



**ALUN ALUN
KOTA MADIUN**



**PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 4 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2019-2024**

DAFTAR ISI

PERDA.....	1
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR SINGKATAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	9
1.3 Hubungan Antar Dokumen	14
1. P-RPJMD Kota Madiun 2019-2024 dengan RPJMN Tahun 2020-2024	15
2. P-RPJMD Kota Madiun 2019-2024 dengan RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031	17
3. P- RPJMD Kota Madiun 2019-2024 dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024.....	18
4. P-RPJMD Kota Madiun dengan RPJMD Daerah lain (Kabupaten Madiun)	20
I. P-RPJMD dengan RPJPD Kota Madiun 2005-2025.....	21
II. P-RPJMD dengan RTRW Kota Madiun 2010-2030	22
III. P-RPJMD dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	24
IV. P-RPJMD dengan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah	25
V. P-RPJMD dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).....	27
1.4 Maksud dan Tujuan	28
1.5 Sistematika Penulisan	28
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	31
2.1 Aspek Geografi dan Demografi.....	31
2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah.....	31
2.1.1.1 Letak Geografis, Luas dan Batas Wilayah Administrasi	31
2.1.1.2 Kondisi Topografi	33
2.1.1.3 Kondisi Geologi	34
2.1.1.4 Kondisi Hidrologi	34
2.1.1.5 Kondisi Klimatologi	35
2.1.1.6 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup.....	36
2.1.1.7 Penggunaan Lahan	54
2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah	56
2.1.3 Kawasan Rawan Bencana	59
2.1.4 Kondisi Demografi.....	61
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	67
2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi.....	67
2.2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi.....	67
2.2.1.2 Struktur Ekonomi.....	74
2.2.1.3 Laju Inflasi	77
2.2.1.4 PDRB per Kapita.....	79
2.2.1.5 Indeks Gini	80
2.2.1.6 Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia	81
2.2.1.7 Persentase Penduduk Miskin	81
2.2.1.8 Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif.....	87
2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial	87
2.2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia	87
2.2.2.2 Angka Melek Huruf.....	89
2.2.2.3 Angka Rata-rata Lama Sekolah	90
2.2.2.4 Angka Harapan Lama Sekolah	91
2.2.2.5 Usia Harapan Hidup	92
2.2.2.6 Persentase Balita Gizi Buruk dan Prevalensi Balita Gizi Kurang.....	92
2.2.2.7 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	94
2.2.2.8 Tingkat Pengangguran Terbuka	96
2.2.2.9 Rasio Penduduk yang Bekerja.....	97
2.2.2.10 Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas.....	98
2.2.2.11 Indeks Kepuasan Masyarakat dan Opini BPK.....	99
2.2.2.12 Persentase PAD terhadap Pendapatan	100
2.2.2.13 Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	101
2.2.2.14 Penanganan Daerah Rawan Pangan	101

2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga	102
2.3 Aspek Pelayanan Umum	104
2.3.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib	104
2.3.1.1 Pendidikan	104
2.3.1.2 Kesehatan	112
2.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	119
2.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	125
2.3.1.5 Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	127
2.3.1.6 Sosial	130
2.3.1.7 Tenaga Kerja	133
2.3.1.8 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	135
2.3.1.9 Pangan	140
2.3.1.10 Pertanahan	141
2.3.1.11 Lingkungan Hidup	142
2.3.1.12 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	146
2.3.1.13 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	149
2.3.1.14 Perhubungan	151
2.3.1.15 Komunikasi dan Informatika	154
2.3.1.16 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	156
2.3.1.17 Penanaman Modal	157
2.3.1.18 Kepemudaan dan Olah Raga	160
2.3.1.19 Statistik	161
2.3.1.20 Persandian	162
2.3.1.21 Kebudayaan	162
2.3.1.22 Perpustakaan	164
2.3.1.23 Kearsipan	165
2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan	166
2.3.2.1 Kelautan dan Perikanan	166
2.3.2.2 Pariwisata	167
2.3.2.3 Pertanian	169
2.3.2.4 Energi dan Sumber Daya Mineral	177
2.3.2.5 Perdagangan	178
2.3.2.6 Perindustrian	181
2.3.2.7 Transmigrasi	183
2.3.3 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	184
2.3.3.1 Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	184
2.3.3.2 Fungsi Penunjang Pengawasan	187
2.3.3.3 Fungsi Penunjang Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan	187
2.3.3.4 Fungsi Penunjang Keuangan	189
2.3.3.5 Fungsi Penunjang Perencanaan Pembangunan	191
2.3.3.6 Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan	192
2.3.3.7 Fungsi Penunjang Kecamatan	193
2.4 Aspek Daya Saing Daerah	195
2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	195
2.4.1.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita	195
2.4.1.2 Persentase Pengeluaran Konsumsi per Kapita Makanan dan Non Makanan	196
2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	197
2.4.2.1 Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan	197
2.4.2.2 Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara/Terminal Per Tahun	198
2.4.2.3 Ketaatan terhadap RTRW	199
2.4.2.4 Luas Wilayah Produktif (Ha)	199
2.4.2.5 Luas Wilayah Industri (Ha)	200
2.4.2.6 Luas Wilayah Perkotaan (Ha)	200
2.4.2.7 Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang	200
2.4.2.8 Perusahaan Asuransi	202
2.4.2.9 Jenis, Kelas, dan Jumlah Penginapan/Hotel	202
2.4.2.10 Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Bersih	203
2.4.2.11 Ketersediaan Daya Listrik	204
2.4.2.12 Pelanggan Listrik	205
2.4.2.13 Kenyamanan Kota	206
2.4.2.14 Infrastruktur	206
2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi	207
2.4.3.1 Angka Kriminalitas Tertangani	207
2.4.3.2 Jumlah Demonstrasi	207

2.4.3.3	Indeks Kerukunan	208
2.4.3.4	Indeks Rasa Aman	209
2.4.3.5	Lama Proses Perizinan	209
2.4.3.6	Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah.....	212
2.4.3.7	Persentase Perda yang mendukung Dunia Usaha.....	212
2.4.4	Fokus Sumber Daya Manusia	213
2.4.4.1	Kualitas Tenaga Kerja	213
2.4.4.2	Rasio Ketergantungan	214
BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH.....		242
3.1	Kinerja Keuangan Masa Lalu	243
3.1.1	Kinerja Pelaksanaan APBD	243
3.1.1.1	Realisasi Pendapatan Daerah	244
3.1.1.2	Realisasi Belanja Daerah.....	253
3.1.1.3	Realisasi Pembiayaan Daerah.....	262
3.1.2	Neraca Daerah.....	265
3.2	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	275
3.2.1	Proporsi Penggunaan Anggaran	278
3.2.1.1	Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja.....	278
3.2.1.2	Proporsi Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur	278
3.2.2	Analisis Pembiayaan	282
3.3	Kerangka Pendanaan.....	286
3.3.1	Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah	286
3.3.2	Perhitungan Kerangka Pendanaan	293
3.3.3	Arah Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah	296
BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH		302
4.1	Permasalahan Pembangunan	302
4.2	Isu Strategis	314
4.2.1	Identifikasi isu-isu strategis.....	314
4.2.2	Penetapan Isu Strategis Pembangunan Daerah	322
BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN.....		333
5.1	Visi.....	333
5.2	Misi.....	334
5.3	Tujuan dan Sasaran.....	336
5.3.1	Tujuan dan Sasaran dari Misi Pertama	336
5.3.2	Tujuan dan Sasaran dari Misi Kedua	337
5.3.3	Tujuan dan Sasaran dari Misi Ketiga	338
5.3.4	Tujuan dan Sasaran dari Misi Keempat	338
BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		346
6.1	Strategi Pembangunan	346
6.2	Arah Kebijakan Pembangunan	354
6.3	Program Pembangunan Kota Madiun	367
BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH.....		413
BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.....		492
8.1	Indikator Kinerja Utama	492
8.2	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.....	493
BAB IX PENUTUP.....		590
9.1	Pedoman Transisi.....	590
9.2	Kaidah Pelaksanaan	591

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Keselarasan Dokumen P-RPJMD Kota Madiun dengan RPJMN	16
Tabel 1.2 Keselarasan Dokumen P-RPJMD Kota Madiun dengan RTRW Provinsi Jawa Timur	18
Tabel 1.3 Keselarasan Dokumen P-RPJMD Kota Madiun dengan RPJMD Provinsi	19
Tabel 1.4 Identifikasi RPJMD Daerah Lain	20
Tabel 1.5 Keselarasan Dokumen P-RPJMD dengan RPJPD Kota Madiun	21
Tabel 1.6 Keselarasan Dokumen P-RPJMD dengan RTRW	24
Tabel 1.7 Keselarasan Dokumen P-RPJMD dengan KLHS P-RPJMD	25
Tabel 2.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Madiun	32
Tabel 2.2 Nama Kecamatan dan Kelurahan di Kota MadiunMadiun.....	32
Tabel 2.3 Kondisi Iklim di Kota Madiun Tahun 2020	35
Tabel 2.4 Perhitungan kebutuhan Air Kota Madiun Tahun 2020	36
Tabel 2.5 Perhitungan Daya Dukung Air Permukaan Kota Madiun Tahun 2020	36
Tabel 2.6 Perhitungan Daya Dukung Pangan (Beras) Kota Madiun	38
Tabel 2.7 Perhitungan Daya Dukung Fungsi Lindung Kota Madiun.....	39
Tabel 2.8 Daya Dukung Lahan Bangun (DDLb) Kota Madiun Tahun 2020	40
Tabel 2.9 Distribusi Luas Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem Penyedia Bahan Pangan (Ha) Tahun 2020.....	41
Tabel 2.10 Distribusi Luas Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem Penyedia Air Bersih (Ha) Tahun 2020.....	42
Tabel 2.11 Distribusi Luas Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim (Ha) Tahun 2020.....	43
Tabel 2.12 Distribusi Luas Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Air dan Banjir (Ha) Tahun 2020	44
Tabel 2.13 Distribusi Luas Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana (Ha) Tahun 2020	46
Tabel 2.14 Distribusi Luas Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup (Ha) Tahun 2020.....	47
Tabel 2.15 Distribusi Luas Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem Pendukung Biodiversitas (Ha) Tahun 2020	48
Tabel 2.16 Analisis Pencemaran Air Sungai di Kota Madiun	51
Tabel 2.17 Penggunaan Lahan di Kota Madiun, Tahun 2016-2020	54
Tabel 2.18 Luas Lahan Sawah Menurut Kecamatan dan Jenis Pengairan di Kota Madiun (Ha), Tahun 2020	56
Tabel 2.19 Rencana Sub Pusat Pelayanan Kota Madiun, 2020.....	57
Tabel 2.20 Luas Lahan Sawah Menurut Kecamatan dan Jenis Pengairan di Kota Madiun (Ha), Tahun 2020	58
Tabel 2.21 Intensitas Bencana di Kota Madiun, 2016-2020	60
Tabel 2.22 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan, 2020.....	62
Tabel 2.23 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kota Madiun, 2020	62
Tabel 2.24 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Usia, 2016-2020	64
Tabel 2.25 Jenis Pekerjaan Penduduk Kota Madiun (orang), 2016-2020	65
Tabel 2.26 Jumlah Penduduk Menurut Agama (orang), 2016-2020	65
Tabel 2.27 Pertumbuhan ekonomi regional dan nasional Tahun 2016-2020.....	68
Tabel 2.28 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Madiun Tahun 2016-2020.....	69
Tabel 2.29 Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun Menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2016 – 2020	70
Tabel 2.30 Tipologi Klasen Kota Madiun (%)	71
Tabel 2.31 Kontribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha di Kota Madiun (%) Tahun 2016-2020.....	74
Tabel 2.32 Struktur Perekonomian Kota Madiun Menurut Lapangan Usaha Primer, Sekunder, dan Tersier (%) Tahun 2016-2020	77
Tabel 2.33 Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kota Madiun Tahun 2016-2020	82
Tabel 2.34 Indeks Kedalaman (P1) dan Indeks Keparahan (P2) Kemiskinan di Kota Madiun Tahun 2016-2020	86
Tabel 2.35 Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif di Kota Madiun Tahun 2016-2020.....	87
Tabel 2.36 Komponen IPM Kota Madiun dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2020.....	88
Tabel 2.37 Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kota Madiun Tahun 2016-2020.....	91

Tabel 2.38 Angka Harapan Lama Sekolah di Kota Madiun Tahun 2016-2020	91
Tabel 2.39 Usia Harapan Hidup di Kota Madiun Tahun 2016-2020	92
Tabel 2.40 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Madiun Tahun 2016-2020	95
Tabel 2.41 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020.....	96
Tabel 2.42 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Madiun Tahun 2016-2020	96
Tabel 2.43 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020.....	97
Tabel 2.44 Rasio Penduduk Bekerja di Kota Madiun Tahun 2016-2020	97
Tabel 2.45 Rasio Penduduk Bekerja Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020	98
Tabel 2.46 Jumlah Klub Olah Raga, Sarpras, serta Peserta Olah Raga Tahun 2016-2020.....	103
Tabel 2.47 Jumlah Bangunan, Peserta, dan Tenaga Pendidik PAUD Menurut Kecamatan Tahun 2020.....	104
Tabel 2.48 Angka Partisipasi Kasar Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Madiun Tahun 2016-2020.....	105
Tabel 2.49 Angka Partisipasi Murni Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Madiun Tahun 2016-2020.....	106
Tabel 2.50 Angka Partisipasi Sekolah di Kota Madiun Tahun 2016-2020.....	107
Tabel 2.51 Angka Kelulusan di Kota Madiun Tahun 2016-2020	108
Tabel 2.52 Jumlah Sekolah Menurut Kecamatan di Kota Madiun Tahun 2020	110
Tabel 2.53 Rasio Ketersediaan Sekolah-Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar di Kota Madiun Tahun 2016-2020	110
Tabel 2.54 Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D4 di Kota Madiun Tahun 2016-2020	112
Tabel 2.55 Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup dan Angka Keberlangsungan Hidup Bayi di Kota Madiun, 2016-2020	113
Tabel 2.56 Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup di Kota Madiun, 2016-2020	113
Tabel 2.57 Rasio Posyandu per Satuan Balita di Kota Madiun, 2016-2020	114
Tabel 2.58 Data Stunting, 2016-2020	115
Tabel 2.59 Rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu per 1.000 Penduduk di Kota Madiun, 2016-2020	115
Tabel 2.60 Rasio Dokter dan Tenaga Kesehatan Lainnya per 100.000 Penduduk di Kota Madiun, Tahun 2016-2020	116
Tabel 2.61 Rasio Rumah Sakit per 1.000 Penduduk di Kota Madiun, 2016-2020.....	117
Tabel 2.62 Cakupan Imunisasi di Kota Madiun, 2016-2020	118
Tabel 2.63 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit DBD di Kota Madiun, 2020	118
Tabel 2.64 Perkembangan Panjang Jalan dalam Km Berdasarkan Kondisi di Kota Madiun, Tahun 2016-2020.....	120
Tabel 2.65 Perkembangan Panjang Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase di Kota Madiun, Tahun 2016-2020	120
Tabel 2.66 Persentase Drainase dalam Kondisi Baik/Pembuangan Air Tidak Tersumbat di Kota Madiun, Tahun 2016-2020	121
Tabel 2.67 Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum di Kota Madiun, Tahun 2020.....	121
Tabel 2.68 Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk di Kota Madiun, Tahun 2016-2020	121
Tabel 2.69 Rasio Tempat Pemakaman Umum per Satuan Penduduk di Kota Madiun, 2016-2020.....	122
Tabel 2.70 Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah di Kota Madiun Tahun 2016-2020	122
Tabel 2.71 Rasio Bangunan ber IMB per Satuan Bangunan di Kota Madiun, 2016-2020 ...	123
Tabel 2.72 Persentase Penduduk Berakses Air Minum di Kota Madiun, Tahun 2016-2020	123
Tabel 2.73 Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kota Madiun, Tahun 2020.....	126
Tabel 2.74 Data Kejadian Kebakaran di Kota Madiun, 2016-2020	130
Tabel 2.75 Capaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kota Madiun, Tahun 2020.....	130
Tabel 2.76 Jumlah Panti Asuhan, Panti Jompo, dan Panti Rehabilitasi di Kota Madiun Tahun 2016-2020	131
Tabel 2.77 Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Madiun Tahun 2016-2020.....	131
Tabel 2.78 Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Mendapatkan Bantuan Sosial di Kota Madiun Tahun 2016-2020	132
Tabel 2.79 Data Jumlah Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani di Kota Madiun Tahun 2016-2020.....	132
Tabel 2.80 Capaian Kinerja Penyelesaian Sengketa Pengusaha Pekerja per Tahun di Kota Madiun, Tahun 2016-2020.....	134

Tabel 2.81 Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja (kasus hubungan industrial) Kota Madiun, Tahun 2016-2020.....	134
Tabel 2.82 Pencari Kerja yang Ditempatkan di Kota Madiun, Tahun 2016-2020	134
Tabel 2.83 Keselamatan dan Perlindungan Kerja di Kota Madiun, Tahun 2016-2020	135
Tabel 2.84 Persentase Partisipasi Perempuan yang Bekerja di Lembaga Pemerintah Kota Madiun, Tahun 2013-2020.....	135
Tabel 2.85 Partisipasi Perempuan Bekerja di Lembaga Non Pemerintahan di Kota Madiun, Tahun 2016-2020	136
Tabel 2.86 Data Laporan Kasus Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kota Madiun, Tahun 2016-2020.....	138
Tabel 2.87 Regulasi Ketahanan Pangan dan Ketersediaan Pangan Utama di Kota Madiun, Tahun 2016-2020	141
Tabel 2.88 Persentase Luas Tanah Bersertifikat Aset Pemerintah Kota Madiun, Tahun 2016-2020	141
Tabel 2.89 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Madiun Tahun 2016-2020.....	142
Tabel 2.90 Indeks Kualitas Air Kota Madiun tahun 2016-2020.....	144
Tabel 2.91 Indeks Kualitas Udara Kota Madiun tahun 2016-2020.....	144
Tabel 2.92 Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kota Madiun tahun 2015-2020	145
Tabel 2.93 Rasio Tempat Penampungan Sampah Sementara per Satuan Penduduk dan Persentase Penanganan Sampah di Kota Madiun, 2016-2020.....	145
Tabel 2.94 Jumlah Tempat Penampungan Sampah Sementara di Kota Madiun, 2016-2020	146
Tabel 2.95 Penegakan Hukum Lingkungan di Kota Madiun, 2016-2020	146
Tabel 2.96 Cakupan Penduduk berKTP per Satuan Penduduk di Kota Madiun, Tahun 2013-2020	147
Tabel 2.97 Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran di Kota Madiun, 2016-2020.....	147
Tabel 2.98 Rasio Pasangan Berakta Nikah di Kota Madiun, Tahun 2016-2020	148
Tabel 2.99 Persentase Kepemilikan NIK di Kota Madiun, Tahun 2016-2020	148
Tabel 2.100 Jumlah Kepemilikan Kartu Keluarga (KK), Tahun 2016-2020.....	149
Tabel 2.101 Rata-rata Jumlah Anak per Keluarga di Kota Madiun, Tahun 2016-2020.....	149
Tabel 2.102 Cakupan Peserta KB Aktif di Kota Madiun, Tahun 2016-2020.....	150
Tabel 2.103 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I di Kota Madiun, Tahun 2016-2020	151
Tabel 2.104 Rasio Izin Trayek di Kota Madiun, 2016-2020	152
Tabel 2.105 Jumlah Uji KIR Angkutan Umum di Kota Madiun, 2016-2020	152
Tabel 2.106 Jumlah Angkutan Darat di Kota Madiun, 2016-2020	153
Tabel 2.107 Daya Tampung Sub Terminal, 2019-2020	153
Tabel 2.108 Persentase Jumlah Pemasangan Rambu Lalu Lintas, 2016-2020	153
Tabel 2.109 Korban Kecelakaan dan Kerugian, 2016-2020.....	153
Tabel 2.110 Jumlah Surat Kabar di Kota Madiun, Tahun 2016-2020	155
Tabel 2.111 Persentase Koperasi Aktif di Kota Madiun, 2016-2020.....	156
Tabel 2.112 Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN di Kota Madiun, Tahun 2016-2020	159
Tabel 2.113 Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga di Kota Madiun, Tahun 2016-2020	160
Tabel 2.114 Hasil Kinerja Urusan Statistik Pemerintah Kota Madiun, Tahun 2016-2020	161
Tabel 2.115 Seni dan Budaya, Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya, dan Benda Situs, Kawasan Cagar Budaya di Kota Madiun, 2016-2020.....	163
Tabel 2.116 Daftar Kebudayaan di Kota Madiun, 2020.....	164
Tabel 2.117 Data Urusan Perpustakaan di Kota Madiun Tahun 2016-2020.....	164
Tabel 2.118 Data Urusan Kearsipan di Kota Madiun Tahun 2016-2020	165
Tabel 2.119 Data Perkembangan Perikanan di Kota Madiun, Tahun 2016-2020.....	166
Tabel 2.120 Jumlah Produksi Perikanan Budidaya dan Tangkap Kota Madiun Tahun 2016-2020	167
Tabel 2.121 Data dan Informasi Urusan Pariwisata di Kota Madiun, Tahun 2016-2020.....	168
Tabel 2.122 Luas Lahan Sawah Menurut Kecamatan dan Jenis Pengairan di Kota Madiun (Ha), 2020.....	170
Tabel 2.123 Luas Lahan Tegal/Kebun dan Pemanfaatan Lahannya di Kota Madiun (Ha), 2020.....	170
Tabel 2.124 Perkembangan Produksi dan Produktivitas Kedelai, Tahun 2016-2020	172
Tabel 2.125 Perkembangan Produksi dan Produktivitas Kacang Hijau, 2016-2020	173
Tabel 2.126 Perkembangan Produksi Buah di Kota Madiun, Tahun 2016-2020.....	173
Tabel 2.127 Perkembangan Produksi Tebu di Kota Madiun, Tahun 2016-2020	174
Tabel 2.128 Perkembangan Populasi Ternak di Kota Madiun, Tahun 2016-2020.....	174

Tabel 2.129 Perkembangan Populasi Ternak Unggas di Kota Madiun, Tahun 2016-2020	175
Tabel 2.130 Perkembangan Jumlah Hewan Ternak Dipotong di Kota Madiun, 2016-2020	176
Tabel 2.131 Data Kelompok Tani di Kota Madiun Tahun 2020	176
Tabel 2.132 Perkembangan Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Pertanian di Kota Madiun, Tahun 2016-2020	177
Tabel 2.133 Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral di Kota Madiun, Tahun 2016-2020	178
Tabel 2.134 Sarana Perdagangan dan Jumlah Pedagang di Kota Madiun, 2016-2020.....	179
Tabel 2.135 Jumlah Perusahaan Menurut Badan Hukum di Kota Madiun, Tahun 2016-2020	180
Tabel 2.136 Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Perdagangan di Kota Madiun, Tahun 2016-2020	180
Tabel 2.137 Jumlah Industri yang Tercatat dan Tenaga Kerjanya Menurut Kecamatan di Kota Madiun, Tahun 2018 – 2020.....	182
Tabel 2.138 Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Perindustrian di Kota Madiun, Tahun 2016-2020.....	12
Tabel 2.139 Data Perkembangan Fasilitas Ketransmigrasian di Kota Madiun, Tahun 2016-2020	183
Tabel 2.140 Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan di Kota Madiun, Tahun 2016-2020	185
Tabel 2.141 Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan di Kota Madiun Tahun 2020	187
Tabel 2.142 Jumlah Pelanggaran Pegawai dan Hukuman yang Dikenakan, Tahun 2016-2020	188
Tabel 2.143 Jumlah Pejabat Eselon IV, III, dan II yang Sudah dan Belum Mengikuti Diklatpim, Tahun 2016-2020	188
Tabel 2.144 Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan di Kota Madiun Tahun 2016-2020	189
Tabel 2.145 Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan di Kota Madiun Tahun 2016-2020.....	190
Tabel 2.146 Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan Pembangunan di Kota Madiun Tahun 2016-2020	191
Tabel 2.147 Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan di Kota Madiun Tahun 2020.....	192
Tabel 2.148 Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kecamatan di Kota Madiun, Tahun 2015-2020	193
Tabel 2.149 Perkembangan Rata-rata Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita di Kota Madiun, Tahun 2016-2020	195
Tabel 2.150 Persentase Pengeluaran Konsumsi per Kapita Makanan dan Non Makanan di Kota Madiun Tahun 2016-2020.....	196
Tabel 2.151 Jumlah Kendaraan Menurut Jenis dan Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan di Kota Madiun Tahun 2020	198
Tabel 2.152 Jumlah Orang/Barang melalui Terminal di Kota Madiun Tahun 2016-2020	199
Tabel 2.153 Ketaatan Terhadap RTRW, 2016-2020	199
Tabel 2.154 Luas Wilayah Produktif (Ha) di Kota Madiun, 2016-2020	200
Tabel 2.155 Luas Wilayah Industri (Ha) di Kota Madiun Tahun 2016-2020	200
Tabel 2.156 Luas Wilayah Perkotaan (Ha) di Kota Madiun Tahun 2016-2020	200
Tabel 2.157 Jumlah Bank dan Cabang Bank di Kota Madiun Tahun 2016-2020	201
Tabel 2.158 Jenis Bank dan Cabang Bank di Kota Madiun	201
Tabel 2.159 Jumlah Perusahaan Asuransi Kota Madiun Tahun 2016-2020.....	202
Tabel 2.160 Kelas dan Jumlah Penginapan/Hotel di Kota Madiun, 2016-2020.....	203
Tabel 2.161 Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Kota Madiun Tahun 2016-2020.....	204
Tabel 2.162 Persentase Penduduk Berakses Air Bersih Perpipaan di Kota Madiun Tahun 2016-2020	204
Tabel 2.163 Ketersediaan Daya Listrik di Kota Madiun, 2016-2020	205
Tabel 2.164 Pertumbuhan Kapasitas Daya Listrik dan Pertumbuhan Listrik Terjual di Kota Madiun Tahun 2016-2020.....	205

Tabel 2.165 Jumlah dan Pertumbuhan Pelanggan Listrik Terjual di Kota Madiun Tahun 2016-2020	206
Tabel 2.166 Angka Kriminalitas di Kota Madiun Tahun 2016-2020	207
Tabel 2.167 Jumlah Demonstrasi di Kota Madiun, 2016-2020	208
Tabel 2.168 Lama Proses Perizinan di Kota Madiun Tahun 2020	210
Tabel 2.169 Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah di Kota Madiun Tahun 2016-2020	212
Tabel 2.170 Persentase Perda yang Mendukung Dunia Usaha di Kota Madiun, 2016-2020	213
Tabel 2.171 Persentase Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Jenjang Pendidikan Tertinggi di Kota Madiun, 2020	213
Tabel 2.172 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia di Kota Madiun, 2016-2020	214
Tabel 2.173 Usia Produktif, Usia Tidak Produktif di Kota Madiun, 2016-2020	215
Tabel 2.174 Evaluasi Pelaksanaan RPJMD sampai tahun 2020 pada aspek capaian indikator tujuan dan sasaran	217
Tabel 2.175 Evaluasi Pelaksanaan RPJMD sampai tahun 2020 pada Tiga Aspek Pembangunan Daerah	222
Tabel 2.176 Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun	240
Tabel 3.1 Capaian Realisasi Pendapatan Daerah terhadap Target RPJMD Pada Tahun 2019 dan 2020	245
Tabel 3.2 Realisasi dan Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kota Madiun 2016 – 2020	251
Tabel 3.3 Capaian Realisasi Belanja Daerah terhadap Target RPJMD pada Tahun 2019 dan 2020	255
Tabel 3.4 Realisasi dan Rata-Rata Pertumbuhan Belanja Daerah Kota Madiun Tahun Anggaran 2016-2020	261
Tabel 3.5 Perkembangan Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Madiun Tahun Anggaran 2016–2020	264
Tabel 3.6 Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah, Kota Madiun Tahun 2016-2020	267
Tabel 3.7 Analisis Rasio Neraca Daerah Kota Madiun, 2016-2020 (Rp juta)	272
Tabel 3.8 Proporsi Realisasi Belanja Daerah Kota Madiun, 2016-2020	278
Tabel 3.9 Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama, Tahun 2016 – 2020 (Rp juta)	279
Tabel 3.10 Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur, Tahun 2016 – 2020 (Rp juta)	280
Tabel 3.11 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Madiun, Tahun 2016-2020 (Rp juta)	282
Tabel 3.12 Realisasi Pembiayaan Kota Madiun Tahun 2016-2020	283
Tabel 3.13 Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Kota Madiun Tahun 2016-2020	284
Tabel 3.14 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Madiun Tahun 2018-2020	285
Tabel 3.15 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kota Madiun Tahun 2018-2020 (Rp juta)	285
Tabel 3.16 Kerangka Makro Ekonomi Indonesia Tahun 2020-2024	286
Tabel 3.17 Kerangka Makro Kota Madiun 2020-2024	287
Tabel 3.18 Proyeksi Balanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kota Madiun Tahun 2019-2024	288
Tabel 3.19 Realisasi dan Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024	289
Tabel 3.20 Proyeksi Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Kota Madiun Tahun 2019-2024	294
Tabel 3.21 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024	295
Tabel 3.22 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024	295
Tabel 3.23 Perbandingan Arah Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah	296
Tabel 4.1 Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas Kota Madiun	303
Tabel 4.2 Hasil Pemetaan Masalah Pokok berdasarkan Identifikasi Permasalahan Pembangunan	313
Tabel 4.3 Identifikasi Isu-isu Strategis Daerah Kota Madiun	316
Tabel 4.4 Kriteria Pembobotan Isu-isu Strategis Daerah Kota Madiun	322

Tabel 4.5 Hasil Perankingan Isu-isu Strategis Daerah Kota Madiun	322
Tabel 4.6 Perbandingan Isu Strategis RPJMD 2019-2024 dengan Ranwal RPJMD Perubahan 2019-2024	331
Tabel 5.1 Keterkaitan Visi dengan RPJMD dan RPJP Provinsi	334
Tabel 5.2 Keterkaitan Pokok-Pokok Visi, Panca Karya, dan Rumusan Misi	334
Tabel 5.3 Perumusan dan Penjelasan Misi	335
Tabel 5.4 Tujuan Sasaran Sebelum dan Sesudah	340
Tabel 5.5 Keterkaitan Misi, Tujuan, dan Sasaran Jangka Menengah Kota Madiun Tahun 2019-2024	342
Tabel 6.1 Strategi dan Arah kebijakan P-RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024	346
Tabel 6.2 Arah Kebijakan Pembangunan Kota Madiun	355
Tabel 6.3 Penjelasan Operasional Arah kebijakan Pembangunan Kota Madiun	355
Tabel 6.4 Persandingan Strategi, Sasaran dan Arah Kebijakan Antara RPJMD 2019-2024 Dengan Perubahan RPJMD 2019-2024	360
Tabel 6.5 Keterkaitan Strategi dan Arah Kebijakan serta program prioritas/aksi (janji politis)	368
Tabel 6.5 Program Prioritas Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif	381
Tabel 7.1 Prioritas Alokasi Program Prioritas Kota Madiun Tahun 2019-2024	415
Tabel 7.2 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kota Madiun 2019 -2024	417
Tabel 7.3 Rincian Alokasi Program Prioritas Kota Madiun Tahun 2020-2024	418
Tabel 8.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Madiun	493
Tabel 8.2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Madiun Tahun 2019-2024	495

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Prinsip, Pendekatan dan Landasan Perumusan P-RPJMD Kota Madiun 2019-2024	2
Gambar 1.2 Tahapan Penyusunan Perubahan RPJMD Kota Madiun 2019-2024	4
Gambar 1.3 Dasar Perubahan RPJMD Kota Madiun 2019-2024	6
Gambar 1.4 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan	15
Gambar 1.5 Alur Keterhubungan Dokumen RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024 dan RTRW Kota Madiun Tahun 2010-2030	23
Gambar 1.6 Alur Keterhubungan Dokumen RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024	26
Gambar 1.7 Alur Keterhubungan Dokumen RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	27
Gambar 2.1 Wilayah Administrasi Kota Madiun	31
Gambar 2.2 Peta Jasa Ekosistem Penyedia Bahan Pangan di Kota Madiun	41
Gambar 2.3 Peta Jasa Ekosistem Penyedia Air Bersih di Kota Madiun	42
Gambar 2.4 Peta Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim di Kota Madiun	44
Gambar 2.5 Peta Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir di Kota Madiun.....	45
Gambar 2.6 Peta Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana di Kota Madiun.....	46
Gambar 2.7 Peta Jasa Ekosistem Budaya Fungsi Tempat Tinggal dan Ruang Hidup di Kota Madiun.....	47
Gambar 2.8 Peta Jasa Ekosistem Pendukung Biodiversitas di Kota Madiun	48
Gambar 2.9 pH rata-rata Air Sungai di Kota Madiun	49
Gambar 2.10 Kandungan Oksigen Terlarut Air Sungai di Kota Madiun	50
Gambar 2.11 Total Dissolved Solid (TDS) Air Sungai di Kota Madiun.....	50
Gambar 2.12 Total Coliform Air Sungai di Kota Madiun	51
Gambar 2.13 Perkiraan jumlah timbulan sampah per hari di Kota Madiun Tahun 2018-2019	52
Gambar 2.14 Kapasitas Tampung Sampah di Kota Madiun	53
Gambar 2.15 Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Kota Madiun, 2016-2020.....	61
Gambar 2.16 Perkembangan Nilai PDRB ADHB, PDRB ADHK, dan Laju Pertumbuhan Kota Madiun,2016-2020	67
Gambar 2.17 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2020.....	69
Gambar 2.18 Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, dan Tingkat Pengangguran Terbuka, Tahun 2016-2020	72
Gambar 2.19 Laju Inflasi Kota Madiun Tahun 2016-2020	78
Gambar 2.20 PDRB Per Kapita ADHK di Kota Madiun (Rp juta) Tahun 2016-2020	79
Gambar 2.21 Indeks Gini Kota Madiun Tahun 2016-2020.....	80
Gambar 2.22 Perbandingan Indeks Gini Kota Madiun dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2020.....	81
Gambar 2.23 Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kota Madiun dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2020	86
Gambar 2.24 Perkembangan IPM Kota Madiun Tahun 2016-2020.....	88
Gambar 2.25 Peringkat IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2020.....	89
Gambar 2.26 Angka Melek Huruf Kota Madiun Tahun 2016-2020	90
Gambar 2.27 Prevalensi Balita Gizi Kurang Kota Madiun Tahun 2016-2020	93
Gambar 2.28 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur dan Nasional, 2016-2020	97
Gambar 2.29 Rasio Kesempatan Kerja Kota Madiun Tahun 2016-2020	99
Gambar 2.30 Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2016-2020.....	99
Gambar 2.31 Persentase PAD terhadap Pendapatan Kota Madiun Tahun 2016-2020	100
Gambar 2.32 Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Kota Madiun Tahun 2016-2020	101
Gambar 2.33 Penanganan Daerah Rawan Pangan Kota Madiun Tahun 2016-2020	102
Gambar 2.34 Angka Melanjutkan Sekolah di Kota Madiun Tahun 2016-2020	109
Gambar 2.35 Rasio Guru-Murid Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah di Kota Madiun Tahun 2015-2020	111
Gambar 2.36 Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Kota Madiun, 2016-2020	124
Gambar 2.37 Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi di Kota Madiun, 2016-2020	124
Gambar 2.38 Rasio Rumah Layak Huni di Kota Madiun, 2016-2020	126

Gambar 2.39 Rasio Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk di Kota Madiun, 2016-2020	127
Gambar 2.40 Rasio Petugas Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk di Kota Madiun, 2016-2020.....	128
Gambar 2.41 Rasio Pos Kamling per Jumlah Kelurahan di Kota Madiun, 2016-2020	128
Gambar 2.42 Persentase Penegakan Perda di Kota Madiun, 2016-2020.....	129
Gambar 2.43 Penyelesaian Pelanggaran K-3 di Kota Madiun,2016-2020	129
Gambar 2.44 Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Madiun, Tahun 2016-2020	136
Gambar 2.45 Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Madiun, Tahun 2016-2020.....	138
Gambar 2.46 Indeks Pemberdayaan Gender di Kota Madiun, 2016-2019	139
Gambar 2.47 Indeks Pembangunan Gender di Kota Madiun, 2016-2020	140
Gambar 2.48 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Madiun Tahun 2016-2020.....	143
Gambar 2.49 Perbandingan IKLH Nasional, Provinsi dan Kota Madiun Tahun 2017-2019 .	143
Gambar 2.50 Rasio Akseptor KB di Kota Madiun, 2013-2020	150
Gambar 2.51 Jumlah Jaringan Komunikasi di Kota Madiun, 2016-2020.....	154
Gambar 2.52 Jumlah Penyiaran Radio dan TV Lokal di Kota Madiun, 2014-2020	155
Gambar 2.53 Jumlah UMKM Non BPR/LKM dan Usaha Kecil Mikro di Kota Madiun, 2016-2020	157
Gambar 2.54 Jumlah Investor PMDN dan PMA di Kota Madiun, 2016-2020.....	158
Gambar 2.55 Jumlah Investasi PMDN dan PMA di Kota Madiun, 2016-2020.....	158
Gambar 2.56 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Perusahaan PMDN/PMA di Kota Madiun, 2015-2019	159
Gambar 2.57 Perkembangan Luas Panen Padi Sawah di Kota Madiun (ha), 2016-2020	170
Gambar 2.58 Perkembangan Produksi dan Produktivitas Padi Sawah di Kota Madiun, 2016-2020	171
Gambar 2.59 Perkembangan Luas Panen Kedelai (Ha) di Kota Madiun, 2016-2020	172
Gambar 2.60 Perkembangan Luas Panen Kacang Hijau di Kota Madiun (ha), 2016-2020.....	172
Gambar 2.61 Jumlah Pelanggan Listrik di Kota Madiun, 2016-2020	178
Gambar 2.62 Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran: Reparasi Mobil dan Sepeda Motor di Kota Madiun, 2016-2020.....	179
Gambar 2.63 Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan di Kota Madiun, 2016-2020	181
Gambar 3.1 Struktur APBD	244
Gambar 3.2 Capaian Realisasi Terhadap Target APBD Kota Madiun Tahun 2016-2020	245
Gambar 3.3 Perkembangan Pendapatan Kota Madiun Tahun 2016-2020	246
Gambar 3.4 Perkembangan PAD Kota Madiun Tahun 2016-2020	247
Gambar 3.5 Perkembangan Pendapatan Transfer Kota Madiun Tahun 2016-2020	248
Gambar 3.6 Perkembangan Pertumbuhan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Madiun Tahun 2016-2020	248
Gambar 3.7 Perkembangan Derajat Desentralisasi Fiskal (dalam %) Kota Madiun Tahun 2016-2020	249
Gambar 3.8 Capaian Realisasi Belanja Daerah Terhadap Target APBD Kota Madiun tahun 2016-2020	254
Gambar 3.9 Perkembangan Pertumbuhan Belanja Daerah Kota Madiun Tahun 2016-2020.....	256
Gambar 3.10 Perkembangan Komposisi Belanja Daerah (dalam %) Kota Madiun Tahun 2016-2020.....	256
Gambar 3.11 Perkembangan Pertumbuhan Belanja Operasi Kota Madiun Tahun 2016-2020.....	257
Gambar 3.12 Perkembangan Komposisi Komponen Belanja Operasi (dalam %) Kota Madiun Tahun 2016-2020	258
Gambar 3.13 Perkembangan Pertumbuhan Belanja Modal Kota Madiun Tahun 2016-2020.....	258
Gambar 3.14 Perkembangan Pertumbuhan Belanja tak Terduga Kota Madiun Tahun 2016-2020	259
Gambar 3.15 Perkembangan Pertumbuhan Belanja Transfer Kota Madiun Tahun 2016-2020	260
Gambar 3.16 Perkembangan Penerimaan Pembiayaan Netto Tahun Berjalan Kota Madiun Tahun 2016-2020 (Milyar Rupiah)	262
Gambar 3.17 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Madiun tahun 2019-2024 (Milyar Rupiah)	292
Gambar 3.18 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Asli Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024 (Milyar Rupiah)	292

Gambar 3.19 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024 (Milyar Rupiah)	393
Gambar 4.1 Lima Masalah Pokok Pembangunan Kota Madiun	312
Gambar 4.2 Isu Strategis Pembangunan Daerah Kota Madiun	325
Gambar 5.1 Visi Pembangunan Kota Madiun Tahun 2019-2024	333
Gambar 5.2 Misi Pembangunan Kota Madiun Tahun 2019-2024	335
Gambar 5.3 Kerangka Logis Pencapaian Misi-1 Tujuan 1	337
Gambar 5.4 Kerangka Logis Pencapaian Misi-2 Tujuan 2	337
Gambar 5.5 Kerangka Logis Pencapaian Misi-3 Tujuan 3	338
Gambar 5.6 Kerangka Logis Pencapaian Misi-4 Tujuan 4	339
Gambar 5.7 Kerangka Logis Pencapaian Misi-4 Tujuan 5	339
Gambar 6.1 Agenda/Tema RPJMD Kota Madiun 2019-2024	354

DAFTAR SINGKATAN

AMH	: Angka Melek Huruf
APK	: Angka Partisipasi Kasar
APM	: Angka Partisipasi Murni
APS	: Angka Partisipasi Sekolah
BKKBN	: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
BPHTB	: Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
CFD	: Case Fatality Rate
CSR	: Corporate Social Responsibility
DAU	: Dana Alokasi Umum
DAK	: Dana Alokasi Khusus
DAS	: Daerah Aliran Sungai
DBH-PAJAK	: Dana Bagi Hasil Pajak
DDL	: Daya Dukung Fungsi Lindung
DDLb	: Daya Dukung Lahan Bangun
DO	: Dissolved Oxygen (Kandungan Oksigen Terlarut)
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
EPPD	: Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
HA	: Hektar
HLS	: Harapan Lama Sekolah
ICOR	: Incremental Capital Output Rasio
IDG	: Indeks Pemberdayaan Gender
IKA	: Indeks Kualitas Air
IKLH	: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
IKM	: Industri Kecil Menengah
IKTL	: Indeks Kualitas Tutupan Lahan
IKU	: Indikator Kinerja Utama
IPG	: Indeks Pembangunan Gender
IPM	: Indeks Pembangunan Manusia
JKI	: Jaminan Keamanan Informasi
KB	: Keluarga Berencana
KDRT	: Kekerasan Dalam Rumah Tangga
KLHS	: Kajian Lingkungan Hidup Strategis
KPBU	: Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha
KPS	: Keluarga Pra Sejahtera
KS I	: Keluarga Sejahtera 1
K-3	: Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan
LKPD	: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
NIK	: Nomor Induk Kependudukan
PAD	: Pendapatan Asli Daerah
PBB	: Pajak Bumi dan Bangunan
PD	: Pemerintah Daerah
PDRB	: Produk Domestik Regional Bruto
PDRB ADHB	: Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
PDRB ADHK	: Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan
PKW	: Pendidikan Kecakapan Wirausaha
PMA	: Penanaman Modal Asing
PMBA	: Pelatihan Pemberian Makan Bayi dan Anak
PMDN	: Penanaman Modal Dalam Negeri
PMKS	: Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
PPH	: Pola Pangan Harapan
P-RPJMD	: Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

RANPERDA	: Rancangan Peraturan Daerah
RAPBD	: Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
RB	: Revormasi Birokrasi
RENJA PD	: Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RENSTRA-PD	: Rencana Strategis Pemerintah Daerah
RKA-PD	: Rencana Kerja Anggaran Pemerintah Daerah
RKPD	: Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RLS	: Rata-rata Lama Sekolah
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJPD	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RT	: Rukun Tetangga
RTRW	: Rencana Tata Ruang Wilayah
SDA	: Sumber Daya Alam
SDM	: Sumber Daya Manusia
SILPA	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
SIUP	: Surat Izin Usaha Perdagangan
SPBE	: Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
SPM	: Standar Pelayanan Minimal
SOTK	: Susunan Organisasi dan Tata Kerja
TDG	: Tanda Daftar Gudang
TDS	: Total Dissolved Solid (Jumlah Padatan Terlarut)
TDP	: Tanda Daftar Perusahaan
TDUP	: Tanda Daftar Usaha Pariwisata
TPA	: Tempat Pembuangan Akhir
TPAK	: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
TPT	: Tingkat Pengangguran Terbuka
TSS	: Total Suspended Solid
UHH	: Usia Harapan Hidup
WS	: Wilayah Sungai
WTP	: Wajar Tanpa Pengecualian



WALIKOTA MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MADIUN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024 dipandang sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat ini sehingga perlu diubah;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024;

- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
17. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6632);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
33. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan;
34. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
44. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031;
45. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Madiun Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2009 Nomor 4/E)
46. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2009 Nomor 4/E);

47. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2010 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 5);
48. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2016 Nomor 1/C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2020 Nomor 3/A, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 97);
49. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 40);
50. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2019 Nomor 13/D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN

dan

WALIKOTA MADIUN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2019-2024.

Pasal I

Ketentuan Lampiran Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2019 Nomor 13/D) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 1 Desember 2021

WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. MAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. **WALIKOTA MADIUN**

Sekretaris Daerah

u.b.

Kepala Bagian Hukum



BUDI WIBOWO, SH

Pembina Tingkat I

NIP. 19750117 199602 1 001

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 1 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

SOEKO DWI HANDIARTO

LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2021
NOMOR 1/D

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR :
247-4/2021

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR : 4 TAHUN 2021
TANGGAL : 1 Desember 2021

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih diwajibkan untuk menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen RPJMD Kota Madiun tahun 2019-2024 merupakan arah kebijakan Walikota dan Wakil Walikota Madiun tahun 2019-2024, Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd dan INDA RAYA AYU MIKO SAPUTRI, SE, MIB yang dilantik pada tanggal 29 April 2019 sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah periode Tahun 2019-2024, setelah terbit Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.35-8262 Tahun 2018 tanggal 12 Oktober 2018 sebagai tindak lanjut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun Nomor: 49/PL.03-Kpt/3577/KPU-Kot/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2018.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu lima tahun yang mutlak harus ada dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dokumen RPJMD juga merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah, serta memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Seiring dengan perkembangan kondisi dan dinamika pembangunan di berbagai level pemerintahan, dokumen RPJMD dapat dilakukan perubahan. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam Pasal 342 dikemukakan bahwa (1) Perubahan RPJPD dan RPJMD dapat dilakukan apabila: a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini; b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan c. terjadi perubahan yang mendasar mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional. (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak dapat dilakukan apabila: a. sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun; dan b. sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.

Disinilah pentingnya untuk melakukan perubahan RPJMD.



Gambar 1.1

Prinsip, Pendekatan dan Landasan Perumusan P-RPJMD Kota Madiun 2019–2024

Sama seperti proses penyusunan RPJMD, proses penyusunan perubahan RPJMD Kota Madiun 2019–2024 mengikuti berbagai kaidah yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 yang berprinsip pada empat hal. Pertama, Integratif, yang menunjukkan bahwa perubahan RPJMD Kota Madiun merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional; Kedua, Partisipatif yang berarti bahwa dalam penyusunan perubahan RPJMD ini dilakukan pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing; Ketiga, komprehensif, yang menunjukkan bahwa dokumen perubahan RPJMD ini harus mengintegrasikan rencana tata ruang, kajian lingkungan hidup strategis, dan dokumen perencanaan lainnya dengan rencana pembangunan Daerah;

dan Terakhir berprinsip pada kemutakhiran yang berarti bahwa perubahan RPJMD ini dirumuskan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki Kota Madiun, sesuai dengan dinamika perkembangan Daerah baik Kota Madiun maupun Provinsi Jawa Timur, dan nasional serta Internasional.

Sesuai dengan empat prinsip diatas, perubahan RPJMD Kota Madiun dirumuskan berdasarkan sepuluh landasan utama :

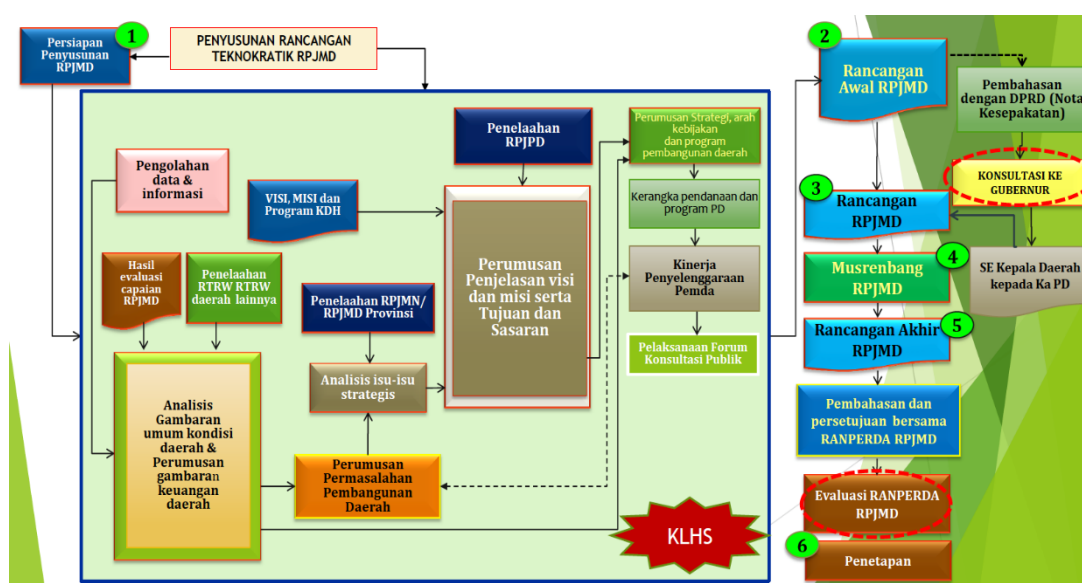
1. Transparan, yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan Daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;
2. Responsif yaitu dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di Daerah;
3. Efisien yaitu pencapaian keluaran (*output*) tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran (*output*) maksimal.
4. Efektif yaitu kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, melalui cara atau proses yang paling optimal;
5. Akuntabel menunjukkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
6. Partisipatif merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan Daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan terpinggirkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan;
7. Terukur, yaitu penetapan target kinerja yang jelas dan dapat diukur serta cara untuk mencapainya;
8. Berkeadilan merupakan prinsip keseimbangan antar wilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia;
9. Berwawasan lingkungan, yaitu untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan dalam mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia; dan
10. Berkelanjutan, yaitu pembangunan yang mewujudkan keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan dalam mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Penyusunan RPJMD Kota Madiun dilakukan melalui dua pendekatan yaitu berorientasi pada proses dan substansi. Pendekatan berorientasi pada proses terdiri dari empat pendekatan:

1. Teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah;
2. Partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan;
3. Politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD; dan
4. Atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah rencana pembangunan yang dilaksanakan mulai dari kelurahan, Kecamatan, dan daerah Kota Madiun.

Sedangkan pendekatan berorientasi substansi meliputi tiga pendekatan:

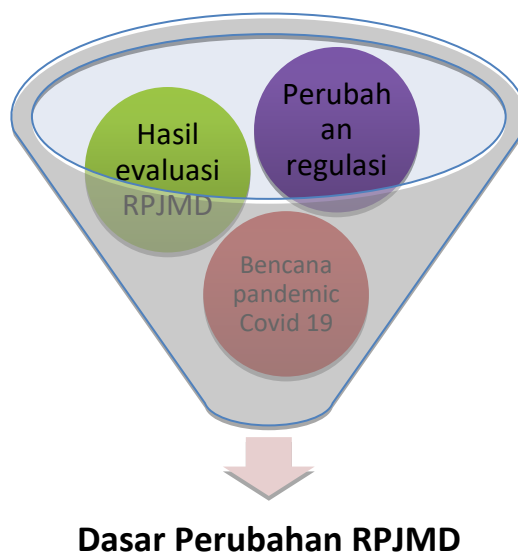
1. Holistik-tematik dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya;
2. Integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah, dan
3. Spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.



Gambar 1.2
Tahapan Penyusunan Perubahan RPJMD Kota Madiun 2019-2024

Terdapat beberapa tahapan yang dilaksanakan dalam penyusunan P-RPJMD Kota Madiun 2019-2024, seperti dalam gambar 1.2. Tahap awal adalah persiapan penyusunan perubahan RPJMD melalui evaluasi pencapaian kinerja pembangunan daerah sebelumnya, penelaahan RPJPD Kota Madiun 2005–2025, RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Timur, sehingga dapat merumuskan visi dan misi serta tujuan dan sasaran. Sesuai dengan sasaran P-RPJMD, selanjutnya dirumuskan strategi, arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan. Dalam upaya memenuhi prinsip transparansi dan partisipatif, maka penyusunan perubahan RPJMD juga melibatkan masyarakat melalui forum konsultasi publik yang selanjutnya dilakukan pembahasan dengan DPRD Kota Madiun. Selanjutnya, berdasarkan proses sebelumnya, disusun rancangan awal perubahan RPJMD. Rancangan awal tersebut selanjutnya dikonsultasikan dengan pemerintah Provinsi Timur untuk mendapatkan hasil evaluasi. Hasil evaluasi dari Gubernur tersebut kemudian dituangkan dalam rancangan perubahan RPJMD yang akan dibahas dalam forum Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) RPJMD. Setelah mendapat berbagai masukan dalam musrenbang tersebut, perubahan RPJMD dibahas bersama DPRD untuk mendapat persetujuan bersama. Setelah mendapat persetujuan bersama dan konsultasi akhir dengan Gubernur, selanjutnya adalah melakukan pembahasan dan evaluasi rancangan peraturan daerah (RANPERDA) perubahan RPJMD untuk kemudian ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Perubahan RPJMD Kota Madiun Periode 2019-2024 merupakan periode terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Madiun Tahun 2005-2025. Kedudukan RPJMD dalam RPJPD sangat penting untuk menjaga kesinambungan dari suatu periode 5 (lima) tahun pemerintahan ke periode 5 (lima) tahun berikutnya. RPJPD tahun 2005-2025 dilaksanakan dalam empat tahapan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), yang masing-masing tahapan telah pula memuat rumusan indikatif arahan prioritas kebijakan. Kedudukan perubahan RPJMD 2019-2024 Kota Madiun juga merupakan pedoman untuk penyusunan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Madiun setiap tahunnya. Perubahan RPJMD juga merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan daerah.



Gambar 1.3

Dasar Perubahan RPJMD Kota Madiun 2019–2024

Berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017, setidaknya terdapat tiga alasan Perubahan RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024 yang meliputi:

1. Penyesuaian regulasi dalam penyusunan RPJMD, yang meliputi :
 - a. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 menjadi Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Berkaitan dengan target dan kebutuhan pendanaan yang terdapat dalam RPJMN bersifat indikatif. Dikarenakan RPJMD Kota Madiun masih mengacu pada RPJMN 2019 – 2020 maka perubahan RPJMD mutlak dilakukan.
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Terdapat perbedaan mendasar dari kedua PP tersebut diantaranya adalah perbedaan dari struktur APBD baik pendapatan, belanja maupun pembiayaan daerah. Secara efektif PP tersebut berlaku untuk APBD 2021.
 - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, berubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berlakunya peraturan tersebut telah dilakukan Perubahan atas peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya sebagai salah satu dasar dalam penyusunan Perubahan RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024 .

2. Hasil evaluasi Dokumen RPJMD menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

a. Substansi Dokumen RPJMD

Substansi Dokumen RPJMD 2019-2024 sebelum perubahan, belum memuat arah kebijakan tahunan dan spesifik, sehingga prioritas tahunan sebagai pedoman penyusunan RKPD belum terfokus dengan jelas. Selain itu, arah kebijakan belum secara spesifik menjelaskan dan mengkaitkan dengan masing-masing strategi pembangunannya. Perumusan isu strategis berubah dari sebelas menjadi lima poin isu strategis. Perubahan tersebut merupakan bagian dari *refocusing* dari berbagai isu strategi yang saat ini sedang berkembang sehingga akan memudahkan untuk merumuskan berbagai strategi dan prioritas pembangunan dalam perubahan RPJMD.

b. Capaian Kinerja Pembangunan

Beberapa target tujuan dan sasaran pembangunan khususnya terkait dengan kondisi sosial ekonomi yang terdampak Covid-19 khususnya target tahun 2020 sampai 2024 perlu disesuaikan. Pelaksanaan evaluasi RPJMD di mulai untuk tahun 2020. Hal ini dikarenakan RPJMD Kota Madiun disahkan melalui Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2019 tertanggal 28 Oktober 2019. Sehingga secara efektif target pembangunan dalam RPJMD dimulai Tahun 2020-2024. Sedangkan tahun 2019, masih menggunakan target pada RPJMD periode sebelumnya.

Secara umum, target indikator tujuan dan sasaran sampai dengan tahun 2020 yang belum memenuhi target masing-masing sebesar 57 persen (4 dari 7 indikator tujuan yang mencapai target) dan 67 persen (16 dari 24 indikator sasaran yang mencapai target kinerja).

Selanjutnya jika dilihat capaian indikator kinerja tujuan dan sasaran per Misi, pada misi I sampai dengan tahun 2020, Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE), Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah, dan Indeks Pemberdayaan Gender masih belum mencapai target yang ditentukan.

Pada misi kedua, kinerja ruas jalan belum memenuhi target. Pada misi ketiga, realisasi kinerja telah mencapai target yang ditetapkan. Sedangkan pada misi keempat, PDRB perkapita, pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, TPT, ICOR, pertumbuhan sektor perdagangan dan pengolahan jauh di bawah target sebagai dampak pandemi Covid-19.

Dari realisasi keuangan daerah baik pendapatan dan belanja daerah selama tahun 2019 dan 2020 menunjukkan bahwa capaian realisasi terhadap target APBD dalam RPJMD 2019-2024 masih belum memenuhi. Dari sisi pendapatan daerah, capaian realisasi terhadap target RPJMD tahun 2019 dan 2020 masing-masing sebesar 97,78% dan 90,43%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa target pendapatan sudah baik meskipun pada tahun 2020 terjadi wabah Covid-19 karena capaiannya diatas 90%. Pada sisi belanja, capaian keuangan RPJMD yang ditetapkan pada tahun 2019 dan 2020 masing-masing sebesar 96,15% dan 75,88%. Masih rendahnya capaian belanja daerah khususnya tahun 2020 disebabkan adanya *refocusing* dan realokasi belanja daerah guna penanganan Covid-19. Sehingga beberapa belanja daerah khususnya pada belanja modal serta barang dan jasa dialihkan untuk belanja lain dalam upaya penanganan Covid-19.

Secara umum untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektifitas perlu dilakukan evaluasi terhadap capaian kinerja melalui perumusan proses bisnis per Misi yang ditetapkan sesuai dengan regulasi dan dinamika yang ada.

3. Perubahan kondisi sosial ekonomi sebagai dampak bencana pandemi Covid-19 yang perlu penyesuaian berbagai kebijakan oleh pemerintah Kota Madiun.

Dampak pandemi Covid-19 telah mengkoreksi realisasi capaian ekonomi makro. Sebagai contoh, pertumbuhan ekonomi Kota Madiun mengalami kontraksi yang dalam sebesar minus 3,39% lebih parah dari rata rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur yang sebesar minus 2,39% dan nasional minus 2,09. Angka kemiskinan meningkat menjadi 4,98% dari 4,35% dari jumlah penduduk ditahun 2019. Tingkat pengangguran Terbuka bertambah menjadi 8,32% dari 5,55% di tahun 2019.

Dengan berbagai perubahan drastis kondisi ekonomi dan sosial sebagai dampak pandemi Covid-19 maka diperlukan berbagai perubahan arah kebijakan yang sesuai.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Perubahan RPJMD Kota Madiun 2019-2024 dilandasi oleh berbagai peraturan sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
17. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2016 Ntentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

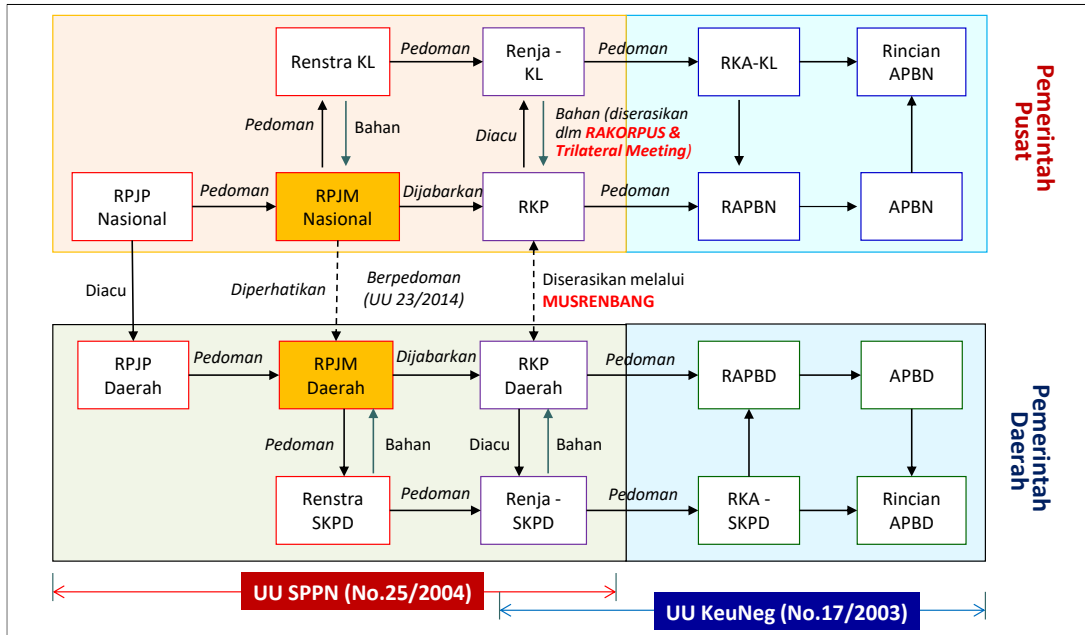
27. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6632);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
33. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan;
34. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknisi Pengelolaan Keuangan Daerah;
45. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031;
46. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
47. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023
48. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Madiun Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2009 Nomor 4/E)

49. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2009 Nomor 4/E);
50. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2010 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 5);
51. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2016 Nomor 1/C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2020 Nomor 3/A, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 97);
52. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 40);
53. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2019 Nomor 13/D);

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Perubahan RPJMD Kota Madiun tahun 2019-2024 merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Timur. Dalam penyusunannya P-RPJMD Kota Madiun 2019-2024 berpedoman pada RPJPD Kota Madiun 2005–2025, dan memperhatikan RPJP Nasional 2005-2025, RPJM Nasional 2020-2024, serta RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024. Selain itu, sebagaimana pasal 12 ayat (2) Permendagri 86 Tahun 2017 menyebutkan bahwa P-RPJMD juga berpedoman pada RTRW Kota Madiun 2010-2030, RTRW Provinsi Jawa Timur 2011-2031, RTRW Nasional 2008-2028. Secara umum, hubungan antar dokumen perencanaan dapat dilihat pada gambar 1.4.



Gambar 1.4
Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

Secara detail, hubungan P-RPJMD Kota Madiun 2019-2024 dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dikategorikan kedalam 2 lingkup yaitu lingkup eksternal dan internal. Lingkup eksternal meliputi RPJMN 2020-2024 dan RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024. Dikarenakan akhir periode RPJMN dan RPJPD Jawa Timur adalah tahun awal RPJMD Kota Madiun, maka penelaahan dokumen perencanaan juga mengacu RPJPN dan RPJPD Jawa Timur. Penelaahan terhadap RPJMN dan RPJPD Provinsi Jawa Timur dijelaskan sebagai berikut.

1. P-RPJMD Kota Madiun 2019-2024 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024

Sinergitas P-RPJMD Kota Madiun 2019-2024 dengan RPJMN menjadi hal penting yang dilakukan dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkualitas. Visi dalam RPJMN 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”.

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 9 Misi Pembangunan yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa

6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Visi dan misi RPJMN selanjutnya dituangkan kedalam 7 (tujuh) agenda prioritas pembangunan nasional:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Tabel 1.1

Keselarasan Dokumen P-RPJMD Kota Madiun dengan RPJMN

NO	RPJMN 2020 – 2024	P-RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024
	VISI	
	Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong	Terwujudnya Pemerintahan Bersih Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera
	MISI	
1	Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia	Misi 3 : Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Kota Madiun
2	Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing	Misi 4 : Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Memeratakan tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kota Madiun
3	Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan	Misi 2 : Mewujudkan Pembangunan yang berwawasan Lingkungan Misi 4 : Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Memeratakan tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kota Madiun
4	Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Misi 2 : Mewujudkan Pembangunan yang berwawasan Lingkungan

NO	RPJMN 2020 – 2024	P-RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024
5	Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa	Misi 3 : Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Kota Madiun
6	Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya	Misi 1 : mewujudkan pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)
7	Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga	Misi 3 : Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Kota Madiun
8	Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya	Misi 1 : mewujudkan pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)
9	Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan	Misi 1 : mewujudkan pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)

2. P-RPJMD Kota Madiun 2019-2024 dengan RTRW Provinsi Jawa Timur 2011-2031

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan harus memperhatikan aspek tata ruang. Rencana Tata Ruang merupakan instrumen untuk mengarahkan aspek kewilayahan dalam bentuk alokasi kegiatan-kegiatan sosial ekonomi, pusat pelayanan, infrastruktur, serta permukiman yang akan saling memperkuat satu dengan lainnya dalam konteks pengembangan kota yang berkelanjutan. Berdasarkan RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031, arah Pengembangan Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur yang terkait dengan pembangunan di Kota Madiun adalah tentang rencana struktur pemanfaatan ruang wilayah, dimana hal tersebut menggambarkan rencana sistem pusat pelayanan permukiman pedesaan dan perkotaan serta sistem jaringan sarana perwilayahan di Provinsi Jawa Timur. Pada sistem kota-kota di Provinsi Jawa Timur, perkotaan sebagai pusat pelayanan dan kegiatan dapat dikelompokkan berdasarkan hierarkinya sebagai berikut :

- a. Pusat Kegiatan Nasional yaitu Kota atau perkotaan yang memiliki fungsi pelayanan dalam lingkup nasional, Kota yang diklasifikasikan sebagai PKN adalah wilayah wilayah Surabaya Metropolitan Area.
- b. PKW (Pusat Kegiatan Wilayah) yaitu kota atau perkotaan yang berfungsi sebagai pusat pelayanan dalam lingkup wilayah, meliputi Kota Jember, Kediri, Kota Madiun, dan Kota Malang, selain itu daerah yang diarahkan untuk berfungsi sebagai PKW adalah daerah-daerah yang potensial atau daerah-daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan relatif tinggi, yaitu Kota Jember dan Kota Blitar.

Tabel 1.2
Keselarasan Dokumen RPJMD dengan RTRW Provinsi Jawa Timur

NO	RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031	RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024
1	PKW (Pusat Kegiatan Wilayah) yaitu kota atau perkotaan yang berfungsi sebagai pusat pelayanan dalam lingkup wilayah, meliputi Kota Jember, Kediri, Kota Madiun, dan Kota Malang	Misi 2 : Mewujudkan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan

Kebijakan yang telah diarahkan terhadap Kota Madiun dalam kerangka RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031, membawa beberapa konsekuensi terutama yang terkait dengan penyediaan fasilitas dan ruang untuk mendukung kegiatan yang telah direncanakan. Adapun penyediaan ruang yang perlu dilakukan sesuai dengan arahan dari kebijakan regional RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 adalah sebagai berikut :

1. Ruang untuk pengembangan pendidikan tinggi;
2. Ruang untuk pengembangan pasar umum, perdagangan semi modern, perbankan, hotel, tempat hiburan, toko swalayan, dan PKL (pedagang Kaki Lima);
3. Ruang untuk pengembangan rumah sakit Tipe B, rumah sakit swasta, dan klinik kesehatan;
4. Ruang untuk pengembangan kawasan wisata (akomodasi, wisata kota, revitalisasi kawasan wisata lama);
5. Ruang untuk pengembangan fasilitas peribadatan sesuai kebutuhan;^[1]_[SEP]
6. Pengembangan ruang untuk fasilitas olah raga;
7. Ruang untuk pengembangan home industri;
8. Ruang untuk pengembangan jalan lingkar (*Outer dan Inner Ring Road*).

3. P-RPJMD Kota Madiun 2019-2024 dengan P-RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024

Sebagai bagian dari salah satu Kota di Jawa Timur, sinkronisasi dokumen perencanaan dalam hal ini P-RPJMD Kota Madiun 2019-2024 dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur mutlak dilakukan.

Visi Jawa Timur 2019–2024 adalah “terwujudnya masyarakat Jatim yang sejahtera, seimbang, unggul, dan berakhlak dengan tata kelola pemerintahan yang partisipatoris, inklusif, dan menghargai nilai-nilai kemanusiaan”.

Dalam upaya pencapaian visi tersebut, misi utama yang diusung adalah sebagai berikut:

- a. Membangun Jatim secara utuh dengan mendayagunakan seluruh potensi melalui pembangunan sektor kebudayaan, pendidikan, dan kesehatan dengan dilandasi oleh kearifan lokal yang berbasis pada nilai-nilai kesantunan, keagamaan, dan kebudayaan.
- b. Membangun ekonomi berbasis gotong royong sehingga tercapai keadilan dan kesejahteraan yang menjangkau semua lapisan serta mendorong keberpihakan terhadap sektor ekonomi kecil dan menengah yang sinergis dengan kekuatan ekonomi yang lebih besar.
- c. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka, dan partisipatoris sehingga terwujud kebijakan yang inklusif, di atas landasan kepemimpinan yang meritokratik, inovatif, tegas, dan mengayomi.
- d. Memperkuat demokrasi kewargaan untuk menghadirkan ruang sosial yang menghargai prinsip kebhinekaan.
- e. Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan untuk menjamin keselarasan ruang ekologi, sosial, ekonomi, dan budaya.

Tabel 1.3

Keselarasan Dokumen RPJMD Kota Madiun dengan RPJMD Provinsi

NO	P-RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024	P-RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024
	VISI	
	Terwujudnya masyarakat Jawa Timur yang adil, sejahtera, unggul dan berakhlak dengan tata kelola pemerintahan yang partisipatoris inklusif melalui kerja bersama dan semangat gotong royong	Terwujudnya Pemerintahan Bersih Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera
	MISI	
1	Mewujudkan keseimbangan pembangunan ekonomi, baik antar kelompok, antar sektor dan keterhubungan wilayah	Misi 4 : Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Memeratakan tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kota Madiun
2	Terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan sosial, pemenuhan kebutuhan dasar terutama kesehatan dan pendidikan, penyediaan lapangan kerja dengan memperhatikan kelompok rentan	Misi 3 : Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Kota Madiun Misi 4 : Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Memeratakan tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kota Madiun
3	Tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, terbuka, partisipatoris memperkuat demokrasi kewarganegaraan untuk menghadirkan ruang sosial yang menghargai prinsip kebhinekaan	Misi 1 : mewujudkan pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)

NO	P-RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024	P-RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024
4	Melaksanakan pembangunan berdasarkan semangat gotong-royong, berwawasan lingkungan untuk menjamin keselarasan ruang ekologi, ruang sosial, ruang ekonomi dan ruang budaya	Misi 2 : Mewujudkan Pembangunan yang berwawasan Lingkungan

4. P-RPJMD Kota Madiun dengan RPJMD Daerah lain (Kabupaten Madiun)

Mengingat letak geografis Kota Madiun yang berada di tengah-tengah Kabupaten Madiun, maka perencanaan pembangunan Kota Madiun perlu disinergikan dengan perencanaan pembangunan Kabupaten Madiun. Perlunya suatu daerah menelaah RPJMD dengan daerah sekitarnya karena beberapa alasan: (1) Adanya persamaan kepentingan atau tujuan atau upaya-upaya strategis yang harus disinergikan; (2) Adanya persamaan permasalahan pembangunan yang memerlukan upaya pemecahan bersama; (3) Adanya agenda pembangunan kewilayahan yang menentukan yang menentukan kewenangan bersama, utamanya daerah-daerah yang letaknya berdekatan; dan (4) Adanya kebijakan pemerintah menetapkan daerah sebagai bagian dari kesatuan wilayah/kawasan pembangunan.

Secara substansi, perumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan dalam RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024 akan memperhatikan keterkaitan strategi dan arah kebijakan pembangunan yang direncanakan dalam RPJMD Kabupaten sekitarnya. Identifikasi terhadap RPJMD daerah lain dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.4
Identifikasi RPJMD daerah Lain

No	Daerah Lain	Periode	Kebijakan Terkait
1	Kabupaten Madiun	2018-2023	<ul style="list-style-type: none"> a. Mewujudkan rasa aman bagi seluruh Masyarakat dan Aparatur Pemerintah Kabupaten Madiun b. Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang profesional untuk meningkatkan pelayanan publik c. Meningkatkan pembangunan ekonomi yang mandiri berbasis agrobisnis, agroindustri dan pariwisata yang berkelanjutan d. Meningkatkan kesejahteraan yang berkeadilan e. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia dengan meningkatkan kehidupan beragama, menguatkan budaya dan mengedepankan kearifan lokal

Sumber: dari berbagai sumber (diolah)

Dalam lingkup internal, hubungan P-RPJMD 2019-2024 dengan dokumen perencanaan pembangunan meliputi RPJPD 2005-2025, RTRW 2012-2032, RKPD, dan Renstra SKPD. Penjelasan hubungan tersebut adalah sebagai berikut:

I. P-RPJMD dengan RPJPD Kota Madiun 2005-2025

Visi RPJPD Kota Madiun Tahun 2005-2025 adalah Terwujudnya Kota Madiun sebagai pusat pengembangan Jawa Timur bagian barat yang maju dan sejahtera. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka panjang daerah yaitu (1) meningkatkan pengelolaan potensi ekonomi daerah secara optimal; (2) meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial; (3) mewujudkan pemerintahan yang baik dalam situasi yang tertib, aman, dan damai; (4) meningkatkan kerjasama antar pemangku kepentingan pembangunan, baik ditingkat daerah, nasional maupun internasional; dan (5) melestarikan fungsi lingkungan hidup dengan menerapkan prinsip-prinsip pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Arah pembangunan daerah yang tercantum dalam RPJPD Kota Madiun Tahun 2005-2025 adalah (1) meningkatkan pengelolaan potensi ekonomi daerah secara optimal, (2) meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial, (3) mewujudkan pemerintahan yang baik dalam situasi yang tertib, aman, dan damai, (4) meningkatkan kerja sama antar pemangku kepentingan pembangunan, baik di tingkat daerah, nasional, maupun internasional, dan (5) melestarikan fungsi lingkungan hidup dengan menerapkan prinsip-prinsip pencegahan, penanggulangan dan pemulihan dengan melibatkan partisipasi masyarakat. RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024 merupakan RPJMD keempat dari tahapan pelaksanaan RPJPD Kota Madiun Tahun 2005-2025. Oleh sebab itu, penyusunan P- RPJMD selain memuat visi, misi dan program prioritas Walikota/Wakil Walikota Kota Madiun masa bakti tahun 2019-2024, juga berpedoman pada visi, misi dan arah kebijakan yang termuat dalam RPJPD Kota Madiun Tahun 2005-2025.

Tabel 1.5
Keselarasan Dokumen P-RPJMD dengan RPJPD Kota Madiun

NO	RPJPD Kota Madiun Tahun 2005-2025	RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024
	VISI	
	Terwujudnya Kota Madiun sebagai Pusat Pengembangan Jawa Timur Bagian Barat yang Maju dan Sejahtera	Terwujudnya Pemerintahan Bersih Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera

NO	RPJPD Kota Madiun Tahun 2005-2025	RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024
	MISI	
1	Meningkatkan Pengelolaan Potensi Ekonomi Daerah secara Optimal	Misi 4 : Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Memeratakan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kota Madiun
2	Meningkatkan aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, dan Pelayanan Sosial	Misi 3 : Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Kota Madiun
3	Mewujudkan Kepemerintahan yang Baik dalam situasi yang tertib, aman, dan damai	Misi 1 : Mewujudkan Pemerintahan yang Baik
4	Meningkatkan Kerjasama antar pemangku kepentingan pembangunan, baik ditingkat daerah, nasional maupun internasional	Misi 2 : Mewujudkan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan
5	Melestarikan fungsi lingkungan hidup dengan menerapkan prinsip-prinsip pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan dengan melibatkan partisipasi masyarakat	Misi 2 : Mewujudkan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan

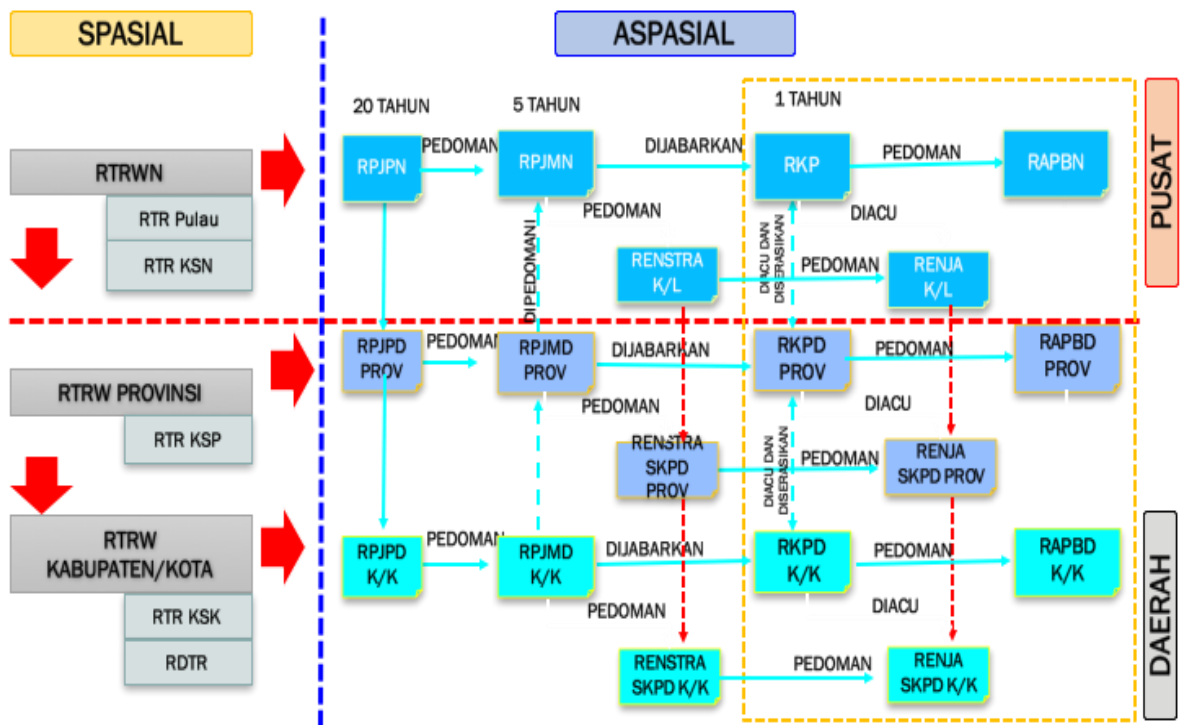
II. P-RPJMD dengan RTRW Kota Madiun 2010-2030

Penyusunan P-RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024 memperhatikan dan mempertimbangkan pola ruang dan struktur ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW Nasional, RTRW Provinsi Jawa Timur dan RTRW Kota Madiun sebagai dasar dalam penetapan lokasi program dan kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Kota Madiun. P-RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024 juga memuat strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah sebagai pusat pertumbuhan dan pusat kegiatan sebagaimana tujuan dari RTRW Kota Madiun.

RTRW Kota Madiun diatur dalam Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010-2030. Keselarasan P-RPJMD dengan RTRW Kota Madiun Tahun 2010-2030 dijelaskan bahwa tujuan RTRW Kota Madiun Tahun 2010-2030 adalah “Mewujudkan penataan ruang yang dapat mengakomodasi terhadap peluang investasi dalam rangka menciptakan daerah sebagai pusat perkembangan Ekonomi Jawa Timur Bagian Barat”. Penataan ruang daerah bertujuan mewujudkan Kota Madiun sebagai kota perdagangan dan industri yang didukung oleh sektor perdagangan dan jasa yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, Kota Madiun harus berusaha mempertahankan dan mengoptimalkan potensi-potensi yang dimilikinya agar berkelanjutan.

Dalam mewujudkan tujuan penataan ruang Kota Madiun selanjutnya tujuan tersebut akan dijabarkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan strategi pengembangan penataan ruang kota. Kebijakan penataan ruang Kota Madiun meliputi:

1. Pengembangan fungsi dalam mewujudkan regional kota;
2. Pengembangan pusat pelayanan kegiatan memperkuat hubungan antar kawasan;
3. Peningkatan aksesibilitas dan keterkaitan antar pusat kegiatan;
4. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana lingkungan permukiman;
5. Peningkatan pengelolaan kawasan yang berfungsi lindung;
6. Pengembangan kegiatan pertanian perkotaan;
7. Peningkatan penyediaan ruang terbuka hijau Kota;
8. Pelestarian kawasan cagar budaya;
9. Pengembangan kawasan budidaya terbangun yang mempertimbangkan efisiensi pemanfaatan ruang dan;
10. Penetapan kawasan-kawasan strategis Kota.



Sumber: Kemendagri, 2017

Gambar 1.5

Alur Keterhubungan RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024 dan RTRW Kota Madiun Tahun 2010-2030

Tabel 1.6
Keselarasan Dokumen P-RPJMD dengan RTRW

NO	RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024	RTRW Kota Madiun Tahun 2010-2030
	VISI	
	Terwujudnya Pemerintahan Bersih Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera	Mewujudkan Penataan Ruang yang dapat mengakomodasi terhadap peluang investasi dalam rangka menciptakan Daerah sebagai pusat perkembangan ekonomi Jawa Timur Bagian Barat
	MISI	
1	Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik	Misi d : Mewujudkan Kepastian Hukum dan Peran Masyarakat dalam mendorong kegiatan yang produktif
2	Mewujudkan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	Misi b : Mewujudkan Pengembangan Sarana dan Prasarana Wilayah dalam rangka mendorong peluang investasi dan pemerataan wilayah Misi c : Mewujudkan Keseimbangan Fungsi Budidaya dan Fungsi lindung dalam Upaya membentuk Daerah yang berkelanjutan
3	Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Kota Madiun	Tidak secara langsung mendukung
4	Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Memeratakan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kota Madiun	Misi a : Mewujudkan Pusat-pusat pelayanan ekonomi skala regional Misi b : Mewujudkan Pengembangan Sarana dan Prasarana Wilayah dalam rangka mendorong peluang investasi dan pemerataan wilayah

III. RPJMD dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Proses pelaksanaan pembangunan daerah harus dapat memperhatikan aspek lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ke dalam penyusunan perencanaan maupun evaluasi Rencana Pembangunan daerah terkhusus RPJMD. KLHS Kota Madiun 2019–2024 menjadi pedoman penyusunan P-RPJMD periode yang sama. Dengan berpedoman pada KLHS, P-RPJMD Kota Madiun tahun 2019–2024 telah memperhatikan kapasitas daya dukung lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

Tabel 1.7
Keselarasan Dokumen P-RPJMD dengan KLHS P-RPJMD

NO	Isu Strategis KLHS RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024	RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024
1	Penyediaan air minum dan sanitasi lingkungan	Misi 3 : Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Kota Madiun Misi 2 : Mewujudkan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan
2	Penanggulangan kriminalitas dan keamanan	Misi 1 : Mewujudkan Pemerintahan yang Baik Misi 3 : Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Kota Madiun Misi 4 : Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Memeratakan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kota Madiun
3	Peningkatan kesehatan masyarakat	Misi 3 : Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Kota Madiun
4	Pengelolaan limbah dan sampah	Misi 3 : Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Kota Madiun Misi 2 : Mewujudkan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan
5	Penanggulangan kemiskinan dan Pengangguran	Misi 4 : Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Memeratakan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kota Madiun
6	Penurunan kualitas lingkungan hidup	Misi 2 : Mewujudkan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan
7	Kualitas pendidikan belum merata	Misi 3 : Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Kota Madiun
8	Kesiapsiagaan dan mitigasi bencana	Misi 2 : Mewujudkan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Misi 1 : Mewujudkan Pemerintahan yang Baik
9	Kesetaraan gender dan perlindungan anak	Misi 3 : Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Kota Madiun
10	Pertumbuhan ekonomi dan investasi daerah	Misi 4 : Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Memeratakan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kota Madiun
11	Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Misi 2 : Mewujudkan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Misi 1 : Mewujudkan Pemerintahan yang Baik
12	Sarana dan prasarana perkotaan	Misi 2 : Mewujudkan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Misi 1 : Mewujudkan Pemerintahan yang Baik

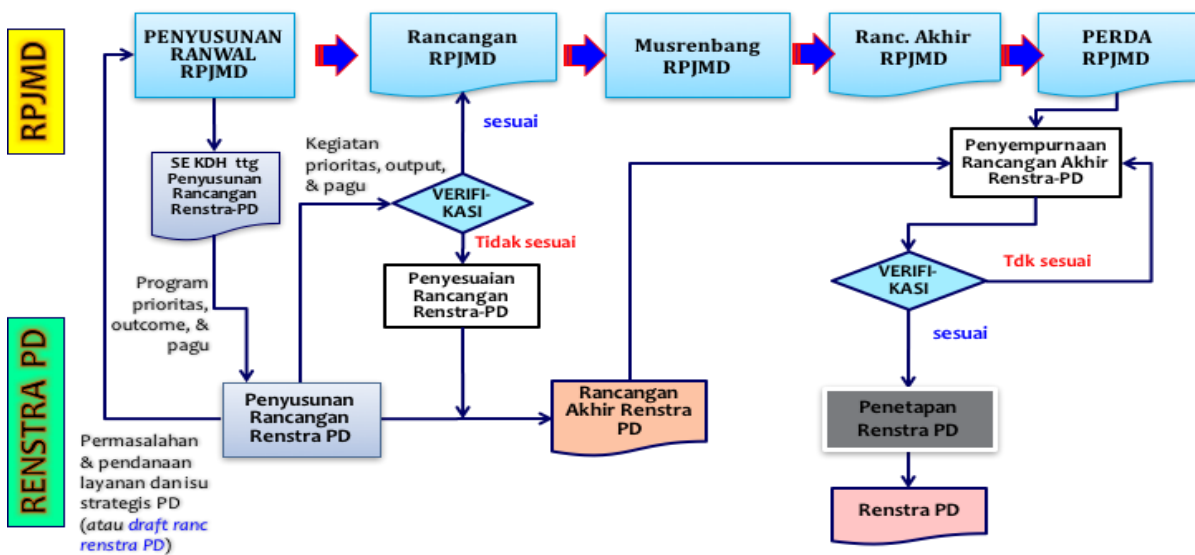
IV. P-RPJMD dengan Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah

P-RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Renstra PD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan pada setiap urusan pemerintahan yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah (PD) di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Madiun.

Renstra PD sebagaimana diatur dalam pasal 272 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Pencapaian sasaran program dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis Perangkat Daerah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian untuk tercapaian sasaran pembangunan nasional. Rencana Strategis PD kemudian dijabarkan menjadi program tahunan dalam Rencana Kerja PD (Renja PD) dan Rencana Kerja Anggaran PD (RKA-PD) yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dilengkapi dengan kebutuhan pendanaan dan sumber dana.

Hubungan nyata RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah diwujudkan melalui pengembangan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah dan Pemerintah Kota Madiun. IKU selain menggambarkan indikator dan target kinerja tugas dan fungsi Perangkat Daerah, juga sebagai sebuah alat ukur komprehensif bagaimana target kinerja Pemerintah Daerah didukung oleh indikator dan target kinerja Perangkat Daerah.



Sumber: Kemendagri, 2017

Gambar 1.6

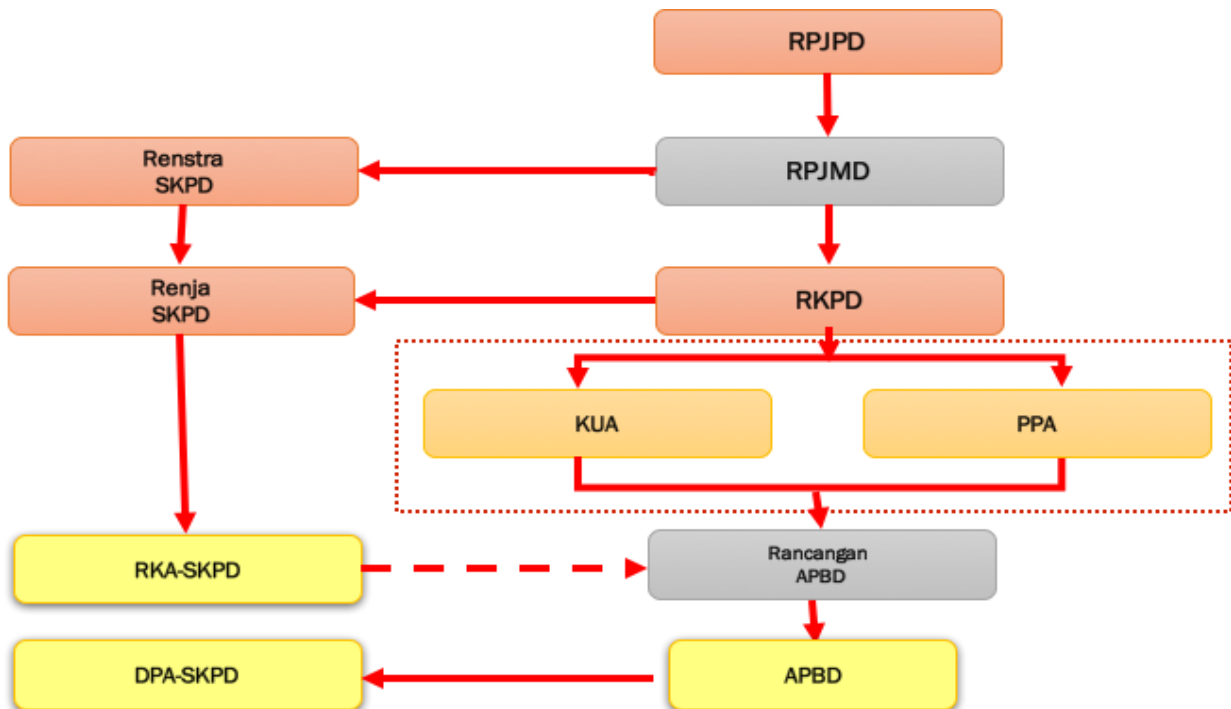
Alur Keterhubungan Dokumen RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024

V. P-RPJMD dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 75 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, penyusunan RKPD berpedoman pada RPJMD termasuk perubahannya. Pelaksanaan RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024 setiap tahun dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan yang memuat prioritas program dan kegiatan yang dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Madiun yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan hingga kota.

Program prioritas pembangunan daerah memuat program-program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan sebagai penjabaran dari RPJMD pada tahun yang direncanakan.

Rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD, memuat program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah, disertai perhitungan kebutuhan dana bersumber dari APBD untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan. RKPD merupakan bahan utama penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara, serta bahan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).



Sumber: Kemendagri, 2017

Gambar 1.7

Alur Keterhubungan Dokumen RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

1.4 Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud

Perubahan RPJMD Kota Madiun 2019-2024 ini disusun dengan maksud sebagai penentu kebijakan yang akan dilakukan dengan memperhatikan Visi dan Misi Kepala Daerah yang akan menjadi Dokumen Publik, serta sebagai landasan pedoman penyusunan dokumen perencanaan:

- a. Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024;
- b. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. Perencanaan Penganggaran.

1.4.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Perubahan RPJMD Kota Madiun 2019-2024 adalah:

1. Menjamin agar tercipta adanya konsistensi, sinergitas dan keserasian antar dan antara dokumen perencanaan pembangunan di berbagai tingkatan pemerintahan;
2. Menjamin, bahwa tahapan, tata cara dan substansi yang ditetapkan dalam berbagai dokumen rencana pembangunan telah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Merumuskan gambaran umum kondisi daerah sebagai dasar untuk perumusan permasalahan dan isu strategis daerah, serta sebagai dasar penentuan prioritas program pembangunan daerah;
4. Merumuskan gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar proyeksi kemampuan riil kapasitas pendanaan tahunan sampai dengan tahun 2024.

1.5 Sistematika Penulisan

Dokumen Perubahan RPJMD Kota Madiun 2019-2024 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan RPJMD, maksud dan tujuan penyusunan, landasan normatif penyusunan, hubungan dengan dokumen perencanaan lainnya dan sistematika penulisan. Bab ini diperjelas dan diperinci ke dalam sub bab-sub bab sebagai berikut:

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Hubungan Antar Dokumen
- 1.4 Maksud dan Tujuan
- 1.5 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini menguraikan statistik dan gambaran umum kondisi daerah saat ini, dengan maksud mengetahui keadaan daerah pada berbagai bidang dan aspek kehidupan sosial ekonomi daerah yang akan diintervensi melalui berbagai kebijakan dan program daerah dalam jangka waktu lima tahun. Bab ini diperjelas dan diperinci ke dalam sub bab-sub bab sebagai berikut:

- 2.1 Aspek Geografi dan Demografi
- 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
- 2.3 Aspek Pelayanan Umum
- 2.4 Aspek Daya Saing Daerah

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menjelaskan gambaran umum keuangan daerah dan pembiayaan pembangunan yang pada akhirnya akan diketahui kemampuan daerah dalam membiayai program-program pembangunan. Adapun struktur sub bab dalam bab ini adalah:

- 3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu
- 3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu
- 3.3 Kerangka Pendanaan

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Bab ini berisi uraian tentang permasalahan pembangunan yang akan dianalisa, sehingga menghasilkan isu-isu strategis dengan tujuan untuk memudahkan proses perumusan strategi, arah kebijakan dan skala prioritas. Adapun struktur sub bab dalam bab ini adalah:

- 4.1 Permasalahan Pembangunan
- 4.2 Isu-isu Strategis

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Bab ini berisi uraian tentang perumusan visi dan misi disertai tujuan serta sasaran strategis pembangunan. Adapun struktur sub bab dalam bab ini adalah:

- 5.1 Visi
- 5.2 Misi
- 5.3 Tujuan dan Sasaran

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini berisi uraian mengenai strategi pembangunan daerah, arah kebijakan dan juga program prioritas pembangunan daerah. Adapun struktur sub bab dalam bab ini adalah:

- 6.1 Strategi Pembangunan
- 6.2 Arah kebijakan
- 6.3 Program Prioritas Pembangunan

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, target, dan pagu indikatif, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Daerah. Adapun struktur sub bab dalam bab ini adalah:

- 8.1 Indikator Kinerja Utama
- 8.2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

BAB IX PENUTUP

Bab ini memberikan kesimpulan tentang bagaimana dokumen yang disusun akan mulai dijalankan dan berakhir, Adapun struktur sub bab dalam bab ini adalah:

- 9.1 Pedoman Transisi
- 9.2 Kaidah Pelaksanaan

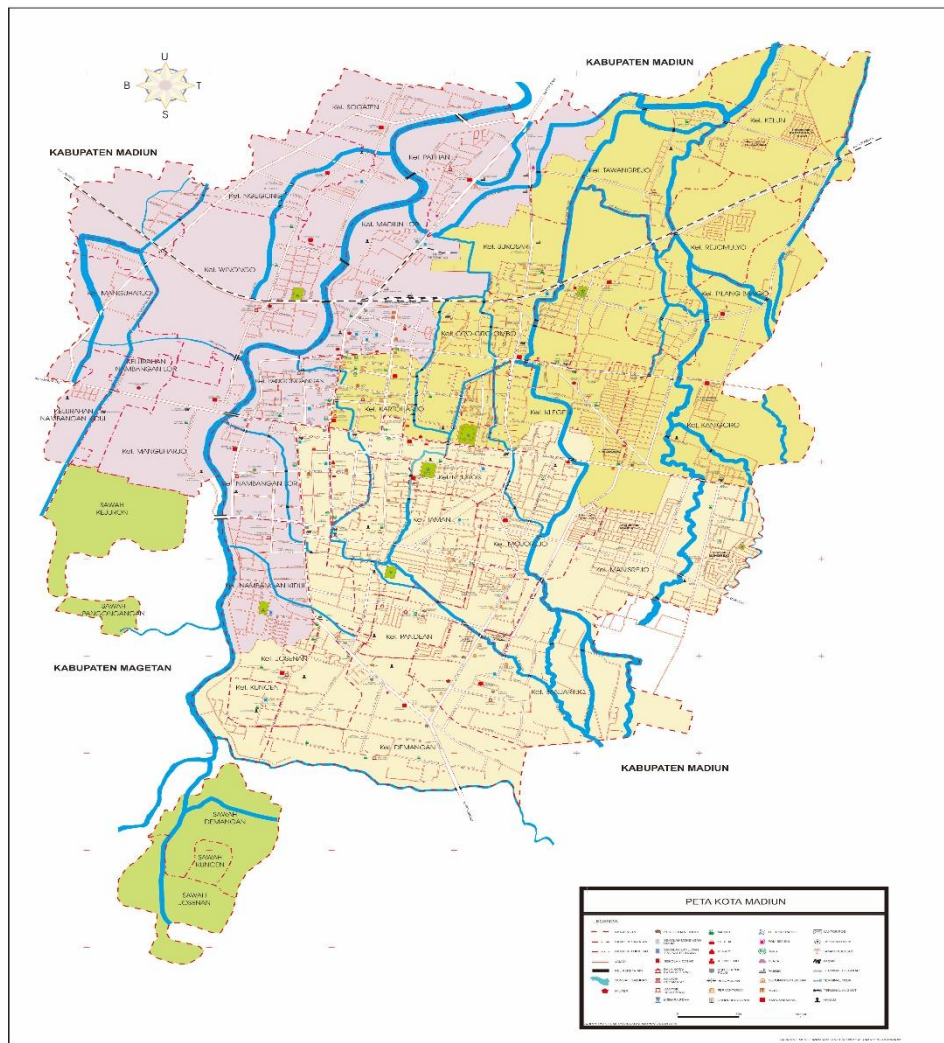
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

2.1.1.1 Letak Geografis, Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kota Madiun memiliki posisi strategis sebagai pusat kegiatan wilayah di Wilayah Jawa Timur bagian barat. Posisi tersebut menjadikan Kota Madiun sebagai pusat pelayanan pemerintahan, perdagangan, jasa, industri, pendidikan, dan kesehatan. Kota Madiun merupakan kota transit yang cukup strategis karena mempunyai topografi tanah yang datar sehingga menjadi pilihan jalur yang mudah dilalui oleh alat transportasi bus maupun kereta api serta mendukung daerah *hinterland* yang mempunyai potensi budaya dan pariwisata yang cukup terkenal.



Sumber: Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, 2021

Gambar 2.1
Wilayah Administrasi Kota Madiun

Secara astronomis, Kota Madiun terletak di titik koordinat 7°-8° Lintang Selatan dan antara 111°-112° Bujur Timur. Wilayah Kota Madiun hampir sepenuhnya berbatasan/dikelilingi oleh Kabupaten Madiun dan sebagian kecil oleh Kabupaten Magetan dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun, dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun dan Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan.

Berdasarkan BPS Kota Madiun Tahun 2020, Kota Madiun memiliki wilayah seluas 33,23 km² yang terbagi menjadi 3 (tiga) kecamatan, yaitu Kecamatan Manguharjo, Kecamatan Taman, dan Kecamatan Kartoharjo. Kecamatan dengan wilayah terluas di Kota Madiun adalah Kecamatan Taman dengan luasan sebesar 12,46 km² (37,50%), disusul Kecamatan Kartoharjo seluas 10,73 km² (32,29%), dan Kecamatan Manguharjo seluas 10,04 km² (30,21%). Berikut ditampilkan luas wilayah dan persentase tiap kecamatan di Kota Madiun.

Tabel 2.1
Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Madiun

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase (%)
1.	Taman	12,46	37,50
2.	Kartoharjo	10,73	32,29
3.	Manguharjo	10,04	30,21
Kota Madiun		33,23	100,00

Sumber: BPS Kota Madiun Tahun 2020

Dari 3 kecamatan, masing-masing kecamatan terdiri dari 9 (sembilan) kelurahan sehingga secara keseluruhan terdapat 27 kelurahan di Kota Madiun. Berikut tabel nama kelurahan pada tiap kecamatan di Kota Madiun.

Tabel 2.2
Nama Kecamatan dan Kelurahan di Kota Madiun

No.	Kecamatan	Kelurahan
1.	Taman	Banjarejo
		Demangan
		Josenan
		Kejuron
		Kuncen
		Manisrejo
		Mojorejo
		Pandean

No.	Kecamatan	Kelurahan
		Taman
2.	Kartoharjo	Kanigoro
		Kartoharjo
		Kelun
		Klegen
		Oro-Oro Ombo
		Pilangbango
		Rejomulyo
		Sukosari
		Tawangrejo
3.	Manguharjo	Madiun Lor
		Manguharjo
		Nambangan Kidul
		Nambangan Lor
		Ngegong
		Pangongangan
		Patihan
		Sogaten
Winongo		

Sumber: RTRW Kota Madiun Tahun 2010-2030

2.1.1.2 Kondisi Topografi

Ditinjau dari kondisi topografi wilayah Kota Madiun didominasi oleh dataran rendah yang landai dan membentang dari utara ke selatan. Kota Madiun secara umum berada pada ketinggian \pm 63 meter di atas permukaan laut (dpl). Di bagian selatan ketinggian wilayah mencapai 67 meter dpl dan selanjutnya menurun hingga 63 meter dpl, sedang di bagian utara kota, ketinggian rata-rata mencapai 64 meter dpl. Perbedaan ketinggian antar wilayah yang satu dengan wilayah yang lainnya sangat kecil dengan kemiringan lahan rata-rata 0-2% atau dapat dikatakan relatif datar. Kondisi tersebut merupakan potensi besar untuk pengembangan fisik Kota Madiun di masa yang akan datang.

Kota Madiun tertelak di lembah sungai Madiun atau Kali Madiun yang merupakan anak sungai terbesar dari Sungai Bengawan Solo. Bila dilihat dari daerah sekelilingnya, maka terdapat rangkaian pegunungan, yaitu sebelah timur terdapat Gunung Wilis (2.169 m), di sebelah selatan membujur Pegunungan Kapur Selatan yang mempunyai ketinggian antara 500 m hingga 1.000 m dpl. Di sebelah barat Kota Madiun, terdapat Gunung Lawu (3.285 m) dan di sebelah utara terdapat Pegunungan Kendeng dengan ketinggian antara 100 m–500 m.

2.1.1.3 Kondisi Geologi

Ditinjau dari aspek geologi, struktur dan karakteristik lahan dan potensi kandungan di Kota Madiun sebagian besar terdiri dari Aluvium dan jenis tanahnya termasuk alluvial. Kondisi tanah tersebut mempunyai kadar mineral dan organisme yang cukup tinggi. Hal ini disebabkan jenis tanah tersebut merupakan campuran dari tanah liat dengan pasir halus yang berwarna hitam kelabu dengan daya penahanan air yang cukup baik dan dapat menyerap air.

Jenis tanah di Kota Madiun termasuk alluvial yang mempunyai kadar mineral dan organisme yang cukup tinggi. Hal tersebut disebabkan jenis tanah alluvial merupakan campuran dari tanah liat dengan pasir halus yang berwarna hitam kelabu dengan daya penahanan air yang cukup baik dan dapat menyerap air

2.1.1.4 Kondisi Hidrologi

Secara hidrologi Kota Madiun memiliki struktur tanah yang cukup baik sehingga dapat menyerap air hujan dengan baik. Hal tersebut menyebabkan debit air tanah sepanjang tahun hampir tetap, sehingga masyarakat mudah untuk mendapatkan air bersih guna keperluan sehari-hari. Sumber air dangkal terdapat pada kedalaman 8 meter sedang sumber air dalam/artesis terdapat pada kedalaman 90 meter. Kota Madiun berada dalam daerah Aliran Sungai (DAS) Bengawan Solo pada Wilayah Sungai (WS) Bengawan Solo. Di bagian barat Kota Madiun, mengalir sungai besar, yaitu Sungai Madiun yang membelah kota menjadi 2 bagian. Bagian timur sungai mencakup 82% wilayah kota, sedangkan di bagian barat sungai mencakup 18% wilayah. Sungai Madiun memiliki 2 anak sungai, yaitu Sungai Catur dan Sungai Sono. Kota Madiun memiliki sistem drainase perkotaan yang terbagi menjadi 2, yaitu drainase makro dan drainase mikro yang berjumlah 32 saluran. Sistem drainase Kota Madiun menggunakan sistem gravitasi dan sistem pemompaan (terdapat 8 rumah pompa yang sekaligus berfungsi sebagai pengendali banjir). Adapun lokasi rumah pompa tersebut adalah :

1. Rumah Pompa Patihan (2 Unit Pompa)
2. Rumah Pompa Pandan (6 Unit Pompa)
3. Rumah Pompa Pancasila (4 Unit Pompa)
4. Rumah Pompa Beteng (2 Unit Pompa)
5. Rumah Pompa Madiun Lor (2 Unit Pompa)
6. Rumah Pompa Taman (1 Unit Pompa)
7. Rumah Pompa Kaswari (2 Unit Pompa)
8. Rumah Pompa Sogaten (1 Unit Pompa)

Dari rumah pompa di atas 7 dalam kondisi baik dan 1 rumah pompa dalam kondisi rusak ringan (rumah pompa Taman), akan tetapi hal ini tidak mempengaruhi fungsi dari masing – masing unit pompa.

2.1.1.5 Kondisi Klimatologi

Kondisi klimatologi Kota Madiun dipengaruhi oleh faktor keadaan iklim, kondisi geografis dan perputaran arus udara. Dilihat dari rata-rata curah hujan yang terjadi sejak 5 (lima) tahun terakhir dapat dikatakan bahwa musim penghujan di Kota Madiun terjadi antara bulan Desember sampai dengan Mei, sedang kemarau terjadi antara bulan Juni sampai dengan bulan November.

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir curah hujan yang terjadi di Kota Madiun termasuk kategori menengah yaitu antara 101–300 mm/bulan. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi jumlah air di permukaan tanah dan ketersediaan air di dalam tanah serta sangat potensial untuk kegiatan pertanian.

Pada tahun 2020, suhu udara maksimum di Kota Madiun dapat dikatakan stabil yaitu berkisar antara 28,4°-33,2°C. Suhu terpanas berkisar pada bulan September yang merupakan puncak dari musim kemarau dan suhu udara terendah pada bulan Desember. Untuk penyinaran matahari pada tahun 2020, kondisi maksimal 100 % berada pada bulan Juli sampai September. Kecepatan angin maksimum di Kota Madiun cukup bervariasi pada tahun 2020 dimana kecepatan tertinggi terjadi pada bulan Mei sebesar 11,83 m/detik, sedang kecepatan angin terendah terjadi pada bulan April dan Oktober yang hanya sebesar 2,57 m/detik. Curah hujan tertinggi di Kota Madiun terjadi pada bulan Desember yaitu sebesar 560,1 mm, sedang rata-rata curah hujan terendah terjadi pada bulan September yaitu sebesar 1 mm. Kondisi klimatologi di Kota Madiun pada tahun 2020 ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Kondisi Iklim di Kota Madiun Tahun 2020

No	Kondisi Iklim	Bulan											
		Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
1.	Temperatur maksimum (°C)	30	29,2	29,7	30	30,2	29,6	30,4	30,4	33,2	32,8	31,7	28,4
2.	Penyinaran Matahari (%)	49,23	52,54	54,54	67,29	73,67	89,17	100	100	100	74,92	73,38	38,23
3.	Kecepatan Angin Maksimum (m/detik)*	3,6	3,09	5,14	2,57	11,83	3,6	5,14	5,14	3,09	2,57	4,63	3,6
4.	Jumlah Curah Hujan (mm)*	376,8	559,3	451,2	231	416,7	33,5	15	40,5	1	45	372	560,1

Sumber: Kota Madiun dalam Angka, 2021

2.1.1.6 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

a. Kapasitas Daya Dukung Lingkungan Hidup

a.1 Daya Dukung Air Permukaan

Daya dukung air meliputi kapasitas lingkungan dalam mendukung penggunaan sumberdaya air di Kota Madiun. Aspek pengukuran daya dukung air meliputi ketersediaan air dan kebutuhan air. Ketersediaan air (SA) dipengaruhi oleh koefisien limpasan yang menginterpretasikan jumlah air limpasan yang dihasilkan oleh hujan di setiap jenis penggunaan lahan yang berbeda. Kebutuhan air diukur berdasarkan pada jumlah penduduk dan nilai kebutuhan air untuk kehidupan layak. Perbandingan antara ketersediaan air dan kebutuhan air tersebut akan menunjukkan status daya dukung air di suatu wilayah. Status daya dukung air dikatakan surplus atau mencukupi ketika SA lebih besar dari DA, status daya dukung air defisit atau tidak memenuhi ketika SA kurang dari DA.

Tabel 2.4

Perhitungan Kebutuhan Air Kota Madiun Tahun 2020

Kecamatan	Kebutuhan Air Kota Madiun Tahun 2020 (m ³ /tahun)				
	Domestik	Non Domestik	Pertanian	Peternakan	Total
Kartoharjo	3.161.703	948.511	122.256	10.272	4.242.742
Manguharjo	3.450.181	1.035.054	171.072	8.828	4.665.135
Taman	4.891.913	1.467.574	81.216	12.074	6.452.776
Kota Madiun	11.503.796	3.451.139	374.544	31.174	15.360.653

Sumber: Laporan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kota Madiun, 2020

Kebutuhan air total Kota Madiun berdasarkan hasil perhitungan yang ditunjukkan pada Tabel di atas, adalah 15.360.653 m³/tahun. Proporsi paling besar kebutuhan air di Kota Madiun berasal dari sektor domestik yakni 11.503.796 m³/tahun dengan distribusi yang yang paling tinggi berada di Kecamatan Taman.

Tabel 2.5

Perhitungan Daya Dukung Air Permukaan Kota Madiun Tahun 2020

No	Penggunaan Lahan	Koefisien limpasan (Ci)	Luas (Ai)	Ai.Ci
1	Bangunan	0.7	609.5	870.73
2	Fasilitas Kesehatan	0.7	6.5	9.31
3	Fasilitas Olahraga	0.7	20.8	29.79
4	Fasilitas Pendidikan	0.7	53.9	77
5	Fasilitas Peribadatan	0.7	2.9	4.17
6	Fasilitas Sosial Budaya	0.7	0.03	0.04
7	Fasilitas Transportasi	0.7	5.6	8
8	Industri	0.5	50.2	100.42

No	Penggunaan Lahan	Koefisien limpasan (Ci)	Luas (Ai)	Ai.Ci
9	Jalan	0.7	195.7	279.64
10	Kawasan Militer	0.7	21.2	30.29
11	Kolam Ikan	0.1	0.2	1.88
12	Makam	0.1	21.9	219.14
13	Pariwisata	0.7	1.8	2.54
14	Pekarangan Rumah	0.15	922.7	6151.39
15	Perdagangan dan Jasa	0.6	24.9	41.53
16	Perkantoran	0.6	44.9	74.87
17	Perkebunan	0.3	11.3	37.61
18	RTH	0.1	7.6	76.4
19	Sawah	0.3	1292.5	4308.48
20	Semak Belukar	0.3	235.2	784.12
21	Sungai	0.1	87	869.93
22	Taman	0.1	9.9	99.05
23	Tanah Kosong	0.35	119.3	340.73
24	Tegalan	0.35	61.3	175.11
25	TPA	0.1	4.5	44.51
26	TPS	0.1	0	0.29
27	Luas Wilayah (A)		3323	14636.96
	C Tertimbang			4.4
	Curah Hujan Rerata Tahunan (R)			2895
	Ketersediaan air (m ³ /tahun) (SA)			423691061.24
	Total Kebutuhan Air (m ³ .tahun) (DA)			15360653
	Daya Dukung Air			27.58

Sumber: Laporan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kota Madiun, 2020

Hasil analisis daya dukung air ditunjukkan pada Tabel di atas Perbandingan antara potensi ketersediaan air permukaan dan kebutuhan air diperoleh nilai daya dukung air sebesar 27,58. Secara lebih jelas daya dukung air permukaan Kota Madiun dihitung sebagai berikut:

$$DDA = 423.691.061 / 15.360.653 = 27,58$$

Keterangan :

DDA < 1 : Daya dukung air terlampaui atau buruk

DDA 1-3 : Daya dukung air bersyarat atau sedang

DDA > 3 : Daya dukung air aman atau baik

Nilai Daya Dukung Air di Kota Madiun Tahun 2020 berdasarkan perhitungan di atas termasuk untuk pemenuhan Kota Madiun adalah 27,58 yang berarti daya dukung airnya termasuk dalam kategori aman atau baik. Jika dibandingkan antara ketersediaan dengan kebutuhan maka ketersediaan air Kota Madiun surplus sebesar 408.330.408 m³/tahun.

a.2 Daya Dukung Pangan

Status daya dukung pangan diperoleh melalui pendekatan kuantitatif untuk memetakannya serta menggunakan sistem grid skala ragam. Sistem grid merupakan struktur dua dimensi yang membagi suatu wilayah menjadi rangkaian sel-sel unik dan berbeda yang bersebelahan. Konsep skala ragam (*multiscale*) digunakan untuk mendeskripsikan suatu fenomena dengan pola yang tidak berubah atau berubah secara monoton dalam skala dengan memanfaatkan informasi yang mengacu pada suatu rentang skala secara simultan.

Tabel 2.6
Perhitungan Daya Dukung Pangan (Beras) Kota Madiun

Kecamatan	Kebutuhan Bahan Pangan (Kg/Th)	Ketersediaan Bahan Pangan (Kg/Th)	Selisih Kebutuhan Bahan Pangan	Nilai Daya Dukung Bahan Pangan	Status Daya Dukung Bahan Pangan
Kartoharjo	10,041,261	2,314,200	-7,727,061	0.2	Defisit
Manguharjo	9,567,234	2,143,201	-7,424,033	0.2	Defisit
Taman	15,218,485	1,624,501	- 13,593,985	0.1	Sangat Defisit
Kota Madiun	34,826,981	6,081,901	- 28,745,079	0.2	Defisit

Sumber: Laporan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kota Madiun, 2020

Hasil perhitungan daya dukung pangan beras yang ditunjukkan pada Tabel di atas. memperlihatkan bahwa kebutuhan pangan beras per kapita Kota Madiun sebesar 34,826,981 kg/tahun. Sedangkan ketersediaan pangan beras hanya sebesar 6,081,901 kg/tahun yang dihasilkan dari jasa ekosistem penyedia bahan pangan (sawah) di Kota Madiun. Defisit daya dukung pangan beras menunjukkan bahwa ketersediaan bahan pangan di Kota Madiun tidak mampu mendukung kebutuhan penduduknya atas bahan pangan.

a.3 Daya Dukung Fungsi Lindung

Daya dukung fungsi lindung ditinjau dari luas guna lahan yang memiliki fungsi lindung, koefisien lindung untuk guna lahan dan luasan wilayah, dengan rumus sebagai berikut :

$$DDL = \frac{\sum Lgl1. \alpha1 + Lgl2. \alpha2 + Lgl3. \alpha3 + \dots + Lgln. \alpha n}{LW}$$

Keterangan :

DDL = daya dukung fungsi lindung

Lgln = luas guna lahan jenis n (ha)

αn = koefisien lindung untuk guna lahan n

LW = luasan wilayah (Ha)

Tabel 2.7
Perhitungan Daya Dukung Fungsi Lindung Kota Madiun

Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ai) (ha)	Luas (%)	Koefisien Lindung (an)	$\sum (ci \times Ai)$
Bangunan	1038.09	31.24	0.18	186.86
Kolam Ikan	0.19	0.01	0.98	0.18
Makam	21.91	0.66	1.00	21.91
Pekarangan Rumah	950,71	27.77	0.21	193.77
Perkebunan	11.28	0.34	0.42	4.74
RTH	7.64	0.23	1.00	7.64
Sawah dan Lahan Pertanian Non Sawah	1264	38.90	0.46	594.57
Semak Belukar	235.24	7.08	1.00	235.24
Sungai	86.99	2.62	0.98	85.25
Taman	9.91	0.30	1.00	9.91
Tanah Kosong	119.26	3.59	0.01	1.19
Tegalan	61.29	1.84	0.21	12.87
TPA	4.45	0.13	0.01	0.04
TPS	0.03	0.00	0.01	0.00
Total	3323.00	100.00	0.41	1354.17

Sumber: Laporan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kota Madiun, 2020

Daya Dukung fungsi lindung (DDL), memiliki kisaran nilai antara 0 (minimal) sampai 1 (maksimal). Nilai mendekati angka 1, semakin baik fungsi lindung yang ada dalam wilayah tersebut, demikian pula sebaliknya, apabila mendekati angka 0, fungsi lindung semakin buruk atau lebih berfungsi sebagai kawasan budidaya.

Luas lahan sawah dan semak belukar memberikan kontribusi besar dalam daya dukung lindung yang tinggi, sementara permukiman dan lahan terbangun lainnya menyebabkan daya dukung lindung menjadi kecil. Hasil perhitungan Daya Dukung Lindung yakni $1.354,17 / 3.323,00 = 0,41$.

a. 4 Daya Dukung Lahan Bangun

Daya dukung lahan bangun (DDLb) menunjukkan kapasitas atau kemampuan lahan untuk pengembangan lahan bangunan. DDLb Kota Madiun secara keseluruhan sebesar 2.1 yang termasuk dalam daya dukung lahan bersyarat atau sedang. Hal tersebut dimaksudkan bahwa di Kota Madiun masih memiliki daya tampung bangunan yang relatif baik untuk pengembangan.

Namun untuk masa yang akan datang, harus tetap memperhatikan karakteristik Kota Madiun. Data DDLb pada tabel di bawah ini menunjukkan tidak ada kecamatan di Kota Madiun yang berada pada kategori terlampaui atau buruk, namun untuk masa yang akan datang hanya satu kecamatan yang nilainya mendekati terlampaui atau buruk yakni kecamatan Manguharjo.

Tabel 2.8
Daya Dukung Lahan Bangun (DDLB) Kota Madiun Tahun 2020

Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Luas Bangunan (Ha)	Luas Lahan Terbangun (Ha)	DDLB	Status
Kartoharjo	1073	247.09	317.24	2.4	Sedang
Manguharjo	1004	305.38	415.33	1.7	Sedang
Taman	1246	294.36	396.98	2.2	Sedang
Kota Madiun	3323	846.82	1129.56	2.1	Sedang

Sumber: Laporan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kota Madiun, 2020

a. 5 Kinerja Layanan atau Jasa Ekosistem

Kinerja layanan atau jasa ekosistem berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Pasal 13 ayat (1) huruf c merupakan ukuran perubahan kapasitas dan kualitas layanan ekosistem dari kondisi awal yang disepakati dengan kondisi aktual saat pemantauan. Jasa ekosistem terdiri dari 20 jenis yang terbagi atas empat kelompok utama yaitu jasa penyediaan (*provisioning*), jasa budaya (*cultural*), jasa pendukung (*supporting*) yang mewakili unsur daya dukung lingkungan dan jasa pengaturan (*regulating*) yang mewakili unsur daya tampung lingkungan. Berikut ini beberapa jasa ekosistem yang cukup penting bagi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di Kota Madiun.

a.5.1 Jasa Ekosistem Penyedia Bahan Pangan

Daya dukung daya tampung lingkungan hidup berbasis jasa ekosistem penyedia bahan pangan menunjukkan kemampuan ekosistem memberikan manfaat penyediaan bahan pangan yaitu segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati (tanaman dan hewan), baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia. Penyediaan pangan oleh ekosistem dapat berasal dari pertanian dan perkebunan, hasil pangan peternakan, hasil laut dan termasuk pangan dari hutan. Karakteristik ekoregion dan juga tutupan vegetasi merupakan faktor pendukung kemampuan ekosistem dalam penyediaan pangan.

Tabel 2.9

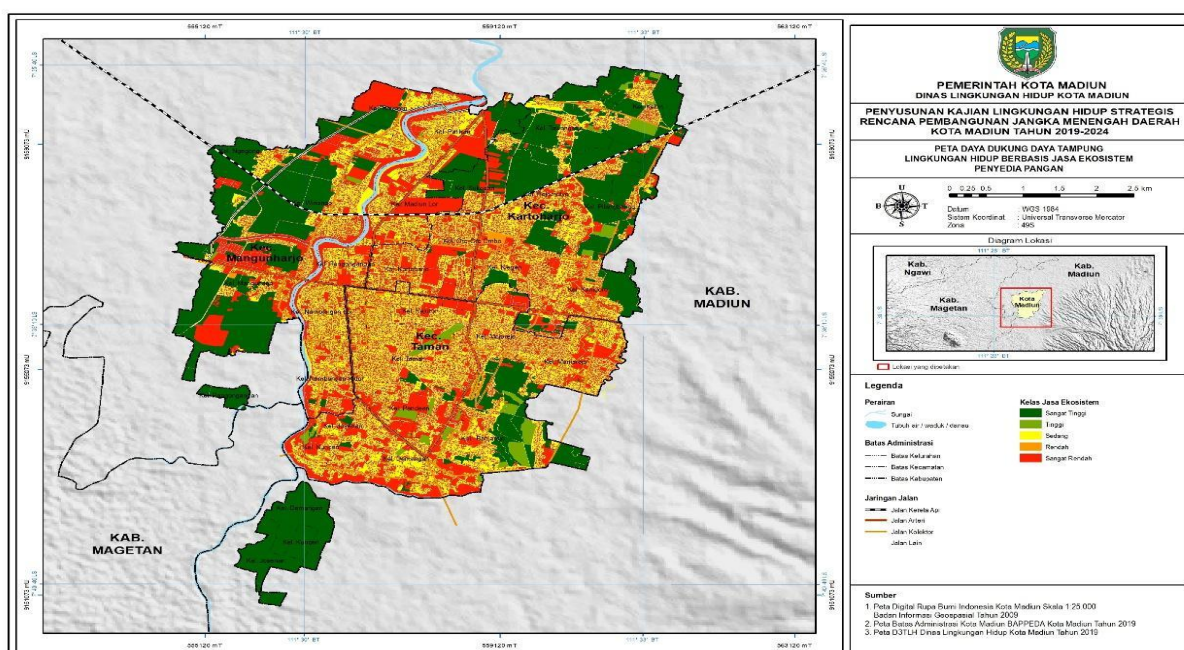
Distribusi Luas Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem Penyedia Bahan Pangan (Ha) Tahun 2020

Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Tidak Berhubungan	Total
Kartoharjo	66,40	13,77	230,58	-	503,65	258,60	1.073,00
Manguharjo	126,38	35,46	212,74	0,24	349,62	279,56	1.004,00
Taman	156,80	24,53	434,84	10,86	250,71	368,26	1.246,00
Kota Madiun	348,91	75,84	857,88	9,84	1.127,04	903,49	3.323,00

Sumber: Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kota Madiun, 2020

Kecamatan Kartoharjo mempunyai indikasi jasa ekosistem penyedia pangan pada kelas sangat tinggi dan tinggi seluas 503,65 Ha dari luas wilayahnya sedangkan Kecamatan Manguharjo seluas 349,62 Ha dari luas wilayahnya. Selain itu, hanya Kecamatan Taman yang relatif kecil mempunyai indikasi jasa ekosistem penyedia pangan pada kelas sangat tinggi dan tinggi yaitu seluas 250,71 Ha.

Hasil kajian terkait jasa ekosistem penyedia pangan yang perlu digarisbawahi bahwasanya sebaran distribusi klasifikasi justru terlihat merata antara kelas klasifikasi rendah dengan klasifikasi sangat tinggi dan ini terjadi pada semua kecamatan. Artinya setiap kecamatan di Kota Madiun juga mempunyai wilayah non-tutupan lahan tanaman pangan yang cukup besar seperti permukiman, perdagangan maupun jasa yang dapat mempengaruhi ketersediaan jasa ekosistem penyedia bahan pangan di masa yang akan datang.



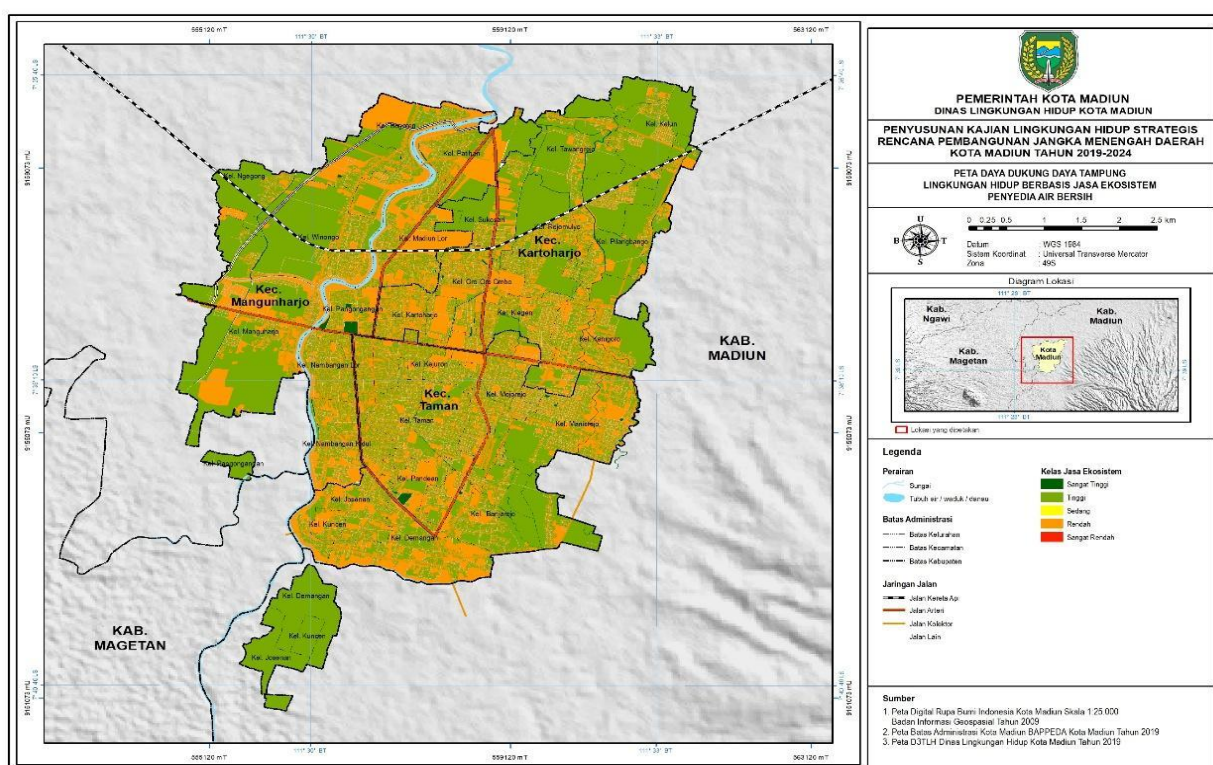
Sumber: Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kota Madiun, 2020

Gambar 2.2

Peta Jasa Ekosistem Penyedia Bahan Pangan di Kota Madiun

a.5.2 Jasa Ekosistem Penyedia Air Bersih

Jasa ekosistem penyedia air bersih berkaitan dengan segala jenis sumber air baik berasal dari air permukaan, air tanah, maupun air hujan yang digunakan manusia untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Faktor penyusun dari jasa ekosistem penyedia air bersih adalah curah hujan, lapisan tanah, jenis batuan yang dapat menyimpan air, bentanglahan, tutupan lahan dan jenis vegetasi. Jenis penggunaan lahan dengan kerapatan vegetasi yang tinggi pada umumnya memiliki potensi penyedia air bersih yang besar karena memungkinkan ekosistem untuk menyimpan air maupun cadangan air dalam jumlah yang banyak.



Sumber: Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kota Madiun, 2020

Gambar 2.3
Peta Jasa Ekosistem Penyedia Air Bersih di Kota Madiun

Tabel 2.10
Distribusi Luas Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem Penyedia Air Bersih (Ha) Tahun 2020

Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Tidak Berhubungan	Total
Kartoharjo	258,60	62,32	-	232,11	519,97	0,00	1.073,00
Manguharjo	279,56	118,78	11,47	201,51	392,68	0,00	1.004,00
Taman	368,26	152,15	0,07	445,63	279,89	0,00	1.246,00
Kota Madiun	903,49	332,07	13,10	856,16	1.218,18	0,00	3.323,00

Sumber: Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kota Madiun, 2020

Secara umum, potensi penyediaan air bersih oleh ekosistem yang terdapat di Kota Madiun masih dalam kemampuan yang relatif baik yang diindikasikan dengan penyedia air bersih kelas tinggi (856,16 Ha) dan sangat tinggi (1.218,18 Ha). Jika dilihat secara administratif, Kecamatan Kartoharjo memiliki indikasi penyedia air bersih kelas tinggi (232,11 Ha) dan sangat tinggi (519,97 Ha). Kecamatan Manguharjo memiliki indikasi penyedia air bersih kelas tinggi (201,51 Ha) dan sangat tinggi seluas (392,68 Ha) dan Kecamatan Taman memiliki indikasi penyedia air bersih kelas tinggi (445,63 Ha) dan sangat tinggi seluas (279,89 Ha).

a.5.3 Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim

Jasa ekosistem pengaturan iklim merupakan jasa yang dimiliki ekosistem secara alamiah untuk mengatur suhu, kelembaban dan hujan, angin, pengendalian gas rumah kaca dan penyerapan karbon. Kelas jasa ekosistem pengaturan iklim di Kota Madiun cenderung didominasi oleh kelas sedang kemudian diikuti dengan kelas sangat tinggi sebagai luasan tertinggi kedua.

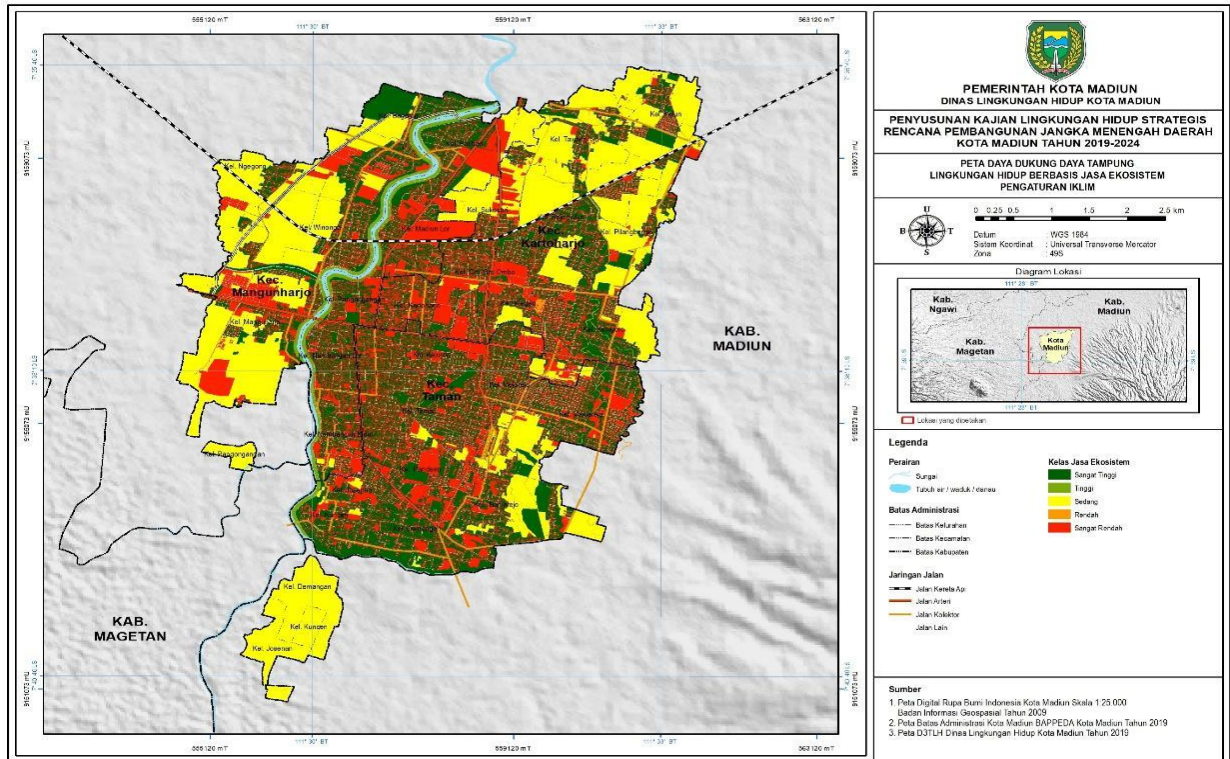
Tabel 2.11

Distribusi Luas Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim (Ha) Tahun 2020

Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Tidak Berhubungan	Total
Kartoharjo	278,04	15,30	503,65	-	276,00	0,00	1.073,00
Manguharjo	305,38	35,46	349,48	49,00	264,68	0,00	1.004,00
Taman	435,26	24,53	250,76	6,40	529,04	0,00	1.246,00
Kota Madiun	1.011,53	77,39	1.126,92	61,36	1.045,80	0,00	3.323,00

Sumber: Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kota Madiun, 2020

Jasa ekosistem pengaturan iklim di Kota Madiun cenderung didominasi oleh kelas sedang kemudian diikuti dengan kelas sangat tinggi sebagai luasan tertinggi kedua. Jasa ekosistem kelas sedang memiliki luasan sebesar 1.126,92 Ha, sedangkan kelas sangat tinggi memiliki luasan sebesar 1.045,80 Ha. Tingginya kontribusi jasa ekosistem pengaturan iklim kelas sedang di Kota Madiun disebabkan karena sebagian besar wilayah ini berada pada dataran yang relatif rendah dan penggunaan lahan didominasi dengan lahan sawah.



Sumber: Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kota Madiun, 2020

Gambar 2.4

Peta Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim di Kota Madiun

a.5.4 Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir

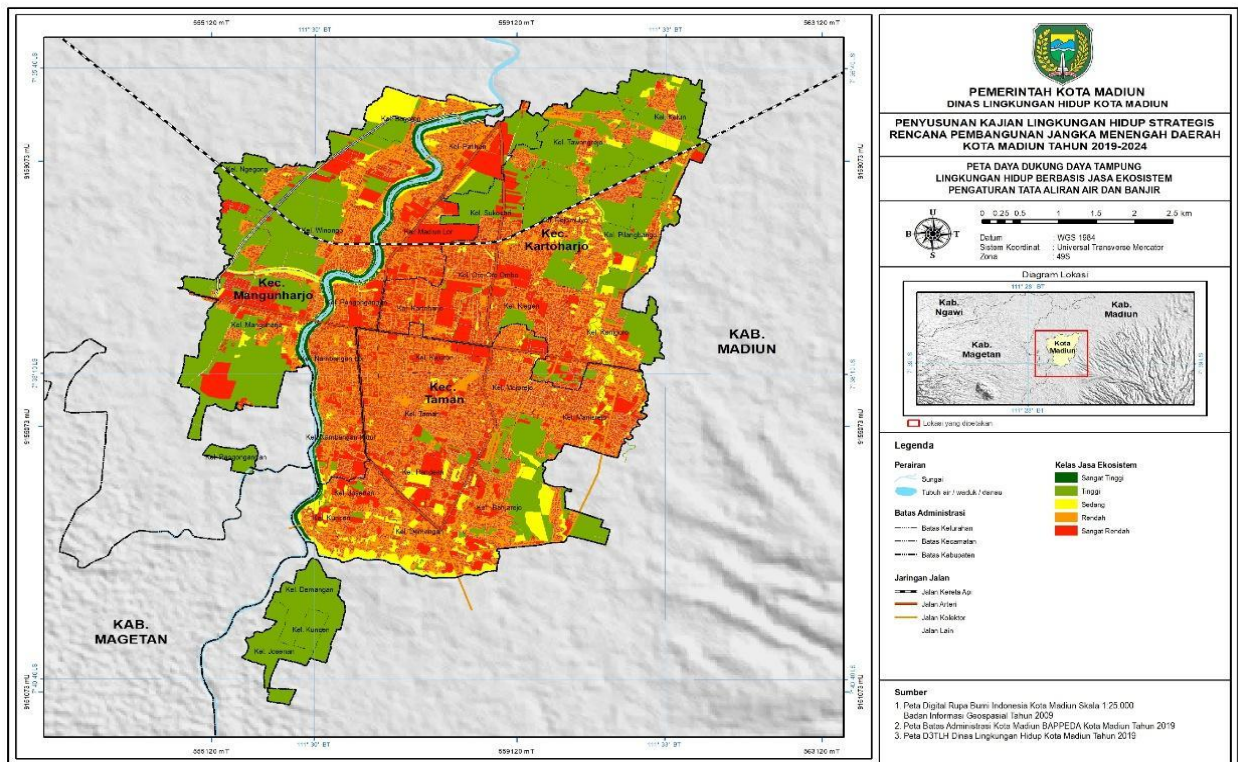
Jasa ekosistem ini merupakan jasa yang dimiliki ekosistem untuk berbagai macam kepentingan seperti penyimpanan air, pengendalian banjir, dan pemeliharaan ketersediaan air. Jasa ekosistem pengaturan tata aliran air dan banjir berhubungan langsung dengan siklus hidrologi. Siklus hidrologi merupakan pergerakan air dalam hidrosfer yang meliputi proses penguapan (evaporasi), pendinginan massa udara (kondensasi), hujan (presipitasi), dan pengaliran (flow). Siklus hidrologi yang normal akan berdampak pada pengaturan tata air yang baik. Pengaturan tata air dengan siklus hidrologi sangat dipengaruhi oleh keberadaan tutupan lahan dan fisiografi (bentangalam) suatu wilayah.

Tabel 2.12

Distribusi Luas Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Air dan Banjir (Ha) Tahun 2020

Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Tidak Berhubungan	Total
Kartoharjo	279,58	4,16	41,26	748,00	-	0,00	1.073,00
Mangunharjo	306,23	6,23	51,04	561,19	79,30	0,00	1.004,00
Taman	435,11	19,41	74,86	700,14	16,48	0,00	1.246,00
Kota Madiun	1.013,90	28,38	165,66	2.010,35	104,70	0,00	3.323,00

Sumber: Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kota Madiun, 2020



Sumber: Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kota Madiun, 2020

Gambar 2.5

Peta Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir di Kota Madiun

Luas kelas jasa ekosistem pengaturan tata aliran air dan banjir didominasi oleh kelas tinggi (2.010,35 Ha) dan kelas sangat rendah (1.013,90 Ha). Hal ini menunjukkan bahwa potensi pengaturan tata aliran air dan banjir didominasi dengan kelas tinggi karena memiliki tutupan lahan sawah yang cukup besar. Besarnya tutupan lahan tersebut menandakan bahwa ekosistem mampu melakukan penyimpanan air, pemeliharaan ketersediaan air, dan pengendalian air dengan baik.

a.5.5 Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana

Daya dukung daya tampung lingkungan hidup berbasis jasa ekosistem pengaturan pencegahan perlindungan bencana adalah kemampuan ekosistem untuk melakukan pencegahan dan perlindungan suatu wilayah terhadap bencana khususnya bencana alam. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana suatu wilayah adalah ekoregion bentanglahan dan tutupan vegetasi. Ekoregion bentanglahan struktural dan denudasional dengan morfologi perbukitan umumnya rawan terjadi bencana. Perbukitan memiliki kondisi topografi dengan kemiringan lereng yang curam hingga sangat curam sehingga berpotensi mengalami bencana. Keberadaan vegetasi dengan kepadatan tinggi mampu menahan laju air hujan agar dapat mengendalikan bencana, seperti longsor dan banjir.

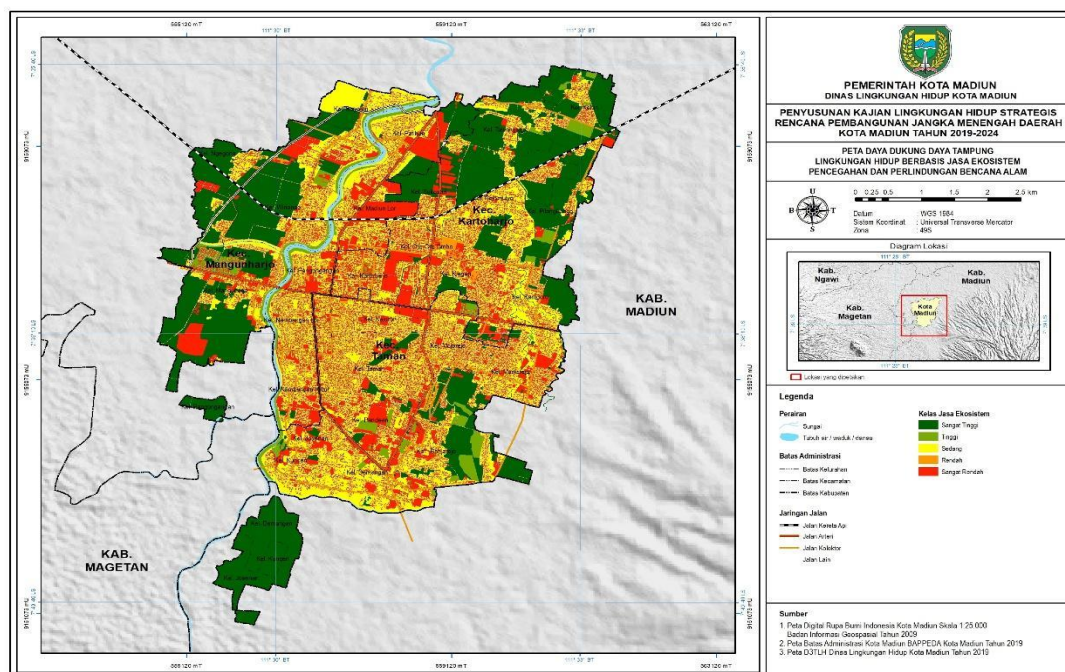
Tabel 2.13

Distribusi Luas Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana (Ha) Tahun 2020

Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Tidak Berhubungan	Total
Kartoharjo	266,66	11,34	256,40	18,64	519,97	0,00	1.073,00
Manguharjo	287,75	9,22	268,12	53,70	385,21	0,00	1.004,00
Taman	425,26	5,05	475,28	49,61	290,80	0,00	1.246,00
Kota Madiun	971,17	26,38	982,55	123,59	1.219,31	0,00	3.323,00

Sumber: Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kota Madiun, 2020

Kota Madiun didominasi oleh kelas sangat tinggi yakni sebesar 1.219,31 Ha yang kemudian diikuti oleh kelas sedang sebagai kelas tertinggi kedua. Luasan jasa ekosistem kelas sedang memiliki luas sebesar 982,55 Ha dan kelas sangat rendah pada posisi yang ketiga terluas sebesar 971,17 Ha. Tingginya jasa ekosistem pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana di Kota Madiun dipengaruhi dengan kondisi morfologi wilayah yang berada pada dataran rendah sehingga secara faktor endogen, Kota Madiun minim bencana longsor. Namun, besarnya kelas sedang dan sangat rendah pada jasa ekosistem pengaturan pencegahan perlindungan bencana ini mendapatkan tekanan dari aktivitas manusianya.



Sumber: Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kota Madiun, 2020

Gambar 2.6

Peta Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana di Kota Madiun

a.5.6 Jasa Ekosistem Budaya Fungsi Tempat Tinggal dan Ruang Hidup

Jasa ekosistem untuk tempat tinggal tercermin dari kelas kemampuan dan kesesuaian lahan yang tinggi, sehingga memberikan dukungan kehidupan secara sosial, ekonomi maupun budaya. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi lingkungan fisik dan geografis serta peluang pengembangan wilayah yang lebih besar. Kondisi bentang alam yang memiliki jasa untuk lokasi tempat tinggal pada umumnya berada pada topografi yang datar hingga landai, didukung oleh material tanah dan batuan dasar yang stabil, terdapat akuifer yang memiliki potensi tinggi dalam penyediaan sumber air bersih, mampu mendukung untuk pembangunan infrastruktur dan aksesibilitas dengan mudah, serta tidak terdapat ancaman bencana alam, seperti: banjir, tanah longsor, dan berisiko terhadap gempa bumi tektonik maupun vulkanik yang rendah.

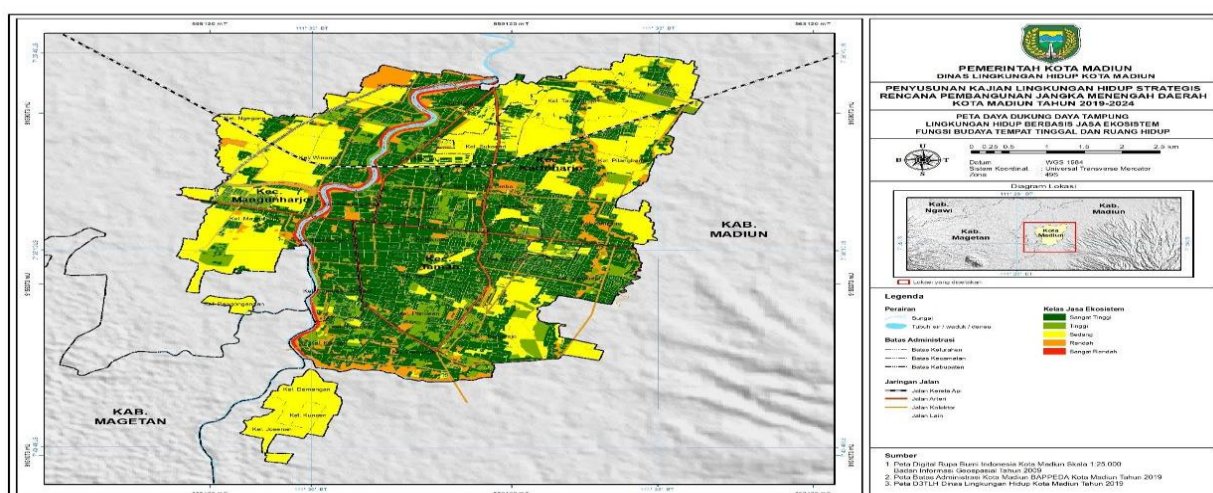
Tabel 2.14

Distribusi Luas Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup (Ha) Tahun 2020

Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Tidak Berhubungan	Total
Kartoharjo	0,00	115,79	513,96	67,39	375,86	0,00	1.073,00
Manguharjo	71,91	123,27	378,19	90,05	340,59	0,00	1.004,00
Taman	16,55	179,71	264,44	154,30	630,99	0,00	1.246,00
Kota Madiun	96,36	415,44	1.182,03	306,40	1.322,78	0,00	3.323,00

Sumber: Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kota Madiun, 2020

Jasa ekosistem budaya untuk tempat tinggal di Kota Madiun didominasi oleh kelas sangat tinggi (1.322,78 Ha) dan kelas sedang (1.182,03 Ha), sehingga secara umum Kota Madiun memiliki ekosistem dengan kemampuan memberikan jasa budaya fungsi tempat tinggal yang tergolong baik.



Sumber: Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kota Madiun, 2020

Gambar 2.7

Peta Jasa Ekosistem Budaya Fungsi Tempat Tinggal dan Ruang Hidup di Kota Madiun

a. 5.7 Jasa Ekosistem Pendukung Biodiversitas

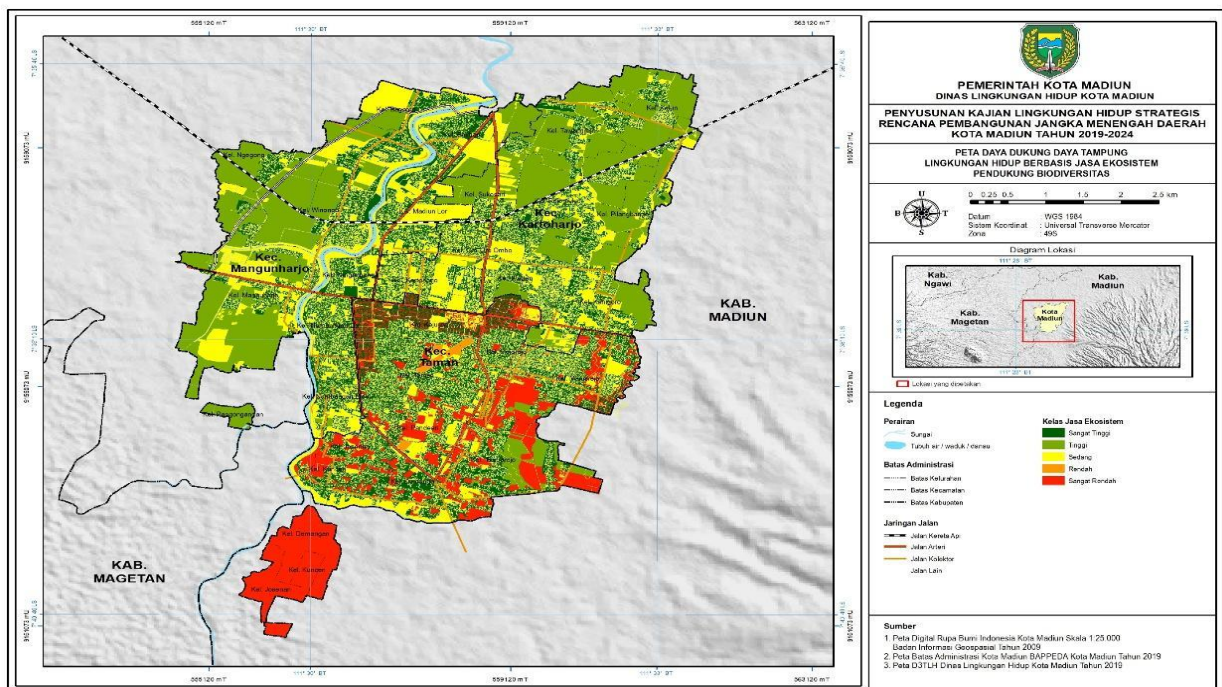
Jasa ekosistem keanekaragaman hayati dipengaruhi oleh faktor endogen dan eksogen yaitu kondisi ekoregion dan penutup lahan di suatu wilayah. Ekoregion merupakan definisi suatu wilayah yang didasarkan pada kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora dan fauna yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup. Keberadaan ekoregion akan mengindikasikan tingkat endemisitas suatu spesies yang dimiliki suatu wilayah. Di mana tingkat endemisitas yang tinggi akan mempengaruhi keanekaragaman hayati yang tinggi. Sementara itu, penutup lahan merupakan tutupan biofisik pada permukaan bumi yang akan mengandung biota, tanah, topografi, air, tanah, dan permukaan yang akan mempengaruhi keberlanjutan keanekaragaman hayati.

Tabel 2.15

Distribusi Luas Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem Pendukung Biodiversitas (Ha) Tahun 2020

Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Tidak Berhubungan	Total
Kartoharjo	33,22	5,69	17,06	542,37	216,06	258,60	1.073,00
Manguharjo	61,28	6,48	37,73	400,52	218,43	279,56	1.004,00
Taman	91,54	8,55	44,70	320,93	412,02	368,26	1.246,00
Kota Madiun	183,88	20,65	99,52	1.285,88	829,58	903,49	3.323,00

Sumber: Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kota Madiun, 2020



Sumber: Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kota Madiun, 2020

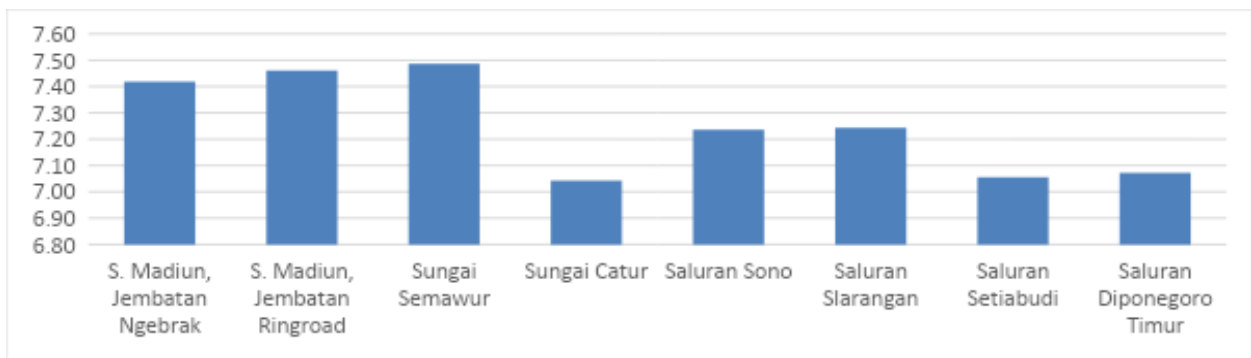
Gambar 2.8

Peta Jasa Ekosistem Pendukung Biodiversitas di Kota Madiun

Kelas jasa tinggi mendominasi di Kota Madiun yaitu menempati luasan 1.285,88 Ha. Kelas jasa sangat tinggi juga menempati luasan yang cukup luas yaitu 829,58 Ha. Kelas jasa rendah memiliki luasan terkecil yaitu 20,65 Ha. Kelas jasa tinggi paling luas terdapat pada Kecamatan Kartoharjo yang menempati luasan 542,37 Ha. Kecamatan Taman memiliki luasan kelas jasa sangat tinggi yang tertinggi di Kota Madiun yang mencakup luasan 412,02 Ha.

a. 1 Analisis Daya Tampung Kualitas Air Sungai

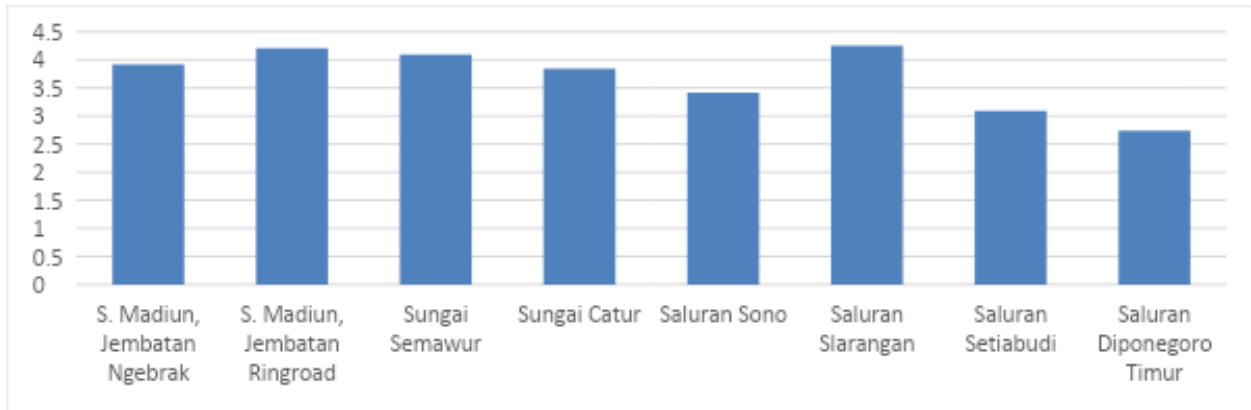
Sumber daya air permukaan utama di Kota Madiun meliputi 3 sungai yakni Sungai Madiun, Sungai Catur dan Sungai Semawur serta satu embung yakni Embung Pilangbango. Kota Madiun sendiri terletak di bagian tengah Daerah Aliran Sungai (DAS) Madiun yang menjadi titik kumpul air dari kawasan hulunya di daerah sekitarnya. Sumber pencemar pada Sungai Madiun sendiri dapat berasal dari aktivitas pertanian, perkebunan atau domestik dari kawasan sekitarnya atau aktivitas perkotaan yang lebih intensif di Kota Madiun sendiri. Hasil pengamatan yang telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun menunjukkan kualitas air sungai yang relatif baik jika digunakan untuk kegiatan non domestik namun beberapa lokasi memiliki kualitas air yang kurang baik jika digunakan untuk air minum.



Sumber : Dinas IKLHD Kota Madiun Tahun 2020

Gambar 2.9
pH rata-rata Air Sungai di Kota Madiun

Air sungai di Kota Madiun memiliki pH air yang cukup baik yakni pada kisaran 6,5-8,5 yang masih layak digunakan untuk air bersih. Gambar 2.40. memperlihatkan nilai rata-rata pH air sungai di beberapa lokasi di Kota Madiun. Rata-rata pH paling rendah terdapat di Sungai Catur yakni 7,04 dan Saluran Setiabudi yakni 7,24. Kondisi ini menunjukkan air sungai di Kota Madiun memiliki pH yang relatif normal dengan pH paling rendah umumnya terdapat pada Bulan Februari atau Maret. Sedangkan kandungan oksigen terlarut atau *Dissolved Oxygen* (DO) berkisar antara 2 sampai 5 yang menunjukkan kecukupan oksigen yang berperan dalam penyerapan makanan organisme perairan sungai di Kota Madiun.

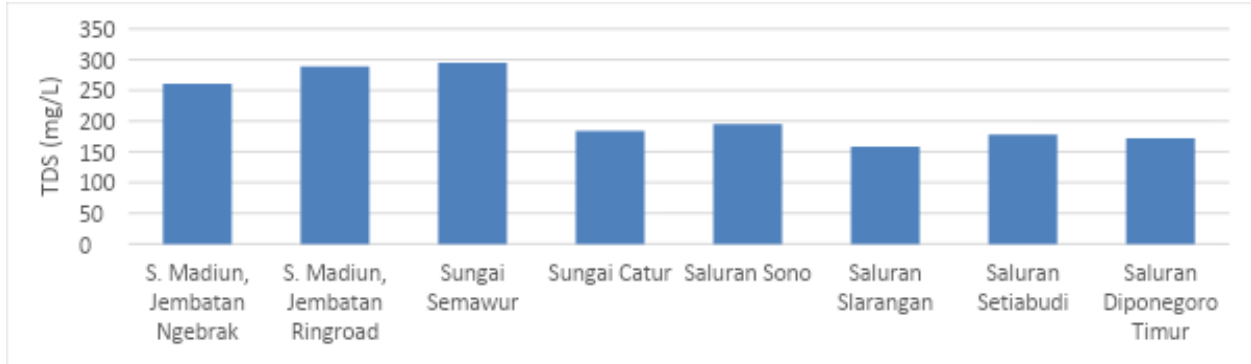


Sumber: Dinas IKLHD Kota Madiun Tahun 2020

Gambar 2.10
Kandungan Oksigen Terlarut Air Sungai di Kota Madiun

Parameter fisik kualitas air seperti *Total Dissolved Solid* (TDS) atau jumlah padatan terlarut ditunjukkan pada Gambar 2.42. Secara umum nilai TDS air sungai di Kota Madiun kurang dari 500 mg/L artinya masih di bawah ambang batas kelayakan yakni 1000 mg/L. Kondisi ini menunjukkan bahwa jumlah zat padat yang terlarut pada air sungai di Kota Madiun masih belum memberikan dampak pencemaran yang signifikan.

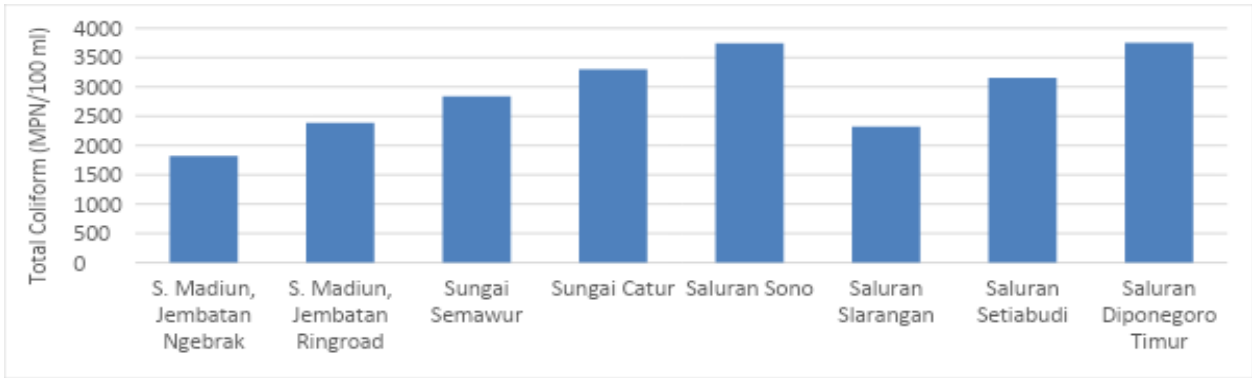
Nilai rata-rata TDS paling tinggi terdapat pada Sungai Semawur yakni 295 mg/L dan paling rendah pada Saluran Slarangan sebesar 158 mg/L.



Sumber: Dinas IKLHD Kota Madiun Tahun 2020

Gambar 2.11
Total Dissolved Solid (TDS) Air Sungai di Kota Madiun

Parameter mikrobiologi pada air sungai diamati melalui kandungan bakteri coliform yang menjadi salah satu indikator utama pencemaran akibat aktivitas domestik atau lainnya pada tubuh air. Sungai-sungai yang melewati kawasan permukiman atau perkotaan umumnya pasti memiliki kandungan bakteri coliform yang tinggi. Secara umum kandungan *Total Coliform* pada air sungai di Kota Madiun dibawah ambang batas untuk penggunaan non domestic namun untuk keperluan domestik seperti air minum perlu adanya proses pengolahan air yang lebih lanjut. Rata-rata *Total Coliform* paling tinggi terdapat di Saluran Sono sebesar 3744 MPN/100 ml dan Saluran Diponegoro Timur sebesar 3752 MPN/100 ml.



Sumber: Dinas IKLHD Kota Madiun Tahun 2020

Gambar 2.12
Total Coliform Air Sungai di Kota Madiun

Kualitas air sungai dapat diukur menggunakan indeks pencemaran air. Hasil analisis indeks pencemaran air sungai berdasarkan peruntukan atau pemafaatannya dapat dilihat pada Tabel 2.82. Secara umum kualitas air sungai di Kota Madiun yang diamati memiliki kelas tercemar ringan untuk pemanfaatan budidaya perairan maupun domestik kecuali di Saluran Setidabudi dan Saluran Diponegoro Timur.

Sedangkan untuk peruntukkan lainnya seperti pengairan tanaman air sungai di Kota Madiun secara umum masih cukup aman untuk digunakan. Lokasi kualitas air yang cukup rendah terdapat di Saluran Setiabudi dan Saluran Diponegoro Timur yang terletak di tengah kota. Kedua saluran tersebut melewati pusat-pusat perkotaan seperti pasar, pusat perdagangan, PKL, pertokoan, hotel dan kegiatan jasa lainnya. Sumber pencemar dapat berasal dari polutan yang berasal dari jalan, pusat-pusat kegiatan serta limbah rumah tangga yang terbuang ke dalam saluran tersebut.

Tabel 2.16
Analisis Pencemaran Air Sungai di Kota Madiun

Lokasi Pengamatan	Peruntukan Air Minum		Peruntukan Budidaya Perairan		Peruntukan Lainnya	
	Indeks Pencemar	Kelas	Indeks Pencemar	Kelas	Indeks Pencemar	Kelas
Sungai Madiun, Jembatan Ngebrak	3.3	Tercemar ringan	1.9	Tercemar ringan	0.7	Aman
Sungai Madiun, Jembatan Ringroad	3.8	Tercemar ringan	2.1	Tercemar ringan	0.8	Aman
Sungai Semawur	4.4	Tercemar ringan	2.4	Tercemar ringan	0.7	Aman
Sungai Catur	3.9	Tercemar ringan	2.0	Tercemar ringan	0.8	Aman
Saluran Sono	4.6	Tercemar ringan	2.5	Tercemar ringan	0.9	Aman
Saluran Slarangan	3.2	Tercemar ringan	2.0	Tercemar ringan	0.7	Aman
Saluran Setiabudi	5.5	Tercemar sedang	2.9	Tercemar ringan	1.2	Tercemar ringan
Saluran Diponegoro Timur	5.5	Tercemar sedang	2.5	Tercemar ringan	0.9	Aman

Sumber: Analisis Indeks Pencemar Data IKPLHD, 2021

Beberapa indikator yang mempengaruhi nilai indeks pencemar air sungai di Kota Madiun antara lain *Total Suspended Solid (TSS)*, DO, BOD, COD dan kandungan bakteri coli untuk penggunaan air domestik. Indeks pencemaran juga cenderung mengalami kenaikan pada bulan Januari-Februari dan beberapa juga terdapat pada bulan Agustus-September. Umumnya pada aliran sungai terjadi kenaikan kandungan bakteri coli, BO COD serta penurunan kandungan oksigen (DO) pada bulan-bulan tersebut, sedangkan pada saluran air drainase terjadi kenaikan TSS yang cukup signifikan disertai kandungan bakteri coli serta BOD dan COD pada bulan-bulan tersebut.

b. 2 Kondisi dan Analisis Daya Tampung Sampah

Sampah merupakan material hasil sisa terakhir dari suatu proses produksi atau pengolahan lainnya yang sudah tidak dimanfaatkan. Material sisa tersebut dapat memiliki berbagai wujud antara lain padat, cair atau gas. Pengelolaan sampah di Kota Madiun menghadapi tantangan yakni semakin pesatnya aktivitas kegiatan ekonomi. Semakin pesat aktivitas di suatu daerah, maka semakin banyak pula sampah yang dihasilkan. Umumnya pertumbuhan penduduk menjadi faktor pemicu meningkatkannya volume timbulan sampah yang dihasilkan di suatu daerah. Gambar 2.44. menunjukkan adanya peningkatan jumlah penduduk yang diiringi dengan kenaikan volume timbulan sampah yang dihasilkan di Kota Madiu pada Tahun 2016-2020.

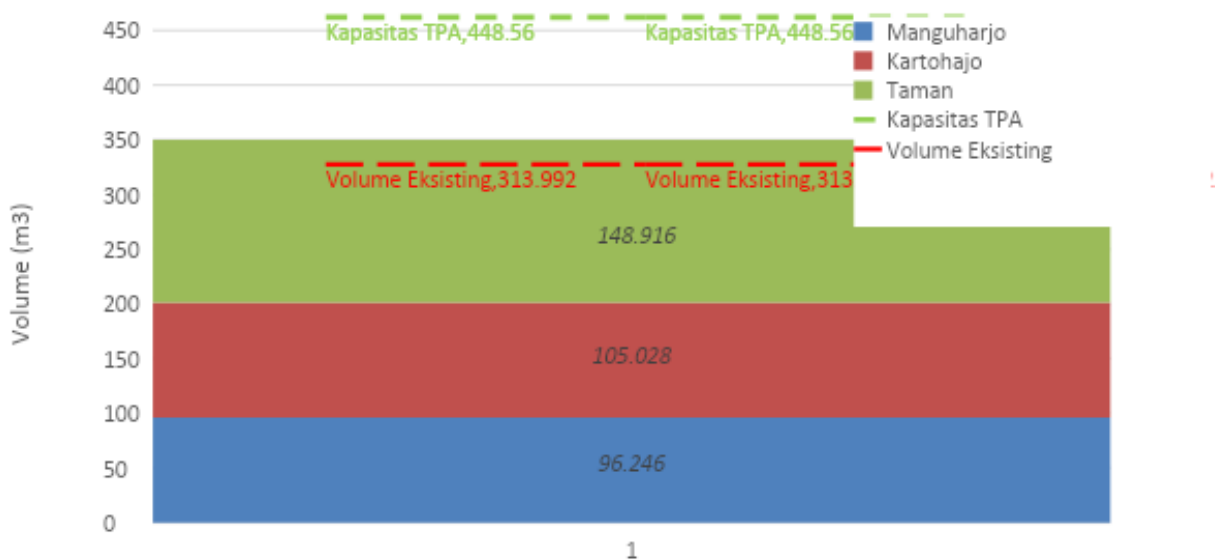


Sumber: Dinas IKLHD Kota Madiun Tahun 2020

Gambar 2.13

Perkiraan jumlah timbulan sampah per hari di Kota Madiun, Tahun 2016-2020

Peningkatan jumlah penduduk dari 209.797 jiwa pada Tahun 2018 menjadi 210.115 jiwa pada Tahun 2019 dengan penambahan sebesar 318 jiwa penduduk. Kenaikan jumlah penduduk di Kota Madiun mempengaruhi jumlah timbulan sampah yang mengalami peningkatan timbulan sampah per hari dari 326.551 m³/hari (tahun 2018) menjadi 350.190 m³/hari (tahun 2019) atau sebesar 23,639 m³/hari. Selain jumlah penduduk yang tinggi ternyata faktor kesadaran untuk melakukan pengelolaan sampah masih rendah. Pengelolaan sampah untuk menuju konsep 3R memerlukan pengetahuan dan keterampilan masyarakat.



Sumber: Analisis Data DIKPLHD, 2021

Gambar 2.14
Kapasitas Tampungan Sampah di Kota Madiun

Kota Madiun memiliki sebuah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yakni TPA Winongo dengan luas 6,4 Ha yang dapat menampung sampah hingga 100 m³/hari. Kapasitas TPA Winongo saat ini diperkirakan hanya mampu menampung 448,56 m³ sampah dengan volume eksisting saat ini telah mencapai 313,992 m³. Artinya 70% - 80% daya tampung TPA Winonongo saat ini sudah terisi, sehingga jika tidak dilakukan strategi pengelolaan sampah yang efektif kapasitas TPA akan terlampaui dalam beberapa tahun ke depan. Sebagian besar dari areal TPA Winongo merupakan zona pasif sampah di TPA Winongo yang seadanya diupayakan diubah menjadi bukit hijau. Terdapat berbagai fasilitas pengolahan sampah di TPA Winongo yang belum optimal sehingga meningkatkan laju penumpukan sampah. Permasalahan yang kerap dialami adalah timbulnya bau dari TPA Winongo khususnya ketika musim penghujan akibat volume tumpukan sampah yang besar.

Pengelolaan sampah dalam lingkup masyarakat sudah banyak dilakukan melalui berbagai kegiatan fisik oleh instansi dan pendirian bank-bank sampah. Bank sampah banyak didirikan oleh masyarakat, baik yang sudah berbadan hukum maupun belum berbadan hukum. Data tahun 2018 menunjukkan terdapat 10 bank sampah yang sudah berbadan hukum. Bank sampah yang ada saling bersinergi satu sama lain, terdapat bank sampah yang hanya berfokus dalam pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang untuk kemudian dijual kepada bank sampah yang telah dapat mengolah sampah yang ada menjadi berbagai macam kerajinan.

Namun demikian masih terdapat terdapat timbulan sampah yang belum dilakukan pengelolaan, sehingga terbuang secara bebas yang akhirnya masuk ke saluran drainase dan/atau sungai yang dapat meningkatkan risiko terhadap banjir.

2.1.1.7 Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kota Madiun pada dasarnya dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kawasan terbangun (pemukiman dengan fasilitas penduduknya) dan kawasan tidak terbangun (sawah, tegalan/kebun, perkebunan, kolam/empang). Ketersediaan lahan dapat memberikan gambaran potensi dan arahan bagi kawasan yang dapat dikembangkan/dibudidayakan atau karena keterbatasannya tidak dapat dikembangkan sama sekali berdasarkan faktor-faktor fisik dasar.

Tabel 2.17
Penggunaan Lahan di Kota Madiun, 2016-2020

No.	Penggunaan Lahan	Luas Lahan (Ha)				
		2016	2017	2018	2019	2020
Kawasan Tidak Terbangun						
1.	Sawah	1041	906	905	892	892
2.	Lahan Pertanian Non Sawah	300	406	372	372	372
Kawasan Terbangun						
1.	Permukiman beserta Fasilitasnya	1.982	2.011	2.046	2.059	2.059
Luas Lahan Keseluruhan		3.323	3.323	3.323	3.323	3.323

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun, 2021

Sebagai kota urban, Kota Madiun pada tahun 2020 memiliki kawasan terbangun seluas 2.059 Ha atau 61,96% dari luas kota. Sedang untuk kawasan yang tidak terbangun meliputi 1.264 Ha atau sekitar 38,04% dari luas kota yang terbagi atas sawah seluas 892 Ha dan lahan pertanian non sawah seluas 372 Ha. Tabel 2.4 di atas, dalam 5 (lima) tahun ini terjadi alih fungsi lahan dari kawasan tidak terbangun menjadi kawasan terbangun sebesar 77 Ha atau secara rata-rata 15,4 Ha setiap tahunnya. Secara fisik, Kota Madiun mempunyai karakteristik wilayah perkotaan terbangun yang relatif tinggi. Hal ini sejalan dengan kebijakan dan peraturan daerah yang berupaya untuk terus menerus meningkatkan infrastruktur sarana dan prasarana, guna optimalisasi pelayanan publik bagi masyarakat.

Dari sudut pandang sosial ekonomi, fungsi dasar Kota Madiun adalah memberikan penghasilan penduduk melalui produksi barang dan jasa. Kondisi tersebut seiring dengan tujuan dan sasaran dari peningkatan kinerja ekonomi, sosial, daya saing daerah dengan sasaran meningkatkan pemerataan dan kesejahteraan masyarakat. Bila dipetakan, pola penggunaan tanah/lahan kawasan terbangun Kota Madiun dapat dijabarkan sebagai berikut:

Pusat kegiatan dan orientasi utama

Kawasan yang merupakan pusat kota berada di sekitar alun-alun kota, sepanjang Jalan Panglima Sudirman, Jalan Agus Salim, Jalan Pahlawan, Jalan Kolonel Marhadi, dan Jalan Cokroaminoto. Kegiatan yang berada di pusat kota berupa kegiatan perdagangan dan jasa serta pelayanan umum (perkantoran dan fasilitas sosial). Pusat kota merupakan kawasan yang memiliki intensitas perkembangan yang cukup tinggi, kepadatan penduduk pada kawasan permukiman dan transportasi terpadat. Kecenderungan yang terjadi pada wilayah pusat kota di masa mendatang adalah bergesernya kegiatan pelayanan umum menjadi kegiatan komersial (perdagangan dan jasa), selain itu terdapat kemungkinan meluasnya wilayah pusat kota yang ditandai dengan berkembangnya kegiatan perdagangan dan jasa pada jalur-jalur utama wilayah kota.

Sub pusat pelayanan

Sub pusat pelayanan ini dapat mengurangi terjadinya pemusatan kegiatan komersial pada wilayah pusat kota. Di Kota Madiun, sub pusat pelayanan yang berkembang adalah sub pelayanan bagian selatan yaitu berupa kawasan perdagangan dan jasa di sepanjang Jalan Ponorogo, sub pelayanan bagian barat yaitu di sepanjang Jalan Mayjen Sungkono, dan sub pelayanan bagian timur yaitu di sepanjang Jalan Setiabudi. Melihat sub pusat pelayanan di Kota Madiun tersebut, dapat dikatakan bahwa kegiatan yang mendominasi adalah kegiatan perdagangan dan jasa.

Kawasan terbangun lainnya

Kawasan terbangun lainnya yang berupa perumahan, akhir-akhir ini mulai berkembang dengan pesat di Kota Madiun. Lokasi kawasan terbangun berupa perumahan cenderung menyebar ke arah bagian timur dan utara.

Tabel 2.18

Luas Lahan Sawah Menurut Kecamatan dan Jenis Pengairan di Kota Madiun (Ha),
Tahun 2020

No.	Kecamatan	Irigasi	Non Irigasi	Jumlah	Persentase
1.	Manguharjo	292	0	292	32,73
2.	Taman	218	0	218	24,43
3.	Kartoharjo	382	0	382	42,84
Kota Madiun		892	0	892	100,00

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun, 2021

2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Kota Madiun menjadi pusat wilayah pengembangan Madiun dan sekitarnya yang memiliki fungsi antara lain sebagai pusat pelayanan pemerintahan, perdagangan, jasa, industri, pendidikan, kesehatan bagi daerah hinterland. Kota Madiun sebagai pusat kegiatan wilayah (PKW) di Provinsi Jawa Timur bagian barat yang berfungsi sebagai pelayanan dalam lingkup provinsi.

Dalam rangka mendukung pertumbuhan daya saing daerah, penataan ruang menjadi salah satu hal penting dalam perencanaan pembangunan di masa mendatang dengan tetap mempertimbangkan kondisi geografis dan potensi pengembangan perekonomian di Kota Madiun sebagai wilayah urban. Hal yang harus diupayakan dalam pengembangan wilayah adalah pengembangan dan pemerataan infrastruktur serta meningkatkan kapasitas ekonomi di beberapa wilayah prioritas.

Bila tingkat pelayanan infrastruktur dasar di semua wilayah masih rendah, maka akan berdampak pada terbatasnya kemampuan penduduk setempat dalam mengembangkan potensi sumber daya yang dimiliki. Implementasi pembangunan di Kota Madiun pada masa mendatang diharapkan mampu berkembang guna meningkatkan hidup dan tingkat kesejahteraan masyarakat sesuai dengan potensi dimiliki.

Dalam dokumen RTRW Kota Madiun Tahun 2010-2030, terdapat beberapa kawasan di Kota Madiun yang telah dipersiapkan sebagai kawasan pengembangan pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, industri, pariwisata, permukiman, dan pengembangan aktivitas lainnya. Walaupun Kota Madiun adalah daerah urban perkotaan, dimana titik utama pembangunan tidak bertumpu pada sektor pertanian. Namun, dalam rangka mendukung upaya kedaulatan pangan yang merupakan prioritas nasional, Kota Madiun tetap berupaya menjaga eksistensi sektor pertanian, perkebunan, perikanan maupun peternakan. Selanjutnya, pengembangan kawasan di Kota Madiun diharapkan fokus terhadap pengembangan komoditas unggulan. Komoditas unggulan akan membantu meningkatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota

Rencana sistem pusat pelayanan kota diikuti dengan pengembangan infrastruktur kota untuk menunjang kegiatan perkotaan sesuai dengan fungsi Daerah sebagai Pusat Kegiatan Wilayah Madiun dan sekitarnya. Sistem pusat pelayanan Kota terdiri atas : a. Rencana pusat pelayanan; b. Rencana sub pusat pelayanan kota; c. Rencana pusat lingkungan.

Rencana pusat kota berada di sepanjang Jalan Panglima Sudirman, Jalan Agus Salim, Jalan Pahlawan, Jalan Kolonel Marhadi, dan Jalan Cokroaminoto. Kegiatan yang berada di pusat kota diarahakan untuk kegiatan perdagangan dan jasa serta pelayanan umum (perkantoran dan fasilitas sosial).

Rencana sub pusat pelayanan ini dapat mengurangi terjadinya pemusatan kegiatan pada wilayah pusat kota. Rencana sub pusat pelayanan terdiri dari sub pusat pelayanan I, sub pusat pelayanan II dan sub pusat pelayanan III. Sub pusat pelayanan I berada di Kelurahan Manguharjo, sub pusat pelayanan II berada di Kelurahan Kartoharjo, dan sub pusat pelayanan III berada di Kelurahan Taman dengan cakupan layanan tingkat kecamatan sampai dengan regional. Rencana pusat lingkungan berada di beberapa kelurahan di masing – masing Kecamatan.

Tabel 2.19
Rencana Sub Pusat Pelayanan Kota Madiun, 2020

No.	Sub Pusat Pelayanan	Luas Wilayah Kecamatan (Ha)	Fungsi Pelayanan
1.	Sub Pusat Pelayanan Kota Manguharjo	1.004	Pusat pemerintahan skala kecamatan Pusat pelayanan industry skala regional Pusat pelayanan perhubungan Pusat pelayanan kesehatan skala regional Pusat pelayanan kegiatan pertahanan dan keamanan Pusat pelayanan pendidikan skala regional
2.	Sub Pusat Pelayanan Kota Kartoharjo	1.073	Pusat pemerintahan skala kecamatan Pusat pelayanan perdagangan dan jasa skala regional Pusat pelayanan kegiatan wisata skala regional Pusat pelayanan kesehatan skala regional Pusat pelayanan kegiatan pertahanan dan keamanan Pusat pelayanan perumahan berkepadatan sedang Pusat pelayanan pendidikan skala regional
3.	Sub Pusat Pelayanan Kota Taman	1.246	Pusat pemerintahan skala kota Pusat pelayanan perdagangan dan jasa Pusat pelayanan industri kecil dan rumah tangga Pusat pelayanan perhubungan Pusat pelayanan kegiatan pertahanan dan keamanan Pusat pelayanan pendidikan skala regional Pusat pelayanan perumahan berkepadatan tinggi-sedang Lahan pertanian pangan berkelanjutan

Sumber: RTRW Kota Madiun Tahun 2010-2030

Rencana Pengembangan Wilayah

Rencana pengembangan wilayah, diantaranya diarahkan pada kawasan pertanian, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, dan kawasan permukiman.

Kawasan pertanian

Kawasan peruntukan pertanian meliputi: a. pertanian tanaman pangan (sawah); b. lahan perkebunan; dan c. lahan budidaya perikanan darat. Pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan (sawah) sebagai lahan pertanian berkelanjutan di Daerah meliputi sawah Kelurahan Kejuron, sawah Kelurahan Pangongangan, sawah Kelurahan Demangan, sawah Kelurahan Kuncen, sawah Kelurahan Josenan, sawah Kelurahan Manguharjo, sawah Kelurahan Kelun, sawah Kelurahan Tawangrejo, dan sawah Kelurahan Rejomulyo dengan luas kurang lebih 720 Ha.

Lahan perkebunan yang dapat dikonversi menjadi kawasan terbangun berupa perumahan maupun fasilitas penunjang perkotaan lainnya dengan luas kurang lebih 40 Ha berada di Kelurahan Patihan, Kelurahan Madiun Lor, dan Kelurahan Banjarejo. Lahan budidaya perikanan darat diarahkan di Kelurahan Nambangan Lor.

Sampai dengan Tahun 2020, luasan lahan pertanian di Kota Madiun seluas 892 Ha. Prosentase sawah terluas berada di Kecamatan Kartoharjo sebesar 42,84%

Tabel 2.20

Luas Lahan Sawah Menurut Kecamatan dan Jenis Pengairan di Kota Madiun (Ha), Tahun 2020

No.	Kecamatan	Irigasi	Non Irigasi	Jumlah	Persentase
1.	Manguharjo	292	0	292	32,73
2.	Taman	218	0	218	24,43
3.	Kartoharjo	382	0	382	42,84
Kota Madiun		892	0	892	100,00

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun, 2021

Kawasan untuk pengembangan industri

Sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di bagian barat Provinsi Jawa Timur, maka sektor industri menjadi salah satu sektor ekonomi unggulan di Kota Madiun. Dalam rangka pengembangan sektor industri besar, menengah dan kecil/rumah tangga, Pemerintah Kota Madiun sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, telah menyiapkan lahan peruntukan industri untuk pengembangan industri seluas 111 Ha. Rencana kawasan peruntukan industri meliputi: a. industri besar; b. industri menengah; dan c. industri kecil/rumah tangga

Kawasan pariwisata

Rencana pengembangan kawasan peruntukan pariwisata meliputi: a. kawasan pariwisata budaya; b. kawasan pariwisata kota; dan c. kawasan pariwisata buatan. Beberapa lokasi wisata yang termasuk dalam rencana pengembangan antara lain yaitu wisata Benteng Pendem dan bangunan perumahan peninggalan Belanda yang merupakan kawasan wisata budaya. Salah satu lokasi kawasan pariwisata kota yang termasuk dalam rencana pengembangan adalah kawasan Jalan Pahlawan, Jalan Cokroaminoto, Jalan Agus Salim dan kawasan Pasar Burung. Kawasan pariwisata buatan berupa wisata ekologi, wisata rekreasi dan wisata pendidikan. Wisata ekologi yang dimaksud adalah hutan kota di Kelurahan Kartoharjo, Kelurahan Pandean, Kelurahan Ngegong, Kelurahan Sukosari, dan Kelurahan Tawangrejo, sedangkan wisata rekreasi tersebar berupa taman bermain dan ruang terbuka hijau. Wisata pendidikan diarahkan pada industri perkeretaapian di Jalan Yos Sudarso.

Kawasan permukiman

Kota Madiun merupakan pusat pertumbuhan bagian Barat Provinsi Jawa Timur. Hal ini mendorong perkembangan pembangunan fasilitas pelayanan dan sektor strategis lainnya. Faktor tersebut menjadi salah satu daya tarik bagi penduduk di wilayah sekitar untuk masuk dan bermukim di Kota Madiun.

Rencana permukiman di Kota Madiun diarahkan untuk perumahan kepadatan rendah sampai dengan kepadatan tinggi dan arahan rencana pengembangan perumahan secara vertikal melalui pembangunan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) yang dilakukan secara terpadu dengan lingkungan sekitarnya. Kawasan permukiman dilengkapi dengan sarana dan prasarana permukiman sesuai hirarki dan tingkat pelayanan masing-masing.

2.1.3 Kawasan Rawan Bencana

Wilayah Kota Madiun mempunyai potensi terjadinya bencana alam, yakni berupa angin puting beliung dan banjir, serta bencana non alam yaitu kebakaran. Kawasan – kawasan yang berpotensi terjadinya bencana alam dan non alam di Kota Madiun yaitu:

1. Kawasan Rawan Angin Puting Beliung

Kawasan rawan bencana alam berupa angin puting beliung di Kota Madiun yaitu menyebar di wilayah Kota Madiun yang merupakan wilayah dengan dataran landai, adapun berada pada Kecamatan Taman (Kelurahan Manisrejo dan Kelurahan Banjarejo), Kecamatan Manguharjo (Kelurahan Sogaten dan Kelurahan Ngegong), serta Kecamatan Kartoharjo (Kelurahan Pilangbango, Kelurahan Kelun, Kelurahan Kanigoro).

2. Kawasan Rawan Banjir

Banjir yang terjadi di Kota Madiun dipengaruhi oleh kondisi alam, dimana tingginya curah hujan terkadang menimbulkan banjir atau genangan di beberapa tempat. Kondisi ini juga disebabkan kondisi fisik wilayah Kota Madiun yang umumnya datar. Adanya Kali Madiun di tengah kota juga mempengaruhi terjadinya bencana banjir ini, karena adanya luapan air sungai di saat curah hujan yang tinggi. Keberadaan anak sungai lainnya di Kota Madiun, serta kondisi sistem drainase kota yang kurang mendukung juga berpengaruh terhadap adanya kawasan-kawasan yang mengalami banjir atau genangan. Adapun genangan air kawasan di Kota Madiun terjadi di seluruh kecamatan di Kota Madiun dengan intensitas yang berbeda.

3. Kawasan Rawan Bencana Kebakaran

Kebakaran yang terjadi di Kota Madiun dipengaruhi kondisi alam yang cukup kering, namun dominasi besar tetap ditimbulkan akibat aktivitas manusia. Kejadian kebakaran banyak terjadi pada lahan terbuka ataupun perumahan padat, apabila terjadi pada perumahan padat diperlukannya alat pemadam kebakaran yang mumpuni membelah kepadatan perumahan ataupun penyediaan alat pemadaman kebakaran mandiri tiap kelurahan. Adapun lokasi yang memiliki rawan bencana kebakaran ialah hampir berada diseluruh kelurahan yang ada di Kota Madiun.

Intensitas bencana alam di Kota Madiun Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.21
Intensitas Bencana di Kota Madiun, 2016-2020

No.	Jenis Bencana	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Banjir	9	3	4	33	5
2.	Angin Puting Beliung	15	7	15	72	33
3.	Kebakaran*	12	29*	86*	79*	69*

Sumber: BPBD Kota Madiun dan *SatPol PP Kota Madiun, 2021

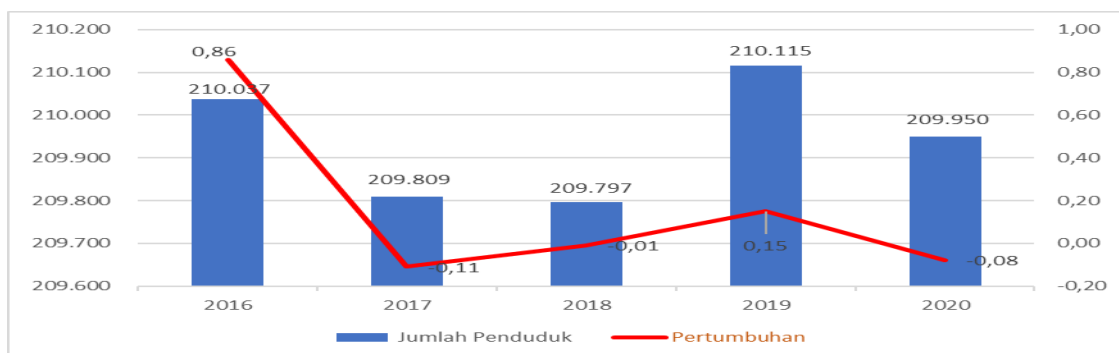
2.1.4 Kondisi Demografi

Penduduk sebagai aktor utama pembangunan merupakan modal dasar keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Besaran, komposisi, dan distribusi penduduk akan mempengaruhi struktur ruang dan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. Seluruh aspek pembangunan memiliki korelasi dan interaksi dengan kondisi kependudukan yang ada, sehingga informasi tentang demografi memiliki posisi strategis dalam penentuan kebijakan.

Salah satu aspek pembangunan yang berkorelasi dengan kondisi kependudukan adalah Sumber Daya Manusia (SDM) Kualitas SDM yang dimiliki suatu wilayah dapat menentukan maju dan mundurnya pembangunan wilayah tersebut. Penduduk dibagi atas kelompok-kelompok tertentu, atau dapat dikatakan atas komposisi penduduk tertentu. Susunan penduduk tersebut menggambarkan pengelompokan penduduk menurut karakteristik yang sama seperti jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan, dan mata pencaharian.

Semakin banyak penduduk, semakin banyak pula jumlah tenaga kerja yang dapat menggerakkan pembangunan wilayah. Namun, penambahan penduduk yang berlebihan dapat menimbulkan permasalahan dalam pembangunan. Ketika penambahan penduduk tidak dapat dikendalikan, maka akan timbul berbagai masalah diantaranya:

1. tekanan penduduk dan lingkungan, akibat berkurangnya lahan pertanian dan rusaknya lingkungan akibat pemukiman padat dan perilaku manusia yang tidak peduli terhadap lingkungan,
2. kemiskinan, terdapat penduduk tidak dapat memenuhi kebutuhan perekonomian,
3. pengangguran terjadi karena banyaknya pencari kerja dibandingkan lapangan kerja yang tersedia,
4. rawan pangan terjadi karena kebutuhan pangan masyarakat meningkat sedangkan luas lahan pertanian semakin berkurang dan berdampak pada produksi kebutuhan pangan seluruh penduduk.



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, 2021 (diolah)

Gambar 2.15
Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Kota Madiun, 2016-2020

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, jumlah penduduk Kota Madiun pada tahun 2020 sebanyak 209.950 jiwa. Selama periode tersebut, laju pertumbuhan penduduk tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 0,86%. Namun, pada tahun 2017 dan 2018 pertumbuhan penduduk di Kota Madiun mengalami penurunan masing-masing sebesar -(0,11)%, dan -(0,01)%. Pada tahun 2019, pertumbuhan penduduk Kota Madiun meningkat sebesar 0,15%, namun pada Tahun 2020 mengalami penurunan -(0,08)%.

Dilihat dari kepadatan penduduknya, di Kota Madiun pada tahun 2020 kepadatan penduduknya sebesar 6.318 jiwa/Km². Kepadatan penduduk tertinggi berada pada Kecamatan Taman 7.175 jiwa/Km², disusul Kecamatan Manguharjo 6.263 jiwa/Km² dan Kecamatan Kartoharjo 5.374 jiwa/Km². Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.22
Jumlah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan, 2020

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk	Persentase (%)	Kepadatan Penduduk (Jiwa per Km ²)
1.	Taman	12,46	89.398	42,58	7.175
2.	Kartoharjo	10,73	57.668	27,47	5.374
3.	Manguharjo	10,04	62.884	29,95	6.263
Kota Madiun		33,23	209.950	100,00	6.318

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, 2021

Karakteristik penduduk yang penting adalah struktur umur dan jenis kelamin. Karakteristik penduduk berpengaruh penting terhadap proses demografi dan tingkah laku sosial ekonomi penduduk. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki di Kota Madiun pada tahun 2020 adalah sebanyak 102.751 jiwa, sedang jumlah penduduk perempuan sebanyak 107.199 jiwa.

Tabel 2.23
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kota Madiun, 2020

KECAMATAN	KELURAHAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
KARTOHARJO	ORO-ORO OMBO	3,353	3,596	6,949
	SUKOSARI	1,488	1,616	3,104
	KLEGEN	4,360	4,444	8,804
	REJOMULYO	5,207	5,482	10,689
	PILANGBANGO	2,317	2,314	4,631
	TAWANGREJO	2,100	2,124	4,224
	KANIGORO	4,588	4,767	9,355
	KARTOHARJO	2,554	2,672	5,226
	KELUN	2,252	2,434	4,686
KARTOHARJO		28.219	29.449	57.668

KECAMATAN	KELURAHAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
MANGUHARJO	MANGUHARJO	3,964	4,028	7,992
	SOGATEN	2,133	2,119	4,252
	PATIHAN	2,705	2,772	5,477
	NGEGONG	1,547	1,599	3,146
	WINONGO	3,844	4,099	7,943
	MADIUN LOR	3,294	3,622	6,916
	PANGONGANGAN	1,756	1,905	3,661
	NAMBANGAN LOR	6,564	6,703	13,267
	NAMBANGAN KIDUL	4,964	5,266	10,23
MANGUHARJO		30.771	32.113	62,884
TAMAN	MOJOREJO	5,624	6,044	11,668
	PANDEAN	5,197	5,433	10,63
	BANJAREJO	4,659	4,579	9,238
	KUNCEN	702	734	1,436
	MANISREJO	8,008	8,349	16,357
	KEJURON	4,760	5,196	9,956
	JOSENAN	3,714	3,769	7,483
	DEMANGAN	4,706	4,912	9,618
	TAMAN	6,391	6,621	13,012
TAMAN		43.761	45.637	89.398
KOTA MADIUN		102,751	107,199	209.950
Rasio Jenis Kelamin		95,85		

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, 2021

Berdasarkan data tersebut, maka rasio jenis kelamin di Kota Madiun pada tahun 2020 adalah sebesar 95,85 yang berarti bahwa dalam 100 penduduk perempuan di Kota Madiun terdapat 96 penduduk laki-laki. Data mengenai rasio jenis kelamin berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil. Selain itu, dinamika kependudukan dalam waktu tertentu dapat dilihat menggunakan angka rasio jenis kelamin. Rasio jenis kelamin juga dapat membantu mengetahui sebab-sebab perubahan nilai rasio jenis kelamin dan mencari solusi yang tepat atas permasalahan kependudukan. Sebagai contoh, perubahan rasio jenis kelamin dikarenakan tingginya angka kematian penduduk perempuan. Hal tersebut dapat disebabkan karena tingkat kesehatannya sangat rendah, maka perlu dilakukan usaha untuk meningkatkan derajat kesehatan.

Berdasarkan kelompok usia, jumlah penduduk Kota Madiun paling banyak berada pada kelompok usia produktif (usia 15-55 tahun) yaitu sebanyak 123.903 jiwa. Penduduk diatas 60 tahun sebanyak 32.124 jiwa, kelompok usia 40-45 tahun yakni 16.982 jiwa diikuti kelompok usia 35-40 tahun yaitu sebanyak 16.559 jiwa.

Tabel 2.24
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Usia, 2016-2020

No.	Golongan Usia (Tahun)	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	0 ≤ 5	12.313	12.169	12.215	12.212	12.145
2	5 ≤ 10	17.517	14.186	14.106	14.162	13.863
3	10 ≤ 15	13.354	16.033	15.520	15.494	15.308
4	15 ≤ 20	21.168	17.519	17.246	16.924	16.502
5	20 ≤ 25	11.530	14.873	15.147	15.434	15.656
6	25 ≤ 30	16.454	13.862	14.020	14.042	14.439
7	30 ≤ 35	13.484	15.284	14.605	14.147	13.839
8	35 ≤ 40	21.043	17.499	17.340	17.086	16.559
9	40 ≤ 45	13.028	16.542	16.660	16.998	16.982
10	45 ≤ 50	18.108	15.975	15.744	15.618	15.663
11	50 ≤ 55	11.045	13.688	13.945	14.417	14.263
12	55 ≤ 60	14.194	12.244	12.357	12.195	12.607
13	60 ≤ 65	26.799	9.946	10.161	10.395	10.733
14	65 ≤ 70		7.074	7.380	7.717	7.951
15	70 ≤ 75		4.519	4.631	4.856	4.958
16	≥ 75		8.396	8.720	8.418	8.482
Jumlah		210.037	209.809	209.797	210.115	209.950

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, 2021

Implikasi dari penduduk muda adalah besarnya persentase penduduk yang bersiap memasuki batas penduduk usia kerja (*economically active population*) dan besarnya rasio ketergantungan (*dependency ratio*). Batas bawah usia kerja di Indonesia adalah umur 15 tahun. Setelah memasuki usia tersebut maka mereka disebut sebagai penduduk usia kerja. Bila penduduk usia kerja tidak melakukan salah satu aktivitas dalam kelompok bukan angkatan kerja maka termasuk ke dalam kriteria angkatan kerja. Bila dalam angkatan kerja tidak melakukan aktivitas kerja maka kelompok ini termasuk ke dalam kriteria pengangguran (*unemployment*). Dengan jumlah penduduk muda yang besar tentu potensi jumlah penduduk yang akan terjun ke dalam angkatan kerja juga besar, untuk itu pemerintah harus bersiap untuk menyediakan lapangan kerja untuk menampung jumlah angkatan kerja yang besar ini. Hal yang akan terjadi bila permintaan akan tenaga kerja lebih kecil dari jumlah pencari kerja adalah terciptanya pengangguran.

Tabel 2.25
Jenis Pekerjaan Penduduk Kota Madiun (orang), 2016-2020

No.	Jenis Pekerjaan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Belum/Tidak	35.539	38.358	36.721	36.390	37.270
2.	PRT	35.328	34.773	34.965	34.412	34.227
3.	Pelajar/Mahasiswa	45.352	44.032	45.119	44.940	43.596
4.	Pensiunan	6.399	6.270	6.237	6.095	6.028
5.	Jasa	9.105	8.951	8.449	8.449	8.522
6.	Karyawan	43.735	43.557	44.679	46.311	47.191
7.	Buruh	4.690	4.578	4.489	4.390	4.316
8.	Wiraswasta	19.060	18.826	18.945	18.994	19.117
9.	Aparatur Negara	10.395	10.073	9.838	9.624	9.415
10.	Lain-lain	434	391	355	510	268
	TOTAL	210.037	209.809	209.797	210.115	209.950

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, 2021

Berdasarkan jenis pekerjaannya, terlihat bahwa sebagian besar penduduk di Kota Madiun bekerja pada sektor swasta. Jumlah penduduk Kota Madiun pada tahun 2020 yang bekerja menjadi karyawan sebanyak 47.191 orang, PRT sebanyak 34.227 orang, dan buruh sebanyak 4.316 orang. Dengan posisi Kota Madiun sebagai kota jasa dan perdagangan di bagian barat Provinsi Jawa Timur, maka penduduk yang memiliki pekerjaan sebagai wiraswasta jumlahnya cukup banyak yaitu 19.117 orang dan yang bekerja di sektor jasa sebanyak 8.522 orang. Sementara itu, penduduk yang bekerja pada sektor publik baik menjadi PNS maupun anggota TNI/Polri (Aparatur Negara) secara keseluruhan adalah sebanyak 9.415 orang yang terdiri dari PNS sebanyak 6.655 orang, anggota TNI sebanyak 1.731 orang, dan anggota Polri sebanyak 1.029 orang.

Tabel 2.26
Jumlah Penduduk Menurut Agama (orang), 2016-2020

No.	Agama	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Islam	190.239	190.235	190.392	190.919	191.044
2.	Kristen	12.309	12.134	12.061	11.974	11.818
3.	Hindu	232	230	233	223	212
4.	Budha	750	738	697	680	651
5.	Katolik	6.468	6.435	6.375	6.286	6.189
6.	Konghucu/lain-lain	39	37	39	33	36

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, 2021

Berdasarkan data tentang pemeluk agama Islam dan kepercayaan di Kota Madiun dapat dilihat bahwa sebagian besar penduduk Kota Madiun beragama Islam dengan jumlah mencapai 191.044 orang pada tahun 2020. Sedangkan di tahun yang sama, jumlah penduduk yang memeluk agama Kristen sebanyak 11.818 orang, Katolik sebanyak 6.189 orang, Budha sebanyak 651 orang, Hindu sebanyak 212 orang, dan Konghucu/lainnya sebanyak 36 orang.

Perkembangan jumlah penduduk yang sejalan dengan pertumbuhan jumlah pemeluk agama, maka pemerintah Kota Madiun melalui bagian perekonomian dan kesejahteraan rakyat sekretariat daerah memfasilitasi pemberian bantuan berupa hibah perlengkapan untuk tempat ibadah.

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro yang dapat digunakan untuk mengukur pembangunan ekonomi di suatu wilayah, ketika pertumbuhan ekonomi meningkat maka pembangunan ekonomi pada daerah tersebut juga meningkat. Nilai pertumbuhan ekonomi didapatkan dari perhitungan pertumbuhan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) di suatu wilayah. Definisi PDRB sendiri adalah jumlah nilai tambah yang timbul dari produksi seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah pada periode tertentu. PDRB dapat juga diartikan sebagai nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh sektor perekonomian atau unit ekonomi di suatu wilayah pada periode tertentu.

Dalam perhitungannya, PDRB dibedakan menjadi dua, yaitu PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku dihitung berdasarkan harga tahun berjalan yang digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar yakni tahun 2010, perhitungan ini digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil yang tidak dipengaruhi oleh kenaikan harga atau inflasi. Dengan demikian laju pertumbuhan ekonomi yang dihitung dengan data PDRB atas dasar harga konstan ini dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk menentukan arah kebijakan pembangunan yang akan datang.



Sumber: BPS Kota Madiun, 2021 (diolah)

Gambar 2.16

Perkembangan Nilai PDRB ADHB, PDRB ADHK, dan Laju Pertumbuhan Kota Madiun Tahun 2016-2020

PDRB Kota Madiun selama periode 2016-2020 menunjukkan tren meningkat, baik PDRB ADHB maupun PDRB ADHK. PDRB ADHB Kota Madiun pada tahun 2016 mencapai Rp 10,192 triliun dan pada tahun 2019 meningkat menjadi Rp 14,107 triliun. Namun, pada tahun 2020 PDRB ADHB mengalami penurunan hingga sehingga menjadi sebesar Rp. 13,769 triliun. Tidak jauh berbeda dengan PDRB ADHB, PDRB ADHK Kota Madiun pada tahun 2016 dari 8,455 triliun menjadi sebesar Rp 10,623 triliun pada tahun 2019. PDRB ADHK mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp. 10,262 triliun. Peningkatan nilai PDRB ADHK selama periode 2016-2020 mengindikasikan bahwa perekonomian Kota Madiun terus mengalami pertumbuhan setiap tahunnya. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Kota Madiun selama periode 2016-2020 adalah sebesar 4,31 % per tahun.

Pertumbuhan ekonomi tertinggi Kota Madiun selama periode tersebut terjadi pada tahun 2018 yang mencapai 5,96%, sedang pertumbuhan ekonomi terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu terkontraksi sebesar 3,39%. Pada Gambar di atas, terlihat dalam kurun waktu 2016-2020, pertumbuhan ekonomi Kota Madiun cenderung melambat dimana perlambatan tersebut dipengaruhi kondisi ekonomi, dampak pandemi Covid-19 serta menurunnya daya beli masyarakat.

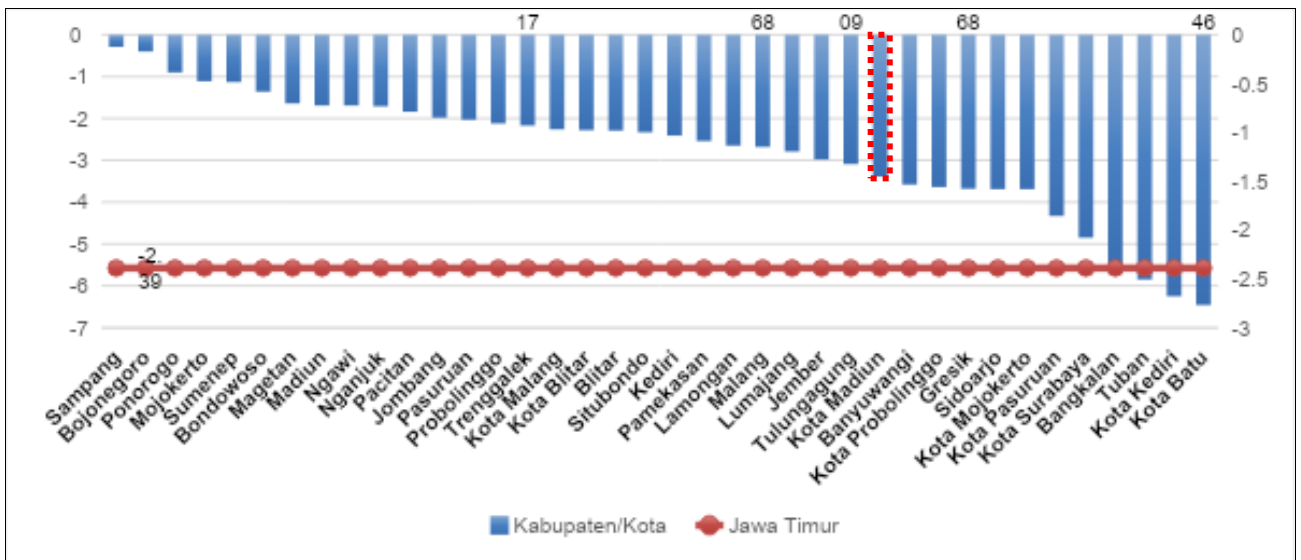
Berdasarkan gambar 2.4, pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur pada tahun 2020 terkontraksi sebesar 2,39%, sedangkan pertumbuhan ekonomi Kota Madiun lebih besar terkontraksinya yaitu 3,39%. Dari 38 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Timur, pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2020 ditempati oleh Kabupaten Sampang yang hanya terkontraksi sebesar 0,29% disusul Kabupaten Bojonegoro terkontraksi sebesar 0,4%. Sedangkan daerah yang terkontraksi paling besar yaitu Kota Batu dengan nilai 6,46 dan Kota Kediri terkontraksi sebesar 6,25%. Posisi Kota Madiun jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Jawa Timur termasuk dalam Kabupaten/Kota yang memiliki pertumbuhan ekonomi cukup rendah atau terkontraksi yang cukup besar.

Tabel 2.27

Pertumbuhan ekonomi regional dan nasional Tahun 2016-2020

Tahun	Nasional	Regional	Kota Madiun
2016	5,03	5,58	5,91
2017	5,07	5,45	5,93
2018	5,17	5,50	5,96
2019	5,02	5,52	5,69
2020	-2,07	-2,39	-3,39

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2021



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2021 (diolah)

Gambar 2.17

Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2020

Tabel 2.28

Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Madiun Tahun 2016-2020

Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019	2020
Kota Madiun	5,91	5,93	5,96	5,69	-3,39
Madiun	5,27	5,42	5,10	5,42	-1,69
Magetan	5,30	5,09	5,25	5,04	-1,64
Ngawi	5,21	5,07	5,26	5,05	-1,69
Pacitan	5,21	4,98	5,51	5,08	-1,84
Ponorogo	5,29	5,10	5,31	5,01	-0,90

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2021

Pertumbuhan ekonomi di wilayah eks Karesidenan Madiun yang meliputi Kabupaten Pacitan, Ponorogo, Madiun, Magetan, Ngawi, dan Kota Madiun, pertumbuhan ekonomi Kota Madiun selama kurun waktu 2016-2019 selalu lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah-wilayah sekitar. Namun, pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kota Madiun yang terdampak paling besar akibat adanya pandemi. Pertumbuhan ekonomi Kota Madiun memiliki nilai terendah dibandingkan Kabupaten di wilayah Karesidenan Madiun. Data mengenai pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota eks Karesidenan Madiun ditampilkan pada tabel di atas.

Tabel 2.29
Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun Menurut Lapangan Usaha (%)
Tahun 2016 – 2020

Lapangan Usaha	Tahun					Rata-rata
	2016	2017	2018	2019	2020	
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,31	-1,78	1,78	-0,94	11,57	0,46
Pertambangan dan Penggalian	1,91	2,31	1,07	2,41	-5,65	2,47
Industri Pengolahan	7,21	8,00	7,01	4,64	-12,84	7,31
Pengadaan Listrik dan Gas	3,86	4,91	5,45	6,69	1,98	5,73
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,82	6,84	4,44	4,52	4,86	4,48
Konstruksi	4,44	5,57	2,03	4,90	-4,71	5,80
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,11	5,83	7,54	6,20	-11,18	5,83
Transportasi dan Pergudangan	7,13	8,18	8,48	9,11	-4,38	7,32
Penyediaan Akomodasi dan Makan minum	7,30	7,47	9,23	8,86	-7,98	7,46
Informasi dan Komunikasi	6,64	6,77	5,34	4,58	16,12	7,75
Jasa Keuangan dan Asuransi	7,11	3,88	4,08	4,79	-0,66	7,53
Real Estate	5,64	4,22	3,57	5,96	0,33	5,98
Jasa Perusahaan	5,94	6,34	5,31	6,10	-3,18	7,04
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,05	2,46	4,48	3,85	-2,23	2,60
Jasa Pendidikan	5,14	4,50	4,21	7,65	1,97	5,51
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,85	5,93	7,38	7,52	9,98	6,91
Jasa Lainnya	4,17	4,14	5,74	6,92	-10,68	4,21
PDRB	5,90	5,93	5,96	5,69	-3,39	6,42

Sumber: BPS Kota Madiun, 2021

Berdasarkan tabel di atas, PDRB Kota Madiun menurut harga berlaku, pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha selama periode 2016-2020, dapat disimpulkan bahwa seluruh sektor yang ada menunjukkan pertumbuhan yang fluktuatif di setiap tahunnya. Pada tahun 2020 pada semua sektor mengalami penurunan kecuali pada sektor pertanian, Informasi dan jasa kesehatan. Kondisi ini disebabkan adanya pandemi Covid-19.

Dari keseluruhan sektor tersebut, tiga sektor dengan rata-rata pertumbuhan tertinggi selama periode tersebut adalah sektor informasi dan komunikasi sebesar 7,75% per tahun, sektor Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 7,53% per tahun, dan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yang tumbuh sebesar 7,46% per tahun. Sementara itu, sektor dengan rata-rata pertumbuhan terendah adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang hanya tumbuh sebesar 0,46% per tahun. Data pertumbuhan sektoral tersebut menunjukkan bahwa Kota Madiun dalam pergerakan ekonominya lebih ditopang sektor tersier yang mana perkembangan sektor perekonomiannya mulai fokus pada sektor perdagangan dan jasa-jasa.

Pada tahun 2020 ketika terjadi pandemi Covid-19, laju pertumbuhan PDRB lapangan usaha tertinggi terjadi pada sektor Informasi dan Komunikasi yaitu sebesar 16,12, diikuti oleh sektor Pertanian sebesar 11,57. Kenaikan pertumbuhan ekonomi sektor pertanian dari tahun 2019 ke 2020 disebabkan oleh pergeseran musim panas tahun 2019 yang menyebabkan panen raya padi terjadi pada Tahun 2020. Jika di dibandingkan dengan tahun 2019, pertumbuhan tertinggi ditempati oleh sektor transportasi dan pergudangan (9,11%), sektor penyediaan akomodasi dan makan minum (8,86%), dan sektor Jasa Pendidikan (7,65%). Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa sektor sekunder di Kota Madiun memiliki kinerja yang lebih baik.

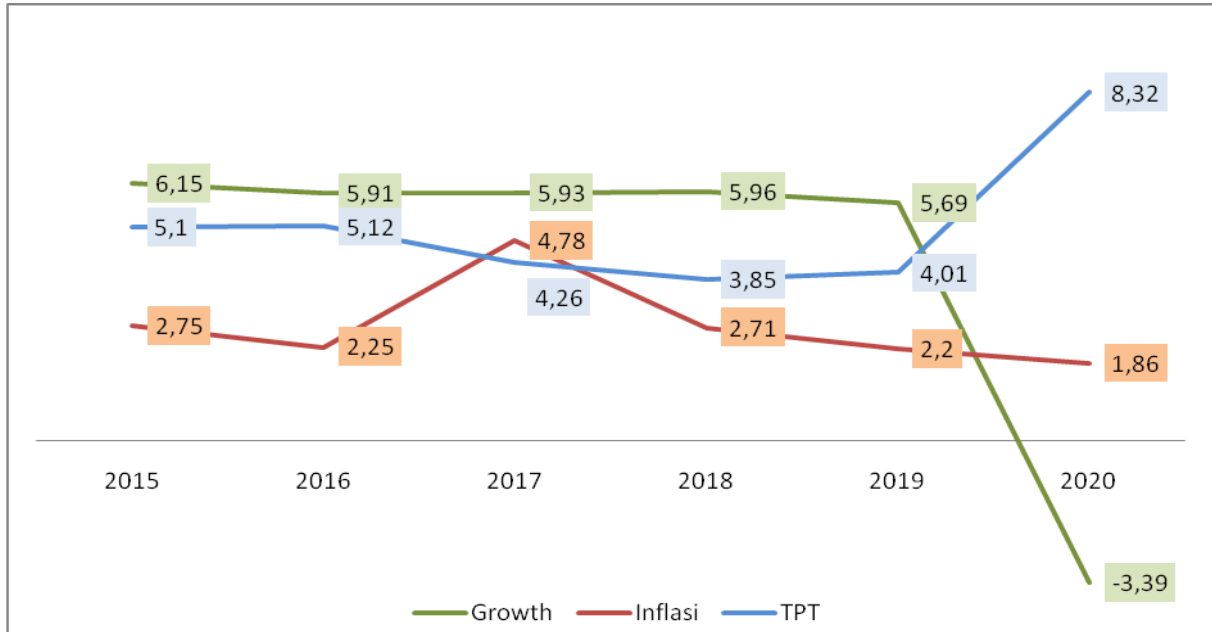
Pertumbuhan yang tinggi pada sektor transportasi dan pergudangan, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, dan sector Jasa Pendidikan ditopang oleh status Kota Madiun sebagai pusat pertumbuhan Jawa Timur bagian barat. Hal tersebut mendukung Kota Madiun sebagai kota transit maupun pusat bisnis yang mendorong berdirinya jasa hotel dan rumah makan. Sedang sektor dengan pertumbuhan terendah yakni sektor Industri Pengolahan (-12,84%) dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (11,18%).

Pertumbuhan PDRB sektor jasa berkontraksi sebesar -10,68%. Padahal sektor ini memiliki share PDRB yang signifikan untuk pertumbuhan ekonomi Kota Madiun. Hal ini dapat dilihat dari Tipologi Klassen Kota Madiun. Sektor Jasa berada pada kuadran I dan II.

Tabel 2.30
Tipologi Klassen Kota Madiun (%)

	Kontribusi Besar (Kontribusi PDRB Sektor \geq Kontribusi PDRB rata - rata)	Kontribusi Kecil (Kontribusi PDRB Sektor $<$ Kontribusi PDRB rata - rata)
Tumbuh Cepat (laju PDRB sektor \geq laju PDRB rata - rata)	Kuadran I (Sektor Prima) 1. Industri Pengolahan 2. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 3. Informasi dan Komunikasi 4. Jasa Keuangan dan Asuransi 5. Jasa Pendidikan	Kuadran II (Sektor Berkembang) 1. Pengadaan Listrik dan Gas 2. Transportasi dan Pergudangan 3. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 4. Jasa Perusahaan 5. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 6. Jasa Lainnya
Tumbuh Lambat (laju PDRB sektor $<$ laju PDRB rata - rata)	Kuadran III (Sektor Potensial) 1. Konstruksi	Kuadran IV (Sektor Tertinggal) 1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 2. Pertambangan dan Penggalian 3. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 4. Real Estat 5. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

Sumber: Bapelitbangda Kota Madiun, 2021 (diolah)



Sumber: BPS Kota Madiun, 2021 (diolah)

Gambar 2.18

Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi dan Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2016-2020

Dari grafik diatas menggambarkan bagaimana pertumbuhan ekonomi, inflasi dan TPT bekerja pada Kota Madiun. Inflasi bergerak searah dengan pertumbuhan ekonomi, inflasi merupakan harga yang harus dibayar suatu daerah apabila ingin menaikkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini merupakan dampak dari demand pull inflation, pertumbuhan ekonomi yang menggeliat akan meningkatkan daya beli masyarakat yang selanjutnya akan meningkatkan agregat demand sehingga berdampak pada kenaikan harga. Begitu juga yang terjadi pada kondisi perekonomian kota Madiun. Pada grafik dapat dilihat bahwa ketika pertumbuhan ekonomi naik maka inflasi juga akan naik. Pandemi yang terjadi pada tahun 2020 telah menguncang perekonomian Kota Madiun dan pertumbuhan ekonomi berkontraksi pada level -3,39. Karakteristik Kota Madiun dengan pendorong perekonomian terbesar pada sektor perdagangan, industri dan jasa membuat Kota Madiun sangat rentan dengan adanya demand shock. Pandemi yang mengharuskan masyarakat dalam kondisi karantina dan pembatasan pergerakan, membuat semua sektor layanan konsumen terhambat. Perdagangan, industri dan jasa adalah sektor yang terpukul berat selain sektor pariwisata, perhotelan dan travel. Dengan terdampaknya sektor perdagangan, industri dan jasa di Kota Madiun maka terjadilah demand shock dengan adanya penurunan pada sisi permintaan yang selanjutnya berdampak pada penurunan harga barang/jasa. Dengan demikian maka pada tahun 2020 inflasi turun sebesar 0,34 basis point dan berada pada level 1,86.

Demikian halnya dengan tingkat pengangguran yang terkontraksi pada masa pandemi. Ketika struktur perekonomian Kota Madiun yang digerakkan oleh sektor perdagangan, industri dan jasa terpuruk akibat pandemi, maka aktifitas perekonomian menjadi lesu, dan memaksa para pengusaha untuk menekan biaya produksi dengan sistem PHK. Pada tahun 2020, penduduk bekerja sebanyak 90.334 jiwa, pengangguran 8.195 jiwa, dan bukan angkatan kerja sebanyak 45.032 jiwa. Dengan demikian, didapatkan hasil bahwa peningkatan jumlah angkatan kerja diikuti dengan peningkatan jumlah pengangguran serta jumlah penduduk bekerja menurun. Jumlah pengangguran dari tahun 2019 naik sebanyak 4.414 jiwa pada tahun 2020. Dominasi status pekerjaan di Kota Madiun dari tahun 2019 dan 2020 adalah sebagai buruh/ karyawan/pegawai yaitu sebesar 50%, disusul dengan status berusaha sendiri sebesar 20%. Melihat struktur status pekerja di Kota Madiun, maka menjadi hal yang wajar jika dampak pandemi yang mengakibatkan peningkatan PHK, telah menjadi penyumbang terbesar naiknya jumlah pengangguran di Kota Madiun. Dan diperparah dengan jumlah lulusan SMA baru yang masuk menjadi angkatan kerja dan masih mencari kerja serta ibu rumah tangga yang terdorong untuk mencari kerja pada masa pandemi.

Untuk mengatasi permasalahan penurunan tingkat inflasi dan kenaikan tingkat pengangguran, maka harus mengatasi akar permasalahan yang disebabkan oleh penurunan sektor unggulan Kota Madiun yakni sektor perdagangan, industri dan jasa yang terdampak pandemi. Intervensi pemerintah sangat diperlukan pada masa pandemi karena pasar telah gagal dalam membentuk stabilitas harga barang dan jasa. Pemerintah hadir dengan kebijakan fiskal dalam mengintervensi perekonomian guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pada sektor perdagangan, Pemerintah Kota Madiun telah memfasilitasi dengan Lapak Kelurahan, Kampung Tematik, Kawasan PSC serta bantuan Gerobak UMKM. Pada sektor industri pemerintah hadir untuk mempermudah proses perizinan. Sektor perdagangan dan sektor industri selanjutnya diharapkan mampu untuk mendongkrak performa sektor jasa. Hal ini karena supply chain barang/jasa sangat panjang dan komplek dan memiliki dampak multiplier effect. Selain itu, pemerintah juga hadir dalam memberikan bantuan sosial untuk mempertahankan daya beli masyarakat. Beragam bantuan sosial telah direalisasikan baik dari pemerintah pusat maupun daerah.

Namun program-program apapun yang telah dikembangkan tidak akan mampu mengatasi dampak adanya demand shock apabila pandemi tidak teratasi, karena terkontraksinya perekonomian kota Madiun pada dasarnya dikarenakan wabah Covid-19. Pemerintah Kota Madiun terus mengedepankan terbentuknya heart imunity di Kota Madiun dengan mencanangkan program percepatan vaksinasi yang diinisiasi oleh Dinas Kesehatan.

2.2.1.2 Struktur Ekonomi

Beragamnya kegiatan perekonomian yang dikembangkan oleh pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat telah memberikan warna pada struktur perekonomian suatu wilayah. Hal ini dipengaruhi oleh potensi sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang tersedia. Salah satu indikator yang sering digunakan untuk menggambarkan struktur ekonomi suatu wilayah adalah distribusi persentase sektoral. Distribusi persentase PDRB secara sektoral menunjukkan peranan masing-masing sektor dalam kontribusinya terhadap PDRB secara keseluruhan. Semakin besar persentase suatu sektor, semakin besar pula pengaruh sektor tersebut dalam perkembangan ekonomi suatu daerah. Tingkat kontribusi terhadap pembentukan PDRB dapat memperlihatkan kontribusi nilai tambah setiap sektor, sehingga akan tampak sektor-sektor yang menjadi pemicu pertumbuhan (sektor andalan) di suatu daerah. Struktur ekonomi yang dinyatakan dalam persentase, menunjukkan besarnya peran masing-masing sektor ekonomi dalam kemampuan menciptakan nilai tambah. Hal tersebut menggambarkan ketergantungan daerah terhadap kemampuan produksi dari masing-masing sektor ekonomi.

Tabel 2.31
Kontribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha di Kota Madiun (%)
Tahun 2016-2020

Lapangan Usaha	Tahun					Rata-rata
	2016	2017	2018	2019	2020	
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,91	0,83	0,80	0,76	0,88	0,88
Pertambangan dan Penggalian	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Industri Pengolahan	16,16	16,40	16,25	16,23	14,74	16,00
Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,22	0,22	0,22	0,21	0,22	0,22
Konstruksi	6,38	6,33	6,10	5,92	5,80	6,24
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	24,96	25,14	25,71	25,93	24,05	25,08

Lapangan Usaha	Tahun					Rata-rata
	2016	2017	2018	2019	2020	
Transportasi dan Pergudangan	3,22	3,36	3,42	3,54	3,47	3,32
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,68	4,73	4,91	4,98	4,80	4,74
Informasi dan Komunikasi	13,63	13,67	13,44	13,12	15,78	13,86
Jasa Keuangan dan Asuransi	10,53	10,38	10,28	10,32	10,33	10,35
Real Estate	2,67	2,63	2,61	2,62	2,77	2,65
Jasa Perusahaan	0,68	0,68	0,68	0,69	0,71	0,68
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,13	3,02	3,04	3,06	3,29	3,16
Jasa Pendidikan	7,72	7,61	7,49	7,45	8,06	7,73
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,27	1,28	1,31	1,31	1,54	1,32
Jasa Lainnya	3,70	3,62	3,64	3,65	3,45	3,65
PDRB	100	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kota Madiun, 2021 (diolah)

Berdasarkan Tabel diatas sektor yang paling dominan terhadap perekonomian Kota Madiun adalah sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dengan rata-rata kontribusi sektor tersebut setiap tahunnya adalah sebesar 25,08% per tahun. Dengan tren yang terus meningkat dalam kurun waktu 2016-2020, kontribusi sektor tersebut di masa mendatang diperkirakan akan terus meningkat dan semakin menguatkan posisi Kota Madiun sebagai kota perdagangan di bagian barat Provinsi Jawa Timur. Kontribusi terbesar kedua adalah sektor industri pengolahan dengan rata-rata kontribusi sebesar 16,00% per tahun dimana kontribusi terbesar sektor ini terjadi pada tahun 2017 yaitu mencapai 16,40%. Jenis industri dengan kontribusi terbesar di sektor ini selama periode 2016-2020 berasal dari industri alat angkutan, industri makanan dan minuman, serta barang dari karet dan plastik. Berdasarkan data-data tersebut, dapat disimpulkan bahwa sektor industri pengolahan di Kota Madiun memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan mengingat kontribusinya yang tinggi terhadap perekonomian.

Selain sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dan industri pengolahan, sektor yang memiliki kontribusi cukup besar terhadap PDRB Kota Madiun adalah sektor informasi dan komunikasi dan sektor jasa keuangan dan asuransi yang masing-masing rata-rata kontribusinya sebesar 13,86% per tahun dan 10,35% per tahun. Sementara itu peranan lapangan usaha lainnya cenderung kecil dimana kontribusinya di bawah 10%. Dalam rangka melihat adanya dominasi atau tidak dalam transformasi/perubahan struktur ekonomi, maka 17 PDRB lapangan usaha dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu:

1. Lapangan Usaha Primer

Lapangan usaha primer yaitu lapangan usaha yang tidak mengolah bahan baku, melainkan hanya mendayagunakan sumber-sumber alam seperti tanah dan segala yang terkandung di dalamnya. Lapangan usaha ini meliputi lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan dan lapangan usaha pertambangan dan penggalian. Rata-Rata kontribusi PDRB lapangan usaha primer sebesar dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 0,88%

2. Lapangan Usaha Sekunder

Lapangan usaha sekunder yaitu lapangan usaha yang mengolah bahan baku baik dari lapangan usaha primer maupun lapangan usaha sekunder itu sendiri, menjadi barang lain yang lebih tinggi nilainya. Lapangan usaha ini meliputi lapangan usaha industri pengolahan: lapangan usaha pengadaan listrik dan gas, lapangan usaha pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, serta lapangan usaha konstruksi. PDRB lapangan usaha sekunder didominasi dari sektor pengolahan, dengan rata – rata kontribusi sebesar 16 %.

3. Lapangan Usaha Tersier

Lapangan usaha tersier yaitu lapangan usaha yang produksinya bukan dalam bentuk fisik, melainkan dalam bentuk jasa. Dalam klasifikasi PDRB yang terbaru lapangan usaha tersier terbagi menjadi sebelas lapangan usaha.

Lapangan usaha ini meliputi lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor; lapangan usaha transportasi dan pergudangan; lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum; lapangan usaha informasi dan komunikasi; lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi; lapangan usaha *real estate*; lapangan usaha jasa perusahaan; lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; lapangan usaha jasa pendidikan; lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial serta lapangan usaha jasa lainnya. PDRB lapangan usaha tersier didominasi oleh sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor dengan rata – rata kontribusi sebesar 25,08 %.

Tabel 2.32
Struktur Perekonomian Kota Madiun Menurut Lapangan Usaha Primer,
Sekunder, dan Tersier (%) Tahun 2016-2020

Sektor	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Primer (%)	0.93	0.98	0.93	0,78	0,9
Sekunder (%)	22.84	22.88	22.84	22,44	20,84
Tersier (%)	76.23	76.14	76.23	76,78	78,26

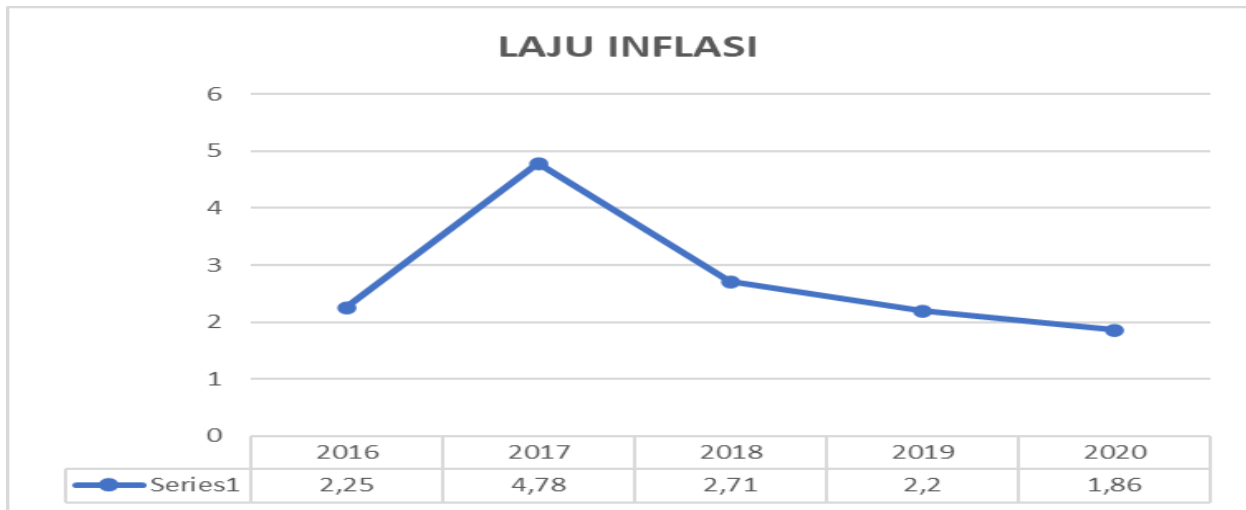
Sumber: BPS Kota Madiun, 2021 (diolah)

Tabel di atas menunjukkan bahwa tidak terjadi pergeseran struktur perekonomian di Kota Madiun selama periode 2016-2020 dimana sektor tersier tetap mendominasi perekonomian, bahkan terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2016, kontribusi sektor tersier di Kota Madiun adalah sebesar 76,23% dan meningkat menjadi sebesar 78,26% pada tahun 2020. Selain tentunya didorong oleh peningkatan kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, peningkatan kontribusi sektor tersier juga didorong semakin meningkatnya kontribusi sektor jasa keuangan dan asuransi. Kontribusi sektor primer terhadap perekonomian Kota Madiun terus mengalami penurunan dari sebesar 0,93% pada tahun 2016 menjadi sebesar 0,90% pada tahun 2020. Sektor sekunder sendiri selama periode 2016-2020 juga mengalami penurunan. Pada tahun 2016, kontribusi sektor sekunder adalah sebesar 22,84% dan menurun menjadi sebesar 20,84% pada tahun 2020.

2.2.1.3 Laju Inflasi

Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa atau turunnya daya jual mata uang suatu negara secara terus menerus. Menurut Bank Indonesia (2016), penyebab timbulnya inflasi dikarenakan adanya tekanan dari sisi penawaran (*cost push inflation*), dari sisi permintaan (*demand pull inflation*), dan dari ekspektasi inflasi.

Terjadinya *demand pull inflation* disebabkan oleh tingginya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya, atau dengan kata lain permintaan total lebih besar daripada kapasitas perekonomian, sedangkan faktor ekspektasi inflasi dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dan pelaku ekonomi terhadap ekspektasi angka inflasi dalam keputusan kegiatan ekonominya, yang mana ekspektasi inflasi dapat cenderung bersifat adaptif atau *forward looking*. Seperti contohnya perilaku pembentukan harga pada saat menjelang hari-hari besar keagamaan, meskipun ketersediaan barang dan jasa diperkirakan cukup untuk mengimbangi kenaikan permintaan, tetapi harga barang dan jasa di hari-hari raya keagamaan cenderung meningkat jauh melebihi kondisi *supply-demand* yang seharusnya.



Sumber: BPS Kota Madiun, 2021 (diolah)

Gambar 2.19
Laju Inflasi Kota Madiun Tahun 2016-2020

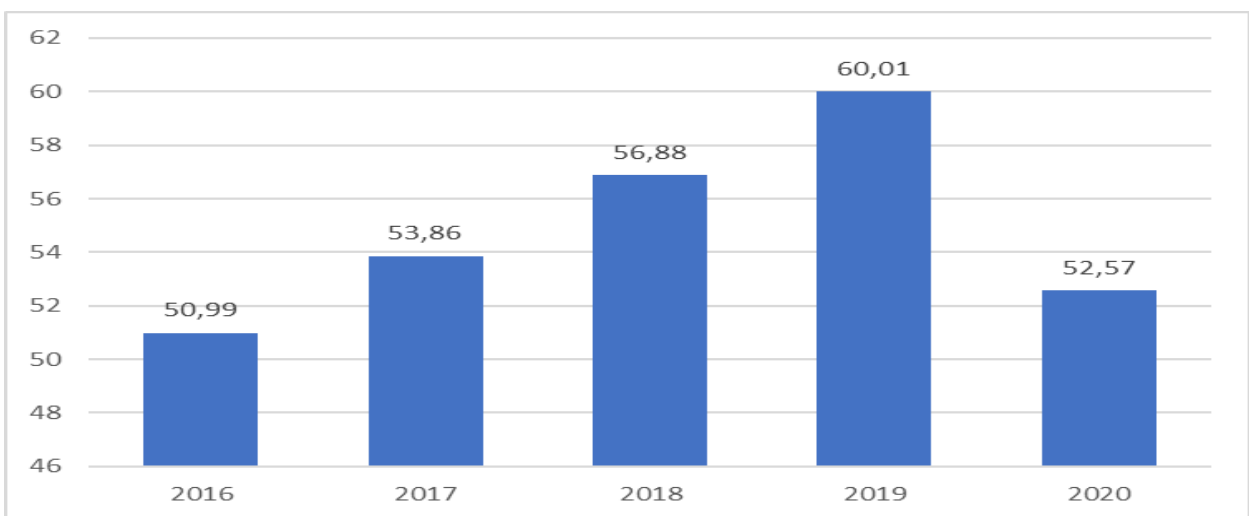
Jika dilihat dari tingkat keparahannya, inflasi dibagi menjadi 4 tingkatan yaitu inflasi ringan ketika laju inflasi kurang dari 10% per tahun, inflasi sedang ketika laju inflasi antara 10-30% per tahun, inflasi berat saat lajunya berada di kisaran 30-100% per tahun, dan inflasi sangat berat/hiperinflasi ketika laju inflasi lebih dari 100% per tahun, komoditi yang menyumbang inflasi adalah BBM, beras, daging ayam dan bawang merah. Pengukuran inflasi di Indonesia hanya dilakukan di 66 kota dan salah satunya adalah Kota Madiun yang dijadikan rujukan bagi beberapa daerah di sekitar Kota Madiun.

Berdasarkan Gambar 2.5, dapat dilihat bahwa pada tahun 2016, laju inflasi Kota Madiun hanya sebesar 2,25%, namun terjadi peningkatan laju inflasi yang cukup pesat di tahun 2017 menjadi 4,78%. Penyebab utama dari kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan harga bahan bakar minyak yang menyebabkan kenaikan pada komoditas lainnya.

Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020 mengalami penurunan yang signifikan menjadi 1,86%. Berdasarkan data BPS tersebut, inflasi di Kota Madiun masih dapat dikendalikan dan masih berada pada kisaran satu digit. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kenaikan harga barang dan jasa di Kota Madiun secara umum belum terlalu mengganggu aktivitas perekonomian dan belum menunjukkan adanya gejala penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat. Terkendalinya laju inflasi Kota Madiun di bawah dua digit dalam kurun waktu 5 tahun terakhir tentunya tidak lepas dari kolaborasi otoritas moneter dengan pemerintah daerah melalui tim pengendali inflasi daerah (TPID).

2.2.1.4 PDRB per Kapita

PDRB per Kapita adalah suatu indikator yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat secara makro. Semakin tinggi PDRB per Kapita, maka tingkat kesejahteraan bertambah baik. Angka ini diperoleh dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk. PDRB per kapita merupakan besaran kasar yang dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk di suatu wilayah pada suatu waktu tertentu. PDRB per kapita diperoleh dengan cara membagi nilai PDRB baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan dengan jumlah penduduk pertengahan tahun di wilayah tersebut.



Sumber: BPS Kota Madiun, 2021 (diolah)

Gambar 2.20

PDRB Per Kapita ADHK di Kota Madiun (Rp juta) Tahun 2016-2020

Tren PDRB per kapita di Kota Madiun selama periode 2016-2019 menunjukkan peningkatan. Namun, pada tahun 2020 dampak pandemi Covid-19 mengakibatkan PDRB perkapita mengalami penurunan hingga Rp 52,57 juta. Pada tahun 2016, PDRB per kapita sebesar Rp 50,99 juta, dan terus meningkat setiap tahunnya menjadi sebesar Rp 60,01 juta pada tahun 2019, namun pada tahun 2020, nilai PDRB per kapita justru mengalami penurunan menjadi sebesar Rp 52,57 juta.

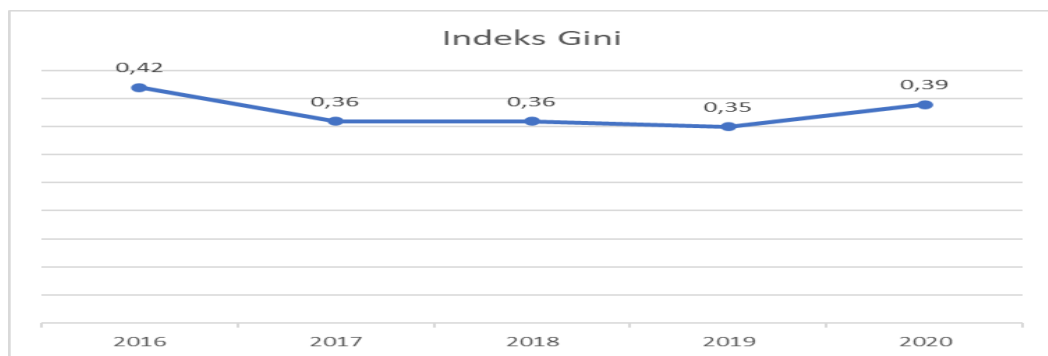
Rata-rata peningkatan PDRB per kapita Kota Madiun dalam kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat semakin membaik dari tahun ke tahun. Hal yang perlu diingat bahwa indikator PDRB per kapita masih banyak mengandung kelemahan dalam analisis tingkat kesejahteraan penduduk suatu daerah. Indikator ini tidak memberikan gambaran riil pendapatan asli masyarakat karena belum memperhitungkan pendapatan yang keluar (*transfer out*) dari luar daerah.

2.2.1.5 Indeks Gini

Indeks Gini adalah Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana tingkat ketidakmerataan (ketimpangan) pendapatan penduduk. Indeks Gini merupakan pengukuran tingkat pemerataan yang dilakukan dengan pendekatan koefisien gini dimana koefisien tersebut dianalisis menggunakan Kurva Lorenz.

Secara umum indeks gini Kota Madiun selama 2016-2020 cenderung fluktuatif, namun masih dalam kategori ketimpangan sedang yaitu berkisar antara 0,3 – 0,5. Pada tahun 2016 indeks gini hanya sebesar 0,42, Pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 0,36, dan 2020 indeks gini mengalami kenaikan menjadi 0,39. Hal tersebut menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi Kota Madiun selama ini ternyata belum mampu memperkecil ketimpangan distribusi pendapatan.

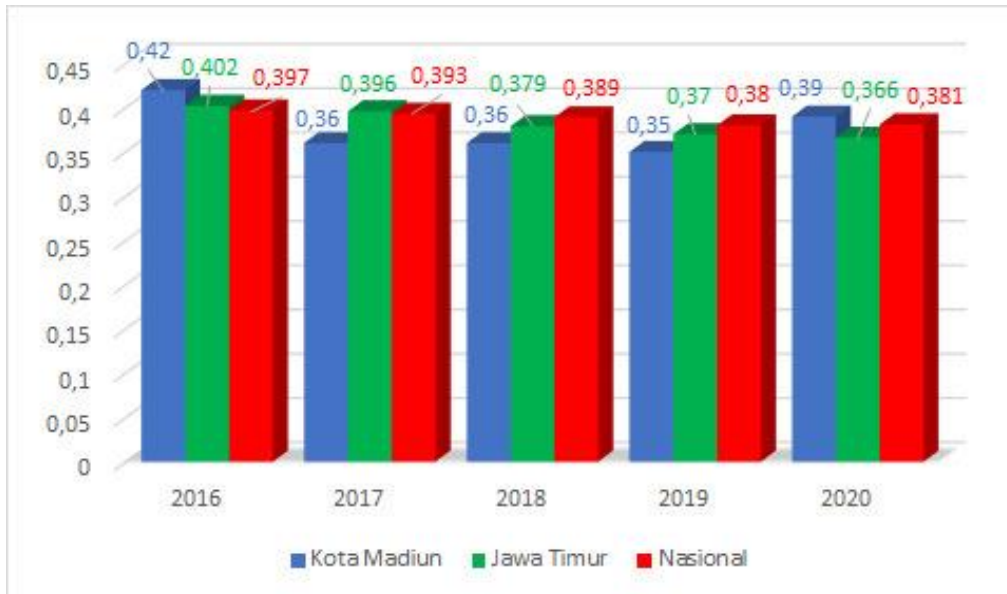
Fenomena ini perlu diperhatikan dengan seksama dan dicarikan strategi kebijakan yang tepat untuk memperbaiki distribusi pendapatan di masa mendatang. Karena ketimpangan pendapatan yang semakin tinggi akan menimbulkan permasalahan yang sangat kompleks yang menjurus kepada permasalahan multidimensi. Ketimpangan pendapatan yang semakin tinggi bisa menyebabkan terjadinya pengurasan sumber daya alam yang berlebihan, konflik horisontal, bahkan disintegrasi bangsa. Berikut ini akan ditampilkan perkembangan indeks gini Kota Madiun selama periode 2016-2020.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2021 (diolah)

Gambar 2.21
Indeks Gini Kota Madiun Tahun 2016-2020

Jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur, Indeks Gini Kota Madiun pada tahun 2017 nilainya lebih rendah dimana Indeks Gini Provinsi Jawa Timur nilai sebesar 0,415. Indeks gini Kota Madiun terus mengalami penurunan hingga pada tahun 2019 sebesar 0,35 yang masih rendah bila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur (0,36) bahkan Nasional (0,38). Pada Tahun 2019 Kota Madiun memang mengalami kenaikan menjadi 0,39 yang berada di atas Provinsi Jawa Timur yang sebesar 0,36 dan Nasional yang sebesar 0,38. Kenaikan Indeks Gini diakibatkan adanya pandemi Covid-19 yang mempengaruhi semua sektor termasuk sektor ekonomi.



Sumber: BPS, 2021 (diolah) kondisi Bulan Maret 2020

Gambar 2.22
Perbandingan Indeks Gini Kota Madiun dengan Jawa Timur dan Nasional,
Tahun 2016-2020

2.2.1.6 Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia

Bank Dunia mengelompokkan penduduk menjadi tiga kelas yaitu 40 persen penduduk berpendapatan rendah, 40 persen penduduk berpendapatan sedang, 20 persen penduduk berpendapatan tinggi. Tingkat ketimpangan pendapatan penduduk menurut kriteria Bank Dunia terpusat pada 40 persen penduduk berpendapatan rendah, kemudian didefinisikan intensitas kemiskinannya dengan kriteria : (a) Bila menerima kurang dari 12 persen dari jumlah pendapatan, menggambarkan distribusi pendapatan mempunyai ketimpangan tinggi, (b) Bila menerima 12-17 persen dari jumlah pendapatan, menggambarkan distribusi pendapatan mempunyai ketimpangan sedang, dan (c) Bila menerima lebih dari 17 persen dari jumlah pendapatan, menggambarkan distribusi pendapatan mempunyai ketimpangan rendah. Kota Madiun tidak memiliki akses data.

2.2.1.7 Persentase Penduduk Miskin

Tujuan pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tetapi seiring dengan kemajuan dan keberhasilan pembangunan, terdapat sebagian masyarakat tidak bisa menikmati hasil pembangunan tersebut. Kemiskinan merupakan suatu kondisi dimana anggota masyarakat tidak/belum ikut serta dalam proses perubahan karena tidak mempunyai kemampuan, baik dalam kepemilikan faktor produksi maupun kualitas faktor produksi yang memadai sehingga tidak mendapatkan manfaat dari hasil proses pembangunan.

Salah satu indikator sosial ekonomi yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk adalah perkembangan penduduk miskin. Tinggi rendahnya tingkat kemiskinan di daerah tergantung dua faktor. Pertama, tingkat rata-rata pendapatan daerah. Kedua, besar atau kecilnya kesenjangan dalam distribusi pendapatan yang diperoleh dari perbandingan angka persentase penduduk dan pendapatan riil tahunan. Kemiskinan menjadi salah satu permasalahan utama yang dihadapi bernagai daerah, tidak hanya di Kota Madiun. Penduduk dapat dikatakan dalam kategori miskin jika pengeluaran per bulannya di bawah garis kemiskinan. Selama periode 2016-2020, garis kemiskinan di Kota Madiun mengalami kenaikan setiap tahun dari Rp. 376.956/kapita/bulan pada tahun 2016 menjadi sebesar Rp. 497.628/kapita/bulan pada tahun 2020.

Tabel 2.33
Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kota Madiun
Tahun 2016-2020

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Bulan)	Penduduk Miskin (orang)	Persentase Penduduk Miskin (%)
2016	376.956	9.050	5.16
2017	404.959	8.700	4,94
2018	446.525	7.920	4,49
2019	478.304	7.690	4,35
2020	497.628	8.830	4,98

Sumber: BPS Kota Madiun, 2021

Perkembangan penduduk miskin di Kota Madiun menunjukkan hasil yang menggembirakan dilihat dari terus menurunnya baik jumlah maupun persentase penduduk miskin selama periode 2016-2020. Hal ini tentunya disebabkan adanya pembangunan yang terus dilaksanakan dan memberikan hasil bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Madiun.

Persentase penduduk miskin pada tahun 2016 sebesar 5,16%. Kemudian terjadi penurunan pada periode tahun 2017-2019 dan periode 2020 terjadi kenaikan hingga mencapai angka 4,98. Hal ini mungkin disebabkan oleh kondisi perekonomian nasional maupun global yang belum stabil sehingga kenaikan garis kemiskinan juga berdampak pada perubahan kategori penduduk rentan miskin menjadi kategori penduduk miskin yang menyebabkan jumlah penduduk yang dikategorikan miskin bertambah. Dari sisi jumlah, penduduk miskin di Kota Madiun juga mengalami sedikit kenaikan dari 8.700 orang pada tahun 2017 naik menjadi 8.830 orang pada tahun 2020.

Perlu diingat, walaupun secara umum terjadi penurunan persentase penduduk miskin di Kota Madiun selama periode 2016-2018, namun pada tahun 2020 jumlah maupun persentase penduduk miskin cenderung meningkat. Jumlah penduduk miskin di Kota Madiun akan mengalami peningkatan jika banyak penduduk Kota Madiun masuk dalam golongan rawan miskin (*vulnerable*). Golongan *vulnerable* merupakan penduduk yang pengeluarannya berada persis di atas garis kemiskinan namun jaraknya tidak terlalu jauh.

Kemiskinan menjadi agenda tahunan dan menjadi hal yang menjadi fokus dari setiap pemimpin baik pusat maupun daerah. Langkah-langkah serta kebijakan Pemerintah Kota Madiun dalam penanggulangan kemiskinan difokuskan pada pemenuhan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin diarahkan pada pemenuhan pelayanan dasar.

Konsep Basic Needs Approach atau konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, mengklasifikasikan kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Misalnya hal ini dapat ditinjau dari kebutuhan pokok manusia yakni makanan yang dikonsumsi, pakaian dan peralatan yang dipakai, serta keberadaan tempat tinggal yang dimilikinya. Menurut International Labour Organization (ILO) kebutuhan dasar tidak hanya terkait pemenuhan kebutuhan dasar hidup individu, tetapi juga kebutuhan untuk mengakses pelayanan mendasar.

Empat Kebutuhan Dasar menurut ILO:

1. Konsumsi dasar personal (sandang, pangan, papan):

Pemerintah Kota Madiun dalam hal pemenuhan konsumsi dasar personal, menerapkan kebijakan berbagai bantuan sosial yang diampu oleh Dinas Sosial, PP, PA. Bantuan sosial tersebut antara lain: BPNTD, BLT, Bantuan UMKM, dll. Dalam hal mencukupi kelayakan rumah layak huni, pemerintah Kota Madiun menjalankan program Jambanisasi dan RTLH yang diampu oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

2. Akses ke pelayanan dasar (air bersih, pendidikan, sanitasi, dan kesehatan)
Dalam mencukupi pelayanan dasar air bersih dan listrik untuk masyarakat miskin, Walikota Madiun mencangkan 33 Program Unggulan salah satunya adalah Subsidi listrik dan air bersih bagi masyarakat yang kurang mampu diampu oleh Dinas Sosial PP PA.

Dalam hal pendidikan untuk masyarakat miskin, Pemerintah Kota Madiun menjalankan kegiatan Beasiswa Mahasiswa, bantuan seragam, dan bantuan Laptop gratis untuk siswa SD dan SMP yang dijalankan oleh Dinas Pendidikan. Selain itu, pada saat pandemi yang mengharuskan siswa belajar secara daring, pemerintah memberikan kemudahan akses internet melalui program Satu RT satu free Wifi untuk pembelajaran online. Pendidikan menjadi salah satu kebutuhan mendasar bagi setiap manusia menjalani kehidupan. Dengan pendidikan, seseorang memiliki kesempatan untuk mencapai dan mewujudkan cita-citanya. pemerataan pendidikan di negara kita bisa dikatakan belum merata. Banyak di antaranya hanya menempuh pendidikan sampai tingkat dasar, menengah pertama, atau menengah atas saja. Saat hendak memasuki ke jenjang yang lebih tinggi, yakni ke bangku kuliah, masih banyak di antaranya yang kesulitan karena masalah biaya dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut Pemerintah Kota Madiun telah memberikan kesempatan bagi warganya untuk meraih pendidikan tinggi, terutama bagi masyarakat yang termasuk dalam kategori kurang mampu, salah satunya melalui program Bantuan Beasiswa Mahasiswa (BBM) dengan harapan program ini dapat memberikan kesempatan bagi putra daerah yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi agar dapat tumbuh dengan SDM yang berkualitas dan mampu bersaing di dunia kerja.

Dalam hal pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin, Pemerintah Kota Madiun menjalankan kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat: Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita yang dijalankan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

3. Akses ke pekerjaan yang digaji

Dalam hal akses pekerjaan, Pemerintah Kota Madiun menjalankan kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja: Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online, Job Fair/Bursa Kerja yang dijalankan oleh Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. Penyaluran tenaga kerja diharapkan mampu menyerap supply tenaga kerja yang selanjutnya dapat mengurangi pengangguran, meningkatkan daya beli dan memajukan Kota Madiun dalam mengoptimalkan ketersediaan SDM.

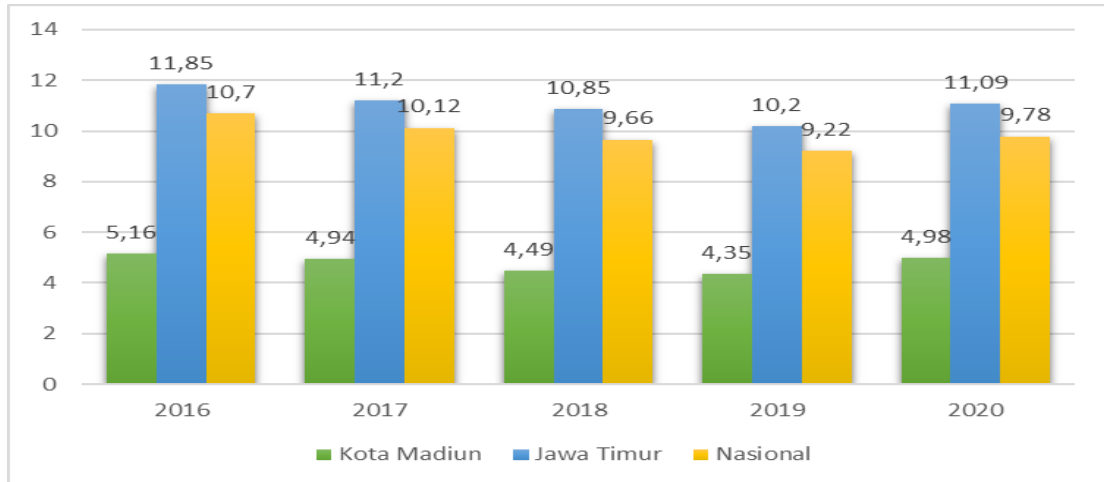
4. Kebutuhan kualitatif (lingkungan yg sehat dan aman, kemampuan untuk turut serta dalam pengambilan keputusan)

Dalam hal lingkungan yg sehat dan aman, Pemerintah Kota Madiun menjalankan kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang dijalankan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran:

- Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
- Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
- Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
- Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraaja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia

Dalam hal kemampuan untuk turut serta dalam pengambilan keputusan, Pemerintah Kota Madiun sangat mengedepankan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah. Hal ini tercermin dari pelaksanaan Musrenbang Kelurahan, Kecamatan dan Kota yang mengakomodir usulan masyarakat. Selain itu, Walikota Madiun dalam 33 program unggulan menginisiasi program:

- Walikota Bersama Rakyat (WBR) guna menampung aspirasi masyarakat
- Mengikutsertakan seluruh elemen masyarakat dalam pengawasan jalannya roda pemerintahan sehingga terbangun budaya yang bebas KKN
- Menghadirkan tenaga profesional yang berkompeten untuk melatih masyarakat dalam merealisasikan ide atau gagasan yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2021 (diolah) data maret 2020

Gambar 2.23

Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kota Madiun dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2020

Kemiskinan Kota Madiun dibandingkan dengan kabupaten/kota di Jawa Timur menempati posisi ke-3 terendah (urutan 35 dari 38). Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Selain upaya memperkecil jumlah dan persentase penduduk miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga terkait dengan bagaimana mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan Kota Madiun selama periode 2016-2020 cenderung fluktuatif. Indeks kedalaman kemiskinan Kota Madiun Tahun 2016 sebesar 0,94. Kemudian menurun setiap tahun hingga menjadi 0,31 pada tahun 2018. Selanjutnya pada tahun 2019, nilai indeks kedalaman kemiskinan mengalami peningkatan menjadi sebesar 0,50 dan 0,77 pada tahun 2020.

Tabel 2.34

Indeks Kedalaman (P1) dan Indeks Keparahan (P2) Kemiskinan di Kota Madiun Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	0,94	0,61	0,31	0,50	0,77
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,26	0,13	0,04	0,08	0,18

Sumber: BPS Kota Madiun, 2021

Indeks keparahan kemiskinan (*Poverty Severity Index-P2*) digunakan untuk melihat masalah ketimpangan di antara penduduk miskin. Indeks ini menyatakan sebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks berarti semakin parah tingkat kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan di Kota Madiun periode tahun 2016-2020 cukup *fluktuatif*.

Nilai indeks pada Tahun 2016 adalah sebesar 0,26, selanjutnya pada Tahun 2017 dan 2018, nilai indeks menurun menjadi 0,13 dan 0,04. Namun pada tahun 2019 dan 2020 mengalami peningkatan, nilai indeks meningkat menjadi sebesar 0,8 dan 0,18

2.2.1.8 Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif

Tabel 2.35
Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif di Kota Madiun
Tahun 2016-2020

	2016	2017	2018	2019	2020
KOTA MADIUN	6,46	6,64	6,72	6,78	6,69

Pembangunan ekonomi yang menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, serta mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah. Sebagaimana data tabel di atas kota madiun menduduki posisi ke-2 Kabupaten/Kota se Jawa Timur di bawah Kota Kediri. Pada tahun 2016-2019 nilai indeks pembangunan ekonomi inklusif di kota madiun meningkat dari 6,46 pada tahun 2016 menjadi 6,78 pada tahun 2019, dan pada tahun 2020 mengalami penurunan yang signifikan menjadi 6,69.

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

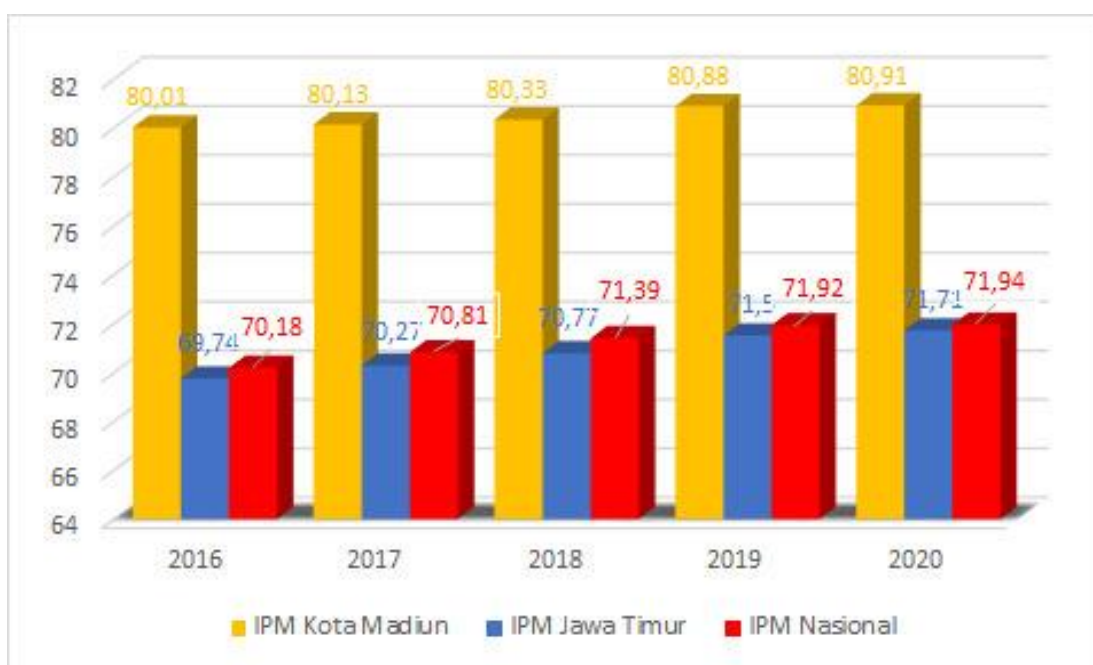
2.2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia

Peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan inti dan tujuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara umum. Berdasarkan perspektif perkembangan pemikiran pembangunan, peningkatan kesejahteraan masyarakat tertuang dalam pemikiran paradigma pembangunan manusia. Paradigma pembangunan manusia dikaitkan dengan upaya untuk memanusiakan masyarakat dalam jati diri pembangunan (*people-centered development*). Penduduk ditempatkan sebagai tujuan akhir (*the ultimated end*), sedangkan upaya pembangunan dipandang sebagai sarana (*principal means*) untuk mencapai tujuan pembangunan.

Pembangunan manusia di suatu daerah dapat dianalisis dan diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Perhitungan IPM dapat dihitung dari tiga aspek dasar pembangunan manusia, yaitu aspek kesehatan, aspek pendidikan, dan aspek ekonomi. Aspek kesehatan direpresentasikan oleh angka harapan hidup, aspek pendidikan oleh indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta aspek ekonomi ditunjukkan dengan indikator pengeluaran per kapita disesuaikan. IPM merupakan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia di suatu daerah, sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang telah berjalan di daerah. Selain itu, IPM juga menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia.

Peningkatan atau penurunan angka IPM merupakan indikasi keefektifan kinerja pembangunan manusia di suatu daerah pada kurun waktu tertentu. Menurut UNDP, IPM suatu daerah/wilayah dapat dikelompokkan menjadi empat kategori, yaitu (1) IPM ≥ 80 termasuk kategori sangat tinggi; (2) ≤ 70 IPM < 80 termasuk kategori tinggi; (3) ≤ 60 IPM < 70 termasuk kategori sedang; dan (4) IPM < 60 termasuk kategori rendah.

Selama periode 2016-2020, perkembangan IPM Kota Madiun menunjukkan tren yang positif yaitu selalu mengalami kenaikan setiap tahun. Kenaikan selama periode tersebut cukup signifikan sehingga angka IPM Kota Madiun dari yang sebelumnya termasuk dalam kategori tinggi menjadi kategori sangat tinggi. IPM Kota Madiun pada tahun 2016 sebesar 80,01 hingga tahun 2020 meningkat menjadi 80,91 capaian ini lebih tinggi dibanding capaian Provinsi dan Nasional pada tahun 2020 yaitu sebesar 71,71 dan 71,94



Sumber: BPS Kota Madiun, 2021 (diolah)

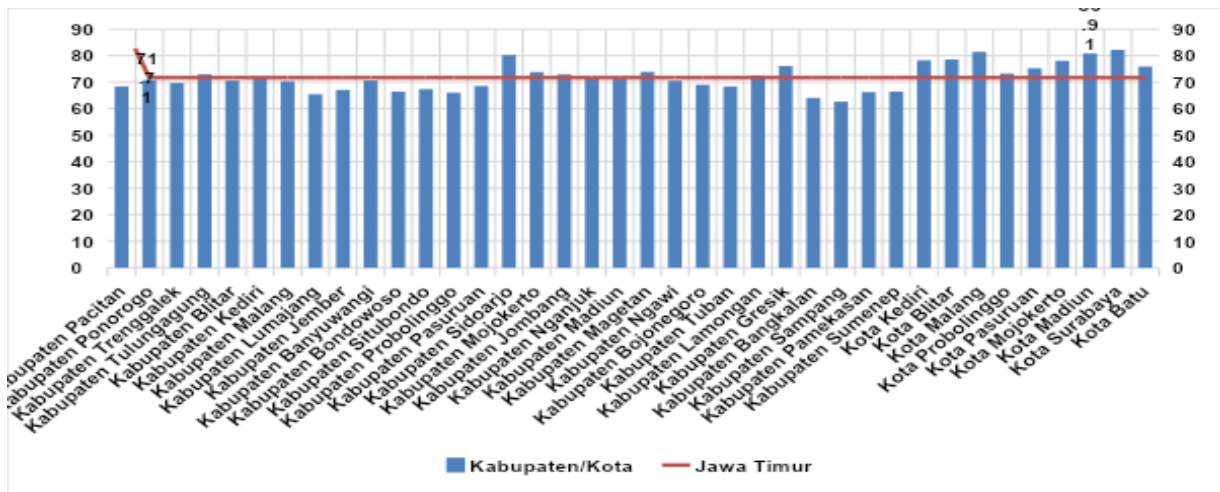
Gambar 2.24
Perkembangan IPM Kota Madiun Tahun 2016-2020

Tabel 2.36
Komponen IPM Kota Madiun dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2020

No.	Komponen IPM	Kota Madiun	Provinsi Jawa Timur
1.	Umur harapan hidup (tahun)	72,81	71,30
2.	Harapan lama sekolah (tahun)	14,40	13,19
3.	Rata-rata lama sekolah (tahun)	11,14	7,78
4.	Pengeluaran per kapita (Rp juta)	16,01	11,60
5.	IPM	80,91	71,71

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2021

Seperti telah diuraikan pada bagian sebelumnya, bahwa komponen penyusun IPM adalah angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan kemampuan daya beli/*purchasing power parity*. Usia harapan hidup di Kota Madiun pada tahun 2020 adalah sebesar 72,81 tahun, harapan lama sekolah sebesar 14,40 tahun, rata-rata lama sekolah sebesar 11,14 tahun, dan pengeluaran riil yang disesuaikan sebesar Rp 16,01 juta. IPM Kota Madiun pada tahun 2020 adalah sebesar 80,91 dan lebih tinggi jika dibandingkan IPM Provinsi Jawa Timur yang nilainya sebesar 71,71. Angka IPM Provinsi Jawa Timur berasal dari komponen usia harapan hidup sebesar 71,30 tahun, harapan lama sekolah sebesar 13,19 tahun, rata-rata lama sekolah sebesar 7,78 tahun, dan pengeluaran riil yang disesuaikan sebesar Rp 11,60 juta. Seperti terlihat pada tabel di atas.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2021 (diolah)

Gambar 2.25

Peringkat IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2020

Dari gambar tersebut, IPM Kota Madiun pada tahun 2020 pada tingkat Provinsi Jawa Timur berada pada posisi 3 dari 38 kabupaten/kota yang ada. Posisi IPM tertinggi pertama ditempati oleh Kota Surabaya yaitu sebesar 82,23, selanjutnya Kota Malang sebesar 81,45, dan Kota Madiun. Hanya 3 wilayah tersebut di Provinsi Jawa Timur yang memiliki IPM dalam kategori sangat tinggi. Sementara wilayah dengan IPM terendah di Provinsi Jawa Timur adalah Kabupaten Sampang dengan nilai IPM sebesar 62,7 dan termasuk dalam kategori IPM rendah.

2.2.2.2 Angka Melek Huruf

Salah satu indikator keberhasilan pemerintah dalam pembangunan pendidikan adalah berkurangnya penduduk yang buta huruf. Angka melek huruf (*literacy rate*) adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya.

Angka melek huruf dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan program pemberantasan buta huruf, Hal ini menunjukkan kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam menyerap informasi dari berbagai media, dan menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis. Perkembangan angka melek huruf selama tahun 2016-2020 menunjukkan nilai stagnan tercapai 100%



Sumber: Dinas Pendidikan Kota Madiun, 2021 (diolah)

Gambar 2.26

Angka Melek Huruf Kota Madiun Tahun 2016-2020

Angka melek huruf tahun 2020 yang telah mencapai 100% tersebut menunjukkan bahwa secara umum penduduk usia 15 tahun ke atas dapat membaca dan menulis.

2.2.2.3 Angka Rata-rata Lama Sekolah

Salah satu indikator pendidikan yang digunakan sebagai alat ukur keberhasilan pembangunan manusia di bidang pendidikan adalah rata-rata lama sekolah (RLS). RLS pada metode lama menunjukkan jenjang pendidikan yang telah dicapai oleh penduduk umur 15 tahun ke atas. Penghitungan RLS metode baru menurut BPS adalah rata-rata jumlah yang dihabiskan oleh penduduk berumur 25 tahun atau lebih untuk menempuh suatu jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani.

RLS dihitung untuk usia 25 tahun ke atas dengan asumsi bahwa pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Selama periode 2016-2020, RLS Kota Madiun mengalami peningkatan setiap tahun walaupun tidak signifikan. RLS Kota Madiun pada tahun 2016 adalah sebesar 11,09 tahun, dan meningkat setiap tahunnya hingga menjadi sebesar 11,14 tahun pada tahun 2020. RLS Kota Madiun sebesar 11,14 tahun pada tahun 2020 dapat diartikan bahwa rata-rata penduduk di Kota Madiun baru mampu menempuh pendidikan hingga kelas 1 SMA atau putus sekolah pada kelas 2 SMA. Angka RLS Kota Madiun pada tahun 2020 lebih tinggi jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur yang sebesar 7,39 tahun. Walaupun angka RLS Kota Madiun lebih tinggi dibandingkan angka RLS Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kota Madiun harus terus menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai bagi masyarakatnya dan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat pendidikan formal.

Tabel 2.37
Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kota Madiun Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
RLS (tahun)	11,09	11,10	11,11	11,13	11,14

Sumber: BPS Kota Madiun, 2021

2.2.2.4 Angka Harapan Lama Sekolah

Kemampuan bertahan seorang anak dalam dunia pendidikan dapat menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan pendidikan di suatu wilayah. Semakin lama seorang anak mampu bertahan untuk terus bersekolah, maka sistem pendidikan yang terbangun di daerah tersebut akan semakin baik. Angka harapan lama sekolah diharapkan mampu memotret fenomena tersebut pada tiap wilayah.

Sesuai dengan publikasi terbaru BPS, angka melek huruf (AMH) yang biasanya digunakan sebagai salah satu komponen dalam menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dianggap sudah tidak relevan, sehingga indikator untuk menghitung dimensi pendidikan penduduk salah satunya menggunakan angka harapan lama Sekolah (HLS). HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang, dengan asumsi kemungkinan anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan rasio penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini.

Tujuan penghitungan HLS adalah untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Tabel 2.38
Angka Harapan Lama Sekolah di Kota Madiun Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
HLS (tahun)	14,19	14,20	14,21	14,39	14,40

Sumber: BPS Kota Madiun, 2021

Angka HLS Kota Madiun selama periode 2016-2020 mengalami peningkatan setiap tahun. Angka HLS Kota Madiun pada tahun 2016 sebesar 14,19 tahun, kemudian meningkat setiap tahun menjadi 14,40 tahun pada tahun 2020. HLS sebesar 14,40 tahun pada tahun 2020 berarti bahwa lamanya sekolah yang akan dicapai oleh anak umur tertentu di masa yang akan datang adalah 14,40 tahun atau telah mencapai pendidikan di level perguruan tinggi.

HLS di Kota Madiun masih berada di bawah HLS ideal yaitu sebesar 18 tahun sehingga pemerintah Kota Madiun harus memberikan prioritas dan pemantauan secara terus menerus terhadap program pembangunan pendidikan serta perbaikan sistem pendidikan di Kota Madiun.

2.2.2.5 Usia Harapan Hidup

Usia harapan hidup adalah perkiraan banyaknya tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup (secara rata-rata). Indikator ini dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan. Semakin tinggi UHH, memberikan indikasi bahwa semakin tinggi kualitas fisik penduduk suatu daerah.

Angka harapan hidup (UHH) Kota Madiun juga mengalami peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2016, UHH di Kota Madiun adalah sebesar 72,44 tahun, kemudian pada tahun 2017 meningkat sebesar 72,48. Pada tahun 2018 hingga tahun 2020 UHH terus meningkat hingga sebesar 72,81 tahun. UHH sebesar 72,81 tahun pada tahun 2020 dapat diartikan bahwa rata-rata penduduk Kota Madiun dapat menjalani hidup selama 72 tahun. Perkembangan UHH setiap tahun di Kota Madiun tercatat tidak melebihi satu dalam satu periode jangka waktu satu tahun. Pada Tahun 2020 terjadi perlambatan pertumbuhan UHH yang tumbuh dari 0,22% pada 2019 menjadi 0,08% pada 2020, yang terkait adanya pandemi Covid-19.

Tabel 2.39
Usia Harapan Hidup di Kota Madiun Tahun 2016-2020

raian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
UHH (tahun)	72,44	72,48	72,59	72,75	72,81
Selisih	0,03	0,04	0,11	0,16	0,06
% Pertumbuhan	0,4%	0,6%	0,15%	0,22%	0,08%

Sumber: BPS Kota Madiun, 2021

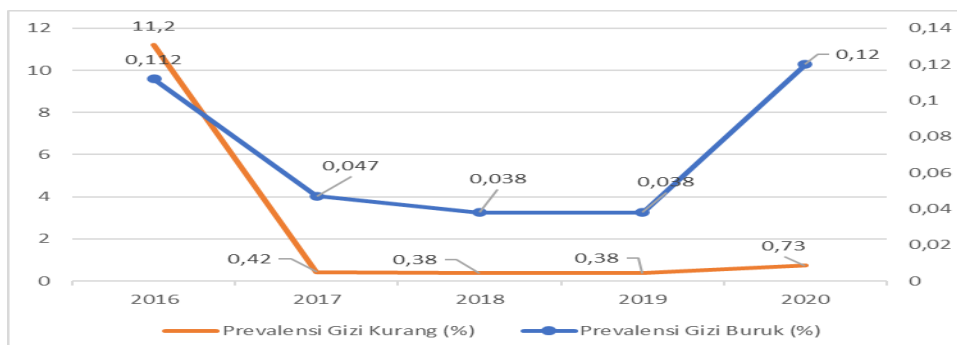
2.2.2.6 Persentase Balita Gizi Buruk dan Prevalensi Balita Gizi Kurang

Gizi buruk merupakan salah satu klasifikasi status gizi dimana kondisi kurang gizi diketahui berdasarkan antropometri seperti penambahan berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, lingkar lengan, dan lain-lain. Balita dikatakan terkena gizi buruk dilihat dari perbandingan antara berat badan menurut umur maupun panjang badannya dengan standar yang telah ditetapkan. Menurut Badan Kesehatan Dunia (*World Health Organization/WHO*), sebanyak 54% penyebab kematian bayi dan balita disebabkan karena keadaan gizi buruk pada anak.

Anak yang mengalami gizi buruk memiliki risiko meninggal 13 kali lebih besar dibandingkan anak yang normal. *World Health Organization* (WHO) juga membagi kategori prevalensi gizi rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi. Menurut WHO (1999), apabila prevalensi gizi di suatu wilayah dibawah 10 persen, maka masuk dalam kategori rendah, bila berada pada kisaran 10-19 persen dikategorikan sedang, kisaran 20-29 persen masuk dalam kategori tinggi, dan apabila lebih dari 30 persen dikategorikan sangat tinggi.

Berdasarkan standar WHO tersebut, maka prevalensi gizi balita di Kota Madiun termasuk dalam kategori rendah, yang tercermin dari nilai prevalensi gizi buruk dan kurang berdasarkan data Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun (2021) pada Gambar 2.13. Data tersebut menunjukkan, prevalensi gizi buruk di Kota Madiun cenderung menurun dalam kurun waktu tahun 2016-2019, yaitu dari 0,112% pada tahun 2016 menjadi 0,038% pada tahun 2019, sedangkan pada tahun 2020 sedikit mengalami kenaikan menjadi 0,12%. Adapun prevalensi balita gizi kurang di Kota Madiun selama 2016-2019 terus mengalami penurunan. Pada tahun 2016 persentasenya sebesar 11,2%, kemudian pada tahun 2017 turun menjadi 0,42% dan turun kembali di tahun 2018 menjadi 0,38%.

Jika melihat data pada tahun 2017-2019, prevalensi balita gizi kurang di Kota Madiun tidak mengalami penurunan yang signifikan, yaitu sebesar 0,42% pada tahun 2017 menjadi 0,38% pada tahun 2019. Namun demikian, pada tahun 2020, prevalensi balita kurang mengalami sedikit peningkatan menjadi sebesar 0,73%. Peningkatan prevalensi gizi buruk dan gizi kurang di tahun 2020, mungkin terkait dengan peningkatan kemiskinan akibat pandemi Covid-19.



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Madiun, 2021 (diolah)

Gambar 2.27
Prevalensi Balita Gizi Kurang dan Gizi Buruk Kota Madiun, 2016-2020

Pemerintah Kota Madiun telah melakukan penanganan terhadap gizi buruk dan gizi kurang pada balita, salah satunya adalah dengan pemberian makanan tambahan. Jumlah balita kurus yang mendapat makanan tambahan pada tahun 2017, adalah sebanyak 42 orang yang tersebar di Kecamatan Kartoharjo dan Manguharjo masing-masing sebanyak 11 orang dan Kecamatan Taman sebanyak 20 orang. Sedangkan, jumlah balita yang mendapatkan makanan tambahan tahun 2018 sebanyak 6 orang yang berada di Kecamatan Taman sebanyak 2 orang dan Kecamatan Manguharjo sebanyak 6 orang. Adapun penanganan pada tahun 2020 dilakukan melalui pemberian Makanan Tambahan Pada Bayi dan Anak (PMBA), pemberian makanan tambahan pada ibu balita, serta pemberian konseling dan pemantauan/visitasi ke rumah.

2.2.2.7 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Salah satu indikator yang biasa digunakan untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat adalah laju pertumbuhan angkatan kerja yang terserap pada lapangan pekerjaan. Tingginya angkatan kerja di suatu daerah secara langsung dapat menggerakkan perekonomian daerah tersebut. Ketenagakerjaan merupakan aspek yang amat mendasar dalam kehidupan manusia karena mencakup dimensi ekonomi dan sosial karena menyangkut banyak hal misalnya ketersediaan pekerjaan, tingkat pengangguran, tingkat produktivitas, dan lain-lain.

Dimensi ekonomi yang dimaksud adalah bahwa tanpa adanya pekerjaan sebagai sumber penghasilan rumah tangga, akan mengancam kelangsungan hidup anggota rumah tangganya. Sedang dimensi sosial yang dimaksud adalah bahwa makin banyaknya anggota masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan atau makin banyaknya penganggur akan menjadi potensi untuk melakukan tindak kejahatan atau tindakan lain yang akan mengganggu stabilitas sosial dalam masyarakat. Gambaran kondisi ketenagakerjaan seperti persentase angkatan kerja yang bekerja dan distribusi lapangan pekerjaan sangat berguna dalam melihat prospek ekonomi suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat apakah benar-benar digerakan oleh produksi yang melibatkan tenaga kerja daerah atau karena pengaruh faktor lain. Banyaknya penduduk yang bekerja akan berdampak pada peningkatan pendapatan. Peningkatan pendapatan penduduk sangat menentukan pemenuhan kebutuhan hidup yang layak (peningkatan kemampuan daya beli).

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase angkatan kerja terhadap total angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Sedang penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. Pada tahun 2017, TPAK Kota Madiun adalah sebesar 67,76%, kemudian berjalan fluktuatif sampai pada Tahun 2020 sebesar 68,63%.

Angka tersebut menunjukkan bahwa setiap 100 orang penduduk terdapat sekitar 66 orang yang merupakan angkatan kerja. Persentase yang cukup tinggi tersebut dari sisi produktivitas tenaga kerja cukup bagus karena dengan banyaknya tenaga kerja tentunya produktivitas juga tinggi. Namun, produktivitas juga harus dikaitkan dengan tingkat pendidikan tenaga kerja di Kota Madiun. Karena meskipun jumlah tenaga kerja besar kalau tidak diimbangi dengan skill atau keterampilan yang memadai tidak akan menghasilkan produktivitas yang diinginkan.

Tabel 2.40
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Madiun Tahun 2016-2020

Tahun	Angkatan Kerja	Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Ke atas	TPAK (%)
2016	Tidak ada angka perhitungan sampai kab/kota dikarenakan pemotongan anggaran pada BPS		
2017	94.435	139.366	67,76
2018	90.358	140.290	64,41
2019	94.105	141.022	66,86
2020	98.529	143.561	68,63

Sumber: BPS Kota Madiun dan BPS Provinsi Jawa Timur, 2021

Dilihat dari sisi gender, terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara TPAK laki-laki dan perempuan dimana TPAK laki-laki pada tahun 2020 sebesar 78,8%, sedangkan TPAK perempuan hanya sebesar 59,35%. Selisih yang cukup jauh tersebut mencerminkan bahwa secara umum kesempatan penduduk laki-laki dalam kegiatan ekonomi lebih besar dengan penduduk perempuan. Secara tidak langsung menunjukkan bahwa pencari nafkah dalam keluarga di Kota Madiun adalah rata-rata laki-laki. Rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan dibandingkan laki-laki di Kota Madiun dikarenakan perempuan lebih banyak mengurus rumah tangga. Selain itu banyak perempuan yang umumnya sebagai pekerja keluarga dan pekerja paruh waktu sehingga dalam situasi tertentu mereka bisa keluar dari kelompok angkatan kerja menjadi bukan angkatan kerja.

Tabel 2.41

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020

Uraian	TPAK (%)
Laki-laki	78,8
Perempuan	59,35
TPAK (%)	68,63

Sumber: BPS Kota Madiun, 2021

2.2.2.8 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Semakin rendah angka TPT mengindikasikan bahwa daya serap lapangan pekerjaan terhadap pencari kerja semakin baik. Selama periode 2016-2020, TPT Kota Madiun cenderung fluktuatif walaupun secara umum mengalami penurunan. Pada tahun 2016, angka TPT di Kota Madiun adalah sebesar 5,12%, kemudian turun menjadi sebesar 4,26% dan 3,85% pada tahun 2017 dan 2018, pada tahun 2019 mengalami sedikit peningkatan sebesar 4,01% kemudian mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2020 menjadi sebesar 8,32%. Peningkatan disebabkan pandemi yang sedang berlangsung, hal tersebut menyebabkan banyak perusahaan yang mengurangi karyawannya yang mengakibatkan TPT meningkat.

Tabel 2.42

Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Madiun Tahun 2016-2020

Tahun	TPT (%)
2016	5,12
2017	4,26
2018	3,85
2019	4,01
2020	8,32

Sumber: BPS Kota Madiun, 2021

TPT Kota Madiun pada tahun 2020 adalah sebesar 8,32%, di mana perbandingan antara TPT laki-laki dan perempuan adalah sebesar 9,86% dan 6,45%. Besaran tingkat pengangguran terbuka tentunya berbanding terbalik dengan tingkat kesempatan kerja di suatu wilayah.

salah satu upaya pemerintah Kota Madiun dalam menurunkan tingkat pengangguran terbuka dengan mengadakan Job fair/ Bursa Kerja yang melibatkan perusahaan yang menyediakan kesempatan kerja melalui aplikasi SICAKER, memberikan perlindungan tenaga kerja melalui jaminan ketenagakerjaan bagi pekerja informal (asuransi kecelakaan kerja dan/ kematian), pemberian pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi, penyediaan informasi pasar kerja online serta pelatihan UMKM

Tabel 2.43

Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020

Uraian	TPT (%)
Laki-laki	9,86
Perempuan	6,45

Sumber: BPS Kota Madiun, 2021



Sumber: BPS Kota Madiun, 2021

Gambar 2.28

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur dan Nasional, 2016-2020

2.2.2.9 Rasio Penduduk yang Bekerja

Rasio penduduk yang bekerja merupakan perbandingan jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja. Pada tahun 2017 dapat dilihat bahwa rasio penduduk yang bekerja di Kota Madiun mencapai 95,74% dan pada tahun 2018 meningkat kembali menjadi sebesar 96,15%, sedikit menurun pada tahun 2019 menjadi 96,04%. Nilai ini meningkat dari tahun-tahun sebelumnya yang berkisar antara 93-94%. Namun, pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 4,36% sehingga rasio penduduk bekerja menjadi 91,68%.

Tabel 2.44

Rasio Penduduk Bekerja di Kota Madiun Tahun 2016-2020

Tahun	Rasio Penduduk Bekerja (%)
2016	Tidak ada angka perhitungan sampai kab/kota dikarenakan pemotongan anggaran pada BPS
2017	95,74
2018	96,15
2019	96,04
2020	91,68

Sumber: BPS Kota Madiun, 2021

Persaingan dalam mendapatkan pekerjaan terjadi tidak terbatas pada *new entrance* yang baru lulus dari jenjang pendidikan, tetapi juga para pencari kerja yang sebelumnya pernah bekerja maupun yang masih bekerja. Kekurangpuasan terhadap pekerjaan yang dijalannya sekarang, mengakibatkan perlunya usaha untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Tabel diatas menunjukkan rasio penduduk bekerja Kota Madiun tahun 2020 sebesar 91,68%.

Pada kenyataannya, penambahan jumlah angkatan kerja tidak secepat penambahan persediaan lapangan pekerjaan. Akibatnya jumlah lapangan pekerjaan yang ada tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja yang jumlahnya terus meningkat. Lapangan pekerjaan semakin menjadi persaingan bagi para pencari kerja yang terdapat di pasar kerja. Semakin lebar jarak antara jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia dengan jumlah para pencari kerja, maka semakin lama jumlah pengangguran juga akan terakumulasi sehingga beban pasar kerja untuk menyediakan lapangan pekerjaan akan semakin berat.

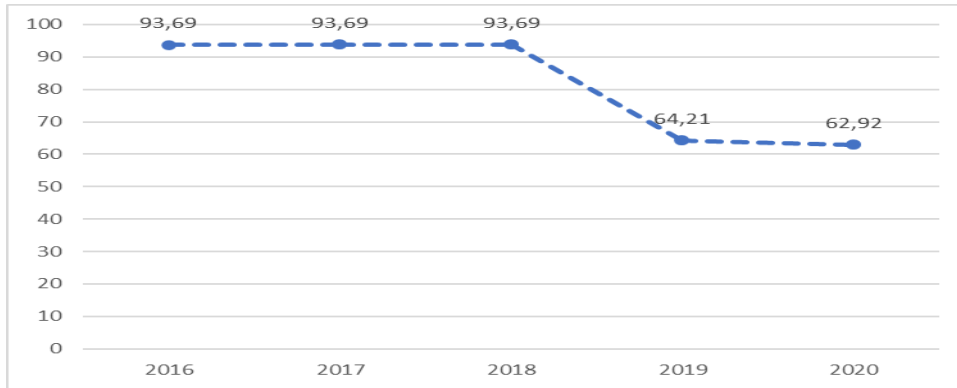
Tabel 2.45
Rasio Penduduk Bekerja Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020

Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Bekerja (orang)	48.663	41.671	90.334
Pengangguran Terbuka (orang)	5.322	2.873	8.195
Angkatan Kerja (orang)	53.985	44.544	98.529
Rasio penduduk yang bekerja (%)	90,14	93,55	91,68

Sumber: BPS Kota Madiun, 2021

2.2.2.10 Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas

Kesempatan kerja dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan yang menggambarkan ketersediaan pekerjaan. Kesempatan kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja, sehingga penambahan angkatan kerja perlu diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan lapangan kerja untuk menyerap tambahan angkatan kerja tersebut. Pada tahun 2016 hingga tahun 2018 rasio kesempatan kerja stabil di angka 93,69%. Pada tahun 2019 dan tahun 2020 kembali mengalami penurunan menjadi 64,21% dan 62,92%. Penurunan ini mungkin disebabkan oleh penambahan angkatan kerja yang tidak diimbangi oleh peningkatan lapangan pekerjaan, sehingga tambahan angkatan kerja tersebut tidak dapat diserap.



Sumber: BPS Kota Madiun, 2021

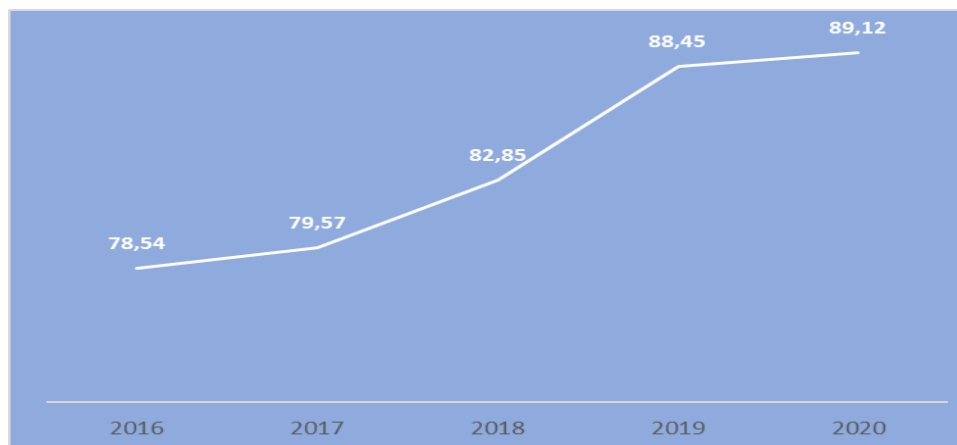
Gambar 2.29

Rasio Kesempatan Kerja Kota Madiun Tahun 2016-2020

2.2.2.11 Indeks Kepuasan Masyarakat dan Opini BPK

Salah satu cara perwujudan tata kelola pemerintah yang baik yaitu dengan mengupayakan tercapainya efektivitas dan efisiensi dalam pembangunan. Pencapaian keberhasilan tata kelola pemerintahan dapat dinilai beberapa indikator seperti Indeks Kepuasan Masyarakat dan opini BPK. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pendapat masyarakat terhadap perolehan pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Data pada Gambar dibawah menunjukkan bahwa selama tahun 2016-2020 Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Madiun meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 hingga 2020 terjadi perbaikan dalam pelayanan oleh aparatur penyelenggara pelayanan publik ditunjukkan dengan peningkatan nilai IKM dari sebesar 78,54 pada tahun 2016 menjadi sebesar 89,12% pada tahun 2020.



Sumber: Bagian Organisasi Setda Kota Madiun, 2021

Gambar 2.30

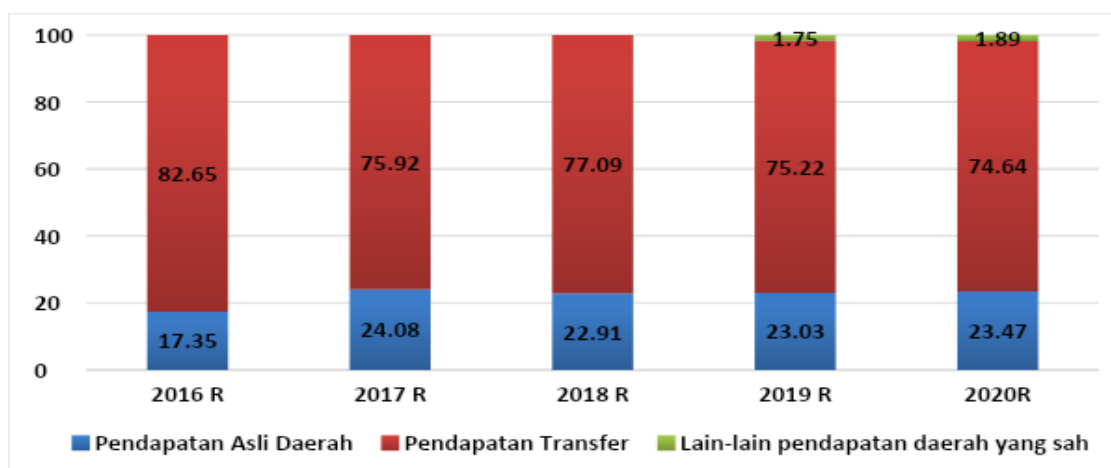
Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2016-2020

Sedang opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Pembuatan laporan keuangan ini didasarkan pada empat kriteria yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap perundang-undang, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Hasil Opini BPK selama 2016-2020 mendapatkan penilaian WTP.

2.2.2.12 Persentase PAD terhadap Pendapatan

Pendapatan Asli Daerah berasal dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Dari tahun 2016-2020, PAD Kota Madiun semakin bertambah tiap tahunnya. PAD merupakan salah satu komponen pendapatan daerah. PAD Kota Madiun berkontribusi dari sekitar 17,35% pada tahun 2016 dan meningkat menjadi 24,08 persen tahun 2017. Nilai proporsi PAD tersebut tertinggi selama lima tahun terakhir.

Pada tahun 2018, rasio PAD terhadap pendapatan mengalami penurunan menjadi sebesar 22,91%. Pada tahun selanjutnya PAD mengalami peningkatan sampai dengan 23,47 persen tahun 2020. Peningkatan persentase PAD terhadap pendapatan tersebut mengindikasikan bahwa Pemerintah Kota Madiun telah berhasil mendayagunakan potensi pendapatan yang dimilikinya baik melalui intensifikasi dan ekstensifikasi terutama yang berasal dari pajak dan retribusi daerah. Selain itu, dengan meningkatnya PAD, Pemerintah Kota Madiun berusaha mengurangi ketergantungan fiskal pada Pemerintah Pusat sehingga nantinya akan lebih leluasa dalam menjalankan program dan kegiatan pembangunan.



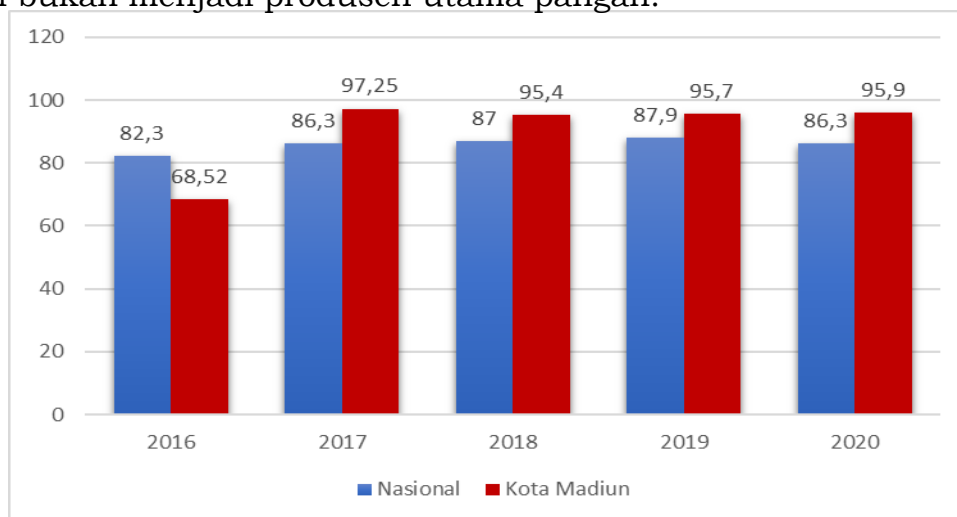
Sumber: Laporan Realisasi APBD Kota Madiun, 2016 - 2020 (diolah)

Gambar 2.31
Persentase PAD terhadap Pendapatan Kota Madiun Tahun 2016-2020

2.2.2.13 Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Pola Pangan Harapan (PPH) adalah metode untuk menilai jumlah dan komposisi atau ketersediaan pangan. PPH digunakan untuk bahan perencanaan konsumsi, kebutuhan, dan penyediaan suatu pangan wilayah. Perhitungan PPH terbentuk dari beberapa komponen yaitu konsumsi energi dan zat gizi total, persentase energi dan gizi aktual, dan skor kecukupan energi dan zat gizi. Berdasarkan data skor Pola Pangan Harapan Kota Madiun selama 2016-2017 mengalami peningkatan dari tahun 2016 hanya sebesar 68,52% menjadi 97,25% pada tahun 2017. Namun, pada tahun 2018 mengalami sedikit penurunan menjadi 95,4%, pada tahun 2019 dan tahun 2020 meningkat sedikit demi sedikit masing-masing sebesar 95,7% dan 95,9%.

Selama kurun waktu tahun 2017 hingga tahun 2020 skor PPH Kota Madiun telah melebihi nilai nasional pada yang hanya sebesar 90%. Nilai PPH yang meningkat signifikan tersebut menunjukkan bahwa Kota Madiun secara umum telah mampu menyediakan kebutuhan pangan bagi penduduknya walaupun bukan menjadi produsen utama pangan.



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun, 2021 (diolah)

Gambar 2.32

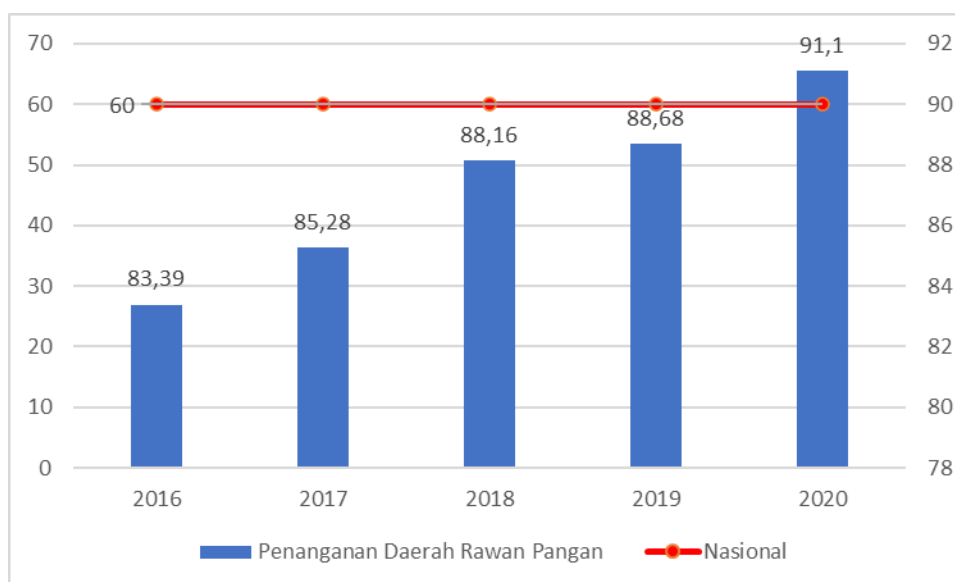
Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Kota Madiun Tahun 2016-2020

2.2.2.14 Penanganan Daerah Rawan Pangan

Pangan merupakan kebutuhan esensial bagi kehidupan manusia, karena itu masalah pangan dapat memicu terjadinya permasalahan rawan pangan dan gizi. Kerawanan pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat, atau rumah tangga pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologi bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat. Kerawanan pangan dapat terjadi berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu, penyebab dari kerawanan ini diantaranya kemiskinan kronis dan keadaan darurat seperti bencana alam maupun bencana sosial.

Kerawanan pangan sangat dipengaruhi oleh daya beli masyarakat yang ditentukan dari tingkat pendapatannya, semakin rendah tingkat pendapatan memperburuk konsumsi energi dan protein. Oleh karena itu perlu adanya penanganan rawan pangan untuk mencegah maupun menanggulangi kerawanan pangan agar Kota Madiun terhindar dari kerawanan pangan.

Selama periode 2016-2020, penanganan daerah rawan pangan di Kota Madiun selalu mengalami peningkatan. Walaupun demikian, hingga pada tahun 2016 nilainya masih jauh dari nilai nasional yaitu sebesar 83,39% dibanding nilai nasional yang sebesar 60%. Akan tetapi, terjadi peningkatan per tahun hingga tahun 2020 hingga mencapai 91,1% pada tahun 2020. Peningkatan nilai penanganan daerah rawan pangan tersebut jauh di atas nilai nasional. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pencapaian penanganan daerah rawan pangan Kota Madiun telah melampaui target nasional.



Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun, 2021 (diolah)

Gambar 2.33

Penanganan Daerah Rawan Pangan Kota Madiun Tahun 2016-2020

2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Pertumbuhan dan perkembangan aspek kesenian dan keolahragaan di masyarakat dapat menjadi salah satu indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah. Pembangunan bidang seni dan budaya sangat erat hubungannya dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan dua sasaran pencapaian pembangunan sosial budaya dan keagamaan yaitu untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika berbudaya dan beradab, serta mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera.

Oleh karena itu untuk mendukung pembangunan seni dan kebudayaan dalam rangka memperkuat, mengembangkan, dan melestarikan potensi budaya lokal Pemerintah Kota Madiun pada tahun 2016 menyediakan fasilitas sarana prasana penunjang berupa gedung kesenian. Pemerintah Kota Madiun terus mengembangkan sektor pariwisata melalui pembinaan dan pendampingan seperti peningkatan kompetensi SDM kepariwisataan dengan mengadakan bimbingan teknis dan sertifikasi. Hal ini merupakan salah satu upaya agar ke depannya sektor pariwisata mampu menarik banyak wisatawan.

Sedang dalam aspek olahraga pemerintah Kota Madiun berupaya mendorong dan mengembangkan olahraga di kalangan masyarakat. Hal ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan pemerintah pusat dalam rangka mendorong terciptanya masyarakat yang sehat jasmani dan rohani, serta memiliki keterampilan yang tinggi untuk memenangkan kompetisi di era persaingan bebas sebagai dampak dari globalisasi.

Tabel 2.46

Jumlah Klub Olah Raga, Sarpras, serta Peserta Olah Raga Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah klub olah raga (klub)	17	152	152	152	152
2.	Jumlah gedung olah raga per 10.000 penduduk (gedung)	3	5	5	5	5
3.	Rasio kondisi sarpras yang layak	60%	100%	100%	100%	100%
4.	Jumlah peserta olah raga (orang)	38.000	19.501	20.394	19.266	2.015

Sumber: Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan, dan Olah Raga Kota Madiun, 2021

Berdasarkan data tersebut didapatkan bahwa terdapat perkembangan di bidang olahraga dilihat dari jumlah klub olahraga yang cenderung naik dari 17 klub pada tahun 2016 menjadi 152 klub pada tahun 2017.

Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Kota Madiun ikut mendukung dan berperan aktif dalam pengembangan bidang olahraga. Selain itu dalam rangka mendukung perkembangan bidang olahraga pemerintah Kota Madiun juga memfasilitasi sarana prasarana penunjang yaitu dengan membangun gedung olahraga dan memperbaiki kondisi sarpras yang bersamaan dengan pembuatan gedung kesenian, serta peningkatan rasio kondisi sarpras yang layak dari 60% pada tahun 2016 menjadi 100% pada tahun 2017. Namun demikian sejak periode tahun 2017 sampai tahun 2020 jumlah sarana prasarana olah raga cenderung stagnan.

Jumlah peserta olah raga cenderung menurun di tahun 2020 karena adanya pembatasan sosial akibat pandemi Covid-19. Jumlah peserta olah raga menurun dari 19.266 orang di tahun 2019 menjadi 2.015 pada tahun 2020.

2.3 Aspek Pelayanan Umum

2.3.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib

2.3.1.1 Pendidikan

Pendidikan merupakan komponen strategis dalam upaya mempercepat pengurangan kesenjangan pembangunan dan memperluas pembangunan antar wilayah. Salah satu upaya nyata dalam rangka menciptakan cita-cita tersebut adalah melalui peningkatan kualitas kemampuan SDM dan IPTEK untuk mendukung pengembangan klaster-klaster industri. Ketersediaan sumber daya manusia yang terampil dan cerdas (*skilled labour*) merupakan modal utama untuk merintis terbangunnya proyek-proyek besar di setiap klaster industri.

Jumlah anak yang mengikuti PAUD di Kota Madiun pada tahun 2020 adalah sebanyak 1.971 orang yang terdiri dari peserta PAUD di Kecamatan Kartoharjo sebanyak 646 orang, Kecamatan Manguharjo sebanyak 595 orang, dan Kecamatan Taman sebanyak 730 orang. Fasilitas pendidikan PAUD di Kota Madiun dapat dikatakan merata di setiap kecamatan dengan ketersediaan tenaga pendidik yang memadai. Jumlah PAUD di Kecamatan Kartoharjo adalah sebanyak 26 unit dengan jumlah tenaga pendidik sebanyak 120 orang, Kecamatan Manguharjo sebanyak 21 unit dengan jumlah tenaga pendidik sebanyak 116 orang, dan Kecamatan Taman sebanyak 29 unit dengan jumlah tenaga pendidik sebanyak 139 orang.

Jumlah fasilitas bangunan TK di Kota Madiun pada tahun 2020 adalah sebanyak 94 unit dengan seluruh bangunan dalam kondisi baik. Kondisi tersebut tentunya akan mendorong terciptanya suasana pembelajaran yang kondusif sehingga peserta didik diharapkan dapat dengan mudah menyerap pemahaman yang diberikan oleh guru. Jumlah TK di Kecamatan Taman adalah sebanyak 38 unit dengan jumlah siswa sebanyak 2.123 siswa, Kecamatan Kartoharjo sebanyak 32 unit dengan jumlah siswa sebanyak 1.603 siswa, dan Kecamatan Manguharjo sebanyak 24 unit dengan jumlah siswa sebanyak 1.498 siswa, sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 2.47

Jumlah Bangunan, Peserta, dan Tenaga Pendidik PAUD Menurut Kecamatan Tahun 2020

No.	Uraian	Kecamatan		
		Kartoharjo	Manguharjo	Taman
PAUD				
1.	Bangunan PAUD (unit)	26	21	29
2.	Peserta PAUD (orang)	646	595	730
3.	Tenaga Pendidik (orang)	120	116	139
TK				
1.	Jumlah Siswa (orang)	1.603	1.498	2.123
2.	Jumlah TK Bangunan Baik (unit)	32	24	38

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Madiun, 2021

Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Sebagai contoh, APK SD sama dengan jumlah siswa yang duduk di bangku SD dibagi dengan jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun.

APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Partisipasi sekolah menggambarkan banyaknya penduduk usia sekolah yang masih sekolah, sehingga terkait dengan pengentasan program wajib belajar. Peningkatan APK menunjukkan adanya keberhasilan dalam memperluas jangkauan layanan pendidikan. Ada dua aspek yang mempengaruhi tingginya tingkat partisipasi sekolah yaitu pemerintah dan masyarakat. Pemerintah sebagai penyedia sarana pendidikan yang memadai, sedangkan masyarakat sebagai yang dituntut pengertian dan kesadarannya akan arti pentingnya pendidikan. Peningkatan partisipasi tersebut mengindikasikan bahwa penduduk di Kota Madiun telah menyadari pentingnya arti pendidikan.

Tabel 2.48

Angka Partisipasi Kasar Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Madiun
Tahun 2016-2020

Jenjang Pendidikan	Tahun				
	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)
PAUD	74,53	114,35	106,70	109	95,61
SD/MI	107,93	118,01	144,90	143,28	120,23
SMP/MTs	88,23	108,14	135,03	170,76	174,89
SMA/SMK/MA	115,24	115,24	101,87	95,83	96,55

Sumber : Dinas Pendidikan, 2021

Berdasarkan tabel sebelumnya, APK jenjang PAUD pada periode tahun 2016-2017 mengalami kenaikan yang cukup significant dari sebesar 74,53% di tahun 2016 menjadi sebesar 114,35% di tahun 2017. Sedangkan dalam kurun waktu 2018-2020 cenderung mengalami penurunan, hingga mencapai sebesar 95,61% di tahun 2020. APK pada jenjang SD/MI cenderung fluktuatif pada setiap tahunnya. Pada tahun 2016 APK SD/MI sebesar 107,93% dan terus meningkat sebesar 144,90% pada Tahun 2018. Pada tahun 2019 mengalami sedikit penurunan menjadi sebesar 143,28% dan kembali menurun pada tahun 2020 menjadi sebesar 120,23%. Hal tersebut berarti terdapat penduduk di luar usia sekolah SD (7-12 tahun) yang masih bersekolah SD dimana terlihat dari angka APK SD/MI yang nilainya lebih besar dari 100%. APK jenjang SMP/MTs mengalami pola perubahan yang beragam di tiap tahunnya. APK tertinggi terjadi pada tahun 2020 yakni sebesar 174,89% dan APK terendah terjadi pada tahun 2016 yakni sebesar 88,23%. APK jenjang pendidikan SMA/SMK/MA pada tahun 2016 sebesar 136,86%. Namun setelah itu terus mengalami penurunan hingga pada tahun 2019 menjadi 95,83% dan sedikit mengalami kenaikan pada tahun 2020 menjadi 96,55%.

Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah indikator pendidikan yang digunakan untuk mendeteksi partisipasi penduduk yang bersekolah tepat pada waktunya. APM adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM juga menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. APM di suatu jenjang pendidikan didapat dengan cara membagi jumlah siswa atau penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang sekolah tersebut, misalnya APM SD merupakan jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang sedang bersekolah di tingkat SD dibagi dengan jumlah penduduk usia 7-12 tahun.

Tabel 2.49
Angka Partisipasi Murni Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Madiun
Tahun 2016-2020

Jenjang Pendidikan	Tahun				
	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)
SD/MI	100,00	98,17	134,59	135,45	113,38
SMP/MTs	80,10	82,05	169,63	131,33	140,70
SMA/SMK/MA	80,14	80,14	78,59	81,30	81,30

Sumber : Dinas Pendidikan, 2021

Berdasarkan tabel di atas APM di Kota Madiun dalam 5 (lima) tahun terakhir yakni tahun 2016 hingga tahun 2020 menunjukkan pola yang berbeda-beda di setiap jenjang pendidikan. APM jenjang SD/MI tertinggi terjadi pada tahun 2019 yakni sebesar 135,45% dan APM terendah pada tahun 2017 dengan nilai 98,17%. Sedang pada jenjang SMP/MTs, APM tertinggi terjadi pada tahun 2018 yakni sebesar 169,63% dan APM terendah pada tahun 2016 sebesar 80,10%. APM jenjang SMA/SMK/MA tertinggi terjadi pada tahun 2019 dan 2020 yakni sebesar 81,30% dan terendah terjadi pada tahun 2018 yakni sebesar 78,59% dan mulai tahun 2017 data APM jenjang SMA/SMK/MA sudah tidak dihitung lagi karena bukan menjadi kewenangan Pemerintah Kota Madiun dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pendidikan menengah atas menjadi kewenangan provinsi. APM jenjang pendidikan SD di Kota Madiun pada tahun 2020 adalah sebesar 113,38%. Hal tersebut dapat diartikan bahwa terdapat beberapa anak yang berusia 7-12 tahun tidak bersekolah pada jenjang pendidikan SD/MI. APM jenjang pendidikan SMP pada tahun 2020 adalah sebesar 140,70% dimana hal tersebut berarti masih ada siswa yang berusia 13-15 tahun tidak bersekolah pada jenjang pendidikan SMP.

Angka Partisipasi Sekolah

Angka partisipasi sekolah (APS) dapat digunakan untuk mengetahui berapa banyak penduduk usia sekolah yang telah memanfaatkan fasilitas pendidikan. Partisipasi sekolah menggambarkan banyaknya penduduk usia sekolah yang masih sekolah, sehingga terkait dengan pengentasan program wajib belajar. Indikator inilah yang digunakan sebagai petunjuk berhasil tidaknya program tersebut. Sebagai standar program wajib belajar dikatakan berhasil jika nilai APS SD sebesar 100% dan APS SMP sebesar 100% atau dengan kata lain semua anak usia sekolah 7-12 tahun dan 13-15 tahun bersekolah.

Peningkatan APS menunjukkan adanya keberhasilan dalam memperluas jangkauan layanan pendidikan. Ada dua aspek yang mempengaruhi tingginya tingkat partisipasi sekolah yaitu pemerintah dan masyarakat. Pemerintah sebagai penyedia sarana pendidikan yang memadai, sedangkan masyarakat yang dituntut pengertian dan kesadarannya akan arti pentingnya pendidikan.

APS di Kota Madiun pada jenjang SD (7-12 tahun) pada tahun 2016 menunjukkan angka 100%. Namun pada tahun 2017 dan 2018, nilai APS SD justru mengalami penurunan menjadi sebesar 98,42%. Tahun 2019 kembali menunjukkan angka 100% dan >100% pada tahun 2020, nilai APS SD justru mengalami kenaikan menjadi sebesar 113,76%. APS pada jenjang SMP atau usia 13-15 tahun menunjukkan angka 100% selama periode 2016 hingga 2019. Nilai APS pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 144,31%. Data tersebut menunjukkan bahwa dalam kurun waktu tujuh tahun anak usia 7-15 tahun di Kota Madiun telah mengikuti program wajib belajar 9 tahun yang dikeluarkan oleh pemerintah.

APS jenjang SMA atau usia 16-18 tahun, berdasarkan jenis kelamin, pada tahun 2017 menunjukkan APS laki-laki lebih besar daripada APS perempuan. Namun, dalam 3 (tiga) tahun terakhir yakni tahun 2018 hingga 2020, APS perempuan lebih besar daripada APS laki-laki. Pada tahun 2020 APS laki-laki mengalami kenaikan jika dibandingkan tahun 2019 yang menjadi sebesar 94,23%. Sedangkan untuk APS perempuan juga mengalami kenaikan pada tahun 2020 menjadi 100%. Peningkatan APS perempuan pada jenjang SMA menunjukkan bahwa kesempatan perempuan dalam pendidikan di Kota Madiun telah setara, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.50
Angka Partisipasi Sekolah di Kota Madiun Tahun 2016-2020

Jenjang Pendidikan	Tahun				
	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)
APS PAUD	74,53	100	100	100	95,61
APS SD (7-12 tahun)					
Laki-laki	100	96,82	96,82	100	113,18
Perempuan	100	100	100	100	114,35
Total	100	98,42	98,42	100	113,76
APS SMP (13-15 tahun)					
Laki-laki	100	100	100	100	138,43
Perempuan	100	100	100	100	150,19

Jenjang Pendidikan	Tahun				
	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)
Total	100	100	100	100	144,31
APS SMA (16-18 tahun)					
Laki-laki	77,87	90,72	94,10	92,97	94,23
Perempuan	97,49	88,48	95,73	98,24	100
Total	86,49	98,41	95,63	95,60	97,11

Sumber: BPS Kota Madiun, 2021

Angka Kelulusan

Ujian nasional untuk jenjang pendidikan SD hingga SMA ditujukan untuk mengukur kualitas pendidikan di suatu wilayah apakah telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan secara nasional. Hal tersebut berarti bahwa kelulusan dalam ujian nasional secara kasar dapat menunjukkan bahwa kualitas pendidikan di suatu wilayah telah memenuhi kualitas nasional.

Selama kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2020, angka kelulusan SD/MI/SDLB di Kota Madiun menunjukkan nilai sebesar 100%. Artinya siswa pada jenjang tersebut berhasil lulus ujian nasional secara keseluruhan.

Tabel 2.51
Angka Kelulusan di Kota Madiun Tahun 2016-2020

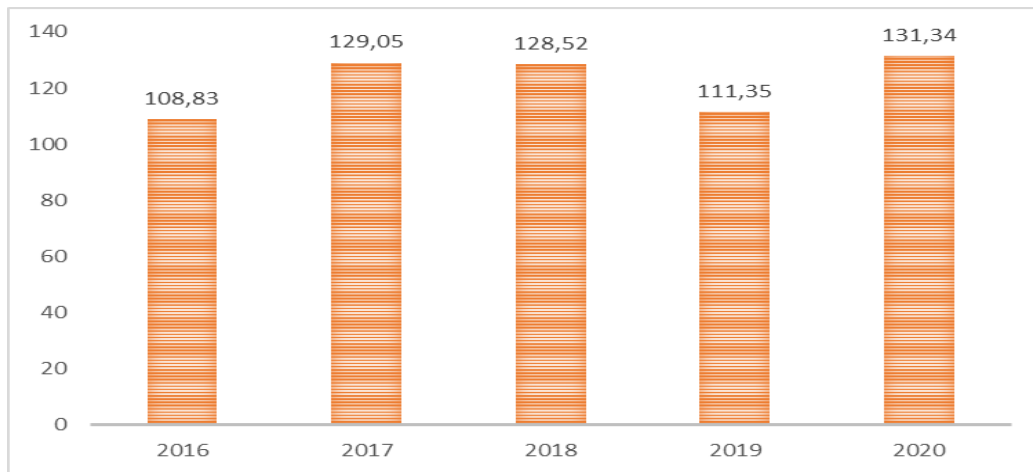
Tahun	SD/MI/SDLB (%)	SMP/MTs/SMPPLB(%)
2016	100	100
2017	100	100
2018	100	100
2019	100	100
2020	100	100

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Madiun, 2021

Angka Melanjutkan Sekolah

Selama tahun 2016 hingga tahun 2020, angka melanjutkan pendidikan dari jenjang pendidikan dasar ke pendidikan menengah di Kota Madiun telah mencapai lebih dari 100% dengan besaran yang bervariasi. Angka melanjutkan sekolah pada jenjang SD ke SMP di Kota Madiun pada tahun 2016 mencapai 108,83% selanjutnya meningkat menjadi 129,05% pada tahun 2017. Pada tahun selanjutnya angka melanjutkan sekolah sedikit menurun mencapai 128,52% pada tahun 2018 dan 111,35% pada tahun 2019, akan tetapi meningkat secara signifikan pada tahun 2020 yang mencapai 131,34%

Secara keseluruhan angka melanjutkan sekolah di Kota Madiun telah mencapai lebih dari 100%. Pada tahun 2017 sampai dengan 2020 angka melanjutkan sekolah nilainya sama dengan angka melanjutkan sekolah pada jenjang SD ke SMP dikarenakan mulai tahun 2017 SMA/SMK/MA menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.



Sumber: Dinas Pendidikan Kota Madiun, 2021

Gambar 2.34

Angka Melanjutkan Sekolah di Kota Madiun Tahun 2016-2020

Jumlah Sekolah

Pendidikan merupakan salah satu pilar terpenting dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Pembangunan di bidang pendidikan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu yang relevan dengan kondisi dan dinamika yang ada, untuk mewujudkan efisiensi manajemen pendidikan.

Pendidikan menjadi salah satu isu strategis dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Madiun. Hal ini disadari karena pendidikan dipandang sebagai unsur utama dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pembangunan sumber daya manusia tidak terlepas dari tingkat ketersediaan fasilitas pendidikan.

Jumlah sekolah merupakan salah satu indikator yang dapat menunjukkan ketersediaan fasilitas sekolah. Maka dari itu, perlu adanya perhatian pemerintah terkait dengan ketersediaan sekolah guna mendukung peningkatan kualitas pendidikan. Secara umum, fasilitas sekolah yang ada di Kota Madiun telah memadai didukung dengan bangunan sekolah yang baik dan tersebar merata di setiap kecamatan. Data pada tahun 2020 menunjukkan sekolah di Kota Madiun yakni sebanyak 158 unit sekolah, yang terbagi menjadi 72 unit SD, 15 unit MI, 23 unit SMP, 1 unit MTs, 42 unit SMA/SMK dan 5 unit MA. Berdasarkan kecamatan, jumlah SD dan MI terbanyak yakni Kecamatan Taman dan Kecamatan Manguharjo, kecamatan dengan SMP dan MTs terbanyak yakni Kecamatan Mangunharjo dan Kecamatan Taman, serta kecamatan dengan SMA/SMK dan MA terbanyak yakni Kecamatan Taman untuk kedua jenjang pendidikan. Secara keseluruhan, sebagian besar sekolah terletak di Kecamatan Mangunharjo dan Kecamatan Taman.

Tabel 2.52
Jumlah Sekolah Menurut Kecamatan di Kota Madiun Tahun 2020

Jenjang Pendidikan	Kecamatan			Jumlah
	Manguharjo (unit)	Taman (unit)	Kartoharjo (unit)	
Sekolah Dasar (SD)	22	26	24	72
Madrasah Ibtidaiyah (MI)	6	6	3	15
Sekolah Menengah Pertama (SMP)	10	9	4	23
Madrasah Tsanawiyah (MTs)	0	1	0	1
Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan (SMA/SMK)	15	15	12	42
Madrasah Aliyah (MA)	-	4	1	5

Sumber: BPS Kota Madiun, 2021

Rasio Ketersediaan Sekolah-Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar

Rasio ketersediaan sekolah-penduduk usia sekolah merupakan rasio perbandingan antara jumlah penduduk sekolah dengan jumlah penduduk usia sekolah. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan jumlah sekolah dalam menampung usia penduduk usia sekolah.

Berdasarkan kategori pendidikan dasar, rasio ini dihitung dengan membagi antara jumlah sekolah (SD/MI+SMP/MTs) dengan jumlah penduduk usia sekolah (7-12 tahun) ditambah penduduk usia (13-15 tahun) dikali 10.000.

Rasio ketersediaan sekolah-penduduk usia sekolah pada tahun 2016 pada kategori pendidikan dasar di Kota Madiun yakni sebesar 1:38. Rasio ini tetap hingga tahun 2017. Tahun 2018 hingga tahun 2020, rasio ketersediaan sekolah-pendidikan dasar terus mengalami peningkatan.

Rasio ketersediaan sekolah menjadi sebesar 1:39 pada tahun 2018, kemudian meningkat menjadi 1:52 pada tahun 2019, dan pada tahun 2020 meningkat sangat signifikan menjadi 1:56 yang artinya setiap 1 unit lembaga pendidikan dasar dapat menampung 177 siswa penduduk usia sekolah.

Tabel 2.53
Rasio Ketersediaan Sekolah-Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar
di Kota Madiun Tahun 2016-2020

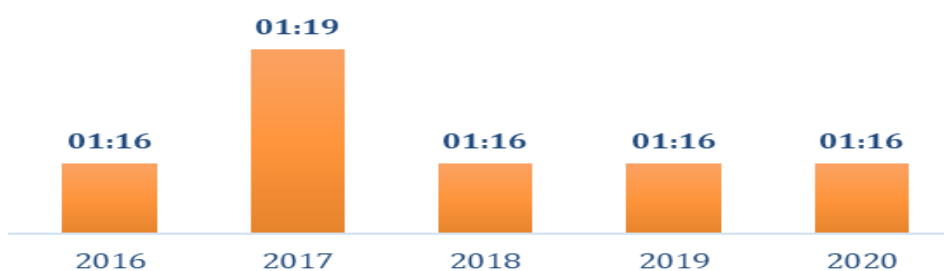
Tahun	Pendidikan Dasar
2016	1 : 38
2017	1 : 38
2018	1 : 39
2019	1 : 52
2020	1 : 56

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Madiun, 2021 (diolah)

Rasio Guru-Murid Pendidikan Dasar dan Menengah

Rasio guru-murid merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan guru dalam menangani siswa. Rasio ini dihitung dengan membagi jumlah guru (SD/MI+SMP/MTs) dengan jumlah murid (SD/MI+SMP/MTs) dikali 10.000 untuk jenjang pendidikan dasar.

Data menunjukkan rasio murid-guru pada jenjang pendidikan dasar di Kota Madiun pada tahun 2016 adalah sebesar 1:16 Artinya, setiap 1 guru dapat menangani 16 siswa. Namun, pada tahun 2017 rasio guru-murid di Kota Madiun menunjukkan angka yang berbeda yakni sebesar 1:19 yang artinya setiap 1 guru dapat menangani 19 siswa, dan pada tahun 2018-2020 rasio guru-murid kembali lagi 1:16.



Sumber: Dinas Pendidikan Kota Madiun, 2021 (diolah)

Gambar 2.35

Rasio Guru-Murid Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah di Kota Madiun Tahun 2016-2020

Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D4

Pendidik SD/MI/SDLB berkualifikasi S1/D4 pada tahun 2016 berjumlah 836 orang. Namun, pada tahun 2017 guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4 menurun menjadi 790 orang.

Selama kurun waktu 2018 hingga tahun 2020 pendidik SD/MI/SDLB yang memenuhi kualifikasi S1/D4 mengalami tren peningkatan, hingga menjadi 1133 orang di tahun 2020. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4 pada jenjang SMP/MTs/SMPLBP pada tahun 2016 adalah sejumlah 592 orang, dan meningkat menjadi 638 orang pada tahun 2017. pada kurun waktu 2018 pendidik pada jenjang SMP/MTs/SMPLBP yang memenuhi kualifikasi S1/D4 mengalami penurunan dari tahun 2017 menjadi 626 orang, dimana pada tahun 2019 naik menjadi 671 orang, kemudian berangsur naik sebesar 678 orang di tahun 2020.

Secara keseluruhan jenjang pendidikan guru yang memenuhi klasifikasi S1/D4 di Kota Madiun mengalami penurunan pada tahun 2017 hanya sebesar 92,04%. Tahun 2018, sebesar 98,02% guru telah memenuhi kualifikasi S1/D4. Tahun 2019 dan 2020 mengalami penurunan hampir dua % sehingga menjadi 96,1% dan 96,83%. Peningkatan guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4 dalam kurun waktu 2017 hingga 2018 menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Madiun berusaha meningkatkan kualitas pendidikan melalui perbaikan kualitas guru yang mengajar yang selanjutnya ditunjang dengan fasilitas pendidikan yang memadai.

Tabel 2.54

Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D4 di Kota Madiun Tahun 2016-2020

Tahun	SD/MI/SDLB (orang)	SMP/MTs/SMPLB (orang)	persentase (%)
2016	836	592	96,21
2017	790	638	92,04
2018	760	626	98,02
2019	1085	671	96,1
2020	1133	678	96,83

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Madiun, 2021 (diolah)

2.3.1.2 Kesehatan

Dalam perspektif pembangunan manusia ada 3 (tiga) domain utama yang menjadi fokus pembangunan, yaitu: kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Meskipun sesungguhnya ketiga domain tersebut saling berinteraksi dan berinter-relasi satu dengan yang lainnya. Dapat dimengerti bahwa, tanpa kesehatan yang baik, pendidikan tidak mungkin dapat berjalan dengan baik, tanpa kesehatan yang baik dan pendidikan yang baik mustahil ekonomi keluarga masyarakat dapat membaik pula. Tanpa kesehatan dan pendidikan yang baik/prima, ekonomi yang layak sulit untuk dicapai.

Namun sebaliknya, tanpa ekonomi yang kuat, kesehatan dan pendidikan keluarga/masyarakat pun tidak mungkin dapat membaik.

Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup dan Angka Keberlangsungan Hidup Bayi

Kualitas kesehatan ibu, balita, dan bayi baru lahir salah satunya dapat diukur dengan indikator angka kematian bayi dan angka keberlangsungan hidup bayi. Dalam kurun waktu 2016-2020 angka kematian bayi di Kota Madiun cenderung turun pada tahun 2017-2020. Pada tahun 2016, angka kematian bayi per 1.000 kelahiran di Kota Madiun menunjukkan nilai sebesar 7,30, namun meningkat pada tahun 2017 menjadi 7,57. Peningkatan angka kematian bayi pada tahun 2016-2017 disebabkan oleh kelainan diare, BBLR, asfiksia, kongential, infeksi seperti panas demam, febris konvulsi, kejang dan infensi otak, serta lain-lain seperti kejang, pneumonia, dan leukemia. Pada tahun 2018-2020, angka kematian bayi per 1.000 kelahiran di Kota Madiun mengalami penurunan yaitu menjadi sebesar 6,64 pada tahun 2018, 6,32 pada tahun 2019 dan 4,32 pada tahun 2020.

Penurunan angka kematian bayi akan berpengaruh pada angka peningkatan keberlangsungan hidup bayi, dan sebaliknya. Angka keberlangsungan hidup bayi per 1.000 kelahiran, pada tahun 2016 sampai dengan 2020 mengalami tren kenaikan. Pada tahun 2017 menunjukkan nilai sebesar 992,64 yang mengalami penurunan sedikit pada tahun 2016, selanjutnya meningkat pada kurun waktu 2018-2020 hingga mencapai nilai 995,68 bayi per 1.000 kelahiran pada tahun 2020 (Tabel 2.39).

Tabel 2.55

Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup dan Angka Keberlangsungan Hidup Bayi di Kota Madiun, 2016-2020

Tahun	Angka Kematian Bayi	Angka Keberlangsungan Hidup Bayi
2016	7,30	992,70
2017	7,57	992,64
2018	6,64	993,36
2019	6,32	993,68
2020	4,32	995,68

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun, 2021

Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup

Selain angka kematian bayi, angka kematian ibu juga menjadi indikator yang menjelaskan mengenai kualitas kesehatan di masyarakat. Dalam Kurun waktu periode 2016-2020, angka kematian ibu terus mengalami penurunan, hingga menyentuh nihil kasus kematian. Pada tahun 2016 tercatat angka kematian ibu sebesar 38,43. Penurunan angka kematian secara signifikan pada tahun 2017 menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Madiun telah bersungguh-sungguh dalam memberikan pelayanan kepada ibu hamil baik melalui pendampingan, pembinaan, dan pemberian layanan langsung bagi ibu hamil khususnya bagi keluarga tidak mampu di berbagai fasilitas kesehatan. Data tahun 2017-2018 menunjukkan bahwa tidak terdapat kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup di Kota Madiun. Pada tahun 2019 kembali muncul angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup sebesar 39,53. Pada tahun 2020 kembali menurun dan menunjukkan tidak adanya angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup, hal ini mengindikasikan bahwa program-program pembangunan bidang kesehatan yang dijalankan Pemerintah Kota Madiun telah berlangsung secara efektif.

Tabel 2.56

Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup di Kota Madiun, 2016-2020

Tahun	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup
2016	38,37
2017	Tidak ada kasus
2018	Tidak ada kasus
2019	39,53
2020	Tidak ada kasus

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun, 2021

Rasio Posyandu per Satuan Balita

Posyandu adalah suatu wadah komunikasi alih teknologi dalam pelayanan kesehatan masyarakat dan Keluarga Berencana dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Pelaksanaan Posyandu yang didukung oleh pelayanan dan pembinaan teknis dari petugas kesehatan memiliki nilai strategis untuk pengembangan sumber daya manusia sejak dini. Rasio posyandu per satuan balita merupakan perbandingan antara jumlah posyandu dengan jumlah balita. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2016, rasio posyandu per satuan balita di Kota Madiun mencapai angka 2,2. Selanjutnya pada tahun 2017-2018, nilai rasio posyandu terhadap satuan balita cenderung tetap dan tidak mengalami perubahan. Pada tahun 2019 posyandu per satuan balita kembali meningkat menjadi 2,3 sedikit mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 2,29.

Tabel 2.57
Rasio Posyandu per Satuan Balita di Kota Madiun, 2016-2020

Tahun	Rasio (%)
2016	2,2
2017	2,2
2018	2,2
2019	2,3
2020	2,29

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun, 2021

Stunting

Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yaitu tinggi badan anak lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar usianya. Kondisi tubuh anak yang pendek seringkali dikatakan sebagai faktor keturunan (genetik) dari kedua orang tuanya, sehingga masyarakat banyak yang hanya menerima tanpa berbuat apa-apa untuk mencegahnya. Padahal seperti kita ketahui, genetika merupakan faktor determinan kesehatan yang paling kecil pengaruhnya bila dibandingkan dengan faktor perilaku, lingkungan (sosial, ekonomi, budaya, politik), dan pelayanan kesehatan. Dengan kata lain, stunting merupakan masalah yang sebenarnya bisa dicegah.

Stunting merupakan prioritas nasional, sehingga salah satu fokus utama bidang kesehatan yang dilaksanakan pemerintah saat ini adalah pencegahan stunting. Upaya ini bertujuan agar anak-anak Indonesia dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan maksimal, dengan disertai kemampuan emosional, sosial, dan fisik yang siap untuk belajar, serta mampu berinovasi dan berkompetisi di tingkat global. Data stunting di Kota Madiun dari tahun 2016 sampai dengan 2020 mengalami penurunan jumlah.

Pada tahun 2016 data stunting menunjukkan persentase sebesar 16,61% dan mengalami penurunan sebesar 8,56 dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Sehingga persentase data stunting tahun 2020 menjadi 8,90%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah kota cukup berhasil dalam pencegahan stunting. Selain itu, dengan tingkat kondisi perekonomian yang baik dan tingkat kesadaran masyarakat yang tinggi akan perkembangan anak akan menjadi faktor pendorong utama keberhasilan pencegahan stunting di Kota Madiun.

Tabel 2.58
Data Stunting, 2016-2020

Tahun	Jumlah yang diperiksa	Jumlah Stunting	persentase
2016	8.096	1.345	16,61%
2017	8.606	1.267	14,72%
2018	8.407	995	11,84%
2019	7.907	895	11,31
2020	8.822	785	8,90

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun, 2021

Rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu per Satuan Penduduk

Salah satu upaya pemerintah untuk menyehatkan masyarakat adalah dengan membangun sarana dan prasarana kesehatan. Dengan demikian akses masyarakat ke sarana dan prasarana kesehatan lebih mudah serta meningkatkan profesionalisme tenaga medis yang ada. Upaya meningkatkan pemerataan kesehatan masyarakat antara lain ditempuh dengan jalan menyediakan fasilitas kesehatan yang bisa dijangkau oleh semua lapisan masyarakat. Sebab tanpa sarana yang memadai, derajat kesehatan penduduk yang baik akan sulit tercapai. Ketersediaan fasilitas kesehatan yang menunjang bagi masyarakat merupakan suatu hal yang dibutuhkan dan dapat menjadi faktor utama keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan.

Tabel 2.59
Rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu per 1.000 Penduduk di Kota Madiun, 2016-2020

Tahun	Rasio Jumlah Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu per 1.000 Penduduk
2016	0,11
2017	0,11
2018	0,11
2019	0,11
2020	0,11

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun, 2021

Ketersediaan sarana pelayanan kesehatan seperti puskesmas, poliklinik, dan pustu di masyarakat dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Selama tahun 2016 hingga tahun 2020, rasio jumlah puskesmas, poliklinik, dan pustu per 1.000 penduduk di Kota Madiun cenderung stabil. Pada tahun 2016 hingga tahun 2020 rasio jumlah puskesmas, poliklinik, dan pustu sebesar 0,11.

Rasio Dokter dan Tenaga Kesehatan Lainnya

Rasio dokter dan tenaga medis per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk. Berdasarkan standar sistem pelayanan kesehatan terpadu, idealnya 1 dokter dan tenaga medis melayani 2.500 penduduk. Adapun di Kota Madiun jumlah dokter dan tenaga medis dapat dikatakan sudah melebihi ideal, yaitu 1 dokter melayani sekitar 1000 penduduk.

Data menunjukkan bahwa pada tahun 2015 hingga 2020, rasio dokter per 100.000 penduduk di Kota Madiun berkisar antara 103,32 hingga 171,93. Rasio tertinggi terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 171,93 dan rasio terendah terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 103,32. Namun secara keseluruhan dalam 5 (lima) tahun rasio dokter menunjukkan peningkatan, hanya saja pada tahun 2018 mengalami sedikit penurunan menjadi 136,32. Hal ini menunjukkan kebutuhan dokter di Kota Madiun semakin meningkat dan semakin banyak dokter spesialis yang disediakan oleh RS di Kota Madiun.

Adapun untuk rasio tenaga kesehatan lainnya pada tahun 2016 hingga 2020 berkisar antara 719,87 hingga 1.094,707. Rasio tertinggi terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 1.094,707 dan rasio terendah terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 719,87. Peningkatan ini terjadi akibat adanya pencatatan dan pelaporan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan yang semakin meningkat, serta adanya pembinaan dan pengawasan yang semakin baik.

Tabel 2.60

Rasio Dokter dan Tenaga Kesehatan Lainnya per 100.000 Penduduk di Kota Madiun, Tahun 2016-2020

Tahun	Dokter	Tenaga Kesehatan Lainnya
2016	103,32	719,87
2017	151,09	996,14
2018	136,32	906,59
2019	138,02	818,12
2020	171,93	1.094,707

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun, 2021

Rasio Rumah Sakit per 1.000 Penduduk

Selama tahun 2016 hingga 2020, di Kota Madiun beroperasi sebanyak 8 rumah sakit, yang terdiri dari 1 rumah sakit milik pemerintah kota, 1 rumah sakit milik pemerintah provinsi, 1 rumah sakit milik TNI/AD, 1 rumah sakit swasta, dan 1 rumah sakit khusus. Adapun pada tahun 2016 hingga 2020 rasio rumah sakit per 1.000 penduduk di Kota Madiun cenderung stabil. Pada tahun 2016 sampai dengan 2020, rasio ini menunjukkan nilai sebesar 0,0381.

Tabel 2.61

Rasio Rumah Sakit per 1.000 Penduduk di Kota Madiun, 2016-2020

Tahun	Jumlah Rumah Sakit	Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Rumah Sakit Terhadap 1.000 Penduduk
2016	8	210.037	0,0381
2017	8	209.809	0,0381
2018	8	209.797	0,0381
2019	8	210.115	0,0381
2020	8	209.950	0,0381

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun, 2021

Cakupan Imunisasi

Indikator imunisasi balita digunakan untuk menggambarkan tingkat pelayanan imunisasi lengkap terhadap balita. Pemberian imunisasi pada balita sangat perlu dalam menjaga kekebalan pada tubuh balita dari berbagai macam penyakit. Imunisasi merupakan salah satu cara preventif untuk menurunkan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian akibat suatu penyakit, seperti TBC, difteri, pertussis, hepatitis B, polio, dan campak.

Di Kota Madiun, Pada tahun 2016 cakupan imunisasi di Kota Madiun telah mencapai lebih dari 90% dengan cakupan tertinggi yakni imunisasi dasar lengkap sebesar 95,93%. Dengan meningkatnya cakupan imunisasi, diharapkan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian akibat suatu penyakit dapat diminimalisir. Pada tahun 2020, persentase balita yang memperoleh imunisasi dasar lengkap menurun menjadi sebesar 96,91% dibandingkan tahun 2019 sebesar 98,63%. Ke depannya, diharapkan bahwa seluruh balita di Kota Madiun memperoleh imunisasi dasar lengkap sesuai dengan target kinerja SPM yang dibebankan.

Tabel 2.62
Cakupan Imunisasi di Kota Madiun, 2015-2020

Jenis Imunisasi	2016	2017	2018	2019	2020
HB 0	90,80	70,73	72,38	96,21	86,15
BCG	95,22	91,06	81,79	97,25	97,1
POLIO 1	93,29	88,82	85,45	97,63	94,57
DPT HB 1	94,53	86,07	80,51	98,91	89,39
POLIO 2	92,28	83,05	79,79	98,39	88,98
POLIO 3	90,50	82,34	78,36	97,87	89,84
DPT HB 2	91,97	84,89	77,85	97,91	90,37
DPT HB 3	91,89	84,11	78,32	96,9	90,16
POLIO 4	91,04	78,61	77,54	96,5	89,96
Campak	91,54	63,93	82,45	98,7	96,83
Imunisasi Dasar Lengkap	95,93	97,84	96,55	98,63	96,91

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun, 2021

Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit DBD

Penyelesaian dan penanganan DBD diperlukan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Pada tahun 2020, di Kota Madiun penanganan kasus DBD telah mencapai 100%. Hal ini didukung oleh adanya keterlibatan lintas program dan lintas sektor, seperti koordinasi dengan rumah sakit di Kota Madiun dalam pelaporan kasus, adanya penanganan cepat dari Puskesmas, adanya Penyelidikan Epidemiologi, Penyuluhan Pemberantasan Sarang Nyamuk Larvasiadi dan Fogging oleh Dinas Kesehatan & KB, serta peran dari kader jumentik RT dan lintas sektor terkait dalam upaya menggerakkan PSN di masyarakat.

Data 2020 menunjukkan sebanyak 58 kasus DBD ditemukan di Kota Madiun. Dari data tersebut juga dapat dilihat bahwa penderita yang meninggal serta *case fatality rate* (CFR) DBD sebesar 0%, yang artinya tidak terdapat kasus kematian akibat adanya penyakit DBD.

Tabel 2.63
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit DBD di Kota Madiun, 2020

No.	Puskesmas	Demam Berdarah Dengue (DBD)								
		Jumlah Kasus			Meninggal			CFR (%)		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1.	Oro-Oro Ombo	2	4	6	0	0	0	0	0	0
2.	Tawangrejo	3	0	3	0	0	0	0	0	0
3.	Banjarejo	4	3	7	1	0	1	25	0	14,29
4.	Demangan	8	2	10	0	0	0	0	0	0
5.	Manguharjo	4	3	7	0	0	0	0	0	0
6.	Patihan	15	10	25	1	0	1	6,67	0	4,00
Jumlah		36	22	58	2	0	2	5,56	0	3,45
Incidence Rate Per 100.000 Penduduk		20,3	12,4	32,7						

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun, 2021

2.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan pekerjaan umum salah satunya dapat dilihat dari indikator kondisi jalan dan infrastruktur lainnya. Jaringan jalan yang baik, memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maupun terhadap kondisi sosial budaya kehidupan masyarakat. Infrastruktur jalan yang baik adalah modal sosial masyarakat dalam menjalani roda perekonomian, sehingga pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak mungkin dicapai tanpa ketersediaan infrastruktur jalan yang baik dan memadai.

Pelaksanaan urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang memiliki tujuan untuk mewujudkan pelayanan dasar masyarakat dengan tujuan mengembangkan infrastruktur, pengelolaan lingkungan hidup, dan penataan ruang yang berbasis *eco-city*. Adapun sasaran dari urusan ini adalah meningkatnya kualitas pelayanan transportasi dan meningkatnya pelayanan drainase, dan pengendalian banjir dan air bersih. Beberapa indikator yang dapat menjelaskan pencapaian kinerja urusan pekerjaan umum dan penataan ruang antara lain:

Panjang Jalan Berdasarkan Kondisi

Kondisi jalan terbagi menjadi kondisi baik, sedang, rusak ringan, dan rusak berat. Selama tahun 2016 hingga tahun 2020 kondisi jalan berkategori baik di Kota Madiun terus mengalami peningkatan. Panjang jalan dalam kondisi baik pada tahun 2016 adalah sepanjang 389,66 km dan pada tahun 2019 meningkat menjadi sepanjang 405,54 km. Di satu sisi panjang jalan yang baik bertambah, namun pada tahun 2019 masih terdapat jalan dalam kondisi sedang yaitu sepanjang 26,25 km. Dalam rangka menjaga kondisi jalan yang tetap mantap dan memadai, Pemerintah Kota Madiun telah melaksanakan langkah-langkah pemeliharaan jalan setiap tahun dengan kondisi jalan baik dilaksanakan dengan sistim pemeliharaan rutin, kondisi jalan sedang dilaksanakan dengan pemeliharaan berkala, dan kondisi rusak dilaksanakan sistem pemeliharaan berkala atau dengan peningkatan jalan. Panjang jalan kota pada tahun 2020 adalah 433,485 km dengan 407,62 km panjang jalan kota dalam kondisi baik, dan jalan dalam kondisi sedang sebesar 21,80 km. Pada tahun 2020, kondisi jalan baik mengalami peningkatan sebesar 2,08 km di bandingkan tahun sebelumnya. sedangkan kondisi jalan rusak ringan pada tahun 2020 sebesar 2,15 km dan tidak terdapat kondisi Jalan Rusak Berat pada Tahun 2020. Data pada Tabel di bawah menunjukkan bahwa secara umum kondisi jalan di Kota Madiun telah memenuhi kebutuhan masyarakat akan aksesibilitas yang memadai.

Tabel 2.64

Perkembangan Panjang Jalan dalam Km Berdasarkan Kondisi di Kota Madiun, Tahun 2016-2020

Kondisi Jalan	Panjang Jalan (km) / Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Baik	389,66	400,70	397,48	405,54	407,62
Sedang	25,85	26,19	31,52	26,25	21,80
Rusak ringan	5,00	4,54	1,47	0	2,15
Rusak Berat	1,15	1,37	2,63	1,305	0
Jumlah	421,66	432,80	433,10	433,095	433,485

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun, 2021

Panjang Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase

Panjang jalan di Kota Madiun sampai tahun 2020 baik jalan Kota maupun jalan nasional yang memiliki trotoar cenderung meningkat. Trotoar diperlukan guna memfasilitasi para pejalan kaki. Pada tahun 2016, sepanjang 87,94 km jalan di Kota Madiun tercatat telah memiliki trotoar dan meningkat pada dua tahun berikutnya menjadi 90,40 km pada 2017 dan 92,09 km pada 2018. Pada tahun 2019 dan 2020 mengalami sedikit peningkatan dibanding tahun sebelumnya yaitu masing-masing sebesar 92,61 dan 92,74. Selain penambahan jalan yang memiliki trotoar, panjang jalan di Kota Madiun yang memiliki drainase juga bertambah dari sepanjang 414,14 km pada tahun 2016 menjadi sepanjang 450,025 km pada tahun 2020.

Tabel 2.65

Perkembangan Panjang Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase di Kota Madiun, Tahun 2016-2020

Tahun	Panjang Jalan Memiliki Trotoar (km)	Panjang Jalan Memiliki Drainase (km)
2016	87,94	414,14
2017	90,40	442,68
2018	92,09	444,37
2019	92,61	449,635
2020	92,74	450,025

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun, 2021

Drainase Dalam Kondisi Baik

Selain ketersediaan drainase di sepanjang jalan, perlu diperhatikan kualitas dari drainase tersebut. Drainase yang baik akan mengurangi potensi banjir di suatu wilayah. Drainase dalam kondisi baik dalam hal ini termasuk pula kondisi pembuangan air yang tidak tersumbat. Di Kota Madiun, selama tahun 2016 hingga tahun 2020 lebih dari 90% drainase dalam kondisi baik dan cenderung terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2016, sebesar 89,39% drainase di Kota Madiun dalam kondisi baik. persentase ini meningkat pada tahun 2017 dan 2018, persentase drainase di Kota Madiun dalam kondisi baik telah mencapai 90,96% pada tahun 2019. Pada tahun 2020 sedikit mengalami penurunan hingga mencapai 90,40%.

Tabel 2.66
persentase Drainase dalam Kondisi Baik/Pembuangan Air Tidak Tersumbat di Kota Madiun, Tahun 2016-2020

Tahun	Drainase dalam Kondisi Baik (%)
2016	89,39
2017	90,30
2018	90,30
2019	90,96
2020	90,40

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun, 2021

Tabel 2.67
Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum di Kota Madiun, Tahun 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi 2020
1. BIDANG PEKERJAAN UMUM				
1.	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	96,58%
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	99%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun, 2021

Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk

Tempat ibadah merupakan salah satu kebutuhan yang penting bagi lingkungan masyarakat. Selain itu, ketersediaan tempat ibadah juga dapat meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat. Rasio tempat ibadah per satuan penduduk merupakan perbandingan jumlah tempat ibadah dengan jumlah penduduk dikali 1.000. Pada tahun 2016, rasio tempat ibadah per satuan penduduk di Kota Madiun menunjukkan nilai sebesar 0,93 untuk masjid, 1,06 untuk gereja, dan kelenteng sebesar 83,33. Rasio tersebut menunjukkan nilai yang sama hingga tahun 2020.

Tabel 2.68
Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk di Kota Madiun, Tahun 2016-2020

Bangunan Tempat Ibadah	Rasio				
	2016	2017	2018	2019	2020
Masjid	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93
Gereja	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06
Pura	0	0	0	0	0
Vihara	0	0	0	0	0
Kelenteng	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun, 2021 (diolah)

Rasio Tempat Pemakaman Umum per Satuan Penduduk

Pemakaman umum merupakan salah satu fasilitas yang diperlukan oleh sebuah kota. Pada tahun 2016, rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk di Kota Madiun yakni sebesar 578,4 per satuan penduduk. dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2020, rasio tempat pemakaman umum menjadi 587 per satuan penduduk.

Tabel 2.69

Rasio Tempat Pemakaman Umum per Satuan Penduduk di Kota Madiun, 2016-2020

Tahun	Rasio
2016	578,4
2017	579
2018	587
2019	586
2020	587

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Madiun, 2021

Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah

Ruang terbuka hijau merupakan area memanjang/jalur dan/ atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Untuk mengukur ketersediaan ruang terbuka hijau di suatu wilayah dapat menggunakan rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah. Rasio ini dihitung dengan membandingkan antara luas terbuka hijau dengan luas wilayah ber HPL/HGB. Selama tahun 2016 hingga 2020, rasio ruang terbuka hijau di Kota Madiun cenderung mengalami pola peningkatan di setiap tahunnya. Pada tahun 2016, rasio ruang terbuka hijau di Kota Madiun menunjukkan nilai sebesar 18,88. Pada tahun 2017 dan 2018, rasio ruang terbuka hijau di Kota Madiun meningkat menjadi masing-masing sebesar 19,01 dan 19,48. Rasio ruang terbuka hijau tahun 2019 dan 2020 kembali meningkat mencapai 20,01.

Tabel 2.70

Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah di Kota Madiun Tahun 2016-2020

Tahun	Rasio
2016	18,88
2017	19,01
2018	19,48
2019	20,01
2020	20,01

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun, 2021

Rasio Bangunan ber IMB per Satuan Bangunan

Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan merupakan perbandingan antara jumlah bangunan ber-IMB dengan jumlah bangunan. Pada tahun 2016, rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan di Kota Madiun menunjukkan nilai sebesar 60,77. Nilai ini terus meningkat pada tahun 2017 dan 2018 sehingga menjadi sebesar 62,78 pada tahun 2016 dan 71,71 pada tahun 2018. Data pada tahun 2019 menunjukkan bahwa rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan di Kota Madiun meningkat menjadi sebesar 71,71.

Pada tahun 2019 meningkat hampir sebesar 10 % atau menjadi 80,06. Pada tahun 2020 kembali menurun menjadi sebesar 72,65. Di Kota Madiun sendiri masih ditemui bangunan yang belum ber IMB. Permasalahan lain ditemukan bahwa masyarakat dalam mengurus IMB, hanya digunakan untuk mengakses pinjaman perbankan.

Tabel 2.71

Rasio Bangunan ber IMB per Satuan Bangunan di Kota Madiun, 2016-2020

Tahun	Rasio
2016	60,77
2017	62,78
2018	71,71
2019	80,06
2020	72,65

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Madiun, 2021

persentase Penduduk Berakses Air Minum

Data menunjukkan bahwa pada tahun 2016 hingga 2020, sekitar lebih dari 80% penduduk di Kota Madiun telah memiliki akses air minum atau terus meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2016 sebesar 94,21% penduduk dapat mengakses air minum. Namun pula pada tahun 2017 mengalami sedikit penurunan menjadi sebesar 92,04%. Pada tahun 2018, persentase penduduk berakses air minum di Kota Madiun kembali mengalami kenaikan yakni 93,81%. Pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 0,51% dibanding tahun sebelumnya dan mengalami peningkatan sebesar 3,28% atau sebesar 96,58 pada tahun 2020.

Tabel 2.72

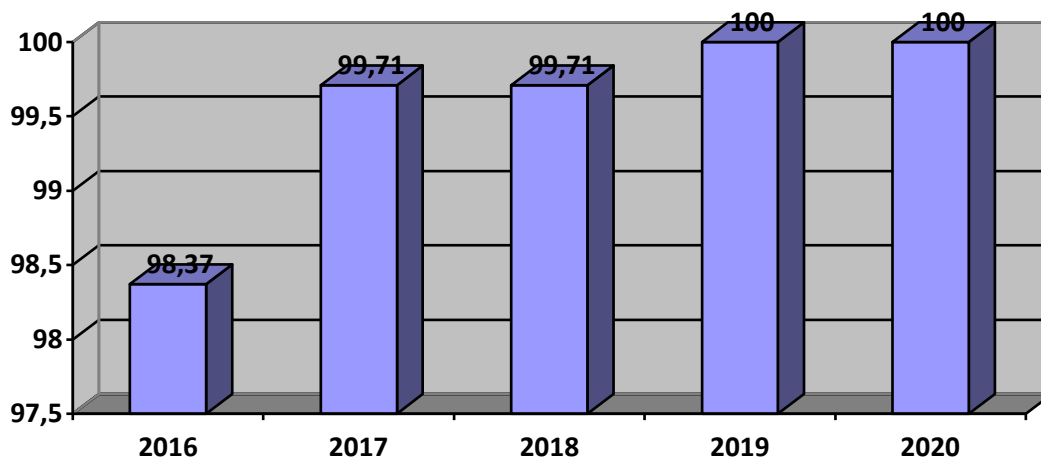
persentase Penduduk Berakses Air Minum di Kota Madiun, Tahun 2016-2020

Tahun	Penduduk Berakses Air Minum
2016	94,21
2017	92,04
2018	93,81
2019	93,30
2020	96,58

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun, 2021

Rumah Tangga Pengguna Air Bersih

Ketersediaan air bersih merupakan salah satu kebutuhan penting bagi masyarakat utamanya untuk memenuhi berbagai keperluan rumah tangga. Ketersediaan air bersih juga dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Pada tahun 2016 sampai 2020 rumah tangga pengguna air bersih di kota madiun terus mengalami peningkatan. Tahun 2016 pengguna air bersih di kota madiun mencapai 98,37% dan terus meningkat pada tahun 2019 dan 2020 seluruh rumah tangga sudah menggunakan air bersih baik dengan perpipaan maupun non perpipaan. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh Penduduk Kota Madiun sudah memiliki akses air bersih, baik itu melalui PDAM maupun sumber air bersih mandiri Rumah Tangga seperti sumur.

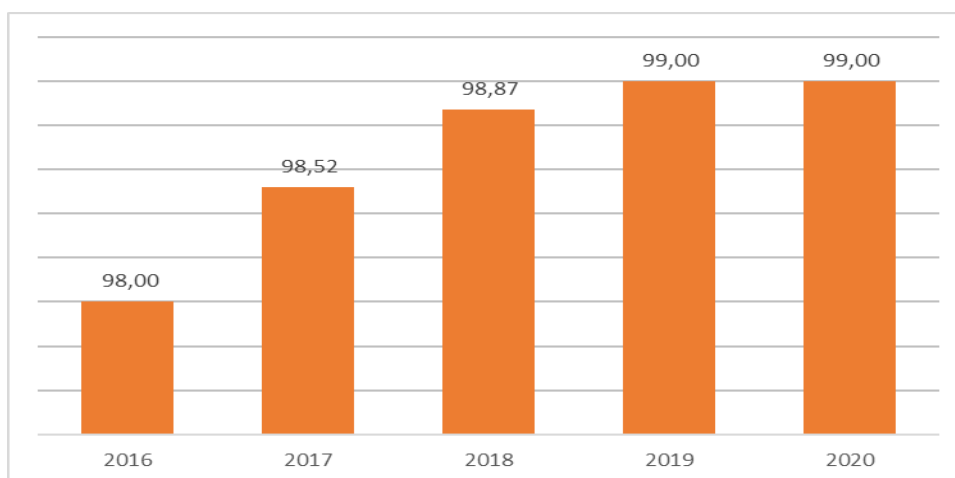


Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun, 2021 (diolah)

Gambar 2.36
persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Kota Madiun, 2016-2020

Rumah Tinggal Bersanitasi

Ketersediaan sanitasi yang baik akan mengurangi tingkat pencemaran di lingkungan masyarakat. Selain itu, adanya sanitasi yang baik dapat meningkatkan kualitas kesehatan sehingga dapat mengurangi potensi terjangkitnya suatu penyakit. Selama tahun 2016 hingga tahun 2020, lebih dari 90% rumah tinggal di Kota Madiun telah memiliki sanitasi. Di Kota Madiun, pada tahun 2016 sebesar 98% rumah telah bersanitasi, pada tahun 2017 persentase rumah tinggal bersanitasi di Kota Madiun mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, yakni menjadi sebesar 98,52%. Pada tahun 2018, data sementara juga menunjukkan adanya kenaikan persentase rumah tinggal bersanitasi di Kota Madiun yakni menjadi 98,87%. Pada tahun 2019 dan tahun 2020 persentase rumah tinggal bersanitasi Kota Madiun telah mencapai 99%.



Sumber: Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun, 2021 (diolah)

Gambar 2.37
persentase Rumah Tinggal Bersanitasi di Kota Madiun, 2016-2020

Indeks Infrastruktur

Capaian indikator Indeks Infrastruktur Pemerintah Kota Madiun untuk Tahun 2020 adalah 96,15 sehingga realisasi tahun 2020 melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 96 dengan persentase capaian kinerja sebesar 100,15%. Indikator ini diukur berdasarkan persentase realisasi layanan infrastruktur yang berupa gedung, jalan maupun saluran dibandingkan dengan jumlah infrastruktur yang tersedia. Faktor pendorong yang mempengaruhi tercapainya Indeks Infrastruktur Kota Madiun adalah : 1) Adanya keinginan masyarakat agar sarana dan prasana perkotaan yang representatif 2) Adanya aplikasi yang memudahkan pengaduan masyarakat sehingga segera dapat ditangani Sedangkan faktor penghambatnya antara lain : 1) Kurangnya tenaga teknis yang berkompeten di bidang infrastruktur 2) Kurang optimalnya kinerja sumber daya manusia penyedia dalam proses penyelesaian proyek tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam kontrak

2.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Perumahan dan permukiman yang layak, sehat, aman, serasi, dan teratur merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan merupakan faktor penting dalam peningkatan harkat dan martabat mutu kehidupan serta kesejahteraan rakyat. Secara umum, kualitas rumah tinggal ditentukan oleh kualitas bahan bangunan yang digunakan, yang secara nyata mencerminkan tingkat kesejahteraan penghuninya, aspek kesehatan dan kenyamanan bahkan estetika bagi sekelompok masyarakat tertentu sangat menentukan dalam pemilihan rumah tinggal. Hal ini berhubungan dengan tingkat kesejahteraan penghuninya. Selain kualitas rumah tinggal, tingkat kesejahteraan juga dapat digambarkan dari fasilitas yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kualitas perumahan yang memadai akan memberikan kenyamanan bagi penghuninya.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang permukiman adalah penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi korban bencana kab/kota serta fasilitasi rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kab/ kota. Substansi SPM sangat spesifik, yaitu sangat tergantung pada keberadaan bencana dan program pemerintah yang membutuhkan relokasi.

Dalam kondisi tersebut, maka respon dari perangkat daerah pengampu SPM adalah bersiap siaga. Dengan demikian maka target pencapaian SPM tetap akan diformulasikan sebagai dasar pelaksanaan program di SPM yang bersangkutan.

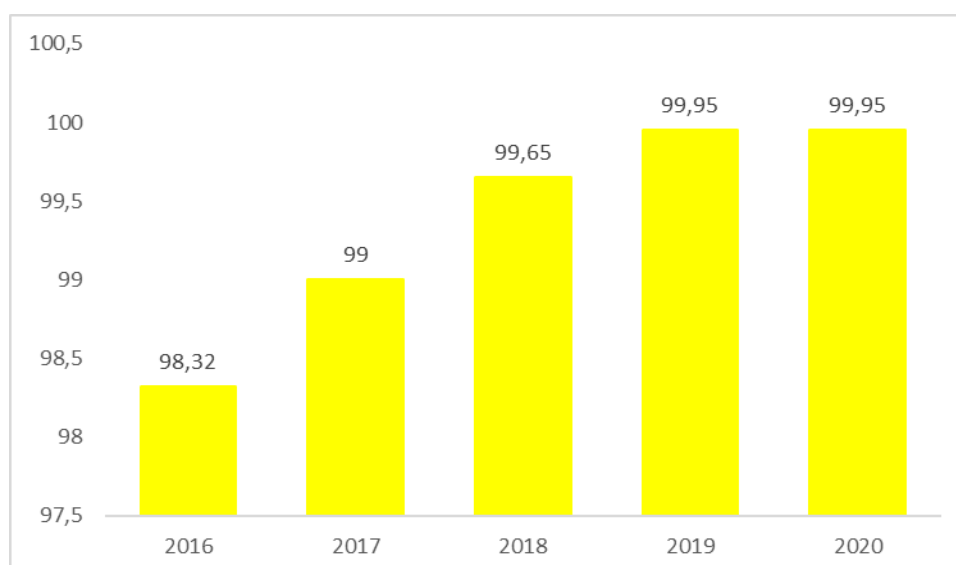
Tabel 2.73
Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kota Madiun, Tahun 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi 2020
2. BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
1.	Penyediaan & rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kab/Kota	jumlah unit rumah rusak akibat bencana yang akan direhabilitasi, dibangun kembali, dan/atau direlokasi serta rencana jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan akses rumah darurat layak huni sesuai rencana dalam dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	100%	100%
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota	jumlah Rumah Tangga terkena relokasi program pemerintah daerah, sesuai dengan jumlah rencana Rumah Tangga dalam rencana pemenuhan	100%	100%

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2021 (diolah)

Rasio Rumah Layak Huni

Rasio rumah layak huni merupakan rasio perbandingan antara jumlah rumah layak huni dengan jumlah penduduk. Rasio rumah layak huni di Kota Madiun pada tahun 2016 hingga 2020 cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2016, rasio rumah layak huni di Kota Madiun sebesar 98,32%. Meningkat pada tahun 2017 sehingga menjadi sebesar 99%. Rasio ini terus meningkat hingga tahun 2019 dan 2020 yakni masing-masing mencapai rasio sebesar 99,95%. Sehingga semakin tinggi rasio ini berarti semakin banyak penduduk yang memiliki rumah yang layak huni.



Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2021 (diolah)

Gambar 2.38

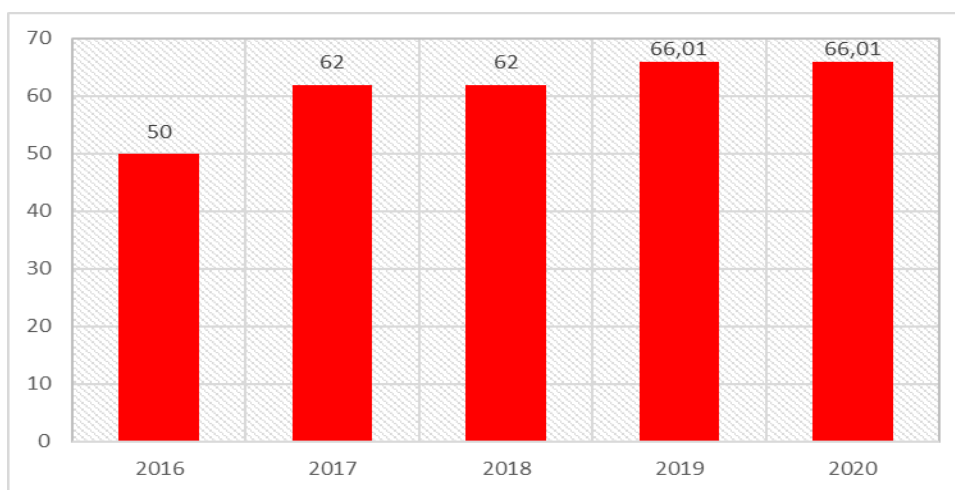
Rasio Rumah Layak Huni di Kota Madiun, 2016-2020

2.3.1.5 Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan ketentraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat merupakan hal yang dapat membantu proses pembangunan suatu wilayah. Perlu adanya pemantauan mengenai tindak pidana kriminalitas dengan tujuan mendukung proses pencapaian ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Indeks Ketentraman merupakan salah satu alat ukur yang dipakai di kota madiun dengan menggunakan survey mandiri. Pada tahun 2020 capaian indeks ketentraman kota madiun menunjukkan angka 76,87 dengan kriteria Kondusif

Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat

Sebagai upaya dalam mewujudkan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat perlu adanya peran dari berbaagi pihak seperti dari petugas perlindungan masyarakat. Data menunjukkan pada tahun 2016 nilai rasio menjadi 50. Selanjutnya peningkatan rasio linmas di Kota Madiun pada tahun 2017 yakni mencapai nilai sebesar 62, dan pada tahun 2018 nilai rasio ini tetap pada angka 62. Pada tahun 2019 kembali meningkat sebesar 66,01 dan pada tahun 2020 rasio tetap pada angka 66,01.



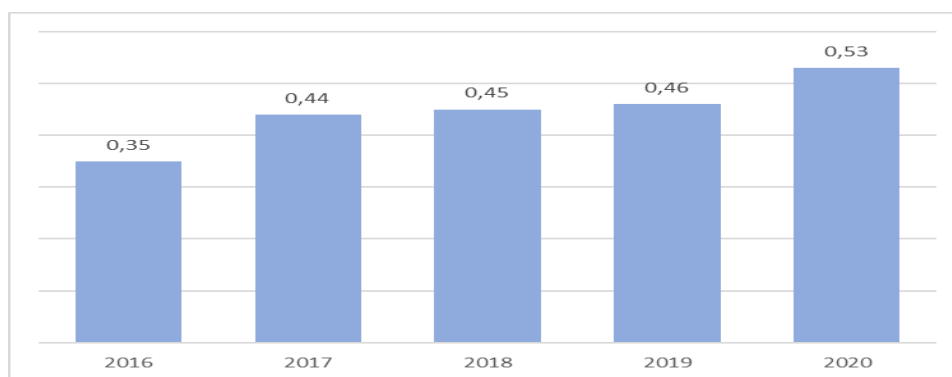
Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Madiun, 2021 (diolah)

Gambar 2.39

Rasio Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk di Kota Madiun, 2016-2020

Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk

Selain petugas linmas, petugas Polisi Pamong Praja juga memiliki peran dalam menjaga ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Pada tahun 2016, rasio pol PP menunjukkan nilai sebesar 0,35. Pada tahun 2017, nilai rasio pada indikator ini menunjukkan peningkatan yakni menjadi sebesar 0,44 dan pada 2018 juga kembali mengalami sedikit peningkatan yakni menjadi sebesar 0,45. Pada tahun 2019 mengalami sedikit peningkatan menjadi 0,46. Peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 0,7 sehingga rasio dalam indikator ini menjadi 0,53.



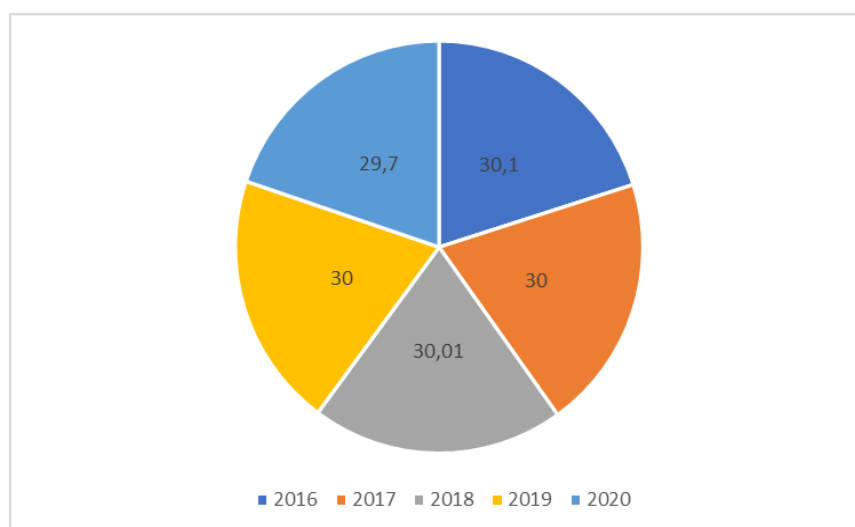
Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Madiun, 2021 (diolah)

Gambar 2.40

Rasio Petugas Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk di Kota Madiun, 2016-2020

Rasio Pos Kamling per Jumlah Kelurahan

Selain peran dari petugas linmas, peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat juga diperlukan. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan kegiatan ronda. Kegiatan ini tentunya perlu didukung sarana yang memadai seperti ketersediaan pos kamling. Pada tahun 2020, rasio pos kamling per jumlah kelurahan yakni sebesar 29,7% menurun sebesar 0,3% dari Tahun 2019. rasio dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 cenderung fluktuatif menurun.



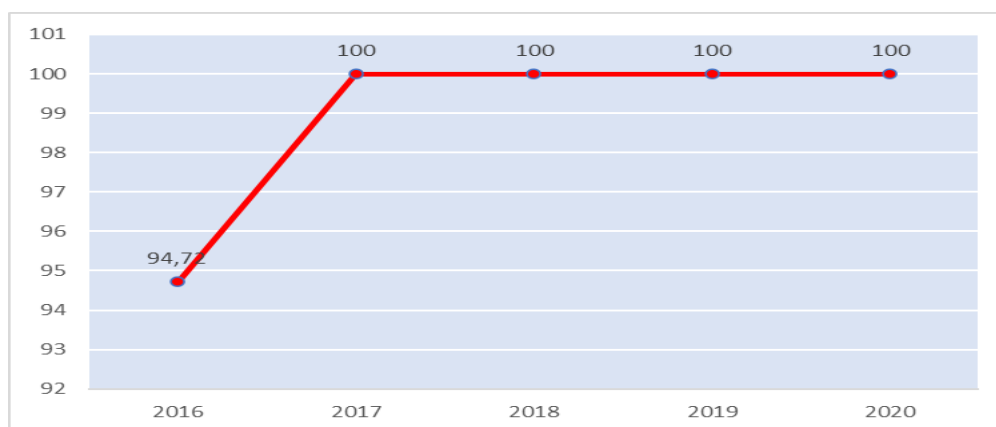
Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, 2021 (diolah)

Gambar 2.41

Rasio Pos Kamling per Jumlah Kelurahan di Kota Madiun, 2016-2020

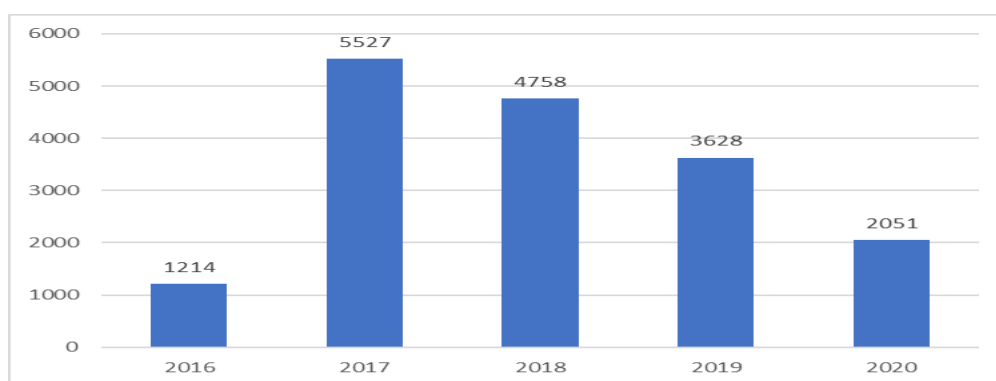
persentase Penegakan Perda dan Penyelesaian Pelanggaran K-3

Tingkat keberhasilan penegakan Perda suatu daerah dapat diukur dengan indikaor persentase penegakan Perda. persentase ini dihitung dengan membagi jumlah penyelesaian penegakan Perda dengan jumlah pelanggaran Perda. Data Kota Madiun menunjukkan bahwa pada tahun 2016, penegakan perda yang telah dilaksanakan di Kota Madiun yakni sebesar 94,72%. Pada tahun 2017, persentase penegakan Perda terus meningkat hingga mencapai 100%. Kondisi ini terus dipertahankan hingga pada tahun 2020.



Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Madiun, 2021 (diolah)

Gambar 2.42
persentase Penegakan Perda di Kota Madiun, 2016-2020



Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Madiun, 2021 (diolah)

Gambar 2.43
Penyelesaian Pelanggaran K-3 di Kota Madiun, 2016-2020

Berdasarkan data, penyelesaian pelanggaran K-3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan) di Kota Madiun cukup fluktuatif selama tahun 2016 hingga 2020. Pada tahun 2016 sebanyak 1.214 pelanggaran K-3 berhasil diselesaikan. Kemudian pada tahun 2017 terjadi peningkatan yang cukup signifikan sebanyak 5.527 pelanggaran yang berhasil diselesaikan namun tahun 2018 hingga Tahun 2020 terjadi penurunan penyelesaian pelanggaran K-3 sampai 2051.

Kejadian Kebakaran

Dengan ciri wilayah perkotaan dengan pemukiman penduduk yang padat, bencana kebakaran merupakan salah satu jenis bencana yang sering terjadi di Kota Madiun. Data pada tahun 2016-2018 menunjukkan frekuensi kebakaran di Kota Madiun mengalami kenaikan. Pada tahun 2017 terjadi sebanyak 29 kejadian kebakaran kemudian meningkat signifikan sebanyak 85 kejadian pada tahun 2018. Intensitas kebakaran yang meningkat tersebut salah satunya disebabkan pada tahun 2018 mengalami kemarau yang panjang. Pada tahun 2019 terjadi penurunan kejadian kebakaran dibandingkan tahun sebelumnya yakni menjadi 79 kejadian.

Pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan sebesar 18 kejadian sehingga menjadi 61 kejadian. Diperlukan kegiatan patroli dan pelatihan rutin anggota pemadam kebakaran serta peningkatan dan perawatan sarana dan prasarana pemadam kebakaran untuk berjaga-jaga jika terdapat kejadian kebakaran yang harus ditangani. Pembekalan dan pelatihan pemadam kebakaran dilaksanakan secara rutin dan adanya kegiatan inspeksi penanggulangan kebakaran sehingga diharapkan dapat mencegah adanya peristiwa kebakaran.

Tabel 2.74
Data Kejadian Kebakaran di Kota Madiun, 2016-2020

Tahun	Kejadian	Back Up Daerah Sekitar
2016	12 Kali	Tidak ada data
2017	29 Kali	Tidak ada data
2018	85 Kali	18 Kali
2019	79 Kali	1 kali
2020	61 Kali	Tidak ada data

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Madiun, 2021

Tabel 2.75
Capaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kota Madiun, Tahun 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi 2020
3. BIDANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada	100%	100%
2.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	100%

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Madiun, 2021

2.3.1.6 Sosial

Panti Asuhan, Panti Jompo, dan Panti Rehabilitasi

Salah satu indikator urusan sosial adalah ketersediannya sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo ataupun panti rehabilitasi. Data menunjukkan bahwa di Kota Madiun sarana sosial yang tersedia adalah panti asuhan dan panti rehabilitasi yang berupa rumah singgah binaan. Jumlah panti asuhan pada tahun 2016 yang berada di Kota Madiun yakni sebanyak 10 unit, kemudian mengalami peningkatan di tahun 2017 menjadi 12 unit dan bertahan sampai dengan tahun 2020. Selain itu, di Kota Madiun terdapat sarana sosial panti rehabilitasi yang berjumlah 1 unit dalam bentuk rumah singgah pada tahun 2017 dan tidak ada perubahan hingga tahun 2020. Secara total sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, dan panti rehabilitasi di Kota Madiun berjumlah 16 unit.

Tabel 2.76
Jumlah Panti Asuhan, Panti Jompo, dan Panti Rehabilitasi
di Kota Madiun Tahun 2016-2020

Tahun	Panti Asuhan (unit)	Panti Jompo (unit)	Panti Rehabilitasi (unit)
2016	10	-	-
2017	12	1	3
2018	12	1	3
2019	12	1	3
2020	12	1	3

Sumber: Dinas Sosial, PP dan PA Kota Madiun, 2021

Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota Madiun dilakukan dalam bentuk pendataan, pembinaan, pemberian bantuan dana, pengiriman ke Panti Rehabilitasi Sosial, dan pemulangan ke tempat asal atau keluarga PMKS. Data menunjukkan Angka penanganan PMKS terendah terjadi pada tahun 2016, yaitu dari 3.588 jumlah PMKS yang tertangani sebanyak 3.090 orang atau sebesar 86,12%. Penanganan PMKS tersebut berupa pelayanan sosial, pemberian SPM, dan pembekalan ketrampilan dan pengiriman rehabilitasi Sosial ke UPT. Selama kurun waktu 2017 sampai dengan tahun 2020 angka penanganan PMKS mencapai 100% bahkan lebih. Namun, pada tahun 2020, jumlah PMKS sebesar 31,215 orang dengan persentase sebesar 99,99% jumlah PMKS yang di rehabilitasi.

Tabel 2.77
persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
di Kota Madiun Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah PMKS (orang)	Rehabilitasi	
		Jumlah (orang)	Rasio (%)
2016	3,588	3,090	86,12
2017	10,563	10,775	102
2018	10,470	10,593	101,17
2019	10674	10773	100.92
2020	31215	31123	99,99

Sumber: Dinas Sosial, PP dan PA Kota Madiun, 2021

PMKS yang Mendapatkan Bantuan Sosial

Data menunjukan bahwa pada tahun 2016 jumlah orang PMKS yang mendapat bantuan sosial 1.614 orang penerima PMKS atau 72,71% dari total jumlah PMKS. Tahun 2017, data menunjukkan bahwa sebesar 10.664 orang telah mendapatkan bantuan sosial dan terus meningkat pada tahun 2018 hingga mencapai 12.936 orang. Selanjutnya pada tahun 2019 dan 2020, jumlah orang mendapatkan bantuan sosial menurun lagi masing-masing sebesar 10.612 orang dan 27.647 orang.

Tabel 2.78

persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Mendapatkan Bantuan Sosial di Kota Madiun Tahun 2016-2020

Tahun	Mendapat Bantuan Sosial	
	Jumlah (orang)	Rasio (%)
2016	1,614	72,71
2017	10,664	100,10
2018	12,936	123,55
2019	10.612	99,41
2020	27.647	88,8

Sumber: Dinas Sosial, PP dan PA Kota Madiun, 2021

Jumlah PMKS yang tertangani di Kota Madiun mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Jumlah bayi terlantar yang tertangani pada tahun 2016 adalah mencapai 100% dengan jumlah bayi terlantar sebesar 89 jiwa. Sedangkan pada tahun 2020 jumlah bayi terlantar mengalami penurunan sebesar 29 jiwa dengan jumlah tertangani sebesar 100%.

Tabel 2.79

Data Jumlah Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani di Kota Madiun Tahun 2016-2020

Jenis PMKS	2016		2017		2018		2019		2020	
	Jumlah (Jiwa)	Tertangani (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)	Tertangani (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)	Tertangani (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)	Tertangani (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)	Tertangani (Jiwa)
Anak Balita Terlantar (ABT)	89	89	60	60	47	47	20	20	29	29
Anak Terlantar (AT)	263	263	222	222	211	211	135	135	208	208
Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)	21	21	28	28	22	22	17	17	19	19
Anak Jalanan (ANJAL)	6	5	11	5	10	10	7	26	3	3
Anak Dengan Kedisabilitas (ADK)	128	128	99	99	98	98	81	81	66	66
Anak Menjadi Korban Tindak Kekerasan	1	1							-	-
Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK)	2	2			5	5	5	5	2	2
Lanjut Usia Terlantar (LUT)	799	799	574	574	585	585	643	652	848	848
Penyandang Disabilitas (PD) termasuk ODGJ	541	541	469	469	426	426	491	583	489	489
Tuna Susila (TS)	7	7	5	5	3	3	6	6	3	3
Gelandangan	14	169	5	320	10	186	8	28	4	4
Pengemis	29	22	40	15	28	28	18	23	17	17
Pemulung	76		60	60	52	52	50	55	59	59
Kelompok Minoritas (KM)	13	13	-	-	-	-	2	2	-	-
Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan (BWBP)	35	-	55	-	47	-	47	-	31	-
Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA)	2	2	17	14	2	2	1	1	1	1
Korban Penyalahgunaan Nafza (KPGN)	15	-	7	-	6	-	4	-	6	-
Korban Trafficking (KTRF)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Korban Tindak Kekerasan (KTK)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Korban Bencana Alam (KBA)	596	324	10	10	10	10	10	10	-	-
Korban Bencana Sosial (KBS)	-	-	4	4	-	-	-	-	-	-
Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE)	728	704	932	932	856	856	926	926	954	954

Jenis PMKS	2016		2017		2018		2019		2020	
	Jumlah (Jiwa)	Tertangani (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)	Tertangani (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)	Tertangani (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)	Tertangani (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)	Tertangani (Jiwa)
Fakir Miskin (FM)	5.495	1.099	7.938	7.938	8.02	8.02	8.166	8.166	31.215	31.123
Korban Bermasalah Sosial Psikologi (KBSP)	35	-	27	-	32	32	37	37	37	-
Komunitas Adat Terpencil (KAT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	8.895	4.189	10.563	10.755	10.47	10.593	10.674	10.773	33.991	33.825
PMKS Lainnya										
Keluarga Yang Tinggal Di Rumah Tidak Layak Huni (KTRLH)	188	-	141	-	113	-	28	-	28	-

Sumber: Dinas Sosial, PP dan PA Kota Madiun, 2021

2.3.1.7 Tenaga Kerja

Aspek ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek yang berpengaruh terhadap kesejahteraan penduduk. Pemerintah sebagai pengambil kebijakan dapat mengkaji berbagai permasalahan mengenai ketenagakerjaan dalam upaya mencari solusinya. Salah satu permasalahan ketenagakerjaan yang masih dapat ditemui hingga saat ini adalah pengangguran.

Pengangguran terjadi ketika pertumbuhan angkatan kerja lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan tenaga kerja. Dengan menggunakan berbagai data yang tersedia, maka pemerintah dapat menyusun serta merumuskan kebijakan sebagai upaya penyelesaian masalah. Oleh karena itu, pembahasan mengenai ketenagakerjaan perlu menjadi perhatian bagi pemerintah.

Angka Sengketa Pengusaha Pekerja Per Tahun Indikator ini menunjukkan capaian kinerja penyelesaian sengketa antara pekerja atau buruh dan pengusaha. Data selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan bahwa di Kota Madiun hampir seluruh pengaduan sengketa pekerja atau buruh dapat terselesaikan dengan capaian kinerja sebesar 100%. Namun, pada tahun 2016, capaian kinerja penyelesaian sengketa antara pekerja atau buruh dan pengusaha di Kota Madiun hanya sebesar 94,9%. Pada tahun 2017 dari 23 kasus terdapat 2 kasus yang tidak dapat terselesaikan dan harus masuk dalam Pengadilan Hubungan Industrial dikarenakan penyelesaian melalui persetujuan bersama belum mendapatkan titik temu antara pekerja dan pemberi kerja. Di tahun 2018, dari 33 jumlah pengaduan, keseluruhannya dapat terselesaikan dengan capaian kinerja sebesar 100%. Adapun cara penyelesaian pengaduan ini dilakukan dengan cara mediasi dan perjanjian bersama. Pada tahun 2019 dan tahun 2020 terjadi penurunan kasus pengaduan yakni sebesar 27 kasus, keseluruhannya bisa diselesaikan seluruhnya dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Tabel 2.80
Capaian Kinerja Penyelesaian Sengketa Pengusaha Pekerja per Tahun di Kota Madiun, Tahun 2016-2020

Tahun	Capaian Kinerja (%)
2016	94,9
2017	100
2018	100
2019	100
2020	100

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan KUM Kota Madiun, 2021

Tabel 2.81
Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja (kasus hubungan industrial) Kota Madiun, Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Kasus	Selesai	Tidak Selesai	Keterangan
2016	12	12	-	diselesaikan melalui persetujuan bersama
2017	23	21	2	2 kasus di selesaikan di PHI (Pengadilan Hubungan Industrial)
2018	33	33	-	diselesaikan melalui persetujuan bersama
2019	27	27	-	diselesaikan melalui persetujuan bersama
2020	20	16	4	4 kasus diselesaikan melalui anjuran ke PHI

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan KUM Kota Madiun, 2021

Pencari Kerja yang Ditempatkan

Rasio pencari kerja yang ditempatkan merupakan indikator yang dihitung dengan membandingkan antara jumlah pencari kerja yang ditempatkan dengan pencari kerja (dikalikan dengan 100). Selama tahun 2016 hingga 2018, rasio pencari kerja yang ditempatkan di Kota Madiun dari tahun ke tahun selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2016, data menunjukkan bahwa rasio pencari kerja yang ditempatkan sebesar 87,90%. Pada tahun 2017 hingga 2018, terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada indikator ini, sehingga pada tahun 2017 rasio pekerja yang ditempatkan di Kota Madiun sebesar 98,24% pada tahun 2017 dan 99,1% pada tahun 2018. Hal ini salah satunya didukung oleh adanya kerjasama antara perusahaan lokal yang bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja di Kota Madiun untuk melakukan rekrutmen lowongan kerja. Pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 13,48 sehingga menjadi 85,52%. Angka sementara pada tahun 2020 juga menunjukkan penurunan yakni sebesar 57,28.

Tabel 2.82
Pencari Kerja yang Ditempatkan di Kota Madiun, Tahun 2016-2020

Tahun	Pencari Kerja yang Ditempatkan (%)
2016	87,90
2017	98,24
2018	99,1
2019	85,52
2020	57,28

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan KUM Kota Madiun, 2021

Keselamatan dan Perlindungan

Keselamatan dan perlindungan merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan dalam pelaksanaan urusan tenaga kerja. Tenaga kerja perlu mendapatkan keselamatan dan perlindungan dalam melaksanakan pekerjaannya. Perusahaan perlu menerapkan prosedur K3 yakni Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Di Kota Madiun, data selama tahun 2016 hingga 2020 menunjukkan bahwa jumlah pekerja yang telah menerima jaminan sosial tenaga kerja mengalami peningkatan yang sangat signifikan pada tahun 2016 hingga 2017. Pada tahun 2016, jumlah pekerja yang telah menerima jaminan sosial tenaga kerja hanya sebesar 3.110 pekerja. Pada tahun 2017, mengalami peningkatan yang sangat drastis hingga mencapai 12.996 pekerja yang telah menerima jaminan sosial tenaga kerja. Pada tahun 2018, sebanyak 13.968 pekerja dari 521 perusahaan di Kota Madiun telah menerima jaminan sosial tenaga kerja. Jumlah penerima jaminan sosial tenaga terus meningkat pada tahun 2019 dan 2020 yakni sebanyak 15.976 dan 18.565.

Tabel 2.83

Keselamatan dan Perlindungan Kerja di Kota Madiun, Tahun 2016-2020

Tahun	Keselamatan dan Perlindungan
2016	3.110
2017	12.996
2018	13.968
2019	15.976
2020	18.565

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan KUM Kota Madiun, 2021

2.3.1.8 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Partisipasi Perempuan Bekerja di Lembaga Pemerintah

persentase partisipasi perempuan yang bekerja di lembaga pemerintah di Kota Madiun pada periode tahun 2016 hingga tahun 2020 menunjukkan data yang fluktuatif. Perempuan yang bekerja di lembaga pemerintah di Kota Madiun pada tahun 2016 hingga 2018 terjadi kenaikan partisipasi perempuan bekerja di lembaga pemerintah hingga mencapai 13,32% pada Tahun 2018. Sedangkan pada tahun 2019 dan 2020 persentasenya sedikit mengalami penurunan dibanding tahun 2018 yakni menjadi 12,7% pada tahun 2019 dan 12,72% pada tahun 2020.

Tabel 2.84

persentase Partisipasi Perempuan yang Bekerja di Lembaga Pemerintah Kota Madiun, Tahun 2016-2020

Tahun	persentase
2016	8,21
2017	9,96
2018	13,32
2019	12,78
2020	12,72

Sumber: Dinas Sosial, PP dan PA Kota Madiun, 2021

Perempuan Bekerja di Lembaga Non Pemerintah

Selain lembaga pemerintah, perempuan juga berpartisipasi sebagai pekerja dalam lembaga non pemerintah atau swasta. Adapun beberapa jenis pekerjaan pada lembaga non pemerintah antara lain bekerja pada perusahaan swasta, terjun ke partai politik, dan menjadi anggota DPR. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2016, sebesar 91,73% perempuan berpartisipasi bekerja di lembaga swasta, kemudian menurun pada tahun 2017 menjadi sebesar 90,03%. Selanjutnya pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 86,69% dan mengalami kenaikan kembali pada tahun 2019 dan tahun 2020 yang mencapai 86,95% dan 87,27%.

Tabel 2.85

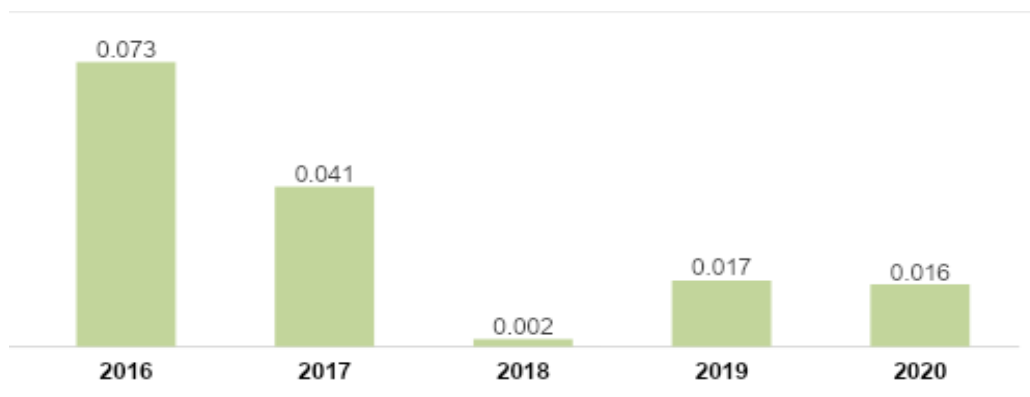
Partisipasi Perempuan Bekerja di Lembaga Non Pemerintahan di Kota Madiun, Tahun 2016-2020

Tahun	persentase
2016	91,73
2017	90,03
2018	86,69
2019	86,95
2020	87,27

Sumber: Dinas Sosial, PP dan PA Kota Madiun, 2021

Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Rasio kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan perbandingan jumlah KDRT dengan jumlah rumah tangga. Semakin tinggi rasio ini maka menggambarkan adanya peningkatan kesadaran kaum perempuan untuk melapor jika terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga. Data rasio KDRT di Kota Madiun pada tahun 2016 menunjukkan angka sebesar 0,073. Rasio ini mengalami penurunan sehingga mencapai nilai 0,041 pada tahun 2017, begitu pula pada tahun 2018, rasio kekerasan dalam rumah tangga di Kota Madiun kembali mengalami penurunan sehingga mencapai nilai sebesar 0,002. Hal ini terjadi disebabkan karena masyarakat yang melapor di pusat pelayanan terpadu mengalami penurunan. Rasio kekerasan kembali meningkat menjadi 0,017 pada tahun 2019 dan sedikit menurun pada tahun 2020 yakni sebesar 0,016.



Sumber: Dinas Sosial, PP dan PA Kota Madiun, 2021 (diolah)

Gambar 2.44

Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Madiun, Tahun 2016-2020

Penanganan penyelesaian pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak ini adalah sebagai berikut:

1. Kasus KDRT dalam tindak lanjutnya akan dilakukan kerjasama dengan Polresta serta Rumah Sakit Bhayangkara terkait visum dan kelanjutan proses kasus. Pemulihan secara psikis didampingi oleh relawan dari beberapa universitas dan organisasi masyarakat di Kota Madiun. Jika diperlukan juga dilakukan mediasi antara korban dan pelaku ataupun antar keluarga.
2. Kasus pencabulan anak dilakukan visum dan untuk memproses pelaku dengan melakukan kerjasama dengan pihak Perlindungan Perempuan dan Anak, Polresta, dan Rumah Sakit Bhayangkara. Kemudian dilakukan pendampingan psikolog dalam proses penyembuhan psikis. Selain itu, dilakukan kunjungan langsung guna memantau keadaan korban.
3. Permasalahan hak asuh anak dilakukan melalui konseling dan mediasi keluarga. Selain itu dilakukan kunjungan ke rumah untuk dilakukan pengamatan langsung mengenai kondisi sekitar rumah yang berkaitan dengan anak dan permasalahan yang diadukan. Jika dilakukan jalur hukum, maka akan dilakukan kerja sama dengan dengan Pengadilan Agama untuk membantu kasus tersebut. Apabila diperlukan pendampingan psikolog maupun hukum akan bekerja sama dengan universitas di Kota Madiun, organisasi masyarakat, dan Bagian Hukum.
4. Kasus pemenuhan hak anak dimana anak belum mendapatkan identitas Akta, KIA, KK karena adanya masalah lain yang menghambat anak mendapatkan identitas akan melibatkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan didampingi Dinas Sosial PP dan PA.
5. Kasus perceraian karena sebab yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga ditindaklanjuti dengan konsultasi dengan didampingi relawan dari Pengadilan Agama dan bidang hukum lainnya.
6. Sekolah yang mengadukan siswa yang bermasalah akan diterima dan dilakukan proses konseling juga ada pendampingan dari psikolog.
7. Orang tua yang merasa ada keanehan dari putra-putrinya akan diberikan pendampingan oleh psikolog.
8. Kasus yang pelakunya anak seperti pencurian yang pernah terjadi akan bekerja sama dengan pekerja sosial dan Perlindungan Perempuan Anak Polres dalam penanganannya.
9. Kasus pergaulan bebas yang melibatkan anak-anak sekolah akan dilakukan rapat koordinasi dengan perangkat daerah yang terkait.

10. Kasus yang diterima dari luar kota dan antar pulau diadakan di Kota Madiun akan dilakukan kerja sama dengan dinas daerah lain yang terkait dalam penyelesaian kasus dan tindak lanjut lainnya.

Data laporan kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat dilihat pada tabel di bawah

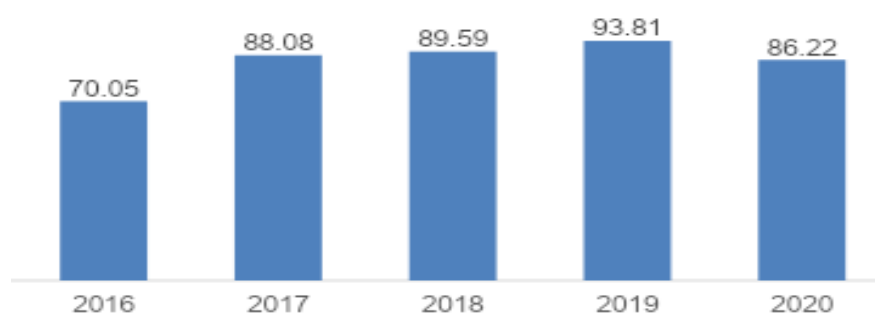
Tabel 2.86

Data Laporan Kasus Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kota Madiun, Tahun 2016-2020

No	Nama Kasus	Dewasa	Anak	Total
TAHUN 2016				
1.	KDRT, Non KDRT	Tidak ada data	Tidak ada data	Tidak ada data
2.	Kriminal	Tidak ada data	Tidak ada data	Tidak ada data
3.	Konsultasi	Tidak ada data	Tidak ada data	Tidak ada data
TAHUN 2017				
1.	KDRT, Non KDRT	33	4	37
2.	Kriminal	0	0	0
3.	Konsultasi	8	12	20
Tahun 2018				
1.	KDRT, Non KDRT	18	12	30
2.	Kriminal	2	2	4
3.	Konsultasi	8	33	41
Tahun 2019				
1.	KDRT, Non KDRT	11	5	16
2.	Kriminal	0	0	0
3.	Konsultasi	11	17	28
Tahun 2020				
1.	KDRT, Non KDRT	10	10	20
2.	Kriminal	0	0	0
3.	Konsultasi	9	15	24

Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Partisipasi angkatan kerja perempuan di Kota Madiun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun cenderung fluktuatif. Partisipasi angkatan kerja perempuan di Kota Madiun pada tahun 2016 yakni sebesar 70,05% dan mencapai 88,08% pada 2017. Selanjutnya angka partisipasi angkatan kerja perempuan terus meningkat pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 menjadi 93,81%. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 7,61% sehingga angka partisipasi angkatan kerja perempuan menjadi 86,22%.



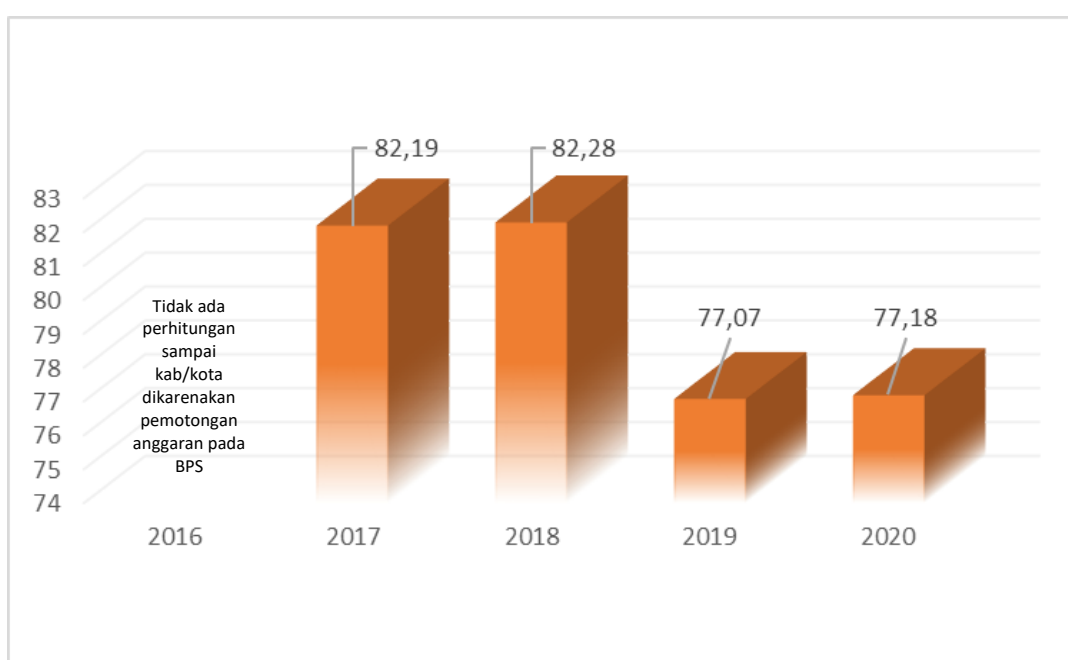
Sumber: Dinas Sosial, PP dan PA Kota Madiun, 2021 (diolah)

Gambar 2.45

Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kota Madiun, Tahun 2016-2020

Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indikator yang menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG di Kota Madiun tahun 2017 sebesar 82,19% mengalami sedikit peningkatan menjadi 82,28% pada tahun 2018, namun pada tahun 2019 mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun 2018 menjadi 77,07 pada tahun 2019. Pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 77,18. IPG Kota Madiun pada tahun 2019 yang menurun dipengaruhi oleh persentase anggota perempuan DPRD Kota Madiun yang kurang dari 30% dari total jumlah anggota DPRD Kota Madiun.



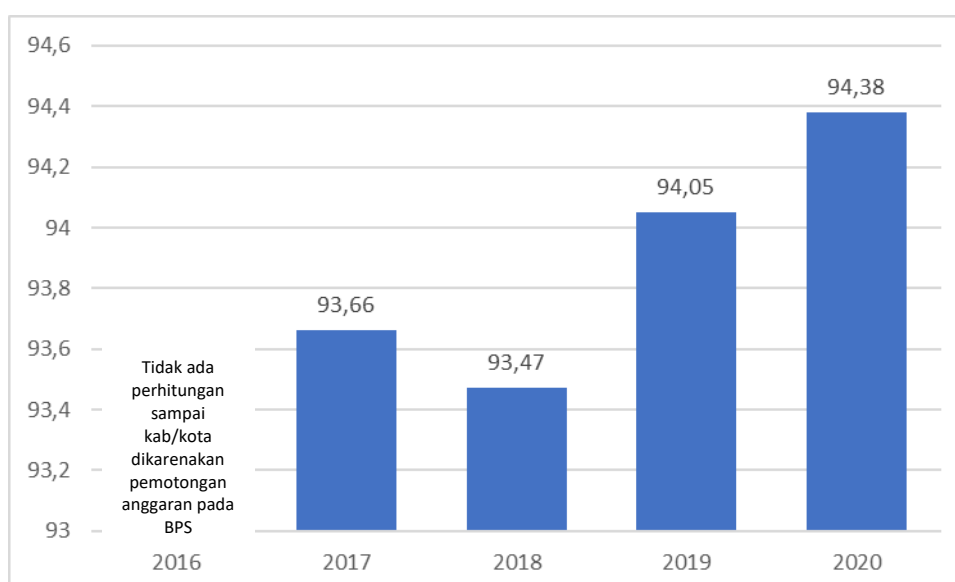
Sumber: BPS, 2021 (diolah)

Gambar 2.46

Indeks Pemberdayaan Gender di Kota Madiun, Tahun 2016-2020

Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan. Selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir IPG Kota Madiun mengalami tren kenaikan walaupun sempat mengalami penurunan pada tahun 2018. Indeks terendah ada pada tahun 2018 sebesar 93,47 dan yang tertinggi ada pada tahun 2020 sebesar 94,38. Dengan terus meningkatnya IPG Kota Madiun, menandakan Kinerja Pemerintah Kota Madiun dalam kesetaraan gender yang dilaksanakan secara optimal.



Sumber: BPS, 2021 (diolah)

Gambar 2.47

Indeks Pembangunan Gender di Kota Madiun, Tahun 2016-2020

2.3.1.9 Pangan

Kebutuhan mendasar manusia terdiri dari kebutuhan dari sandang, pangan, dan papan. Ketahanan pangan menjadi hal penting bagi suatu negara, khususnya terkait dengan ketahanan nasional, dalam rangka pemenuhan kebutuhan rakyatnya. Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan ketersediaan pangan yang akan digunakan dalam jangka waktu tertentu. Pangan juga menjadi salah satu indikator kesejahteraan masyarakat yang dapat dilihat melalui tingkat kecukupan gizi. Semakin tercukupi gizi masyarakat mengindikasikan kemampuan masyarakat dalam mendapatkan asupan makanan sesuai standar gizi yang baik, meningkat. Hal ini berarti terjadi peningkatan pada kesejahteraan masyarakat.

Keberhasilan pemenuhan urusan pangan dapat diukur dengan dua indikator yang dapat digunakan yaitu regulasi ketahanan pangan dan ketersediaan pangan utama. Dalam kurun waktu 2016 hingga 2020, Kota Madiun sudah memiliki regulasi mengenai ketahanan pangan. Selain itu, ketersediaan pangan utama dalam periode yang sama menunjukkan kecenderungan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013, ketersediaan pangan utama di Kota Madiun menembus lebih dari 10.000 ton yakni sebesar 10.144 ton. Kondisi ini terus meningkat hingga tahun 2014 yakni mencapai jumlah sebesar 10.689. Terjadi sedikit penurunan ketersediaan pangan utama pada tahun 2015 sehingga menjadi 11.468 ton. Pada tahun 2016 hingga 2018, perkembangan ketersediaan pangan utama di Kota Madiun ditunjukkan dengan angka rasio yang dihitung dari jumlah ketersediaan beras dibagi jumlah penduduk di Kota Madiun.

Ketersediaan beras adalah produksi domestik dikurangi ekspor ditambah impor dan stok. Pada tahun 2016, rasio ketersediaan pangan utama di Kota Madiun menunjukkan nilai sebesar 116,72%. Pada tahun 2017 meningkat sebesar 138,59%. Pada tahun 2018 meningkat secara signifikan yakni mencapai nilai sebesar 183,38%. Adanya kenaikan ini disebabkan oleh peningkatan pada jumlah pasokan beras di Kota Madiun, sehingga jumlah ketersediaan beras di Kota Madiun menjadi meningkat. Namun, pada tahun 2019 dan tahun 2020 rasio ketersediaan pangan utama di Kota Madiun menurun masing-masing sebesar 154,44% dan 138,56%.

Tabel 2.87
Regulasi Ketahanan Pangan dan Ketersediaan Pangan Utama di Kota Madiun, Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Regulasi Ketahanan Pangan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Ketersediaan Pangan Utama	116,72%	138,59%	183,38%	154,44 %	138,56%

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun, 2021

2.3.1.10 Pertanian

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur bidang pertanian adalah persentase luas lahan bersertifikat. Pemerintah Kota Madiun dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 telah memiliki lahan bersertifikat sebesar 3.874.886 m² atau sebesar 11,66% dari total luas wilayah sebesar 33.230.000 m². Terkait dengan penanganan konflik-konflik pertanian, capaian keberhasilan perangkat daerah telah mencapai 100% yang artinya bahwa jumlah kasus pertanian yang ada telah ditangani dan diselesaikan. Jumlah kasus konflik pertanian di Kota Madiun pada tahun 2018 adalah sebanyak 2 kasus.

Tabel 2.88
persentase Luas Tanah Bersertifikat Aset Pemerintah Kota Madiun, Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Luas Lahan Bersertifikat (m ²)	Penambahan Aset (m ²)	Jumlah Luas Wilayah (m ²)	persentase
2016	3.874.886	-	33.230.000	11,66
2017	3.874.886	-	33.230.000	11,66
2018	3.874.886	-	33.230.000	11,66
2019	3.874.886	-	33.230.000	11,66
2020	3.874.886	-	33.230.000	11,66

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Madiun, 2021

2.3.1.11 Lingkungan Hidup

Kualitas lingkungan hidup merupakan hal yang perlu menjadi perhatian bagi setiap daerah di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan yang salah satunya memperhitungkan aspek, lingkungan hidup dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mengukur kualitas lingkungan hidup digunakan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang terdiri dari: Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Air, dan Indeks Tutupan Lahan.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indeks yang dihitung berdasarkan nilai Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Nilai dari IKLH dapat digunakan untuk menilai kinerja organisasi untuk meningkatkan fungsi lingkungan hidup dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Berdasarkan pengukuran yang telah dilakukan, IKLH Kota Madiun pada tahun 2016-2020 sebagai berikut:

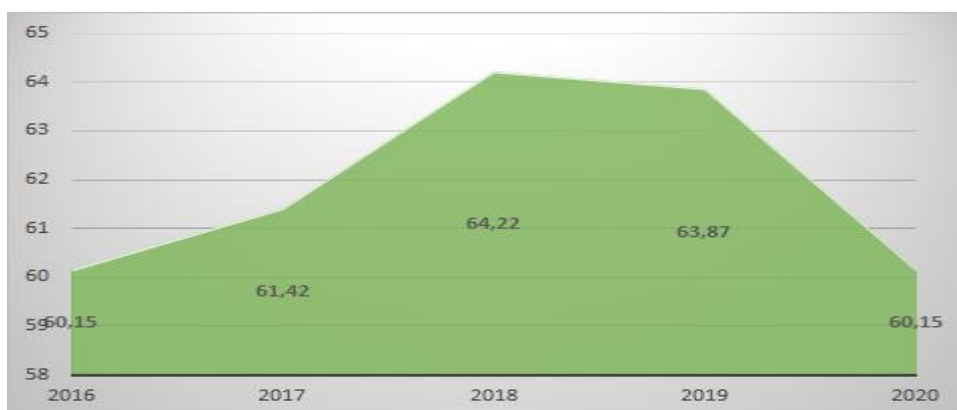
Tabel 2.89
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Madiun Tahun 2016-2020

No	Sasaran	Indikator	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	5	6	7	8	9
		Misi 3: Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan masyarakat					
1	Meningkatnya penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	60,15	61,42	64,22	63,87	60,15

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun, 2021

Hasil pengukuran IKLH Kota Madiun pada tahun 2016-2020 ditunjukkan pada Gambar di bawah ini. Sepanjang periode 2016-2020, nilai IKLH Kota Madiun terus menunjukkan perbaikan dengan terus meningkatnya nilainya setiap tahun. Pada tahun 2016, nilai IKLH adalah sebesar 60,15 dan pada tahun 2019 meningkat menjadi sebesar 63,87.

Data tahun 2020 sebesar 60,15 dikarenakan terbitnya surat Kementerian LHK S-318/PPKL/SET/REN.0/12/2020 tentang perubahan metodologi perhitungan yang menjelaskan perubahan metodologi lama dan metodologi baru.

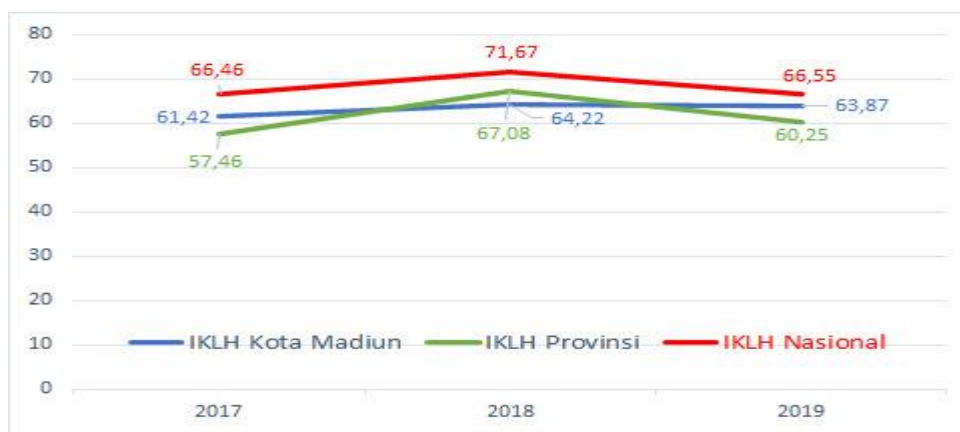


Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun, 2021

Gambar 2.48

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Madiun Tahun 2016-2020

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) telah dikembangkan sejak tahun 2009, yang merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional dan menjadi acuan bersama bagi semua pihak dalam mengukur kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penghitungan IKLH terdiri dari tiga komponen yaitu: Indeks Kualitas Air (IKA); Indeks Kualitas Udara (IKU); dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun, 2021

Gambar 2.49

Perbandingan IKLH Nasional, Provinsi dan Kota Madiun Tahun 2017-2019

Perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Madiun jika dibandingkan dengan IKLH provinsi Jawa Timur dan Nasional.

a. Indeks Kualitas Air (IKA)

Indeks Kualitas Air (IKA) berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air diukur dengan metode indeks pencemaran air sungai (PI). Metode ini digunakan untuk menilai kualitas badan air dan kesesuaian peruntukan badan air tersebut. Dari hasil perhitungan metode ini juga dapat dilihat kandungan apa saja yang terdapat di sample air tersebut dan dapat digunakan untuk dasar tindakan jika terjadi penurunan kualitas karena adanya senyawa pencemar. Hasil IKA Kota Madiun pada tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.90
Indeks Kualitas Air Kota Madiun tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Kualitas Air		55,71	50	76,89	76,70	78,30

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2021

b. Indeks Kualitas Udara (IKU)

Indeks Kualitas Udara (IKU) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air dihitung berdasarkan kadar kandungan *Sulfur Dioksida* (SO₂) dan *Nitrogen Dioksida* (NO₂) di udara. Hasil dari perhitungan indeks ini dapat dimanfaatkan untuk memberi informasi yang mudah dipahami bagi masyarakat terkait kualitas udara dan dasar dalam penyusunan terkait kebijakan untuk memperbaiki maupun menjaga kualitas udara untuk manusia dan ekosistem. Hasil IKU Kota Madiun pada tahun 2016-2020 dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.91
Indeks Kualitas Udara Kota Madiun tahun 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Kualitas Udara	70,11	88,49	85,50	84,38	87,94

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun, 2021

c. Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kota Madiun

Indeks tutupan lahan di Kota Madiun diperhitungkan dari ruang terbuka hijau dan juga lahan perkebunan. Ruang Terbuka Hijau (RTH) memiliki banyak fungsi antara lain untuk membantu menyerap emisi yang dihasilkan oleh penduduk Kota, memperbaiki iklim mikro kota dan mempercantik keindahan kota (fungsi estetika). RTH di Kota Madiun terdiri dari RTH publik dan RTH privat. Hutan di wilayah Kota Madiun berupa hutan kota yang tersebar di 3 (tiga) kecamatan dan lahan perkebunan merupakan kebun campuran yang sebagian besar milik masyarakat. Selain dari hutan kota dan perkebunan, tutupan lahan juga diperhitungkan dari taman pada jalur jalan kota, taman pada monumen dan gerbang kota, taman pada makam dan lapangan olahraga, taman lintasan kereta api, taman kantor, taman gedung komersial, daerah penyangga industri, sempadan SUTT, sempadan sungai dan sempadan mata air. Dimana total luasan tutupan lahan 5,91 km² atau 17,79% dari luas wilayah Kota Madiun dengan luas 33,23 km² dan angka tersebut masih jauh dari syarat ketentuan yaitu 30%. Hasil perhitungan menunjukkan angka Indeks Tutupan Lahan di Kota Madiun pada tahun 2018 adalah sebesar 38,76. Pada tahun 2019 dan 2020 mengalami sedikit peningkatan yakni mencapai 38,87.

Kurangnya Indeks Tutupan lahan ini perlu mendapat perhatian serius agar tidak kembali terjadi penurunan di tahun-tahun berikutnya, meskipun juga harus dipahami bahwa Kota Madiun merupakan sebuah kota dengan berarti besaran luasan yang sangat kecil dan merupakan Kawasan padat penduduk dan didominasi oleh area/kawasan terbangun.

Tabel 2.92
Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kota Madiun tahun 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	56,01	49,69	38,76	38,87	38,87

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun, 2021

d. Rasio Tempat Penampungan Sampah Sementara per Satuan Penduduk dan persentase Penanganan Sampah

Pada tahun 2016 hingga tahun 2020, rasio tempat penampungan sampah sementara per satuan penduduk di Kota Madiun cenderung mengalami peningkatan. Tahun 2016 dan Tahun 2017, rasio tempat penampungan sampah sementara per satuan penduduk menunjukkan angka sebesar 2,82. Pada tahun 2018 mengalami sedikit peningkatan yakni menjadi sebesar 2,89. Pada tahun 2019 rasio ini kembali menunjukkan peningkatan menjadi 2,96 dan 3,07 pada tahun 2020. Peningkatan rasio ini disebabkan oleh adanya pemeliharaan container dan peningkatan jumlah container dari tahun ke tahun. Selain itu, didukung pula dengan adanya kegiatan rehabilitasi dan pembangunan TPS. Pada tahun 2016 hingga tahun 2020, persentase penanganan sampah di Kota Madiun sudah melebihi 90% dan meningkat untuk tiap tahunnya. Berada pada kisaran 93,55% pada tahun 2016 hingga 97,01% pada tahun 2020.

Tabel 2.93
Rasio Tempat Penampungan Sampah Sementara per Satuan Penduduk dan persentase Penanganan Sampah di Kota Madiun, 2016-2020

Tahun	Rasio Tempat Penampungan Sampah Sementara per Satuan Penduduk (m ³ /hari/orang)	persentase Penanganan Sampah
2016	2,82	93,55
2017	2,82	93,62
2018	2,89	93,68
2019	2,96	94,01
2020	3,07	97,01

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun, 2021

e. Jumlah Tempat Penampungan Sampah Sementara

Pada tahun 2016 hingga 2018 rata-rata jumlah tempat penampungan sampah sementara di Kota Madiun cukup stabil atau sekitar 41 unit. Pada tahun 2019 dan 2020 masing-masing mengalami penurunan sebanyak 1 unit atau sebesar 40 dan 39.

Tabel 2.94
Jumlah Tempat Penampungan Sampah Sementara di Kota Madiun,
2016-2020

Tahun	Jumlah Tempat Penampungan Sampah Sementara
2016	41
2017	41
2018	41
2019	40
2020	39

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun, 2021

f. Penegakan Hukum Lingkungan

Terkait dengan penegakan hukum lingkungan, tercatat pada tahun 2016 hingga 2020 terdapat 33 pengaduan, yang terbagi menjadi 3 pengaduan pada tahun 2016, 5 pengaduan pada tahun 2017, dan 9 pengaduan pada tahun 2018. Sedang pada tahun 2019 hingga 2020 terdapat 8 pengaduan.

Pengaduan tersebut tidak sampai ke ranah hukum/pengadilan namun dilakukan mediasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun dengan mendatangkan instansi terkait dengan pelaku usaha kegiatan yang menghasilkan limbah. Hasil yang didapatkan yakni kedua pihak saling menyepakati hasil keputusan bersama. Pada konteks pelaksanaan AMDAL, Dinas Lingkungan Hidup telah menunjukkan kinerja yang baik dengan seluruh pembangunan yang mensyaratkan AMDAL telah diawasi seluruhnya sehingga capaiannya mencapai 100%.

Tabel 2.95
Penegakan Hukum Lingkungan di Kota Madiun,
2016-2020

Tahun	Data Penegakan Hukum
2016	3
2017	5
2018	9
2019	8
2020	8

2.3.1.12 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Arsip kependudukan seperti KTP, akte kelahiran, akte nikah, atau akte kematian merupakan dokumen penting yang perlu dimiliki oleh setiap penduduk. Dokumen tersebut digunakan untuk berbagai macam keperluan serta menjadi syarat administrasi mulai dari pendaftaran sekolah, mendaftar pekerjaan, administrasi perbankan, pembuatan paspor, dan sebagainya. Oleh karena itu, pengadministrasian serta pencatatan dokumen tersebut perlu menjadi fokus bagi pemerintah sehingga dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi syarat administrasi.

a. Cakupan Penduduk ber-KTP per Satuan Penduduk

Cakupan penduduk ber-KTP per satuan penduduk merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Cakupan dihitung berdasarkan jumlah perekaman KTP elektronik 8 dibagi jumlah penduduk yang wajib ber-KTP elektronik dikali 100%. Dalam kurun waktu tahun 2016 hingga 2020, cakupan penduduk ber-KTP per satuan penduduk di Kota Madiun berkisar pada nilai 97%-99%. Pada tahun 2016 sebesar 97,42%. Pada tahun 2017, nilai cakupan penduduk ber-KTP per satuan penduduk di Kota Madiun mengalami penurunan yakni menjadi sebesar 93,78%. dan pada tahun 2018 kembali meningkat menjadi 97,02%. Pada tahun 2019 dan tahun 2020 menunjukkan peningkatan sebesar 98,22% dan 99,80%.

Tabel 2.96

Cakupan Penduduk berKTP per Satuan Penduduk di Kota Madiun, Tahun 2016-2020

Tahun	Rasio Penduduk ber KTP Persatuan Penduduk
2016	97,42%
2017	93,78%
2018	97,02%
2019	98,22%
2020	99,80%

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun, 2021

b. Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran

Cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran merupakan angka yang menunjukkan perbandingan antara jumlah penerbitan akta kelahiran bayi yang lahir dibandingkan jumlah bayi yang lahir (dikalikan 100 %). Data menunjukkan bahwa dalam, 4 (empat) tahun terakhir kinerja cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran bayi di Kota Madiun cenderung meningkat. Pada tahun 2016, nilai cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran di Kota Madiun sebesar 82,94%. Meningkat pada tahun 2017 yakni mencapai nilai sebesar 90,56%. Pada tahun 2018, kinerja cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran kembali mengalami peningkatan hingga mencapai nilai sebesar 98,44%. Pada tahun 2019 dan 2020 cakupan penerbitan akta mengalami peningkatan sebesar 98,5% dan 98,90%.

Tabel 2.97

Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran di Kota Madiun, 2016-2020

Tahun	Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran
2016	82,94 %
2017	90,56 %
2018	98,44 %
2019	98.50%
2020	98,90%

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, 2021

c. Rasio Pasangan Berakta Nikah

Rasio pasangan berakta nikah merupakan rasio yang dihitung berdasarkan jumlah pasangan nikah berakta nikah dibagi dengan jumlah keseluruhan pasangan nikah. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yakni tahun 2016 hingga tahun 2020 tercatat seluruh pasangan nikah telah memiliki akte nikah, yang ditunjukkan oleh rasio pasangan berakta nikah sebesar 100%.

Tabel 2.98

Rasio Pasangan Berakta Nikah di Kota Madiun, Tahun 2016-2020

Tahun	Rasio Pasangan Berakta Nikah
2016	100
2017	100
2018	100
2019	100
2020	100

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun, 2021

d. Kepemilikan Nomor Induk Kependudukan

Dalam 5 (lima) tahun terakhir, kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Kota Madiun menunjukkan tren yang fluktuatif pada tiap klasifikasi berdasarkan usia, Pada tahun 2016, sebesar 99,79% penduduk usia >5 tahun telah memiliki NIK, dan sebesar 99,89% penduduk usia >17 tahun telah memiliki NIK. Kemudian pada tahun 2017 terjadi penurunan pada tiap klasifikasi yakni menjadi sebesar 98,90% untuk klasifikasi usia >5 tahun, dan 99,70% untuk klasifikasi usia >17 tahun. Sedangkan pada tahun 2018 terjadi penurunan pada tiap masing-masing klasifikasi yakni menjadi sebesar 98,90% untuk usia >5 tahun dan sebesar 99,70% untuk usia >17 tahun. Pada tahun 2019 kepemilikan NIK penduduk usia >5 tahun sedikit mengalami peningkatan yakni sebesar 1,03% atau menjadi sebesar 100%, untuk kepemilikan NIK penduduk usia >17 tahun menjadi sebesar 100%. Sedangkan pada tahun 2019 dan 2020 persentase kepemilikan NIK baik untuk usia diatas 5 tahun dan 17 tahun sudah 100%.

Tabel 2.99

persentase Kepemilikan NIK di Kota Madiun, Tahun 2016-2020

Usia	2016	2017	2018	2019	2020
>5 tahun	99,78 %	98,90 %	98,97 %	100%	100%
>17 tahun	99,89 %	99,70 %	99,47 %	100%	100%

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun, 2021

e. Jumlah Kepemilikan Kartu Keluarga

Kartu Keluarga adalah dokumen kependudukan untuk mengetahui susunan, jumlah dan hubungan anggota keluarga, kartu ini berisi data lengkap tentang identitas keluarga dan anggota keluarganya. Dari tahun 2016 sampai dengan 2020 kepemilikan kartu keluarga mengalami kenaikan mulai Tahun 2016 terdata 70.848 KK sampai dengan 72.750 pada tahun 2020.

Tabel 2.100
Jumlah Kepemilikan Kartu Keluarga (KK), Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Kartu Keluarga	70.848	70.110	71.153	71.995	72.750

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun, 2021

2.3.1.13 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pada dasarnya, pengendalian penduduk merupakan salah satu hal terpenting dalam pertumbuhan ekonomi. Apabila pertumbuhan penduduk ini tidak dikendalikan maka akan terjadi ledakan penduduk, yang nantinya akan meningkatkan beban ekonomi di Kota Madiun. Selain itu pengendalian penduduk merupakan upaya mendasar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Salah satu caranya yaitu melalui program keluarga berencana (KB). Dengan mengikuti KB, diharapkan keluarga dapat merencanakan kehidupan yang lebih berkualitas dan sejahtera.

a. Rata-rata Jumlah Anak Per-Keluarga

Rata-rata jumlah anak per keluarga merupakan angka yang didapat dari pembagian antara jumlah anak dengan jumlah keluarga. Angka ini menunjukkan rata-rata anak yang dimiliki oleh setiap keluarga. Di Kota Madiun, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir rata-rata jumlah anak per keluarga mengalami perkembangan fluktuatif. Pada tahun 2016, rata-rata jumlah anak per keluarga di Kota Madiun sebanyak 1,59% atau 1 anak. Lalu sedangkan pada tahun 2017 mengalami kenaikan yakni rata-ratanya mencapai 1,97. Kemudian pada tahun 2018, mengalami penurunan menjadi sebesar 1,91. Rata-rata jumlah anak mengalami peningkatan pada tahun 2019 sebesar 0,03 atau menjadi 1,94 dan tetap stabil pada angka 1,94 di tahun 2020.

Tabel 2.101
Rata-rata Jumlah Anak per Keluarga di Kota Madiun, Tahun 2016-2020

Tahun	Rata-rata jumlah anak per keluarga
2016	1,59
2017	1,97
2018	1,91
2019	1,94
2020	1,94

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun, 2021

b. Cakupan Peserta KB Aktif

Cakupan peserta KB Aktif menunjukkan persentase peserta KB aktif terhadap jumlah pasangan usia subur. Pada tahun 2016, cakupan peserta KB aktif mencapai 77,69%. Artinya sebanyak 77,69% jumlah pasangan subur merupakan peserta KB aktif. Pada tahun 2017 terjadi penurunan sehingga cakupan peserta KB aktif di Kota Madiun menjadi sebesar 77,16%.

Pada 2 (dua) tahun selanjutnya cakupan peserta KB aktif di Kota Madiun kembali meningkat sehingga menjadi 77,20% pada 2018 dan 78,80% pada tahun 2019. Namun demikian, pada tahun 2020 mengalami penurunan hingga 6,04% atau sebesar 72,76%.

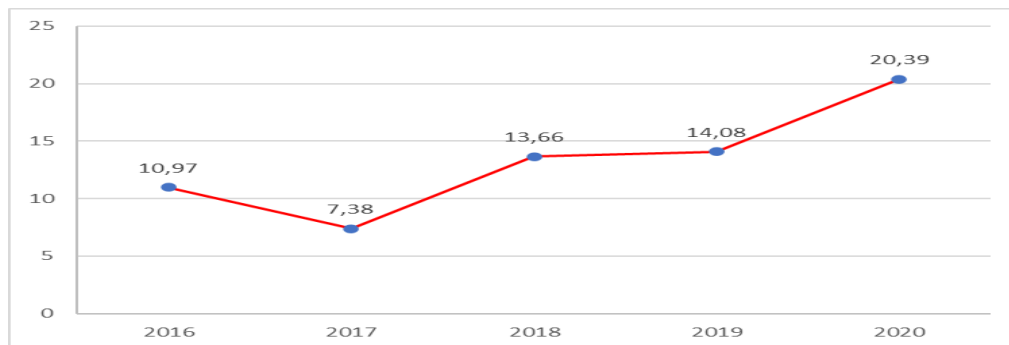
Tabel 2.102
Cakupan Peserta KB Aktif di Kota Madiun, Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Pasangan Usia Subur (Pasangan)	Peserta KB Aktif (Orang)	Cakupan Peserta KB Aktif (persentase)
2016	29.094	22.603	77,69
2017	28.107	21.686	77,16
2018	26.107	20.335	77,20
2019	27.452	21.633	78,80
2020	20.495	14.912	72,76

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2021

c. Rasio Akseptor KB

Akseptor KB dapat didefinisikan sebagai pasangan usia subur yang menggunakan alat kontrasepsi/alat KB. Periode tahun 2016 ke tahun 2017, rasio akseptor KB di Kota Madiun mengalami penurunan, namun demikian pada kisaran tahun 2018 sampai tahun 2020 cenderung terjadi kenaikan. Akseptor KB pada tahun 2017 terjadi penurunan yang cukup signifikan sebesar 3,41% atau mencapai nilai 7,38%. Kemungkinan penurunan rasio akseptor KB di Kota Madiun pada periode tersebut disebabkan data dari fasilitas kesehatan masih belum mengumpulkan tepat waktu, para akseptor membeli alat kontrasepsi sendiri di Apotek sehingga masih belum tercatat dengan baik, dan adanya pasangan usia subur yang menggunakan metode KB alami. Namun demikian karena adanya perbaikan terus-menerus dari pelayanan KB, pada tahun 2018 hingga tahun 2020, rasio akseptor KB terus mengalami peningkatan hingga mencapai 20,39% di tahun 2020.



Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun, 2021 (diolah)

Gambar 2.50
Rasio Akseptor KB di Kota Madiun, 2016-2020

d. Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

Menurut penjelasan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Keluarga Pra Sejahtera (KPS) merupakan keluarga yang tidak memenuhi salah satu dari 6 (enam) indikator Keluarga Sejahtera I (KS I) atau indikator “kebutuhan dasar keluarga”. Sedang Keluarga Sejahtera I adalah keluarga yang mampu memenuhi 6 (enam) indikator tahapan KS I tetapi tidak memenuhi salah satu dari 8 (delapan) indikator Keluarga Sejahtera II atau indikator “kebutuhan psikologis” keluarga. Kedua indikator ini merupakan dua tahap awal tingkat kesejahteraan keluarga. Keluarga Pra Sejahtera Kota Madiun tahun 2016 hingga tahun 2020 terus mengalami penurunan. Pada tahun 2016 dan 2017, jumlah KPS di Kota Madiun yakni sebesar 326 keluarga. Angka ini menurun signifikan pada tahun 2018 hingga jumlah KPS menjadi 120 keluarga. Pada tahun 2019 dan 2020 berhasil mencapai angka dibawah 100 keluarga yakni sebesar 88 keluarga. Sedang di Kota Madiun jumlah KS I selama lima tahun terakhir cenderung berada pada kisaran 6.984 keluarga hingga 8.742 keluarga.

. Pada tahun 2016 hingga tahun 2019, jumlah KS I berhasil turun hingga dibawah angka 7.000. Jumlah KS I mengalami peningkatan pada tahun 2020 dibanding 2019, sebanyak 2.627 keluarga, sehingga menjadi sejumlah 8.742 keluarga pada tahun 2020.

Tabel 2.103
Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I di Kota Madiun,
Tahun 2016-2020

Tahun	Keluarga Pra Sejahtera	Keluarga Sejahtera I
2016	326	6.984
2017	326	6.984
2018	120	6.806
2019	88	6.115
2020	88	8.742

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun, 2021

2.3.1.14 Perhubungan

Dalam rangka mendukung pembangunan daerah, maka urusan perhubungan menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan oleh pemerintah. Pemerintah Kota Madiun terus berupaya meningkatkan kualitas dan kuantitas transportasi di perkotaan dalam usaha mendorong lancarnya konektivitas baik di dalam kota maupun antara kota dengan wilayah sekitar. Untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan urusan perhubungan, digunakan indikator sebagai berikut:

a. Rasio Izin Trayek

Rasio Izin Trayek merupakan perbandingan antara jumlah izin trayek yang dikeluarkan dan jumlah penduduk. Data Kota Madiun menunjukkan bahwa dalam 5 (lima) tahun yakni tahun 2016-2020 rasio izin trayek cenderung menurun/kecil. Pada tahun 2016, rasio izin trayek di Kota Madiun berada pada nilai 0,0005. Pada tahun 2017 justru mengalami penurunan yakni pada nilai 0,0004.

Meskipun demikian, pada tahun 2018 terjadi peningkatan yang cukup signifikan yakni mencapai 0,0010. Pada tahun 2019 dan tahun 2020 terjadi penurunan masing-masing sebesar 0,00085 dan 0,000092.

Tabel 2.104
Rasio Izin Trayek di Kota Madiun, 2016-2020

Tahun	Rasio
2016	0,0005
2017	0,0004
2018	0,0010
2019	0,00085
2020	0,00092

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Madiun, 2021

b. Jumlah Uji KIR Angkutan Umum

Dijelaskan bahwa jumlah uji KIR angkutan umum merupakan pengujian setiap angkutan umum yang diimpor, maupun yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Pada tahun 2016 dan 2017 tercatat jumlah uji KIR angkutan umum 6.428 unit dan 6.219 unit. Pada tahun 2018 terjadi kenaikan yang cukup signifikan hingga mencapai 7.226 unit. Pada tahun 2019 dan tahun 2020 terus mengalami penurunan yang jumlahnya berkisar 800 hingga 1000 unit angkutan umum. Pada tahun 2019 tercatat sebanyak 6.446 unit sedangkan tahun 2020 tercatat 5.475 unit.

Tabel 2.105
Jumlah Uji KIR Angkutan Umum di Kota Madiun, 2016-2020

Tahun	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum
2016	6.428
2017	6.219
2018	7.226
2019	6.446
2020	5.475

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Madiun, 2021

c. Jumlah Stasiun Kereta Api dan Terminal

Konektivitas antar daerah dapat ditingkatkan dengan menambah ketersediaan stasiun kereta api dan terminal. Data menunjukkan, bahwa Kota Madiun memiliki 1 stasiun kereta api yaitu Stasiun Madiun. Selain itu, Kota Madiun juga memiliki 3 terminal yang terdiri dari 1 unit terminal tipe A dan 2 unit sub terminal yaitu Sub Terminal Mayjend Sungkono dan Sub Terminal Manisrejo. Kota Madiun juga memiliki 1 terminal barang. Sedangkan jumlah angkutan darat mengalami penurunan seiring dengan meningkatnya jumlah kendaraan pribadi dari sebesar 230 angkutan menjadi 179 angkutan.

Tabel 2.106
Jumlah Angkutan Darat di Kota Madiun, 2016-2020

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Angkutan darat	230	230	230	179	179

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Madiun, 2021

Tabel 2.107
Daya Tampung Sub Terminal, 2019-2020

Keterangan	2019	2020
Jumlah Armada	32	32
Kapasitas Sub Terminal	48	48
Armada Masuk Sub Terminal per Hari	9	7

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Madiun, 2021

Di lihat seperti tabel di atas pada tahun 2019 dan tahun 2020 dari total jumlah armada yaitu 32 armada, yang masuk sub terminal per hari tahun 2019 dan tahun 2020 hanya sebanyak 9 armada dan 7 armada.

d. Pemasangan Rambu-rambu dan Kejadian Kecelakaan

Untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan urusan perhubungan dapat dilihat melalui indikator persentase jumlah pemasangan rambu-rambu. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2016-2018 cenderung mengalami peningkatan. Realisasi jumlah pemasangan rambu pada tahun 2016 yakni sebesar 71%. Demikian pula pada tahun 2017, 2018, dan 2019 juga selalu menunjukkan adanya peningkatan, yakni masing-masing sebesar 82%, 95%, dan 100%. Peningkatan pemasangan rambu tersebut mengindikasikan bahwa 100% jalan di Kota Madiun telah dipasang rambu-rambu lalu lintas dan berfungsi dengan baik sampai dengan tahun 2020. Sehingga memberikan kemudahan bagi para pengguna sarana transportasi baik angkutan pribadi maupun umum.

Tabel 2.108
Persentase Jumlah Pemasangan Rambu Lalu Lintas, 2016-2020

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Pemasangan Rambu	71	82	95	100	100

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Madiun, 2021

Selain itu jumlah kecelakaan pada tahun 2016 hingga tahun 2020 mengalami fluktuatif dan jumlah korban meninggal mengalami peningkatan tahun 2016 sejumlah 25 korban meninggal meningkat hingga tahun 2019 mencapai 43 korban meninggal, tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan korban meninggal menjadi 23 korban.

Tabel 2.109
Korban Kecelakaan dan Kerugian, 2016-2020

NO	KECELAKAAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	JML KEJADIAN	287	461	351	402	286
2	JML KORBAN MENINGGAL	25	29	34	43	23
3	JML KORBAN LUKA BERAT	1	2	0	0	0
4	JML KORBAN LUKA RINGAN	401	505	422	522	387
5	KERUGIAN MATERIAL (Rp)	182.700.000	124.500.000	160.800.000	211.700.000	176.500.000

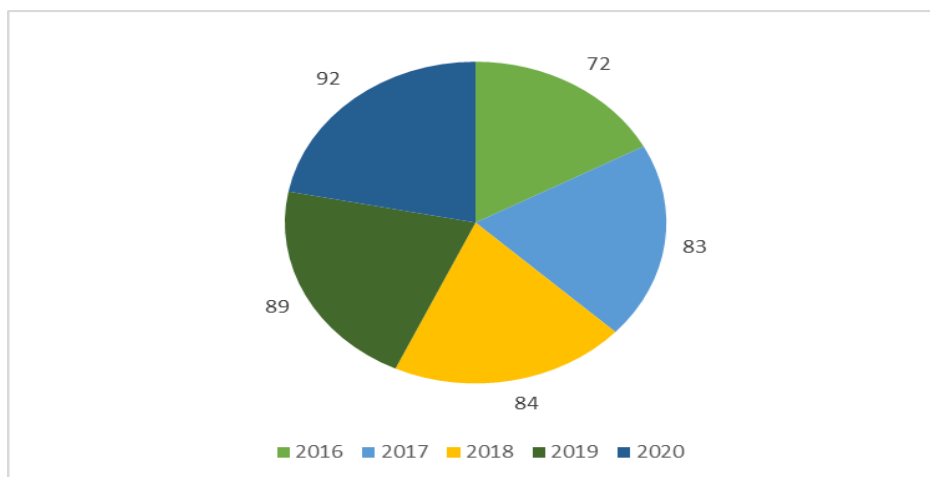
Sumber: Dinas Perhubungan Kota Madiun, 2021

2.3.1.15 Komunikasi dan Informatika

Komunikasi dan Informatika pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan akses dan kemudahan masyarakat berkomunikasi dan mendapatkan informasi di semua wilayah Kota Madiun dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Hal tersebut diwujudkan dengan sasaran terwujudnya peningkatan akses, pelayanan dan kemudahan masyarakat untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi.

a. Jumlah Jaringan Komunikasi dan Menara Telekomunikasi

Pada tahun 2016-2020, data menunjukkan bahwa jumlah jaringan komunikasi di Kota Madiun terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2016, jumlah jaringan komunikasi berjumlah 72 menara. Hingga sampai tahun 2020, jumlah menara telekomunikasi terus meningkat menjadi sebanyak 92 menara. Jumlah jaringan komunikasi di Kota Madiun hingga tahun 2019 adalah sebanyak 6 operator yaitu Telkom, Telkomsel, Indosat, XL, Axiata, Smartfren, Three. Semakin banyak jumlah jaringan komunikasi maka menggambarkan semakin besar ketersediaan fasilitas jaringan komunikasi sebagai pelayanan penunjang dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.



Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun, 2021 (diolah)

Gambar 2.51

Jumlah Jaringan Komunikasi di Kota Madiun, Tahun 2016-2020

b. Jumlah Surat Kabar

Selama kurun waktu 2016-2019 jumlah surat kabar di Kota Madiun terus meningkat, akan tetapi pada tahun 2020 terjadi penurunan yang signifikan. Pada tahun 2016, jumlah surat kabar yang beredar di Kota Madiun berjumlah hingga sebanyak 50 surat kabar. Peningkatan jumlah surat kabar terjadi pada dua tahun selanjutnya yakni tahun 2017, dan 2018 yakni masing-masing sebanyak, 75 surat kabar, dan 80 surat kabar. Pada tahun 2019 jumlah surat kabar sama seperti periode sebelumnya yakni 80 surat kabar. Akan tetapi Terjadi penurunan jumlah surat kabar yang cukup signifikan pada tahun 2020 yaitu sebesar 38 surat kabar atau menjadi 42 surat kabar.

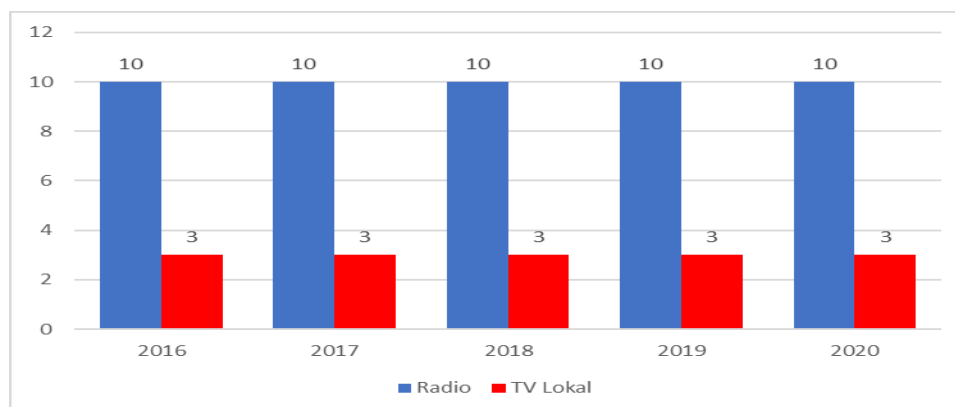
Tabel 2.110
Jumlah Surat Kabar di Kota Madiun, Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Surat Kabar
2016	50
2017	75
2018	80
2019	80
2020	42

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun, 2021

c. Jumlah Penyiaran Radio dan TV Lokal

Di Kota Madiun, pada tahun 2016 hingga 2020 jumlah penyiaran TV lokal tidak terdapat perubahan yaitu sebanyak 3 unit. Stasiun TV lokal yang beroperasi hingga kurun waktu 5 (lima) tahun itu adalah JTV Madiun, SAKTI TV dan BBS TV. Tidak hanya TV lokal yang tidak mengalami perubahan, stasiun radio yang beroperasi selama tahun 2016-2020 sebanyak 10 unit. Stasiun radio lokal yang hingga kini masih beroperasi adalah RRI, Radio Suara Madiun, DCS FM, Moderato FM, Ge FM, Madya FM, Suara Kasih, Radio Komunitas Kita, Radio Pesona dan Radio Sahabat Kehidupan.



Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun, 2021 (diolah)

Gambar 2.52
Jumlah Penyiaran Radio dan TV Lokal di Kota Madiun, Tahun 2016-2020

d. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Pemantauan dan evaluasi SPBE dilakukan dengan mengukur tingkat kematangan (maturity level) penerapan SPBE pada instansi pusat dan pemerintah daerah yang direpresentasikan dalam bentuk nilai indeks SPBE. pemantauan dan evaluasi SPBE dilakukan dengan mengukur tingkat kematangan (maturity level) penerapan SPBE pada instansi pusat dan pemerintah daerah yang direpresentasikan dalam bentuk nilai indeks SPBE. Upaya yang sudah dilakukan dalam rangka mencapai tingkat kematangan (maturity level) penerapan SPBE adalah :

1. Melakukan pengintegrasian sistem e-goverment;
2. Pengelolaan website Pemerintah Kota secara terintegrasi;
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publikasi informasi ke masyarakat;

4. Menjalin kerjasama dan hubungan yang lebih harmonis dengan media massa dan instansi terkait;
5. Menyediakan layanan publik berbasis Teknologi Informasi;
6. Menyediakan saluran informasi dan komunikasi yang memadai bagi masyarakat berkaitan dengan implementasi kebijakan dan pembangunan Pemerintah Kota;
7. Mengoptimalkan PPID;
8. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder masyarakat;

2.3.1.16 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Pada dasarnya, koperasi merupakan salah satu usaha dalam rangka pemberdayaan rakyat masyarakat. Koperasi dapat diartikan sebagai salah satu bentuk lembaga profit sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui berbagai bentuk usaha. Keberadaan koperasi di Kota Madiun jumlahnya cukup banyak dan tersebar di seluruh kecamatan. Semakin banyaknya koperasi yang aktif diharapkan dapat memberdayakan ekonomi berbasis kerakyatan, guna menurunkan angka kemiskinan dan menurunkan jumlah pengangguran.

a. persentase Koperasi Aktif

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian pelaksanaan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah, salah satu indikator yang dapat digunakan adalah persentase koperasi aktif. Menurut UU No. 25 Tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Sedang koperasi aktif didefinisikan sebagai koperasi yang dalam 2 (dua) tahun terakhir mengadakan Rapat Anggota Tahunan atau koperasi yang dalam tahun terakhir melakukan kegiatan usaha. Pada kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir yaitu tahun 2016-2020, persentase koperasi aktif, jumlah koperasi, dan persentase koperasi aktif di Kota Madiun menunjukkan tren fluktuatif, peningkatan dan penurunan diakibatkan jumlah koperasi yang mengalami penambahan dan pengurangan selama kurun waktu tahun 2016-2020.

Tabel 2.111
persentase Koperasi Aktif di Kota Madiun, 2016-2020

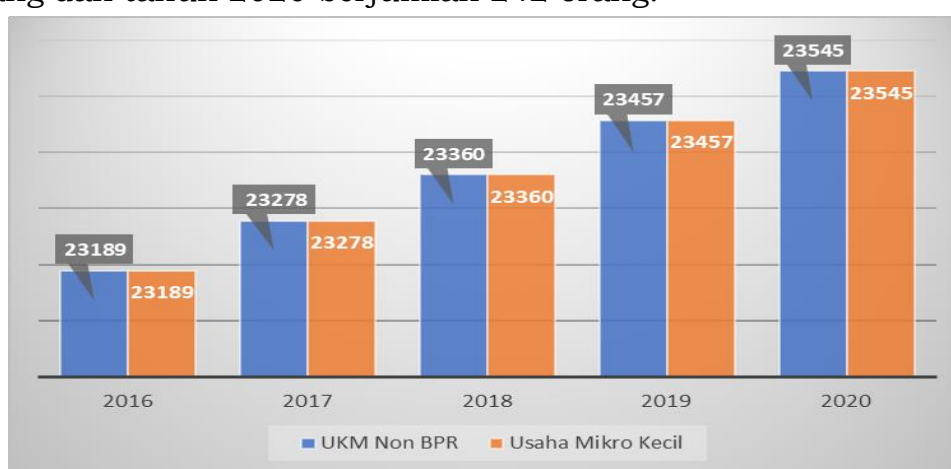
Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Koperasi	304	306	173	308	155
Jumlah Koperasi Aktif	297	300	172	302	153
persentase Koperasi Aktif	97,69	98,04	99,42	98,05	98,71

Sumber: Dinas Penanaman Modal, PTSP Kota Madiun, 2021

b. Jumlah Usaha Mikro Kecil, dan Menengah Non BPR/LKM UKM dan Usaha Kecil Mikro

Dalam 5 (lima) tahun terakhir, jumlah UMKM Non BPR/ LKM UKM dan Usaha Mikro dan Kecil di Kota Madiun cenderung terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2016, jumlah UMKM Non BPR/LKM UKM sebesar 23.189 unit. Pada tahun 2017 dan 2018 juga terjadi peningkatan yakni masing-masing sebanyak 23.276 unit dan 23.360 unit. Pada tahun 2019 jumlah UMK dan UMK non BPR masing-masing sebesar 23.457 unit dan 23.457. selanjutnya pada tahun 2020, jumlah UMK dan UMK non BPR masing-masing sebesar 23.545 dan 23.545 unit

Sementara itu jumlah UMKM yang dibina pada tahun 2019 berjumlah 979 orang dan tahun 2020 berjumlah 242 orang.



Sumber: Dinas Penanaman Modal, PTSP Kota Madiun, 2021 (diolah)

Gambar 2.53

Jumlah UMKM Non BPR/LKM dan Usaha Kecil Mikro di Kota Madiun, Tahun 2016-2020

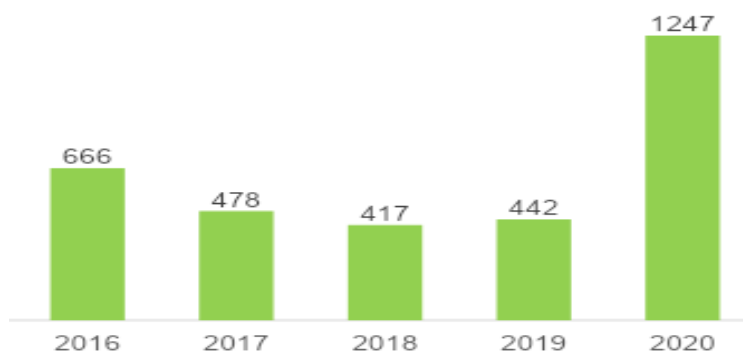
2.3.1.17 Penanaman Modal

Penanaman modal atau investasi merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di suatu daerah, sehingga semakin tinggi penanaman modal di suatu daerah akan mendorong pertumbuhan ekonomi untuk semakin meningkat. Dalam rangka mengarahkan potensi ekonomi lokal, penyelenggaraan urusan penanaman modal menjadi salah satu urusan yang dapat mendukung peningkatan kontribusi sektor keuangan terhadap PDRB di Kota Madiun. Penanaman modal terbagi menjadi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA).

PMDN adalah penggunaan modal dalam negeri bagi usaha-usaha yang mendorong pembangunan ekonomi pada umumnya. Sedang PMA adalah penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan di Indonesia, artinya bahwa pemilik modal secara lnsung menanggung risiko dari penanaman modal tersebut. Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan urusan penanaman modal, antara lain:

a. Jumlah Investor

Dalam 5 (lima) tahun terakhir jumlah investor di Kota Madiun cenderung fluktuatif. Pada tahun 2016, jumlah investor PMDN dan PMA di Kota Madiun sebesar 666 investor. Akan tetapi, pada 2 tahun setelahnya mengalami penurunan, sehingga jumlah investor PMDN dan PMA hanya mencapai 478 investor pada 2017, dan 417 investor pada 2018. Pada tahun 2019 jumlah investor meningkat sebanyak 25 atau sebanyak 442. Tahun 2020 mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu hampir mencapai tiga kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya atau sebanyak 1247.



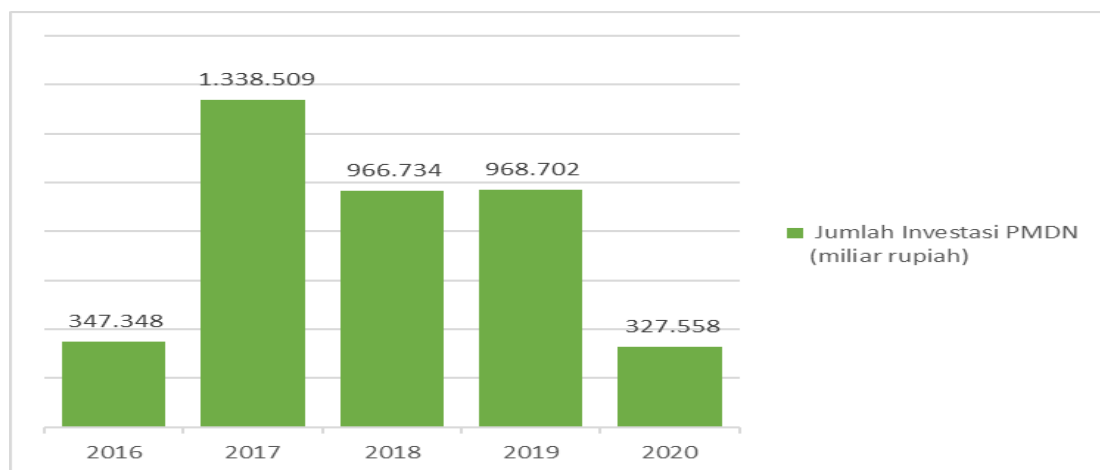
Sumber: Dinas Penanaman Modal, PTSP Kota Madiun, 2021

Gambar 2.54

Jumlah Investor PMDN dan PMA di Kota Madiun, Tahun 2016-2020

b. Jumlah Investasi

Jumlah investasi PMDN di Kota Madiun dalam 5 (lima) tahun terakhir cenderung berfluktuasi. Pada tahun 2016, jumlah investasi PMDN di Kota Madiun sebesar Rp 347,35 miliar yang nilai investasinya didominasi oleh bidang usaha perdagangan, jasa, konstruksi, hotel dan rumah kos. Namun, pada tahun 2017 terjadi peningkatan yang signifikan hingga lebih dari tiga kali lipatnya atau mencapai Rp 1,34 triliun, sedangkan pada tahun 2018 menurun menjadi sebesar Rp 966,73 miliar. Pada tahun 2019 terjadi sedikit peningkatan menjadi sebesar Rp 968,70 miliar. Pada tahun 2020 terjadi penurunan yang cukup signifikan sehingga nilainya menjadi Rp 327,55 miliar.



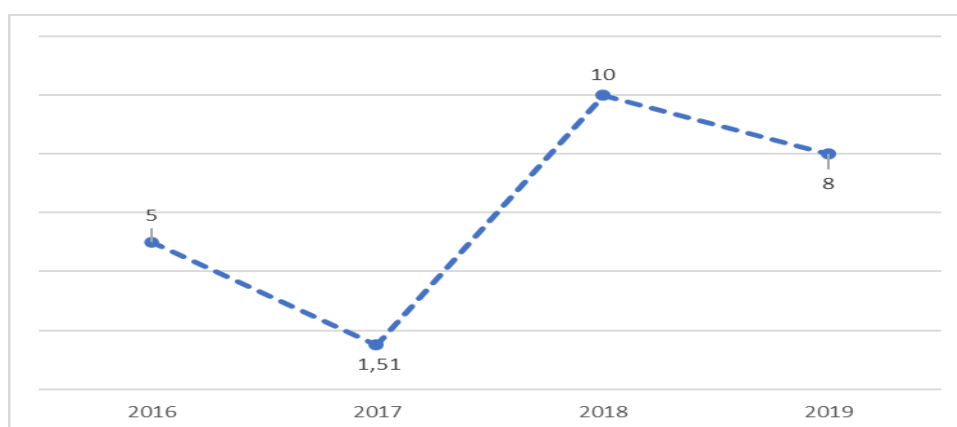
Sumber: Dinas Penanaman Modal, PTSP Kota Madiun, 2021

Gambar 2.55

Jumlah Investasi PMDN dan PMA di Kota Madiun, Tahun 2016-2020

c. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Rasio Daya Serap Tenaga Kerja merupakan perbandingan antara jumlah tenaga kerja bekerja pada perusahaan PMA/PMDN dengan jumlah PMA/PMDN. Jumlah tenaga kerja bekerja pada perusahaan PMA/PMDN dihitung dari banyaknya tenaga kerja yang bekerja pada investasi PMA/PMDN yang terealisasi pada suatu tahun. Jumlah seluruh PMA/PMDN dihitung dari banyaknya proyek investasi yang terealisasi di daerah pada suatu tahun berdasarkan data BKPM. Data menunjukkan pada tahun 2016 rasio daya serap tenaga kerja berada pada angka 5 dan menurun pada tahun 2017 menjadi 1,51. Berdasarkan data, penurunan ini disebabkan adanya peningkatan yang cukup signifikan pada jumlah tenaga kerja perusahaan PMDN/PMA. Pada tahun 2018, rasio daya serap tenaga kerja kembali mengalami kenaikan menjadi sebesar 10. Tahun 2019 rasio daya serap sedikit mengalami penurunan menjadi 8.



Sumber: Dinas Penanaman Modal, PTSP, 2021

Gambar 2.56

Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Perusahaan PMDN/PMA di Kota Madiun, Tahun 2016-2019

d. Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN

Investor PMA di Kota Madiun pada Tahun 2016, 2018 dan 2020 tidak ada, untuk tahun 2017 terdapat 2 investor PMA dan 2019 hanya terdapat 1 Investor PMA, Sedangkan untuk nilai realisasi PMDN di tahun 2016, terjadi penurunan nilai realisasi sebesar rp 1.190.531 miliar. Pada tahun 2017 kembali terjadi kenaikan mencapai Rp 1.041.161 M. namun pada tahun 2018 terjadi penurunan sebesar Rp 421,775 M terjadi sedikit peningkatan pada tahun 2019 sebesar 6,11 M dan kembali terjadi penurunan yang signifikan sebesar Rp 641,14 M pada tahun 2020.

Tabel 2.112

Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN di Kota Madiun, Tahun 2016-2020

Tahun	Kenaikan (Rp miliar)	Penurunan (Rp miliar)
2016		1.190,531
2017	1.041,161	
2018		421,775
2019	6,11	
2020		641,14

Sumber: Dinas Penanaman Modal, PTSP Kota Madiun, 2021

2.3.1.18 Kepemudaan dan Olah Raga

Pada dasarnya kepemudaan dan olahraga melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kepemudaan dan olahraga. Urusan kepemudaan dan olah raga diarahkan pada penyiapan sumber daya manusia untuk menjadi pemimpin masyarakat serta sebagai pelaku utama dalam pembangunan di dalam lingkup kepemudaan dan olahraga. Dalam rangka memenuhi arahan tersebut diperlukan program-program yang berkaitan dengan sektor lain, misalnya pendidikan, kesehatan, kepemimpinan serta profesionalitas.

Organisasi pemuda adalah sekelompok pemuda yang bekerja sama dengan suatu perencanaan-perencanaan kerja dan peraturan-peraturan, untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jumlah organisasi pemuda dihitung dari jumlah organisasi pemuda yang aktif sampai dengan tahun pengukuran. Indikator keberhasilan pelaksanaan bidang urusan kepemudaan dan olahraga dapat diukur melalui indikator jumlah organisasi pemuda, jumlah organisasi olahraga, jumlah kegiatan kepemudaan, jumlah kegiatan olahraga, jumlah gelanggang/balai remaja milik pemda dan jumlah lapangan olahraga, jumlah peserta olah raga, dan jumlah prestasi olah raga tingkat regional dan nasional. Data tentang bidang urusan kepemudaan dan olahraga di Kota Madiun tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, dapat dilihat sebagaimana tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.113
Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga
di Kota Madiun, Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah organisasi pemuda (unit)	3	6	3	6	6
2.	Jumlah organisasi olahraga (unit)	28	28	28	28	28
3.	Jumlah kegiatan kepemudaan (kegiatan)	2	3	3	3	1
4.	Jumlah kegiatan olahraga (kegiatan)	4	8	8	18	2
5.	Jumlah gelanggang/balai remaja milik Pemda (gedung)	3	3	3	3	3
6.	Jumlah lapangan olahraga (lapangan)	83	83	83	83	83
7.	Jumlah prestasi di bidang pemuda dan olah raga tingkat nasional (prestasi)	2	7	11	7	3
8.	Jumlah prestasi olah raga tingkat regional dan nasional (prestasi)	7	8	34	52	79
9.	Jumlah peserta olahraga (orang)	38.000	19.501	20.394	19.266	2.015

Sumber: Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan, dan Olah Raga Kota Madiun, 2021

Dalam kaitannya dengan peran serta Kota Madiun dalam memajukan urusan kepemudaan dan olahraga, pada tahun 2016 Kota Madiun telah berhasil memperoleh beberapa capaian prestasi yakni angka partisipatif peserta jalan bersama yang dilaksanakan di tiga kecamatan sebanyak 38.000 orang. Namun demikian, pada tahun 2020 telah terjadi penurunan yang signifikan terhadap jumlah peserta olahraga dari 19.266 pada tahun 2019 menjadi 2.015 pada tahun 2020 karena adanya pembatasan sosial akibat pandemi Covid-19.

Selain itu berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan pula bahwa peningkatan partisipatif peserta olah raga diimbangi oleh peningkatan jumlah prestasi bidang olah raga tingkat regional maupun nasional yang semakin meningkat sejak 2018 sehingga mencapai 79 prestasi olah raga pada tahun 2020.

2.3.1.19 Statistik

Bidang urusan statistik daerah mempunyai tugas dan fungsi pengolahan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. Hasil pengolahan data dan informasi, selanjutnya dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan rencana kerja tahunan pemerintah daerah, yang mencakup data dan informasi gambaran umum kondisi daerah, data kondisi geografis dan demografis daerah, serta data terkait dengan indikator kinerja kunci penyelenggaraan pemerintahan daerah yang meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

Dalam pencatatan statistik, Pemerintah Kota Madiun bekerjasama dengan BPS Kota Madiun telah merangkum berbagai statistik Kota Madiun yang selanjutnya merupakan indikator atau tolak ukur yang digunakan untuk menggambarkan kelengkapan urusan statistik yang tersedia oleh Kota Madiun. Jenis dokumen yang dapat menjadi indikator urusan statistik antara lain Buku Analisis ASPM (Analisa Situasi Pembangunan Manusia) dan Buku Data Sektoral. Penyusunan 2 (dua) buku tersebut penting kaitannya dengan keberadaan data yang digunakan dalam merancang kebijakan, dan penyusunan program kegiatan.

Tabel 2.114

Hasil Kinerja Urusan Statistik Pemerintah Kota Madiun, Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Buku Analisis ASPM	-	ada	ada	ada	ada
2.	Buku Data Sektoral	-	-	-	ada	ada

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun, 2021

2.3.1.20 Persandian

Salah satu urusan wajib diluar pelayanan dasar yang perlu diatur oleh perangkat daerah adalah bidang persandian. Kewenangan daerah terkait dengan urusan persandian telah dijabarkan dalam pemetaan urusan persandian dalam rangka Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Bidang Persandian Sesuai Arah UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam lampiran Undang-Undang Pemerintah Daerah telah dijelaskan terkait pembagian urusan pemerintahan untuk bidang persandian.

Kewenangan pertama adalah penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi, yaitu dengan melaksanakan tata kelola Jaminan Keamanan Informasi (JKI) yang meliputi aspek kerahasiaan, ketersediaan, keutuhan, keaslian dan/atau nir-sangkal. Indikator keberhasilan dari layanan ini dapat dilihat dari jumlah informasi dan juga jumlah konten informasi yang wajib diamankan dengan persandian sesuai peraturan perundang-undangan. Selain itu layanan yang juga perlu dilaksanakan yaitu dukungan kegiatan pengamanan informasi, indikatornya dilihat dari jumlah aset atau fasilitas yang harus diamankan serta jumlah rata-rata kegiatan penting yang membutuhkan dukungan pengamanan informasi per bulannya.

Kewenangan kedua yaitu terkait penetapan pola hubungan komunikasi sandi yaitu dengan layanan berupa pelaksanaan pola hubungan komunikasi sandi, indikatornya dilihat dari jumlah organisasi pemerintah daerah yang menggunakan persandian untuk mengamankan setiap jenis informasi yang wajib diamankan atau rasio dari jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar perangkat daerah dengan jumlah total perangkat daerah (Majalah Info Singkat Permendagri Vol. VIII, No. 09/I/P3DI/Mei/2016). Untuk mengaplikasikan indikator tersebut perlu adanya kerjasama antara urusan komunikasi dan informatika dengan persandian di Kota Madiun.

2.3.1.21 Kebudayaan

Pembangunan bidang urusan kebudayaan sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan 2 (dua) sasaran pencapaian pembangunan bidang sosial budaya dan keagamaan yaitu: (i) mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab; dan (ii) mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk pencapaian masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera.

Indikator keberhasilan pelaksanaan bidang urusan kebudayaan dapat diukur dengan indikator melalui jumlah grup kesenian, jumlah gedung, penyelenggaraan festival seni dan budaya, sarana penyelenggaraan seni dan budaya serta terpeliharanya benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan. Sesuai tabel di bawah pada 3 tahun terakhir periode tahun 2018 sampai tahun 2020 jumlah grup kesenian 168 group, gedung kesenian 1 gedung, sarana penyelenggaraan festival 4 unit dan jumlah kawasan cagar budaya yang dilestarikan 21 lokasi jumlahnya stagnan. Adapun jumlah penyelenggaraan festival seni budaya naik dari 30 festival di 2018 menjadi menjadi 58 festival di 2019, tetapi menurun sangat signifikan pada tahun 2020 menjadi 10 festival terdampak pandemi Covid-19.

Tabel 2.115

Seni dan Budaya, Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya, dan Benda Situs, Kawasan Cagar Budaya di Kota Madiun, 2016-2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah grup kesenian (group)	88	93	168	168	168
2.	Jumlah gedung kesenian (gedung)	1	1	1	1	1
3.	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya (Festival)	11	18	30	58	10
4.	Jumlah Sarana Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya (unit)	3	4	4	4	4
5.	Jumlah Benda/situs/kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan (lokasi)	2	21	21	21	21

Sumber: Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan, dan Olah Raga Kota Madiun, 2021

Pengembangan kesenian lokal merupakan salah satu cara untuk melestarikan kebudayaan jawa dan dapat menumbuhkembangkan pendidikan karakter yang berdasarkan pada budi pekerti yang luhur dari para leluhur sehingga dapat membentengi diri arus globalisasi yang serba terbuka. Melihat potensi dari jumlah grup kesenian yang melimpah, Pemerintah Kota Madiun berupaya mengembangkan potensi kebudayaan lokal melalui kegiatan pentas budaya seperti panembromo, mocapat, upacara adat, pedalangan dan karawitan. Pelestarian kebudayaan juga terlihat dalam jumlah benda/situs/kawasan cagar budaya yang dilestarikan yang semula hanya berjumlah 2 saja di 2016, meningkat menjadi 21 benda/situs/kawasan cagar budaya yang dilestarikan di 2020 (Tabel 2.104). Adapun daftar kebudayaan Kota Madiun tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 2.116
Daftar Kebudayaan di Kota Madiun, 2020

No	Daftar	Rincian	
1.	Grup kesenian yang dikembangkan	Campursari (33), Keroncong (9), Reog (12), Kethoprak (4),	
		Hadroh (3), Band (6), Karawitan (8), Dalang (8),	
		Sanggar Seni (7), Teater (1), Wayang Orang (2)	
2.	Budaya lokal yang Dipentaskan	Panembromo, Mocopat, Upacara Adat, Pedalangan, Karawitan	
3.	Situs budaya yang Dilestarikan	Makam dan Masjid Kuno	Makam dan Masjid Kuno
		Taman	Kuncen
		Kompleks Bakorwil	Kompleks Gereja Santo Cornelius
		Kompleks Santo Bernadus	Rumah Kapiten Cina
		SDN 05 Madiun Lor	SMPN 01 Kota Madiun
		SMPN 13 Kota Madiun	SMPN 03 Kota Madiun
		Stasiun Madiun	Balaikota
		SDN 01 Kartoharjo	SDN 02 Kartoharjo
		Klenteng Hwie Ing Kiong	Menara Air Sleko
		SMAN 01 Kota Madiun	Rumah Keluarga Andi Wibisono
		Kompleks Pabrik Gula	Kompleks Rumdin PG.
		Rejoagung	Rejoagung

Sumber: Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan, dan Olah Raga Kota Madiun, 2021

2.3.1.22 Perpustakaan

Bidang urusan perpustakaan, merupakan suatu wadah atau tempat yang di dalamnya terdapat bahan pustaka untuk masyarakat yang disusun menurut sistem tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pendidikan. Indikator keberhasilan pelaksanaan bidang urusan perpustakaan, dapat diukur melalui indikator (i) jumlah perpustakaan; (ii) jumlah koleksi buku perpustakaan; dan (iii) jumlah pengunjung perpustakaan.

Tabel 2.117
Data Urusan Perpustakaan di Kota Madiun Tahun 2016-2020

No.	Uraian Data	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Perpustakaan yang dibina/ didampingi (unit)	37	37	37	37	36
2.	Jumlah Koleksi Buku (eksemplar)	33.373	36.397	49.172	51.986	85.518
3.	Jumlah Pengunjung (orang)	39.324	55.633	56.648	81.284	108,211

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun, 2021

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun memberikan penyediaan bantuan taman bacaan yang ada di kelurahan. Jumlah perpustakaan masyarakat yang dibina pada tahun 2020 ada sebanyak 36 unit, menurun dari tahun sebelumnya sebanyak 37 unit. Adanya perpanjangan jam pelayanan di Perpustakaan Umum pada hari Sabtu dan Minggu dapat meningkatkan tren jumlah pengunjung mulai dari kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2020, hingga mencapai 108.211 orang pengunjung di tahun 2020. Peningkatan yang signifikan terjadi pada tahun 2019 mencapai sebesar 81.284 orang.

Hal ini mungkin dipengaruhi dengan semakin seringnya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan melakukan sosialisasi dalam bentuk informasi ke media TV dan Radio, penyebaran leaflet.

2.3.1.23 Kearsipan

Berbagai macam kegiatan operasional maupun program kerja yang dijalankan oleh pemerintah perlu didukung oleh sistem pengarsipan yang baik agar dapat menyajikan informasi perkembangan penyelenggaraan pemerintahan dari tahun ke tahun. Terlebih untuk menciptakan tata kelola administrasi yang baik juga diperlukan pemeliharaan dan pelestarian arsip daerah yang merupakan bahan kerja dalam mencapai tujuan pemerintahan. Oleh karena itu, seluruh jajaran pemerintah perlu menyadari pentingnya arsip, sehingga akan mempermudah dalam penyelenggaraan program kearsipan. Indikator keberhasilan pelaksanaan bidang urusan kearsipan, dapat diukur melalui indikator (i) Pengelolaan arsip secara terpadu; dan (ii) Peningkatan sumber daya manusia pengelola kearsipan, sebagaimana data yang tersaji pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.118
Data Urusan Kearsipan di Kota Madiun Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Berkas Arsip Aktif yang Dikelola (berkas)	40.048	51.430	53.613	57,615	60,004
2.	persentase Unit Kearsipan yang Menyerahkan Arsip Aktifnya (unit)	32,5%	39,7%	43,51%	48,00%	Indikator tidak di gunakan
3.	Jumlah SDM Pengelola Kearsipan yang Mendapatkan Pelatihan (orang)	565	765	965	200	131

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun, 2021

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah berkas arsip aktif yang dikelola terus mengalami peningkatan selama kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, hingga mencapai 60.004 berkas pada tahun 2020. Pengelolaan arsip yang didampingi langsung oleh arsiparis cenderung meningkat jika dilihat dari persentase unit kearsipan yang menyerahkan arsip aktif, dari semula 32,5% pada tahun 2016 terus meningkat hingga 48% pada tahun 2019, sedangkan pada tahun 2020 indikator tersebut sudah tidak ada atau tidak dipakai serta tidak dihitung. Sedangkan dari segi jumlah SDM pengelola kearsipan selama kurun waktu 2016 hingga tahun 2018 terus mengalami peningkatan, hingga mencapai 965 orang pada tahun 2018.

Peningkatan kompetensi pengelola arsip tersebut terjadi Setelah diadakannya sosialisasi, pendampingan dan monitoring pengelolaan arsip. Namun pada kurun 2019 sampai dengan tahun 2020 mengalami penurunan, yaitu sebesar 200 orang pada tahun 2019 dan 131 orang di tahun 2020. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun perlu melanjutkan program sosialisasi, pendampingan dan monitoring pengelolaan arsip sehingga pengelola arsip yang mempunyai kompetensi bertambah dengan harapan jumlah arsip yang diselamatkan semakin meningkat setiap tahun.

2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan

2.3.2.1 Kelautan dan Perikanan

Kota Madiun tidak memiliki wilayah laut sehingga fokus kegiatan perikanan di Kota Madiun berbasis perikanan budidaya. Selain itu, dengan status sebagai wilayah perkotaan yang didominasi sektor perdagangan dan jasa, kegiatan perikanan di Kota Madiun dapat dikatakan belum berkembang dengan optimal. Indikator keberhasilan pelaksanaan bidang urusan kelautan dan perikanan dapat diukur melalui indikator (i) jumlah produksi perikanan; (ii) jumlah konsumsi ikan; (iii) produksi perikanan kelompok nelayan; dan (iv) cakupan bina kelompok nelayan. Data dan informasi tentang perkembangan kegiatan perikanan selama kurun tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, dapat dilihat sebagaimana tersaji pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.119
Data Perkembangan Perikanan di Kota Madiun, Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Produksi Perikanan (ton)	234,14	322,07	343,9	361,3	362,9
2.	Jumlah Konsumsi Ikan (kg/kapita/tahun)	14,7	14,81	15,1	15,4	15,5
3.	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan (kg)	-	-	-	-	-
4.	Cakupan Bina Kelompok Nelayan (%)	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun, 2021

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa dasar perhitungan dari indikator produksi perikanan adalah jumlah hasil perikanan budidaya dan tangkap. Pada tahun 2020 produksi ikan di Kota Madiun mencapai 362,9 ton. Jumlah konsumsi ikan juga mengalami kenaikan dari pada tahun sebelumnya menjadi 15,5 kg/kapita/tahun.

Hal ini mungkin dikarenakan program gemar makan ikan terus disosialisasikan baik dari tingkat nasional, provinsi maupun tingkat kota. Melihat proporsi produksi ikan di Kota Madiun yang didominasi oleh budidaya, alangkah baiknya, diperlukan perhatian untuk meningkatkan budidaya perikanan di Kota Madiun. Pada prinsipnya budidaya di dalam kota sangatlah sulit dikembangkan, sehingga pemanfaatan lahan pekarangan perlu dimaksimalkan sehingga ke depan budidaya perikanan dapat merupakan tambah penghasilan masyarakat di perkotaan dan *supply* perikanan melalui penyuluhan dalam pengelolaan budidaya perikanan di masyarakat perkotaan.

Jumlah produksi perikanan meningkat dari tahun 2016 ke tahun 2020 sebesar 128,76 ton. Peningkatan tersebut karena meningkatnya produksi ikan lele yaitu dari kegiatan budidaya, serta budidaya gurame yang peningkatannya. Produksi perikanan tahun 2020 adalah 362,9 ton yang didominasi oleh produksi ikan lele, gurame, dan nila.

Tabel 2.120
Jumlah Produksi Perikanan Budidaya dan Tangkap Kota Madiun
Tahun 2016-2020

No.	Jenis Ikan	Jumlah Produksi Perikanan (ton)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Nila	53,87	43,00	63,37	61,6	63,65
2.	Gurame	31,74	27,14	58,38	67,4	64,45
3.	Lele	97,55	194,57	163,35	175,4	176,7
4.	Tawes	12,50	24,00	15,70	17,8	15,3
5.	Baug	-	15,30	16,00	16,9	19,5
6.	Patin jambal	8,00	10,00	-	-	-
7.	Gabus	14,50	5,10	5,70	7,6	8,2
8.	Mujair	-	-	10,50	-	-
9.	Keting	-	-	7,90	10,7	10,2
10.	Ikan lainnya	17,00	2,96	3,00	3,9	4,9
Jumlah		234,14	322,07	343,90	361,3	362,9

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun, 2021

2.3.2.2 Pariwisata

Dalam rangka mengembangkan nilai-nilai sosial dalam kebijakan publik yang konstruktif dan dinamis sebagai dasar menuju harmonisasi pelaksanaan pembangunan pada penyelenggaran urusan pariwisata di Kota Madiun diarahkan untuk mencapai tujuan mengembangkan potensi dan ketahanan budaya dengan sasaran meningkatnya kontribusi sektor pariwisata di Kota Madiun dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan, dan Olah Raga Kota Madiun.

Pariwisata Kota Madiun selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami kemajuan seiring dengan dibangunnya berbagai sarana dan prasarana pariwisata, objek-objek wisata alam dan obyek-obyek wisata lainnya yang lebih bervariasi. Data dan informasi tentang perkembangan bidang urusan pariwisata selama kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, dapat dilihat sebagaimana tersaji pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.121
Data dan Informasi Urusan Pariwisata di Kota Madiun, Tahun 2016-2020

No	Uraian Data	Tahun					Rata-Rata
		2016	2017	2018	2019	2020	
1.	Jumlah Kunjungan Wisata	245.525	268.803	411.237	421,753	452,891	319.600
2.	Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB	5,66%	8,6%	8,6%	8,60%	8,60%	7,14
3.	Jumlah Penginapan/Hotel	35	38	-	39	37	31
4.	Jumlah Restoran, Café, dan Rumah Makan	99	-	-		93	46

Sumber: Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan, dan Olah Raga Kota Madiun, 2021

Berdasarkan tabel di atas, kunjungan wisata di Kota Madiun setiap tahun mengalami peningkatan hingga pada tahun 2020 mencapai 452.891 wisatawan. Selain itu jika dilihat dari angka kontribusi pariwisata terhadap PDRB berdasarkan Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Atas Dasar Harga Berlaku, selama kurun waktu 5 tahun terakhir cenderung meningkat, dari semula sebesar 5,66% menjadi 8,60% pada tahun 2020. Hal ini sering dengan sejumlah promosi yang telah dilakukan sejak tahun 2016 yaitu mengikuti pameran Majapahit Travel Fair (MTV), mengikuti pameran Jatim Fair dalam rangka Hari Jadi Provinsi Jawa Timur di Surabaya, mengikuti Pameran Gebyar Wisata Nusantara (GWN) di Jakarta, dan mengikuti pameran INAFEC di Lombok, mengadakan festival Pecel Pincuk, Pameran Hari Jadi Kota Madiun dan Pameran Madioen Tempo Doeloe Selain itu, agenda kegiatan pariwisata telah dibuat yakni penilaian Kakang Mbakyu Madiun, Lomba Gebyar Batik dan Fashion, dan pengembangan makanan khas dengan bukti peningkatan jumlah restoran, café dan rumah makan dimana menjadi 93 pada tahun 2020.

Untuk jumlah destinasi wisata dikota madiun saat ini masih dalam proses penetapan Surat Keputusan terhadap destinasi wisata di Kota Madiun yang layak untuk dikembangkan sebagai tempat kunjungan bagi warga pendatang yang sedang berkunjung ke Kota Madiun, beberapa Destinasi Wisata Kota Madiun Tahun 2020 diantaranya adalah THR Retno Dumilah Park, Masjid dan Makam Kuncen, Makam Taman, Taman Wisata Trembesi, Taman Bantaran Kali Madiun, Perum Perhutani, Pahlawan Street Center dan Pedestrian Balaikota Madiun, Padepokan SH Terate, Stadion Wilis/ Gor Wilis, PT. INKA Madiun, Bluder Cokro, Lapangan Gulun Madiun, Suncity Water Park, Theme Park, Masjid Kuno Taman dan Alun-Alun Madiun dengan total kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Nusantara sebanyak 311.575 orang. Sedangkan untuk kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD pada saat ini masih di topang dari pendapatan pajak hotel, penginapan, restoran dan sejenisnya. Yang pada tahun 2021 ditargetkan sebesar Rp.14.340.000.000,-

2.3.2.3 Pertanian

Pertanian merupakan salah satu sektor penting karena memiliki hubungan langsung dengan kebutuhan pokok atau primer bagi kehidupan manusia di dunia, termasuk masyarakat Kota Madiun. Dalam arti luas sektor pertanian tidak hanya mencakup kegiatan dalam hal tanaman pangan seperti jagung dan padi, tetapi juga hortikultura (sayur dan buah), perkebunan, dan peternakan. Penyelenggaran urusan pertanian di Kota Madiun berorientasi untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian, dengan sasaran meningkatnya ketersediaan pangan daerah serta fasilitasi pelayanan di bidang pertanian dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun.

Perkembangan sektor pertanian tidak bisa dipisahkan dengan aspek luas lahan karena suatu kegiatan pertanian pastilah membutuhkan sejumlah lahan untuk memproduksi hasil pertanian dari kegiatan tersebut. Luas lahan sawah di Kota Madiun dibagi menjadi dua kelompok, yaitu sawah irigasi dan non irigasi (tadah hujan). Secara keseluruhan, luas lahan sawah di Kota Madiun pada tahun 2020 mencapai 892,00 Ha dan semuanya merupakan sawah irigasi. Lahan sawah adalah lahan pertanian yang berpetak-petak dan dibatasi oleh pematang (galengan), sauran untuk menahan/ menyalurkan air yang biasanya ditanami padi sawah tanpa memandang dari mana diperoleh atau status lahan tersebut. Lahan sawah dalam hal ini yaitu lahan bengkok, lahan serobotan, lahan rawa yang ditanami padi dan lahan bekas tanaman tahunan yang telah dijadikan sawah, baik yang ditanami padi, palawija atau tanaman semusim lainnya.

Tabel 2.122

Luas Lahan Sawah Menurut Kecamatan dan Jenis Pengairan di Kota Madiun (Ha), 2020

No.	Kecamatan	Jenis Pengairan		Jumlah
		Irigasi	Non Irigasi	
1.	Manguharjo	292	0	292
2.	Taman	218	0	218
3.	Kartoharjo	382	0	382
Jumlah		892	0	892

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun, 2021

Selain lahan sawah, Kota Madiun juga memiliki lahan tegal/kebun. Tegal/kebun adalah lahan pertanian bukan sawah (lahan kering) yang ditanami tanaman semusim atau tahunan dan terpisah dengan halaman sekitar rumah serta penggunaannya tidak berpindah-pindah.

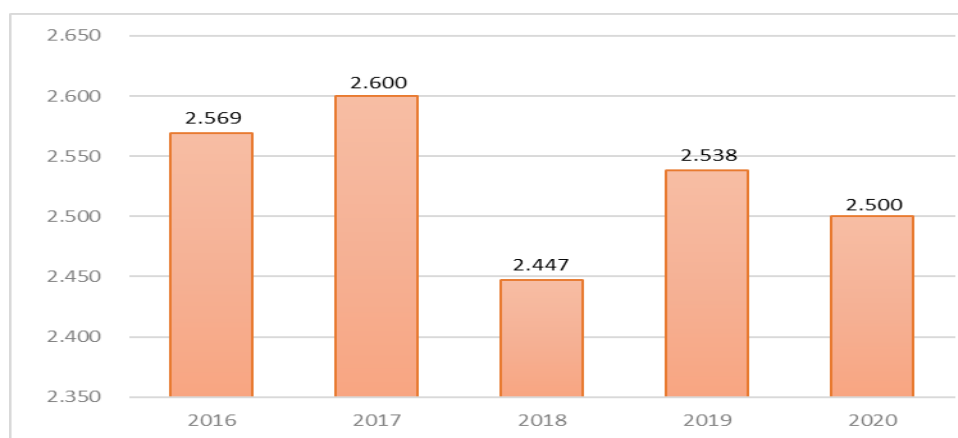
Berdasarkan data, luas lahan tegal/kebun tahun 2020 yang ada di Kota Madiun yakni seluas 144 Ha, namun tidak semuanya diusahakan. Tiga kecamatan dengan luas lahan tegal/kebun terbesar berturut-turut adalah Kecamatan Taman dengan luas 60 Ha dengan ditanami tanaman perdu tidak seperti yang terdapat pada klasifikasi tabel, lalu Kecamatan Manguharjo seluas 44 Ha, dan Kecamatan Kartoharjo yang memiliki luas lahan tegal/kebun seluas 40 Ha. Adapun tanaman yang ditanam di lahan tegal/kebun antara lain: kedelai, kacang hijau, kacang tanah, dan kangkung.

Tabel 2.123

Luas Lahan Tegal/Kebun dan Pemanfaatan Lahannya di Kota Madiun (Ha), 2020

No	Kecamatan	Jenis Tanaman Pangan						Lahan Tegal/Kebun
		Kedelai	Kacang Tanah	Kacang Hijau	Jagung	Ubi Kayu	Ubi Jalar	
1.	Manguharjo	59	-	19	-	-	-	44
2.	Taman	-	-	-	-	-	-	60
3.	Kartoharjo	25	-	10	-	-	-	40
Jumlah		84	-	29	-	-	-	144

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun, 2021

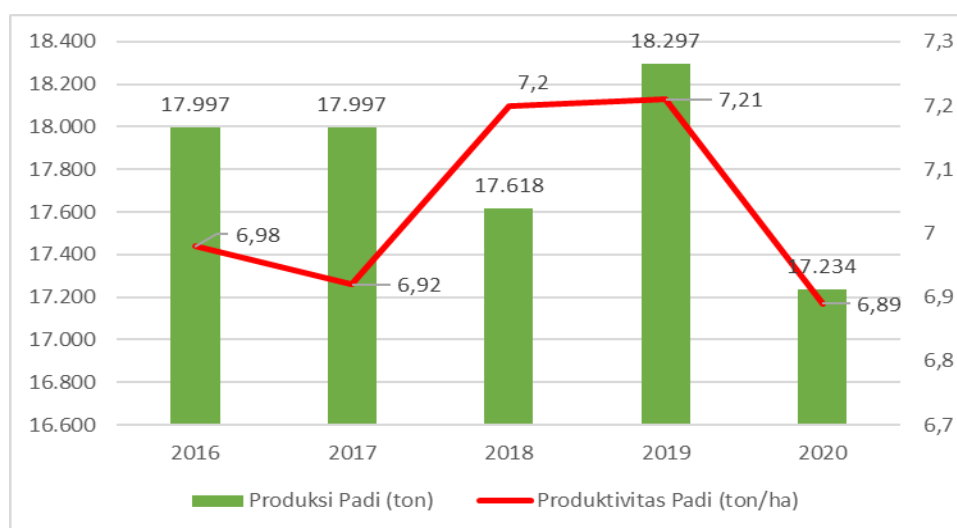


Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun, 2021

Gambar 2.57

Perkembangan Luas Panen Padi Sawah di Kota Madiun (Ha), Tahun 2016-2020

Menurut jenis tanaman pangan yang dihasilkan, tanaman pangan yang dibudidayakan penduduk diantaranya adalah padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar. Padi merupakan salah satu bahan makanan terpenting yang dihasilkan oleh masyarakat di Kota Madiun. Luas panen padi sawah di Kota Madiun cenderung fluktuatif selama tahun 2016 hingga 2020. Pada tahun 2016 luas panen padi sawah 2.569 Ha dan naik menjadi 2.600 pada tahun 2017. Akan tetapi, terjadi penurunan pada tahun 2018 menjadi 2.447 Ha, atau turun sebesar 122 Ha dari tahun sebelumnya. pada tahun 2019 kembali meningkat sebesar 2.538 Ha dan menurun kembali pada tahun 2020 menjadi sebesar 2.500 Ha.

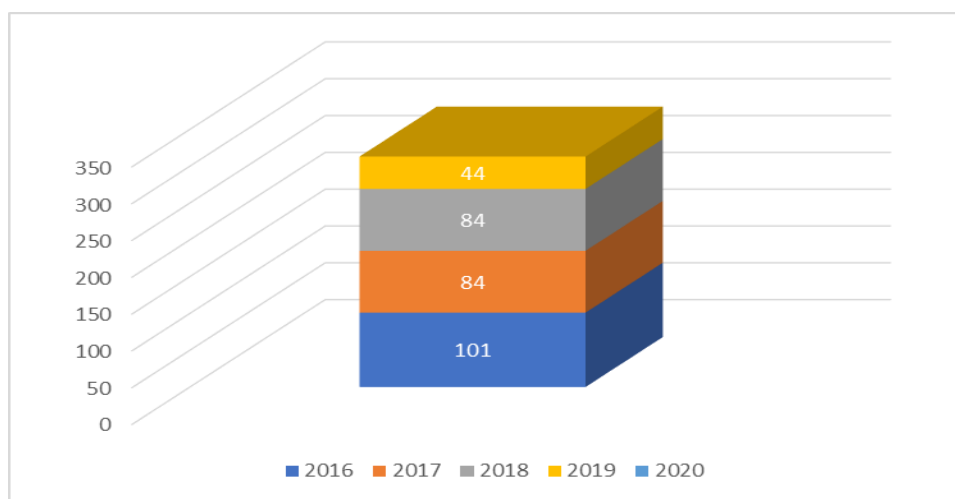


Sumber: Ketahanan Pangan dan pertanian Kota Madiun, 2021(diolah)

Gambar 2.58

Perkembangan Produksi dan Produktivitas Padi Sawah di Kota Madiun, Tahun 2016-2020

Sejalan dengan luas panen, produksi lahan padi sawah periode 2016 hingga 2020 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2016 produksi padi yakni 17.997 ton, dengan produktivitas sebesar 6,98 ton/Ha. Sedikit peningkatan terjadi pada tahun 2017 yakni sebesar 65 ton atau total produksi sebesar 17.997 ton, namun produktivitasnya justru turun dari tahun sebelumnya yakni menjadi 6,92. Sedangkan pada tahun 2018 produksi padi turun menjadi 17.618 ton, tetapi dengan kenaikan produktivitas mencapai 0,28 ton/Ha, yakni menjadi 7,20 ton/Ha. Pada tahun 2019 produksi padi meningkat mencapai 18.297 ton, namun kenaikan produktivitasnya hanya sebesar 0,01 atau sebesar 7,21 ton/Ha. Tahun 2020 produksi padi menurun sekitar 1062 ton atau sebesar 17.234 ton dan produktivitasnya menurun sebesar 6,89 ton/Ha.



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun, 2021 (diolah)

Gambar 2.59

Perkembangan Luas Panen Kedelai (Ha) di Kota Madiun, Tahun 2016-2020

Adapun jenis tanaman bahan makanan potensial lainnya adalah kedelai.

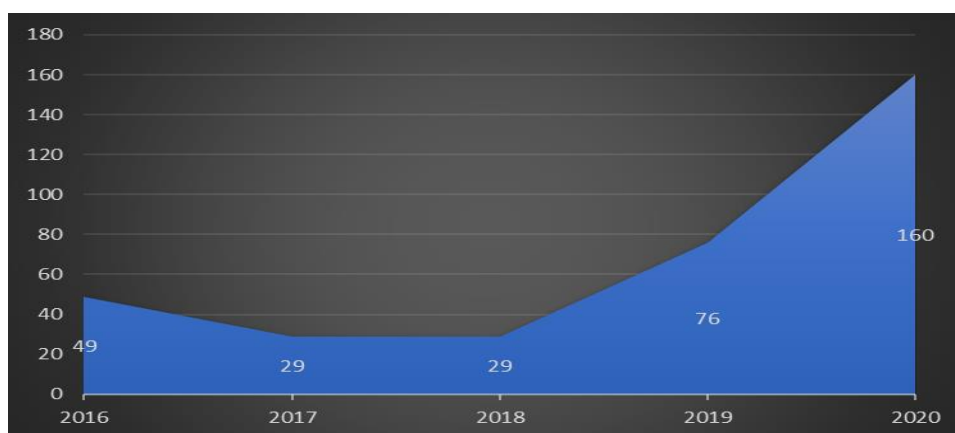
Selama kurun waktu 5 tahun terakhir luas panen kedelai cenderung berfluktuatif. Pada tahun 2016 yaitu seluas 110 Ha, dan pada tahun 2017 serta tahun 2018 berkurang menjadi 84 Ha. Hingga tahun 2019, luas panen kedelai terus mengalami penurunan hingga menjadi seluas 44 Ha dan untuk tahun 2020 tidak ada perkembangan luas panen kedelai. Jika dilihat dari produksi kedelai dalam kurun waktu 2016-2020, terdapat penurunan produksi kedelai dari sebesar 131 ton pada tahun 2016 menjadi sebesar 67 ton pada tahun 2019. Sedangkan tahun 2020, tidak ada produksi kedelai.

Tabel 2.124

Perkembangan Produksi dan Produktivitas Kedelai, Tahun 2016-2020

Tahun	Kedelai	
	Produksi (ton)	Produktivitas (ton/Ha)
2016	131	1,30
2017	101	1,30
2018	101	1,30
2019	67	1,5
2020	0	0

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun, 2021



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun, 2021 (diolah)

Gambar 2.60

Perkembangan Luas Panen Kacang Hijau di Kota Madiun (ha), Tahun 2016-2020

Selain kedelai, bahan makanan potensial lainnya di Kota Madiun adalah kacang hijau. Walaupun selama periode 2016-2020, luas panen kacang hijau memiliki tren yang cenderung fluktuatif. Luas panen kedelai pada tahun 2016 seluas 49 Ha. Akan tetapi, turun cukup signifikan pada tahun 2017 dan 2018 menjadi 29 Ha. Terjadi kenaikan luas panen kacang hijau berturut-turut pada tahun 2019 dan tahun 2020 yakni masing masing luas 76 Ha dan 160 Ha. Pada tahun 2016 produksi kacang hijau hanya sebesar 2 ton, dan produktivitas sebesar 0,714 ton/ Ha. Akan tetapi pada tahun 2017 meningkat yakni dengan produksi kacang hijau sebanyak 29 ton, dengan produktivitas mencapai 1,06 ton/ Ha.

Terjadi kenaikan produksi yang signifikan pada tahun 2019 yakni sebesar 96,2 ton dengan produktivitas sebesar 1,27 ton/ Ha. Pada tahun 2020 produksi kacang hijau terus meningkat sebesar 117 ton akan tetapi mengalami penurunan dalam produktivitasnya yakni sebesar 0,73 ton/ Ha, sehingga akibat penurunan lahan persawahan di kota madiun maka perlu untuk meningkatkan intensifikasi pemanfaatan lahan yang ada.

Tabel 2.125
Perkembangan Produksi dan Produktivitas Kacang Hijau, 2016-2020

Tahun	Kacang Hijau	
	Produksi (ton)	Produktivitas (ton/Ha)
2016	2	0,71
2017	29	1,06
2018	29	1,06
2019	96,2	1,27
2020	117	0,73

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun, 2021

Selain tanaman pangan, usaha pertanian di Kota Madiun juga mencakup hortikultura. Usaha hortikultura yang dikembangkan di Kota Madiun adalah buah-buahan. Tidak ditemukan data perkembangan mengenai jenis tanaman hortikultura lain seperti sayur-sayuran. Untuk produksi buah di Kota Madiun didominasi oleh empat jenis buah unggulan, yaitu mangga, pisang, pepaya dan jeruk. Selama periode tahun 2016-2020 terdapat data pencatatan produksi keempat macam buah tersebut di Kota Madiun.

Tabel 2.126
Perkembangan Produksi Buah di Kota Madiun, Tahun 2016-2020

Tahun	Produksi Buah (ton)			
	Mangga	Pisang	Pepaya	Jeruk
2016	74,00	7,00	35,00	14,00
2017	261,00	50,20	36,40	-
2018	261,00	50,20	36,40	-
2019	176	48,75	57,5	4,68
2020	176	48,75	57,5	4,68

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun, 2021

Hingga tahun 2015 jenis tanaman perkebunan yang potensial menjadi tanaman andalan adalah tanaman tebu, namun pada tahun 2016 dan 2017 mulai tergantikan dengan tanaman kelapa dengan luas areal 54 Ha. Walaupun demikian, luas areal yang ditanami oleh tanaman tebu termasuk luas area yang paling luas, meski mengalami penurunan setiap tahunnya selama periode 2013-2020. Luas areal perkebunan tebu pada tahun 2013 adalah seluas 175 Ha dengan produksi sebesar 10.994,10 ton. Namun terus mengalami penurunan hingga tersisa 114 Ha pada tahun 2020, produksi tebu yang diproduksi juga mengalami penurunan menjadi hanya sebanyak 706 ton pada tahun 2020.

Tabel 2.127
Perkembangan Produksi Tebu di Kota Madiun, Tahun 2016-2020

Tahun	Tebu		
	Luas Panen (Ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (ton/Ha)
2016	115,00	715,00	6,00
2017	126,00	715,00	7,00
2018	114,00	715,00	7,00
2019	114,00	704,00	6,18
2020	114,00	706,00	6,19

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun, 2021

Tabel di atas menunjukkan bahwa produksi dan produktivitas tebu pada tahun 2016 sebedar 715,00 ton dengan produktivitas menjadi 6,00 ton/ Ha. Pada tahun 2017 dan 2018 jumlah produksi tebu menunjukkan nilai yang sama yakni 715 ton dengan produktivitas menjadi 7 ton/ Ha. Terjadi produksi tebu pada tahun 2019 dan tahun 2020 masing-masing sebesar 704,00 ton dan 706 ton, angka produktivitas juga mengalami penurunan sebesar 6,18 pada tahun 2019 dan 6,19 pada tahun 2020.

Tabel 2.128
Perkembangan Populasi Ternak di Kota Madiun, Tahun 2016-2020

Tahun	Perkembangan Ternak (ekor)					
	Kambing	Domba	Sapi Perah	Sapi Potong	Kerbau	Kuda
2016	2.900	977	21	306	8	7
2017	2.901	992	21	341	8	4
2018	1.765	992	21	413	8	4
2019	2804	962	18	239	2	0
2020	2904	962	10	239	0	0

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun, 2021

Sebagaimana tabel di atas, Kota Madiun juga mempunyai peternakan yang mempunyai populasi yang relatif stabil, aman untuk ketahanan pangan. Jenis ternak yang dibudidayakan penduduk di Kota Madiun yaitu kambing, domba, sapi potong, sapi perah, kerbau dan kuda. Pada tahun 2016, populasi kambing sebanyak 2.900 ekor, menempati urutan pertama jumlah populasi hewan ternak di Kota Madiun, menunjukkan pergerakan yang positif meningkat menjadi sebanyak 2.904 ekor di tahun 2020.

Posisi kedua adalah domba, dimana tahun 2016 sebanyak 977 ekor menurun menjadi 962 ekor di tahun 2020. Posisi ketiga adalah sapi potong dengan jumlah populasi sebanyak 306 ekor di tahun 2016, menunjukkan pergerakan menurun pada tahun 2020 menjadi sebanyak 239 ekor. Begitu juga dengan posisi nomor empat yaitu sapi perah juga mengalami pergerakan negatif dengan populasi sebanyak 21 ekor tahun 2016 tersisa 10 ekor di tahun 2020. Posisi kelima yaitu kerbau dengan pergerakan menurun hingga tahun 2016 dengan jumlah populasi sebanyak 8 ekor, namun pada tahun 2020 tidak tersisa. Posisi terakhir adalah kuda, mengalami pergerakan positif sebanyak 7 ekor di tahun 2016, tersisa 0 ekor pada tahun 2020.

Tabel 2.129
Perkembangan Populasi Ternak Unggas di Kota Madiun, Tahun 2016-2020

Tahun	Perkembangan Ternak (ekor)			
	Ayam kampung	Itik	Ayam pedaging	Ayam Petelur
2016	68.100	6.244	4.000	2.100
2017	64.076	6.221	4.000	2.100
2018	61.514	6.098	6.750	3.000
2019	58,445	5,107	6,750	900
2020	58,445	5,107	6,750	800

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun, 2021

Sebagaimana tabel di atas, Jenis ternak unggas utama yang dikembangkan oleh masyarakat di Kota Madiun meliputi ayam kampung, ayam petelur, ayam pedaging dan itik. Pada tahun 2016, populasi ayam kampung menempati urutan pertama dengan jumlah sebanyak 68.100 ekor, namun pada tahun 2019 dan 2020 menunjukkan penurunan menjadi sebesar 58.445 ekor.

Posisi kedua yaitu itik dengan jumlah populasi sebanyak 6.244 ekor di tahun 2016, dimana populasi itik ini mengalami penurunan populasi menjadi sebanyak 5.107 ekor pada tahun 2020. Posisi ketiga adalah ayam pedaging dengan jumlah populasi sebanyak 4.000 ekor di tahun 2016, pada tahun 2017 dan 2018 meningkat sehingga jumlah populasi ayam pedaging menjadi sebanyak 6750 ekor pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020.

Ayam petelur menempati posisi paling bawah jumlah populasi hewan ternak dengan jumlah populasi sebanyak 2.100 ekor di tahun 2016, yang mana mengalami penurunan hingga mencapai jumlah populasi sebanyak 800 ekor di tahun 2020.

Tabel 2.130
Perkembangan Jumlah Hewan Ternak Dipotong di Kota Madiun, 2016-2020

Tahun	Perkembangan Ternak (ekor)			
	Kambing	Sapi Potong	Domba	Babi
2016	2.229	517	590	284
2017	2.095	542	524	524
2018	1.785	1.004	414	524
2019	1831	689	486	480
2020	906	278	600	549

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun, 2021

Tidak semua hewan ternak yang ada di Kota Madiun dipotong untuk dikonsumsi dagingnya, hanya ada empat hewan ternak yang sering dipotong yaitu kambing, sapi, domba dan babi. Kambing dengan jumlah 2.229 ekor di tahun 2016 menjadi hewan ternak yang sering dipotong. Jumlahnya berfluktuatif setiap tahun, namun berdasarkan data pada tahun 2020 menunjukkan sebanyak 906 ekor kambing dipotong. Begitu juga dengan sapi yakni berjumlah sebanyak 517 ekor di tahun 2016 cenderung berfluktuatif, hingga pada tahun 2020 sebanyak 278 ekor sapi dipotong.

Domba yang dipotong pada tahun 2016 berjumlah 590 ekor, sama halnya dengan kambing dan sapi yang menunjukkan angka yang berfluktuatif di setiap tahunnya, hingga pada tahun 2020 mencapai 600 ekor domba dipotong.

Tabel 2.131
Data Kelompok Tani di Kota Madiun Tahun 2020

Kecamatan	Jumlah Anggota (orang)	Jumlah Kelompok Tani (poktan)	Jumlah Gabungan Kelompok tani (gapoktan)	Cakupan Binaan Kelompok tani (poktan)	persentase Cakupan Binaan Kelompok (%)
Kartoharjo	735	19	6	19	100
Manguharjo	458	12	5	12	100
Taman	270	8	4	8	100
Jumlah	1.576	39	15	39	100

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun, 2021

Semua kelompok tani tanaman pangan di Kota Madiun yang berjumlah 39 kelompok berada dalam cakupan binaan melalui kegiatan penyuluhan, pendampingan, pelatihan pada bidang tanaman pangan dan perkebunan, dengan demikian cakupan bina kelompok petani adalah 100%. Bila dibandingkan dengan tahun 2016, cakupan bina kelompok tani tahun 2020 tetap stabil, artinya semua kelompok tani yang ditargetkan untuk dibina dapat tercapai. Capaian ini berkat dukungan kegiatan-kegiatan penyuluhan dari dinas, serta pendampingan dan anjungsana oleh petugas lapang/ penyuluh/ tenaga harian lepas penyuluh pertanian, seperti penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) pupuk bersubsidi, pemberian materi/ pelatihan budidaya tanaman, pemantauan hama penyakit tanaman, dan lain sebagainya.

Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB terus mengalami penurunan mengingat laju pertumbuhan dan kontribusi sektor lain seperti industri pengolahan, perdagangan, dan jasa yang lebih tinggi. Dalam kurun waktu 2016-2019, kontribusi sektor pertanian terus mengalami penurunan setiap tahun menjadi hanya sebesar 0,88% pada tahun 2020. Penurunan kontribusi dan pertumbuhan sektor pertanian juga disebabkan menurunnya jumlah lahan produktif yang mengakibatkan turunya produksi pertanian. Hal tersebut berimbas pada turunya PDRB sektor pertanian dan rendahnya pertumbuhan sektor pertanian khususnya sub sektor tanaman hortikultura dan perkebunan di Kota Madiun. Dari sisi pertumbuhan, sektor pertanian merupakan sektor yang tumbuh paling kecil diantara 16 sektor lainnya dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,77%.

Bahkan pada tahun 2017, sektor pertanian mengalami kontraksi sebesar 1,78%. Pada tahun 2018, sektor pertanian mengalami pertumbuhan tertinggi dalam kurun waktu 2016-2020 yaitu sebesar 1,78%.

Tabel 2.132

Perkembangan Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Pertanian di Kota Madiun, Tahun 2016-2020

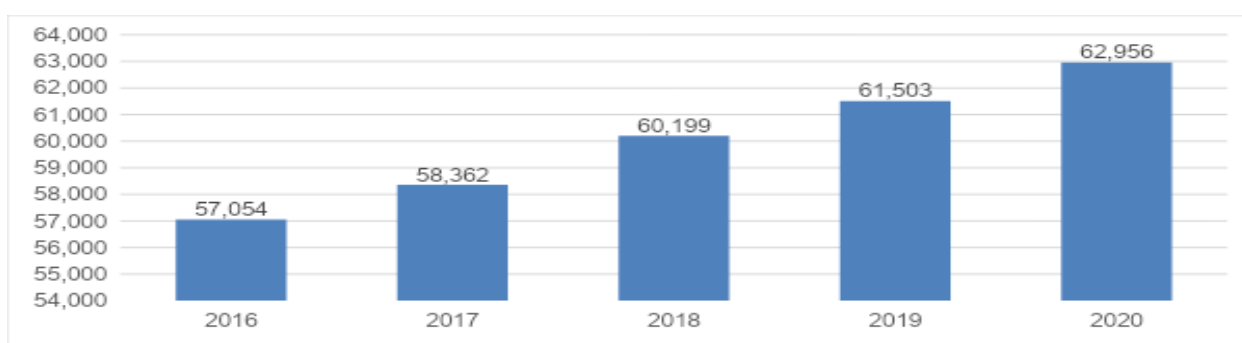
No	Uraian Data	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Kontribusi (%)	0,91	0,83	0,80	0,76	0,88
2.	Pertumbuhan (%)	1,31	(1,78)	1,78	-0,04	0,12

Sumber: BPS Kota Madiun, 2021

2.3.2.4 Energi dan Sumber Daya Mineral

Energi dan sumber daya mineral merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui (unrenewable resources). Sumber daya alam jenis ini mempunyai waktu pemulihan yang sangat lama, sehingga pemanfaatannya harus digunakan secara efektif dan efisien. Pemanfaatan energi dan sumber daya mineral sangat erat hubungannya dengan kehidupan manusia contohnya listrik yang berasal dari sumber daya energi.

Sumber daya energi yang tidak bisa diperbaharui berasal dari minyak dan gas bumi (migas). Kebutuhan energi yang semakin meningkat dan menipisnya cadangan migas sebaiknya disertai dengan pengembangan sumber energi yang memanfaatkan sumber daya energi lain misalnya yang berasal dari gelombang laut, angin, air, dan matahari. Penyelenggaraan urusan energi dan sumber daya mineral di Kota Madiun berorientasi untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berdaya saing, berbasis potensi lokal dan pemberdayaan masyarakat, dengan tujuan meningkatkan potensi ekonomi lokal yang mendukung potensi perdagangan dengan sasaran yang akan dicapai adalah meningkatnya kontribusi sektor listrik, gas dan air bersih terhadap PDRB.



Sumber: BPS Kota Madiun, 2021

Gambar 2.61

Jumlah Pelanggan Listrik di Kota Madiun, Tahun 2016-2020

Berdasarkan data di atas, bahwa jumlah pelanggan listrik yang tercatat di wilayah Kota Madiun selalu naik setiap tahunnya. Di tahun 2016 pelanggan listrik Kota Madiun sebanyak 57.054 dan pada tahun 2018 meningkat kembali menjadi sebanyak 60.199 pelanggan. Peningkatan terus terjadi hingga tahun 2020 dengan jumlah pelanggan sebanyak 62.956 pelanggan. Kenaikan jumlah pelanggan seiring dengan kenaikan daya terpasang, yakni sebesar 149.783.215 KW tahun 2016 menjadi sebesar 194.076.915 KW tahun 2020.

Selain itu, dalam rangka melindungi konsumen dan pelaku usaha, maka Dinas Perdagangan Kota Madiun mengadakan peningkatan SDM serta setiap tahun mengadakan tera ulang secara periodik 1 tahun 3 kali kegiatan, sehingga baik program dan kegiatan berjalan sesuai yang diharapkan. Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku pada kurun waktu 2016-2020 mengalami pertumbuhan yang stagnan sebesar 0,02%.

Tabel 2.133

Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral di Kota Madiun, Tahun 2016-2020

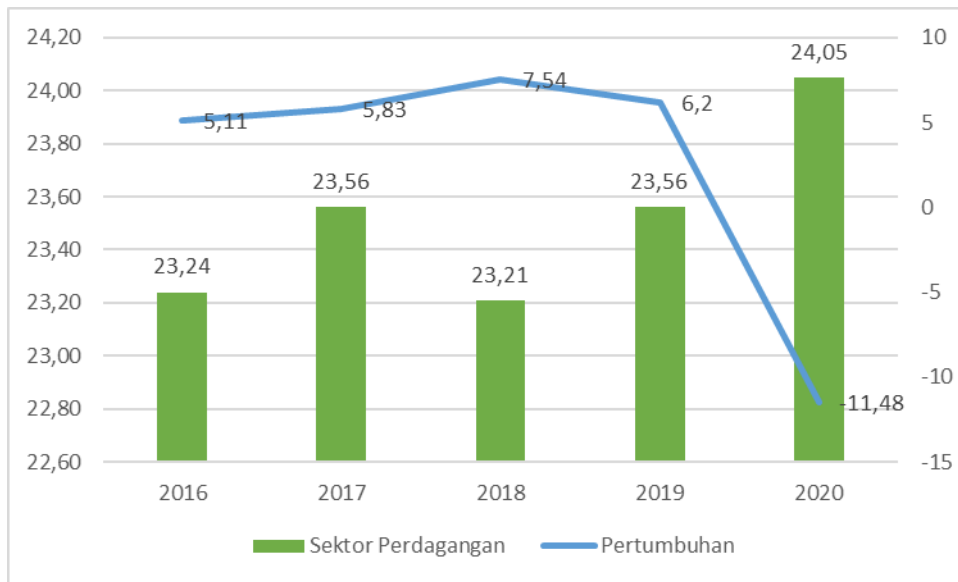
No.	Indikator Kinerja	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Produksi Listrik (KWh)	273.333.561	270.490.128	282.081.429	298.351.203	298.881.699
2.	Daya Terpasang (KW)	149.783.215	160.539.815	170.732.715	180.913.315	194.076.915
3.	Jumlah Pelanggan (Rumah Tangga)	57.054	58.362	60.199	61.503	62.956
4.	Intensitas tera timbangan (Kali)	3	3	3		
5.	Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PDRB (%)	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Sumber: BPS Kota Madiun, 2021

2.3.2.5 Perdagangan

Orientasi pembangunan pada penyelenggaraan urusan perdagangan di Kota Madiun adalah untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berdaya saing, berbasis potensi lokal dan pemberdayaan masyarakat, yang diarahkan untuk mencapai tujuan meningkatkan kapasitas pasar dan perdagangan dengan sasaran meningkatnya kontribusi sektor perdagangan dan meningkatnya fasilitas pendukung kegiatan sektor informal. Penyelenggara urusan perdagangan di Kota Madiun adalah Dinas Perdagangan Kota Madiun.

Sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi dan sepeda motor menyumbang porsi paling besar dibanding sektor lain terhadap perekonomian Kota Madiun menurut lapangan usaha. Data yang diperoleh dari BPS, untuk kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 terus mengalami fluktuatif, dimulai tahun 2016 sebesar 23,24% dan mengalami titik terendah di angka 23,21% pada tahun 2018. Dan mengalami peningkatan kembali menjadi 24,05% pada tahun 2020. Sama halnya dari sisi pertumbuhan juga mengalami fluktuatif mulai dari tahun 2016 sampai tahun 2020 menjadi sebesar 7,54% dan mengalami kontraksi lebih menjadi -11,48% pada tahun 2020.



Sumber: BPS Kota Madiun, 2021

Gambar 2.62

Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran ; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor di Kota Madiun, Tahun 2016-2020

Dilihat dari sarana perdagangannya, jumlah toko pada periode 2016-2020 tidak menunjukkan adanya perubahan yang signifikan. Jumlah pasar umum di Kota Madiun tahun 2020 ada 9 unit, pasar khusus 2 unit dan pasar desa mengalami kenaikan dari mulai 5 unit di tahun 2016 menjadi 6 unit di tahun 2020.

Tabel 2.134

Sarana Perdagangan dan Jumlah Pedagang di Kota Madiun, 2016-2020

No.	Sarana Perdagangan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Pasar Umum	11	11	11	9	9
2.	Pasar Khusus	3	3	3	3	2
3.	Pasar Desa	5	5	5	6	6
4.	Pedagang Tetap	3.315	3.478	3.478	3.485	3.555

Sumber: BPS Kota Madiun, 2021

Lebih lanjut lagi, merujuk data dari BPS Kota Madiun jumlah perusahaan menurut badan hukum juga menunjukkan adanya peningkatan pada tahun 2020, yakni dari semula 275 perusahaan pada tahun 2016 perusahaan menjadi 600 perusahaan pada tahun 2020. Dengan rincian 196 PT, 257 CV/Firma, 7 Koperasi, 61 perusahaan perorangan dan 79 perusahaan lainnya pada tahun 2020. Perubahan paling signifikan ada di CV/Firma, Perseroan Terbatas (PT) dan Perorangan.

Tabel 2.135

Jumlah Perusahaan Menurut Badan Hukum di Kota Madiun, Tahun 2016-2020

No.	Tipe Badan Hukum	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Perseroan Terbatas (PT)	44	38	38	82	196
2.	CV/Firma	71	56	56	195	257
3.	Koperasi	3	3	3	8	7
4.	Perorangan	153	112	112	291	61
5.	Lainnya	4	0	0	33	79
Jumlah		275	209	209	609	600

Sumber: BPS Kota Madiun, 2021

Berdasarkan data, Jumlah kelompok perdagangan/usaha informal terus meningkat hingga menjadi 35 kelompok tahun 2020, yang pada awalnya 31 kelompok tahun 2016. Sejalan dengan cakupan bina kelompok yang meningkat dari 72,5% pada tahun 2016 menjadi 100% pada tahun 2020.

Tabel 2.136

Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Perdagangan di Kota Madiun, Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Ekspor Bersih Perdagangan (ribu rupiah)	-	-	-	-	-
2.	Jumlah Kelompok Perdagangan/ Usaha Informal (kelompok)	31	25	35	35	35
3.	Cakupan Bina Kelompok Perdagangan/ Usaha Informal (%)	72,5	76	100	100	100

Sumber: Dinas Perdagangan Kota Madiun, 2021

Upaya yang telah dilakukan yaitu dengan adanya pembinaan secara bersama melalui kegiatan pembinaan PKL yang diselenggarakan Dinas Perdagangan dan pada tahun 2018 telah diselenggarakan lomba PKL, dengan tujuan untuk mengasah keterampilan PKL terhadap kebersihan, inovasi, dan pelayanan dagangannya. Dengan sendirinya PKL akan berlomba untuk meningkatkan kualitas dagangannya sesuai petunjuk atau persyaratan yang dilombakan.

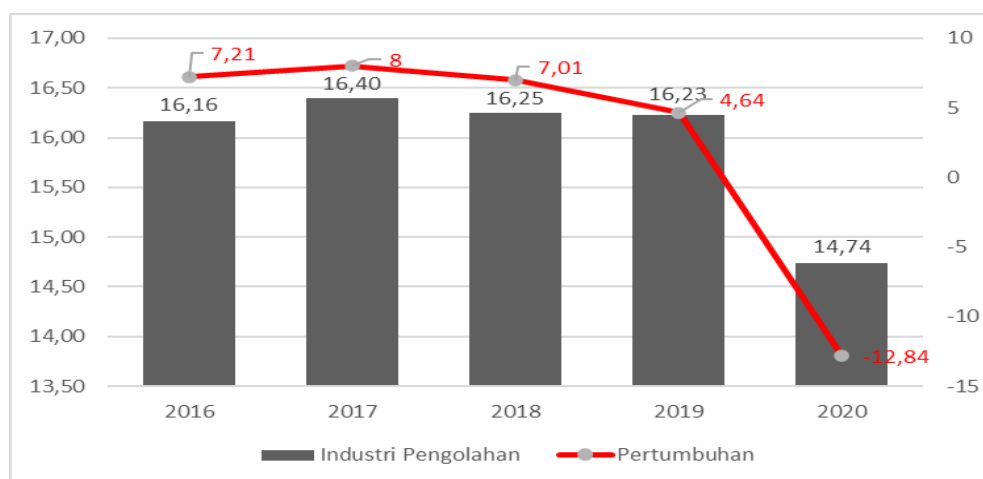
Pembinaan pedagang pasar tradisional perlu dilaksanakan dalam bentuk penguatan daya saing terhadap semakin meningkatnya system pelayanan pada pasar-pasar modern. Pemahaman terhadap metode pemasaran atau ilmu tentang dasar-dasar promosi untuk peningkatan jumlah omset dan pengunjung pasar menjadi salah satu faktor meningkatkan daya jual yang ada pada pasar tradisional.

Sebagai upaya peningkatan daya jual pasar tradisional, Pemerintah telah melaksanakan beberapa kegiatan yang berhubungan dengan promosi dan peningkatan daya jual berupa kegiatan Gerakan kembali Ke Pasar yang dilaksanakan dengan bekerja sama sekolah-sekolah yang ada di Kota Madiun. Serta Kegiatan Gebyar Undian dan Pemberian Cenderamata Kepada Wajib Retribusi/Sewa Pasar Tradisional yang dilakukan pada beberapa lokasi pasar tradisional yang ada di Kota Madiun dengan tujuan agar pasar tradisional lebih meningkatkan daya jualnya.

2.3.2.6 Perindustrian

Industri pengolahan merupakan sektor penyumbang PDRB Kota Madiun nomor dua terhadap perekonomian Kota Madiun setelah sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor. Rata-rata kontribusi sektor industri pengolahan terhadap perekonomian Kota Madiun adalah sebesar 15,96%.

Industri pengolahan merupakan salah satu sektor yang memiliki kontribusi terbesar. Pada tahun 2016 proporsi sektor ini sebesar 16,16% meningkat sedikit pada tahun 2017 menjadi sebesar 16,40%. Pada tahun 2020, kontribusi sektor ini mengalami penurunan hingga 14,74% dengan tingkat pertumbuhan yang terkontraksi sebesar -12,84%.



Sumber: BPS Kota Madiun, 2021

Gambar 2.63

Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan di Kota Madiun, 2016-2020

Jika dilihat dari jumlah industri yang tercatat dan tenaga kerjanya menurut kecamatan di Kota Madiun tahun 2020, kecamatan yang memiliki jumlah industri terbanyak adalah Kecamatan Taman yaitu 9 industri dengan menyerap tenaga kerja sebesar 325 orang. Namun kecamatan Manguharjo dengan industri sebanyak 5 unit namun dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 1874 tenaga kerja yang juga merupakan terbanyak dibanding kecamatan lain.

Tabel 2.137

Jumlah Industri yang Tercatat dan Tenaga Kerjanya Menurut Kecamatan di Kota Madiun, Tahun 2018 – 2020

No.	Kecamatan	Industri Besar Sedang			Tenaga Kerja		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	Manguharjo	5	5	5	2908	1874	1874
2	Taman	10	10	9	286	345	325
3	Kartoharjo	9	7	7	308	294	294
Jumlah		24	22	21	3502	2513	2493

Sumber: BPS Kota Madiun, 2021

Dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi yang berdaya saing, berbasis potensi lokal dan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan perindustrian di Kota Madiun diarahkan untuk mencapai tujuan meningkatkan potensi ekonomi lokal yang mendukung potensi perdagangan dengan sasaran meningkatnya kontribusi sektor industri terhadap PDRB yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Madiun.

Indikator keberhasilan pelaksanaan bidang urusan perindustrian, dapat diukur melalui beberapa indikator, (i) cakupan bina kelompok pengrajin, dan (ii) jumlah IKM dan IRT. Data dan informasi tentang perkembangan bidang urusan perindustrian selama kurun tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, dapat dilihat sebagaimana tersaji pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.138

Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Perindustrian di Kota Madiun, Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Cakupan bina kelompok pengrajin	7	12	17	17	17
2.	Jumlah IKM dan IRT	281	338	363	363	363

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, KUKM Kota Madiun, 2021.

Berdasarkan tabel di atas, cakupan bina kelompok pengrajin tahun 2016 sejumlah 7 kelompok dengan jumlah IKM dan IRT 281, hingga tahun 2020 perkembangan cakupan bina kelompok pengrajin menjadi 17 kelompok dengan jumlah IKM dan IRT 363.

Bertambahnya kelompok pengrajin ini dikarenakan banyak bermunculan pengrajin–pengrajin baru dengan jenis bahan dan hasil kerajinan atau barang yang sama. Jenis kelompok pengrajin di tahun 2020 antara lain: kelompok IKM pengrajin kayu, tahu, pengolahan makanan, sambal pecel, tempe kripi, batik tulis, batik warna alami, rajut, smock, mebelair/furniture, bordir lukis, souvenir, krupuk lembeng, tempe sayur, kain lukis, jamu, dan anyaman plastik.

2.3.2.7 Transmigrasi

Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka pemerataan penduduk yaitu dengan perpindahan penduduk dari kawasan padat penduduk ke kawasan yang jarang penduduknya melalui program transmigrasi. Transmigrasi yang pembiayaannya ditanggung oleh Dinas Tenaga Kerja adalah transmigrasi lokal, swakarya, dan bedol desa.

Transmigrasi lokal yaitu transmigrasi yang dilakukan masih dalam satu provinsi dan biasanya dilakukan secara massal. Transmigrasi swakarya adalah jenis transmigrasi yang bertujuan untuk memberikan pekerjaan dan jaminan hidup selama beberapa bulan kepada transmigran. Sedang transmigrasi bedol desa adalah transmigrasi yang dilakukan bersama-sama oleh penduduk satu desa beserta aparat pemerintah dari desa tersebut. Tujuan dari transmigrasi selain untuk pemerataan penduduk adalah untuk penyediaan lapangan pekerjaan dan meningkatkan taraf hidup para transmigran, serta pemerataan pembangunan. Transmigrasi umumnya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten yang memiliki profil wilayah dengan kesempatan kerja yang terbatas, untuk Pemerintah Kota sendiri jarang dilakukan. Terkait dengan urusan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Madiun yaitu sebatas sosialisasi ketransmigrasian serta memfasilitasi apabila terdapat warga Kota Madiun yang berminat untuk mengikuti program transmigrasi yang selanjutnya penentu akhir terdapat di tingkat Provinsi Jawa Timur. Pada prinsipnya jika terdapat penduduk yang ingin melakukan transmigrasi, Dinas Tenaga Kerja Kota Madiun akan memfasilitasinya sehingga capaian kerjanya pada fasilitas program transmigrasi adalah 100%.

Tabel 2.139

Data Perkembangan Fasilitas Ketransmigrasian di Kota Madiun, Tahun 2016-2020

No	Tahun	Terfasilitasi	Nama	Alamat	Status
1.	2016	1 Orang	Susanto	Jl. Lambang Sari No.6 Sogaten	Berkeluarga
2.	2017	4 Orang	Basuki	Jl. Unggul Gg.III Kanigoro	Berkeluarga
			Jahan	Jl. Manyar No.27B Nambangan Lor	Berkeluarga
			Marsiti	Jl. Serayu No.3B Banjarejo	Berkeluarga
			Arie Setiawan	Jl. Serayu No.7B Banjarejo	Berkeluarga
3.	2018	2 Orang	Agus Istiyono	Jl. Condro Manir No.50	Berkeluarga
			Yulianto	Jl. Gegono Manis No.2	Berkeluarga
4.	2019	-			
5.	2020	-			

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, KUKM Kota Madiun, 2021

2.3.3 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

2.3.3.1 Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan transparan dengan melaksanakan prinsip-prinsip *good and clean governance* pada penyelenggaraan urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, kepegawaian dan persandian diarahkan untuk mencapai tujuan meningkatnya kelembagaan dan regulasi yang efisien dan efektif, responsif, profesional, akuntabel, visioner dan transparan dengan sasaran meningkatnya kinerja pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan hasil-hasil pembangunan serta meningkatnya kegiatan kerjasama dalam pembangunan daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka telah dilakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Tim Nasional Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) pada Pemerintah Kota Madiun tiap tahunnya. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 - 53 Tahun 2018 Tentang Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional, bahwa Kota Madiun dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mendapatkan predikat Sangat Tinggi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Tingkat Nasional.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka telah dilakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kota Madiun. Secara umum terdapat peningkatan nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Madiun. Perkembangan nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Madiun cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.

Realisasi indikator kinerja "Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Madiun" selama kurun waktu 5 (lima) tahun berturut-turut (tahun 2016-sampai dengan tahun 2019) realisasi kinerjanya mengalami kenaikan apabila dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2016, nilai akuntabilitas kinerja adalah sebesar 61,58 selanjutnya meningkat setiap tahunnya menjadi sebesar 68,20 pada tahun 2019 dan sebesar 70,01 pada tahun 2020.

Tabel 2.140
Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan di Kota Madiun, Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Nilai hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (kategori)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
2.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah daerah (skor)	B (61,58)	B (63,50)	B (67,21)	B (68,20)	B (70,01)
3.	Perkembangan Indeks Kepuasan masyarakat Kota Madiun	78,54	79,57	82,85	88,85	85,501
4.	persentase capaian SPM (%)	82,85	79,10	89,58	79,31	75,86
5.	persentase perangkat daerah yang memiliki SOTK sesuai standar yang ditetapkan (%)	100	100	100	100	100
6.	persentase capaian pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan road map RB (%)	40	60	78,46	100	100
7.	persentase perangkat daerah yang menyelesaikan Laporan Kinerja (max 31 Maret) tepat waktu (%)	85,29	100	100	100	100
8.	persentase kelembagaan yang sesuai dengan Perundang-undangan (%)	100	100	100	100	100
9.	persentase perangkat daerah yang telah dilakukan Anjab dan ABK (%)	100	100	100	100	100
10.	persentase Perda yang disahkan tepat waktu (%)	100	100	100	100	100
11.	persentase pembinaan peningkatan kualitas pelayanan publik (%)	100	100	100	100	100
12.	Cakupan fasilitasi pelayanan anggota DPRD (%)	100	100	100	100	100

Sumber: Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Madiun, 2021

Terkait dengan pencapaian SPM hingga tahun 2020, terdapat beberapa Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang belum dipenuhi oleh Pemerintah Kota Madiun sehingga belum mencapai 100%. Pada kasus SOTK perangkat daerah sesuai standar, Pemerintah Kota Madiun telah mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. SOTK secara kewenangan dan besaran sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, target capaian pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan *Road Map* Reformasi Birokrasi (RB) Tahun 2020 adalah sebesar 100% yang artinya telah memenuhi target yang telah ditentukan.

Kota Madiun pada Tahun 2020 mendapatkan nilai Indeks Reformasi Birokrasi 65,55 dengan kategori (B) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Indikator penilaian yang digunakan dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi didasarkan pada prinsip S M A R T – C di bawah ini:

- a. Specific: indikator yang digunakan harus mampu menyatakan sesuatu yang khas/unik dalam menilai kinerja keberhasilan reformasi birokrasi;
- b. Measurable: indikator yang dirancang harus dapat diukur dengan jelas, memiliki satuan pengukuran, dan jelas pula cara pengukurannya;
- c. Achievable: indikator yang dipilih harus dapat dicapai oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
- d. Relevant: indikator yang dipilih dan ditetapkan harus sesuai dengan visi dan misi, serta sasaran reformasi birokrasi;
- e. Timely: indikator yang dipilih harus memiliki batas waktu pencapaian;
- f. Continuity: indikator yang dibangun harus berkelanjutan dan dapat menyesuaikan dengan perkembangan kemajuan reformasi birokrasi

Terkait besaran jumlah kelembagaan sudah disesuaikan dengan kriteria yang disyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta Peraturan Walikota Madiun Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Madiun Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Berdasarkan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota terdiri atas Kepala Daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah. Melihat konteks seperti ini, maka pola hubungan yang dikembangkan adalah kemitraan atau *partnership*. Hubungan kemitraan pada realisasinya tidak hanya didasarkan pada peraturan-peraturan perundangan semata akan tetapi juga mengacu pada nilai dan budaya yang berkembang dalam masyarakat, sehingga dapat dijalin hubungan yang harmonis, saling menghargai, menghormati dan transparan. Pelayanan eksekutif terhadap legislatif dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD yang mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Pada prinsipnya, seluruh fasilitasi kegiatan yang mendukung pelaksanaan fungsi legislatif telah difasilitasi sehingga capaian kerjanya adalah sebesar 100%.

2.3.3.2 Fungsi Penunjang Pengawasan

Fungsi pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Madiun dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Madiun. Sampai dengan tahun 2020 Inspektorat Kota Madiun telah melaksanakan pengawasan internal secara berkala pada 53 obyek pemeriksaan dan indikator kinerja persentase entitas yang melaksanakan pengelolaan keuangan dan kinerja dengan baik. Hasil dari pengawasan tersebut menunjukkan bahwa terdapat penurunan jumlah hasil temuan pengawasan sebesar 2%. Terkait dengan persentase temuan hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi pada tahun 2020 sebesar 96,42%. Pemantauan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan pengawasan internal dan eksternal yang dilaksanakan setiap semester dan dalam pelaksanaan pemantauan, selain memantau hasil pemeriksaan tahun berjalan juga memantau tindak lanjut sisa temuan tahun sebelumnya. Selanjutnya terdapat level kabalitas APIP tahun 2020 sebesar 2%.

Tabel 2.141

Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan di Kota Madiun Tahun 2020

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2020
1	persentase Penurunan Jumlah Temuan Hasil Pengawasan	2%
2	persentase Temuan Hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi	96,42%
3	Level Kapabilitas APIP	2

Sumber: Inspektorat Kota Madiun, 2021

2.3.3.3 Fungsi Penunjang Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan

Fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan berperan penting untuk mengatasi permasalahan seperti kurangnya kesesuaian penempatan dan promosi jabatan, dan dinamika kinerja ASN. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. Indikator kinerja persentase kasus pelanggaran disiplin pegawai dipergunakan untuk mengukur keberhasilan dari kegiatan pembinaan kepegawaian yang ada di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Madiun. Pada tahun 2020 jumlah pelanggaran disiplin pegawai sebanyak 9. Realisasi capaian tersebut menunjukkan bahwa peran pengawasan internal oleh Perangkat Daerah telah berjalan dengan baik. Adapun data Penjatuhan Hukuman Disiplin dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.142
Jumlah Pelanggaran Pegawai dan Hukuman yang Dikenakan, Tahun 2016-2020

No.	Keterangan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Hukuman Disiplin Berat	4	6	7	2	6
2.	Hukuman Disiplin Sedang	3	2	2	2	3
3.	Hukuman Disiplin Ringan	-	3	4	1	0
Jumlah		7	11	13	5	9

Sumber: BKPSDM Kota Madiun, 2021

Indikator persentase pejabat struktural yang telah mengikuti diklat kepemimpinan sesuai jenjangnya digunakan untuk mengukur kinerja Kegiatan Diklat Kepemimpinan Tingkat II, III dan IV. Perkembangan Jumlah pejabat eselon yang sudah mengikuti dan belum mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat II, III dan IV di Pemerintah Kota Madiun dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.143
Jumlah Pejabat Eselon IV, III, dan II yang Sudah dan Belum Mengikuti Diklatpim, Tahun 2016-2020

Jenis Diklat	Sudah Mengikuti Diklatpim			Belum Mengikuti Diklatpim				
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2019	2020
Diklatpim IV	355	329	327	68	78	100	142	112
Diklatpim III	69	66	66	36	37	24	43	38
Diklatpim II	21	14	15	7	10	13	8	7

Sumber: BKPSDM Kota Madiun, 2021

Pada indikator persentase jabatan struktural yang dilaksanakan dibanding dengan jabatan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kota Madiun melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dengan menerbitkan Peraturan Struktur Organisasi Tata Kerja berupa Peraturan Daerah. Peraturan tersebut merupakan landasan hukum untuk menyusun struktur organisasi Perangkat Daerah dari staf sampai dengan pejabat struktural. Pejabat struktural pada Pemerintah Kota Madiun menurut peraturan tersebut adalah total sejumlah 561 jabatan, terdiri dari jabatan eselon II, III dan IV. Pada tahun anggaran 2020 persentase jabatan struktural sebesar 99,63% atau dengan kata lain seluruh jabatan struktural hampir seluruhnya terisi.

Tabel 2.144

Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan di Kota Madiun Tahun 2016-2020

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2016	2017	2018	2019	2020
1.	persentase kasus pelanggaran disiplin pegawai (%)	0,19	0,42	0,39	0,15	0,28
2.	persentase pejabat struktural yang telah mengikuti diklat kepemimpinan sesuai jenjangnya (%)	84,13	76,74	80,79	71,27	72,16
3.	persentase jabatan struktural yang dilaksanakan dibanding dengan jabatan menurut PP 18 tahun 2016 (%)	99,29	95,01	89,13	98,71	99,63

Sumber: BKPSDM Kota Madiun, 2021

2.3.3.4 Fungsi Penunjang Keuangan

Fungsi penunjang keuangan diperlukan untuk mengatasi permasalahan seperti kurang optimalnya penerimaan pendapatan daerah, belum optimalnya pemanfaatan aset, dan kondisi kinerja keuangan daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi penunjang pemerintahan bidang keuangan. Selain indikator pada fungsi penunjang keuangan yang telah disebutkan pada bagian sebelumnya yaitu opini BPK dan persentase penerimaan PAD, terdapat 7 indikator lainnya pada fungsi penunjang keuangan. Terkait dengan penetapan APBD, pengesahan APBD dalam kurun waktu 2016-2018 selalu ditetapkan secara tepat waktu dalam arti penetapan peraturan daerah tentang APBD dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.

Perkembangan perangkat daerah yang menyampaikan laporan keuangan tahun 2016-2018 mengalami peningkatan. persentase perangkat daerah yang menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu pada tahun 2016 adalah 73,52% menurun capaiannya tahun 2016 adalah 73,52%, terdapat 25 perangkat daerah yang tertib dan 9 perangkat daerah yang tidak tertib. Hal ini dikarenakan ada perubahan penyajian dan susunan laporan keuangan serta aplikasi SIPKD yang berbasis akrual merupakan hal yang baru bagi perangkat daerah sehingga menghambat proses penyusunan laporan keuangan.

Pada tahun 2017, perangkat daerah yang menyampaikan laporan keuangan meningkat menjadi 91,71%, terdapat 29 perangkat daerah yang tertib dan 5 perangkat daerah yang tidak tertib. Selanjutnya pada tahun 2018 hingga tahun 2020, semua perangkat daerah yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu yaitu mencapai 100%. Peningkatan persentase ketepatan penyampaian laporan keuangan perangkat daerah ini dipengaruhi oleh pemahaman bendahara pengeluaran dalam penatausahaan keuangan sehingga perangkat daerah segera menyelesaikan tanggung jawab pelaporan tahun 2020 baik secara kinerja dan keuangan.

Tabel 2.145

Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan di Kota Madiun Tahun 2016-2020

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Penetapan APBD tepat waktu	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2.	persentase PD yang menyelesaikan laporan keuangan tepat waktu (%)	73,52	91,17	100	100	100
3.	Laporan keuangan Pemda disusun tepat waktu	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
4.	persentase pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan landasan hukum (%)	100	100	100	100	100
5.	persentase aset yang dikelola pemerintah daerah (%)	100	100	100	100	100
6.	Rasio target peningkatan pajak daerah (%)	112,56	129,70	99,88	108,38	118,26
7.	Rasio target penerimaan PBB (%)	111,89	115,35	111,39	112,62	122,63

Sumber: BKAD dan Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun, 2021

Terkait dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Madiun disampaikan ke BPK RI yaitu selambatnya 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Pada tahun 2016-2020 penyampaian LKPD secara tepat waktu. Pada indikator persentase pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan landasan hukum, pengelolaan keuangan daerah Kota Madiun sudah sesuai dengan landasan hukum baik dari peraturan pusat maupun daerah, sehingga capaian tahun 2016-2020 adalah 100%. Perkembangan jumlah aset yang dikelola Pemda tahun 2016-2020 mengalami kenaikan. Capaian jumlah aset pada tahun 2016 adalah 1.347.317 buah sedangkan pada tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi 1.466.795 buah, dan seluruhnya dikelola pemerintah daerah Kota Madiun, sehingga capaiannya 100% pada tahun 2016-2020.

Dalam kurun waktu 2016-2018, rasio penerimaan target pendapatan pajak daerah yang dibebankan kepada Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun selalu tercapai. Rasio target peningkatan pajak daerah pada tahun 2016 adalah sebesar 112,56% dan pada tahun 2017 menyentuh level tertingginya dengan rasio mencapai 129,70%. Pada tahun 2020, rasionya sebesar 118,26% dimana dengan sisa waktu 1 bulan diharapkan target yang dibebankan akan tercapai. Sebagai bagian dari jenis pajak daerah, rasio penerimaan PBB juga selalu mencapai target dalam kurun waktu 2016-2018. Rasio target penerimaan PBB tertinggi dalam kurun waktu tersebut terjadi pada tahun 2020 yang mencapai 122,63%.

2.3.3.5 Fungsi Penunjang Perencanaan Pembangunan

Fungsi penunjang perencanaan pembangun merupakan fungsi yang berperan untuk memastikan tersedianya dan berkualitasnya data dan informasi yang mendukung penyusunan dokumen rencana pembangunan. Selain itu, fungsi ini perlu untuk mensinkronkan dokumen rencana pembangunan di berbagai tingkat administratif yaitu pusat, provinsi dan kota serta realisasinya. Kinerja suatu pemerintah daerah dapat dilihat melalui beberapa indikator perencanaan pembangunan. Pemerintah Kota Madiun dalam fungsi perencanaan pembangunan menunjukkan kinerja yang membaik selama kurun waktu 2016-2020. Pada ketiga indikator ketersediaan dokumen, selama 2016-2020 menunjukkan status yang baik dengan tersedianya dokumen. Pada indikator yang lain juga menunjukkan keadaan yang baik pada tahun-tahun selanjutnya sasaran yang tercapai mencapai 100%. Indikator persentase hasil musrenbang yang diakomodasi menunjukkan peningkatan yang semula hanya 34% pada tahun 2016 menjadi 50% pada tahun 2020. Secara umum kinerja fungsi penunjang perencanaan pembangunan Kota Madiun menunjukkan tren perbaikan dari tahun ke tahun.

Tabel 2.146

Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan Pembangunan di Kota Madiun Tahun 2016-2020

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA (Ya/Tidak)	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA (Ada/Tidak)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPDP yang telah ditetapkan dengan PERKADA (Ada/Tidak)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4.	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPDP (%)	100	100	100	100	100
6.	persentase pelaksanaan musrenbang tepat waktu (%)	100	100	100	100	100

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2016	2017	2018	2019	2020
7.	persentase Capaian Sasaran Tahunan Terhadap Target Sasaran RPJMD (%)	100	100	100	100	100
8.	persentase hasil musrenbang yang diakomodasi (%)	34	41	47	50	50
9.	persentase SKPD yang menyusun dokumen Renja (%)	100	100	100	100	100

Sumber: Bapelitbangda Kota Madiun, 2021

2.3.3.6 Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan

Fungsi penunjang penelitian dan pengembangan berperan penting untuk memastikan bahwa permasalahan penelitian dan pengembangan seperti belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan yang dijadikan sebagai pertimbangan dalam pengambilan kebijakan. Pada fungsi penunjang penelitian dan pembangunan, Pemerintah Kota Madiun menunjukkan kinerja yang stabil dengan jumlah dokumen yang mencapai 2 buah setiap tahunnya sejak 2016 hingga 2018. Pada tahun 2019 dan tahun 2020 kajian/penelitian meningkat menjadi 4 buah setiap tahunnya. Kajian/penelitian yang dilakukan dalam kurun waktu tersebut terkait dengan bidang perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya dan pemerintahan umum.

Beberapa judul dokumen penelitian yang disusun adalah Kajian Identifikasi Ekonomi Kreatif Kota Madiun, Kajian Strategi Pemberdayaan Perempuan Dalam Pengentasan Kemiskinan di Kota Madiun, Kajian Evaluasi Jabatan Dalam Rangka Penyusunan Tunjangan Penghasilan Aparatur Sipil Negeradi Lingkungan Pemkot Madiun, Kajian Daya Saing Pasar Tradisional Terhadap Mini Market Modern Kota Madiun. Sedang kajian/penelitian yang terkait dengan bidang perencanaan pembangunan Prasarana Wilayah adalah Kajian Identifikasi Ruang Terbuka Hijau Privat, Kajian Identifikasi Ruang Terbuka Hijau Publik, Studi Penataan RTH di Kota Madiun, Kajian Rencana Penataan dan Pengembangan Alun-alun dan Bundaran Taman Kota Madiun, dan Rencana Pemanfaatan Aset Eks Taman Harapan/Kawasan Jalan Puter.

Tabel 2.147

Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan di Kota Madiun, 2016-2020

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah kajian dan penelitian	2	2	2	4	4

Sumber: Bapelitbangda Kota Madiun, 2021

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, yang dimaksud Indeks Inovasi daerah merupakan himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Kota Madiun pada Tahun 2020 telah mendapatkan skor 1.892 dengan kategori sangat inovatif.

2.3.3.7 Fungsi Penunjang Kecamatan

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 Ayat 12, pemberdayaan masyarakat desa merupakan upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Hal ini mengartikan bahwa pemberdayaan masyarakat desa merupakan kegiatan pembangunan masyarakat untuk memperbaiki situasi dan kondisi agar lebih mandiri dan sejahtera. Pembangunan ini bukan hanya meliputi individu tetapi juga pranata-pranata sosialnya. Sebagai upaya meningkatkan kapasitas pemberdayaan masyarakat dan desa, Pemerintah Kota Madiun berusaha untuk mengasah serta meningkatkan wawasan masyarakat melalui kegiatan pelatihan dan pembinaan. Selain itu, dengan meningkatnya kapasitas pemberdayaan masyarakat dan desa di Kota Madiun maka diharapkan pelayanan kepada masyarakat akan semakin meningkat dari segi kualitas. Dalam kurun waktu 2016-2020, kecamatan di Kota Madiun telah berperan dalam berbagai program pembangunan yang ditunjukkan dengan berbagai indikator sebagai berikut:

Tabel 2.148

Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kecamatan di Kota Madiun, Tahun 2016-2020

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan (LPM)	5	5	5	5	5
2.	Jumlah anggota binaan PKK	37.161	38.413	43.436	57.761	64.998
3.	LPM berprestasi	11,11	11,11	11,11	11,11	11,11
4.	PKK aktif	31	31	31	31	31
5.	Posyandu aktif	270	399	389	389	389
6.	Swadaya masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	4	3	3	3	3

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2016	2017	2018	2019	2020
7.	Prosentase LPMD/Organisasi Pemberdayaan yang aktif menjalankan fungsinya	100%	100%	100%	100%	100%
8.	persentase Kehadiran Peserta Penguatan Lembaga Kemasyarakatan	100%	100%	100%	100%	100%
9.	persentase Kehadiran dalam Perencanaan Pembangunan Kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%
10.	Jumlah LPMK Aktif	27	27	27	27	27
11.	Jumlah Posyandu Balita	270	270	270	270	270
12.	Jumlah alat yang dipromosikan	1	1	1	1	1
13.	Jumlah LKK Aktif	27	27	27	27	27

Sumber: Kecamatan di Kota Madiun, 2020

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Fokus kemampuan ekonomi daerah dapat dianalisis menggunakan beberapa indikator yakni pengeluaran konsumsi perkapita, pengeluaran konsumsi makanan dan non makanan, nilai tukar petani, dan produktivitas total daerah. Berikut merupakan penjelasan dari beberapa indikator tersebut:

2.4.1.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita

Pengeluaran konsumsi merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk selain pendapatan. Biasanya tingkat pendapatan yang naik, juga meningkatkan pengeluaran konsumsi. Pengeluaran konsumsi itu sendiri dapat dilihat dari tingkat konsumsi serta pola konsumsi. Tingkat konsumsi adalah pengeluaran konsumsi yang berubah-ubah setiap tahunnya, sedang pola konsumsi adalah perbedaan pola konsumsi antara komoditas makanan dan non makanan. Rumah tangga yang mengalami kenaikan pada tingkat konsumsi pada beberapa waktu, pola pengeluarannya biasanya juga akan berubah dari pola konsumsi makanan ke non makanan. Hal ini karena kepuasan mengonsumsi makanan sudah tercapai maksimum.

Tabel 2.149

Perkembangan Rata-rata Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita di Kota Madiun, Tahun 2016-2020

Tahun	Rata-rata konsumsi rumah tangga (juta)	Pertumbuhan (%)
2016	35,70	6,16
2017	37,70	5,83
2018	37,70	0
2019	33,59	-10,90
2020	36,54	8,78

Sumber: BPS Kota Madiun, 2021

Secara rata-rata, konsumsi per kapita dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Kenaikan rata-rata konsumsi per-kapita cenderung searah dengan kenaikan jumlah penduduk. Setiap penduduk Kota Madiun diperkirakan menggunakan dana sekitar 32 juta rupiah (2014) setahun untuk membiayai konsumsi baik berupa makanan maupun bukan makanan (sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, dsb).

Penggunaan konsumsi rumah tangga ini terus meningkat menjadi; 35,70 juta rupiah (2016); dan 37,70 juta rupiah (2017 dan 2018), 33,59 juta rupiah (2019), dan 36,54 juta (2020). Kondisi ini menunjukkan rata-rata konsumsi setiap penduduk meningkat, baik secara kuantitas (volume) maupun secara nilai (termasuk peningkatan kualitas).

2.4.1.2 Persentase Pengeluaran Konsumsi per Kapita Makanan dan Non Makanan

Tingkat konsumsi menunjukkan kenaikan konsumsi dari waktu ke waktu. Pola konsumsi antara komoditas makanan dan non makanan menunjukkan komposisi pola konsumsi non makanan mengalami tren kenaikan, komposisi konsumsi makanan menunjukkan adanya tren penurunan dari tahun 2016 ke 2018. Proporsi pengeluaran untuk makanan cenderung masih berada pada kisaran yang sama dari tahun ke tahun, yaitu 24,14 persen (2016); 23,95 persen (2017) dan (2018); 41,90 persen (2019); 41,75 persen (2020). Jika dilihat pola proporsi konsumsi di atas, memperlihatkan adanya tarik menarik antara kebutuhan rumah tangga atas makanan dan non makanan yang masih cukup kuat. Namun, pengeluaran untuk kebutuhan non makanan menjadi semakin penting sebagai akibat dari perubahan dan pengaruh tatanan ekonomi sosial dalam masyarakat. Pengeluaran tersebut di antaranya meliputi biaya untuk pendidikan, pembelian alat dan perlengkapan elektronik, pembelian alat transportasi, jasa komunikasi, jasa transportasi, jasa kesehatan, perjalanan wisata, restoran, sewa bangunan tempat tinggal, jasa hiburan dan sebagainya

Pengeluaran konsumsi komoditas non makanan yang menunjukkan persentase tertinggi dari total pengeluaran adalah transportasi, komunikasi, rekreasi, dan budaya lalu diikuti oleh hotel dan restoran. Tingginya perbedaan persentase antara konsumsi komoditas makanan dan non makanan menunjukkan bahwa secara umum masyarakat sudah memenuhi dan merasa puas dengan konsumsi komoditas makanan sehingga saat ini mereka cenderung meningkatkan konsumsi komoditas non makanan.

Tabel 2.150

Persentase Pengeluaran Konsumsi per Kapita Makanan dan Non Makanan di Kota Madiun Tahun 2016-2020

Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga	2016	2017	2018	2019	2020
Makanan	24,14	23,95	23,95	41,90	41,75
Pakaian dan Alas Kaki	2,72	2,74	2,74	3,18	3,05

Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga	2016	2017	2018	2019	2020
Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah	11,19	11,26	11,26	26,03	24,70
Kesehatan dan Pendidikan	6,98	7,12	7,12	15,99	15,67
Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	28,36	28,32	28,32	6,13	6,35
Hotel dan Restoran	21,57	21,61	21,61	4,16	5,05
Lainnya	5,04	5,00	5,00	2,60	3,42
Total	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kota Madiun, 2021

2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Infrastruktur merupakan salah satu faktor penting yang diperlukan untuk meningkatkan daya saing daerah. Daerah yang memiliki infrastruktur yang baik akan memiliki kemudahan akses dan konektivitas. Kemudahan akses dan konektivitas akan meningkatkan aktivitas ekonomi sehingga akan berpengaruh terhadap perekonomian daerah.

2.4.2.1 Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan

Ketersediaan fasilitas infrastruktur seperti jalan merupakan salah satu upaya meningkatkan daya saing daerah. Ketersediaan jalan mempermudah konektivitas antarwilayah sehingga dapat memberikan dampak pada kondisi ekonomi maupun sosial. Rasio antara panjang jalan dan jumlah kendaraan digunakan untuk mengukur beban suatu infrastruktur jalan. Semakin tinggi nilai rasio, maka semakin besar beban suatu jalan.

Berdasarkan data UPTD Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, jumlah kendaraan bermotor di Kota Madiun pada tahun 2020 adalah sebanyak 125.598 unit yang terdiri dari 123.053 unit kendaraan pribadi, 1.662 kendaraan dinas, dan 883 kendaraan umum. Untuk mengantisipasi risiko terkecil dalam rangka menciptakan keselamatan pengguna jasa transportasi darat, peran ratio panjang jalan per jumlah kendaraan menjadi salah satu ukuran yang sangat obyektif untuk digunakan sebagai indikator keamanan di jalan.

Dengan asumsi bahwa semakin pendek ratio panjang jalan per jumlah kendaraan, akan semakin berisiko atau tingkat kenyamanan dan keselamatan di jalan akan semakin berkurang. Bila dilihat dari rasio panjang jalan per 1.000 kendaraan, pada tahun 2020 tercatat 3,58 km untuk setiap 1.000 kendaraan bermotor di Kota Madiun. Dengan pertambahan jumlah kendaraan dan panjang jalan yang relatif tidak bertambah signifikan atau bahkan tetap, hal tersebut akan mengakibatkan makin padatnya arus lalu lintas di Kota Madiun.

Tabel 2.151

Jumlah Kendaraan Menurut Jenis dan Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan di Kota Madiun Tahun 2020

No.	Jenis Kendaraan	Pribadi	Dinas	Umum
1.	Sedan dan Sejenisnya	2.144	8	53
2.	Jeep dan Sejenisnya	1.073	6	-
3.	Station dan Sejenisnya	11.675	183	52
4.	Bus dan Sejenisnya	57	16	216
5.	Truck dan Sejenisnya	3.472	111	562
6.	Sepeda Motor	104.611	1.338	-
7.	Alat Berat	21	-	-
Jumlah		123.053	1.662	883
Total Kendaraan		125.598		
Panjang Jalan		449,34		
Rasio (km/1.000 kendaraan)		3,58		
Rasio (kendaraan/1 km)		280		

Sumber : UPTD Bapenda Provinsi Jawa Timur dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun, 2021

2.4.2.2 Jumlah Orang/Barang Melalui Terminal Per Tahun

Apabila daerah memiliki jumlah perpindahan barang dan orang yang menunjukkan tren tinggi, maka daerah tersebut mengalami aktivitas ekonomi yang tumbuh. Perkembangan perpindahan orang dan barang itu juga menunjukkan bagaimana tingginya interaksi suatu kota dengan kota lain karena adanya kemungkinan semakin meningkatnya jumlah kunjungan orang atau tingginya mobilitas penduduk lokal. Jumlah orang yang melalui terminal menunjukkan bahwa trennya selalu menurun setiap tahunnya. Kemungkinan yang terjadi adalah masyarakat telah berpindah menggunakan kendaraan pribadi daripada menggunakan bus. Selain itu, terdapat moda transportasi alternatif yaitu kereta api yang juga melintasi Kota Madiun.

Jumlah orang yang terangkut angkutan umum dalam kurun waktu 2016-2020 cenderung mengalami penurunan dari sebanyak 5.887.254 penumpang pada tahun 2016 menjadi sebanyak 5.676.392 penumpang pada tahun 2020. Namun dari sisi barang yang terangkut menunjukkan peningkatan dari sebanyak 11.505 ton menjadi sebanyak 12.688 ton. Data jumlah barang yang terangkut tersebut menunjukkan peningkatan aktivitas ekonomi selama 5 tahun terakhir di Kota Madiun.

Tabel 2.152
Jumlah Orang/Barang melalui Terminal di Kota Madiun Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum (orang dan ton)	5.887.254 (11.505 ton)	5.824.523 (13.015 ton)	5.676.390 (12.688 ton)	6.460.900 (13.030 ton)	5.676.392 (12.688 ton)
Jumlah orang/barang yang terangkut melalui Terminal Kota Madiun (orang dan ton)	5.887.254 (11.505 ton)	5.824.523 (13.015 ton)	5.676.390 (12.688 ton)	6.460.900 (13.030 ton)	5.676.392 (12.688 ton)

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Madiun, 2021

2.4.2.3 Ketaatan terhadap RTRW

Ketaatan terhadap RTRW merupakan indikator penting karena ketaatan RTRW berarti kegiatan pembangunan yang dilakukan sesuai dengan rancangan keseimbangan pembangunan dan pengembangan wilayah suatu daerah. Keseimbangan dan ketaatan ini penting agar pembangunan tidak mengalami tumpang tindih di masa depan. Selama kurun waktu 2016-2020 ketaatan RTRW menunjukkan angka 100%. Ini berarti pembangunan yang dilakukan telah sesuai dengan keterpaduan dan keserasian antara kondisi lapangan dengan kondisi yang telah ditetapkan. Dengan begitu, pembangunan di masa depan dapat dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan.

Tabel 2.153
Ketaatan Terhadap RTRW, 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Ketaatan terhadap RTRW	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun, 2021

2.4.2.4 Luas Wilayah Produktif (Ha)

Luas wilayah yang dimiliki Kota Madiun seluas 3.323 Ha. Luas wilayah produktif sendiri selama 2016-2020 menunjukkan nilai yang semakin menurun yaitu dari seluas 1.038 Ha pada tahun 2016 menjadi seluas 1.010 Ha pada tahun 2020. Hal ini disebabkan oleh adanya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Luas areal produktif yang meliputi luas baku sawah irigasi teknis tanaman pangan (padi palawija) dan perkebunan (tebu) mengalami penurunan dari tahun 2016 sampai tahun 2020 dari 1.038 Ha menjadi 1.010 Ha atau turun sebanyak 28 Ha.

Tabel 2.154

Luas Wilayah Produktif (Ha) di Kota Madiun, 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Luas Wilayah Produktif (Ha)	1.038	1.031	1.015	1010	1010

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun, 2021

2.4.2.5 Luas Wilayah Industri (Ha)

Luas wilayah industri di Kota Madiun sampai dengan 2020 seluas 83,22 Ha. Luasan ini mengalami perkembangan 17,89 Ha dibandingkan pada tahun 2016. Hal ini menunjukkan adanya perkembangan jumlah industri besar, sedang dan kecil di Kota Madiun.

Tabel 2.155

Luas Wilayah Industri (Ha) di Kota Madiun Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Luas Wilayah Industri (Ha)	65,33	75	83,22	83,22	83,22

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun, 2021

2.4.2.6 Luas Wilayah Perkotaan (Ha)

Kota Madiun merupakan daerah dengan 100% wilayahnya berupa wilayah perkotaan. Luas wilayah yang tetap selama tahun 2016-2020 menunjukkan bahwa tidak terdapat penyempitan wilayah daerah administratif maupun perluasan wilayah daerah administratif.

Tabel 2.156

Luas Wilayah Perkotaan (Ha) di Kota Madiun Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Luas Wilayah Perkotaan (Ha)	33,23	33,23	33,23	33,23	33,23

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun, 2021

2.4.2.7 Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang

Fasilitas perbankan merupakan salah satu hal penting dalam mendukung aspek daya saing daerah. Keberadaan bank berperan penting dalam memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan. Keberadaan bank juga memberikan fasilitas penyimpanan dana serta penyaluran dana kepada masyarakat. Semakin banyak bank dan semakin bervariasi bank, maka menunjukkan bahwa pasar keuangan dan kebutuhan masyarakat akan jasa keuangan semakin tinggi. Semakin banyak bank juga berperan dalam meningkatkan penyaluran dana kepada masyarakat. Oleh sebab itu keberadaan bank membantu perputaran roda perekonomian suatu daerah.

Tabel 2.157
Jumlah Bank dan Cabang Bank di Kota Madiun Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah bank dan cabang	32	32	32	46	46

Sumber: BPS Kota Madiun, 2021

Kota Madiun terdapat fasilitas keuangan berupa bank umum swasta dan bank umum pemerintah. Adanya variasi jenis perbankan menguntungkan masyarakat dan pelaku bisnis, nama-nama bank tersebut ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 2.158
Jenis Bank dan Cabang Bank di Kota Madiun

Uraian	Fasilitas Perbankan
Bank Umum Swasta	Bank Central Asia Bank Permata CIMB Niaga Bank Sinar Mas Bank Mega Bank OCBC NISP Bank Panin Bank Danamon Bank Pundi Bank Bukopin Centrataman Nasional Bank Bank Tabungan Pensiunan Nasional Bank Muamalat Bank Arta Niaga Kencana Bank Woori Saudara Bank Shinhan Bank Internasional Indonesia Bank Mayapada Maybank BPR Tunas Artha
Bank Umum Pemerintah	Bank Negara Indonesia Bank Rakyat Indonesia Bank Tabungan Negara Bank Mandiri Bank Pembangunan Daerah Jatim Bank Daerah Kota Madiun Bank Syariah Indonesia

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Madiun, 2021

2.4.2.8 Perusahaan Asuransi

Asuransi sebagai jasa keuangan non bank memiliki peran penting sebagai lembaga yang memberi kenyamanan dan keamanan pada suatu risiko tertentu. Adanya perusahaan asuransi pada suatu wilayah menunjukkan bahwa penduduk di wilayah tersebut telah peduli dengan tindakan preventif menghadapi risiko tertentu pada masa depan. Di Kota Madiun, jumlah perusahaan asuransi selama 2016-2020 menunjukkan tren yang stagnan atau tidak terdapat pertumbuhan. Jumlah perusahaan asuransi sampai dengan Tahun 2020 berjumlah 10. Beberapa perusahaan asuransi yang ada di Kota Madiun diantaranya adalah PT. Asuransi Jiwasraya, PT. Prudential, Jasa Raharja, Asuransi Sinar Mas, PT. AIA, BPJS Ketenagakerjaan, PT. Mandiri Inhealth Indonesia, AJB Bumiputera, PT. Asuransi Central Asia Finance dan PT. Allianz.

Tabel 2.159
Jumlah Perusahaan Asuransi Kota Madiun Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah perusahaan asuransi	14	14	16	10	10

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2021

2.4.2.9 Jenis, Kelas, dan Jumlah Penginapan/Hotel

Ketersediaan akomodasi berupa penginapan atau hotel penting untuk mendukung iklim bisnis, keberlangsungan usaha dan pariwisata. Adanya hotel dan beragamnya pilihan akan menjadi investor atau wisatawan yang datang nyaman untuk tinggal di Kota Madiun. Secara umum, jumlah hotel dan penginapan di Kota Madiun pada tahun 2016-2020 terus bertambah dari sebanyak 33 hotel/ penginapan pada tahun 2016 menjadi sebanyak 35 hotel/ penginapan pada tahun 2020. Pertambahan tersebut berasal dari pembangunan sejumlah hotel berbintang seperti Hotel Amaris (bintang 2), The Sun Hotel (bintang 3), Hotel Aston (bintang 4), dan Fave Hotel (bintang 3) pada kurun waktu sekitar 2016-2018 (Tabel 2.146).

Kenaikan jumlah hotel tersebut menunjukkan bahwa permintaan untuk kebutuhan hotel, khususnya hotel berbintang di Kota Madiun meningkat. Pada saat ini, jenis akomodasi di Kota Madiun sangat bervariasi baik hotel berbintang maupun hotel non bintang / kelas melati atau jenis akomodasi lainnya yang tersebar di tiga kecamatan. Badan Pusat Statistik Kota Madiun (2021) mencatat pada tahun 2020 terdapat 18 hotel/penginapan di Kecamatan Manguharjo, 9 hotel/penginapan di Kecamatan Taman, dan 8 hotel/penginapan di Kecamatan Kartoharjo.

Tabel 2.160

Kelas dan Jumlah Penginapan/Hotel di Kota Madiun, 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Hotel Bintang 4	-	1	1	1	1
Hotel Bintang 3	2	3	3	3	3
Hotel Bintang 2	2	2	2	2	2
Hotel Bintang 1	1	1	1	1	1
Hotel Non Bintang	28	31	31	30	28
Jumlah	33	38	38	37	35

Sumber: BPS Kota Madiun, 2021

2.4.2.10 Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Bersih

Akses terhadap air bersih merupakan kebutuhan utama untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik. Berdasarkan Undang-Undang RI No.7 Tahun 2004 dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907 Tahun 2002, disebutkan bahwa definisi air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak. Dengan kata lain air bersih merupakan salah satu jenis sumber daya berbasis air bermutu baik dan biasa dimanfaatkan oleh manusia untuk dikonsumsi atau dalam melakukan aktivitas mereka sehari-hari.

Persentase rumah tangga di Kota Madiun dalam kurun waktu 2016-2019 terus menunjukkan peningkatan dari sebesar 98,37% pada tahun 2016 menjadi sebesar 100% pada tahun 2019 dan 2020. Jumlah rumah tangga yang menggunakan air bersih adalah sebanyak 41.836 unit. Data tersebut menunjukkan bahwa hampir seluruh rumah tangga di Kota Madiun telah menggunakan air bersih dan tidak mengalami kesulitan dalam mengakses air bersih.

Dengan tren semakin banyak RT yang berlanggan air bersih, taraf hidup masyarakat Kota Madiun mengalami perbaikan. Sementara itu, persentase penduduk berakses air bersih didasarkan pada jumlah masyarakat yang terlayani melalui jaringan PDAM. Pada tahun 2020 masyarakat yang terlayani sebesar 96,58%. Persentase tersebut terus meningkat selama periode 2016-2020.

Tabel 2.161
Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih
di Kota Madiun Tahun 2016-2020

Tahun	Persentase RT Pengguna Air Bersih (%)
2016	98,37
2017	99,71
2018	99,71
2019	100
2020	100

*Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kota Madiun, 2021*

Tabel 2.162
Persentase Penduduk Berakses Air Bersih Perpipaan
di Kota Madiun Tahun 2016-2020

Tahun	Persentase RT Pengguna Air Bersih Perpipaan (%)
2016	90,16
2017	92,04
2018	92,06
2019	93,3
2020	96,58

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun, 2021

2.4.2.11 Ketersediaan Daya Listrik

Ketersediaan listrik merupakan kebutuhan yang vital bagi Kota Madiun. Peningkatan daya listrik terpasang dianggap sebagai pemenuhan atas kenaikan permintaan listrik masyarakat. Kenaikan permintaan listrik menunjukkan bahwa masyarakat semakin membutuhkan listrik untuk aktivitas konsumsi dan produksi. Oleh sebab itu, ketersediaan listrik dianggap mampu mendorong kegiatan industri dan aktivitas produksi sehari-hari. Pada periode 2016-2020 daya listrik terpasang selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2016, terdapat 149.783.215 KW listrik terpasang. Pada tahun 2020, nilai tersebut telah meningkat sebesar 194.076.915 KW.

Kenaikan daya listrik terpasang juga diikuti dengan kenaikan listrik terjual dari sebesar 258.141.399 kWh (2016) menjadi sebesar 291.095.826 kWh (2020). Kenaikan listrik terjual ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan konsumsi masyarakat terhadap listrik.

Tabel 2.163
Ketersediaan Daya Listrik di Kota Madiun, 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Daya listrik terpasang (KW)	149.783.215	160.539.819	170.732.715	180.913.315	194.076.915
Listrik Terjual (kWh)	258.141.399	259.490.128	271.070.328	284.349.796	291.095.826

Sumber: BPS Kota Madiun, 2021

Tren pertumbuhan kapasitas daya listrik sendiri menunjukkan tren pertumbuhan yang fluktuatif, namun tetap tumbuh positif. Lonjakan kenaikan kapasitas daya listrik terpasang terbesar pada tahun 2020 dengan pertumbuhan 7,27%, sedang pertumbuhan terendah pada tahun 2016 yang hanya sebesar 5,93%. Pada pertumbuhan produksi listrik, tren menunjukkan pertumbuhan positif fluktuatif. Lonjakan kenaikan pertumbuhan produksi listrik terjadi pada tahun 2016 dengan pertumbuhan sebesar 6,84%. Selain itu, pada tahun 2017, produksi listrik mengalami penurunan sebesar 1,04%, namun meningkat kembali sebesar 2,37 % pada tahun 2020.

Tabel 2.164
Pertumbuhan Kapasitas Daya Listrik dan Pertumbuhan Listrik Terjual di Kota Madiun Tahun 2016-2020

Tahun	Pertumbuhan Daya Listrik (%)	Pertumbuhan Listrik Terjual (%)
2016	5,93	6,84
2017	7,18	(1,04)
2018	6,35	4,29
2019	5,96	4,89
2020	7,27	2,37

Sumber: BPS Kota Madiun, 2021

2.4.2.12 Pelanggan Listrik

Kenaikan daya listrik terpasang dan listrik terjual ternyata memang diikuti dengan kenaikan jumlah pelanggan listrik selama lima tahun terakhir. Jumlah pelanggan listrik mencakup pengguna rumah tangga, industri, maupun instansi. Tren menunjukkan bahwa pertumbuhan pelanggan listrik mengalami pertumbuhan positif yang melambat.

Pertumbuhan pelanggan listrik tertinggi terjadi pada tahun 2016 sebesar 2,99% dengan penambahan pelanggan sebanyak 57.054 unit. Sampai dengan Tahun 2020, jumlah pelanggan listrik di Kota Madiun terus bertambah hingga mencapai sebanyak 62.956 pelanggan.

Tabel 2.165
Jumlah dan Pertumbuhan Pelanggan Listrik Terjual
di Kota Madiun Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Pelanggan Listrik	Pertumbuhan (%)
2016	57.054	2,99
2017	58.362	2,29
2018	60.199	3,15
2019	61.503	2,16
2020	62.956	2,36

Sumber: BPS Kota Madiun, 2021

2.4.2.13 Kenyamanan Kota

Indeks Kenyamanan Kota (Livable City) merupakan konsep yang digagas oleh Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia, indeks ini merupakan istilah yang menggambarkan sebuah lingkungan dan suasana kota yang nyaman sebagai tempat tinggal dan sebagai tempat untuk beraktivitas yang dilihat dari berbagai aspek, baik aspek fisik (fasilitas perkotaan, prasarana, tata ruang, dll) maupun aspek non fisik (hubungan social, aktivitas ekonomi, dll). Prinsip-prinsip dasar livable city :

1. Tersedianya berbagai kebutuhan dasar masyarakat perkotaan (hunian yang layak, air bersih, listrik),
2. Tersedianya berbagai fasilitas umum dan fasilitas sosial (transportasi publik, taman kota, fasilitas ibadah/kesehatan/ibadah),
3. Tersedianya ruang dan tempat publik untuk bersosialisasi dan berinteraksi,
4. Keamanan, Bebas dari rasa takut,
5. Mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya,
6. Sanitasi lingkungan dan keindahan lingkungan fisik.

2.4.2.14 Infrastruktur

Kota yang baik adalah kota yang mempunyai infrastruktur yang memadai dari segi jalan, akses air minum, sanitasi layak, ketersediaan listrik dan kualitas akses internet dan telepon. Perhitungan Indeks infrastruktur dapat memberikan gambaran sejauh mana infrastruktur di suatu daerah dapat dikatakan baik, indeks infrastruktur dibentuk dari berbagai indikator yang diantaranya indikator persentase jalan dengan kondisi mantap, persentase rumah tangga dengan akses terhadap air minum layak, persentase rumah tangga dengan akses terhadap sanitasi layak, persentase keluarga pengguna listrik, serta kualitas sinyal telepon dan internet di daerah.

2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Iklim investasi yang kondusif akan menarik investor untuk menanamkan modal. Modal investor penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya modal yang masuk ekonomi tumbuh dan kesejahteraan masyarakat meningkat. Kondisi iklim investasi suatu daerah dapat dilihat pada beberapa indikator seperti angka kriminalitas, jumlah demonstrasi, lama proses perizinan, jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah, jumlah perda yang mendukung dunia usaha, persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa.

2.4.3.1 Angka Kriminalitas Tertangani

Iklim investasi di suatu wilayah salah satunya dipengaruhi oleh keamanan. Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keamanan suatu daerah salah satunya dengan angka kriminalitas. Angka ini menunjukkan jumlah tindak kriminalitas yang terjadi di suatu wilayah pada satu tahun per 10.000 penduduk. Semakin rendah angka kriminalitas semakin aman dan terjamin suatu daerah sehingga investor lebih percaya dalam menanamkan modalnya. Sebaliknya, jika angka kriminalitas tinggi menyebabkan investor enggan untuk menanamkan modalnya.

Tabel 2.166
Angka Kriminalitas di Kota Madiun Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Angka Kriminalitas	14,93	10,10	4,06	0,016	0,018

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa Politik Kota Madiun, 2021

Dalam kurun waktu 2016-2020, Angka kriminalitas di Kota Madiun terus menunjukkan penurunan dari sebesar 14,93 menjadi hanya sebesar 0,018 tahun 2020. Dengan tren semakin rendahnya angka kriminalitas setiap tahun, hal tersebut menunjukkan bahwa kondisi kota semakin nyaman dan aman untuk berinvestasi.

2.4.3.2 Jumlah Demonstrasi

Demonstrasi yang terjadi pada suatu wilayah terkadang mengganggu aktivitas perekonomian sehingga demonstrasi merupakan salah satu indikator yang sering digunakan oleh investor untuk mempertimbangkan keputusan berinvestasi. Selain itu, demonstrasi seperti pemogokan kerja tentu akan mengganggu aktivitas produksi suatu perusahaan. Dalam kurun waktu 2016 hingga 2020, jumlah demonstrasi di Kota Madiun berkurang secara signifikan dari sebanyak 8 demonstrasi menjadi sebanyak 5 demonstrasi tahun 2018, dan tahun 2019 dan 2020 tidak ada demonstrasi.

Hal tersebut mengindikasikan bahwa hal tersebut dapat mendorong perbaikan iklim dan kondusivitas investasi. Demonstrasi yang dilakukan umumnya karena kasus politik dan ekonomi. Demonstrasi pemogokan kerja tidak terjadi di Kota Madiun, hal ini menandakan bahwa resiko tersendatnya aktivitas produksi akibat demonstrasi pemogokan kerja sangat minim di Kota Madiun.

Tabel 2.167
Jumlah Demonstrasi di Kota Madiun, 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Demonstrasi/Unjuk Rasa	8	1	5	-	-

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa Politik Kota Madiun Kota Madiun, 2021

2.4.3.3 Indeks Kerukunan

Kerukunan umat beragama mempunyai kedudukan strategis bagi kelangsungan kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat di Indonesia. Oleh karena itu harus dikelola dengan baik dan tepat. Agama apapun yang dianut masyarakat akan berlaku pada kehidupan berbangsa dan bernegara bila memang implementasi dari ajaran agama tersebut dijiwai dan diamalkan dengan benar. Adapun capaian kinerja untuk indikator ini tahun 2020 adalah sebesar dengan status/predikat Harmonis, jika dibandingkan dengan capaian tahun 2019 yaitu 3,7000 maka terdapat peningkatan sebesar 0,0015. Terdapat 5 (lima) dimensi yang diukur secara berurutan : 1) Jujur 2) Menerima 3) Menghormati 4) Kesetaraan 5) Teladan Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka meminimalisir terjadinya konflik di Kota Madiun yaitu :

- Kegiatan Rakor Forkopimda mengadakan pertemuan dengan masyarakat membahas isu yang berkembang di masyarakat untuk mencari solusi pemecahan masalah.
- Sosialisasi, sarasehan dan pembinaan kepada berbagai elemen masyarakat, pelajar dan generasi muda tentang kehidupan berbangsa dan bernegara,
- Membentuk Forum Pembauran Kebangsaan dan Forum Kerukunan Umat Beragama sehingga tidak terjadi gesekan-gesekan dalam masyarakat untuk menciptakan rasa aman dan kondusif di Kota Madiun,
- Membentuk Tim Kewaspadaan Dini untuk menampung informasi terkait isu permasalahan yang akan menimbulkan konflik di masyarakat,
- Penyusunan Peta Rawan Konflik yaitu suatu kajian tentang wilayah rawan konflik di Kota Madiun. Hasil yang diharapkan dari Pemetaan rawan konflik adalah untuk mengantisipasi tidak terjadinya potensi konflik sosial terutama memberikan gambaran dan pemetaan rawan konflik sosial di Kota Madiun, sehingga potensi konflik bisa terdeteksi dan tidak terjadi di Kota Madiun,
- Memfasilitasi/audiensi terjadinya konflik yang timbul di masyarakat yang dilakukan oleh Organisasi Kemasyarakatan

2.4.3.4 Indeks Rasa Aman

Capaian kinerja untuk indikator Indeks Rasa Aman tahun 2020 adalah sebesar 76,05 dengan peringkat aman, sehingga melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar 76. Sehingga Capaian Kinerja hanya mencapai persentase sebesar 100,06%. Rasa aman merupakan salah satu kebutuhan hidup masyarakat yang harus terpenuhi. Suatu kemustahilan apabila membicarakan tentang kesejahteraan masyarakat dengan mengabaikan aspek keamanan. Suatu pemerintahan tidak akan mungkin mengklaim masyarakatnya telah sejahtera sementara dalam kehidupan sehari-hari diusik oleh rasa ketakutan dan keresahan terhadap kemungkinan timbulnya ancaman terhadap jiwa, harta, dan kehormatan. Indeks keamanan sebagai salah satu alat pengukuran tingkat keamanan dan digunakan untuk mengukur perubahan tingkat keamanan. Terdapat empat dimensi dalam yang digunakan dalam pengukuran indeks rasa aman yaitu : 1) Dimensi Keamanan dari Bencana (Kebencanaan) 2) Dimensi Pemenuhan Kesejahteraan Sosial (Kesejahteraan Sosial) 3) Dimensi Perlindungan dan Pemanfaatan atas Kebhinnekaan (Kebhinnekaan) 4) Dimensi Keamanan dari Kekerasan (Kekerasan)

2.4.3.5 Lama Proses Perizinan

Sejak dikeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan pasal 9, bahwa perusahaan wajib melakukan pendaftaran perusahaan sesuai dengan ketentuan paling lama 2 Tahun terhitung sejak Peraturan Menteri diundangkan yaitu terhitung mulai 19 Juli 2018. Dalam PP tersebut juga menjelaskan bahwa Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Perizinan yang sering digunakan oleh investor dan pelaku bisnis seperti Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Pemenuhan Komitmen Tanda Daftar Gudang (TDG). Pemenuhan Komitmen SIUP mengurus hanya membutuhkan waktu 5 (lima) hari dengan persyaratan 5 (lima) dokumen saja. Pada TDG lama proses perizinan hanya membutuhkan waktu 5 (lima) hari dengan kebutuhan dokumen sebanyak 5 (lima) dokumen. Kebijakan serupa juga diterapkan pada Pemenuhan Komitmen Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) yang tidak membebankan biaya pengurusan dan hanya membutuhkan waktu pengurusan selama 5 (lima) hari saja dengan jumlah persyaratan dokumen sebanyak 5 (lima) dokumen.

Pada Izin Pemakaian Kekayaan Daerah Tanah dan/atau Bangunan milik Pemerintah Kota Madiun, izin lama mengurus membutuhkan waktu 5 (lima) hari dengan jumlah persyaratan sebanyak 2 (dua) dokumen.

Kasus yang sama terjadi pada izin reklame yang besaran retribusinya diatur dalam Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Untuk lama mengurus membutuhkan 5 (lima) hari dengan persyaratan dokumen sebanyak 5-6 dokumen. Pada pemenuhan komitmen izin sarana dan tenaga kesehatan waktu yang diperlukan untuk mengurus proses perizinan sebanyak 5 (lima) hari dengan jumlah persyaratan dokumen sebanyak 6-7 dokumen. Sedangkan untuk Pemenuhan Komitmen Izin Mendirikan Bangunan merupakan izin yang membutuhkan proses perizinan paling lama yaitu 30 (tiga puluh hari).

Tabel 2.168
Lama Proses Perizinan di Kota Madiun Tahun 2020

Uraian	Lama Mengurus (hari)	Jumlah Persyaratan (dokumen)	Biaya Pengurusan (Rp)
SEKSI PELAYANAN PEMBANGUNAN DAN PEMERINTAHAN			
Pemenuhan Komitmen Izin Mendirikan Bangunan - Fungsi Hunian - Fungsi Usaha - Fungsi Sosbud - Fungsi Keagamaan - Fungsi Campuran	30 (Tiga Puluh)	8 (Delapan)	1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 19/PRT/M/2018 Tentang Penyelenggaraan IMB dan SLF melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik ; 2. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 10 Tahun 2015 tentang Retribusi IMB.
Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	5 (Lima)	13 (Tiga Belas)	Tidak Ada
Izin Pemakaian Kekayaan Daerah - Bahu Badan Jalan - Penurunan Trotoar - Gedung dan/atau Lapangan - Tanah dan/atau Bangunan	5 (Lima) 5 (Lima) 5 (Lima) 5 (Lima)	3 (Tiga) 3 (Tiga) 3 (Tiga) 2 (Dua)	Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
Pemenuhan Komitmen Izin Lokasi	5 (Lima)	10 (Sepuluh)	Tidak Ada
Izin Penempatan Penggunaan Tanah (IPPT)	5 (Lima)	11 (Sebelas)	Tidak Ada
Izin Penempatan Bangunan Reklame	30 (Tiga Puluh)	11 (Sebelas)	Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 10 Tahun 2015 tentang Retribusi IMB
Pemenuhan Komitmen Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek	5 (Lima)	6 (Enam)	Tidak Ada
SEKSI PELAYANAN PEREKONOMIAN			
Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri (IUI)/Perluasan Izin Usaha Industri	5 (Lima)	3 (Tiga)	Tidak Ada
Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	5 (Lima)	5 (Lima)	Tidak Ada
Pemenuhan Komitmen Tanda Daftar Gudang (TDG)	5 (Lima)	5 (Lima)	Tidak Ada
Izin Usaha Rumah Kost/Pemondokan	5 (Lima)	5 (Lima)	Tidak Ada

Uraian	Lama Mengurus (hari)	Jumlah Persyaratan (dokumen)	Biaya Pengurusan (Rp)
Pemenuhan Komitmen Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	5 (Lima)	5 (Lima)	Tidak Ada
Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB) - Golongan B dan C	5 (Lima)	9 (Sembilan)	Peraturan Daerah Kota Madiun No. 8 Tahun 2017 tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol dan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, pasal 18 retribusi tempat penjualan Minuman Beralkohol : a. Bar termasuk PUB dan Klub Malam, sebesar Rp. 150.000.000,- b. Hotel berbintang 3, berbintang 4, dan berbintang 5 sebesar Rp. 125.000.000,- c. Restoran berbintang 2 dan berbintang 3 Rp. 90.000.000,- d. <i>Supermarket</i> dan <i>Hypermarket</i> Rp. 75.000.000,-
Pemenuhan Komitmen Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)	5 (Lima)	5 (Lima)	Tidak Ada
Pemenuhan Komitmen Pendidikan Non Formal (PNF)	5 (Lima)	5 (Lima)	Tidak Ada
Pemenuhan Komitmen Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan	5 (Lima)	5 (Lima)	Tidak Ada
Pemenuhan Komitmen Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)	5 (Lima)	5 (Lima)	Tidak Ada
SEKSI PELAYANAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			
Izin Reklame - Permanen - Insidental Spanduk, Umbul-umbul, Banner, Baliho	5 (Lima) 3 (Tiga)	6 (Enam) 3 (Tiga)	1. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah ; 2. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Reklame; 3. Peraturan Walikota Madiun Nomor 42 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 44 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Reklame.
Pemenuhan Komitmen Izin Sarana Kesehatan/Izin Sarana Kesehatan (18 Jenis)	5 (Lima)	6 (Enam)	Tidak Ada
Izin Tenaga Kesehatan (32 Jenis)	5 (Lima)	7 (Tujuh)	Tidak Ada
Pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Penyimpanan Limbah B3	5 (Lima)	10 (Sepuluh)	Tidak Ada
Pemenuhan Komitmen Izin Pembuangan Air Limbah (IPAL)	5 (Lima)	18 (Delapan Belas)	Tidak Ada
Izin Pasar - Penempatan Pedagang Pasar - Reklame Dalam Pasar - Pengelolaan Parkir dan KM/WC - Promosi dalam Pasar	5 (Lima) 5 (Lima) 5 (Lima) 5 (Lima)	3 (Tiga) 3 (Tiga) 3 (Tiga) 4 (Empat)	Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Kota Madiun Nomor 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Madiun, 2021

2.4.3.6 Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah

Pajak dan retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan suatu daerah. Semakin sedikit macam pajak dan retribusi pajak suatu daerah yang dibebankan kepada investor atau pelaku bisnis, maka semakin menarik minat investor untuk berinvestasi. Jenis pajak daerah yang dikenakan di Kota Madiun terdiri dari 9 jenis pajak yaitu: pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, parkir, air bawah tanah, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sementara itu, jenis retribusi yang dikenakan kepada masyarakat terdiri dari Retribusi Jasa Umum (retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, pelayanan parkir di tepi jalan umum, pelayanan pasar, dan pengujian kendaraan bermotor), Retribusi Jasa Usaha (retribusi pemakaian kekayaan daerah, terminal, tempat kusus parkir, rumah potong hewan, dan tempat rekreasi dan olah raga), dan Retribusi tempat Perizinan Tertentu (retribusi izin mendirikan bangunan, izin tempat penjualan minuman berakohol, izin gangguan, dan izin trayek).

Tabel 2.169

Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah di Kota Madiun Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah	15	15	15	15	15

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun, 2021

2.4.3.7 Persentase Perda yang mendukung Dunia Usaha

Peraturan daerah berperan penting sebagai peraturan yang menjamin adanya kepastian bagi semua pemangku kepentingan termasuk investor di dalamnya. Adanya perda menjamin terciptanya iklim investasi yang kondusif. Dalam rangka direvisi dengan Perda Nomor 32 Tahun 2018. Secara umum, Perda di menggairahkan iklim investasi di Kota Madiun, Pemerintah Kota Madiun bersama DPRD Kota Madiun telah menyusun aturan main investasi melalui Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penanaman Modal yang telah Kota Madiun seluruhnya mendukung dunia usaha karena pada dasarnya Perda yang ada merupakan aturan yang telah digariskan oleh Pemerintah Pusat. Selain itu, dalam proses pembuatan Perda di Kota Madiun telah melibatkan masyarakat karena seluruh Perda yang ada telah dilakukan konsultasi publik.

Tabel 2.170

Persentase Perda yang Mendukung Dunia Usaha di Kota Madiun, 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Perda (%)	100	100	100	100	100

Sumber: Sekretariat Daerah dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2021

2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

2.4.4.1 Kualitas Tenaga Kerja

Sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor terpenting kemajuan dan pembangunan suatu wilayah. Lebih detailnya, SDM yang berkualitas memiliki andil besar dalam kemajuan dan pembangunan tersebut. SDM yang berkualitas pada suatu daerah dapat dilihat dari produktivitas tenaga kerja yang usianya antara 15-64 tahun yang dimiliki daerah tersebut dan dapat pula dilihat dari tingkat pendidikannya. Diharapkan, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin berkualitas pula orang tersebut.

Tabel 2.171

Persentase Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Jenjang Pendidikan Tertinggi di Kota Madiun, 2020

No.	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Angkatan Kerja			
		Bekerja	Pengangguran Terbuka	Jumlah	Persentase yg bekerja
1	s/d SD	12.616	1.043	13.659	92,36
2	SMP	10.906	1.039	11.945	91,30
3	SMA	44.809	3.944	48.753	91,91
4	Perguruan Tinggi	22.003	2.169	24.172	91,03
Total		90.334	8.195	98.529	91,68

Sumber: BPS Kota Madiun, 2021

Berdasarkan tabel di atas, penduduk yang bekerja di Kota Madiun sebagian besar didominasi oleh lulusan pendidikan menengah. Penduduk yang bekerja dengan kualifikasi jenjang pendidikan SMA adalah sebanyak 44.809 orang. Sementara itu, penduduk yang bekerja dengan kualifikasi pendidikan perguruan tinggi sebanyak 22.003 orang. Walaupun rasio penduduk bekerja dengan jenjang pendidikan universitas cukup tinggi, masih banyak penduduk bekerja di Kota Madiun dengan kualifikasi pendidikan SD. Diharapkan ke depannya, dengan semakin meningkatnya rata-rata lama sekolah dan tingkat kesadaran akan masyarakat akan pentingnya pendidikan yang tinggi, persentase penduduk yang bekerja dengan kualifikasi universitas akan terus meningkat.

Selain itu, dengan perkembangan teknologi yang cepat dan berbagai jenis pekerjaan baru yang tercipta karena hal tersebut, membutuhkan lulusan universitas untuk mengisinya dan penduduk yang hanya memiliki kualifikasi pendidikan dasar akan terpinggirkan dan menciptakan ketidakmerataan.

2.4.4.2 Rasio Ketergantungan

Tingkat ketergantungan penduduk digunakan untuk melihat gambaran besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk muda berusia di bawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia di atas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun, adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. Meskipun tidak terlalu akurat, rasio ketergantungan semacam ini memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi.

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. *Dependency ratio* merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi persentase *dependency ratio*, maka semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Tabel 2.172

Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia di Kota Madiun, 2016-2020

No.	Golongan Usia (Tahun)	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	0 ≤ 5	9.658	12.271	12.215	12.211	12.218
2.	5 ≤ 10	14.040	12.583	14.106	14.163	14.164
3.	10 ≤ 15	15.948	12.018	15.520	15.494	15.469
4.	15 ≤ 20	18.408	13.874	17.246	16.924	16.863
5.	20 ≤ 25	14.888	12.519	15.147	15.434	15.455
6.	25 ≤ 30	13.841	12.245	14.020	14.042	14.096
7.	30 ≤ 35	15.399	13.025	14.605	14.147	14.075
8.	35 ≤ 40	17.657	12.506	17.340	17.086	17.089

No.	Golongan Usia (Tahun)	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
9.	40 ≤ 45	16.673	12.998	16.660	16.998	17.034
10.	45 ≤ 50	16.140	13.460	15.744	15.618	15.602
11.	50 ≤ 55	13.832	13.138	13.945	14.417	14.400
12.	55 ≤ 60	12.433	11.872	12.357	12.195	12.211
13.	60 ≤ 65	10.185	8.435	30.886	31.386	31.406
14.	65 ≤ 70	7.280	5.906			
15.	70 ≤ 75	4.689	4.190			
16.	≥ 75	8.966	5.059			

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun, 2021

Bila dicermati, rasio ketergantungan pada tahun 2020 adalah sebesar angka 42,57%. Hal ini berarti setiap 100 orang penduduk usia produktif mempunyai tanggungan sebanyak 43 orang usia belum dan tidak produktif. Melihat pada kurun waktu 2016-2020, angka rasio ketergantungan besarnya fluktuatif setiap tahunnya. Namun antara tahun 2016-2019 angka ketergantungan terus mengalami peningkatan, meski akhirnya di tahun 2020 terjadi sedikit penurunan. Terkait dengan Indeks Pembangunan Manusia, penurunan angka ketergantungan akan memberi dampak positif bagi usia produktif untuk meningkatkan kualitas dirinya. Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap naiknya angka Indeks Pembangunan Manusia, jika mereka dapat memperoleh akses untuk pengembangan dirinya. Seperti akses ke pendidikan dan pelatihan, fasilitas kesehatan, dan akses ke sumber modal untuk meningkatkan usahanya. Jika mereka tidak mendapatkan akses tersebut, maka bonus demografi yang ditandai dengan makin menurunnya angka ketergantungan justru akan menjadi malapetaka. Sebuah bencana bagi suatu daerah karena, banyak penduduk usia produktif yang tidak berpendidikan dan tidak mempunyai pekerjaan, akibatnya dapat meningkatkan angka kriminalitas.

Tabel 2.173
Usia Produktif, Usia Tidak Produktif di Kota Madiun, 2016-2020

No.	Keterangan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Usia Produktif (jiwa)	149.456	124.072	147.225	147.256	147.297
2.	Usia Tidak Produktif (jiwa)	60.581	52.027	62.572	62.859	62.707
3.	Beban Ketergantungan (%)	40,53	41,93	42,50	42,69	42,57

Sumber: BPS Kota Madiun, 2021

Selanjutnya evaluasi pelaksanaan RPJMD kota Madiun sampai dengan tahun 2020 dapat diuraikan beberapa hal penting sebagai berikut:

1. Target indikator tujuan dan sasaran sampai dengan tahun 2020 yang belum memenuhi target masing-masing sebesar 57% (4 dari 7 indikator tujuan yang mencapai target) dan 67% (16 dari 24 indikator sasaran yang mencapai target kinerja).
2. Selanjutnya jika dilihat capaian indikator kinerja tujuan dan sasaran per Misi, pada misi I sampai dengan tahun 2020, Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE), Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah, dan Indeks Pemberdayaan Gender masih belum mencapai target yang ditentukan. Pada misi kedua, kinerja ruas jalan belum memenuhi target. Pada misi ketiga, realisasi kinerja telah mencapai target yang ditetapkan. Sedangkan pada misi keempat, PDRB perkapita, pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, TPT, ICOR, pertumbuhan sektor perdagangan dan pengolahan jauh di bawah target sebagai dampak pandemi Covid-19.

Secara lebih detail capaian kinerja pelaksanaan RPJMD Kota Madiun 2019–2024 sampai dengan tahun 2020, baik dari capain indikator tujuan dan sasaran, maupun 3 aspek pembangunan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.174
Evaluasi Pelaksanaan RPJMD sampai tahun 2020 pada aspek capaian indikator tujuan dan sasaran

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2018	Realisasi 2019	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian Kinerja	Target Akhir Periode 2024	Permasalahan	Akar Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	MISI 1: Mewujudkan Pemerintahan yang Baik (Good Governance)	Tujuan 1. Terwujudnya Pemerintahan yang Baik		Indeks Reformasi Birokrasi	B	B	B	B	B	A	Tata kelola pemerintahan dalam pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan	Indeks reformasi birokrasi belum optimal
			Sasaran 1.1. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	3,3056 (sangat tinggi)	3,3056 (sangat tinggi)	3,11 (sangat tinggi)	3,385 (sangat tinggi)	109,01%	3,125 (sangat tinggi)		Masih perlu ditingkatkannya kapasitas pengelolaan pemeritahan
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,85 (baik)	88,45	83 (baik)	85,501 (baik)	103%	87 (baik)		Masih perlu ditingkatkannya kualitas pelayanan terhadap masyarakat
				Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	3,16 (baik)	3,16 (baik)	3,36 (baik)	2,82 (baik)	89,24%	3,96 (baik)		Masih perlu ditingkatkannya sistem informasi berbasis elektronik
				Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	B (63,5)	BB (68,20)	BB (70,01)	BB (68,20)	92,20%	A (80,01)		Masih perlu ditingkatkannya kualitas aparatur
			Sasaran 1.2. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	100%	WTP		Dapat dipertakankan hingga target akhir RPJMD

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2018	Realisasi 2019	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian Kinerja	Target Akhir Periode 2024	Permasalahan	Akar Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Sasaran 1.3. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Pemangku Kepentingan	Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi Swasembada	3,7 % (1 kelurahan)		14,81% (4 kelurahan)	18,50% (5 kelurahan)	124,90%	62,96% (17 kelurahan)		Masih perlu ditingkatkannya,partisipasi pembinaan lembaga pemberdayaan masyarakat
				Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	83,02	77,07	83,25	77,05	92,57%	84,56		Masih terbatasnya pengarusutamaan gender
2	MISI 2: Mewujudkan Pembangunan yang berwawasan lingkungan	Tujuan 1. Terwujudnya Infrastruktur Kota yang Berwawasan Lingkungan		Indeks Kenyamanan Kota (livable City)	Belum ada perhitungan	85,32	80,73	86,67	107,36 %	89,01		Masih perlu ditingkatkannya indeks kenyamanan kota
			Sasaran 2.1. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur, sarana transportasi kota dan Permukiman	Indeks Sarana-Prasarana Pemukiman	82,23	82,33	86,62	87,12	100,58%	94		Masih perlu ditingkatkannya kualitas sarana prasarana diruang publik
				Kinerja Ruas Jalan	0,45	0,44	0,44	0,38	116%	0,4		Masih perlu ditingkatkannya kondisi jalan berkategori baik
				Indeks Infrastruktur	Belum ada perhitungan	96,72	96	96,85	100,89	98,59		Masih terbatasnya indeks infrastruktur ekonomi daerah
			Sasaran 2.2: Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	64,22	63,87	65,04	65,42	100,60%	66,1		Masih perlu ditingkatkannya sanitasi dan penyediaan air dan udara yang bersih
				Persentase Ruang yang dimanfaatkan RTRW	100	100	100	100	100%	100		Dapat dipertakankan hingga target akhir RPJMD

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2018	Realisasi 2019	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian Kinerja	Target Akhir Periode 2024	Permasalahan	Akar Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	MISI 3: Meningkatkan kualitas hidup Masyarakat Kota Madiun	Tujuan 1. Terwujudnya Masyarakat Kota Madiun yang berkualitas baik		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	80,33	80,88	80,51	80,91	100,50%	80,98	Indeks Pembangunan manusia sudah sangat tinggi namun belum mencapai target akhir RPJMD	Masih perlu ditingkatkannya angka HLS dan RLS dan masih perlu ditingkatkannya pelayanan kesehatan rujukan di RSUD Kota Madiun
			Sasaran 1.1. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Kota Madiun	Indeks Kesehatan	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81		Belum terpenuhinya target SMP pelayanan bidang kesehatan
			Sasaran 1.2. Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat Kota Madiun	Indeks Pengetahuan	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77		Masih perlu ditingkatkannya tenaga pendidik SD/MI dan SMP/MTs dengan lulusan S1/S2/S3
4	MISI 4: Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Memeratakan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kota Madiun	Tujuan 1. Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat		Pertumbuhan PDRB	5,96	5,69	6,01	-3,39	-56,00%	6,05	Menurunnya pertumbuhan Ekonomi	Belum meratanya pertumbuhan ekonomi antar wilayah
				PDRB Per Kapita	68,9	60,01	76,53	52,58	68,70%	87,41	Menurunnya PDRB perkapita	Nilai tambah sektor unggulan masih terbatas
				Angka Kemiskinan	4,49	4,53	4,47	4,98	88,96%	4,43	Meningkatnya tingkat Kemiskinan	Masih perlu ditingkatkannya jaring pengaman sosial

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2018	Realisasi 2019	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian Kinerja	Target Akhir Periode 2024	Permasalahan	Akar Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Sasaran 1.1. Terwujudnya Iklim Investasi yang Kondusif, dan peningkatan Penyerapan Tenaga Kerja	ICOR	2,61		2,55	-0,91	235,86%	2,3		Masih perlu ditingkatkannya investasi modal terhadap hasil yang akan diperoleh
				Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,85	4,01	3,8	8,32	-18,90%	3,45		Kurang optimalnya penyerapan tenaga kerja
			Sasaran 1.2. Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Pertumbuhan Sektor Perdagangan	5,82	6,2	5,91	-11,18	-183,20%	6,23		Masih perlu ditingkatkannya penerimaan PAD dari beberapa macam retribusi
				Pertumbuhan Sektor Pengolahan	n.a	7,3	7,3	-12,84	-175%	7,41		Masih perlu ditingkatkannya industri pengolahan
				Pertumbuhan Sektor Pariwisata	8,6	8,6	8,7	8,6	95,56%	9		Masih perlu ditingkatkannya sarana ruang kreatif sebagai ekspresi, promosi bagi masyarakat
			Sasaran 1.3. stabilitas Ketersediaan Pangan dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Rasio Ketersediaan Pangan Utama dan konsumsi pangan	1,02	1,02	1,03	1,38	134%	1,07		Berkurangnya lahan pertanian akibat alih lahan pertanian
				Indeks Gini	0,36	0,35	0,35	0,39	100%	0,35		Masih terjadinya ketimpangan antar wilayah khususnya antar kelurahan
		Tujuan 2. Terwujudnya Stabilitas Kehidupan Masyarakat		Indeks Ketentraman	n.a	n.a	75	72	96%	85	Masih perlu ditingkatkannya toleransi kehidupan masyarakat	Masih perlu ditingkatkannya tingkat penyelesaian pelanggaran K3

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2018	Realisasi 2019	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian Kinerja	Target Akhir Periode 2024	Permasalahan	Akar Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		yang Dinamis dan Kondusif	Sasaran 2.1. Meningkatnya Kerukunan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Pemuda yang Berprestasi	Indeks Kerukunan	n.a	2,6	2,77 (tinggi)	3,7 (tinggi)	133,50%	3,30 (sangat tinggi)		Masih perlu ditingkatkannya kesadaran masyarakat dalam menjaga kerukunan
				Prestasi Pemuda dan Olahraga ditingkat regional dan nasional	33	52	33	79	239,39%	36		Masih perlu ditingkatkannya prestasi pemuda dan olahraga
				Sasaran 2.2. Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Indeks Rasa Aman	n.a	73	76	76,05	100,07%	85	

Tabel 2.175
Evaluasi Pelaksanaan RPJMD sampai tahun 2020 pada Tiga Aspek Pembangunan Daerah

NOMOR	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	REALISASI	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	TARGET AKHIR PERIODE	CAPAIAN KINERJA 2020 TERHADAP 2024	STATUS CAPAIAN /EVALUASI CAPAIAN /PERMASALAHAN	
			2018	2019	2020	2020	2020 (6/5)	2024	(6/8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT										
a	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi										
	1	Laju Pertumbuhan PDRB	Persen	5,96	5,69	6,01	-3,39	-56,40%	6,05	-56,03	Tidak Tercapai
	2	PDRB Per Kapita	Juta	68,9	60,01	76,53	52,58	68,70%	85,34	61,61	Tidak Tercapai
	3	Angka Kemiskinan	Persen	4,49	4,53	4,47	4,98	89,76%	4,43	88,96	Tidak Tercapai
	4	Indeks Gini		0,36	0,35	0,35	0,35	100%	0,34	97,14	Tercapai
b	Fokus Kesejahteraan Sosial										
	1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		80,33	80,88	80,51	80,91	100,50%	80,98	99,914	Tercapai
	I	Bidang Urusan Sosial									
	1	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Persen	100	100	100	100	100%	100	100%	Tercapai
	2	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Persen	100	100	100	100	100%	100	100%	Tercapai
	3	Jumlah Warga Negara lanjut Usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Persen	100	100	100	100	100%	100	100%	Tercapai
	4	Jumlah warga negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	Persen	100	100	100	100	100%	100	100%	Tercapai
	5	Jumlah Warga Negara Korban Bencana Kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	Persen	100	100	100	100	100%	100	100%	Tercapai
	6	Persentase Penurunan PMKS	Persen			1,5			10		
	7	Persentase PMKS yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal	Persen	80		91			91		

NOMOR	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	REALISASI	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	TARGET AKHIR PERIODE	CAPAIAN KINERJA 2020 TERHADAP 2024	STATUS CAPAIAN /EVALUASI CAPAIAN /PERMASALAHAN	
			2018	2019	2020	2020	2020 (6/5)	2024	(6/8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I	Bidang Urusan Pendidikan										
	1		jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar(SD/MI, SMP/MTs)	27.714		26.937			26.314		
	2		jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	54		46			41		
	3		jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	5.768		5.213			4.495		
	4		Indeks Pengetahuan	0,77	0,77	0,77	0,77	100%	0,77	100%	Tercapai
	5		Rata-rata Lama Sekolah	11,1	11,13	11,12	11,14	100,18%	11,16	99,82	Tercapai
	6		Harapan Lama Sekolah	14,2	14,39	14,22	14,4	101,27%	14,26	100,98	Tercapai
	7		Persentase Sekolah Standar Nasional Pendidikan	Persen 80		85			100		
	8		Persentase Jumlah tenaga pendidik yang bersertifikasi	Persen 76,66		78	125 guru		100		
	9		Angka Partisipasi Murni SD/SMP	152,99	133,69	100%	127,04	127,04%	100	127,04	Tercapai
	10		Angka Partisipasi Kasar PAUD	106,7	109	100%	95,61	95,61%	100	95,61	Tercapai
	11		Jumlah Lembaga non formal yang Terakreditasi	80 lembaga		90 lembaga	106 lembaga		136 lembaga		
II	Bidang Urusan Kesehatan										
	1		Persentase ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen 100	100	100	100	100%	100	100%	Tercapai
	2		Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen 100	100	100	100	100%	100	100%	Tercapai
	3		Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen 100	100	100	100	100%	100	100%	Tercapai
	4		Persentase balita yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen 100	100	100	100	100%	100	100%	Tercapai
	5		Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang	Persen 100	100	100	100	100%	100	100%	Tercapai

NOMOR	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	REALISASI	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	TARGET AKHIR PERIODE	CAPAIAN KINERJA 2020 TERHADAP 2024	STATUS CAPAIAN /EVALUASI CAPAIAN /PERMASALAHAN
			2018	2019	2020	2020	2020 (6/5)	2024	(6/8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	mendapatkan layanan kesehatan									
6	Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	79,49	107,18%	100			100		
7	Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	65,62	93,12%	100			100		
8	Persentase warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	82,6	89,21%	100			100		
9	Persentase warga negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	83,55	106,54%	100			100		
10	Persentase warga negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	Persen	100	107,44%	100			100		
11	Persentase warga negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	100	100%	100			100		
12	Persentase warga negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>human immunodeficiency virus</i>) yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	101,27	103,70%	100			100		
13	Indeks Kesehatan		0,81	0,81	0,81	0,81	100%	0,81	100	Tercapai
14	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kesehatan	Persen	81,32	81,84	81,4	74,94	92,06%	81,48	91,97	Tidak Tercapai
15	Indeks Keluarga Sehat		0,33		0,37			0,45		
16	Status Akreditasi SNARS				Lulus Paripurna Akreditasi SNARS					
17	Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD Kota Madiun		78,17		79,17			83,15		
18	Persentase Pencapaian Standart Pelayanan Minimal Rumah Sakit	Persen	71,15		73,92	50		85		

NOMOR	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	REALISASI	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	TARGET AKHIR PERIODE	CAPAIAN KINERJA 2020 TERHADAP 2024	STATUS CAPAIAN /EVALUASI CAPAIAN /PERMASALAHAN
			2018	2019	2020	2020	2020 (6/5)	2024	(6/8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6	Indeks Ketentraman	-		75	72	96	85	84,71	Tidak Tercapai
	7	Indeks Rasa Aman	-		76	76,05	100,07	85	89,47	Tercapai
	8	Persentase Masyarakat yang taat perda dan perwal	98		96	100%		98		
	9	Persentase Tingkat Penanganan Kejadian Kebakaran	100%		100%	100%		100%		
	10	Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kota	1 orang setiap RT		1 orang setiap RT	1.3 orang setiap RT		1 orang setiap RT		
	11	Persentase Kasus Penegakan Perda yang diselesaikan	100	100	100	100		100		
	12	Prosentase Kasus K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) yang diselesaikan	98,83		96%	97%		9800%		
	13	Tingkat Waktu Tanggap (response time rate)	100%	100	100%	100%		100%		
	14	Persentase Penanggulangan Korban Bencana	100	100	100	100		100		
	15	Persentase Early Warning System (EWS) di daerah rawan Bencana			100	100		100		
	16	Persentase Korban Bencana yang tertangani			100	100		100		
	17	Persentase Korban Bencana Alam yang ditangani			100			100		
2	Tidak Terkait Pelayanan Dasar									
I	Bidang Urusan Tenaga Kerja									
	1	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,85	4,01	3,8	8,32	45,67	3,45	41,47	Tidak Tercapai
	2	Persentase Tingkat Partisipasi angkatan kerja		66,86	50	66,63	133,26	70	95,19	Tercapai
	3	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	79	85,52	79	57,28	72,51	79,8	71,78	Tidak Tercapai
	4	Persentase Tenaga Kerja yang terlindungi	60		60			70		
	5	Persentase lulusan pelatihan yang berkompeten	80		80	35 orang		84		

NOMOR	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	REALISASI	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	TARGET AKHIR PERIODE	CAPAIAN KINERJA 2020 TERHADAP 2024	STATUS CAPAIAN /EVALUASI CAPAIAN /PERMASALAHAN
			2018	2019	2020	2020	2020 (6/5)	2024	(6/8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II	Bidang Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil									
	1	Persen			99,92	100		99,96		
	2	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
	3	Persen	97,02	98,35	98	99,34	101,37	99,3	100,04	Tercapai
	4	Persen	-		80			99,5		
	5	Persen	98,44	100	98,5	98,9	100,41	98,9	100	Tercapai
	6	Persen	98		98			98,8		
	7	Persen	98,5	100	98,7	100	101,32	99,2	100,81	Tercapai
	8	Persen	81,03		82	100%		89,5		
	9	Persen	99,51		92	99,12%		98,5		
	10	Persen	99		98			99,6		
III	Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
	1		83,02	77,07	83,25			84,56		
	2	Persen	48,34	99,73	48,5	25,21		52		
	3	Persen	13,32	12,78	13,32	12,72	95,50	13,5	94,22	Tidak Tercapai
IV	Bidang Urusan Pangan									
	1		1,02		1,03	1,38		1,07		
	2	Persen	0,17		0,18			0,22		

NOMOR	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	REALISASI	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	TARGET AKHIR PERIODE	CAPAIAN KINERJA 2020 TERHADAP 2024	STATUS CAPAIAN /EVALUASI CAPAIAN /PERMASALAHAN	
			2018	2019	2020	2020	2020 (6/5)	2024	(6/8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	3	Indeks Ketahanan Pangan	80		80,2	80,64		81			
	4	Skor Pola Pangan Harapan	95,4	95,7	95,6	95,9	100,31	96,4	99,48	Tercapai	
V		Bidang Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									
	1	Persentase Peserta KB Aktif MKJP	Persen	42,73		42,74	42,88		42,78		
VI		Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika									
	1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		3,16 (baik)	3,16 (Baik)	3,20 (baik)	2,82	89,24	3,56 (baik)	79,21	Tidak Tercapai
	2	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik		87,1		87,25			88,25		
	3	Nilai Domain Layanan SPBE		3,12		3,2			3,6		
	4	Persentase pelayanan publik yang sudah terintegrasi	Persen	25		35	33,40		75		
	5	Persentase sasaran penyebaran informasi publik	Persen	75		80	75		100		
	6	Persentase Penyebaran Informasi tentang Cukai	Persen	100		100	89		100		
VII		Bidang Urusan Statistik									
	1	Persentase Data Statistik Sektoral yang Terintegrasi	Persen	50		75	60		95		
VIII		Bidang Urusan Persandian									
	1	Persentase PD yang mengimplementasikan keamanan informasi		8,8		25	25		85		
IX		Bidang Urusan Perpustakaan									
	1	Persentase Peningkatan Kunjungan Perpustakaan	Persen			50%	33,25%		500%		
	2	Nilai IKM Pemustaka terhadap layanan perpustakaan	Persen			700%			7800%		
X		Bidang Urusan Kearsipan									
	1	Persentase Unit Kearsipan yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku	Persen			2,29	5 unit		2,29		
	2	Jumlah Berkas Arsip Yang Dikelola		55.323 berkas		500 berkas			500 berkas		

NOMOR	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	REALISASI	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	TARGET AKHIR PERIODE	CAPAIAN KINERJA 2020 TERHADAP 2024	STATUS CAPAIAN /EVALUASI CAPAIAN /PERMASALAHAN	
			2018	2019	2020	2020	2020 (6/5)	2024	(6/8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
3	Fokus Pelayanan Urusan Pilihan										
I	Bidang Urusan Transmigrasi										
	1	Persentase pendaftar transmigrasi yang terfasilitasi	Persen	80		80	80	100	84		
4	Pelayanan Urusan Penunjang Pemerintahan										
I	Unsur Staf										
	1	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah Daerah		B (63,5)	B (68,20)	BB (70,01)	B (68,2)	97,2	A (80,01)		
	2	Nilai evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan		3,3056 Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	3,1 Sangat Tinggi	3,385 Sangat Tinggi	109,1	3,125 Sangat Tinggi	99,2 Sangat Tinggi	Tercapai
	3	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Persen	82,85 (baik)	88,45	83 (baik)	89,12	103	87 (baik)	95,40	Tercapai
	4	Persentase Capaian Kinerja Indikator Sasaran Kota (LKJ Kota) Sesuai Target yang ditetapkan	Persen	73,68		74			82		
	5	persentase jumlah pengadaan barang/jasa yang terealisasi	Persen	100		100	100	100	100		
	6	persentase OPD yang melaporkan progres fisik dan keuangan tepat waktu sesuai jadwal pelaksanaan	Persen	100		100			100		
	7	jumlah kegiatan keagamaan yang difasilitasi		14		15	15	100	16		
	8	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang indeks Kepuasan Masyarakatnya Bernilai Baik	Persen	100%		100%			100%		
	9	Nilai IKM Bagian Umum	Persen	80,79		81			83		
	10	IKM di Bidang Administrasi dan Keuangan	Persen	80,77		81			83		
	11	IKM di Bidang Kerumahtanggaan	Persen	80,74		81			83		
	12	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di bidang keprotokolan dan kepegawaian	Persen	80,92		81			83		
	13	Pelayanan Dibidang Hukum		3 jenis		3 jenis			3 jenis		

NOMOR	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	REALISASI	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	TARGET AKHIR PERIODE	CAPAIAN KINERJA 2020 TERHADAP 2024	STATUS CAPAIAN /EVALUASI CAPAIAN /PERMASALAHAN	
			2018	2019	2020	2020	2020 (6/5)	2024	(6/8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	14	Persentase Pencapaian Kinerja Pemerintahan Tepat waktu	Persen	100		100			100		
	15	Persentase Pelayanan Kedinasan Pimpinan	Persen	100		100	105	105	100		
	16	Jumlah Dokuem Pertanggungjawaban Kepala Daerah yang tepat syarat		6 dokumen		6 dokumen	6 dokumen	100	9 dokumen		
	17	Jumlah Perjanjian Kerjasama		5 kerjasama		5 kerjasama	10 Kerjasama	200	5 kerjasama		
	18	Persentase Produk Hukum yang Berkualitas	Persen	100		100	100	100	100		
	19	Nilai Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik		2,4 (cukup dengan catatan)		2,55 (cukup)	2,75	108	3,15 (baik)		
	20	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai regulasi	Persen	100		100			100		
	21	Persentase Perangkat Daerah yang Capaian Kinerja (LKJ Perangkat Daerah) Bernilai Sangat Baik (≥ 100)	Persen	79,41		80	94,12	118	88		
	22	Persentase Kegiatan Keagamaan yang difasilitasi	Persen	100		100	100	100	100		
	23	Persentase OPD yang melaksanakan kegiatan sesuai jadwal	Persen	100		100			100		
II		Unsur Pelayanan Administrasi dan Pemberian Dukungan terhadap Tugas dan Fungsi DPRD									
	1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Persen	79,53		78			82		
	2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap layanan Perundang-Undangan, Dokumentasi dan Rapat	Persen	81		80	80	100	84		
III		Unsur Pengawas Penyelenggraan Pemerintahan Daerah									
	1	Indeks reformasi birokrasi		B	B	B	B	100	A		

NOMOR	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	REALISASI	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	TARGET AKHIR PERIODE	CAPAIAN KINERJA 2020 TERHADAP 2024	STATUS CAPAIAN /EVALUASI CAPAIAN /PERMASALAHAN
			2018	2019	2020	2020	2020 (6/5)	2024	(6/8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2		Level maturitas SPIP Kota Madiun		2	2,2	3	136	3	
	3	Persen	Persentase Temuan Hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi	90		91	96,42	106	95	
	4		Level Kapabilitas APIP		2	2	2	100	3	
	5	Persen	Persentase OPD yang maturitas SPInya level 3	25		25			45	
	6	Persen	Persentase aparaturnya yang bersertifikat	100		100			100	
	7	Persen	Persentase Dokumen Kebijakan dan Sisdur Pengawasan yang Terpenuhi	100		100	25 Orang	100	100	
IV	Fungsi Penunjang Perencanaan									
	1		Sinergitas dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA-PPAS, RENSTRA, RENJA)			100			100	
	2	Persen	Persentase Capaian Kinerja atas Target Indikator Sasaran Strategis Kota Madiun			100			100	
	3		Sinergitas dokumen perencanaan Kota Madiun, Provinsi dan Nasional			100			100	
	4		Penerapan Kebijakan pembangunan daerah yang menerapkan konsep Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS)			100			100	
	5	Persen	Persentase Perangkat Daerah yang Dokumen Perencanaannya sesuai Ketentuan			100	100	100	100	
	6	Persen	Persentase Capaian target program pembangunan bidang ekonomi, sosial dan budaya			100	100	100	100	
	7	Persen	Persentase Dokumen Perencanaan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya yang dapat dimanfaatkan			100			100	

NOMOR	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	REALISASI	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	TARGET AKHIR PERIODE	CAPAIAN KINERJA 2020 TERHADAP 2024	STATUS CAPAIAN /EVALUASI CAPAIAN /PERMASALAHAN
			2018	2019	2020	2020	2020 (6/5)	2024	(6/8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi Swasembada	Persen	3,70 (1 Kelurahan)		14,81 (4 kelurahan)	18,5 (5 Kelurahan)	124,9	62,96 (17 kelurahan)	
	2	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Persen	100		100	100	100	100	
	3	Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada di kecamatan	Persen	-		11	22	100	100	
	4	Persentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	Persen	100		100	100	100	100	
	5	Persentase Hasil Koordinasi yang ditindak lanjuti	Persen	100		100	100	100	100	
	6	Persentase Usulan Musrenbang Kecamatan yang terakomodir dalam RKPD	Persen	10		11	10	90,91	15	
	7	Indeks perkembangan kelurahan		0,73		0,81	100		0,81	
III		ASPEK DAYA SAING DAERAH								
A		Kemampuan Ekonomi								
I		Bidang Urusan Koperasi Usaha Mikro dan Menengah								
	1	persentase pertumbuhan koperasi yang berkualitas	Persen			1,3	98,7	100	1,9	
	2	persentase pertumbuhan usaha mikro yang mandiri	Persen			0,005	0,42	102	0,005	
	3	Persentase koperasi aktif	Persen	98,05	98,05	98,69	98,71	100,02	98,73	99,98
	4	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro	Persen	0,4		0,41			0,45	
II		Bidang Urusan Penanaman Modal								
	1	Jumlah Nilai Realisasi Investasi		334 milyar		187 milyar	327.632.796.023		202 milyar	
	2	Persentase penyelesaian ijin yang diterbitkan tepat waktu	Persen			100%			100%	

NOMOR	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	REALISASI	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	TARGET AKHIR PERIODE	CAPAIAN KINERJA 2020 TERHADAP 2024	STATUS CAPAIAN /EVALUASI CAPAIAN /PERMASALAHAN
			2018	2019	2020	2020	2020 (6/5)	2024	(6/8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	Pertumbuhan Sektor Pengolahan			7,3	-12,84		7,41		
	2	persentase pertumbuhan industri	Persen	0,03	0,03			0,03		
	3	Persentase IKM yang Berstandart	Persen	17,09	17,09			17,17		
	4	Prosentase IKM yang melaksanakan GMP (Good Manufacturing Practice)	Persen	80	80			93		
VIII		Unsur Staf								
	1	jumlah kegiatan pendukung aktivitas ekonomi		4	4			4		
	2	Jumlah kegiatan terkait penyelesaian peredaran rokok ilegal		2	2			2		
	3	Tingkat Inflasi		4	4	1,8	222	4		
	4	Persentase Kelompok Sosial Ekonomi yang difasilitasi	Persen	100	100			100		
	5	Persentase Jumlah Kegiatan Sosialisasi Bidang Cukai Yang Dilaksanakan	Persen	100	100	100	100	100		
B		Fasilitas Wilayah Infrastruktur								
	1	Livable City (Indeks Kenyamanan Kota)	Indeks	NA	85,32	80,73	86,67	107,36	89,01	97,37
I		Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang								
	1	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari		100	100			100		
	2	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen		90			90		
	3	Indeks Infrastruktur	Indeks	NA	96,72	96	96,85	100,89	98,59	98,23
	4	Persentase Ruang yang dimanfaatkan RTRW	Persen	100	100	100	100	100	100	Tercapai
	5	Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kota yang mantab	Persen	94,51	93,64%	94	94,03%	100	96	
	6	Persentase Kawasan Bebas Banjir/genangan	Persen	95,64		94		95		

NOMOR	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	REALISASI	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	TARGET AKHIR PERIODE	CAPAIAN KINERJA 2020 TERHADAP 2024	STATUS CAPAIAN /EVALUASI CAPAIAN /PERMASALAHAN	
			2018	2019	2020	2020	2020 (6/5)	2024	(6/8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	7	Persentase Ketaatan Pemanfaatan ruang sesuai RTRW	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
	8	Persentase bangunan gedung sesuai ketentuan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
	9	Persentase Panjang Jalan Kota dalam Kondisi Baik	Persen	92,41	92,41	94	94,03	100,03	98	100	Tercapai
	10	Jumlah Titik/ Lokasi Banjir/ Tergenang		12	33	11	5	220	10	50	Tercapai
	11	Persentase Panjang Drainase dalam Kondisi Baik/ Pembuangan air tidak tersumbat	Persen	89,75	90,96	90,4	90,4	100	90,8	99,56	Tercapai
	12	Ketaatan terhadap RTRW	Persen	100%	100	100%	100	100	100%	100%	Tercapai
	13	Persentase terlayannya air bersih/ minum	Persen	93	93,3	95	96,58	101,66	97	99,57	Tercapai
II	Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman										
	1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi korban bencana kab/ kota	Persen	0		100%			100%		
	2	Fasilitasi rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi prpgram pemerintah daerah/ kab/ kota	Persen	0		100%			100%		
	3	Indeks Sarana Prasarana Permukiman		82,23		86,62	82,23	94,93	94		
	4	Indeks Perumahan Permukiman		99,51		99,53	99,65	100	99,65		
	5	Indeks Pengelolaan RTH, PJU dan Pemakaman		64,96		73,7	74,59	101	88,36		
	6	Persentase Rumah tinggal Layak Huni dan Bersanitasi	Persen	99,26	99,95	99,3	99,95	100,65	99,47		
	7	Persentase RTH, Penerangan Jalan dan Pemakaman yang dikelola	Persen	64,96		73,7	74,59	101	88,36		
III	Bidang Urusan Pertanahan										
	1	Persentase Rekomendasi Ijin Pertanahan yang diterbitkan	Persen	100		100	100	100	100		
IV	Bidang Urusan Lingkungan Hidup										
	1	Indeks Kualitas Air (IKA)		76,89	76,7	77,36	78,3	101,22	77,83	100,60	Tercapai

NOMOR	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	REALISASI	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	TARGET AKHIR PERIODE	CAPAIAN KINERJA 2020 TERHADAP 2024	STATUS CAPAIAN /EVALUASI CAPAIAN /PERMASALAHAN		
			2018	2019	2020	2020	2020 (6/5)	2024	(6/8)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	2		Indeks Kualitas Udara (IKU)		85,5	84,38	85,76	87,94	102,54	86,28	101,92	Tercapai
	3	Persen	Persentase Pengelolaan Sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga		93,68		97			99		
	4		Indek Kualitas Lingkungan Hidup		64,22	63,87	65,04	65,42	100,58	66,1	98,97	Tercapai
	5	Persen	Persentase data dan informasi Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup yang tersedia		58,97		64,1	64,1	100	79,5		
	6	Persen	Persentase titik sample kualitas air dan udara yang memenuhi baku mutu		44,70		47	53,19	113	50,1		
	7	Persen	Persentase pelaku usaha/kegiatan yang taat terhadap peraturan lingkungan hidup		31,39		41,2	44,59	108%	88,2		
	8	Persen	Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga		74,90		75	74,97	99%	71		
V			Bidang Urusan Perhubungan									
	1		Kinerja Ruas Jalan		0,45	0,45	0,44	0,38	116%	0,40		
	2		Kepadatan Lalu Lintas		48	36,93	47	33	142,42%	43		
	3	Persen	Persentase Perlengkapan jalan		58%	64%	67%	67%	100%	100%		
	4	Persen	Kinerja Angkutan Umum		38%	39%	39%	42%	107,69%	43%		

Tabel 2.176

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun

No	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
1.	Visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah serta pemanfaatan struktur dan pola ruang kabupaten/kota.	Visi dan misi RPJMD selaras dengan visi dan misi arah kebijakan pembangunan jangka Panjang sehingga tidak diperlukan perubahan Kebijakan, strategi, dan program pembangunan belum sepenuhnya memperhatikan pemanfaatan dan pola ruang kota dalam RTRW misalnya seperti Pembentukan sistem pusat kegiatan Kota Madiun sebagai pusat pengembangan, Pengembangan jaringan Telematika untuk peningkatan pelayanan akan kebutuhan komunikasi dan informasi di Kota Madiun yang memerlukan penyesuaian dengan perkembangan teknologi dan informasi terbaru
2.	Visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota selaras dengan arah, kebijakandijadikan pedoman dan acuan dalam meyusun dokumen. Sehingga memerlukan umum,serta prioritas pembangunan provinsi dan nasional, arah, kebijakan, dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan dalam RPJMD provinsi dan RPJMN sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah.	Perubahan RPJMN melalui perubahan Peraturan Presiden no 2 tahun 2015 tentang RPJMN tahun 2015 – 2019 menjadi Peraturan Presiden no 18 tahun 2020 tentang RPJMN 2020 – 2024. Dimana dalam RPJMD Kota Madiun 2019-2024 belum dijadikan pedoman dan acuan dalam meyusun dokumen. Sehingga memerlukan penyesuaian tujuan, sasaran, kebijakan dan strategi dalam RPJMD Kota Madiun Perubahan peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah dimana Peraturan Pemerintah no 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah di cabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah no 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah beserta aturan turuannnya (Peraturan Menteri Dalam Negeri no 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah di rubah menjadi Permendagri 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, terdapat aturan baru yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri no 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Sehingga mengakibatkan perubahan struktur anggaran nomenklatur SOTK di Kota Madiun. Dalam RPJMD 2019-2024 masih berpedoman pada aturan yang lama Perubahan kondisi sosial ekonomi sebagai dampak pandemic covid19 menyebabkan pergeseran arah dan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi yang perlu direspon dan penyesuaian di tingkat kota Madiun. Sehingga beberapa arah dan kebijakan pembangunan dalam RPJMD sudah tidak relevan lagi

No	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
3.	Kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota lainnya.	Adanya Peraturan Presiden (PERPRES) no 80 tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan, memerlukan perubahan kebijakan dan strategi tidak hanya pada RPJMD Kota Madiun 2019-2024 namun juga RPJMD daerah sekitar seperti Kabupaten Madiun, Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Magetan, Kota Kediri dan lain sebagainya. Terdapat beberapa daerah yang melakukan perubahan RPJMD sehingga diperlukan penyesuaian arah kebijakan dan strategi yang sesuai bagi Kota Madiun
4.	Program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang kabupaten/kota lainnya;	Dalam RPJMD Kota Madiun 2019-2024 belum memperhatikan pemanfaatan struktur dan pola ruang kabupaten/kota lainnya. Program pembangunan dalam RPJMD 2019 - 2024 terkait dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang hanya mengacu pada RT RW kota Madiun melalui Perda no 6 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010-2030
5.	Strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota mengarah pada pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota.	Strategi dalam RPJMD 2019 - 2024 masih bersifat umum dan belum secara spesifik / detail dan tanpa penjelasan yang mengarah pada pencapaian visi dan misi RPJMD Arah kebijakan dalam RPJMD 2019-2024 hanya pertahun dan tidak spesifik mengarah pada strategi pencapaian
6.	Sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJMD kabupaten/kota yang diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri ini.	Tahapan dalam penyusunan RPJMD 2019 - 2024 sudah sesuai dengan Permendagri 86 tahun 2017. Namun secara substansi ada beberapa yang perlu disesuaikan

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Perencanaan pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan daerah karena kebijakan pembangunan harus menyesuaikan dengan kemampuan pendanaannya. Dalam penentuan pagu indikatif program prioritas, gambaran pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaannya menjadi dasar utama penentuan target sasaran maupun program pembangunan. Dalam upaya memprediksi dengan baik sumber-sumber penerimaan di masa datang maka diperlukan gambaran umum kinerja keuangan melalui realisasi APBD sekurang-kurangnya dalam 3 (tiga) tahun di masa lalu.

Pengelolaan kemampuan daerah yang baik perlu dilakukan melalui prinsip efektivitas, efisien, ekonomis, adil, bermanfaat, wajar, tertib, taat peraturan perundang-undangan, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan sub-sistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan juga merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pengelolaan keuangan yang baik adalah pengelolaan yang bisa mengoptimalkan potensi-potensi pembangunan suatu daerah, sehingga dapat tercapai target-target dalam peningkatan kualitas pembangunan. Pengelolaan keuangan daerah dengan kewenangan yang didasarkan pada otonomi daerah melahirkan tantangan tersendiri dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah di Kota Madiun mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini telah dijabarkan secara lebih rinci dan teknis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Demi mencapai upaya prioritas pembangunan seluruh kegiatan pada rencana pembangunan lima tahunan melalui RPJMD, perlu ditetapkan gambaran pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan. Kedua hal tersebut perlu ditetapkan agar pengelolaan keuangan daerah dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk masyarakat umum. Arah gambaran pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan meliputi kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, dan kerangka pendanaan.

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Analisis kinerja keuangan masa lalu dimaksudkan untuk mengetahui kinerja kondisi keuangan beberapa tahun terakhir. Dari analisis kinerja beberapa tahun ke belakang dapat menjadi referensi melakukan proyeksi kinerja kondisi keuangan melalui berbagai macam metode analisa misalnya dengan melihat rata-rata pertumbuhan, menggunakan asumsi makro ekonomi (PDRB/laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan lain-lain), dan dapat juga dengan dasar kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah serta dapat melalui kebijakan bidang keuangan daerah.

Perkembangan kinerja keuangan pemerintah daerah tidak terlepas dari batasan pengelolaan keuangan daerah. Batasan tersebut diatur dalam;

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja pelaksanaan APBD dilihat dari perkembangan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa APBD terdiri dari aspek pendapatan, belanja dan pembiayaan. Aspek pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Belanja daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Sedangkan pembiayaan terdiri penerimaan dan pengeluaran pembiayaan.

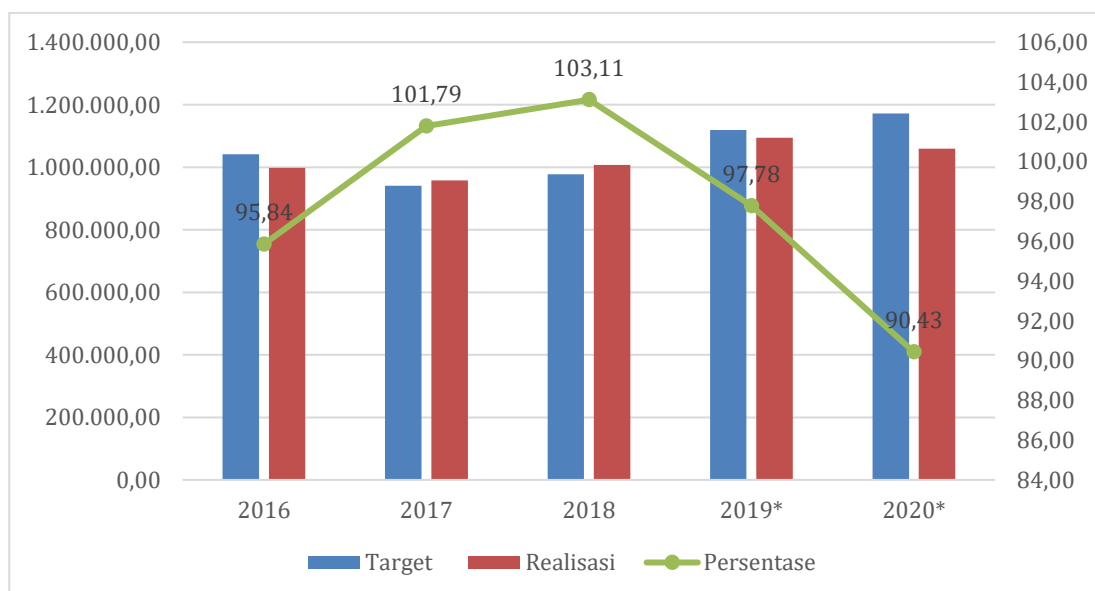


Sumber: Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019

Gambar 3.1
Struktur APBD

3.1.1.1 Realisasi Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih daerah. Pendapatan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dikelompokkan menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Realisasi pengelolaan pendapatan daerah Kota Madiun terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah bersumber pada Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Sedangkan pendapatan transfer diantaranya berasal dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah berasal dari Hibah, dana darurat, dan pendapatan lainnya. Gambaran realisasi pendapatan daerah ini diharapkan dapat membantu dalam mendorong berbagai kebijakan, program dan belanja daerah.



Sumber: BKAD Kota Madiun, 2021

Gambar 3.2

Capaian Realisasi terhadap Target APBD Kota Madiun Tahun 2016–2020

Sampai dengan tahun 2018, capaian realisasi pendapatan terhadap target yang ditetapkan mengalami trend yang semakin meningkat. Bahkan di tahun 2017 dan 2018, capaian realisasi pendapatan melebihi 100 persen. Namun untuk tahun 2019 dan 2020, capaian realisasi pendapatan terhadap target pendapatan dalam RPJMD mengalami trend yang menurun bahkan mencapai sebesar 90,43 persen tahun 2020. Penurunan tersebut tidak terlepas dari dampak covid-19 yang terjadi di tahun tersebut. Ringkasan capaian realisasi pendapatan daerah tahun 2019 dan 2020 terhadap target RPJMD 2019 – 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut :

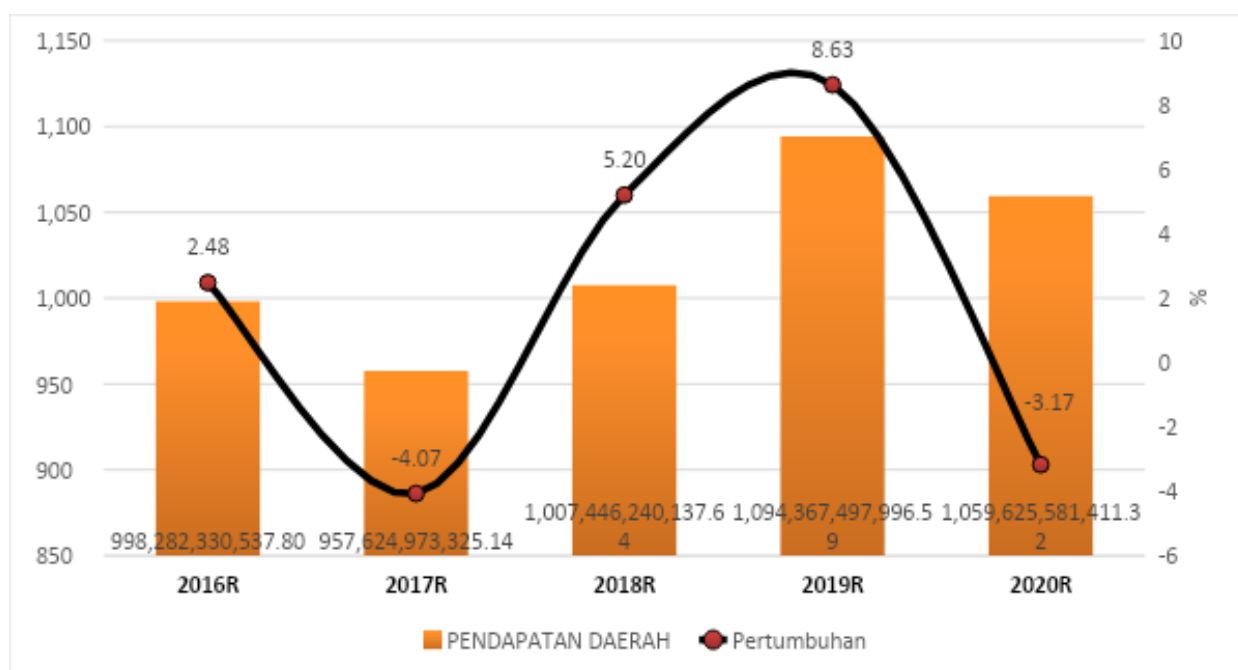
Tabel 3.1
Capaian Realisasi Pendapatan Daerah terhadap Target RPJMD
Pada Tahun 2019 dan 2020

No.	Uraian	Kinerja Anggaran					
		RPJMD 2019	R 2019	Capaian 2019	RPJMD 2020	R 2020	Capaian 2020
1	PENDAPATAN	1.119.169.654.600,00	1.056.906.304.000,00	94,44	1.171.755.147.812,00	1.059.913.793.139,59	90,43
01.01	Pendapatan Asli Daerah	226.307.943.600,00	235.504.941.000,00	104,06	241.576.128.230,00	248.944.404.487,59	102,93
01.01.01	Pajak daerah	77.000.000.000,00	85.000.000.000,00	110,39	84.700.000.000,00	90.291.466.033,07	106,60
01.01.02	Retribusi daerah	17.220.952.600,00	18.762.439.600,00	108,95	18.943.047.860,00	15.619.539.719,00	80,72
01.01.03	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	12.086.991.000,00	14.934.446.400,00	123,56	12.933.080.370,00	15.216.268.562,40	117,65
01.01.04	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	120.000.000.000,00	116.808.055.000,00	97,34	125.000.000.000,00	127.817.130.173,12	102,29
01.02	Dana Perimbangan	730.009.511.000,00	671.425.330.000,00	91,97	763.680.748.502,00	632.559.647.797,00	82,83
01.02.01	Dana bagi hasil pajak	25.371.694.000,00	22.423.248.000,00	88,38	25.980.614.656,00	34.444.290.949,20	132,58

No.	Uraian	Kinerja Anggaran					
		RPJMD 2019	R 2019	Capaian 2019	RPJMD 2020	R 2020	Capaian 2020
	Dana bagi hasil bukan pajak	83.445.154.000,00	31.021.504.000,00	37,18	85.447.837.696,00	51.666.436.423,80	60,47
01.02.02	Dana Alokasi Umum	522.596.024.000,00	527.916.797.000,00	101,02	548.725.825.200,00	473.852.439.000,00	86,36
01.02.03	Dana Alokasi khusus	85.477.493.000,00	76.136.504.000,00	89,07	89.751.367.650,00	72.596.481.424,00	80,89
01.02.04	Dana Bagi hasil cukai	13.119.146.000,00	13.927.277.000,00	106,16	13.775.103.300,00	0	0,00
01.03	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	162.852.200.000,00	149.976.033.000,00	92,09	166.498.271.080,00	178.409.740.855,00	107,15
01.03.01	Hibah	19.356.661.000,00	19.399.600.000,00	100,22	15.000.000.000,00	20.029.980.000,00	133,53
01.03.03	Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya	86.960.763.000,00	64.366.614.000,00	74,02	92.178.408.780,00	84.049.652.855,00	91,18
01.03.04	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	55.542.726.000,00	65.095.240.000,00	117,20	58.319.862.300,00	73.313.029.000,00	125,71
01.03.05	Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya	992.050.000,00	1.114.579.000,00	112,35	1.000.000.000,00	1.017.079.000,00	101,71

Sumber: BKAD Kota Madiun, 2021

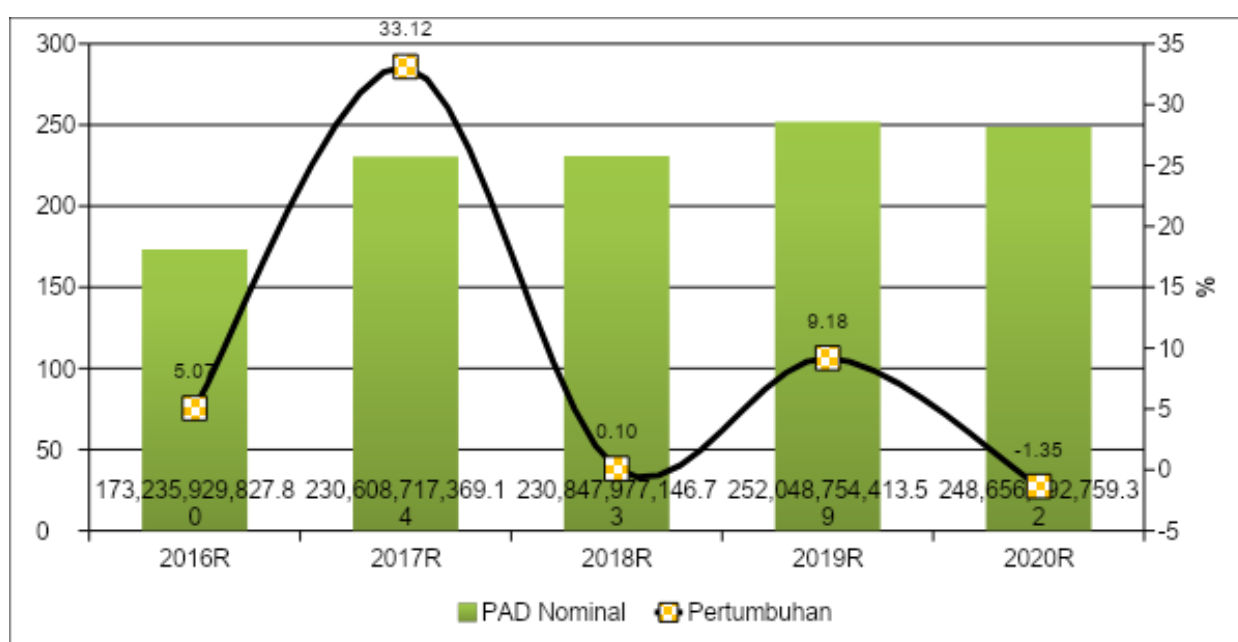
Dari tabel diatas, secara umum dapat dikatakan bahwa capaian realisasi pendapatan daerah tahun 2019 dan 2020 masih di bawah target RPJMD. Realisasi terhadap target pendapatan daerah adalah 94,44 persen tahun 2019 dan 90,43 persen tahun 2020. Jika dilihat dari komponen pendapatannya, realisasi PAD melampaui target RPJMD tahun 2019 dan 2020 dengan nilai masing – masing sebesar 104,06 persen dan 102,93 persen.



Sumber: BKAD Kota Madiun, 2021

Gambar 3.3
Perkembangan Pendapatan Daerah Kota Madiun Tahun 2016–2020

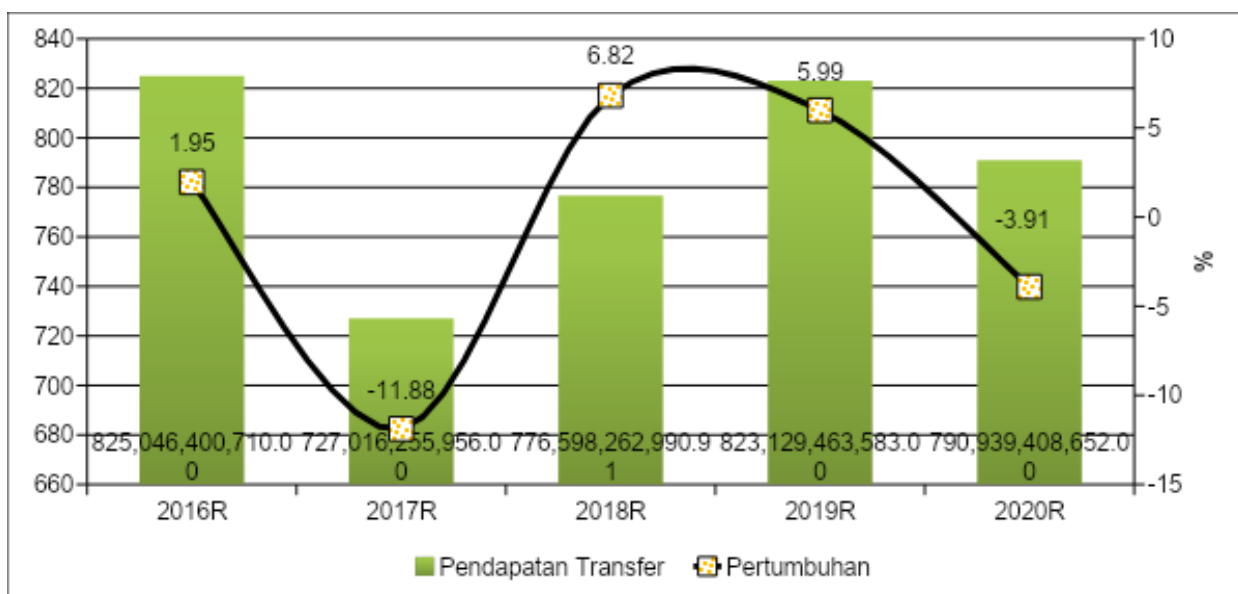
Pertumbuhan pendapatan nominal Kota Madiun sampai dengan tahun 2019 menunjukkan tren yang semakin meningkat. Realisasi pendapatan pada tahun 2018 menunjukkan peningkatan sebesar 5,20 persen, dimana pada tahun sebelumnya, nilainya turun sebesar 4,07 persen. Pada tahun 2019, realisasi pendapatan daerah menunjukkan pertumbuhan sebesar 8,63 persen. Pada tahun 2020, sebagai dampak pandemi Covid-19 pendapatan daerah mengalami penurunan secara nominal dan juga pertumbuhannya sebesar -3,17.



Sumber: BKAD Kota Madiun, 2021

Gambar 3.4
Perkembangan PAD Kota Madiun Tahun 2016–2020

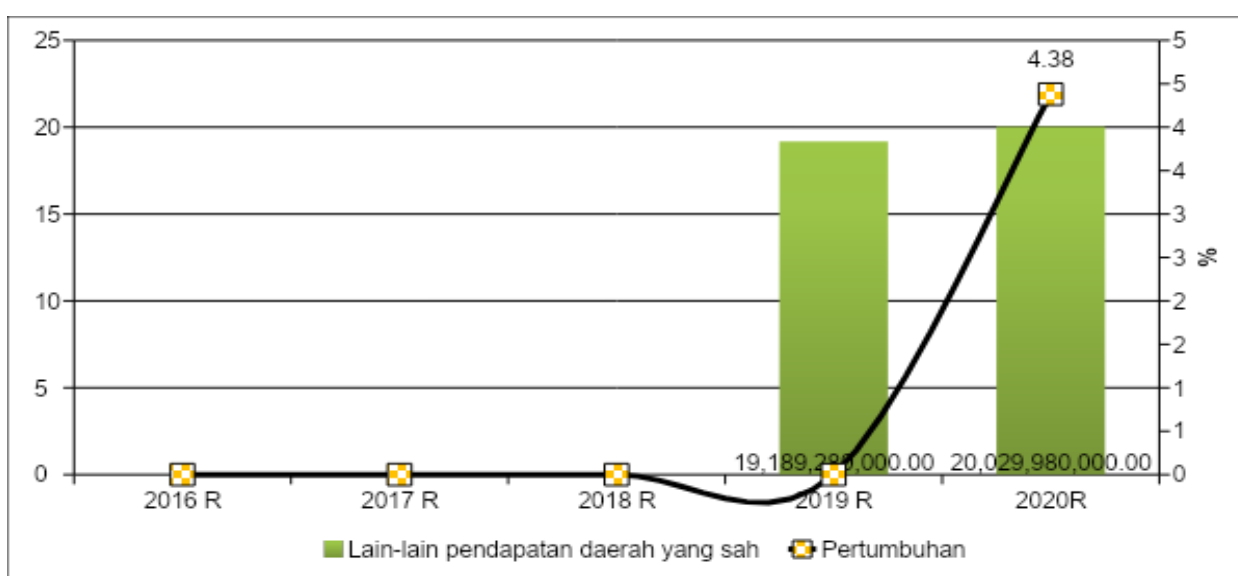
Pertumbuhan PAD tahun 2019 mengalami peningkatan yang relatif tinggi dibandingkan tahun 2018. Tahun 2019 merupakan capaian pertumbuhan PAD tertinggi dengan nilai pertumbuhan sebesar 9,18 persen. Kemudian PAD terus tertekan dengan pertumbuhan -1,35 pada tahun 2020 sebagai dampak pandemi Covid-19. Namun jika dilihat dari grafik diatas, penurunan PAD tahun 2020 tidak terlalu parah. Dari sisi nominal PAD pada tahun 2020 masih lebih tinggi dibandingkan sebelum tahun 2019. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pandemi Covid-19 tidak terlalu berpengaruh terhadap PAD. Selanjutnya, perkembangan pendapatan transfer dapat dilihat dalam grafik berikut:



Sumber: BKAD Kota Madiun, 2021

Gambar 3.5
Perkembangan Pendapatan Transfer Kota Madiun Tahun 2016–2020

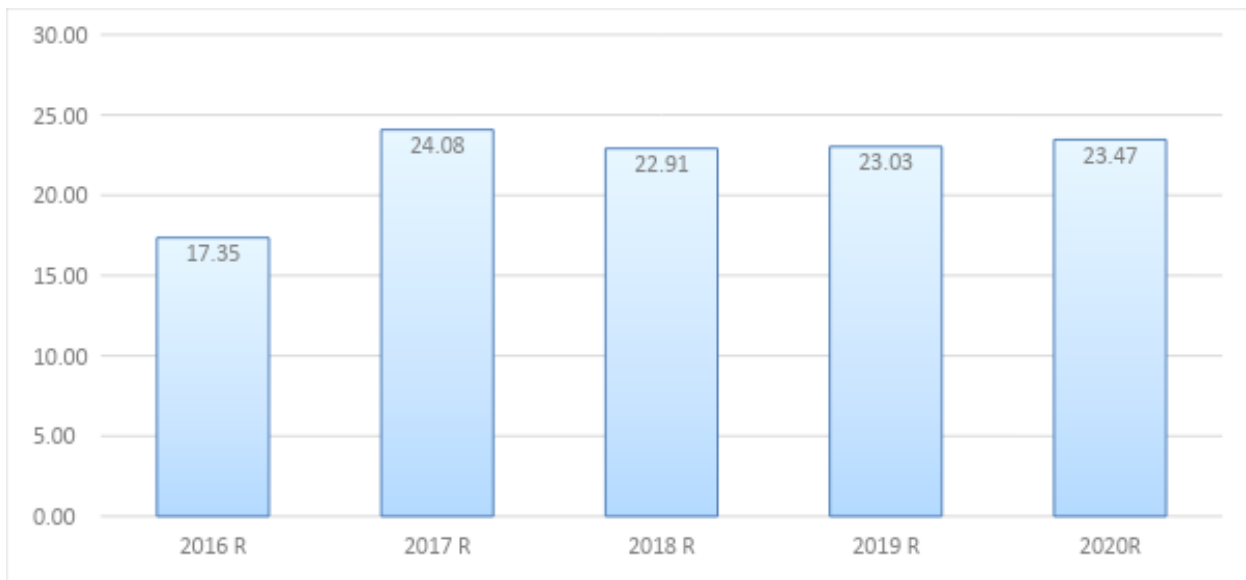
Realisasi pendapatan transfer tahun 2018 menunjukkan tren yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Persentase peningkatan pendapatan transfer tahun tersebut sebesar 6,82 persen namun selanjutnya pendapatan transfer terus turun hingga sebesar -3,91. Penurunan pendapatan transfer sejalan dengan kebijakan realokasi dan *refocusing* dari pemerintah pusat dalam upaya penanganan dan pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Selanjutnya, perkembangan lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah sebagai berikut:



Sumber: BKAD Kota Madiun, 2021

Gambar 3.6
Perkembangan Pertumbuhan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Madiun Tahun 2016–2020

Realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah menunjukkan perkembangan sampai dengan tahun 2020. Pertumbuhan lain-lain pendapatan daerah yang sah pada tahun 2020 sebesar 4,38 persen. Nilai pertumbuhan yg positif ini adalah posisi terbaik selama lima tahun terakhir. Selanjutnya, mengenai perkembangan Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) dapat dilihat dalam gambar berikut:



Sumber: BKAD Kota Madiun, 2021

Gambar 3.7
Perkembangan Derajat Desentralisasi Fiskal (dalam %)
Kota Madiun Tahun 2016–2020

Derajat desentralisasi fiskal mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2020, derajat desentralisasi fiskal sebesar 23,47 persen lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya yaitu sebesar 23,03. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kemandirian daerah, terutama dalam kontribusinya terhadap pendapatan daerah di era pandemi Covid-19. Meskipun mengalami peningkatan, namun kemandirian fiskal masih terbatas. Oleh karena itu, diperlukan sebuah strategi peningkatan pendapatan daerah. Namun demikian, dalam upaya peningkatan pendapatan daerah dihadapkan pada berbagai permasalahan sebagai berikut:

- Kondisi perekonomian mengalami kontraksi yang mengakibatkan kelesuan usaha, sehingga pendapatan daerah mengalami penurunan.
- Masih perlu ditingkatkannya strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan pendapatan daerah khususnya dalam penggalian potensi pendapatan daerah;

- Masih terbatasnya kesadaran wajib pajak dan retribusi daerah dalam membayar kewajibannya bagi pembangunan daerah;
- Masih perlu ditingkatkannya kapasitas sumber daya manusia dalam berbagai bidang tugas peningkatan pendapatan asli daerah;
- Masih perlu ditingkatkannya sarana dan prasarana pendukung dalam mobilisasi sumber-sumber pendapatan daerah;
- Belum optimalnya keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam memberdayakan potensi ekonomi daerah serta perannya dalam peningkatan pendapatan asli daerah.

Tabel 3.2
Realisasi dan Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kota Madiun 2016 – 2020

Kode	Uraian	REALISASI										
		2016R		2017R		2018R		2019R		2020R		Rata-rata Pertumbuhan
		Rp	Rp.	%P	Rp.	%P	Rp.	%P	Rp.	%P	%	
1	PENDAPATAN DAERAH	998.282.330.537,80	957.624.973.325,14	-4,07	1.007.446.240.137,64	5,20	1.094.367.497.996,59	8,63	1.059.913.793.139,59	-3,17	1,65	
01.01	Pendapatan Asli Daerah	173.235.929.827,80	230.608.717.369,14	33,12	230.847.977.146,73	0,10	252.048.754.413,59	9,18	248.944.404.487,59	-1,35	10,26	
01.01.01	Pajak daerah	64.045.559.079,36	75.224.831.585,44	17,46	83.454.704.361,41	10,94	91.077.191.655,45	9,13	90.291.466.033,07	-0,87	9,17	
01.01.02	Retribusi daerah	16.762.538.293,00	18.407.218.016,50	9,81	19.138.960.648,50	3,98	20.301.325.919,00	6,07	15.619.539.719,00	24,68	-1,20	
01.01.03	Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	11.172.031.994,51	13.320.249.415,39	19,23	13.365.402.573,59	0,34	14.641.711.340,55	9,55	15.216.268.562,40	3,92	8,26	
01.01.04	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	81.255.800.460,93	123.656.418.351,81	52,18	114.888.909.563,23	-7,09	126.028.525.498,59	9,70	127.817.130.173,12	1,45	14,06	
01.02	Pendapatan Transfer	825.046.400.710,00	727.016.255.956,00	-11,88	776.598.262.990,91	6,82	823.129.463.583,00	5,99	790.939.408.652,00	-3,91	-0,75	
01.02.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	758.944.056.206,00	646.473.881.834,00	-14,82	678.417.066.007,00	4,94	737.079.907.650,00	8,65	705.872.676.797,00	-4,23	-1,37	
1.2.1.01.01.1	Dana bagi hasil pajak	34.049.572.850,00	27.325.331.947,00	-19,75	25.390.798.853,00	-7,08	16.076.390.385,00	36,68	34.444.290.949,20	114,25	12,69	
1.2.1.01.01.2	Dana bagi hasil bukan pajak	18.880.139.043,00	18.680.122.868,00	-1,06	67.464.332.495,00	261,16	52.685.578.633,00	21,91	51.666.436.423,80	-1,93	59,06	
1.2.1.01.01.3	Dana Bagi hasil cukai	12.409.333.957,00	13.308.934.159,00	7,25	13.119.146.000,00	-1,43	13.939.983.813,00	6,26	0,00	100,00	-21,98	
1.2.1.01.01.4	Dana Alokasi Umum	511.375.289.000,00	502.392.070.000,00	-1,76	501.753.246.649,00	-0,13	522.596.024.000,00	4,15	473.852.439.000,00	-9,33	-1,76	
1.2.1.01.01.5	Dana Alokasi khusus	140.847.099.356,00	77.267.422.860,00	-45,14	70.689.542.010,00	-8,51	76.239.204.819,00	7,85	72.596.481.424,00	-4,78	-12,65	
1.2.1.01.02	Dana Insentif Daerah	41.382.622.000,00	7.500.000.000,00	-81,88	0	-100,00	55.542.726.000,00	0,00	73.313.029.000,00	31,99	-37,47	
1.2.1.01.03	Dana Otonomi Khusus	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	
01.02.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	66.102.344.504,00	80.542.374.122,00	21,84	98.181.196.983,91	21,90	86.049.555.933,00	12,36	85.066.731.855,00	-1,14	7,56	
1.2.2.01	Pendapatan Bagi Hasil	64.431.714.504,00	79.825.524.122,00	23,89	79.153.128.616,00	-0,84	84.934.976.933,00	7,30	84.049.652.855,00	-1,04	7,33	
1.2.2.02	Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya	1.670.630.000,00	716.850.000,00	-57,09	19.028.068.367,91	2.554,40	1.114.579.000,00	94,14	1.017.079.000,00	-8,75	598,60	

Kode	Uraian	REALISASI										
		2016R		2017R		2018R		2019R		2020R		Rata-rata Pertumbuhan
		Rp		Rp.	%P	Rp.	%P	Rp.	%P	Rp.	%P	%
01.03	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	-		-	0,00	-	0,00	19.189.280.000,00	0,00	20.029.980.000,00	4,38	1,10
01.03.01	Hibah	0.00		0.00	0,00	0.00	0,00	19.189.280.000,00	0,00	20.029.980.000,00	4,38	1,10
01.03.02	Dana darurat	0.00		0.00	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00
01.03.03	Pendapatan Lainnya	0.00		0.00	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00

Sumber : BKAD Kota Madiun, 2021;

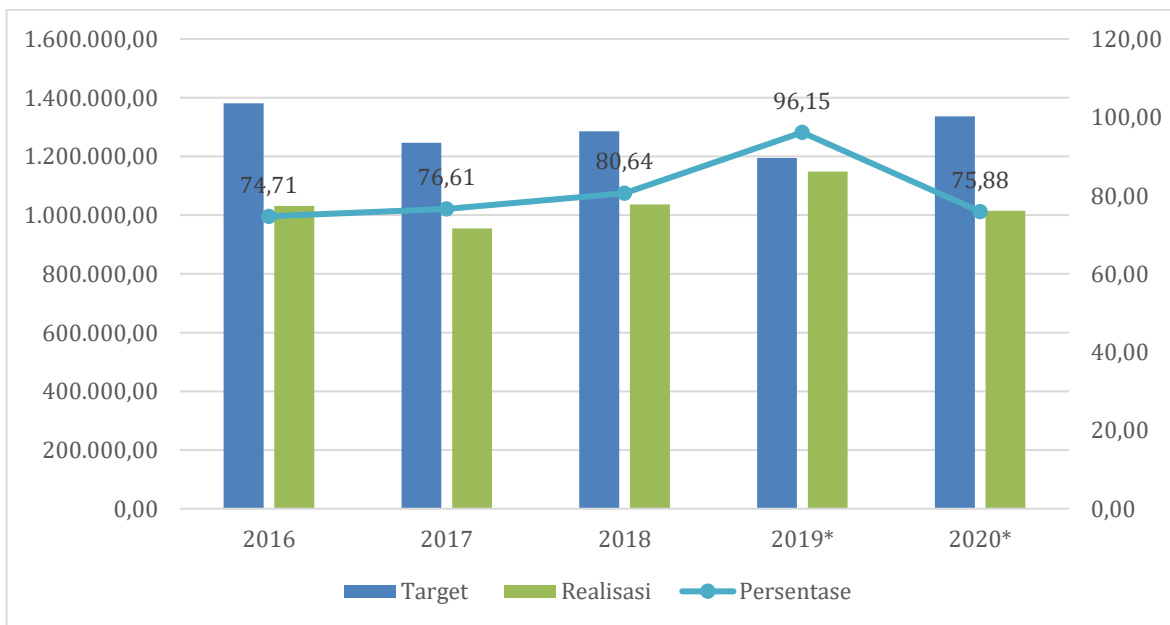
Keterangan : %P adalah persentase pertumbuhan

3.1.1.2 Realisasi Belanja Daerah

Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja sesuai PP 12 Tahun 2019 meliputi belanja operasi; belanja modal; belanja tidak terduga; dan belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek yang terdiri dari belanja pegawai; belanja barang dan jasa; belanja bunga; belanja subsidi; belanja hibah; dan belanja bantuan sosial.

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Belanja modal meliputi: belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai; belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai; belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai; belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai; belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai; dan belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya, belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dirinci atas jenis: belanja bagi hasil; dan belanja bantuan keuangan.



Sumber: BKAD Kota Madiun, 2021

Gambar 3.8
Capaian Realisasi Belanja Daerah terhadap Target APBD
Kota Madiun Tahun 2016–2020

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, capaian realisasi belanja daerah terhadap target APBD relatif rendah. Capaian tertinggi hanya terjadi pada tahun 2019, dimana nilai realiasinya sebesar 96,15 persen. Sedangkan pada tahun 2020, capaian realisasi belanja daerah terhadap target belanja RPJMD hanya mencapai 75,88 persen. Rendahnya pencapaian tersebut diakibatkan oleh pandemi Covid-19 yang mengharuskan setiap daerah untuk merealokasi dan merefokusing anggaran dalam upaya pemulihan dampak Covid-19. Ringkasan capaian realisasi belanja daerah tahun 2019 dan 2020 terhadap target RPJMD dapat dilihat dalam tabel berikut :

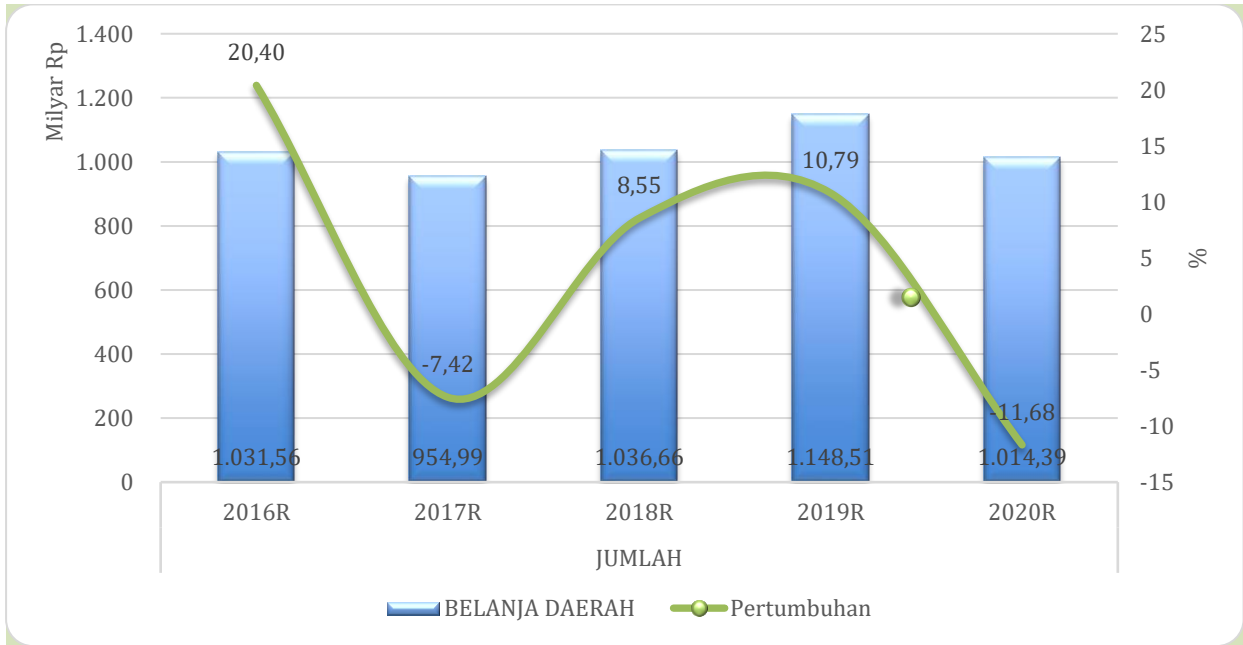
Tabel 3.3
Capaian Realisasi Belanja Daerah terhadap Target RPJMD pada Tahun 2019 dan 2020

No.	Uraian	Kinerja Anggaran					
		RPJMD 2019	R 2019	Capaian 2019	RPJMD 2020	R 2020	Capaian 2020
2	BELANJA	1.194.552.988.508,00	1.148.511.321.355,75	96,15	1.336.799.891.335,00	1.014.631.224.152,20	75,90
02.01	Belanja Tidak Langsung	484.105.379.819,00	402.432.149.206,46	83,57	505.424.220.335,00	403.213.660.624,53	79,78
02.01.01	Belanja Pegawai	447.356.400.319,00	371.056.454.264,38	82,94	469.724.220.335,00	371.359.200.247,00	79,06
02.01.04	Belanja Hibah	16.277.528.500,00	15.603.619.810,08	95,86	16.000.000.000,00	11.938.091.671,53	74,61
02.01.05	Belanja Bantuan Sosial	16.843.600.000,00	15.001.277.870,00	101,63	16.000.000.000,00	12.854.873.000,00	80,34
02.01.06	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
02.01.07	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kab/Kota dan Pemeritahan Desa	627.851.000,00	651.920.000,00	103,83	700.000.000,00	700.062.000,00	100,01
02.01.08	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000,00	118.877.262,00	3,96	3.000.000.000,00	6.361.433.706,00	212,05
02.02	Belanja Langsung	710.447.608.689,00	746.245.382.711,92	104,72	831.375.671.000,00	611.417.563.527,67	73,54
02.02.01	Belanja Pegawai	80.751.200.451,00	69.165.928.315,00	85,65	84.788.760.474,00	70.381.629.872,00	83,01
02.02.02	Belanja Barang dan Jasa	354.068.347.460,00	369.278.712.052,86	103,65	371.771.764.833,00	349.956.080.581,10	94,13
02.02.03	Belanja Modal	275.628.060.778,00	307.800.742.344,06	111,67	374.815.145.693,00	191.079.853.074,57	50,98
	Surplus/Defisit	-75.383.333.908,00	-54.310.033.921,79	121,52	-165.044.743.523,00	44.994.357.259,12	-27,26

Sumber: BKAD Kota Madiun, 2021

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian realisasi belanja daerah terhadap target RPJMD pada tahun 2019 dan 2020 tidak memenuhi target. Realisasi belanja daerah tahun 2019 sebesar 96,15 persen, sedangkan tahun 2020 hanya sebesar 75,90 persen. Rendahnya capaian realisasi tahun 2020 terhadap target RPJMD dikarenakan adanya realokasi dan refocusing anggaran tahun 2020 untuk penanganan Covid-19. Hal ini juga bisa dilihat dari realisasi baik belanja tidak langsung dan belanja langsung yang masing – masing hanya sebesar 79,78 persen dan 73,54 persen tahun 2020.

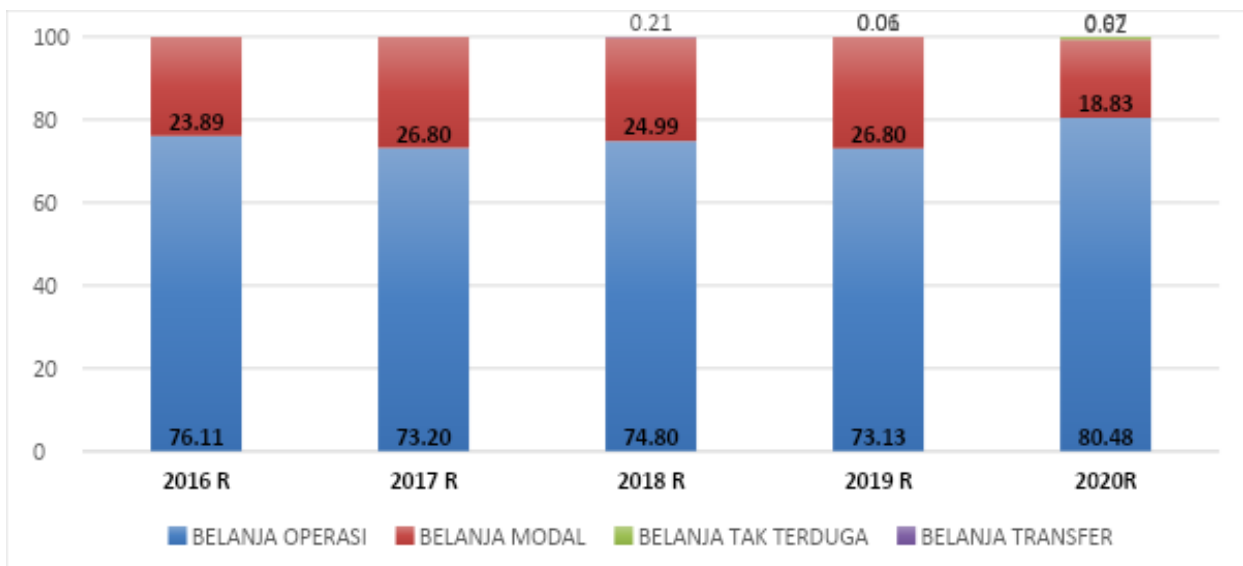
Secara umum selama lima tahun terakhir, jumlah belanja Pemerintah Kota Madiun terus mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan kapasitas fiskal daerah, kecuali di tahun 2020. Gambar 3.9 menunjukkan jumlah nominal dan rata-rata pertumbuhan total belanja daerah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Jumlah nominal belanja daerah Kota Madiun pada tahun 2016 mencapai sebesar Rp 1,031 triliun yang kemudian meningkat menjadi sebesar Rp. 1,148 trilyun tahun 2019 dan mengalami penurunan hingga Rp 1,014 trilyun pada tahun 2020 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,06 persen.



Sumber: BKAD Kota Madiun, 2021

Gambar 3.9
Perkembangan Pertumbuhan Belanja Daerah Kota Madiun
Tahun 2016–2020

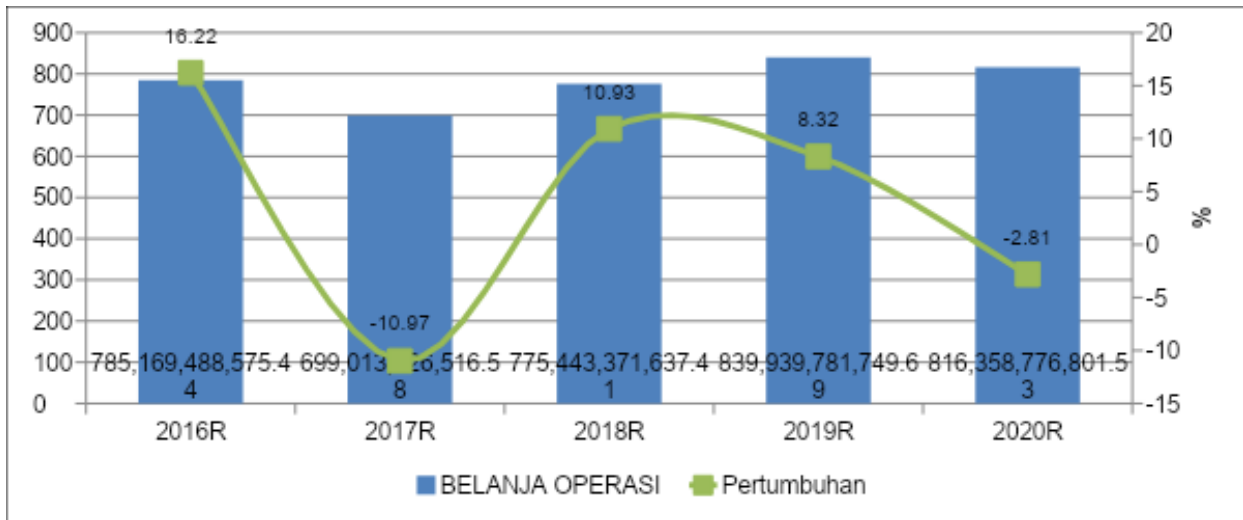
Pertumbuhan belanja daerah pada Tahun 2020 mengalami penurunan sekitar 11,68 persen dari tahun sebelumnya. Secara nominal, belanja daerah tahun 2019 merupakan belanja daerah tertinggi dalam lima tahun terakhir yaitu sebesar 1,148 triliun dengan tingkat pertumbuhan 10,79 persen. Penurunan belanja daerah tertinggi, terjadi pada tahun 2020 yang dengan nilai nominal sebesar Rp 1.014,39 miliar.



Sumber: BKAD Kota Madiun, 2021

Gambar 3.10
Perkembangan Komposisi Belanja Daerah (dalam %) Kota Madiun
Tahun 2016–2020

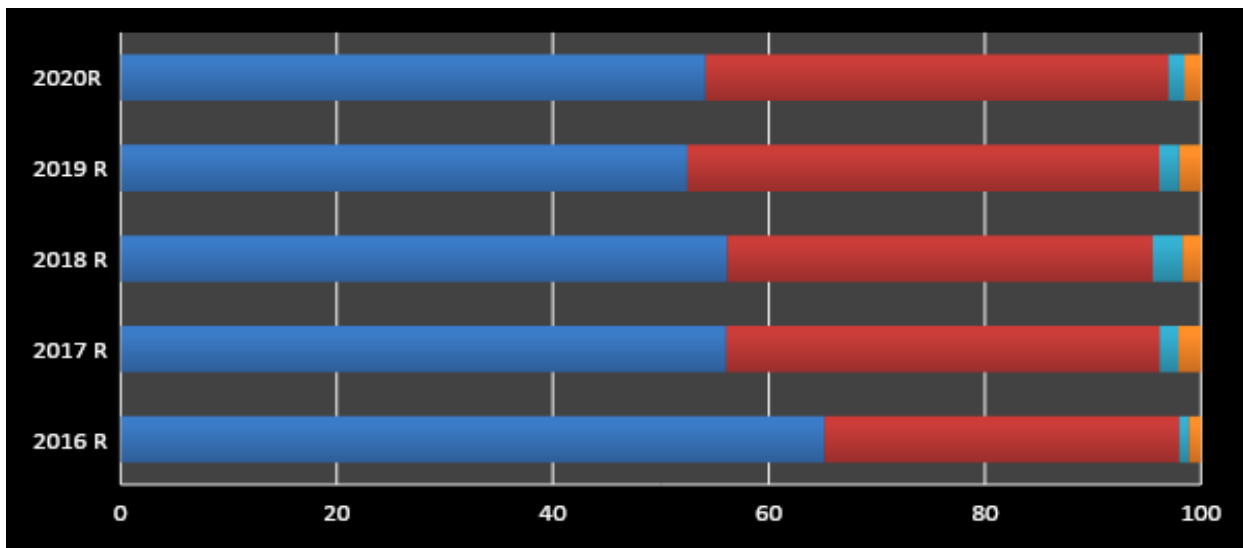
Komposisi belanja daerah selama lima tahun terakhir masih didominasi oleh belanja operasi yaitu sebesar 80,48 persen di tahun 2020. Belanja modal menjadi komponen terbesar kedua dalam belanja daerah dengan proporsi sebesar 18,83 tahun 2020. Angka tersebut mengalami penurunan di bandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 26,80 persen. Sedangkan belanja tak terduga dan transfer masing – masing hanya sebesar 0,62 persen dan 0,07 persen.



Sumber: BKAD Kota Madiun, 2021

Gambar 3.11
Perkembangan Pertumbuhan Belanja Operasi Kota Madiun
Tahun 2016–2020

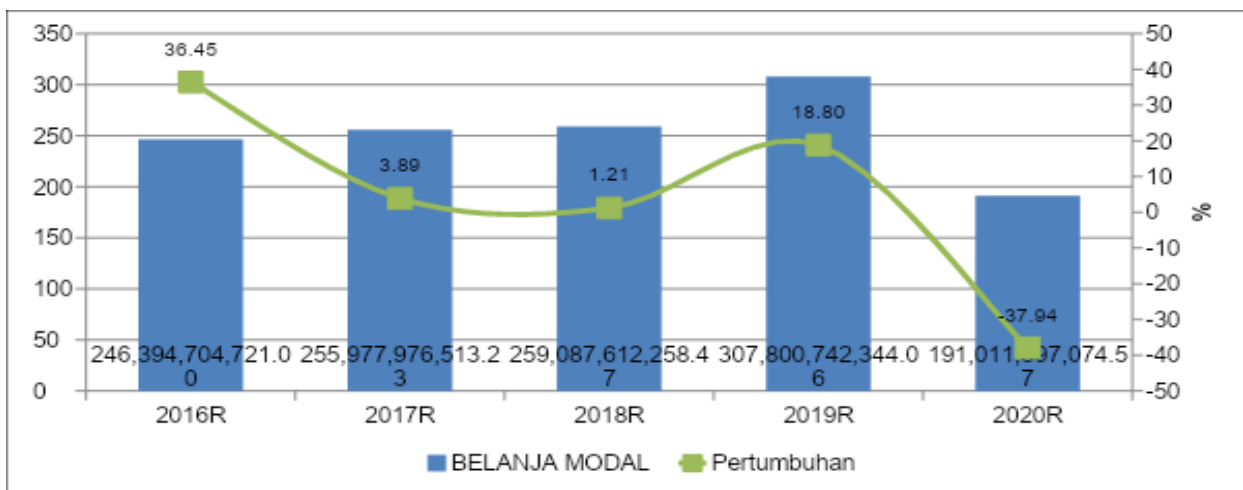
Dalam lima tahun terakhir, belanja operasi mengalami perkembangan yang fluktuatif. Pada tahun 2020, belanja operasi mengalami penurunan hingga -2,81 persen atau sebesar 816,36 milyar. Pertumbuhan belanja operasi tertinggi terjadi di tahun 2018 dengan nilai sebesar 10,93 persen. Nilai tersebut mengalami penurunan di tahun setelahnya sebesar 8,32 meskipun secara nominal jumlah belanja operasi mengalami peningkatan. Perkembangan persentase belanja operasi Kota Madiun tahun 2016-2020 dapat dilihat dalam gambar berikut:



Sumber: BKAD Kota Madiun, 2021

Gambar 3.12
Perkembangan Komposisi Komponen Belanja Operasi (dalam %)
Kota Madiun Tahun 2016–2020

Komposisi Belanja operasi dari tahun ke tahun memiliki tren yang relatif sama. Meskipun secara nominal nilainya berubah dari tahun ke tahun, komposisi terbesar terdapat pada belanja pegawai. Persentase belanja pegawai pada Tahun 2022 sebesar 54,10 persen. Angka tersebut lebih tinggi di bandingkan tahun 2019 namun lebih rendah dibandingkan sebelum tahun 2019 baik secara persentase maupun secara nominal.

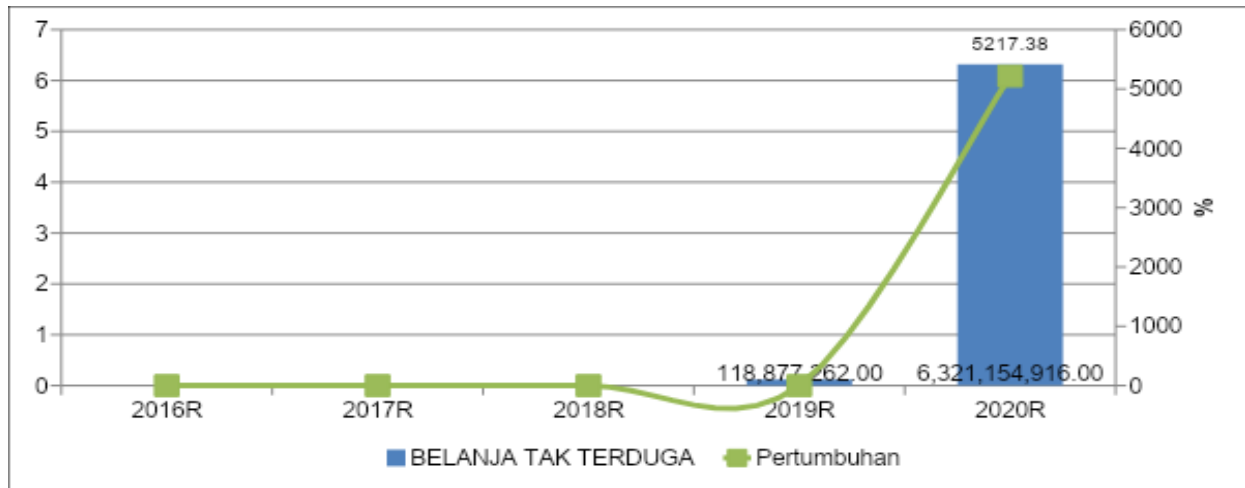


Sumber: BKAD Kota Madiun, 2021

Gambar 3.13
Perkembangan Pertumbuhan Belanja Modal Kota Madiun
Tahun 2016–2020

Belanja modal cenderung mengalami penurunan dalam lima tahun terakhir. Dampak pandemi Covid-19 pada tahun 2020 memberikan tekanan yang dalam terhadap belanja modal sebagai akibat adanya realokasi dan refokusing anggaran.

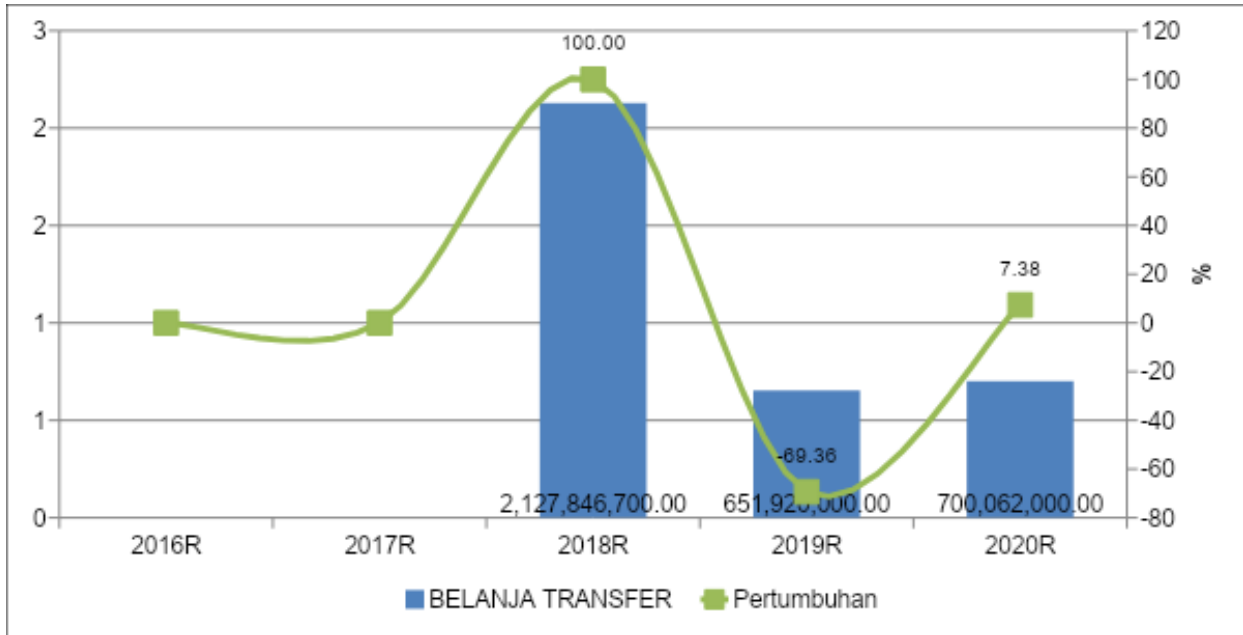
Pertumbuhan belanja modal mengalami kontraksi sebesar -37,94 atau sebesar 191,01 miliar. Nilai tersebut jauh berkurang dibandingkan tahun sebelumnya yang mengalami pertumbuhan sampai dengan 18,80 persen dengan nilai belanja modal sebesar 307,80 miliar. Angka tersebut merupakan belanja modal tertinggi dalam kurun waktu lima tahun terakhir.



Sumber: BKAD Kota Madiun, 2021

Gambar 3.14
Perkembangan Pertumbuhan Belanja tak Terduga Kota Madiun
Tahun 2016–2020

Belanja tak terduga mengalami peningkatan drastis sebagai dampak dari adanya Covid-19. Pada tahun 2020 belanja tak terduga sebesar 6,32 miliar atau meningkat sebesar 5217,38 persen dari tahun sebelumnya. Sedangkan tahun 2019, belanja tak terduga hanya sebesar 0,12 miliar dengan pertumbuhan mendekati nol. Peningkatan Belanja Tidak Terduga terjadi karena digunakan untuk penanganan Covid-19 di tiga cluster, baik untuk penanganan Kesehatan, Pemulihan Ekonomi Nasional maupun Jaring Pengaman Sosial. Dimana semuanya dianggarkan di Belanja Tidak Terduga karena penanganan Pandemi pada tahun 2020 belum bisa direncanakan dan kejadiannya ketika tahun anggaran sudah berjalan. Untuk bisa menganggarkan di Belanja Tidak Terduga itupun harus melakukan refocusing dan realokasi dari pagu anggaran belanja yang sudah dianggarkan. Jadi kenaikan anggaran Belanja Tidak Terduga adalah posting anggaran untuk penanganan pandemic covid-19



Sumber: BKAD Kota Madiun, 2021

Gambar 3.15
Perkembangan Pertumbuhan Belanja Transfer Kota Madiun
Tahun 2016–2020

Pertumbuhan belanja transfer mengalami perkembangan yang fluktuatif. Belanja transfer pada tahun 2018 sebesar 2,13 miliar mengalami penurunan hingga 0,70 miliar tahun 2020. Jika dibandingkan antara tahun 2020 dan 2019, belanja transfer mengalami pertumbuhan hingga 7,38 persen atau secara nominal meningkat dari 0,65 miliar tahun 2019 menjadi 0,70 miliar tahun 2020.

Berdasarkan uraian perkembangan belanja daerah diatas, dapat disimpulkan beberapa hal penting sebagai berikut

1. Program pemulihan daerah sebagai dampak covid19 telah menyebabkan serapan anggaran relatif cukup rendah.
2. Komposisi belanja daerah masih didominasi oleh belanja operasi dengan nilai lebih dari 70 persen. Dimana sebagian besar penggunaan belanja operasi diperuntukan bagi belanja pegawai sekitar lebih dari 50 persen.
3. Belanja modal sebagai motor utama pembangunan hanya memiliki proporsi sekitar 25 persen dari total belanja daerah. Pandemi Covid-19 menyebabkan anggaran belanja modal dialihkan untuk program penanganan Covid-19. Sehingga beberapa program pembangunan mengalami stagnasi.

Selanjutnya, perkembangan nilai dan pertumbuhan belanja daerah Kota Madiun tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4
Realisasi dan Rata-Rata Pertumbuhan Belanja Daerah Kota Madiun Tahun Anggaran 2016-2020

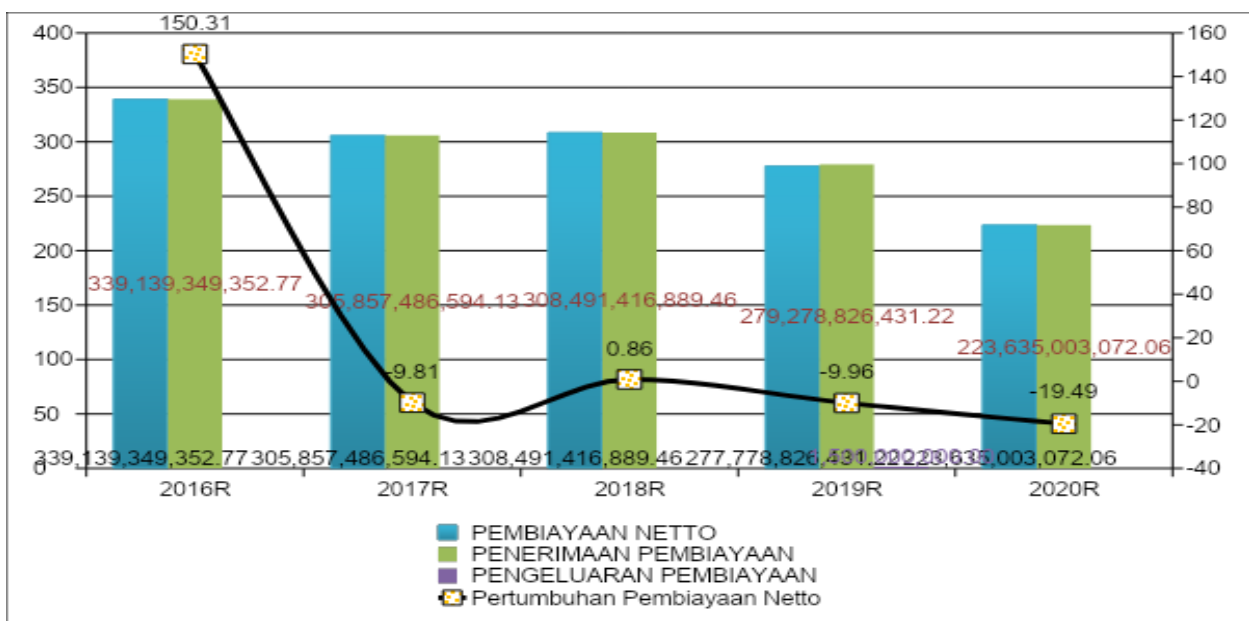
Kode	Uraian	REALISASI										
		2016R		2017R		2018R		2019R		2020R		Rata-rata Pertumbuhan
		Rp	Rp.	%P	Rp.	%P	Rp.	%P	Rp.	%P	(%)	
2	BELANJA DAERAH	1.031.564.193.296,44	954.991.703.029,81	-7,42	1.036.658.830.595,88	8,55	1.148.496.711.114,00	10,79	1.014.391.890.792,10	-11,68	0,06	
05.01	BELANJA OPERASI	785.169.488.575,44	699.013.726.516,58	-10,97	775.443.371.637,41	10,93	839.925.171.507,94	8,32	816.358.776.801,53	-2,81	1,37	
05.01.01	Belanja Pegawai	511.243.214.266,00	391.631.558.502,00	-23,40	435.126.974.606,00	11,11	440.222.382.579,38	1,17	441.683.138.649,00	0,33	-2,70	
05.01.02	Belanja Barang dan Jasa	257.954.754.292,44	280.472.821.815,27	8,73	305.475.751.519,41	8,91	369.278.712.052,86	20,14	349.882.673.481,00	-4,66	8,28	
05.01.03	Belanja Bunga	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	
05.01.04	Belanja Subsidi	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	
05.01.05	Belanja Hibah	7.013.671.600,00	11.924.689.389,31	70,02	21.318.545.231,00	78,78	15.422.819.810,08	-26,81	11.938.091.671,53	-23,49	24,62	
05.01.06	Belanja Bantuan Sosial	8.957.848.417,00	14.984.656.810,00	67,28	13.522.100.281,00	-9,76	15.001.277.870,00	26,59	12.854.873.000,00	-24,90	14,80	
05.02	BELANJA MODAL	246.394.704.721,00	255.977.976.513,23	3,89	259.087.612.258,47	1,21	307.800.742.344,06	18,80	191.011.897.074,57	-37,94	-3,51	
05.02.01	Belanja Modal Tanah	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
05.02.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	62.160.897.084,00	103.557.504.743,48	66,60	47.310.430.082,75	-54,31	68.460.669.520,00	44,71	47.752.974.268,64	-30,25	6,68	
05.02.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	53.614.816.421,00	43.416.541.452,75	-19,02	64.833.894.806,80	49,33	48.758.211.485,26	-24,80	38.202.379.414,91	-21,65	-4,03	
05.02.04	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	127.909.902.613,00	102.648.521.200,00	-19,75	138.271.368.268,92	34,70	184.022.541.935,80	33,09	100.281.245.964,15	-45,51	0,63	
05.02.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	463.668.600,00	3.188.874.942,00	587,75	3.542.965.670,00	11,10	2.888.082.876,00	-18,48	4.775.297.426,86	65,34	161,43	
05.02.05	Belanja Modal Aset Lainnya	2.245.420.003,00	3.166.534.175,00	41,02	5.128.953.430,00	61,97	3.671.236.527,00	-28,42	0,00	0,00	18,64	
05.03	BELANJA TAK TERDUGA	-	-	0,00	-	0,00	118.877.262,00	0,00	6.321.154.916,00	5.217,38	1.304,34	
05.03.01	Belanja Tidak Terduga	0	0	0,00	0	0,00	118.877.262,00	0,00	6.321.154.916,00	5.217,38	1.304,34	
05.04	BELANJA TRANSFER	-	-	0,00	2.127.846.700,00	0,00	651.920.000,00	-69,36	700.062.000,00	7,38	-15,49	
5.4.1	Belanja Transfer Ke Daerah Lain	0	0	0,00	2.127.846.700,00	0,00	651.920.000,00	-69,36	700.062.000,00	7,38	-15,49	
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	1.031.564.193.296,44	954.991.703.029,81	-7,42	1.036.658.830.595,88	8,55	1.148.496.711.114,00	10,79	1.014.391.890.792,10	-11,68	0,06	
	SURPLUS (DEFISIT) /	-33.281.862.758,64	2.633.270.295,33	-107,91	-29.212.590.458,24	-1.209,37	-54.129.213.117,41	85,34	45.233.690.619,22	-183,54	-353,87	

Sumber: BPPKAD Kota Madiun, 2021; Persentase adalah persentase pertumbuhan

3.1.1.3 Realisasi Pembiayaan Daerah

Berdasarkan PP 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pembiayaan daerah didefinisikan sebagai semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan sumbernya, pembiayaan dibagi menjadi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan sumber penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang di antaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang. Sedangkan ketika APBD diperkirakan surplus, diutamakan untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah, pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial.



Sumber: BKAD Kota Madiun, 2021

Gambar 3.16
Perkembangan Penerimaan Pembiayaan Netto Tahun Berjalan Kota Madiun Tahun 2016–2020 (Miliar Rupiah)

Dari sisi pembiayaan, realisasi penerimaan pembiayaan menurun mencapai -19,49 persen pada tahun 2020 dibandingkan tahun sebelumnya. Komponen utama penerimaan pembiayaan masih bersumber dari Silpa tahun sebelumnya. Sedangkan Pembiayaan netto pada Tahun 2020 juga mengalami penurunan hingga Rp 223,64 miliar. Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian mengenai pembiayaan adalah sebagai berikut

1. Silpa tahun lalu masih relatif tinggi. Hal ini bisa menunjukkan kelemahan dalam perencanaan pembangunan tahunan. Namun disisi lain, silpa yang tinggi bisa jadi akibat adanya efisiensi belanja maupun penangguhan kegiatan pembangunan.
2. Pembiayaan pembangunan masih bertumpu kepada APBD, sehingga kedepan diperlukan pembiayaan alternatif seperti KPBU, CSR dan lain sebagainya.

Selanjutnya, rincian perkembangan nilai penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, serta pembiayaan netto Kota Madiun tahun 2016 sampai dengan proyeksi tahun 2020 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.5
Perkembangan Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Madiun Tahun Anggaran 2016–2020

Kode	Uraian	REALISASI									Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2016R	2017R		2018R		2019R		2020R		
		Rp	Rp.	%P	Rp.	%P	Rp.	%P	Rp.	%P	
3	PEMBIAYAAN										
03.01	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	339.139.349.352,77	305.857.486.594,13	-9,81	308.491.416.889,46	0,86	279.278.826.431,2 2	-9,47	223.635.003.072,0 6	-19,92	-9,59
03.01.01	Penggunaan SiLPA	339.135.179.352,77	305.857.486.594,13	-9,81	308.490.756.889,46	0,86	279.278.826.431,22	-9,47	223.635.003.072,06	-19,92	-9,59
03.01.02	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
03.01.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
03.01.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
03.01.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	4.170.000,00	0	-100,00	660.000,00	0,00	0	-100,00	0	0,00	-50,00
03.02	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-	0,00	-	0,00	1.500.000.000,00	0,00	-	-100,00	-25,00
03.02.01	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
03.02.02	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0	0	0,00	0	0,00	1.500.000.000,00	0,00	0	-100,00	-25,00
03.02.03	Pembayaran Pokok Utang	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
03.02.04	Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	339.139.349.352,77	305.857.486.594,13	-9,81	308.491.416.889,46	0,86	277.778.826.431,2 2	-9,96	223.635.003.072,0 6	-19,49	-9,60
03.03	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	305.857.486.594,13	308.490.756.889,46	0,86	279.278.826.431,22	-9,47	223.635.003.072,0 6	-19,92	268.868.693.691,2 8	20,23	-2,08

Sumber : BKAD Kota Madiun, 2021;

Keterangan : %P adalah persentase pertumbuhan

3.1.2 Neraca Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2020 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, neraca daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah. Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif.

Gambaran umum perkembangan neraca daerah pada periode tahun 2016-2020 menunjukkan bahwa jumlah nilai total nominal Aset daerah mengalami peningkatan seiring dengan dinamika pengelolaan keuangan daerah Kota Madiun. Pada tahun 2016, nilai total aset daerah mencapai sebesar Rp 2,38 triliun yang kemudian meningkat menjadi sebesar Rp 2,40 triliun pada tahun 2017. Pada tahun 2018, nilai total aset kembali meningkat sebesar Rp 2,53 triliun. Hingga tahun 2020 nilai total aset Kota Madiun mencapai 2,75 triliun.

Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa datang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam satuan moneter. Aset terdiri dari (1) aset lancar, (2) investasi jangka panjang, (3) aset tetap, (4) dana cadangan, dan (5) aset lainnya.

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Kewajiban memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Pada pos kewajiban daerah terlihat bahwa sepanjang tahun 2016-2020, jumlah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Madiun terdistribusi kedalam kewajiban jangka pendek.

Pada sisi lain, selama periode tahun 2016-2020, nilai ekuitas dana Kota Madiun juga mengalami peningkatan. Ekuitas Dana merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas Dana meliputi (1) Ekuitas Dana Lancar, (2) Ekuitas Dana Investasi, dan (3) Ekuitas Dana Cadangan. Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek.

Ekuitas dana investasi merupakan selisih antara jumlah nilai investasi permanen, aset tetap dan aset lainnya (tidak termasuk Dana Cadangan) dengan jumlah nilai utang jangka panjang. Ekuitas dana cadangan merupakan kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan dalam dana cadangan untuk tujuan tertentu di masa mendatang.

Tabel 3.6
Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah, Kota Madiun Tahun 2016-2020

	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan
1	ASET						
1.1	ASET LANCAR						
1.1.1	Kas						
	Kas di Kas Daerah	275.264,59	39.929,24	37.960,62	203.192,16	230.933,57	157.456
	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-	-	-	-	-
	Kas di Bendahara Penerimaan	20,39	41,69	7,07	2,11	1,81	13,2
	Kas di BLUD RSUD	28.036,19	23.695,74	14.145,09	11.466,24	29.262,96	21.321,24
	Kas di BLUD Puskesmas/JKN	2.536,32	3.527,55	5.779,79	7.160,29	6.899,78	5180,75
	Kas Lainnya	2.672,07	1.296,53	1.480,43	1.877,79	1.835,06	1.832,38
	Deposito berjangka 1 bulan	0	240.000,00	220.000,00	-	-	92.000
	Investasi Jangka Pendek						
1.1.2	Piutang						
	Piutang Pajak	3.433,17	4.062,93	5.147,92	9.834,98	8.748,31	6.245,46
	Piutang Retribusi	1.292,72	1.930,53	2.192,59	3.051,85	5.543,99	2.802,33
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	270,59	215,55	176,62	134,86	124,17	148,39
	Piutang Lain-Lain	30.636,06	35.482,42	23.021,78	32.039,14	1.169,19	24.469,72
	Penyisihan Piutang						
	Persediaan	12.648,25	11.908,19	16.671,48	17.001,49	17.752,06	15.196,29
	Belanja Dibayar Dimuka	1.521,88	2.502,47	2.725,16	2.657,86	19.008,00	5.683,07
	Jumlah Aset Lancar	358.332,23	364.592,85	329.308,64	285.335,48	299.326,03	327.379
	INVESTASI JANGKA PANJANG						
	Investasi Non Permanen						
	Investasi Dana Bergulir	21.282,51	22.535,72	23.268,81	24.042,03	24.563,73	23.138,56

	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan
	Penyisihan Investasi Dana Bergulir	-4.033,23	-4.282,74	-4.517,76	-4.532,36	-4.839,30	-4.441,08
	Investasi Permanen						
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	127.812,96	124.924,04	131.473,92	129.781,91	134.595,28	129.717,6
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	145.062,24	143.177,02	150.224,97	149.291,58	134.595,27	144.470,2
1.2	ASET TETAP						
1.2.1	Tanah	746.929,75	706.768,92	704.996,32	709.974,67	723.583,59	718.450,7
1.2.2	Peralatan dan Mesin	392.197,74	425.595,97	472.721,59	536.073,04	601.640,70	485.645,8
1.2.3	Gedung dan Bangunan	715.435,06	647.411,66	730.922,73	779.408,09	809.892,28	736.614
1.2.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	705.169,61	800.578,58	951.310,51	1.134.991,90	1.212.978,74	961.005
1.2.5	Aset Tetap Lainnya	4.770,70	4.806,74	5.751,21	5.915,704	6.141,44	5.477,16
1.2.6	Konstruksi dalam pengerjaan	45.425,93	48.322,38	6.106,39	4.916,06	7.607,04	22.475,56
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	-787.931,45	-841.927,31	-	-	-	-325.972
	Jumlah Aset Tetap	1.821.997,34	1.791.556,94	1.917.628,09	2.090.514,51	2.158.740,82	1.956.088
	DANA CADANGAN						
	Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
1.3	ASET LAINNYA						
1.3.1	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-	-	-	-	-
	Tuntutan Perbendaharaan	-	-	-	-	-	-
1.3.2	Tuntutan Ganti Rugi	2.925,74	155,65	155,65	155,65	121,44	702,83
1.3.3	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	31.979,76	88.411,76	119.532,90	119.532,90	119.532,90	95.798,04
	Bangun Guna Serah (Built of Transfer)	-	-	-	-	-	-

	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan
1.3.4	Aset Tak Berwujud	2.673,16	1.768,02	2.202,96	3.410,65	3.251,33	2.661,22
	Aset Lain-lain	20.891,86	23.096,00	23.299,76	24.743,31	32.817,02	2.543.514
	Jumlah Aset Lainnya	58.470,52	99.086,05	130.898,44	133.599,73	136.105,40	111.632
	TOTAL AKTIVA	2.383.862,33	2.398.412,87	2.528.060,14	2.658.741,30	2.748.491,96	2.543.514
2	KEWAJIBAN						
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						
2.1.1	Hutang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-	94	49	-	28,6
	Hutang Bunga	-	-	-	-	-	-
	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	-	-	-	-	-	-
	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Pemerintah Lainnya	-	-	-	-	-	-
	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - LK Bank	-	-	-	-	-	-
	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan	-	-	-	-	-	-
	Bukan Bank.	-	-	-	-	-	-
	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Obligasi	-	-	-	-	-	-
	Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang Lainnya	-	-	-	-	-	-
	Pendapatan Diterima Dimuka	3.948,53	4.963,94	6.039,49	5.782,08	4.482,21	5.043,25
	Utang Belanja	28.426,00	5.440,68	8.571	11.050,9	7.999,16	12.297,55

	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan
	Utang Jangka Pendek Lainnya	166,39	164,78	56	-	-	77,43
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	32.540,92	10.569,39	14.759,90	16.882,06	12.481,37	14.070,32
	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						
	Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	-	-	-	-	-	-
	Utang Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-	-	-
	Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	-	-	-	-	-	-
	Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bak	-	-	-	-	-	-
	Utang Dalam Negeri – Obligasi	-	-	-	-	-	-
	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	32.540,93	10.569,40	14.759,90	16.882,06	12.481,37	17.446,73
3	EKUITAS DANA						
3.1	EKUITAS DANA LANCAR						
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	305.857	308.490	279.278	223.635	268.868	277.225,6
	Pendapatan yang ditangguhkan	-	-	-	-	-	-
3.1.2	Cadangan Piutang	-	-	-	-	-	-
3.1.3	Cadangan Persediaan	-	-	-	-	-	-

	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan
	Cadangan Belanja Dibayar Dimuka	-	-	-	-	-	-
	Cadangan Pendapatan Diterima Dimuka	-	-	-	-	-	-
	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang	-	-	-	-	-	-
	Jangka Pendek	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Ekuitas Dana Lancar	-	-	-	-	-	-
3.2	EKUITAS DANA INVESTASI						
3.2.1	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	-	-	-	-	-	-
3.2.2	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	-	-	-	-	-	-
	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang	-	-	-	-	-	-
	Jangka Panjang.	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Dana Investasi	-	-	-	-	-	-
	EKUITAS DANA CADANGAN						
	Diinvestasikan dalam Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
	RK PPKD	736.059,69	742.163,33	-	-	-	-
	RK SKPD	-736.059,69	-742.163,33	-	-	-	-
	JUMLAH EKUITAS DANA	2.351.321,39	2.387.843,47	2.513.300,24	2.641.859,24	2.736.010,58	2.526.067
	TOTAL UTANG DAN EKUITAS DANA	2.383.862,31	2.398.412,87	2.528.060,14	2.658.741,30	2.748.491,96	2.543.514

Sumber: Neraca Daerah Kota Madiun, 2016-2020

Berdasarkan neraca tersebut, kemudian dianalisis kemampuan keuangan pemerintah daerah dapat dilakukan melalui perhitungan rasio. Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Untuk neraca keuangan daerah, rasio solvabilitas yang digunakan adalah rasio kewajiban terhadap aset dan rasio kewajiban terhadap ekuitas. Rasio kewajiban terhadap aset adalah kewajiban dibagi dengan aset, sedangkan rasio kewajiban terhadap ekuitas adalah kewajiban dibagi dengan ekuitas. Rasio Lancar digunakan untuk melihat kemampuan Pemerintah Kota Madiun dalam melunasi hutang jangka pendeknya. Semakin besar rasio yang diperoleh, semakin lancar hutang pembayaran jangka pendeknya.

Tabel 3.7
Analisis Rasio Neraca Daerah Kota Madiun, 2016-2020 (Rp juta)

Rasio	Rumus	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio Likuiditas	Aset Lancar	358.332,23	364.592,85	329.308,64	285.335,48	299.326,03
	Kewajiban Jangka Pendek	32.540,92	10.569,39	14.759,90	16.882,06	12.481,37
	Rasio Lancar	11,01	34,50	22,35	16,90	23,98
	Aset Lancar - Persediaan	345.683,98	352.684,66	312.637,16	268.333,99	281.573,97
	Kewajiban Jangka Pendek	32.540,92	10.569,39	14.759,90	16.882,06	12.481,37
	Quick Ratio	10,62	33,33	21,19	15,89	22,56
Rasio Solvabilitas	Total Hutang	32.540,93	10.569,40	14.759,90	16.882,06	12.481,37
	Total Aset	2.383.862,31	2.398.412,87	2.528.060,14	2.658.741,30	2.748.491,96
	Rasio Total Hutang (%)	1,37%	0,44%	0,59%	0,64%	0,46%
	Total Hutang	32.540,93	10.569,40	14.759,90	16.882,06	12.481,37
	Total Ekuitas	2.351.321,39	2.387.843,47	2.513.300,24	2.641.859,24	2.736.010,58
	Rasio Hutang/Modal (%)	1,38%	0,44%	0,59%	0,64%	0,46%

Sumber: Neraca Daerah Kota Madiun, 2016-2020 (diolah)

Tabel diatas menunjukkan kinerja keuangan Pemerintah Kota Madiun tahun 2016 sampai dengan 2020 yang dilihat dari rasio likuiditas dan solvabilitas. Hitungan rasio likuiditas berupa rasio lancar selama periode tahun 2016 sampai dengan 2020 terlihat mengalami fluktuasi seiring dengan dinamika perubahan komposisi kewajiban jangka pendek daerah. Demikaian juga dengan quick rasio yang mengalami tren fluktuatif selama lima tahun terakhir seiring dengan pemenuhan kewajiban jangka pendek daerah. Namun demikian secara keseluruhan terlihat bahwa cukup tingginya kemampuan keuangan daerah Kota Madiun dalam memenuhi kewajiban jangka pendek adalah cukup tinggi.

Kemudian jika dilihat kemampuan keuangan Kota Madiun dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya dapat terlihat dari rasio solvabilitas. Sepanjang tahun 2016-2020, rasio total hutang terhadap aset dan rasio hutang terhadap ekuitas mengalami tren fluktuatif. Pada tahun 2016 rasio hutang sebesar, 1,38 persen, pada tahun 2017 menurun drastis hingga mencapai 0,17 persen. Pada tahun 2018-2019 kembali meningkat hingga sebesar 0,64 persen. Pada tahun 2020 perlahan menurun hingga mencapai 0,44 persen. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa jumlah hutang jangka panjang daerah relatif kecil jika dibandingkan dengan kekayaan yang dimiliki oleh daerah.

Berdasarkan perhitungan, nilai rasio lancar Neraca Keuangan Pemerintah Daerah Kota Madiun mengindikasikan bahwa Pemerintah dapat dengan mudah mencairkan aset lancarnya untuk membayar seluruh hutang atau kewajiban jangka pendeknya. Walaupun begitu, perlu diperhatikan nilai rasio lancar sangat fluktuatif dari tahun ke tahun. Nilai rasio yang tidak stabil dapat menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi kewajibannya juga mengalami perubahan dari tahun ke tahun.

Quick Ratio lebih akurat dibandingkan rasio lancar (*current ratio*), dikarenakan *Quick ratio* telah mempertimbangkan persediaan dalam perhitungannya. Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai *quick ratio* neraca keuangan Pemerintah Daerah Kota Madiun menunjukkan bahwa kemampuan aset lancar daerah setelah dikurangi persediaan, mempunyai kemampuan yang kuat untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya walaupun nilainya mengalami tren yang fluktuatif.

Current ratio dan *quick ratio* atas keuangan Pemerintah Kota Madiun adalah tergolong kuat. Termasuk rasio total hutang terhadap aset relatif kecil, seperti terlihat pada tabel di atas. Hal tersebut menunjukkan bahwa kapabilitas keuangan Pemerintah Kota Madiun relatif kuat dalam pelunasan kewajiban-kewajibannya. Bahkan sebenarnya kapasitas keuangannya masih relatif besar bila akan dilakukan peminjaman dana untuk pembangunan-pembangunan, terlebih yang bersifat jangka panjang.

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBD mempunyai fungsi berikut ini:

- a. Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
- b. Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
- c. Fungsi pengawasan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kesesuaian kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- d. Fungsi alokasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
- e. Fungsi distribusi, mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- f. Fungsi stabilisasi, mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan melalui suatu sistem yang terintegrasi dalam rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pelaksanaannya mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai pada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

Berdasarkan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun yang disepakati setiap tahunnya, maka secara umum kebijakan umum pendapatan daerah Kota Madiun tahun-tahun anggaran sebelumnya sebagai berikut:

- a. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.
- b. Seluruh penerimaan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil.
- c. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sebagai komitmen taat azas dalam pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kota Madiun menetapkan kebijakan terkait pendapatan daerah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah

- a. Dalam upaya merencanakan target pendapatan asli daerah dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu, potensi dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi penerimaan pemerintah daerah serta optimalisasi pencapaiannya.
- b. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun berkenaan.
- c. Dalam upaya peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah, pemerintah daerah tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Upaya peningkatan pendapatan asli daerah ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, *law enforcement* dalam upaya membangun ketaatan wajib pajak dan wajib retribusi daerah serta peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli daerah untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi yang dibarengi dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan dengan biaya murah.

d. Melakukan upaya peningkatan penerimaan bagian laba/deviden atas penyertaan modal atau investasi daerah lainnya yang dapat ditempuh melalui inventarisasi dan menata serta mengevaluasi nilai kekayaan daerah yang dipisahkan baik dalam bentuk uang maupun barang sebagai penyertaan modal (investasi daerah). Jumlah rencana penerimaan yang dianggarkan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, telah mencerminkan rasionalitas dibandingkan dengan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan kembali ditetapkan sebagai penyertaan modal (telah diinvestasikan). Dalam upaya peningkatan PAD, pemerintah daerah mendayagunakan kekayaan daerah yang belum dipisahkan dan belum dimanfaatkan untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga sehingga menghasilkan pendapatan. Penyertaan modal pada pihak ketiga ditetapkan dengan peraturan daerah.

2. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah Kota Madiun terdiri dari; Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil Pajak (DBH-Pajak) dan Sumber Daya Alam (SDA).

- a. Pendapatan dari DBH-Pajak dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran berkenaan atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran berkenaan. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran berkenaan atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran berkenaan belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DBH-Pajak didasarkan pada Realisasi pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir;
- b. Pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun berkenaan. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran berkenaan belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DAU dan DAK didasarkan pada realisasi pendapatan DAU dan DAK selama 3 (tiga) tahun terakhir.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
 - a. Hibah yang diterima berupa uang harus dianggarkan dalam APBD dan didasarkan atas naskah perjanjian hibah antara pemerintah daerah dan pemberi hibah. Sumbangan yang diterima dari organisasi/lembaga tertentu/perorangan atau pihak ketiga, yang tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran maupun pengurangan kewajiban pihak ketiga/pemberi sumbangan diatur dalam peraturan daerah.
 - b. Lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah termasuk dana penyesuaian dianggarkan pada lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Kebijakan Umum Belanja Daerah

Secara umum, kebijakan umum keuangan daerah menyangkut tentang belanja daerah Kota Madiun Tahun 2011-2015, sebagai berikut:

- a. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- b. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
- c. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
- d. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

3.2.1.1 Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja

Belanja operasi memiliki proporsi terbesar dalam belanja daerah dengan rata-rata proporsi selama lima tahun terakhir sebesar 75,54 persen. Belanja tersebut diikuti oleh belanja modal dengan proporsi rata-rata sebesar 24,26 persen. Proporsi belanja terendah adalah belanja tak terduga dan transfer dengan nilai rata – rata proporsi masing – masing sebesar 0,13 persen dan 0,07 persen. Perkembangan proporsi belanja daerah dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.8
Proporsi Realisasi Belanja Daerah Kota Madiun, 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rerata
BELANJA OPERASI	76,11	73,20	74,80	73,13	80,48	75,54
Belanja Pegawai	65,11	56,03	56,11	52,41	54,10	56,75
Belanja Barang dan Jasa	32,85	40,12	39,39	43,69	42,86	39,78
Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah	0,89	1,71	2,75	1,86	1,46	1,73
Belanja Bantuan Sosial	1,14	2,14	1,74	2,04	1,57	1,73
BELANJA MODAL	23,89	26,80	24,99	26,80	18,83	24,26
Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25,23	40,46	18,26	22,24	25,00	26,24
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	21,76	16,96	25,02	15,84	20,00	19,92
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	51,91	40,10	53,37	59,79	52,50	51,53
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,19	1,25	1,37	0,94	2,50	1,25
Belanja Modal Aset Lainnya	0,91	1,24	1,98	1,19	0,00	1,06
BELANJA TAK TERDUGA	0,00	0,00	0,00	0,01	0,62	0,13
Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	40,00
BELANJA TRANSFER	0,00	0,00	0,21	0,06	0,07	0,07
Belanja Transfer Ke Daerah Lain	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	60,00
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	%	%	%	%	%	%

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kota Madiun, 2016– 2020 (diolah)

3.2.1.2 Proporsi Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Dalam kerangka untuk melaksanakan fungsi pelayanan dan pembangunan daerah, maka pemerintah daerah membutuhkan sumber pembiayaan *overhead cost* bagi sumber daya pegawai maupun barang jasa serta kebutuhan lainnya.

Dalam konteks penganggaran daerah, *overhead cost* pemerintah ini diletakkan pada berbagai pos pembelanjaan belanja tidak langsung dan belanja langsung. Gambaran tentang belanja daerah yang menginformasikan mengenai proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur Kota Madiun tertuang pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.9
Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama, Tahun 2016 – 2020 (Rp juta)

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	RATA-RATA PER TUMBUHAN
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
A	Belanja Tidak Langsung	319.592.121.409,00	250.060.682.678,31	324.807.335.863,00	325.250.812.396,08	307.373.774.797,53	105,8
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	303.399.209.708,00	226.393.833.947,00	222.510.284.513,00	225.712.878.659,00	221.623.558.333,00	1,02
2	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	2.999.290.000,00	3.310.593.550,00	4.414.005.000,00	4.454.496.650,00	4.545.272.900,00	0,98
3	Belanja Bunga						
4	Belanja Bagi Hasil						
5	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	3.214.958.401,00	3.014.975.014,00	4.563.509.829,00	3.992.809.987,00	3.817.429.733,00	1,05
6	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	-	892.744.078,00				
7	Tunjangan Profesi Guru			57.829.152.600,00	60.014.609.420,00	51.894.487.160,00	1,16
8	Belanja Hibah	4.895.131.600,00	11.924.689.389,31	21.318.545.231,00	15.422.819.810,08	11.938.091.671,53	1,29
9	Belanja Bantuan Sosial	4.455.685.000,00	3.896.000.000,00	12.043.991.990,00	15.001.277.870,00	12.854.873.000,00	1,17
10	Belanja Bantuan Keuangan	627.846.700,00	627.846.700,00	2.127.846.700,00	651.920.000,00	700.062.000,00	93,12
B	Pembiayaan Pengeluaran	339.139.349.352,77	305.857.486.594,13	308.491.416.889,46	279.278.826.431,22	223.650.613.313,81	124,87
1	Pembentukan Dana Cadangan						
2	Pembayaran Pokok Utang						
3	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	4.170.000,00		660.000,00		1.000.000,00	0,00
4	Pendapatan Asli Daerah		14.759.189.827,80				
5	Dana Perimbangan		(62.257.218.794,00)				
6	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah		4.199.693.504,00				
7	Belanja	339.135.179.352,77	349.155.822.056,33	308.490.756.889,46	279.278.826.431,22	223.649.613.313,81	124,87
8	PD, Aneka Usaha				1.500.000.000,00		
	TOTAL (A+B)	658.731.470.761,77	555.918.169.272,44	633.298.752.752,46	604.529.638.827,30	531.024.388.111,34	113,84

Sumber : BKAD Kota Madiun, 2021

Tabel 3.10
Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur, Tahun 2016 – 2020 (Rp juta)

Uraian		2016	2017	2018	2019	2020
BELANJA		1.031.564.193.296,44	954.991.703.029,81	1.036.658.830.595,88	1.148.496.711.114,00	1.014.631.224.152,20
BELANJA OPERASI		785.169.488.575,44	699.013.726.516,58	775.443.371.637,41	839.925.171.507,94	816.557.831.371,63
Belanja Pegawai		511.243.214.266,00	391.631.558.502,00	435.126.974.606,00	440.222.361.775,00	441.740.830.119,00
	Dinas Pendidikan	309.888.670.825,00	190.667.725.306,00	188.392.661.089,00	190.598.262.380,00	174.792.378.157,00
	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	25.854.939.831,00	29.478.458.362,00	34.821.126.933,00	34.902.936.663,00	37.008.693.188,00
	RSUD	17.058.483.673,00	18.121.145.987,00	24.000.063.885,00	26.891.041.812,00	28.400.006.313,00
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7.180.172.987,00	7.139.040.557,00	10.132.708.471,00	10.252.671.794,00	8.744.217.456,00
	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	3.763.249.708,00	5.203.929.512,00	5.265.542.820,00	5.633.900.438,00
	DKP	10.284.328.415,00				
	Satuan Polisi Pamong Praja	3.939.250.867,00	6.136.502.599,00	6.926.109.921,00	7.039.951.936,00	8.151.783.648,00
	BPBD	2.057.707.835,00	1.046.778.306,00	1.151.970.296,00	1.174.721.906,00	1.367.637.708,00
	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	4.352.723.468,00	4.522.137.531,00	4.661.065.597,00	4.526.201.295,00
	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	4.114.957.456,00	3.027.192.588,00	3.492.130.226,00	3.448.385.833,00	3.800.017.709,00
	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	3.598.634.955,00		5.117.732.126,00	5.023.791.156,00	5.021.091.735,00
	Dinas Lingkungan Hidup	1.723.335.204,00	9.996.330.551,00	12.927.368.492,00	12.669.999.211,00	12.858.999.568,00
	Dinas Dukcapil	3.500.081.902,00	3.669.964.657,00	3.892.052.695,00	4.045.559.954,00	3.816.623.191,00
	Dinas Perhubungan	8.544.802.598,00	6.518.188.768,00	7.825.283.871,00	7.593.403.732,00	8.192.811.571,00
	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	3.798.279.607,00	4.663.942.133,00	4.910.728.226,00	4.580.348.886,00
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.895.541.856,00	3.231.946.318,00	4.304.380.668,00	4.162.051.362,00	4.090.955.679,00
	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	4.089.186.986,00	3.594.891.953,00	3.406.259.426,00	3.347.198.454,00	4.178.015.160,00
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.752.853.548,00	1.982.907.306,00	2.440.049.669,00	2.593.258.260,00	3.303.713.338,00
	KDH dan Wakil KDH	726.229.228,00	561.900.334,00	659.314.045,00	629.404.684,00	705.267.744,00
	D P R D	6.796.418.337,00	8.223.883.860,00			
	Sekretariat Daerah	16.304.636.330,00	15.054.347.984,00	16.046.794.687,00	17.021.915.077,00	5.163.056.258,00
	Bappelitbangda	6.192.831.237,00	4.779.555.122,00	4.905.377.524,00	4.991.143.746,00	5.762.592.782,00
	Bakesbangpol	3.275.795.140,00	3.215.943.249,00	3.515.004.868,00	3.238.532.219,00	3.631.686.789,00
	Sekretariat DPRD	2.261.542.566,00	2.667.863.632,00	14.742.708.233,00	15.084.343.422,00	14.964.304.663,00
	BPKAD	15.014.563.097,00	12.248.563.325,00	13.224.955.231,00	13.277.159.465,00	18.945.617.600,00

Uraian		2016	2017	2018	2019	2020
	Inspektorat	4.303.853.446,00	3.701.872.435,00	4.193.843.815,00	4.873.610.991,00	6.426.127.009,00
	Kecamatan Kartoharjo	8.170.491.295,00	7.302.913.570,00	9.957.214.856,00	9.395.694.869,00	9.498.941.202,00
	Kecamatan Taman	8.185.646.415,00	7.596.632.802,00	11.272.962.717,00	10.740.745.115,00	11.450.377.254,00
	Kecamatan Manguharjo	8.076.055.284,00	7.202.044.987,00	10.573.283.182,00	9.606.829.953,00	11.782.442.267,00
	BKPSDM	3.954.880.312,00	3.651.914.114,00	4.675.889.320,00	5.125.067.843,00	5.108.831.947,00
	Dinas Perdagangan	7.953.477.279,00	8.114.296.163,00	9.457.522.228,00	9.434.870.937,00	8.923.980.416,00
	BAPENDA	7.636.437.272,00	6.917.873.681,00	8.682.196.956,00	8.222.472.358,00	7.748.998.522,00
Belanja Barang dan Jasa		257.954.754.292,44	280.472.821.815,27	305.475.751.519,41	369.278.712.052,86	350.024.036.581,10
Belanja Bunga		-	-	-	-	-
Belanja Subsidi		-	-	-	-	-
Belanja Hibah		7.013.671.600,00	11.924.689.389,31	21.318.545.231,00	15.422.819.810,08	11.938.091.671,53
Belanja Bantuan Sosial		8.957.848.417,00	14.984.656.810,00	13.522.100.281,00	15.001.277.870,00	12.854.873.000,00
	Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Kemasyarakatan	-	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial Kelompok Masyarakat	3.046.240.000,00	2.428.950.000,00	5.203.221.415,00	7.841.779.870,00	6.732.010.000,00
	Belanja Bantuan Sosial Anggota Masyarakat	1.334.445.000,00	1.290.050.000,00	6.695.930.575,00	7.092.630.000,00	6.036.763.000,00
	Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan	75.000.000,00	177.000.000,00	144.840.000,00	66.868.000,00	86.100.000,00
BELANJA MODAL		246.394.704.721,00	255.977.976.513,23	259.087.612.258,47	307.800.742.344,06	191.011.897.074,57
	Belanja Modal Tanah					1.972.500.000,00
	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	62.160.897.084,00	103.557.504.743,48	47.310.430.082,75	68.460.669.520,00	68.549.937.238,00
	Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	53.614.816.421,00	43.416.541.452,75	64.833.894.806,80	48.758.211.485,26	35.326.461.602,57
	Belanja Modal Jalan, Irigasi Dan Jaringan	127.909.902.613,00	102.648.521.200,00	138.271.368.268,92	184.022.541.935,80	80.833.932.839,00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	463.668.600,00	3.188.874.942,00	3.542.965.670,00	2.888.082.876,00	1.521.068.895,00
	Belanja Modal Aset Lainnya	2.245.420.003,00	3.166.534.175,00	5.128.953.430,00	3.671.236.527,00	2.807.996.500,00
BELANJA TIDAK TERDUGA		-	-	-	118.877.262,00	6.361.433.706,00
BELANJA TRANSFER		-	-	2.127.846.700,00	651.920.000,00	700.062.000,00

Sumber: BKAD Kota Madiun , 2021

Berdasarkan tabel berikut, terlihat bahwa Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur secara mengalami pasang surut. Pada tahun 2013, proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur mencapai sebesar 48,17% yang kemudian menurun menjadi sebesar 38,23% pada tahun 2016. Kemudian pada tahun 2017 meningkat menjadi sebesar 43,31% dan kembali mengalami penurunan menjadi sebesar 34,86% pada tahun 2018.

Tabel 3.11
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Madiun,
Tahun 2016-2020 (Rp juta)

No.	Uraian	Belanja (Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur)	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	Persentase
		(a)	(b)	(a) / (b) x 100%
1.	Tahun Anggaran 2016	511.243.214.266,00	1.370.703.542.649,21	37,30
2.	Tahun Anggaran 2017	391.631.558.502,00	1.260.849.189.623,94	31,06
3.	Tahun Anggaran 2018	435.126.974.606,00	1.345.150.247.485,34	32,35
4.	Tahun Anggaran 2019	440.222.361.775,00	1.427.775.537.545,22	30,83
5.	Tahun Anggaran 2020	441.740.830.119,00	1.238.281.837.466,01	35,67

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kota Madiun, 2016– 2020 (diolah)

3.2.2 Analisis Pembiayaan

Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pembiayaan daerah didefinisikan sebagai semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan sumbernya, pembiayaan dibagi menjadi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan sumber penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang di antaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.

Sedangkan ketika APBD diperkirakan surplus, diutamakan untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah, pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial. Analisis pembiayaan bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan dimasa datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Surplus/Defisit Riil adalah realisasi pendapatan daerah dikurangi realisasi belanja daerah ditambah dengan pengeluaran pembiayaan daerah. Surplus/Defisit riil APBD Kota Madiun selama kurun waktu tahun 2016-2020 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.12
Realisasi Pembiayaan Kota Madiun Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pendapatan Daerah	998.282.330.537,80	957.624.973.325,14	1.007.446.240.137,64	1.094.367.497.996,59	1.059.625.581.411,32
2	Belanja Daerah	1.031.564.193.296,44	954.991.703.029,81	1.036.658.830.595,88	1.148.511.321.355,75	1.014.391.890.792,10
	Surplus/Defisit	-33.281.862.758,64	2.633.270.295,33	-29.212.590.458,24	-54.143.823.359,16	45.233.690.619,22
3	Pembiayaan daerah					
	Penerimaan Pembiayaan Daerah	339.139.349.352,77	305.857.486.594,13	308.491.416.889,46	279.278.826.431,22	223.635.003.072,06
	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	-	-	-	1.500.000.000,00	-
	Pembiayaan Netto	339.139.349.352,77	305.857.486.594,13	308.491.416.889,46	277.778.826.431,22	223.635.003.072,06
	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	305.857.486.594,13	308.490.756.889,46	279.278.826.431,22	223.635.003.072,06	268.868.693.691,28

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kota Madiun, 2016- 2020 (diolah)

Dari tabel di atas, terlihat bahwa dari kurun waktu tahun 2016-2020, secara garis besar terjadi peningkatan pembiayaan netto pada setiap tahunnya sampai tahun 2018. Sedangkan tahun 2019 dan 2020 pembiayaan netto cenderung menurun. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain berasal dari pelampauan pendapatan, penghematan belanja, kewajiban pada pihak ketiga yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum terselesaikan dan sisa dana lanjutan.

Selama tiga tahun terakhir, SilPA tahun anggaran sebelumnya relatif tinggi. Pada tahun 2020, SilPA mengalami peningkatan yang cukup tinggi, setelah ditahun 2019 mengalami penurunan yang tinggi pula di bandingkan tahun sebelumnya. Perencanaan pembiayaan mutlak dilakukan untuk mengoptimalkan SilPA khususnya untuk anggaran tahun berikutnya.

Tabel 3.13

Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Kota Madiun Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Saldo Kas Neraca Daerah	308.529.553.683,83	68.490.756.889,46	279.373.090.431,22	223.698.605.054,81	268.933.182.301,20
	Dikurangi :					
2	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	32.540.925.644,25	10.569.398.509,44	14.759.899.497,48	16.882.059.880,05	12.481.370.812,44
3	Kegiatan Lanjutan					
	Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran	275.988.628.039,58	57.921.358.380,02	264.613.190.933,74	206.816.545.174,76	256.451.811.488,76

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kota Madiun, 2016-2020 (diolah)

Tabel 3.14
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Madiun Tahun 2016-2020

No	Uraian	Proporsi Dari Total Devisit Riil									
		(2016)	%	(2017)	%	(2018)	%	(2019)	%	(2020)	%
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	305.857.486.594,13		308.490.756.889,46		279.278.826.431,22		223.649.613.313,81		268.933.182.301,00	
2	Pencairan Dana Cadangan	0		0		0		0		0	
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	0		0		0		0		0	
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0		0		0		0		0	
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	4.170.000,00		0		660.000,00		0		1.000.000,00	
6	Penerimaan Piutang Daerah	0		0		0		0		0	

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kota Madiun, 2016-2020 (diolah)

Tabel 3.15
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kota Madiun Tahun 2016-2020 (Rp juta)

No	Uraian	2016		2017		2018		2019		2020	
		Rp	% dari silpa	Rp	% dari silpa	Rp	% dari silpa	Rp	% dari silpa	Rp	% dari silpa
1	Jumlah SiLPA	305.857.486.594,13		308.490.756.889,46		279.278.826.431,22		223.649.613.313,81		268.932.182.301,20	
	Pelampauan penerimaan PAD	14.759.189.827,80	4,83	38.595.466.369,14	12,51	24.674.582.191,73	8,84	25.600.672.907,59	11,45	26.178.521.061,59	9,73
	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	0	0	0	0	5.011.357.623,00	1,79	0	0	22.847.186.797,00	8,50
	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	3.783.304.504,00	1,24	19.177.114.122,00	6,22	663.457.367,91	0,24	0	0	20.313.418.855,00	7,55
	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	287.314.992.262,33	93,94	250.718.176.398,32	81,27	248.929.429.248,58	89,13	198.048.940.406,22	88,55	199.593.055.587,61	74,22
	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kegiatan lanjutan		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kota Madiun, 2016- 2020 (diolah)

Berdasarkan uraian dan penyajian tabel diatas selanjutnya diuraikan kesimpulan analisis kebijakan pembiayaan daerah antara lain:

- Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran sebelumnya dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran berjalan yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Selanjutnya SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran berkenaan. Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dibidang pinjaman daerah.
- Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, pemerintah daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan. Dalam hal perhitungan SILPA Tahun Berjalan negatif, pemerintah daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.

3.3 Kerangka Pendanaan

Setelah menguraikan kondisi pengelolaan keuangan daerah masa lalu sampai tahun 2020, maka selanjutnya dapat digambarkan proyeksi kapasitas riil keuangan daerah untuk mendanai kebutuhan pembangunan daerah dari tahun 2021 hingga tahun 2024 mendatang.

3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah

Proyeksi pendapatan Kota Madiun dilakukan berdasarkan proyeksi asumsi makro yang disesuaikan dengan asumsi makro nasional dan juga perkembangan data dalam beberapa tahun sebelumnya. Asumsi makro nasional dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.16
Kerangka Makro Ekonomi Indonesia Tahun 2020-2024

	2020	2021f*	2022f*	2023f*	2024f*
Pertumbuhan Ekonomi (%, YoY)	-2,1	5,0	5,4 – 6,0	5,2 – 6,1	5,2 – 6,3
Investasi	-4,9	4,3	6,5 – 7,2	8,1 – 9,1	5,8 – 7,0

	2020	2021f*	2022f*	2023f*	2024f*
Ekspor	-7,7	7,3	6,5 – 7,1	5,6 – 6,5	5,2 – 6,3
Industri Pengolahan	-2,9	5,2	5,6 – 6,3	5,2 – 6,2	5,2 – 6,4
Jasa-Jasa	-1,4	6,0	6,2 – 6,9	5,9 – 6,9	6,0 – 7,1
Stabilitas Makro-Ekonomi					
Inflasi (% , akhir periode)	1,7	2,5	2,0 – 4,0	2,0 – 4,0	1,5 – 3,5
Nilai Tukar (USD/IDR)	14.577	14.450	13.900 – 15.000	13.800 – 15.000	13.600 – 15.000
Defisit Transaksi Berjalan (% PDB)	-0,5	- 1,0	(1,6) – (1,7)	(1,8) – (2,1)	(2,2) – (2,7)
Cadangan Devisa (USD Miliar)	135,9	136,1	138,2 – 141,4	138,5 – 144,4	140,3 – 141,2

Sumber: Kemenkeu, 2021

Sejalan dengan asumsi makro nasional, proyeksi pendapatan dan belanja daerah juga mempertimbangkan proyeksi makro di Kota Madiun. Proyeksi makro dengan berbagai skenario dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.17

Kerangka Makro Kota Madiun 2020-2024

indikator makro	2020	2021						2022						2023						2024					
		Pesimis		Moderat		Optimis		Pesimis		Moderat		Optimis		Pesimis		Moderat		Optimis		Pesimis		Moderat		Optimis	
pertumbuhan ekonomi	-3,39	1,67	0,00	1,10	2,69	2,95	3,95	1,65	0,02	1,13	2,71	3,06	5,11	1,62	0,05	1,15	2,73	3,08	5,75	1,60	0,07	1,17	2,76	3,11	4,02
PDRB perkapita	52,57	59,78						60,01						65,34						70,15					
Tingkat kemiskinan	4,98	5,34	5,19	4,91	4,97	4,32	5,09	5,34	5,19	4,87	4,97	4,32	4,38	5,32	5,17	4,65	4,95	4,30	4,36	5,30	5,14	4,55	4,92	4,28	4,33
TPT	8,32	8,15	8,38	5,62	5,74	3,79	3,85	8,26	8,38	5,62	5,74	3,79	3,85	8,24	8,36	5,12	5,72	3,77	3,83	8,21	8,34	5,00	5,70	3,74	3,80
IPM	80,91	81,25						81,7						82,15						82,35					
Gini Ratio	0,39	0,44	0,42	0,37	0,35	0,35	0,34	0,44	0,42	0,37	0,36	0,35	0,34	0,42	0,40	0,35	0,33	0,33	0,32	0,39	0,37	0,32	0,30	0,30	0,29
Inflasi	1,86	4,90	4,78	2,35	2,63	1,98	1,86	4,9	4,66	2,87	2,63	1,98	1,86	4,87	4,76	2,84	2,61	1,95	1,84	4,85	4,73	2,82	2,59	1,93	1,81

Sumber: Data Proyeksi Bapelitbangda, 2021

Pada proyeksi makro di Kota Madiun terdapat 3 kelompok yaitu pesimis, moderat dan optimis. Dengan asumsi sebagai berikut :

1. Kondisi Pesimis adalah apabila :
 - a. Target Vaksin 100% belum dapat dicapai di Tahun 2022
 - b. Terjadi lonjakan kasus Covid-19 yang diikuti dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
2. Kondisi Moderat adalah apabila :
 - a. Target Vaksin 100% belum dapat dicapai di Tahun 2022
 - b. Kasus Covid-19 masih ada, namun perkembangannya cenderung stabil
3. Kondisi Optimis adalah apabila :
 - a. Target Vaksin 100% terselesaikan di Tahun 2021
 - b. Kasus Covid-19 mengalami penurunan, bahkan tidak terjadi perkembangan yang signifikan.

Selain mempertimbangkan asumsi makro ditingkat nasional dan lokal, dilakukan juga penyesuaian dan penilaian terhadap pertumbuhan pos pendapatan daerah selama tahun 2016-2020 dan perkiraan pertumbuhan ekonomi Kota Madiun dalam periode lima tahun yang akan datang, dengan kondisi awal APBD Kota Madiun tahun 2019 dan realisasi APBD Kota Madiun Tahun 2020. APBD tahun 2021 sudah di sahkan pada tahun 2020. Sehingga proyeksi yang dilakukan adalah mulai tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Berdasarkan penghitungan tersebut, pendapatan daerah pada APBD tahun 2022 diperkirakan sebesar Rp 1,003 triliun, dan meningkat menjadi Rp 1,111 triliun pada tahun 2024.

Komponen pendapatan yang berkontribusi paling besar diproyeksikan dari pendapatan transfer yang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU). Seiring dengan perkembangan pendapatan daerah, belanja daerah juga akan mengalami peningkatan, dari sebesar Rp 1,129 triliun pada tahun 2022 kemudian meningkat menjadi sebesar Rp 1,164 triliun pada tahun 2023. Pada akhir periode RPJMD Madiun tahun 2024 ini, belanja daerah diperkirakan akan meningkat menjadi sebesar Rp 1,206 triliun.

Tabel 3.18

Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kota Madiun Tahun 2019-2024

NO	URAIAN	Data Tahun Dasar	Tingkat	Proyeksi			
		2020	Pertumbuhan	2021	2022	2023	2024
		(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
A	Belanja Tidak Langsung	307.373.774.797,53	105,82	306.989.694.737,80	306.682.430.690,01	306.426.377.316,85	306.225.675.086,08
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	221.623.558.333,00	1,02	219.068.069.227,53	217.023.677.943,16	215.320.018.539,51	214.184.245.603,75
2	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	4.545.272.900,00	0,98	4.593.584.865,63	4.632.234.438,13	4.664.442.415,21	4.685.914.399,93
3	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Insentif Pemungutan Pajak daerah	3.817.429.733,00	1,05	3.836.256.962,13	3.851.318.745,43	3.863.870.231,00	3.872.237.888,00
6	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Tunjangan Profesi Guru	51.894.487.160,00	1,16	53.516.189.883,75	54.813.552.062,75	55.894.697.211,92	56.615.443.978
8	Belanja Hibah	11.938.091.671,53	1,29	12.158.184.173,77	12.334.258.175,55	12.480.986.510,00	12.578.805.400,26
9	Belanja Bantuan Sosial	12.854.873.000,00	1,17	13.117.347.625,00	13.327.327.325,00	13.502.310.408,33	13.618.965.797,22
19	Belanja Bantuan Keuangan	700.062.000,00	93,12	700.062.000,00	700.062.000	700.062.000	700.062.000
B	Pengeluaran Pembiayaan	223.650.613.313,81	124,87	220.040.689.375,00	217.634.740.082,61	215.830.278.113,26	214.386.708.537,77
1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pendapatan Asli Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Dana Perimbangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Belanja	223.649.613.313,81	124,87	220.040.689.370,00	217.634.740.082,61	215.830.278.113,26	214.386.708.537,77
8	PD, Aneka Usaha						
	TOTAL	531.024.388.111,34	113,84	527.030.384.112,89	524.317.170.772,62	522.256.655.430,11	520.642.383.605,85

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kota Madiun, 2016-2020 (diolah)

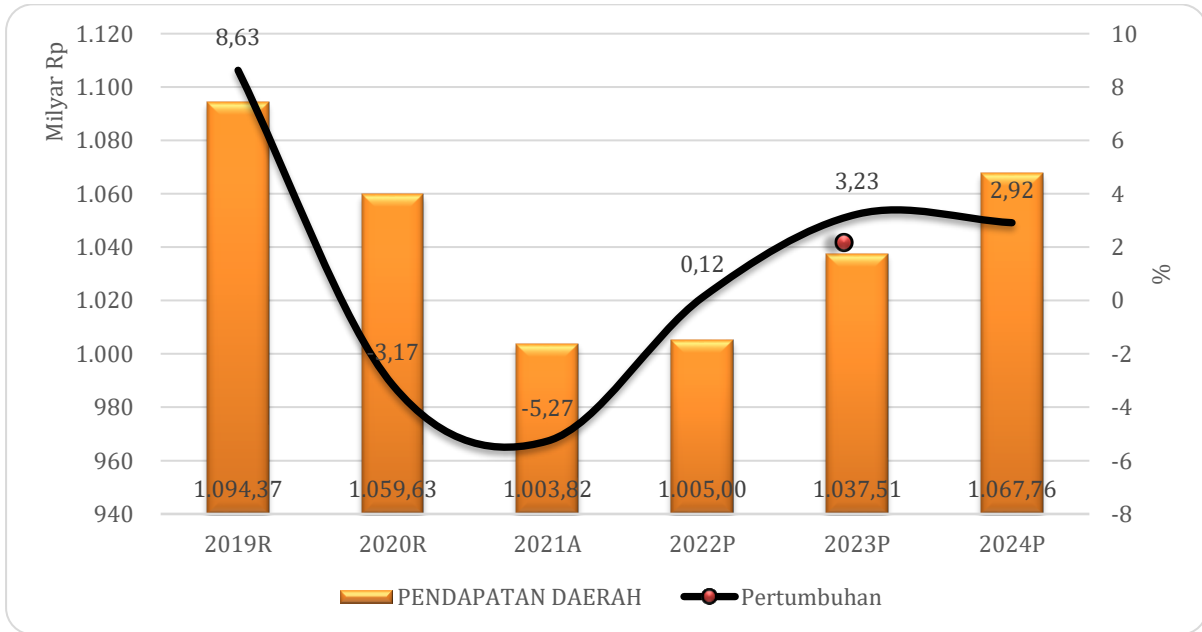
Tabel 3.19
Realisasi dan Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024

Kode	Uraian	Pertumbuhan (%)	JUMLAH					
			2019R	2020R	2021A	2022P	2023P	2024P
1	PENDAPATAN DAERAH	3,28	1.094.367.497.996,59	1.059.625.581.411,32	1.003.822.143.093,00	1.004.999.753.910,00	1.037.508.736.351,40	1.067.757.683.350,44
01.01	Pendapatan Asli Daerah	13,00	252.048.754.413,59	248.656.192.759,32	226.891.939.093,00	246.298.823.859,00	256.478.047.876,63	266.375.505.880,08
01.01.01	Pajak daerah	16,96	91.077.191.655,45	90.286.840.987,07	76.978.000.000,00	86.255.000.000,00	90.567.750.000,00	93.284.782.500,00
01.01.02	Retribusi daerah	9,95	20.301.325.919,00	15.291.324.019,00	16.731.224.667,00	17.841.947.807,00	18.198.786.763,14	19.145.123.674,82
01.01.03	Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	7,68	14.641.711.340,55	15.216.268.562,40	15.092.455.426,00	15.216.268.562,00	16.281.407.361,34	17.258.291.803,02
01.01.04	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	11,53	126.028.525.498,59	127.861.759.190,85	118.090.259.000,00	126.985.607.490,00	131.430.103.752,15	136.687.307.902,24
01.02	Pendapatan Transfer	0,45	823.129.463.583,00	790.939.408.652,00	757.530.604.000,00	739.301.330.051,00	761.631.088.474,77	781.982.577.470,36
01.02.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	0,79	737.079.907.650,00	705.872.676.797,00	692.146.911.000,00	677.911.879.000,00	698.221.826.870,08	716.775.410.888,62
1.2.1.01.01.1	Dana bagi hasil pajak	8,58	16.076.390.385,00	34.444.290.949,20	19.174.345.664,00	19.174.345.664,00	20.133.062.947,20	23.153.022.389,28
1.2.1.01.01.2	Dana bagi hasil bukan pajak	3,72	52.685.578.633,00	51.666.436.423,80	43.349.063.336,00	43.349.063.336,00	44.649.535.236,08	46.882.011.997,88
1.2.1.01.01.3	Dana Bagi hasil cukai	2,35	13.939.983.813,00	0,00	16.345.513.000,00	16.345.513.000,00	16.508.968.130,00	17.334.416.536,50
1.2.1.01.01.4	Dana Alokasi Umum	0,42	522.596.024.000,00	473.852.439.000,00	480.897.030.000,00	480.897.030.000,00	481.493.342.317,20	486.356.425.074,60
1.2.1.01.01.5	Dana Alokasi khusus	1,67	76.239.204.819,00	72.596.481.424,00	79.356.096.000,00	79.356.096.000,00	79.760.812.089,60	82.919.340.248,35
1.2.1.01.02	Dana Insentif Daerah	6,13	55.542.726.000,00	73.313.029.000,00	53.024.863.000,00	53.024.863.000,00	55.676.106.150,00	60.130.194.642,00
1.2.1.01.03	Dana Otonomi Khusus		0	0	0	0	0	0
01.02.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	- 3,13	86.049.555.933,00	85.066.731.855,00	65.383.693.000,00	61.389.451.051,00	63.409.261.604,69	65.207.166.581,74
1.2.2.01	Pendapatan Bagi Hasil	- 3,29	84.934.976.933,00	84.049.652.855,00	64.366.614.000,00	60.321.518.101,00	62.319.969.995,69	64.096.089.140,56
1.2.2.02	Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya	7,11	1.114.579.000,00	1.017.079.000,00	1.017.079.000,00	1.067.932.950,00	1.089.291.609,00	1.111.077.441,18
01.03	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	-	19.189.280.000,00	20.029.980.000,00	19.399.600.000,00	19.399.600.000,00	19.399.600.000,00	19.399.600.000,00
01.03.01	Hibah	-	19.189.280.000,00	20.029.980.000,00	19.399.600.000,00	19.399.600.000,00	19.399.600.000,00	19.399.600.000,00

Kode	Uraian	Pertumbuhan (%)	JUMLAH					
			2019R	2020R	2021A	2022P	2023P	2024P
01.03.02	Dana darurat		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.03	Pendapatan Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	BELANJA DAERAH	- 0,22	1.148.511.321.355,75	1.014.391.890.792,10	1.140.822.143.093,00	1.129.999.753.910,00	1.137.474.067.834,07	1.147.336.615.545,94
05.01	BELANJA OPERASI	2,71	839.939.781.749,69	816.358.776.801,53	939.902.569.530,00	959.324.726.172,00	966.093.763.849,82	970.640.962.947,82
05.01.01	Belanja Pegawai	3,94	440.222.382.579,38	441.683.138.649,00	478.425.879.983,00	485.258.678.433,00	499.476.757.711,09	507.118.752.104,07
05.01.02	Belanja Barang dan Jasa	3,68	366.995.675.620,23	349.882.673.481,00	425.059.231.547,00	436.594.527.461,00	440.960.472.735,61	444.532.252.564,77
05.01.03	Belanja Bunga		0		0	0,00	-	-
05.01.04	Belanja Subsidi		0		0	0,00	-	-
05.01.05	Belanja Hibah	- 21,37	15.603.619.810,08	11.938.091.671,53	13.765.706.000,00	13.572.686.278,00	10.600.267.983,12	8.300.009.830,78
05.01.06	Belanja Bantuan Sosial	- 26,94	17.118.103.740,00	12.854.873.000,00	22.651.752.000,00	23.898.834.000,00	15.056.265.420,00	10.689.948.448,20
05.02	BELANJA MODAL	- 13,78	307.800.742.344,06	191.011.897.074,57	197.738.448.365,00	165.395.287.479,00	170.380.303.984,26	175.695.652.598,13
05.02.01	Belanja Modal Tanah		0,00	0	0,00	0,00	-	-
05.02.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	- 39,55	68.460.669.520,00	47.752.974.268,64	50.500.943.323,00	28.304.237.988,00	30.568.577.027,04	32.708.377.418,93
05.02.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	- 28,50	48.758.211.485,26	38.202.379.414,91	56.229.035.949,00	39.281.239.379,00	40.066.864.166,58	41.268.870.091,58
05.02.04	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	9,72	184.022.541.935,80	100.281.245.964,15	88.974.356.300,00	95.695.457.752,00	97.609.366.907,04	99.561.554.245,18
05.02.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4,99	2.888.082.876,00	4.775.297.426,86	2.034.112.793,00	2.114.352.360,00	2.135.495.883,60	2.156.850.842,44
05.02.05	Belanja Modal Aset Lainnya		3.671.236.527,00	0,00	0,00	0,00	-	-
05.03	BELANJA TAK TERDUGA	- 23,72	118.877.262,00	6.321.154.916,00	3.181.125.198,00	5.279.740.259,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
05.03.01	Belanja Tidak Terduga	- 23,72	118.877.262,00	6.321.154.916,00	3.181.125.198,00	5.279.740.259,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
05.04	BELANJA TRANSFER		651.920.000,00	700.062.000,00	-	-	-	-
5.4.1	Belanja Transfer Ke Daerah Lain		651.920.000,00	700.062.000,00	0,00	0	0	0

Kode	Uraian	Pertumbuhan (%)	JUMLAH					
			2019R	2020R	2021A	2022P	2023P	2024P
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	- 0,22	1.148.511.321.355,75	1.014.391.890.792,10	1.140.822.143.093,00	1.129.999.753.910,00	1.137.474.067.834,07	1.147.336.615.545,94
	SURPLUS / (DEFISIT)	- 25,90	-54.143.823.359,16	45.233.690.619,22	-137.000.000.000,00	-125.000.000.000,00	-99.965.331.482,68	-79.578.932.195,50
3	PEMBIAYAAN							
03.01	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	- 62,24	279.278.826.431,22	223.635.003.072,06	268.868.693.691,28	125.000.000.000,00	99.965.331.482,68	79.578.932.195,50
03.01.01	Penggunaan SiLPA	- 62,24	279.278.826.431,22	223.635.003.072,06	268.868.693.691,28	125.000.000.000,00	99.965.331.482,68	79.578.932.195,50
03.01.02	Pencairan Dana Cadangan		0	0	0	0	0	0
03.01.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0	0	0	0	0	0
03.01.04	Penerimaan Pinjaman Daerah		0	0	0	0	0	0
03.01.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman		0	0	0	-	-	-
03.02	PENGELUARAN PEMBIAYAAN		1.500.000.000,00	-	-	-	-	-
03.02.01	Pembentukan Dana Cadangan		0	0	0	0	0	0
03.02.02	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		1.500.000.000,00	0	0	0	0	0
03.02.03	Pembayaran Pokok Utang		0	0	0	0	0	0
03.02.04	Pemberian Pinjaman Daerah		0	0	0	0	0	0
	PEMBIAYAAN NETTO	- 62,24	277.778.826.431,22	223.635.003.072,06	268.868.693.691,28	125.000.000.000,00	99.965.331.482,68	79.578.932.195,50
03.03	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	-100,00	223.635.003.072,06	268.868.693.691,28	131.868.693.691,28	0,00	0,00	0,00

Sumber: BKAD Kota Madiun, 2021

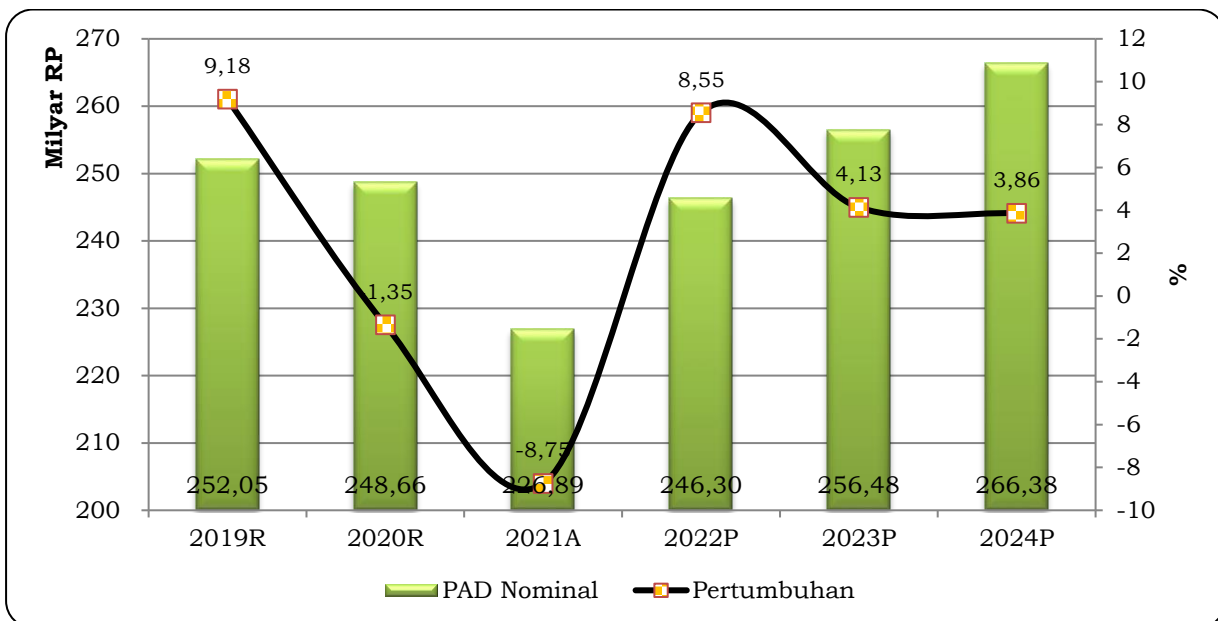


Sumber: BKAD Kota Madiun, 2021

Gambar 3.17

Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Madiun
Tahun 2019–2024 (Miliar Rupiah)

Secara nominal, pendapatan daerah diproyeksikan akan mengalami peningkatan sampai akhir periode RPJMD tahun 2024. Setelah mengalami penurunan pendapatan sebagai dampak Covid19, pendapatan daerah diperkirakan mulai meningkat pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Nilai proyeksi pendapatan daerah tahun 2024 sebesar Rp. 1,067 triliun.

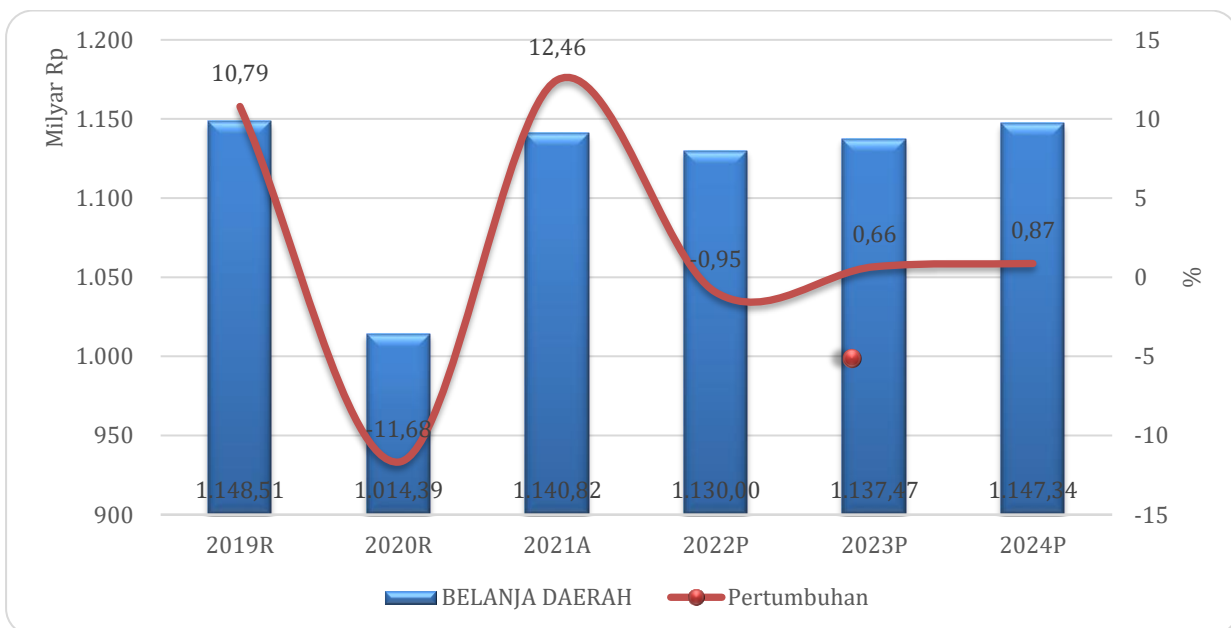


Sumber: BKAD Kota Madiun, 2021

Gambar 3.18

Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Asli Daerah Kota Madiun
Tahun 2019–2024 (Miliar Rupiah)

Sebagai salah satu komponen pembentuk pendapatan daerah, PAD Kota Madiun diproyeksikan mengalami peningkatan mulai tahun 2022. Peningkatan tersebut akan terus berlangsung sampai akhir periode RPJMD dengan nilai nominal sebesar 266,38 Milyar dengan pertumbuhan sebesar 3,86 persen. Peningkatan tersebut cukup moderat ditengah ketidakpastian kondisi ekonomi baik global maupun nasional sebagai dampak Covid-19.



Sumber: BKAD Kota Madiun, 2021

Gambar 3.19

Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Madiun
Tahun 2019–2024 (Miliar Rupiah)

Belanja daerah diproyeksikan meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan daerah. Realisasi belanja daerah tahun 2020 sebesar 1,014 triliun diproyeksikan akan mengalami peningkatan hingga 1,147 triliun pada tahun 2024. Pertumbuhan belanja daerah diakhir periode RPJMD diproyeksikan sebesar 0,87 persen.

3.3.2 Perhitungan Kerangka Pendanaan

Langkah pertama yang dilakukan dalam menghitung kerangka pendanaan daerah adalah menentukan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah yang merupakan hasil proyeksi total penerimaan daerah, baik yang bersumber dari pos pendapatan daerah maupun pos pembiayaan daerah. Selanjutnya total proyeksi penerimaan daerah tersebut dikurangi dengan hasil proyeksi total belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat.

Sesuai dengan kondisi tersebut, proyeksi pendapatan daerah Kota Madiun tahun 2019-2024 dihitung berdasarkan asumsi pertumbuhan moderat, hal ini didasarkan pada data realisasi yang juga moderat selain itu dampak pandemi covid-19 juga berpengaruh terhadap turunnya pendapatan daerah. Kemudian pada tahun 2022-2024 diproyeksikan bahwa tidak akan ada SiLPA tiap tahunnya. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa tahun-tahun mendatang proses perencanaan dan penganggaran diharapkan akan menjadi lebih baik dan sistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sudah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau dengan asumsi bahwa SiLPA harus mampu menutup defisit anggaran yaitu maksimal 6% dari total APBD.

Dalam upaya meningkatkan kapasitas dan efektifitas belanja daerah maka perlu ditetapkan kebijakan alokasi dari kapasitas kemampuan keuangan daerah ke dalam tiga kelompok prioritas;

- a. Rencana Alokasi Pengeluaran Prioritas I, dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar;
- b. Rencana Alokasi Pengeluaran Prioritas II, dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan Visi dan Misi Kepala Daerah
- c. Rencana Alokasi Pengeluaran Prioritas III, dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

Tabel 3.20

Proyeksi Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Kota Madiun Tahun 2019-2024

NO	URAIAN	Data Tahun Dasar	Tingkat	Proyeksi			
		2020	Pertumbuhan	2021	2022	2023	2024
		(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Saldo Kas Neraca Daerah	268.933.182.301,20	83,18	186.398.811.863,07	168.051.911.606,15	132.389.044.046,84	110.095.793.937,81
	Dikurangi :						
2	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	12.481.370.812,44	135,26	11.129.878.680,77	10.034.384.712,83	9.231.026.519,94	8.972.635.920,29
3	Kegiatan Lanjutan						
	Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran	256.451.811.488,76	80,65	175.268.933.182,30	158.017.526.893,32	123.158.017.526,89	101.123.158.017,53

Sumber: BKAD Kota Madiun, 2021

Tabel 3.21
Kapabilitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024

No.	Uraian	PROYEKSI					
		2019R	2020R	2021	2022	2023	2024
01.00	Pendapatan	1.094.367.497.997	1.059.625.581.411	1.003.822.143.093	1.004.999.753.910	1.037.508.736.351	1.067.757.683.350
02.00	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)	-	-	-	-	-	-
03.00	Sia Lebih Riil Perhitungan Anggaran	279.278.826.431	223.635.003.072	268.868.693.691	125.000.000.000	99.965.331.483	79.578.932.196
Jumlah Penerimaan		1.373.646.324.428	1.283.260.584.483	1.272.690.836.784	1.129.999.753.910	1.137.474.067.834	1.147.336.615.546
Dikurangi							
04.00	Belanja Operasi*	472.944.106.129	466.476.103.321	514.843.337.983	522.730.198.711	525.133.291.114	526.108.710.383
05.00	Pengeluaran Pembiayaan	1.500.000.000	0	0	0	0	0
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah		899.202.218.298	816.784.481.163	757.847.498.801	607.269.555.199	612.340.776.720	621.227.905.163

*Belanja operasi diluar belanja barang dan jasa

Sumber: BKAD Kota Madiun, 2021

Tabel 3.22
Rencana Penggunaan Kapabilitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024

Uraian	PROYEKSI					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah	899.202.218.298	816.784.481.163	757.847.498.801	607.269.555.199	612.340.776.720	621.227.905.163
Prioritas I	395.648.976.051	359.385.171.712	333.452.899.473	267.198.604.288	269.429.941.757	273.340.278.272
Prioritas II	377.664.931.685	343.049.482.088	318.295.949.497	255.053.213.184	257.183.126.222	260.915.720.168
Prioritas III	125.888.310.562	114.349.827.363	106.098.649.832	85.017.737.728	85.727.708.741	86.971.906.723

Sumber: BKAD Kota Madiun, 2021

3.3.3. Arah Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan daerah meliputi kebijakan pada bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Kebijakan keuangan daerah memberikan gambaran tentang arah dan upaya dalam pengelolaan keuangan daerah. Optimalisasi penerimaan dan pembiayaan daerah serta efisiensi dan efektifitas belanja daerah menjadi upaya prioritas dalam arah kebijakan keuangan daerah mendatang.

Selain pendanaan yang bersumber dari APBD baik yang bersumber dari PAD, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pendanaan non APBD seperti dana kemitraan swasta, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR). Uraikan lebih lanjut mengenai kebijakan pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat dalam tabel berikut

Tabel 3.23
Perbandingan Arah Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah

KEBIJAKAN	RPJMD SEBELUM PERUBAHAN	RPJMD SETELAH PERUBAHAN
Kebijakan Pendapatan daerah (umum)	Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.	Peningkatan target pendapatan daerah sesuai dengan kondisi perekonomian dan peraturan yang berlaku;
	Seluruh penerimaan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil.	Peningkatan kapasitas SDM pengelola pendapatan daerah;
	Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.	Peningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak / retribusi untuk peningkatan pembangunan;
		Penanganan ekonomi daerah sebagai dampak Covid-19 membutuhkan relaksasi kebijakan pendapatan daerah khususnya bagi masyarakat maupun dunia usaha. Oleh karena itu dibutuhkan insentif

KEBIJAKAN	RPJMD SEBELUM PERUBAHAN	RPJMD SETELAH PERUBAHAN
		fiscal dalam bentuk relaksasi pajak, susnset policy maupun penanguhan atau pembebasan pajak/retribusi sesuai dengan perkembangan kondisi penanganan Covid-19
Kebijakan PAD	Dalam upaya merencanakan target pendapatan asli daerah dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu, potensi dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi penerimaan pemerintah daerah serta optimalisasi pencapaiannya.	Sejalan dengan kebijakan penanganan COVID19, kebijakan peningkatan PAD di fokuskan pada upaya instensifikasi pajak/retribusi, salah satunya melalui updating database perpajakan melalui pemanfaatan sistem informasi dan teknologi.
	Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun berkenaan.	Optimalisasi pengelolaan aset-aset daerah ataupun kerjasama dengan pihak ketiga;
	Dalam upaya peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah, pemerintah daerah tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Upaya peningkatan pendapatan asli daerah ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, <i>law enforcement</i> dalam upaya membangun ketaatan wajib pajak dan wajib retribusi daerah serta peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli daerah untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi yang dibarengi dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan dengan biaya murah.	Optimalisasi BUMD yang dapat berkontribusi terhadap peningkatan PAD
	Melakukan upaya peningkatan penerimaan bagian laba/deviden atas penyertaan modal atau investasi daerah lainnya yang dapat ditempuh melalui inventarisasi dan menata serta mengevaluasi nilai kekayaan daerah yang dipisahkan baik dalam bentuk uang maupun barang sebagai penyertaan modal (investasi daerah). Jumlah rencana penerimaan yang dianggarkan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,	Peningkatan upaya penegakan hukum terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah.

KEBIJAKAN	RPJMD SEBELUM PERUBAHAN	RPJMD SETELAH PERUBAHAN
	<p>telah mencerminkan rasionalitas dibandingkan dengan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan kembali ditetapkan sebagai penyertaan modal (telah diinvestasikan). Dalam upaya peningkatan PAD, pemerintah daerah mendayagunakan kekayaan daerah yang belum dipisahkan dan belum dimanfaatkan untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga sehingga menghasilkan pendapatan. Penyertaan modal pada pihak ketiga ditetapkan dengan peraturan daerah</p>	
Dana Perimbangan	<p>Pendapatan dari DBH-Pajak dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran berkenaan atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran berkenaan. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran berkenaan atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran berkenaan belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DBH-Pajak didasarkan pada Realisasi pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir;</p>	<p>Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi program maupun kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK)</p>
	<p>Pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun berkenaan. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran berkenaan belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DAU dan DAK didasarkan pada realisasi pendapatan DAU dan DAK selama 3 (tiga) tahun terakhir.</p>	<p>DAU khususnya pada saat pandemic diprioritaskan pada pada program yang sangat prioritas dan selaras dengan kebijakan pemerintah pusat.</p>
	<p>Pendapatan dari DBH-Pajak dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran berkenaan atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran berkenaan. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran berkenaan atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak</p>	<p>peningkatan DID melalui Rencana aksi yang jelas dan terukur didukung oleh perencanaan program dan kegiatan yang berkualitas.</p> <p>Selain itu, pemerintah kota Madiun perlu meningkatkan koordinasi secara aktif dengan pemerintah provinsi untuk mendukung program pembangunan melalui bantuan</p>

KEBIJAKAN	RPJMD SEBELUM PERUBAHAN	RPJMD SETELAH PERUBAHAN
	Tahun Anggaran berkenaan belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DBH-Pajak didasarkan pada Realisasi pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir;	keuangan, hibah, dan bantuan sosial.
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Hibah yang diterima berupa uang harus dianggarkan dalam APBD dan didasarkan atas naskah perjanjian hibah antara pemerintah daerah dan pemberi hibah. Sumbangan yang diterima dari organisasi/lembaga tertentu/perorangan atau pihak ketiga, yang tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran maupun pengurangan kewajiban pihak ketiga/pemberi sumbangan diatur dalam peraturan daerah.	Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat mengenai kepastian danahibah; dana darurat; dana penyesuaian dan otonomi khusus, dan bantuan keuangan dari provinsi, yang diperoleh Kota Madiun;
	Lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah termasuk dana penyesuaian dianggarkan pada lain-lain pendapatan daerah yang sah.	Meningkatkan kerjasama antar OPD Pemerintah Kota Madiun dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur secara intensif.
Kebijakan Belanja daerah (umum)	Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.	Konsolidasi anggaran dengan menekankan pada paradigma anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada output dan outcome
.....	Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.	Belanja daerah perlu difokuskan dalam rangka percepatan <i>recovery</i> dan penanganan dampak atas pandemi COVID-19 pada semua bidang khususnya yang strategis.
.....	Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.	Belanja daerah diarahkan untuk membiayai belanja program-program prioritas mengarah pada pemulihan ekonomi, penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, pemenuhan dan peningkatan infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;

KEBIJAKAN	RPJMD SEBELUM PERUBAHAN	RPJMD SETELAH PERUBAHAN
	<p>Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.</p>	<p>Belanja daerah difokuskan dapat memenuhi <i>mandatory spending</i> atau belanja-belanja yang sudah di-<i> earmark</i>, seperti pendidikan 20%, kesehatan 10%, dana transfer umum penggunaannya diarahkan 25% untuk belanja infrastruktur, anggaran fungsi pengawasan, dan alokasi dana kelurahan. Selain itu, belanja daerah diarahkan untuk menyelenggarakan urusan wajib dan urusan pilihan dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku dan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM);</p>
	-	<p>Efektivitas dan efisiensi belanja daerah, melalui pemanfaatan sesuai prioritas daerah (<i>money follow program</i> prioritas);efisiensi belanja daerah dengan memerhatikan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan. Mengendalikan belanja perjalanan dinas, rapat dan honor-honor pegawai</p>
	-	<p>Mengalokasikan kebutuhan belanja operasi, dan belanja modal secara terukur dan terarah.</p>
Belanja Operasi	-	<p>Diarahkan untuk tetap memberikan pemenuhan belanja pegawai, peningkatan kesejahteraan ASN dengan tetap memerhatikan efisiensi dan efektivitas anggaran, serta sensitivitas pada dinamika yang berkembang</p>
Belanja Modal	-	<p>Difokuskan untuk mendanai program dan kegiatan berkaitan dengan prioritas pembangunan daerah,yang terangkum pada masing-masing OPD;</p>
	-	<p>Penggunaan belanja modal diarahkan dalam mendukung sasaran dan prioritas pembangunan daerah khususnya pencapaian visi dan misi</p>

KEBIJAKAN	RPJMD SEBELUM PERUBAHAN	RPJMD SETELAH PERUBAHAN
Kebijakan Pembiayaan daerah	<p>Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran sebelumnya dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran berjalan yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Selanjutnya SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran berkenaan. Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dibidang pinjaman daerah.</p>	<p>Mengoptimalkan penerimaan pembiayaan daerah yang diperkirakan diperoleh dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) yang bersumber dari pelampauan penerimaan pendapatan daerah maupun sisa penghematan belanja;</p>
	<p>Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APBD menghasilkan SiLPA Tahun Berjalan positif, pemerintah daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan. Dalam hal perhitungan SiLPA Tahun Berjalan negatif, pemerintah daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.</p>	<p>Peningkatan Manajemen Pembiayaan Daerah dalam rangka akurasi, efisiensi, efektifitas, dan profitabilitas;</p>
		<p>Peningkatan pembiayaan non-APBD melalui kerjasama dengan pihak swasta, melalui <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR).</p>

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

4.1 Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan daerah pada umumnya disebabkan karena adanya peluang (potensi daerah) dan kekuatan yang belum dimanfaatkan secara optimal, kelemahan yang belum dapat diatasi, peluang yang belum dapat dimanfaatkan serta ancaman dari luar daerah yang tidak diantisipasi. Pada penyusunan Rancangan Perubahan RPJMD Kota Madiun yang nantinya akan menjadi bahan masukan dalam penyusunan P-RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024, perlu diidentifikasi terlebih dulu permasalahan pembangunan daerah agar rencana pembangunan yang disusun dapat meminimalkan atau menyelesaikan masalah tersebut dengan tepat. Permasalahan tersebut merupakan masalah prioritas utama yang menjadi agenda rencana pembangunan dalam periode 2019-2024. Berbagai permasalahan tersebut sesuai salah satunya diidentifikasi di bab II.

Permasalahan pembangunan di Kota Madiun selama beberapa tahun terakhir akan diidentifikasi berdasarkan aspek kesejahteraan rakyat, aspek layanan umum, dan aspek daya saing. Khusus untuk aspek layanan umum akan diurai berdasarkan urusan pemerintah daerah. Urusan pemerintah daerah yang diidentifikasi permasalahannya meliputi urusan Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan umum dan penataan ruang, Perumahan rakyat dan kawasan permukiman, Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, Sosial, Tenaga kerja, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pangan, Pertanahan, Lingkungan hidup, Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, Pemberdayaan masyarakat dan, Pengendalian penduduk dan keluarga berencana, Perhubungan, Komunikasi dan informasi, Koperasi dan UKM, Penanaman Modal, Kepemudaan dan Olah Raga, Statistik, Persandian, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, Pertanian, Perdagangan, Industri, Transmigrasi, Urusan penunjang perencanaan, Keuangan, Kepegawaian pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, serta urusan penunjang lainnya. Hasil identifikasi permasalahan Pembangunan di Kota Madiun dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.1

Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas Kota Madiun

No	ASPEK/BIDANG URUSAN	Permasalahan
A.	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	
	1) Meningkatnya angka kemiskinan sebagai dampak Covid-19	
	2) Indeks Pembangunan Manusia relatif tinggi namun dengan peningkatan yang lambat	
	3) Pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi yang dalam sebagai akibat Covid-19	
	4) Masih terjadi kesenjangan pendapatan antara kelompok masyarakat yang di indikasikan oleh gini rasio	
	5) Kualitas dan kuantitas layanan infrastruktur perkotaan masih perlu ditingkatkan	
	6) Manajemen bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup masih perlu ditingkatkan dan dijaga kelestariannya	
	7) Masih perlu ditingkatkannya tercapainya target indeks reformasi birokrasi dan Tata kelola pemerintahan daerah perlu terus untuk ditingkatkan	
	8) Ketentraman, ketertiban dan keharmonisan kehidupan masyarakat yang perlu terus dijaga	
B.	ASPEK LAYANAN UMUM	
B.1	Fokus Urusan Wajib Layanan Dasar	
1.	Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pandemic Covid-19 menyebabkan pembelajaran di lakukan dengan online / daring sehingga dapat menurunkan kualitas pembelajaran b. Masih perlu ditingkatkannya target Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) c. Masih perlu ditingkatkannya jumlah tenaga pendidik SD/MI dan SMP/MTS yang memiliki sertifikat pendidik d. Masih perlu ditingkatkannya tenaga pendidik SD/MI dan SMP/MTS dengan lulusan S1/S2/S3 e. Masih perlu ditingkatkannya jumlah tenaga pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang memiliki sertifikat pendidik f. Masih perlu ditingkatkannya kualitas penyelenggaraan pendidikan kesetaraan
2.	Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penangan pandemi covid membutuhkan pembiayaan dan tenaga medis dan medis serta sarana dan prasarana kesehatan yang memadai b. Masih perlu ditingkatkannya ketercapaian target SPM pelayanan bidang kesehatan sesuai standar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal c. Masih terdapatnya balita stunting d. Masih terdapatnya angka kematian bayi e. Masih perlu ditingkatkannya imunisasi dasar lengkap bagi balita. f. Masih perlu ditingkatkannya capaian Rumah Tangga Sehat g. diperlukannya pencegahan dan penanganan terhadap penyakit menular seperti Tuberculosis (TB), HIV/AIDS, Demam Berdarah dan penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, serta penguatan <i>surveillance</i> penyakit yang berpotensi wabah dan <i>re-emerging disease</i> h. Masih perlu ditingkatkannya Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) melalui perubahan perilaku masyarakat; i. Masih perlu ditingkatkannya pelayanan kesehatan rujukan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<ul style="list-style-type: none"> a. Realokasi dan refocusing anggaran tahun 2020 untuk pemulihan dampak Covid-19 menyebabkan tertundanya berbagai proyek infrastruktur b. Terdapat jalan yang menjadi kewenangan Kota Madiun dalam kondisi rusak. c. Masih terbatasnya kawasan pejalan kaki/pedestrian/trotoar yang menunjang aktivitas masyarakat. Kawasan pejalan kaki/pedestrian/trotoar banyak dipakai oleh pedagang kaki lima;

No	ASPEK/BIDANG URUSAN	Permasalahan
		<ul style="list-style-type: none"> d. Masih perlu ditingkatkannya sistem drainase kota yang disebabkan oleh tingginya tingkat sedimentasi pada saluran drainase, sempadan saluran yang dimanfaatkan oleh masyarakat, serta banyaknya plengsengan saluran yang rusak; e. Masih perlu ditingkatkannya pengendalian pemanfaatan ruang sehingga pencapaian indikator penataan ruang tidak tercapai. f. Masih perlu ditingkatkannya penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik karena terbatasnya jumlah lahan yang dapat dimanfaatkan untuk ruang terbuka hijau. g. Masih perlu ditingkatkannya memadainya pemahaman pelaku pembangunan daerah terhadap perencanaan yang berbasis pada perspektif tata ruang di wilayah Kota Madiun.
4.	Perumahan dan Pemukiman	<ul style="list-style-type: none"> a. Masih terdapatnya rumah tidak layak huni meskipun dengan rasio kurang dari 1 persen b. Masih perlu ditingkatkannya sarana sanitasi pada rumah tinggal c. Masih terdapatnya kekurangan kebutuhan kepemilikan rumah (<i>backlog</i>) dalam rangka penyediaan perumahan d. Masih perlu ditingkatkannya penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dalam lingkungan perumahan dan kawasan permukiman; e. Masih perlu ditingkatkannya legislasi daerah terutama tataran operasional terkait urusan perumahan dan kawasan permukiman; f. Masih perlu ditingkatkannya pengelolaan sarana dan prasarana aset Pemerintah Kota Madiun, yaitu sarana dan prasarana pemakaman sebanyak 83 lokasi pemakaman; g. Cakupan layanan penerangan jalan permukiman perlu ditingkatkan seiring dengan perkembangan perumahan dan permukiman dengan memperhatikan pemeliharaan, penataan iluminasi serta peralatan dan utilitas pendukung lainnya; h. Masih perlu ditingkatkannya ketersediaan dan kualitas RTH publik Kota Madiun hingga 20% dari luas kota.
5.	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> a. Kesadaran masyarakat akan protokol kesehatan masih perlu di tingkatkan b. Masih perlu ditingkatkannya penegakan Perda dan Perwal oleh masyarakat; c. Meningkatnya persentase pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) yang ditemukan; d. Sumber Daya Manusia (SDM) petugas perlindungan masyarakat (Linmas) rendah; e. Meningkatnya kasus kebakaran di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK). f. Masih terdapatnya potensi bencana di Kota Madiun; g. Masih perlu ditingkatkannya kapasitas aparatur daerah dalam penanggulangan bencana; h. Masih perlu ditingkatkannya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung dalam menghadapi berbagai ancaman bencana alam dan bencana sosial; i. rendahnya kesadaran terhadap risiko bencana dan pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana
6.	Sosial	<ul style="list-style-type: none"> a. Menurunnya ketahanan sosial (kemiskinan meingkat) sebagai dampak dari Covid-19 b. Penanganan PMKS belum 100 persen c. Cakupan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang menerima bantuan sosial belum memenuhi target SPM d. Masih terbatasnya jumlah tenaga yang terdidik/terlatih dalam menangani masalah kesejahteraan sosial; e. terbatasnya sarana prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial dan pelayanan sosial;

No	ASPEK/BIDANG URUSAN	Permasalahan
		f. Masih perlu ditingkatkannya pemberian bantuan dan pemberdayaan sosial pada masyarakat; g. Meningkatnya populasi penyandang penyakit sosial kemasyarakatan di wilayah perkotaan; h. Masih terbatasnya perhatian akan pentingnya pengembangan modal sosial, kesetiakawanan sosial, kearifan lokal, dan semangat kegotongroyongan di masyarakat.
B.2	Fokus Urusan Wajib Bukan Layanan Dasar	
1.	Tenaga Kerja	1. Meningkatnya Tingkat pengangguran Terbuka (TPT) sebagai dampak Covid-19 2. Masih terbatasnya angkatan kerja dengan kualifikasi pendidikan tinggi. Angkatan kerja sebagian besar didominasi lulusan pendidikan menengah dan pendidikan dasar 3. Kurang optimalnya penyerapan tenaga kerja 4. Masih perlu ditingkatkannya optimalnya peningkatan kesempatan kerja 5. Masih perlu ditingkatkannya pemetaan/data dukung kebutuhan tenaga kerja yang ada di perusahaan-perusahaan yang berinvestasi sehingga belum dapat direncanakan secara baik kebutuhan tenaga kerja yang berasal dari Kota Madiun
2.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Masih terdapatnya kasus KDRT 2. Partisipasi perempuan yang bekerja di lembaga pemerintah masih terbatas 3. Masih terdapatnya terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga 4. Masih terbatasnya akses sumber daya dan peran serta perempuan dalam pembangunan 5. Masih terbatasnya peranan perempuan untuk mewujudkan dan mengembangkan keluarga sehat sejahtera dan bahagia dalam pembangunan 6. Masih terdapatnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak; 7. Masih cukup tingginya tingkat tenaga kerja anak/ pekerja bawah umur. 8. Masih perlu ditingkatkannya pemahaman tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan berbagai bidang pembangunan daerah 9. Masih terbatasnya peranan organisasi perempuan dan lembaga terhadap perlindungan perempuan dan anak; 10. Masih perlu ditingkatkannya perangkat daerah dalam Penyusunan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).
3.	Pangan	1. Diversifikasi sumber pangan lokal relatif terbatas; 2. Peningkatan akses pangan masyarakat mensyaratkan akses terhadap inovasi dan teknologi pengolahan pangan berbasis sumberdaya lokal dan sudah berkembang tapi belum maksimal; 3. rendahnya kapasitas SDM pelaku/petani pengolah pangan sebagai salah satu penentu kapasitas penyediaan bahan pangan; 4. terbatasnya jumlah dan kapasitas petugas keamanan pangan segar dan olahan untuk mendorong tersedianya pangan yang sehat; 5. Peningkatan keamanan pangan dengan promosi dan kampanye sudah dilaksanakan tapi belum maksimal; 6. Pola pangan harapan yang belum optimal
4.	Pertanahan	1. Tingginya permintaan perubahan penggunaan tanah sebagai dampak pertumbuhan ekonomi; 2. Adanya kecenderungan pertumbuhan investasi berdampak pada permintaan izin lokasi untuk perolehan tanah dalam rangka investasi; 3. Adanya potensi konflik pertanahan seiring meningkatnya kebutuhan pengadaan tanah untuk pembangunan fasilitas umum

No	ASPEK/BIDANG URUSAN	Permasalahan
5.	Lingkungan Hidup (dan Bencana Alam)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih terdapatnya usaha/kegiatan yang belum memenuhi persyaratan administrasi dan belum tersedianya teknis pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. belum taatnya para pelaku usaha/kegiatan terhadap pengelolaan lingkungan; 3. Masih perlu ditingkatkannya pemahaman dan kesadaran masyarakat maupun aparaturnya terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup sehingga berdampak pada Masih terbatasnya penegakan aturan di bidang lingkungan hidup; 4. Masih perlu ditingkatkannya pelayanan penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan; 5. Masih perlu ditingkatkannya pelayanan penerapan izin lingkungan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 6. Masih terdapat usaha/kegiatan yang belum mempunyai dokumen lingkungan dan usaha/kegiatan yang telah memiliki dokumen lingkungan belum membuat laporan pemantauan dan pengelolaan lingkungan hidup; 7. Kurang kesadaran/partisipasi masyarakat untuk mengelola sampah pada sumber sampah sehingga target pengurangan sampah pada sumber sampah belum sesuai target/harapan dengan Masyarakat berpola pikir bahwa penanganan sampah menjadi tanggung jawab sepenuhnya Pemerintah Kota Madiun; 8. Kurang optimalnya kualitas pengelolaan Bank Sampah sehingga masyarakat perlu di dorong untuk mengolah dan memilah sampah pada sumber sampah; 9. Kapasitas/daya tampung Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Winongo Madiun mendekati <i>over load</i>. 10. Belum mempunyai tenaga fungsional pengawas Lingkungan Hidup
6.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil 2. Belum optimalnya koordinasi dan validasi data kependudukan dengan pihak terkait 3. Kurang optimalnya sosialisasi pemanfaatan data SIAK kepada Instansi/ OPD 4. Kurang optimalnya sinkronisasi/ konsolidasi antara daerah dan pusat 5. Kurangnya sosialisasi terkait pelayanan di masa pandemi
7.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	<ol style="list-style-type: none"> 1) Belum adanya penyusunan <i>Grand Design</i> Kependudukan 5 aspek dan pemanfaatannya bagi perangkat daerah; 2) Masih terdapatnya keluarga pra sejahtera dan sejahtera I 3) Masih diperlukannya upaya untuk meningkatkan cakupan peserta Keluarga Berencana (KB) Aktif dengan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 4) Masih terdapatnya usia kawin pertama di bawah 20 tahun; 5) Masih terdapatnya <i>Unmeet Need</i> KB
8.	Perhubungan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Masih minimnya kesadaran masyarakat terhadap keselamatan di jalan raya; 2) banyaknya terjadi pelanggaran lalu lintas yang disebabkan oleh banyaknya pelajar yang menggunakan sepeda motor untuk ke sekolah; 3) Fungsi Sub Terminal Kota Madiun belum optimal; 4) Perlengkapan jalan yang belum banyak menggunakan teknologi (Belum adanya Area Traffic Control System dan Intelygent Transport System di Dishub Kota Madiun); 5) Belum tercukupinya kebutuhan rambu lalu lintas sesuai standart;

No	ASPEK/BIDANG URUSAN	Permasalahan
9.	Komunikasi dan Informatika	<ol style="list-style-type: none"> 1) Masih perlu ditingkatkannya pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan pemerintah Kota Madiun; 2) Masih perlu ditingkatkannya penyebarluasan informasi citra positif pemerintah di media masa untuk menangkal berita bohong/<i>hoax</i>; 3) Masih terbatasnya ruang informasi publik yang memadai untuk akses informasi bagi masyarakat; 4) Informasi pembangunan yang dilakukan pemerintah belum tersosialisasi dengan baik di masyarakat; 5) Masih perlu ditingkatkannya partisipasi masyarakat dalam penyebarluasan informasi program dan kegiatan pemerintah; 6) Masih perlu ditingkatkannya pelaksanaan standar layanan informasi publik di bidang publik lingkungan pemerintah Kota Madiun; 7) Masih perlu ditingkatkannya penggunaan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) untuk mendukung pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE); 8) Masih perlu ditingkatkannya pemerataan fasilitas akses informasi publik dan internet sehat; 9) Masih perlu ditingkatkannya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana peningkatan usaha yang produktif berbasis online menuju <i>e-commerce</i>; 10) Masih perlu ditingkatkannya regulasi daerah dalam pelaksanaan SPBE dan terwujudnya <i>Smart City</i>; 11) terbatasnya sumber daya yang memadai dibidang layanan komunikasi dan informatika.
10.	Koperasi dan UKM	<ol style="list-style-type: none"> 1) Masih perlu ditingkatkannya fungsi koperasi, dimana sebagian besar koperasi bergerak pada kegiatan simpan pinjam; 2) Masih perlu ditingkatkannya terbangunnya jaringan kemitraan antara UKM dengan pelaku usaha secara maksimal; 3) Kualitas produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) masih terbatas dalam memenuhi standar nasional karena rendahnya penerapan teknologi dan inovasi produksi; 4) rendahnya kemampuan SDM koperasi dalam pengembangan koperasi.
11.	Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> 1) Jumlah dan nilai investasi masih perlu ditingkatkan 2) Masih perlu ditingkatkannya pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dari pelaku usaha 3) Proses perijinan yang terbit tepat waktu masih perlu dipertahankan
12.	Kepemudaan dan Olah Raga	<ol style="list-style-type: none"> 1) Masih terbatasnya ketersediaan sarana prasarana olahraga; 2) Masih terbatasnya prestasi olahraga di tingkat regional, nasional bahkan ke tingkat internasional; 3) Kurang optimalnya peran serta pemuda
13.	Statistik	<ol style="list-style-type: none"> 1) Masih perlu ditingkatkannya sistem integrasi data-data statistik sektoral daerah; 2) Masih perlu ditingkatkannya ketersediaan data-data statistik sektoral untuk perencanaan pembangunan daerah; 3) Masih terbatasnya koordinasi berbagai pihak dalam penyediaan data statistik pembangunan daerah; 4) Masih perlu ditingkatkannya kapasitas sumber daya manusia dalam pendataan dan statistik daerah.
14.	Persandian	<ol style="list-style-type: none"> 1) Masih perlu ditingkatkannya penyelenggaraan keamanan informasi di lingkungan pemerintah Kota Madiun; 2) Masih perlu ditingkatkannya perangkat daerah yang menggunakan persandian untuk mengamankan setiap jenis informasi yang wajib diamankan; 3) Masih perlu ditingkatkannya sarana dan prasarana jejaring persandian daerah dan informasi; 4) Masih terbatasnya sumber daya manusia di bidang pengelolaan persandian daerah.
15.	Kebudayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Masih terbatasnya pelestarian seni tradisi masyarakat Kota Madiun;

No	ASPEK/BIDANG URUSAN	Permasalahan
		2) Masih terbatasnya pembinaan pelaku seni; 3) Masih terbatasnya optimalisasi revitalisasi cagar budaya; 4) Perlu adanya museum daerah Kota Madiun; 5) Masih terbatasnya pembinaan sejarah lokal daerah .
16.	Perpustakaan dan Kearsipan	1) Masih perlunya dilakukan peningkatan pada sistem pelayanan perpustakaan untuk menghadapi era digitalisasi dan dinamika perkembangan teknologi informasi; 2) Masih terbatasnya sarana dan prasarana perpustakaan sehingga masyarakat kurang memiliki minat untuk berkunjung; 3) Belum optimalnya kuantitas dan kualitas SDM pengelola perpustakaan dan kearsipan. 4) Belum optimalnya pengelolaan arsip di Perangkat Daerah 5) Belum optimalnya Sosialisasi perpustakaan dan kearsipan
B.3	Fokus Urusan Pilihan	
1)	Kelautan dan Perikanan	1) Keterbatasan lahan untuk pengembangan budidaya perikanan; 2) terbatasnya SDM, permodalan, dan infrastruktur di bidang perikanan dan industri perikanan; 3) terbatasnya penerapan teknologi tepat guna untuk mengembangkan produk dengan daya saing tinggi berbasis usaha rakyat (masyarakat lokal); 4) Rendahnya margin keuntungan pembudidaya ikan; 5) rendahnya konsumsi makan ikan masyarakat; 6) Menurunnya SDI (Sumber Daya Ikan) di perairan umum; 7) rendahnya kelembagaan dan sistem perijinan usaha perikanan.
2)	Pariwisata	1) Masih terbatasnya pengelolaan destinasi pariwisata; 2) Kurang optimalnya pemasaran pariwisata; 3) Masih perlu ditingkatkannya prasarana ruang kreatif sebagai ruang ekpresi, promosi bagi masyarakat kreatif Kota Madiun; 4) Masih terbatasnya kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif.
3)	Pertanian	1) Keterbatasan lahan untuk pengembangan sektor pertanian mengingat wilayah kota yang kecil; 2) Tingginya alih fungsi lahan sektor pertanian menjadi kawasan industri, perdagangan dan permukiman penduduk; 3) Produksi dan produktivitas komoditas pertanian pangan dan hortikultura belum optimal karena belum diterapkannya sistem pertanian yang modern; 4) rendahnya kapasitas SDM petani dalam meningkatkan produksi; 5) Kegiatan layanan pelatihan dan pendampingan oleh penyuluh sangat terbatas; 6) Keterbatasan kemampuan petani memanfaatkan prasarana dan sarana pertanian yang dimiliki; 7) Tingginya ketergantungan petani terhadap penggunaan pestisida kimia dan pupuk kimia; 8) Keterbatasan akses petani terhadap permodalan yang berkelanjutan; 9) Petani belum mendapatkan keuntungan maksimal karena panjangnya tata niaga produk pertanian; 10) Terjadinya fluktuasi iklim yang tidak menentu yang banyak menimbulkan kerugian bagi petani; 11) Keterbatasan petani dalam mengakses pupuk bersubsidi; 12) Masih perlu ditingkatkannya pengawasan produk hasil ternak yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH) karena keterbatasan petugas yang memiliki kompetensi di sektor Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet); 13) Peningkatan fasilitas permodalan untuk sektor peternakan (terutama peternak kecil yang tidak mempunyai agunan); 14) Masih terbatasnya promosi pemasaran hasil peternakan; 15) Masih terbatasnya obat-obatan hewan baik jenis maupun jumlahnya; 16) Masih terbatasnya peralatan laboratorium dan kesehatan hewan; 17) Masih terbatasnya tenaga petugas pemeriksa daging untuk Rumah Potong Hewan (RPH).

No	ASPEK/BIDANG URUSAN	Permasalahan
4)	Perdagangan	1) Belum maksimalnya revitalisasi pasar rakyat dan pengembangan kapasitas paguyuban pedagang; 2) Masih perlu ditingkatkannya penerimaan PAD dari retribusi tera dan/atau tera ulang alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP); 3) Belum adanya jaminan ketersediaan barang dalam jumlah yang cukup dan harga yang terjangkau serta terhindar dari praktik-praktik perdagangan yang tidak sehat. Selain itu, hal yang mendorong terjadinya praktik yang tidak sehat tersebut adalah belum maksimalnya tingkat kesadaran konsumen dalam menggunakan haknya sebagai konsumen; 4) Pemberdayaan pedagang dengan pelaksanaan penataan Pedagang kaki Lima (PKL); 5) Masih perlu ditingkatkannya informasi jumlah dan volume usaha perdagangan baik perdagangan formal dan informal.
5)	Perindustrian	1) Masih terbatasnya akses permodalan untuk industri kecil dan menengah; 2) Masih perlu ditingkatkannya pemanfaatan kawasan industri; 3) banyak potensi sumber daya lokal yang belum diolah secara maksimal dalam skala industri; 4) Kualitas SDM yang bergerak di bidang industri kecil belum optimal sehingga lemah dalam penerapan teknologi pengolahan.
6)	Transmigrasi	1) Masih terbatasnya motivasi dan rendahnya minat masyarakat untuk mengikuti program transmigrasi
B.4 Fokus Unsur Penunjang		
B4.1. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan		
1)	Indeks Kepuasan Masyarakat cenderung fluktuatif.	
2)	Perlunya revitalisasi nilai dan budaya kerja yang profesional, jujur, dan bersih di setiap jenjang birokrasi;	
3)	Belum maksimalnya penerapan SOP pelayanan kepada masyarakat;	
4)	adanya permasalahan pada kelembagaan seperti tumpang tindih tugas pokok fungsi yang mengakibatkan kinerja menjadi kurang maksimal;	
5)	Belum meratanya beban kerja antar dan intra perangkat daerah.	
6)	Masih perlu ditingkatkannya penataan ketatalaksanaan dan kelembagaan perangkat daerah;	
7)	Masih perlu ditingkatkannya system administrasi untuk mendukung kinerja pimpinan;	
8)	Masih perlu ditingkatkannya daya dukung perlengkapan untuk mendukung kinerja pimpinan;	
9)	Masih perlu ditingkatkannya pelayanan keprotokolan kepada pimpinan;	
10)	Kurang Akuratnya data dalam penyusunan laporan kinerja pemerintahan;	
11)	Kurang tertibnya administrasi kecamatan/kelurahan;	
12)	Belum maksimalnya penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);	
13)	Belum tersedianya data Rupa bumi yang terbaru;	
14)	Sering terjadinya permasalahan tentang batas wilayah;	
15)	Belum ditindaklanjutinya MoU dengan Perjanjian Kerja Sama;	
16)	adanya permasalahan pada kelembagaan, seperti adanya tumpang tindih kewenangan yang mengakibatkan kinerja menjadi kurang maksimal;	
17)	Belum adanya dukungan ketersediaan data kebutuhan PNS berdasarkan analisis jabatan dan Analisis Beban Kerja (ABK);	
18)	Masih perlu ditingkatkannya penataan ketatalaksanaan dan kelembagaan perangkat daerah;	
19)	Belum dimulainya penerapan pelaporan kegiatan Lembaga Pengembangan Uji Kompetensi (LPUK) berbasis online menggunakan sistem aplikasi;	
20)	Masih perlu ditingkatkannya koordinasi dan kerjasama antar-unit kerja serta antar-instansi;	
21)	Prinsip <i>money follow function</i> , <i>money follow organization</i> harus mulai ditinggalkan, menjadi <i>money follow programme</i> ;	
22)	Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan selama ini belum sepenuhnya melibatkan <i>civil society</i> ;	

No	ASPEK/BIDANG URUSAN	Permasalahan
23)		Masih perlu ditingkatkannya layanan pengadaan barang/jasa pemerintah;
24)		Masih perlu ditingkatkannya ketersediaan data yang akurat dan komprehensif untuk pembangunan daerah;
25)		Masih perlu ditingkatkannya kinerja Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Madiun Dalam Rangka mengendalikan laju inflasi daerah;
26)		Masih perlu ditingkatkannya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari 3 (tiga) BUMD yang ada ;
27)		Belum Terpenuhinya SOP Dalam Pembinaan BUMD;
28)		Masih perlu ditingkatkannya Kualitas Produk Hukum Daerah, Pelayanan dan Kesadaran Hukum serta Publikasi;
29)		Kuantitas, Kapabilitas dan Kualitas SDM Sekretariat DPRD kurang optimal, sehingga perlu ditingkatkan melalui training, supervise dan rekrutmen pegawai sesuai kebutuhan organisasi;
30)		Optimalisasi ketersediaan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan;
31)		Belum tersedianya standar atau pedoman secara menyeluruh dalam rangka penyelenggaraan pelayanan dan dukungan sesuai standar terhadap penyelenggara tugas dan fungsi DPRD;
32)		Makin tingginya tuntutan peningkatan kualitas dan efektifitas pelayanan serta dukungan, yang dibebankan kepada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun untuk peningkatan kapasitas DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
B4.1.	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan Pembangunan	
1)		Masih perlu ditingkatkannya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di jajaran Perangkat Daerah;
2)		Masih terbatasnya kuantitas dan kualitas Aparatur Pengawasan
B4.2.	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan Pembangunan	
1)		Belum terciptanya satu sistem perencanaan pembangunan daerah yang komprehensif dan integratif antar wilayah serta sektor perekonomian daerah;
2)		Masih perlu ditingkatkannya kualitas penyusunan dokumen perencanaan baik pada tingkat daerah maupun Perangkat Daerah;
3)		Masih perlu ditingkatkannya kordinasi antar pelaku pembangunan daerah, baik pada tataran horizontal dengan Perangkat Daerah, maupun dengan pemerintah Pusat dan Provinsi;
4)		Masih perlu ditingkatkannya ketersediaan data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kota Madiun yang berkualitas;
5)		Masih terbatasnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah;
6)		Masih perlu ditingkatkannya kuantitas dan kualitas sumber daya perencanaan di daerah;
7)		masih perlu ditingkatkannya pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.
B4.3.	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan	
1)		Ketergantungan pendapatan daerah yang berasal dari dana transfer pemerintah pusat yang mencapai 66,73% pada tahun 2017;
2)		Belum akuratnya <i>database</i> pajak dan retribusi daerah;
3)		Masih perlu ditingkatkannya penggalian potensi dan pemetaan potensi pendapatan daerah;
4)		Masih perlu ditingkatkannya manajemen pengelolaan pajak daerah;
5)		Perlunya komitmen mempertahankan opini WTP;
6)		Belum adanya pemahaman yang sama terkait mekanisme pemberian hibah dan bantuan sosial;
7)		Masih perlu ditingkatkannya pengelolaan aset daerah.
B4.4.	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan	
1)		Masih perlu ditingkatkannya sistem <i>reward</i> dan <i>punishment</i> dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah ;
2)		Penempatan pegawai belum berdasarkan kompetensi dan prestasi kerja;
3)		Jumlah pegawai yang ada kurang dari jumlah pegawai yang dibutuhkan sesuai perhitungan ABK;
4)		Masih perlu ditingkatkannya kapasitas sumber data manusia aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan.

No	ASPEK/BIDANG URUSAN	Permasalahan
B4.5. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan		
1)		Masih perlu ditingkatkannya inovasi pembangunan daerah untuk peningkatan pelayanan bagi masyarakat;
2)		Terbatasnya sumber daya aparatur dalam bidang penelitian dan pengembangan daerah;
3)		Belum dimanfaatkannya hasil penelitian sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan daerah
B4.6. Urusan Pemerintahan Kesatuan Bangsa dan Politik		
1)		Masih terbatasnya kesadaran masyarakat dalam memahami kehidupan berbangsa dan bernegara;
2)		Masih terbatasnya pemahaman generasi muda khususnya para pelajar SMP dan SMU/SMK tentang pentingnya Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara;
3)		Masih terbatasnya semangat Bhinneka Tunggal Ika masyarakat yang berbeda suku, adat, ras dan etnis;
4)		Masih terbatasnya pembinaan dalam pelayanan aliran kepercayaan yang ada ;
5)		Masih terbatasnya pemahaman masyarakat khususnya generasi muda dan pelajar dalam mengantisipasi dan menanggulangi bahaya narkoba dan kenakalan remaja;
6)		Masih terbatasnya rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat dan generasi muda;
7)		rendahnya peran serta masyarakat dalam menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif dalam kehidupan sosial di masyarakat;
8)		Masih terbatasnya keterpaduan dan sinkronisasi pencegahan antar aparat dalam penanganan konflik sosial ;
9)		Masih terbatasnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berpolitik;
10)		rendahnya pemahaman masyarakat dan Ormas/LSM dalam ikut berpartisipasi sebagai salah satu <i>steakholder</i> dalam pembangunan daerah dan kemasyarakatan.
B4.7. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Penunjang kecamatan		
1)		Belum adanya pemetaan potensi wilayah kelurahan sehingga usaha ekonomi yang dikembangkan masyarakat di kelurahan tidak optimal. Kapasitas masyarakat dalam melakukan usaha-usaha produktif rendah;
2)		Masih perlu ditingkatkannya pembinaan lembaga pemberdayaan masyarakat dan kelompok masyarakat pembangunan;
3)		Semangat kepedulian nilai-nilai kegotongroyongan semakin menurun sebagai akibat dari berkembangnya semangat materialistis dan individualistis di tingkat kelurahan;
4)		Menurunnya semangat kepedulian dan kemauan dari warga masyarakat dalam pemberdayaan dan berpartisipasi dalam pembangunan daerah sebagai akibat dari berkembangnya semangat materialistik dan individualis;
5)		Masih perlu ditingkatkannya SDM di kelurahan dalam mengelola data dan aplikasi profil serta monografi kelurahan sehingga pemetaan potensi wilayah kelurahan belum tersajikan dengan baik.
6)		Sarana dan prasarana kecamatan belum optimal dalam pelayanan kepada masyarakat;
7)		terbatasnya kemampuan SDM di kecamatan dan kelurahan.
C. ASPEK DAYA SAING		
1)		Masih terbatasnya kemandirian fiskal daerah yang ditunjukkan dengan masih reoatif rendahnya Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF)
2)		Kualitas infrastruktur perkotaan seperti jalan, jembatan, dan jaringan irigasi masih perlu terus ditingkatkan

Terdapat lima pokok masalah pembangunan Kota Madiun berdasarkan identifikasi permasalahan pembangunan. Lima masalah pokok permasalahan pembangunan tersebut adalah 1. masih perlu ditingkatkannya kualitas sumber daya manusia; 2. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur dengan kondisi sangat baik perlu ditingkatkan; 3. Pembangunan ekonomi perlu didorong untuk lebih berkualitas dan mampu pulih secepatnya sebagai dampak Covid-19; 4. Reformasi birokrasi mengalami peningkatan namun masih perlu ditingkatkannya sesuai target; dan 5. Perlunya peningkatan kehidupan masyarakat yang tentram dan harmonisasi. Hasil pemetaan tersebut dapat dilihat dalam gambar berikut.



Gambar 4.1

Lima Masalah Pokok Pembangunan Kota Madiun

Dalam upaya mengatasi permasalahan pokok pembangunan, perlu diidentifikasi faktor penyebab (akar masalah) masalah pokok yang telah diidentifikasi. Permasalahan pokok masih perlu ditingkatkannya kualitas sumberdaya manusia, disebabkan oleh capaian IPM yang lambat meskipun IPM Kota Madiun tertinggi ketiga di Jawa Timur. Selain itu peningkatan kemiskinan dan permasalahan kesehatan akibat Covid-19 perlu juga menjadi perhatian dalam upaya meningkatkan kualitas SDM. Masih terbatasnya pencapaian ekonomi daerah yang inklusif disebabkan oleh masih rendahnya pertumbuhan ekonomi sebagai dampak Covid-19 dan relatif tingginya ketimpangan pendapatan. Hal tersebut disebabkan oleh masih rendahnya nilai investasi dan nilai tambah sektor unggulan, serta masih perlu ditingkatkannya infrastruktur ekonomi daerah dan kemampuan keuangan daerah.

Hasil pemetaan tersebut sudah sejalan dengan tabel 2.160 21n tabel 261 di bab II. Hasil pemetaan masalah pokok pembangunan lebih rinci dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 4.2
Hasil Pemetaan Masalah Pokok berdasarkan Identifikasi Permasalahan Pembangunan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	masih terbatasnya kualitas sumber daya manusia	Indek Pembangunan manusia sudah sangat tinggi namun belum mencapai target RPJMD	Masih perlu ditingkatkannya Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
			Masih perlu ditingkatkannya tenaga pendidik SD/MI dan SMP/MTS dengan kualifikasi lulusan S1/S2/S3
			Belum terpenuhinya target SPM pelayanan bidang kesehatan
			Masih perlu ditingkatkannya pelayanan kesehatan rujukan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun
		Meningkatnya tingkat kemiskinan	Pandemic Covid-19 menyebabkan tingkat kemiskinan meningkat
			Meningkatnya jumlah PMKS
		Masih terbatasnya jaring pengaman sosial	
2.	Ketersediaan dan kualitas infrastruktur perkotaan dan pengelolaan lingkungan hidup perlu ditingkatkan	Kuantitas dan kualitas infrastruktur masih perlu peningkatan	Masih perlu ditingkatkannya indeks kenyamanan kota
			Perencanaan pembangunan infrastruktur masih perlu ditingkatkan dan direncanakan secara komprehensif
			Masih terdapat jalan berkualitas buruk
			Masih terbatasnya indeks infrastruktur ekonomi daerah
			Proporsi Belanja modal relatif rendah meskipun mengalami peningkatan
		Masih terbatasnya pengelolaan lingkungan hidup	Masih perlu ditingkatkannya sanitasi dan penyediaan air dan udara yang bersih
			Penurunan kualitas lingkungan
			Kesiapsiagaan dan mitigasi bencana kota
			Pengelolaan limbah dan persampahan
			Sanitasi dan penyediaan air bersih
		Alih fungsi lahan pertanian	
3	Pembangunan ekonomi perlu didorong untuk lebih berkualitas	Menurunnya pertumbuhan ekonomi	Pandemic covid 19 masih belum pasti kapan akan diatasi
			Pembatasan mobilitas akibat Covid-19 dan menurunnya tingkat konsumsi

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Industri utama di Kota Madiun terdampak Covid-19 sehingga mengalami penurunan produksi
			Nilai tambah sektor unggulan masih terbatas
		Ketimpangan Pendapatan	Masih perlu ditingkatkannya infrastruktur ekonomi daerah
			Masih terjadinya ketimpangan antar wilayah khususnya antar kelurahan
		Kapasitas fiskal daerah terbatas	Masih terbatasnya penggalian potensi PAD
Penentuan target pendapatan masih dalam skema pesimis			
4	Reformasi birokrasi mengalami peningkatan namun masih perlu ditingkatkannya sesuai target	Tata kelola pemerintahan dalam pelaksanaannya belum optimal	Indeks reformasi birokrasi belum optimal
			Masih terbatasnya kualitas ASN
			Kualitas pelayanan terhadap masyarakat masih perlu ditingkatkan
		Masih perlu ditingkatkannya tata kelola pemerintahan yang baik berbasis sistem informasi dan teknologi /digitalisasi	Masih terbatasnya kualitas aparatur
			Masih perlu ditingkatkannya kapasitas pengelolaan pemeritahan
5	Perlunya peningkatan kehidupan masyarakat yang tentram dan harmonisasi kehidupan bermasyarakat	Masih perlu ditingkatkannya harmonisasi dan stabilisasi kehidupan masyarakat	Masih terdapatnya kriminalitas
			Masih rawannya konflik sosial
		Masih perlu ditingkatkannya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertiban, ketentraman dan keindahan serta masih perlu ditingkatkannya tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban ketentraman, keindahan)	
		Masih rendahnya IPG dan IDG	Masih terbatasnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak

Sumber: bab II (diolah, 2021)

4.2 Isu Strategis

4.2.1 Identifikasi Isu-isu Strategis

Penentuan isu-isu strategis merupakan langkah utama dalam menentukan arah kebijakan kedepan. Isu strategis merupakan kondisi yang perlu diperhatikan berdasarkan hasil analisis kondisi internal dan eksternal sebagaimana digambarkan dalam uraian kondisi, permasalahan, dan tantangan pembangunan Kota Madiun.

Analisis isu-isu strategis didefinisikan berdasarkan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang yang terjadi dan akan terjadi termasuk memiliki pengaruh yang kuat terhadap keberhasilan pembangunan. Isu strategis juga disusun berdasarkan berbagai hal yang dapat dimanfaatkan sebagai peluang yang akan muncul dalam 5 (lima) tahun mendatang, termasuk mengantisipasi berbagai ancaman.

Pernyataan isu-isu strategis memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan karena pengaruh yang besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada lima tahun mendatang sampai dengan berakhirnya masa perencanaan jangka menengah. Isu-isu strategis adalah isu-isu yang jika diprioritaskan penanganannya maka peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan pada sisa waktu pelaksanaan lima tahun mendatang akan lebih besar dan lebih pasti. Jika isu strategis ini tidak ditangani maka tujuan dan sasaran menjadi sulit tercapai dan apabila tidak diantisipasi maka akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, demikian pula sebaliknya jika tidak dimanfaatkan akan dapat menghilangkan peluang untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Penetapan isu-isu strategis pembangunan Kota Madiun berdasarkan hasil analisis terhadap lingkungan eksternal berupa permasalahan/agenda/aspek yang menjadi isu pada tingkat internasional, nasional dan regional yang berpengaruh luas. Disamping itu, dilakukan juga analisis terhadap kondisi lingkungan internal berupa permasalahan pembangunan yang dihadapi dan harus ditangani selama lima tahun mendatang. Adapun isu pada tingkat internasional, nasional, regional, dan permasalahan internal yang berpengaruh signifikan dapat dilihat dalam tabel berikut

Tabel 4.3
Identifikasi Isu-isu Strategis Daerah Kota Madiun

No	Tingkat Isu / Dinamika	Isu Strategis Pembangunan Daerah
1	INTERNASIONAL	Dampak Pandemic Covid-19 terhadap ekonomi global dan vaksinasi global
		Sustainable Development Goals (SDGs) dicetuskan untuk meneruskan Milenium Development Goals (MDGs) agar lebih terarah dan berkelanjutan. SDGs diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030 dan memiliki 5 pondasi utama meliputi: manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian dan kemitraan dengan 17 target sasaran utama, yaitu:
		1 Tanpa Kemiskinan: Tidak ada kemiskinan dalam bentuk apapun di seluruh penjuru dunia.
		2 Tanpa Kelaparan: Tidak ada lagi kelaparan, mencapai ketahanan pangan, perbaikan nutrisi, serta mendorong budidaya pertanian yang berkelanjutan.
		3 Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan: Menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan hidup untuk seluruh masyarakat di segala umur.
		4 Pendidikan Berkualitas: Menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang, menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang.
		5 Kesetaraan Gender: Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum ibu dan perempuan.
		6 Air Bersih dan Sanitasi: Menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua orang.
		7 Energi Bersih dan Terjangkau: Menjamin akses terhadap sumber energi yang terjangkau, terpercaya, berkelanjutan dan modern untuk semua orang.
		8 Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak: Mendukung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, lapangan kerja yang penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua orang.
9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur: Membangun infrastruktur yang berkualitas, mendorong peningkatan industri yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi.		

No	Tingkat Isu / Dinamika	Isu Strategis Pembangunan Daerah
		<p>10Mengurangi Kesenjangan: Mengurangi ketidaksetaraan baik di dalam sebuah negara maupun di antara negara-negara di dunia.</p> <p>11Keberlanjutan Kota dan Komunitas: Membangun kota-kota serta pemukiman yang inklusif, berkualitas, aman, berketahanan dan berkelanjutan.</p> <p>12Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab: Menjamin keberlangsungan konsumsi dan pola produksi.</p> <p>13Aksi Terhadap Iklim: Bertindak cepat untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya.</p> <p>14Kehidupan Bawah Laut: Melestarikan dan menjaga keberlangsungan laut dan kehidupan sumber daya laut untuk perkembangan pembangunan yang berkelanjutan.</p> <p>15Kehidupan di Darat: Melindungi, mengembalikan, dan meningkatkan keberlangsungan pemakaian ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, mengurangi tanah tandus serta tukar guling tanah, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati.</p> <p>16Institusi Peradilan yang Kuat dan Kedamaian: Meningkatkan perdamaian termasuk masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang termasuk lembaga dan bertanggung jawab untuk seluruh kalangan, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan.</p> <p>17Kemitraan untuk Mencapai Tujuan: memperkuat implementasi dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan.</p>
2	NASIONAL	<p>Pemulihan ekonomi nasional dampak dari Covid-19</p> <p>Perpres 80/2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan. Diperlukan klasterisasi wilayah</p>

No	Tingkat Isu / Dinamika	Isu Strategis Pembangunan Daerah
		<p>Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar</p> <p>Pengurangan kesenjangan antarwilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman</p> <p>Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penciptaan lapangan kerja melalui pertanian, industri, pariwisata dan jasa produktif lainnya</p> <p>Pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air</p> <p>Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu nasional dan daerah</p> <p>Konsep pembangunan berbasis <i>Smart City</i> dengan pengintegrasian teknologi untuk menciptakan efisiensi, memperbaiki pelayanan public dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan Teknologi Informasi yang inovatif; 2. Terobosan pada sektor unggulan; 3. Terobosan dalam penyelesaian masalah; 4. Penggunaan data sebagai pengambil kebijakan atau keputusan; 5. Kolaborasi antar bidang dalam penyelenggaraan pembangunan. <p>Dimensi pembangunan berbasis <i>Smart City</i> meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Smart Governance</i>, meliputi unsur pelayanan public, birokrasi dan kebijakan public; 2. <i>Smart Branding</i>, meliputi unsur membangun ekosistem pariwisata, daya saing bisnis dan industry kreatif serta penataan wilayah kota; 3. <i>Smart Economy</i>, meliputi unsur penataan industri, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan membangun ekosistem keuangan; 4. <i>Smart Living</i>, meliputi unsur pembangunan lingkungan, menjamin fasilitas dan pelayanan kesehatan serta membangun transportasi dan logistik; 5. <i>Smart Society</i>, meliputi unsur membangun masyarakat yang smart, membangun system edukasi, keamanan & keselamatan; 6. <i>Smart Environment</i>, meliputi unsur perlindungan sosial, tata kelola sampah dan limbah serta membangun daya saing energi yang berkelanjutan.
3	PROVINSI JAWA TIMUR	Pemulihan dan percepatan pertumbuhan ekonomi dan kondisi sosial masyarakat akibat pandemic Covid-19

No	Tingkat Isu / Dinamika	Isu Strategis Pembangunan Daerah
		<p>Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial</p> <p>Peningkatan lapangan kerja melalui Millineal Job Center dengan cara memberikan job training, pendidikan vokasi, membantu starting-up usaha, membantu promosi bagi usahawan muda, dan membantu pembiayaan usaha pada tahap awal usaha.</p> <p>Peningkatan pendidikan dan kesehatan gratis berkualitas</p> <p>Pembangunan infrastruktur dalam kerangka pengembangan wilayah terpadu, dan keadilan akses bagi masyarakat pesisir dan terluar seperti Kawasan Lingkar Wilis, Lingkar Bromo, Lingkar Ijen, Gerbang Kertasusila, Koridor Maritim Pantura Jawa-Madura, Koridor Maritim Selatan Jawa.</p> <p>Pemberian tunjangan kehormatan bagi imam masjid di kampung, pesisir, dan pulau terluar. Kemudian perluasan tunjangan kehormatan bagi hafidz-hafidzoh. Penguatan peran pondok pesantren dalam mendorong partisipasi sekolah</p> <p>Peningkatan sektor pertanian, peternakan, perikanan darat dan laut, kehutanan, perkebunan untuk mewujudkan kesejahteraan petani dan nelayan.</p> <p>Penguatan ekonomi kerakyatan dengan berbasis UMKM, koperasi, dan mendorong pemberdayaan pemerintahan.</p> <p>Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif, dan anti korupsi. Peningkatan budaya meritokrasi, menyelenggarakan complain handling system, budaya birokrasi yang melayani dan efektif, menjaga clean government, sound governance, perluasan dan pelayanan berbasis IT.</p> <p>Penguatan harmoni sosial dan alam dengan melestarikan kebudayaan dan lingkungan hidup.</p>
4	KOTA MADIUN	<p>Isu strategis berdasarkan kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pengelolaan potensi ekonomi daerah secara optimal • Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan, kesehatan dan pelayanan sosial • Mewujudkan pemerintahan yang baik dalam situasi yang tertib, aman dan damai.

No	Tingkat Isu / Dinamika	Isu Strategis Pembangunan Daerah
		<ul style="list-style-type: none"> ● Meningkatkan kerja sama antar pemangku kepentingan pembangunan, baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional
		<ul style="list-style-type: none"> ● Melestarikan fungsi lingkungan hidup dengan menerapkan prinsip-prinsip pencegahan, penanggulangan dan pemulihan dengan melibatkan partisipasi masyarakat
		Isu strategis berdasarkan kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah:
		<ul style="list-style-type: none"> ● Pengembangan Sarana dan Prasarana Wilayah dalam rangka mendorong peluang investasi dan pemerataan wilayah
		<ul style="list-style-type: none"> ● Keseimbangan Fungsi Budidaya dan Fungsi lindung dalam Upaya membentuk Daerah yang berkelanjutan
		<ul style="list-style-type: none"> ● Pusat kegiatan wilayah dan Penetapan kawasan-kawasan strategis Kota
		<ul style="list-style-type: none"> ● Pusat-pusat pelayanan ekonomi skala regional
		<ul style="list-style-type: none"> ● Pengembangan pusat pelayanan kegiatan memperkuat hubungan antar kawasan
		<ul style="list-style-type: none"> ● Pengembangan kegiatan pertanian perkotaan
		<ul style="list-style-type: none"> ● Peningkatan aksesibilitas dan keterkaitan antar pusat kegiatan
		<ul style="list-style-type: none"> ● Pelestarian kawasan cagar budaya
		<ul style="list-style-type: none"> ● Pengembangan kawasan budidaya terbangun yang ^[1]_{SEP} mempertimbangkan efisiensi pemanfaatan ruang
		<ul style="list-style-type: none"> ● Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana lingkungan permukiman
		Isu strategis berdasarkan Kebijakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
		<ul style="list-style-type: none"> ● Penyediaan air minum dan sanitasi lingkungan
		<ul style="list-style-type: none"> ● Penanggulangan kriminalitas dan keamanan
		<ul style="list-style-type: none"> ● Peningkatan kesehatan masyarakat
		<ul style="list-style-type: none"> ● Pengelolaan limbah dan sampah
		<ul style="list-style-type: none"> ● Penanggulangan kemiskinan dan Penangguran
		<ul style="list-style-type: none"> ● Penurunan kualitas lingkungan hidup
		<ul style="list-style-type: none"> ● Kualitas pendidikan belum merata

No	Tingkat Isu / Dinamika	Isu Strategis Pembangunan Daerah
		<ul style="list-style-type: none"> ● Kesiapsiagaan dan mitigasi bencana
		<ul style="list-style-type: none"> ● Kesetaraan gender dan perlindungan anak
		<ul style="list-style-type: none"> ● Pertumbuhan ekonomi dan investasi daerah
		<ul style="list-style-type: none"> ● Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
		<ul style="list-style-type: none"> ● Sarana dan prasarana perkotaan
		Isu Strategis umum lainnya meliputi
		<ul style="list-style-type: none"> ● Pemulihan dan percepatan pertumbuhan ekonomi dan kondisi sosial masyarakat akibat pandemi Covid-19
		<ul style="list-style-type: none"> ● Peningkatan pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing
		<ul style="list-style-type: none"> ● Peningkatan ekonomi daerah yang inklusif dan pengembangan Kawasan pertumbuhan ekonomi baru peran yang mandiri
		<ul style="list-style-type: none"> ● Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan secara komprehensif
		<ul style="list-style-type: none"> ● Penguatan tata kelola pemerintahan dan yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan public
		<ul style="list-style-type: none"> ● Peningkatan harmonisasi kehidupan bermasyarakat
		<ul style="list-style-type: none"> ● Kolaborasi, kerjasama dan Sinergi dengan daerah baik secara vertical maupun horizontal
		<ul style="list-style-type: none"> ● Klasterisasi wilayah sesuai potensi sosial ekonomi

4.2.2 Penetapan Isu Strategis Pembangunan Daerah

Isu strategis yang dapat dirumuskan dalam RPJMD ini ditetapkan berdasarkan kriteria-kriteria dalam tabel di bawah. Setiap kriteria akan dikalikan dengan angka maksimum 100.

Tabel 4.4
Kriteria Pembobotan Isu-isu Strategis Daerah Kota Madiun

No	Kriteria	Bobot
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional dan daerah	15
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah	20
3	Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat	15
4	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah	20
5	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	15
Total		100

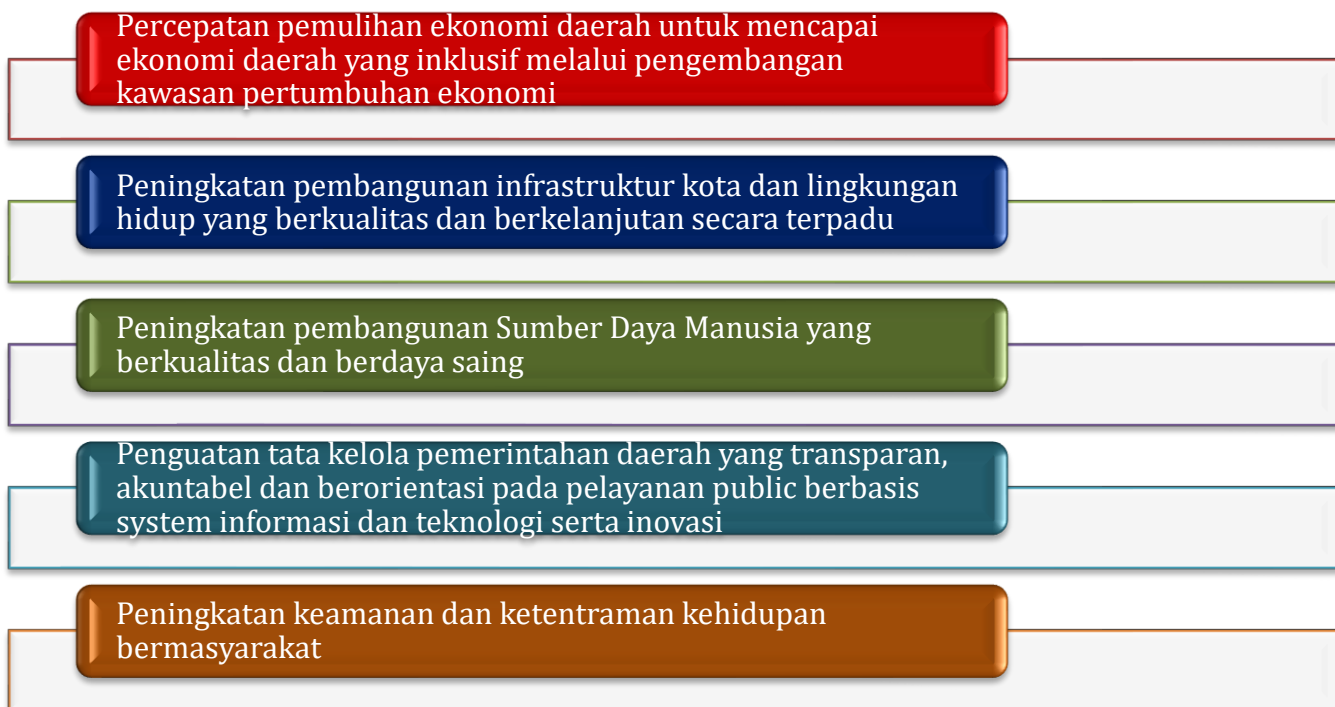
Dari berbagai isu strategis pada sub bab sebelumnya kemudian dikelompokkan dan di ranking

Tabel 4.5
Hasil Perankingan Isu-isu Strategis Daerah Kota Madiun

No	Isu Strategis berdasarkan pengelompokan	Isu Strategis utama	Nilai Skala Kriteria ke-						Total Skor	Ranking
			1	2	3	4	5	6		
1	Sumberdaya manusia	Peningkatan pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing	90	90	80	90	80	80	85,5	3
	Pencapaian SDGs									
	Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan, kesehatan dan pelayanan sosial									
	Kesetaraan gender dan memberdayakan kaum ibu dan perempuan.									
2	Pembangunan Ekonomi	Percepatan pemulihan ekonomi daerah untuk mencapai ekonomi daerah yang inklusif melalui pengembangan	90	85	90	90	85	85	87,5	1
	Pemulihan ekonomi nasional sebagai dampak Pandemic Covid-19 terhadap ekonomi global									

No	Isu Strategis berdasarkan pengelompokan	Isu Strategis utama	Nilai Skala Kriteria ke-						Total Skor	Ranking
			1	2	3	4	5	6		
	Meningkatkan kerja sama antar pemangku kepentingan pembangunan, baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional	teknologi serta inovasi								

Sesuai dengan kriteria diatas, terdapat lima isu strategis pembangunan daerah. Selain itu, berpijak pada analisis atas kondisi daerah dan masukan dari para pemangku kepentingan, maka isu strategis yang menjadi agenda dan prioritas pembangunan Kota Madiun pada tahun pelaksanaan rencana jangka menengah daerah 2019–2024 adalah sebagai berikut:



Gambar 4.2
Isu Strategis Pembangunan Daerah Kota Madiun

1. Percepatan pemulihan ekonomi daerah untuk mencapai ekonomi daerah yang inklusif melalui pengembangan kawasan pertumbuhan ekonomi.

Kondisi perekonomian daerah Kota Madiun perlu ditingkatkan ditengah pemulihan ekonomi daerah akibat pandemi Covid-19. Peningkatan tersebut dapat dilakukan dengan fokus pada peningkatan industri pengolahan, ekonomi kreatif dan perdagangan, serta pertumbuhan sektor pariwisata. Struktur perekonomian daerah Kota Madiun masih didominasi oleh sektor tersier. Sampai dengan tahun 2020 sektor yang paling dominan berkontribusi terhadap perekonomian adalah sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Rata-rata kontribusi sektor tersebut lebih dari 25 persen terhadap PDRB. Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor merupakan sektor yang menjadi mata pencaharian sekaligus menyerap banyak tenaga kerja. Agar menjadi pilar pertumbuhan daerah sekaligus pemulihan dan peningkatan ekonomi yang berkelanjutan, perlu dilakukan upaya-upaya meningkatkan pertumbuhan sektor unggulan daerah.

Peningkatan sektor unggulan dapat dimulai dengan peningkatan pertumbuhan sektor pengolahan dapat didukung dengan peningkatan ekonomi kreatif melalui proses produksi yang dilakukan pengerajin batik, kayu, souvenir, anyaman dan pengolahan makanan. Hasil pengolahan tersebut dapat diperdagangkan sekaligus meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan sektor perdagangan. Dalam rangka pengembangan sektor pengelolaan dan perdagangan Pemerintah Kota Madiun harus menyiapkan lahan untuk pengembangan sektor industri serta mempercepat pemulihan dan peningkatan ekonomi daerah. Selain sektor unggulan tantangan dalam mempercepat pemulihan ekonomi ditengah pandemi yang berlangsung adalah pengembangan pariwisata. Perlu dilakukan upaya-upaya meningkatkan pertumbuhan sektor pariwisata dengan cara mempromosikan lokasi wisata di Kota Madiun yang memiliki nilai jual dan layak dipromosikan seperti; kawasan wisata spiritual, kawasan wisata kuliner, kawasan wisata cagar budaya dan kawasan wisata belanja/*shopping centre*. Dengan pengembangan potensi kawasan wisata, diharapkan dapat memberikan dampak ganda dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi dan pembangunan Kota Madiun. Selain itu basis pengembangan ekonomi perlu dilakukan di masing – masing kelurahan. Sehingga setiap kelurahan bias mandiri dan menjadi pusat Kawasan pertumbuhan ekonomi baru.

2. Peningkatan pembangunan infrastruktur kota dan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan secara terpadu.

Salah satu aset paling penting dalam pembangunan daerah adalah infrastruktur. Secara umum kondisi infrastruktur di Kota Madiun cukup baik. Hal ini diindikasikan oleh indeks infrastruktur Kota Madiun tahun 2020 sebesar 96%. Selain itu, persentase panjang jalan dapat menggambarkan kondisi infrastruktur daerah, kondisi panjang jalan dalam keadaan baik Kota Madiun pada tahun 2020 meningkat sebesar 94,02% dari total panjang jalan sepanjang 433,485 km. Meningkatnya pembangunan infrastruktur juga ditandai dengan meningkatnya sarana panjang jalan di Kota Madiun yang telah memiliki trotoar yaitu sepanjang 92,74 km. Namun demikian, secara keseluruhan indeks sarana prasarana Kota Madiun tahun 2020 sebesar 86,62 persen.

Perlu dilakukan peningkatan dari sisi kuantitas dan kualitas diseluruh wilayah Kota Madiun. Pada sisi lain, intensitas yang tinggi dalam peningkatan pembangunan infrastruktur dapat menimbulkan dampak negatif pada kelestarian lingkungan hidup (perubahan iklim mikro, menyusutnya daerah serapan air, berkurangnya sumber mata air, menurunnya kualitas air. Terwujudnya infrastruktur kota juga harus memperhatikan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan. Kualitas lingkungan hidup dapat diukur dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). IKLH terdiri dari Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Air, dan Indeks Tutupan Lahan. Berdasarkan pengukuran IKLH Kota Madiun menunjukkan perbaikan dengan terus meingkatnya nilai indeks setiap tahun hingga pada tahun 2020 sebesar 65,42. Indeks Kualitas Air Kota Madiun juga meningkat sebesar 78,50, peningkatan kualitas air selaras dengan peningkatan Indeks Kualitas Udara hingga sebesar 87,94. Sedangkan Indeks Kualitas Tutupan Kota Madiun 2020 hanya sebesar 38,87.

Selain IKLH kualitas lingkungan hidup dapat dilihat persentase ruang yang dimanfaatkan, pada tahun 2020 pemerintah Kota Madiun telah berhasil memanfaatkan ruang sebesar 100 persen. Dapat dikatakan pemerintah Kota Madiun telah meningkatkan kualitas penataan ruang sekaligus pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas. Lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan juga dapat menanggulangi bencana alam yang sering terjadi di Kota Madiun yaitu banjir.

3. Peningkatan pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Indikator utama kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia. Indeks Pembangunan Manusia dapat dihitung berdasarkan tiga aspek dasar yaitu aspek kesehatan, aspek pendidikan, dan aspek ekonomi. Selama lima tahun terakhir kualitas sumber daya manusia di Kota Madiun menunjukkan peningkatan. IPM Kota Madiun pada tahun 2020 meningkat hingga mencapai 80,91. Hal tersebut menunjukkan trend yang sangat positif, pada tahun sebelumnya IPM Kota Madiun termasuk dalam kategori tinggi pada tahun 2020 berubah menjadi kategori sangat tinggi. Kota Madiun menduduki posisi tiga IPM tertinggi dibandingkan dengan wilayah karisidenan Madiun bahkan di Provinsi Jawa Timur.

Beberapa faktor yang menyebabkan IPM Kota Madiun berada di posisi 3 dari 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur diantaranya adalah cukup meratanya jumlah kualitas pelayanan dasar masyarakat, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Pada bidang pendidikan harapan lama sekolah telah mencapai sebesar 14,40 tahun atau harapan penduduk untuk bersekolah telah mencapai jenjang perguruan tinggi. Rata-rata lama sekolah Kota Madiun telah mencapai 11,14 tahun dapat diartikan bahwa rata-rata penduduk di Kota Madiun mampu menempuh pendidikan hingga kelas 1 SMA. Selain pendidikan, derajat kesehatan masyarakat di Kota Madiun cukup tinggi yang diindikasikan dengan indeks kesehatan sebesar 0,81 satuan indeks. Pemerintah Kota Madiun juga mampu menurunkan angka kematian ibu dan bayi dengan dibuktikan oleh tidak adanya angka kematian ibu dan kematian bayi yang tercatat pada tahun 2020. Hal tersebut mempengaruhi tingginya umur harapan hidup masyarakat Kota Madiun.

4. Penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik berbasis system informasi dan teknologi serta inovasi.

Tercapainya efektivitas dan efisiensi dalam pembangunan harus dibarengi dengan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, akuntabel, dan berorientasi pada publik. Perkembangan kinerja tata kelola pemerintahan Kota Madiun selama lima tahun terakhir cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari indikator kinerja keuangan melalui opini BPK dengan status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang konsisten selama lima tahun terakhir.

Selain itu, Indeks Kepuasan Masyarakat kota Madiun telah mencapai 89,12%. Fungsi penunjang administrasi pemerintah reformasi birokrasi dan nilai hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah telah mencapai target. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah daerah selama lima tahun terakhir mendapatkan nilai B dan ditargetkan pada akhir periode RPJMD 2019-2024 telah mencapai target dengan nilai A.

Perbaikan dan pengembangan tata kelola pemerintahan yang baik tetap perlu dilaksanakan secara terus-menerus, terutama meliputi kelembagaan, manajemen aparatur, manajemen perencanaan dan penganggaran, prosedur operasi standar (*SOP/standart operation procedure*), dan keterbukaan informasi publik yang memadai serta peningkatan pelayanan publik berbasis IT. Perlunya perbaikan dan peningkatan kualitas SDM aparatur masih perlu ditingkatkan dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan publik serta pengembangan tata kelola pemerintahan berdasarkan kerangka pikir bahwa kinerja birokrasi pemerintahan yang baik dan profesional serta penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi faktor kunci keberhasilan pembangunan di Kota Madiun.

Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dan profesional juga dilaksanakan melalui peningkatan kualitas perencanaan, pembangunan, pengendalian dan penganggaran daerah dengan melakukan evaluasi kinerja. Perkembangan teknologi dan informasi yang semakin maju, maka proses evaluasi kinerja dapat melalui melalui *e-government* yang meliputi *e-planning*, *e-budgeting*, dan lain sebagainya. Selanjutnya perlu juga melakukan optimalisasi pendapatan daerah melalui Pengembangan Potensi Penerimaan Asli Daerah (PAD) melalui peningkatan *Local Taxing Power*, Optimaliasi penerimaan dana perimbangan dari DAK yang bersifat *bottom up*, dalam mendukung pengembangan infrastruktur daerah; Optimaliasi Pendapatan dari Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; Peningkatan upaya penegakan hukum terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah.

5. Peningkatan keamanan dan ketentraman kehidupan bermasyarakat.

Keamanan dan ketentraman kehidupan bermasyarakat dapat diindikasikan oleh tingkat kriminalitas, rasa tentram dan jumlah pelanggaran perda. Angka kriminalitas yang tertangani di Kota Madiun menunjukkan penurunan.

Pada tahun 2016 angka kriminalitas mencapai 14,93 persen menurun secara signifikan pada tahun 2018 sebesar 4,06 persen. Semakin rendah angka kriminalitas semakin tinggi rasa aman suatu daerah. Indeks ketentraman Kota Madiun tahun 2020 mencapai 75% dan ditargetkan pada akhir periode RPJMD 2019-2024 akan mencapai 85%. Tingkat keberhasilan penegakan Perda suatu daerah dapat diukur dengan indikator persentase penegakan Perda. Persentase penegakan perda tahun 2020 di Kota Madiun telah mencapai 100%. Sedangkan, pelanggaran K-3 pada tahun 2020 mengalami penurunan dan pelanggaran K-3 yang berhasil ditangani sebanyak 2051 kasus.

Peningkatan keamanan dan ketentraman juga akan meningkatkan toleransi dalam bermasyarakat. Disisi lain, toleransi masyarakat yang masih rendah mengenai pentingnya menjaga kebersamaan dan keharmonisan kehidupan sosial bermasyarakat akan memicu terjadinya konflik sosial. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayahnya perlu dioptimalkan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya sistematis, berkesinambungan, konsisten untuk meningkatkan toleransi dan peran/partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, menciptakan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum serta mengurangi angka kriminalitas dan penggunaan NAPZA.

Perubahan isu-isu strategis pada P-RPJMD dari RPJMD murni dapat dilihat dalam tabel berikut

Tabel 4.6
Perbandingan Isu Strategis RPJMD 2019-2024 dengan Ranwal RPJMD Perubahan 2019-2024

NO	RPJMD 2019-2024 sebelum perubahan		NO	RPJMD Perubahan 2019-2024
1	Peningkatan Kualitas Sekolah pada Semua Jenjang Pendidikan;		1	Percepatan pemulihan ekonomi daerah untuk mencapai ekonomi daerah yang inklusif melalui pengembangan kawasan pertumbuhan ekonomi
2	Peningkatan Pelayanan Kesehatan;		2	Peningkatan pembangunan infrastruktur kota dan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan secara terpadu
3	Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik;		3	Peningkatan pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing
4	Pengembangan Kota Madiun sebagai Pusat Pengembangan Jawa Timur Bagian Barat;		4	Penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik berbasis system informasi dan teknologi serta inovasi
5	Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;		5	Peningkatan keamanan dan ketentraman kehidupan bermasyarakat
6	Percepatan Pengembangan Agroindustri;			
7	Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kota;			
8	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas RTH serta Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota			
9	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (<i>Sustainable Development Goals</i>);			
10	Penguatan Pola Pembangunan Partisipatif;			
11	Peningkatan Kemampuan Keuangan Daerah.			

Berdasarkan tabel diatas, sebagian isu-isu strategis dalam RPJMD murni hampir semuanya bisa dikelompokkan dalam berbagai isu startegis dalam P-RPJMD. Sehingga bisa dikatakan isu-isu strategis dalam P-RPJMD merangkum secara eksplisit isu strategis dalam RPJMD murni. Sleain itu, capaian indikator kinerja pada beberapa aspek isu strategis RPJMD murni sudah tercapai seperti pada peningkatan kualitas sekolah yang diindikasikan oleh indeks pendidikan yang mengalami peningkatan, peningkatan kemampuan keuangan daerah yang diindikasikan oleh derajat desentralisasi fiskal pun sudah mengalami peningkatan meskipun masih perlu terus diupayakan agar dapat mandiri secara fiskal.

Sedangkan beberapa isu-isu staretgis yang lainnya sudah tidak relevan, seperti pengembangan kota Madiun sebagai Pusat Pengembangan Jawa Timur Bagian Barat. Hal ini dikarenakan kebijakan pusat dan provinsi yang berorientasi pada pengembangan kawsaan selingkar wilis. Dimana Kota Madiun diarahkan pada pengembangan industri dan wisata. Selanjutnya, banyaknya isu strategis dalam RPJMD murni berakibat pada kurang fokusnya arah kebijakan pembangunan daerah.

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

5.1 Visi

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin diwujudkan dalam periode lima tahun mendatang. Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Visi yang ditetapkan dapat memberikan motivasi kepada seluruh aparatur serta masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kinerja dalam rangka mewujudkan visi tersebut. Dengan mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis pada bab sebelumnya maka rumusan Visi Kota Madiun tahun 2019-2024 adalah:

“Terwujudnya Pemerintahan Bersih Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera”

Terdapat Tiga pilar utama dalam rumusan visi pembangunan Kota Madiun 2019-2024. Dalam menuju masyarakat Kota Madiun yang sejahtera diperlukan berbagai upaya secara sistematis dan komprehensif, sehingga visi tersebut dapat tercapai. Memperhatikan Visi Kota Madiun diatas serta perubahan kondisi dan situasi baik internal dan eksternal yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kota Madiun dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup regional terkhusus di Provinsi Jawa Timur, tingkat nasional maupun global. Perumusan dan penjelasan terhadap Visi dimaksud, menghasilkan pokok-pokok Visi yang diterjemahkan pengertiannya, sebagaimana Gambar 5.1.



Gambar 5.1
Visi Pembangunan Kota Madiun Tahun 2019-2024

Rumusan Visi RPJMD Kota Madiun 2019-2024 memiliki keterkaitan dengan visi RPJPD Kota Madiun 2005 – 2025, visi RPJMD provinsi Jawa Timur 2019-2024, dan visi RPJP Provinsi Jawa Timur 2005-2025. Dalam upaya menjamin konsistensi, sinergitas antara rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan RPJMN dan RPJPD, penjelasan visi harus menggambarkan keterkaitannya dengan RPJPD dan RPJPN untuk RPJMD provinsi dan keterkaitannya dengan RPJPD provinsi untuk RPJMD Kota Madiun. Keterkaitan visi Kota Madiun dengan RPJPD Kota Madiun 2005-2025, RPJPD dan RPJMD Provinsi Jawa Timur dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 5.1
Keterkaitan Visi dengan RPJMD dan RPJP Provinsi

Visi RPJP Jatim 2005-2025	Visi RPJMD Jatim 2019-2024	Visi RPJPD Kota Madiun 2005-2025	Visi RPJMD Kota Madiun 2019-2024
Terwujudnya Jawa Timur sebagai pusat agribisnis terkemuka, berdaya saing global dan berkelanjutan	Terwujudnya Jawa Timur yang adil, sejahtera, unggul dan berakhlak dengan tata kelola pemerintahan yang partisipatoris inklusif melalui kerja bersama dan gotong royong	Terwujudnya kota Madiun sebagai Pusat pengembangan Jawa Timur bagian barat yang maju dan sejahtera	Terwujudnya Pemerintahan Bersih Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera

5.2 Misi

Terdapat empat misi pembangunan dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kota Madiun tahun 2019 – 2024. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Tabel 5.2
Keterkaitan Pokok-Pokok Visi, Panca Karya, dan Rumusan Misi

No.	Pokok-pokok Visi	Panca Karya (Janji Politik)	Misi
1	Bersih Berwibawa	KARYA 2: Madiun Kota MELAYANI KARYA 5: Madiun Kota TERBUKA	Mewujudkan pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)
2	Sejahtera	KARYA 1: Madiun Kota PINTAR	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Madiun
		KARYA 3: Madiun Kota MEMBANGUN	Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan
		KARYA 4: Madiun Kota PEDULI	Mewujudkan kemandirian ekonomi dan pemerataan tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Madiun

Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi. Rumusan misi juga memperhatikan janji politik kepala daerah pada saat kampanye yang tercermin dalam Panca karya. Panca karya ini akan menjiwai setiap misi yang dirumuskan, namun beberapa Panca karya di fokuskan pada beberapa misi seperti terlihat dalam tabel:



Gambar 5.2
Misi Pembangunan Kota Madiun Tahun 2019-2024

Empat misi diatas didasarkan kepada kebutuhan pembangunan yang telah ditemukan dalam bentuk Visi pembangunan daerah Kota Madiun 2019-2024. Dalam upaya penyamaan persepsi terhadap misi tersebut serta mengurangi potensi ambiguitas dalam memahami butir misi, maka penjabaran Misi diatas dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.3
Perumusan dan Penjelasan Misi

No.	Pokok-pokok Visi	Misi	Penjelasan Misi
1	Bersih Berwibawa	Mewujudkan pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)	Dimaksudkan untuk mewujudkan pelayanan birokrasi pemerintah Kota Madiun yang prima, menjalankan fungsi birokrasi sebagai pelayan masyarakat yang didukung dengan kompetensi aparat yang professional dan system modern berbasis informasi teknologi (IT) menuju tatakelola pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>) dan pemerintahan yang bersih (<i>Clean Government</i>)

No.	Pokok-pokok Visi	Misi	Penjelasan Misi
2	Sejahtera	Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan	Mewujudkan pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dengan memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan secara berkelanjutan
		Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Madiun	Mewujudkan manusia yang cerdas, sehat dan mandiri; meningkatnya pembangunan responsive gender.
		Mewujudkan kemandirian ekonomi dan pemeratakan tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Madiun	Meningkatkan pembangunan ekonomi, kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja, menciptakan iklim usaha yang kondusif, mengembangkan koperasi dan UMKM, mewujudkan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan, Meningkatkan ketahanan pangan. Selain itu kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari tingkat kemiskinan dan ketimpangan yang menurun; menurunnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); tingginya peran pemuda dalam pembangunan, dan meningkatnya prestasi olah raga tingkat nasional dan internasional.

5.3 Tujuan dan Sasaran

Sesuai dengan visi dan misi yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

5.3.1 Tujuan dan Sasaran Misi pertama

Dalam rangka pencapaian misi 1. Mewujudkan Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*), maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional yang berorientasi pada pelayanan publik berbasis *smart cities*, dengan sasaran pembangunan sebagai berikut:

- S1. Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah
- S2. Meningkatnya kualitas pelayanan public

Tujuan dan Sasaran kemudian dapat dengan mudah dipahami melalui desain kerangka logis pencapaian Misi-1 sebagai berikut:



Gambar 5.3
 Kerangka Logis Pencapaian Misi-1 Tujuan 1

5.3.2 Tujuan dan Sasaran Misi kedua

Dalam rangka pencapaian misi Mewujudkan Pembangunan yang berwawasan lingkungan, maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

2. Terwujudnya Pembangunan infrastruktur Kota yang Maju, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan, dengan sasaran pembangunan sebagai berikut:

S3. Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur kota

S4. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Kerangka logis pencapaian misi kedua sesuai dengan tujuan dan sasaran diatas dapat diuraikan dalam gambar berikut:



Gambar 5.4
 Kerangka Logis Pencapaian Misi-2 Tujuan 2

5.3.3 Tujuan dan Sasaran Misi ketiga

Dalam rangka pencapaian misi Meningkatkan kualitas hidup Masyarakat Kota Madiun, maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

3. Terwujudnya Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing, dengan sasaran pembangunan sebagai berikut:

S5. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat

S6. Meningkatnya Derajat kesehatan Masyarakat

S7. Meningkatnya Pemberdayaan Gender

Tujuan dan Sasaran kemudian dapat dengan mudah dipahami melalui Desain kerangka logis Pencapaian Misi ketiga yang disajikan sebagai berikut:



Gambar 5.5
Kerangka Logis Pencapaian Misi-3 Tujuan 3

5.3.4 Tujuan dan Sasaran Misi keempat

Dalam rangka pencapaian misi Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Memeratakan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kota Madiun, maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

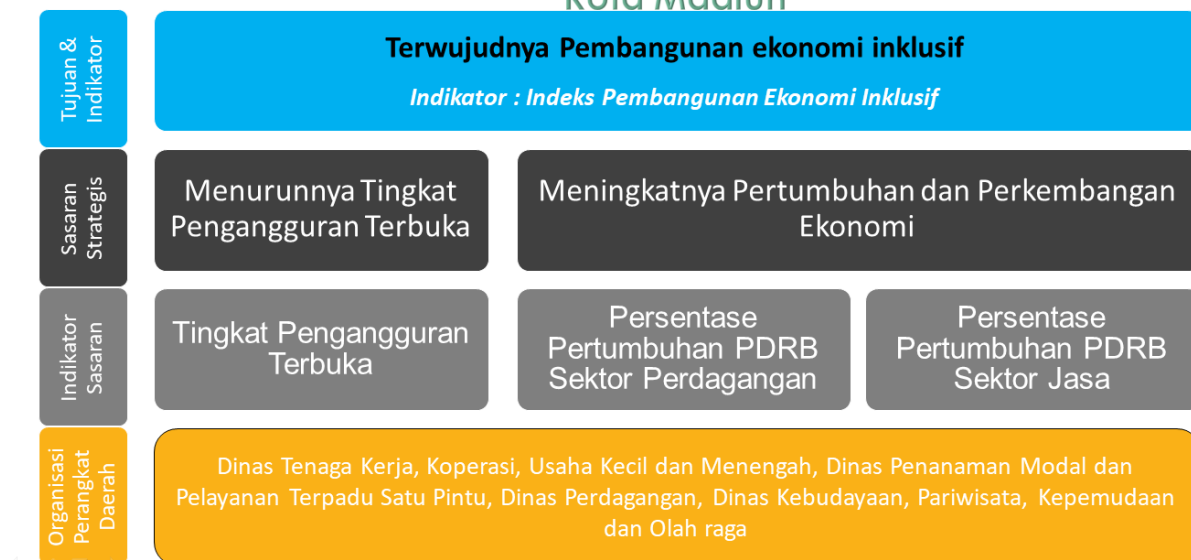
4. Terwujudnya Pembangunan ekonomi inklusif, dengan sasaran pembangunan sebagai berikut:

S8. Menurunnya tingkat pengangguran terbuka

S9. Meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan ekonomi

Pemahaman terhadap linieritas Misi, Tujuan hingga Sasaran kemudian dapat dengan mudah dipahami melalui desain kerangka logis Pencapaian Misi keempat yang disajikan sebagai berikut:

MISI 4 Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Memeratakan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kota Madiun



Gambar 5.6
Kerangka Logis Pencapaian Misi-4 Tujuan 4

5. Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan dan Stabilitas Kehidupan Sosial Masyarakat, dengan sasaran pembangunan sebagai berikut:

S10. Pengurangan Kemiskinan

S11. Meningkatkan stabilitas kehidupan social masyarakat

Pemahaman terhadap linieritas Misi, Tujuan hingga Sasaran kemudian dapat dengan mudah dipahami melalui desain kerangka logis Pencapaian Misi keempat tujuan ke 5 yang disajikan sebagai berikut:

MISI 4 Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Memeratakan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kota Madiun



Gambar 5.7
Kerangka Logis Pencapaian Misi-4 Tujuan 5

Secara umum terdapat perubahan tujuan dan sasaran pembangunan dalam dokumen perubahan RPJMD 2019 – 2024. Tujuan pembangunan mengalami perubahan dari yang sebelumnya terdapat empat tujuan menjadi lima tujuan dengan narasi yang berubah. Tambahan 1 tujuan tersebut adalah Terwujudnya Stabilitas Kehidupan Masyarakat yang Dinamis dan Kondusif. Selanjutnya sasaran pembangunan mengalami perubahan dari 14 menjadi 11 sasaran. Perubahan tersebut sejalan dengan refocusing pembangunan sesuai dengan perkembangan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat terkini.

Tabel 5.4

Tujuan Sasaran Sebelum dan Sesudah

MISI 1: Mewujudkan Pemerintahan yang Baik (Good Governance)			
RPJMD		P-RPJMD	
Tujuan	Sasaran	Tujuan	Sasaran
Terwujudnya Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional yang berorientasi pada pelayanan publik berbasis smart cities	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah
	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Pemangku Kepentingan		Meningkatnya kualitas pelayanan public
MISI 2: Mewujudkan Pembangunan yang berwawasan lingkungan			
RPJMD		P-RPJMD	
Tujuan	Sasaran	Tujuan	Sasaran
Terwujudnya Infrastruktur Kota yang Berwawasan Lingkungan	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur, sarana transportasi kota dan Permukiman	Terwujudnya Pembangunan infrastruktur Kota yang Maju, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur kota
	Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
MISI 3: Meningkatkan kualitas hidup Masyarakat Kota Madiun			
RPJMD		P-RPJMD	
Tujuan	Sasaran	Tujuan	Sasaran
Terwujudnya Masyarakat Kota Madiun yang berkualitas baik	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Kota Madiun	Terwujudnya Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat
	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat Kota Madiun		Meningkatnya Derajat kesehatan Masyarakat

			Meningkatnya pemberdayaan Gender
MISI 4: Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Memeratakan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kota Madiun			
RPJMD		P-RPJMD	
Tujuan	Sasaran	Tujuan	Sasaran
Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Terwujudnya Iklim Investasi yang Kondusif, dan peningkatan Penyerapan Tenaga Kerja	Terwujudnya Pembangunan ekonomi inklusif	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka
	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah		Meningkatnya Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi
	stabilitas Ketersediaan Pangan dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat		
Terwujudnya Stabilitas Kehidupan Masyarakat yang Dinamis dan Kondusif	Meningkatnya Kerukunan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Pemuda yang Berprestasi	Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan dan Stabilitas Kehidupan Sosial Masyarakat	Pengurangan Kemiskinan
	Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan		Meningkatnya stabilitas kehidupan sosial masyarakat

Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran dalam perubahan RPJMD Kota Madiun 2019-2024 menjadi tuntutan yang perlu diperhatikan. Konsistensi penjabaran Visi dan Misi ke dalam Tujuan dan Sasaran menentukan efektivitas pembangunan daerah sesuai dengan amanat pembangunan yang tertuang dalam Visi dan Misi Walikota Terpilih. Berangkat dari tuntutan tersebut, maka dapat dijabarkan konsistensi Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran tersebut kedalam matriks berikut ini:

Tabel 5.5
Keterkaitan Misi, Tujuan, dan Sasaran Jangka Menengah Kota Madiun Tahun 2019-2024

Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target Capaian				Kondisi Akhir		
				2021	2022	2023	2024			
Misi 1: Mewujudkan Pemerintahan yang Baik (Good Governance)										
T.1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional yang berorientasi pada pelayanan publik berbasis smart cities	IT1.1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	(B) 65,55	(B) 67	(B) 68	(B) 69	(BB) 70,01	(BB) 70,01
S.1	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	IS1.1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Madiun (AKIP)	Skor	BB (70,01)	BB (73)	BB (76)	BB (79)	A (80,01)	A (80,01)
		IS1.2	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Skor	3,385 (tinggi)	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
		IS1.3	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	Tidak ada penilaian tahun 2020	2,83 (BAIK)	2,85 (BAIK)	2,87 (BAIK)	2,90 (BAIK)	2,90 (BAIK)
			Opini BPK	WTP	WTP	-	-	-	-	WTP
			Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi Swasembada	%	18,51	-	-	-	-	18,51
S.2	Meningkatnya kualitas pelayanan public	IS2.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Kota Madiun	Indeks	85,501 (baik)	82,85 (baik)	83 (baik)	85 (baik)	86 (baik)	86 (baik)
		IS2.2	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	1892	1892	1900	1925	1950	1950

Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target Capaian				Kondisi Akhir		
				2021	2022	2023	2024			
Misi 2: Mewujudkan Pembangunan yang berwawasan lingkungan										
T.2	Terwujudnya Pembangunan infrastruktur Kota yang Maju, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan	IT2.1	Indeks Kenyamanan Kota (livable city)	Indeks	86,67	87,78	88,19	88,60	89,01	89,01
S.3	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur kota	IS3.1	Indeks infrastruktur	Indeks	96,85	98,06	98,25	98,42	98,59	98,59
			Indeks Sarana-Prasarana Permukiman	Indeks	87,12	-	-	-	-	87,12
			Kinerja Ruas Jalan	%	0,38	-	-	-	-	0,38
S.4	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	IS4.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	60,15	57,69	57,77	57,85	57,93	57,93
			Persentase Ruang yang dimanfaatkan RTRW	%	100	-	-	-	-	100
Misi 3: Meningkatkan kualitas hidup Masyarakat Kota Madiun										
T.3	Terwujudnya Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing	IT.3.1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	80,91	81,25	81,70	82,15	82,35	82,35
		IT.3.2	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	94,38	94,40	94,44	94,49	94,51	94,51
S.5	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	IS5.1	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,39	14,40	14,41	14,42	14,43	14,43
		IS5.2	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	11,14	11,14	11,15	11,16	11,17	11,17

Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja		Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target Capaian				Kondisi Akhir	
					2021	2022	2023	2024		
		Indeks Pengetahuan	Indeks	0,77	-	-	-	-	0,77	
		Prestasi Pemuda dan Olahraga ditingkat regional dan nasional	Kali	79	-	-	-	-	79	
S.6	Meningkatnya Derajat kesehatan Masyarakat	IS6.1	Angka Harapan Hidup	Tahun	72,81	72,81	72,81	72,81	72,81	
			Indeks Kesehatan	Indeks	0,81				0,81	
S.7	Meningkatnya Pemberdayaan Gender	IS7.1	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	77,18	77,07	77,20	77,21	77,22	
Misi 4: Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Memeratakan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kota Madiun										
T.4	Terwujudnya Pembangunan ekonomi inklusif	IT4.1	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	Indeks	6,69	6,38	6,40	6,42	6,44	6,44
			Pertumbuhan PDRB	%	-3,39	-	-	-	-	-3,39
			PDRB Perkapita	Juta	52,57	-	-	-	-	52,57
S.8	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	S9.1	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	8,32	8,15	5,74	5,12	5,00	5,00
			ICOR	%	-0,91	-	-	-	-	-0,91
S.9	Meningkatnya Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi	IS8.1	Persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	%	-10,83	2,16	4,81	5,69	6,91	6,91
		IS8.2	Persentase pertumbuhan PDRB sektor jasa	%	-0,93	0,58	0,76	2,78	3,42	3,42
			Persentase Pertumbuhan Sektor Pengolahan	%	-12,84	-	-	-	-	-12,84
			Persentase Pertumbuhan Sektor Pariwisata	%	8,7	-	-	-	-	8,7

Misi/Tujuan/Sasaran		Indikator Kinerja		Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target Capaian				Kondisi Akhir
						2021	2022	2023	2024	
T.5	Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan dan Stabilitas Kehidupan Sosial Masyarakat	IT5.1	Indeks Ketentraman	Indeks	76,87	76,95	77,05	77,15	77,2	77,2
		IT5.2	Indek Gini	Indeks	0,39	0,38	0,37	0,36	0,35	0,35
S.10	Pengurangan Kemiskinan	IS10.1	Angka Kemiskinan	%	4,98	4,97	4,96	4,95	4,94	4,94
			Rasio Ketersedian Pangan Utama dan Konsumsi Pangan	Rasio	1,38	-	-	-	-	1,38
S.11	Meningkatnya stabilitas kehidupan sosial masyarakat	IS11.1	Indeks Kerukunan	Indeks	B skor 74,0306 (Harmonis)	B skor 74,30 (Harmonis)	B skor 76,40 (Harmonis)	B skor 78,40 (Harmonis)	B skor 80,00 (Harmonis)	B skor 80,00 (Harmonis)
		IS11.2	Indeks rasa aman	Indeks	76,05	76,15	76,2	76,27	76,35	76,35

BAB VI
STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN DAERAH

6.1 Strategi Pembangunan

Rumusan tujuan dan sasaran berdasarkan visi dan misi yang sudah ditetapkan merupakan langkah awal dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Strategi dan arah kebijakan dirumuskan Kota Madiun sebagai upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta target kinerja RPJMD dengan efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun. Arsitektur perencanaan pembangunan daerah dalam konetks ini melingkupi perencanaan pembangunan daerah yang menekankan pada pencapaian visi dan misi pembangunan daerah dan perencanaan operasional berupa perencanaan yang menekankan pada pencapaian kinerja layanan pada tiap urusan.

Perencanaan Strategis dimaksudkan untuk menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam rencana kerja. Segala sesuatu yang secara langsung dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD maka dianggap strategis. Sedangkan perencanaan operasional dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan RPJMD yang dituangkan secara lebih rinci kedalam masing-masing misi berdasarkan pendekatan urusan baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Adapun arah kebijakan merupakan acuan untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap periode waktunya. Penetapan arah kebijakan menjadi fokus yang sesuai dengan pengaturan pada level pelaksanaannya. Secara lebih detil strategi dan arah pembangunan kota madiun dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1
Strategi dan Arah kebijakan P-RPJMD Kota Madiun

Misi/Tujuan/Sasaran		Sasaran	Strategi		
Misi 1: Mewujudkan Pemerintahan yang Baik (Good Governance)					
T.1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional yang berorientasi pada	S.1	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	1	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran
				2	Peningkatan kapasitas fiskal daerah

Misi/Tujuan/Sasaran		Sasaran	Strategi		
	elayanan publik berbasis smart cities	S.2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	3	Peningkatan kualitas dan manajemen pelayanan publik
Misi 2: Mewujudkan Pembangunan yang berwawasan lingkungan					
T2	Terwujudnya Pembangunan infrastruktur Kota yang Maju, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan	S.3	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur kota	4	Peningkatan kualitas infrastruktur dan sarana prasarana kota dan Permukiman
		S.4	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	5	Peningkatan kualitas penataan ruang
				6	Peningkatan kualitas lingkungan hidup
Misi 3: Meningkatkan kualitas hidup Masyarakat Kota Madiun					
T.3	Terwujudnya Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing	S.5	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	7	Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan
		S.6	Meningkatnya Derajat kesehatan Masyarakat	8	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan
		S.7	Meningkatnya Pemberdayaan Gender	9	Peningkatan kuantitas dan kualitas pembangunan berbasis kesetaraan dan keadilan gender
Misi 4: Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Memeratakan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kota Madiun					
T.4	Terwujudnya Pembangunan ekonomi inklusif	S.8	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	10	Perluasan kesempatan kerja
				11	Peningkatan kondusifitas iklim berinvestasi
		S.9	Meningkatnya Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi	12	Pengembangan kebudayaan yang berbasis kearifan lokal untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat
				13	Peningkatan kontribusi sector unggulan dalam perekonomian
14	Peningkatan produktivitas dan daya saing IKM, Usaha Mikro dan koperasi				
T.5	Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan dan Stabilitas Kehidupan Sosial Masyarakat	S.10	Pengurangan Kemiskinan	15	Peningkatan kualitas dan kuantitas ketersediaan pangan
				16	Penurunan tingkat kemiskinan
				17	Peningkatan Perlindungan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial
		S.11	Meningkatnya stabilitas kehidupan sosial masyarakat	18	Peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga kerukunan, ketenteraman dan ketertiban
				19	Peningkatan mitigasi resiko dan ketangguhan bencana

Berdasarkan tabel 6.1 maka perumusan strategi pembangunan dan arah kebijakan pada tahun 2019 – 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. **Strategi 1:** Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran.

Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran merupakan salah satu strategi pendukung perubahan dalam percepatan Reformasi Birokrasi suatu proses perubahan besar dalam paradigma tata kelola pemerintahan yang mengarah pada area akuntabilitas serta pola pikir Pemerintahan Daerah. Strategi percepatan reformasi birokrasi pemerintahan daerah merupakan salah satu cara untuk memperkuat daerah dalam rangka menjalankan tata kelola pemerintahan dan fungsinya. Lebih lanjut, pemerintah Daerah Kota Madiun sebagai daerah otonom, diberikan hak untuk mengurus proses bisnis pemerintahan dalam pengelolaan sumber-sumber keuangan, dan pembangunan daerah, berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas. Untuk itu, daerah perlu menggali sumber daya yang dimiliki agar dapat dimanfaatkan dalam rangka mensejahterakan masyarakat melalui penyediaan pelayanan, meningkatkan daya saing daerah sesuai dengan potensi daerah serta dikelola secara demokratis dan akuntabel.

Untuk mencapai hasil yang maksimal Kota Madiun melaksanakan hak dan kewajiban berdasarkan asas-asas pemerintahan yang baik (*good Governance*). Untuk mewujudkannya, dibutuhkan komitmen yang konsisten dari semua pihak baik aparatur pemerintah, masyarakat maupun pihak swasta. Dalam strategi Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran juga diperlukan perubahan perilaku terkait etika pemerintahan penegak hukum yang efektif serta pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggung-jawab.

2. **Strategi 2** : Peningkatan Kapasitas Fiskal Daerah.

Pada era otonomi daerah, pemerintah mendapatkan kewenangan yang luas untuk mengatur, mengurus, mengembangkan dan memajukan daerah yang dikelola. Oleh karena itu keutamaan pelaksanaan otonomi daerah adalah terdapatnya keleluasaan pemerintahan sendiri atas dasar prakarsa, kreativitas dan peran aktif masyarakat. Tantangan yang dihadapi Kota madiun saat ini adalah potensi ekonomi daerah yang masih perlu dioptimalkan dan *uncenrtainty* yang tinggi akibat pandemic covid-19. Daerah yang kurang potensi ekonominya akan menghadapi kesulitan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, sehingga menimbulkan ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat sebagai salah satu sumber pembiayaan di daerah. Oleh karea itu untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang mandiri, upaya optimalisasi potensi PAD dan upaya lainnya diperlukan dalam rangka meningkatkan kemandirian fiskal daerah.

3. **Strategi 3:** Peningkatan kualitas dan manajemen pelayanan publik.

Pelayanan publik merupakan salah satu pelaksanaan fungsi pemerintahan daerah dengan cara pemberian layanan (melayani) keperluan masyarakat terkait kepentingan tertentu sesuai dengan regulasi dan tata cara yang telah ditetapkan. Upaya peningkatan kualitas dan manajemen pelayanan terhadap publik merupakan persoalan penting dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan program pemerintahan di mana fungsi utama dari pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan pada dasarnya adalah pemberian pelayanan publik yang optimal agar kepentingan masyarakat umum dapat terpenuhi. Untuk mencapai pelayanan yang berkualitas, perlu disusun suatu aturan ataupun ketentuan mengenai pelayanan kepada masyarakat yang efisien. Hal ini dilakukan agar pelayanan yang diberikan lebih terarah dan memiliki proses yang terukur. Dalam perkembangannya, isu permasalahan kualitas layanan muncul dari masih lemahnya proses pelayanan publik yang diberikan pemerintah sehingga belum dapat memenuhi ekspektasi yang diharapkan masyarakat. Lebih jauh hal tersebut dapat ditandai dengan masih adanya keluhan masyarakat ataupun opini public yang buruk, sehingga dapat menimbulkan citra yang kurang baik terhadap pemerintah daerah.

4. **Strategi 4:** Peningkatan kualitas infrastruktur dan sarana prasarana kota dan Permukiman.

Upaya meningkatkan sistem penyediaan dan pengelolaan infrastruktur, sarana prasarana dan pemukiman kota yang berkualitas dilakukan melalui beberapa pendekatan diantaranya seperti pembenahan sistem jaringan drainase perkotaan; pengembangan sistem jaringan jalan yang terpadu dan kualitas prima; peningkatan kualitas manajemen dan rekayasa transportasi; akses perumahan dan pemukiman; serta upaya - upaya penciptaan lingkungan perumahan yang sehat.

5. **Strategi 5:** Peningkatan kualitas penataan ruang.

Perkembangan membawa konsekuensi pada pemanfaatan pola tata ruang kota untuk berbagai kegiatan usaha maupun permukiman. Peningkatan pengelolaan ruang kota merupakan upaya mengendalikan ruang kota agar pemanfaatannya sesuai dengan rencana tata ruang. Selain itu, peningkatan pengelolaan ruang kota diarahkan pada peningkatan upaya pemanfaatan dan pengendalian tata ruang.

Dengan demikian, strategi ini perlu didukung oleh tata ruang mencakup ketersediaan produk hukum dan regulasi terkait pengaturan tata ruang yang dapat dijadikan acuan dalam membangun ruang kota, peningkatan kualitas kelembagaan, sumber daya manusia, dan tata laksana dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan ruang dan daya dukung lingkungan.

6. **Strategi 6:** Peningkatan kualitas lingkungan hidup

Pada dasarnya, peningkatan kualitas lingkungan hidup dilakukan melalui kebijakan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Upaya tersebut dilakukan dengan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dengan penerapan siklus perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakkan hukum terkait lingkungan hidup. Selain itu, strategi ini dilakukan mengoptimalkan ruang terbuka hijau agar dimanfaatkan secara berkesinambungan tidak hanya mempertimbangkan kebutuhan saat ini tetapi juga kebutuhan sumber daya di masa yang akan datang.

7. **Strategi 7:** Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan.

Pendidikan merupakan aspek fundamental pembentukan pola pikir dan kepribadian manusia. Oleh karena itu keberadaan sistem pendidikan yang baik sangat krusial sehingga diharap dapat menghasilkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, terampil dan berdaya saing. Arah upaya – upaya yang dilakukan diantaranya adalah terkait peningkatan mutu dan kualitas pendidikan, seperti pengembangan layanan pendidikan anak usia dini, balai masyarakat, Lembaga pendidikan non-formal hingga optimalisasi pelaksanaan wajib belajar serta upaya pencapaian SPM bidang pendidikan.

8. **Strategi 8:** Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.

Kesehatan juga berpengaruh pada kualitas pembangunan manusia di mana masyarakat yang sehat mampu beraktivitas secara produktif dan berpartisipasi dalam proses pembangunan. Untuk itu strategi peningkatan kualitas kesehatan perlu didukung oleh upaya penyediaan layanan kesehatan berkualitas bagi semua kalangan baik dari sisi infrastruktur kesehatan, tenaga kesehatan, sampai dengan penyediaan informasi kesehatan terpadu.

9. **Strategi 9:** Peningkatan kuantitas dan kualitas pembangunan berbasis kesetaraan dan keadilan gender

Pengarus utamaan gender menjadi salah satu strategi pembangunan baik ditingkat nasional maupun daerah dalam upaya meningkatkan pembangunan yang berkualitas. Upaya peningkatan kuantitas dan kualitas pembangunan berbasis kesetaraan dan keadilan gender, salah satunya dapat dilakukan melalui Peningkatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat responsif gender.

10. **Strategi 10:** Perluasan kesempatan kerja.

Strategi peningkatan kesempatan kerja dilakukan dengan intervensi pasar kerja baik pada unsur tenaga kerja maupun industri yang memberi pekerjaan. Kesempatan kerja yang luas dapat memberikan dampak langsung terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat. Adanya kesempatan kerja melalui industri ditunjukkan dari peningkatan penyerapan tenaga kerja secara merata dari berbagai kalangan. Upaya tersebut dilaksanakan melalui peningkatan jaringan tenaga kerja, serta peningkatan keterampilan masyarakat agar siap kerja.

Disisi lain, peningkatan keterampilan masyarakat diarahkan pada optimalisasi jejaring pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi serta pelatihan berbasis kewirausahaan.

11. **Strategi 11:** Peningkatan kondusifitas iklim berinvestasi.

Kondusifitas iklim berinvestasi adalah upaya yang dalam rangka perbaikan pelayanan investasi kepada investor agar mendapat kemudahan dalam meraih peluang investasi di berbagai sektor ekonomi daerah. Cakupan peningkatan kemudahan berinvestasi dilakukan melalui upaya-upaya penyederhanaan prosedur berinvestasi, promosi investasi, dan penataan jaringan usaha investasi. Adapun peningkatan kemudahan berinvestasi diarahkan pada penyediaan regulasi dan kebijakan yang pro investasi dengan prosedur yang pendek dan efisien.

12. **Strategi 12:** Pengembangan kebudayaan yang berbasis kearifan lokal untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Peningkatan kualitas hidup masyarakat pada dasarnya merupakan strategi yang megupayakan penciptaan kehidupan sosial masyarakat yang berbudaya. Upaya itu dilakukan dengan memanfaatkan potensi budaya dan kearifan lokal yang ada di wilayah Kota Madiun dan wilayah sekitarnya agar tetap lestari. Kemudian budaya lokal dijadikan *branding* daerah agar warisan dari leluhur dieksplorasi secara optimal.

Adapun untuk pelestarian seni dan budaya yang berbasis kearifan lokal, diarahkan melalui pelestarian kawasan dan bangunan cagar budaya serta situs budaya serta peranan lembaga seni budaya. Kemudian, dari sisi kelompok masyarakat, partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam kondisi sosial masyarakat yang rukun dan berbudaya di Kota Madiun. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan dilakukan dengan kebijakan yang mengarah pada peningkatan pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas dan gender, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta peningkatan partisipasi aktif pemuda.

13. **Strategi 13:** Peningkatan kontribusi sector unggulan dalam perekonomian.

Pembangunan perekonomian melalui penguatan sektor unggulan merupakan strategi yang bertujuan untuk mendorong, merangsang, memelihara aktivitas usaha untuk dapat berkembang sehingga menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan meningkatkan nilai tambah perekonomian. Pengembangan produk ekonomi unggulan diarahkan pada pengembangan sentra-sentra usaha serta produk ekonomi dari sisi perdagangan dan jasa berbasis keunggulan lokal, ekonomi kreatif, pariwisata, sarana prasarana perdagangan hingga upaya menuju masyarakat ekonomi digital.

14. **Strategi 14:** Peningkatan produktivitas dan daya saing IKM, Usaha Mikro dan koperasi.

Industri kecil menengah, Usaha Mikro dan koperasi merupakan penyangga ketahanan perekonomian masyarakat dan sumber pendapatan rumah tangga mikro. Kebijakan penguatan dan pengembangan IKM, Usaha Mikro, dan koperasi diarahkan pada peningkatan produktivitas Industri Kecil Menengah (IKM) dan Usaha Mikro. Adapun arah strategi pembangunan koperasi adalah pada dasarnya peningkatan kelembagaan koperasi yang berkelanjutan sehingga mampu bernilai ekonomi tinggi dan mensejahterakan anggotanya.

15. **Strategi 15:** Peningkatan kualitas dan kuantitas ketersediaan pangan.

Strategi peningkatan kualitas dan kuantitas ketersediaan pangan merupakan faktor penting dalam mewujudkan ketahanan pangan. Lebih lanjut, penyediaan pangan diperlukan dalam lingkup untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakat, rumah tangga hingga individu secara berkelanjutan. Upaya yang dilakukan dalam peningkatan ketersediaan pangan dilakukan melalui peningkatan ketersediaan pangan, peningkatan akses pangan dan perilaku pangan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang dan aman.

16. **Strategi 16 :** Penurunan Tingkat kemiskinan

Permasalahan kemiskinan masih menjadi isu krusial di Kota Madiun. Sebelum pandemic Covid19 kemiskinan di Kota Madiun telah mengalami penurunan yang relative baik sekitar 4 persen. Namun Covid 19 berdampak pada peningkatan kemiskinan dengan besaran mendekati 5 persen. Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya penurunan kemiskinan khususnya tipe kemiskinan yang sangat miskin

17. **Strategi 17:** Peningkatan Perlindungan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial.

Perlindungan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial merupakan upaya yang berkaitan dengan upaya mengurangi keterlantaran Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Kelompok PMKS yang tidak direhabilitasi secara tepat akan berakibat pada kesenjangan sosial yang semakin meluas, melemahnya ketahanan sosial masyarakat, serta meningkatnya penduduk yang rentan (*vulnerable*). Ole karena itu, perlindungan sosial diarahkan pada peningkatan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS, termasuk bagi penduduk lanjut usia terlantar, penyandang cacat, dan anak terlantar.

18. **Strategi 18:** Peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga kerukunan, ketenteraman dan ketertiban.

Ketenteraman dan ketertiban merupakan wujud dari masyarakat yang modern dan maju di mana hal tersebut menjadi tanggung jawab bagi seluruh pihak di Kota Madiun. Upaya yang dilakukan dalam peningkatan peran serta masyarakat untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban diantaranya pemberdayaan masyarakat serta peningkatan masyarakat agar senantiasa tertib dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan tersebut dapat diarahkan pada penegakan peraturan perundang-undangan daerah, peningkatan cakupan penanganan gangguan ketentraman, ketertiban dan kenyamanan umum. Selain itu, peningkatan ketentraman dan ketertiban diarahkan keberadaan petugas perlindungan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat yang menjalankan fungsi penjagaan kenyamanan lingkungan.

19. **Strategi 19:** Peningkatan mitigasi resiko dan ketangguhan bencana.

Pada dasarnya strategi ini berupaya mempersiapkan kejadian bencana yang tidak dapat diperkirakan. Dengan upaya kesiapsiagaan masyarakat baik fisik maupun non fisik dalam menghadapi bencana maka dampak negative dari bencana dapat meminimalisasi berdasarkan resiko di setiap area lokasi rawan bencana. Upaya peningkatan ketangguhan bencana dilakukan melalui kebijakan peningkatan ketangguhan pemerintah dan masyarakat terhadap bencana.

6.2 Arah kebijakan Pembangunan

Strategi dan arah kebijakan harus dipandang sebagai satu kesatuan skenario-skenario selama periode 5 (lima) tahun. Strategi terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi membentuk cerita atau skenario strategi, yang selanjutnya menjadi arah kebijakan pembangunan untuk tiap tahunnya. Arah kebijakan merupakan pedoman dalam mengarahkan rumusan strategi yang sebelumnya telah dirumuskan agar lebih sistematis dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode pembangunan. Arah kebijakan memberikan pedoman dan arahan tema pembangunan dan prioritas tahunan apa yang harus dikerjakan. Pada tiap tahunnya diberikan penekanan terhadap prioritas tertentu sesuai dengan pemetaan strategi yang telah dirumuskan.

Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Dalam upaya memudahkan pemahaman terhadap kesinambungan pembangunan setiap tahun dalam jangka 5 (lima) tahun, terlebih dahulu disederhanakan dalam agenda atau tema pembangunan setiap tahun di masing-masing tahap. Atas dasar tema pembangunan inilah disusun arah kebijakan lebih jelas agar RPJMD mudah dituangkan dalam RKPD. Selanjutnya, tahapan-tahapan dimaksud dijadikan sebagai dasar dan disesuaikan dengan pentahapan RKPD.

Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Fokus atau tema pembangunan Kota Madiun dapat dilihat pada Gambar berikut



Gambar 6.1

Tema RPJMD/ Arah Kebijakan Pemerintah Kota Madiun 2019 - 2024

Tabel 6.2
Arah kebijakan Pembangunan Kota Madiun

ARAH KEBIJAKAN					
Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Konsolidasi implementasi PANCA KARYA untuk mewujudkan Pemerintahan Bersih Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera	Penguatan kapasitas pemberdayaan masyarakat untuk percepatan pertumbuhan yang berkualitas	Peningkatan Pembangunan dan Ketahanan Sosial Ekonomi Menuju Masyarakat Sejahtera	Penguatan Pembangunan dan Ketahanan Sosial Ekonomi menuju Masyarakat Sejahtera	Peningkatan Pembangunan Ekonomi Inklusif Menuju Masyarakat Sejahtera	Pemantapan Pembangunan Ekonomi Inklusif Menuju Masyarakat Sejahtera

Pada perubahan RPJMD Kota Madiun ini, agenda / tema pembangunan pada tahun 2021 adalah peningkatan pembangunan dan ketahanan sosial ekonomi menuju masyarakat sejahtera. pada tahun 2022 adalah Penguatan Pembangunan dan ketahanan sosial ekonomi menuju masyarakat sejahtera. Selanjutnya pada tahun 2023 yaitu Peningkatan pembangunan ekonomi inklusif menuju masyarakat sejahtera. Sedangkan agenda pembangunan akhir masa periode RPJMD adalah Pemantapan pembangunan ekonomi inklusif menuju masyarakat sejahtera. Sesuai dengan agenda pembangunan tersebut, arah kebijakan dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi di setiap tahunnya sebagai berikut:

Tabel 6.3
Penjelasan Operasional Arah kebijakan Pembangunan Kota Madiun

Strategi		Penjelasan Operasional Arah Kebijakan		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran	1	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan			√	√	√	√
		2	Peningkatan dan pengintegrasian kualitas penyelenggaraan pemerintahan berbasis e-government			√	√	√	√
		3	Peningkatan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan daerah			√	√	√	√
		4	Peningkatan peran dan kinerja lembaga pengelolaan keuangan daerah			√	√	√	√

Strategi		Penjelasan Operasional Arah Kebijakan		2019	2020	2021	2022	2023	2024
2	Peningkatan kapasitas fiskal daerah	5	Optimalisasi potensi PAD			√	√	√	√
		6	Peningkatan kemandirian fiskal daerah			√	√	√	√
		7	peningkatan DID melalui Rencana aksi yang jelas dan terukur didukung oleh perencanaan program dan kegiatan yang berkualitas			√	√	√	√
		8	Peningkatan Profesionalisme ASN			√	√	√	√
3	Peningkatan kualitas dan manajemen pelayanan publik	9	Penerapan layanan public berbasis sistem informasi dan teknologi (e-government) terpadu			√	√	√	√
		10	Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik yang professional dan melayani			√	√	√	√
4	Peningkatan kualitas infrastruktur dan sarana prasarana kota serta Permukiman	11	Peningkatan kualitas layanan moda transportasi umum			√	√	√	√
		12	Manajemen dan rekayasa transportasi			√	√	√	√
		13	Peningkatan kualitas infrastruktur jalan			√	√	√	√
		14	Optimalisasi jaringan drainase perkotaan			√	√	√	√
		15	Peningkatan kualitas perumahan dan permukiman			√	√	√	√
5	Peningkatan kualitas penataan ruang	16	Peningkatan upaya pemanfaatan dan pengendalian tata ruang			√	√	√	√
		17	Penguatan kualitas koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta sinergi pemanfaatan ruang			√	√	√	√
6	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	18	optimalisasi Ruang Terbuka Hijau (RTH)			√	√	√	√
		19	Peningkatan tata kelola sampah dan limbah secara berkelanjutan			√	√	√	√
		20	Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan			√	√	√	√
7	Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan	21	Peningkatan Harapan Lama Sekolah			√	√	√	√
		22	Peningkatan kualitas manajemen sekolah			√	√	√	√
		23	Peningkatan kualitas proses pembelajaran untuk memenuhi target SPM bidang pendidikan			√	√	√	√

Strategi		Penjelasan Operasional Arah Kebijakan		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		24	Pengembangan layanan pendidikan anak usia dini			√	√	√	√
		25	Pengembangan layanan pendidikan inklusif			√	√	√	√
8	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	26	Peningkatan akses serta kualitas pelayanan kesehatan terpadu			√	√	√	√
		27	Peningkatan sumberdaya dan informasi kesehatan			√	√	√	√
		28	Peningkatan Promosi, upaya Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan			√	√	√	√
		29	Peningkatan pelayanan kesehatan primer dan rujukan			√	√	√	√
		30	Peningkatan Advokasi dan Penggerakan Program Bangga Kencana dan Penguatan Sistem Informasi Keluarga serta Penguatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk			√	√	√	√
		31	Peningkatan akses dan kualitas penyelenggaraan KBKR yang komprehensif			√	√	√	√
		32	Peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang holistik dan integratif sesuai siklus hidup, serta menguatkan pembentukan karakter di keluarga			√	√	√	√
		9	Peningkatan kuantitas dan kualitas pembangunan berbasis kesetaraan dan keadilan gender	33	Peningkatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat responsif gender			√	√
10	Perluasan kesempatan kerja	34	Peningkatan kompetensi dan ketrampilan masyarakat			√	√	√	√
		35	Peningkatan jaringan tenaga kerja			√	√	√	√
11	Peningkatan kondusifitas iklim berinvestasi	36	Penyediaan kebijakan ramah investasi			√	√	√	√
		37	Penyederhanaan prosedur pendukung perijinan dan investasi			√	√	√	√

Strategi		Penjelasan Operasional Arah Kebijakan		2019	2020	2021	2022	2023	2024
12	Pengembangan kebudayaan yang berbasis kearifan lokal untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	38	Pelestarian Seni dan Budaya yang berbasis kearifan lokal			√	√	√	√
		39	Peningkatan partisipasi aktif pemuda			√	√	√	√
13	Peningkatan kontribusi sektor unggulan dalam perekonomian	40	Peningkatan kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB			√	√	√	√
		41	Pengembangan sentra-sentra usaha/produk ekonomi lokal (produk khas daerah) berbasis kelurahan			√	√	√	√
		42	Peningkatan Pengelolaan Pariwisata			√	√	√	√
		43	Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan yang representatif			√	√	√	√
		44	Pengembangan ekonomi kreatif			√	√	√	√
		45	Pengembangan ekonomi digital masyarakat			√	√	√	√
14	Peningkatan produktivitas dan daya saing IKM, Usaha Mikro dan koperasi	46	Peningkatan Produktivitas IKM dan Usaha Mikro			√	√	√	√
		47	Pengembangan Sistem Pendukung Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro			√	√	√	√
		48	Peningkatan kelembagaan koperasi			√	√	√	√
15	Peningkatan kualitas dan kuantitas ketersediaan pangan	49	Peningkatan ketersediaan pangan			√	√	√	√
		50	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat			√	√	√	√
		51	Peningkatan akses pangan dan perilaku pangan masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang dan aman.			√	√	√	√
16	Penurunan tingkat kemiskinan	52	Peningkatan database kemiskinan berbasis RT/RW			√	√	√	√
		53	Peningkatan jejaring sosial			√	√	√	√
		54	Penguatan program pengentasan kemiskinan			√	√	√	√

Strategi		Penjelasan Operasional Arah Kebijakan		2019	2020	2021	2022	2023	2024
17	Peningkatan Perlindungan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial	55	Peningkatan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS			√	√	√	√
		56	Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak serta Rehabilitasi Sosial			√	√	√	√
18	Peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga kerukunan, ketenteraman dan ketertiban	57	Peningkatan masyarakat yang tertib dan patuh terhadap peraturan			√	√	√	√
		58	Peningkatan ketenteraman dan ketertiban			√	√	√	√
		59	Penguatan peran masyarakat dalam membangun Kerukunan			√	√	√	√
19	Peningkatan mitigasi resiko dan ketangguhan bencana	60	Peningkatan ketangguhan pemerintah dan masyarakat terhadap bencana			√	√	√	√

Tabel 6.4
Persandingan Strategi, Sasaran dan Arah Kebijakan Antara
RPJMD 2019-2024 Dengan Perubahan P-RPJMD 2019-2024

RPJMD 2019-2024			P-RPJMD 2019-2024		
Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Misi 1: Mewujudkan Pemerintahan yang Baik (Good Governance)					
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) untuk peningkatan kinerja birokrasi melalui peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah serta pelaporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan pengintegrasian pada sistem akuntabilitas kinerja yang berpihak pada kebutuhan masyarakat.	Tidak spesifik	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran	peningkatan kualitas perencanaan pembangunan
	Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDA) pada seluruh pelayanan publik perangkat daerah.	Tidak spesifik			Peningkatan dan pengintegrasian kualitas penyelenggaraan pemerintahan berbasis e-government
	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan tata kelola pemerintah melalui pengintegrasian sistem yang berbasis E-government, E-planning, E-budgeting, E-Contract dan E-Monev.	Tidak spesifik			Peningkatan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan daerah
	Penerapan Wilayah yang telah terintegrasi teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola sehari-hari untuk mempertinggi efisiensi, memperbaiki pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan warga (Smart City) di Kota Madiun	Tidak spesifik			Peningkatan peran dan kinerja lembaga pengelolaan keuangan daerah
	Optimalisasi Program satu RT satu free wifi untuk peningkatan pembelajaran online dan pengembangan ekonomi masyarakat berbasis internet.	Tidak spesifik	Meningkatnya Kapasitas keuangan daerah	Peningkatan kapasitas fiskal daerah	Optimalisasi potensi PAD
	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kebijakan keterbukaan informasi publik melalui pengintegrasian dalam Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP).	Tidak spesifik			Peningkatan kemandirian fiskal daerah
					peningkatan DID melalui Rencana aksi yang jelas dan terukur didukung oleh perencanaan program dan kegiatan yang berkualitas

RPJMD 2019-2024			P-RPJMD 2019-2024		
Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Meningkatkan dan mengembangkan kualitas pengelolaan keuangan Daerah melalui pembinaan maturitas penerapan sistem pengendalian internal Pemerintah, penguatan prosedur standar pengelolaan keuangan serta peningkatan komitmen seluruh jajaran di Perangkat Daerah dalam peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah.	Tidak spesifik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Peningkatan kualitas dan manajemen pelayanan publik	Peningkatan Profesionalisme ASN penerapan layanan public berbasis sistem informasi dan teknologi (e-government) terpadu
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Pemangku Kepentingan	Menguatkan kualitas mekanisme peningkatan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pembangunan Kota Madiun melalui pengembangan ide atau gagasan inovatif masyarakat untuk peningkatan ekonomi masyarakat Kota Madiun.	Tidak spesifik			Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik yang professional dan melayani Peningkatan dan Pengintegrasian kualitas penyelenggaraan pemerintahan berbasis e-government
Misi 2: Mewujudkan Pembangunan yang berwawasan lingkungan					
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur, sarana transportasi kota dan Permukiman	Meningkatkan Indeks Daya Saing Infrastruktur melalui penguatan koordinasi dan sinergi vertikal dan horizontal dan penguatan kualitas koordinasi, pembinaan dan pengawasan, yang meliputi jalan dan jembatan; air minum; penyehatan lingkungan perumahan; dan aksesibilitas masyarakat terhadap perumahan dan permukiman.	Tidak spesifik	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur kota	Peningkatan kualitas infrastruktur dan sarana prasarana kota dan Permukiman	Peningkatan kualitas layanan moda transportasi umum
	Menurunkan disparitas wilayah lingkup Kota Madiun yang sinergis dengan kebijakan pengembangan wilayah Provinsi Jawa Timur melalui penguatan prioritas pembangunan infrastruktur.	Tidak spesifik			Manajemen dan rekayasa transportasi
					Peningkatan kualitas infrastruktur jalan
					Optimalisasi jaringan drainase perkotaan
					Peningkatan kualitas perumahan dan permukiman
Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Meningkatkan kualitas penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup melalui penguatan kualitas koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta sinergi pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkesinambungan dan melalui optimalisasi RTH dan peningkatan peran seluruh stakeholder dalam meningkatkan keasrian lingkungan.	Tidak spesifik	meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Peningkatan kualitas penataan ruang	Peningkatan upaya pemanfaatan dan pengendalian tata ruang

RPJMD 2019-2024			P-RPJMD 2019-2024		
Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
					penguatan kualitas koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta sinergi pemanfaatan ruang
					optimalisasi Ruang Terbuka Hijau (RTH)
			Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Peningkatan tata Kelola Sampah dan Limbah Secara Berkelanjutan
					Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
Misi 3: Meningkatkan kualitas hidup Masyarakat Kota Madiun					
Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat Kota Madiun	Meningkatkan kualitas pendidikan melalui peningkatan aksesibilitas, kualitas manajemen sekolah, serta kualitas proses pembelajaran untuk memenuhi target SPM bidang pendidikan.	Tidak spesifik	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Peningkatan aksesibilitas dan kualitas Pendidikan	Peningkatan Harapan Lama Sekolah
	Meningkatkan Harapan Lama Sekolah masyarakat Kota Madiun melalui peningkatan kualitas koordinasi dengan Pemerintah Provinsi.	Tidak spesifik			Peningkatan kualitas manajemen sekolah
	Meningkatkan kapasitas ASN aparatur melalui optimalisasi pendidikan dan pelatihan, beasiswa khusus serta mempercepat dan mempermudah pengembangan karir ASN.	Tidak spesifik			Peningkatan kualitas proses pembelajaran untuk memenuhi target SPM bidang pendidikan
					Pengembangan layanan pendidikan anak usia dini
					Pengembangan layanan pendidikan inkulisif
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Kota Madiun	Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui peningkatan pembudayaan paradigma sehat di masyarakat serta peningkatan keberdayaan masyarakat dalam upaya peningkatan kesehatannya.	Tidak spesifik	Meningkatnya Derajat kesehatan Masyarakat	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Peningkatan akses serta kualitas pelayanan kesehatan terpadu
	Peningkatan kualitas koordinasi, pembinaan dan pengawasan, kemitraan dan sinergi para pihak terkait untuk mewujudkan Madiun Kota Sehat.	Tidak spesifik			Peningkatan sumberdaya dan informasi kesehatan
	Peningkatan akses serta kualitas pelayanan kesehatan terpadu bagi warga Kota Madiun.	Tidak spesifik			Peningkatan Promosi, upaya Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan

RPJMD 2019-2024			P-RPJMD 2019-2024		
Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
					Peningkatan pelayanan kesehatan primer dan rujukan
					Peningkatan Advokasi dan Penggerakan Program Bangga Kencana dan Penguatan Sistem Informasi Keluarga serta Penguatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk
					Peningkatan akses dan kualitas penyelenggaraan KBKR yang komprehensif
					Peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang holistik dan integratif sesuai siklus hidup, serta menguatkan pembentukan karakter di keluarga
				Peningkatan kuantitas dan kualitas pembangunan berbasis kesetaraan dan keadilan gender	Peningkatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat responsif gender
Misi 4: Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Memeratakan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kota Madiun					
Terwujudnya Iklim Investasi yang Kondusif, dan peningkatan Penyerapan Tenaga Kerja	Meningkatkan daya saing iklim investasi Kota Madiun melalui peningkatan kualitas koordinasi, pembinaan dan pengawasan dan sinergi para pihak dalam meningkatkan iklim investasi.	Tidak spesifik	Meningkatnya pengelolaan sektor unggulan dan ekonomi kreatif	Peningkatan kontribusi sector unggulan dalam perekonomian	Pengembangan sentra-sentra usaha/produk ekonomi lokal (produk khas daerah) berbasis kelurahan
	Meningkatkan penciptaan lapangan kerja sektor formal dan non formal melalui penyesuaian kompetensi tenaga kerja sesuai dengan karakteristik Kota Madiun dalam konteks wilayah Provinsi Jawa Timur.	Tidak spesifik			Peningkatan kontribusi sector perdagangan dan jasa terhadap PDRB
	Mengembangkan ekonomi kreatif yang disinergikan dengan penyelenggaraan Seni Budaya Minggu.	Tidak spesifik			Peningkatan Pengelolaan Pariwisata
	Mengoptimalkan bantuan modal dan pengembangan SDM UKM Kota Madiun.	Tidak spesifik			Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan yang representatif
					Pengembangan ekonomi kreatif

RPJMD 2019-2024			P-RPJMD 2019-2024		
Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Mengembangkan sektor perdagangan melalui optimalisasi kualitas pelayanan Bis Wisata gratis keliling Kota Madiun.	Tidak spesifik			Pengembangan ekonomi digital masyarakat
			Meningkatnya kerukunan kehidupan masyarakat yang berbudaya	Peningkatan kualitas hidup bermasyarakat yang berbudaya	Pelestarian Seni dan Budaya yang berbasis kearifan lokal Peningkatan partisipasi aktif pemuda
	Mengembangkan pemasaran produk unggulan lokal yang ada di wilayah Bakorwil 1 Madiun melalui pengembangan Madiun Display.	Tidak spesifik	Meningkatnya penguatan daya saing usaha mikro dan koperasi	Peningkatan produktivitas dan daya saing IKM, Usaha Mikro dan koperasi	Peningkatan Produktivitas IKM dan Usaha Mikro
Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Meningkatkan peran Kota Madiun sebagai pusat perdagangan dan jasa melalui peningkatan kualitas koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta sinergi para pihak terkait pengembangan sektor unggulan daerah.	Tidak spesifik			Pengembangan Sistem Pendukung Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro
stabilitas Ketersediaan Pangan dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan kualitas koordinasi dan sinergi para pihak dalam penyediaan pangan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.	Tidak spesifik			Peningkatan kelembagaan koperasi
	Optimalisasi subsidi pupuk bagi petani kurang mampu dan potensial serta subsidi listrik dan air bersih bagi pengembangan ekonomi masyarakat.	Tidak spesifik	Meningkatnya realisasi investasi dan penyerapan tenaga kerja	Peningkatan kondusifitas iklim berinvestasi	Penyediaan kebijakan ramah investasi
	Meningkatkan dan Mengoptimalkan Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Tidak spesifik			Penyederhanaan prosedur perijinan dan investasi
				Perluasan kesempatan kerja	Peningkatan kompetensi dan ketrampilan masyarakat
					Peningkatan jaringan tenaga kerja
			Pengurangan Kemiskinan	Penurunan Tingkat Kemiskinan	Peningkatan database kemiskinan berbasis RT/RW
					Peningkatan Jejaring Sosial
					Penguatan Program Pengentasan Kemiskinan
				Peningkatan Perlindungan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial	Peningkatan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS
					Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak serta Rehabilitasi Sosial

RPJMD 2019-2024			P-RPJMD 2019-2024		
Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Peningkatan kualitas dan kuantitas ketersediaan pangan	Peningkatan ketersediaan pangan
					Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
					Peningkatan akses pangan dan perilaku pangan masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang dan aman.
Meningkatnya Kerukunan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Pemuda yang Berprestasi	Meningkatkan peran masyarakat melalui peningkatan kualitas koordinasi dan sinergi para pihak untuk penguatan peran masyarakat dalam membangun Kerukunan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Pemuda yang Berprestasi.	Tidak spesifik			
Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam pengembangan aspek keamanan dan kenyamanan lingkungan melalui peningkatan koordinasi dan sinergi para pihak.	Tidak spesifik	Meningkatnya kualitas ketentraman dan ketertiban masyarakat	Peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga kerukunan, ketenteraman dan ketertiban	Peningkatan masyarakat yang tertib dan patuh terhadap peraturan
					Peningkatan ketentraman dan ketertiban
					penguatan peran masyarakat dalam membangun Kerukunan
					Peningkatan ketangguhan pemerintah dan masyarakat terhadap bencana
			Peningkatan mitigasi resiko dan ketangguhan bencana		

6.3 Program Pembangunan Kota Madiun

Pengembangan program pembangunan Kota Madiun dilakukan dengan menjaga keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan dan rumusan indikator kinerja sasaran yang kebijakan yang dituju. Perumusan prioritas program pembangunan daerah merupakan rencana pembangunan dalam bentuk program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan visi dan misi pembangunan Daerah. Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Pemerintah Kota Madiun menetapkan beberapa program yang menjadi prioritas sehingga wajib dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

Tabel 6.5
Keterkaitan Strategi dan Arah Kebijakan serta program prioritas/aksi (janji politis)

1	STRATEGI	2	ARAH KEBIJAKAN	3	PROGRAM RPJMD	4	PROGRAM AKSI/ JANJI POLITIK	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran	1	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan	1	program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	1	Penguatan atas pelaksanaan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		2	Peningkatan dan pengintegrasian kualitas penyelenggaraan pemerintahan berbasis e-government	2	program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah			
		3		program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota				
		4		Program Pengelolaan Arsip			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		5		Program Perlindungan dan Penyelamatan arsip				
		6		Program Aplikasi Informatika	2	melaksanakan tata kelola pemerintahan berbasis E-goverment, e-planning, e-budgeting, e-contract dan e-monev	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		7		Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi				
		3		Peningkatan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan daerah	8	program penyelenggaraan pengawasan	3	Mengikutsertakan seluruh elemen masyarakat untuk pengawasan jalannya roda pemerintahan sehingga terbangunnya budaya yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
		9	program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi					
		10	program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat				Sekretariat Daerah	
		4	Peningkatan peran dan kinerja lembaga pengelolaan keuangan daerah	11	program pengelolaan barang milik daerah			Badan Keuangan dan Aset Daerah

1	STRATEGI	2	ARAH KEBIJAKAN	3	PROGRAM RPJMD	4	PROGRAM AKSI/ JANJI POLITIK	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
				12	program pengelolaan keuangan daerah					
2	Peningkatan kapasitas fiskal daerah	5	Optimalisasi potensi PAD	13	program pengelolaan pendapatan daerah			Badan Pendapatan Daerah		
		6	Peningkatan kemandirian fiskal daerah	14	program perekonomian dan pembangunan			Sekretariat Daerah		
		7	peningkatan DID melalui Rencana aksi yang jelas dan terukur didukung oleh perencanaan program dan kegiatan yang berkualitas							
3	Peningkatan kualitas dan manajemen pelayanan publik	8	Peningkatan Profesionalisme ASN	15	program kepegawaian daerah	4	Mempercepat dan mempermudah pengembangan karir ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
				16	program pengembangan sumber daya manusia	5	Melaksanakan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas ASN			
		9	Penerapan layanan public berbasis sistem informasi dan teknologi (e-government) terpadu	17	Program Informasi dan Komunikasi Publik	6	Program Satu RT satu free Wifi untuk pembelajaran online	Dinas Komunikasi dan Informatika		
				18	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral					
		10	Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik yang professional dan melayani			19	Program Pendaftaran Penduduk	7	Memberikan pelayanan yang berpihak pada kebutuhan masyarakat.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						20	Program Pencatatan Sipil			
						21	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			Sekretariat DPRD
						22	Program Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD			
						23	Program Pelayanan Pemerintah dan Pelayanan Publik			Kecamatan
						24	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			
25	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan									

1	STRATEGI	2	ARAH KEBIJAKAN	3	PROGRAM RPJMD	4	PROGRAM AKSI/ JANJI POLITIK	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				26	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum			
						8	Program Walikota Bersama Rakyat (WBR) Program 2 (dua) hari bersama rakyat di kelurahan guna menampung aspirasi masyarakat	Sekretariat Daerah
						9	Tersedianya layanan berkualitas bagi setiap warga masyarakat Kota Madiun dalam memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku	Dinas Komunikasi dan Informatika
						10	Tersedianya informasi publik oleh setiap organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang akurat secara terbuka, benar dan tidak menyesatkan.	Dinas Komunikasi dan Informatika
				27	program penelitian dan pengembangan daerah	11	Menghasilkan gagasan atau ide sehingga dapat di desain sebagai basis program pemerintah Kota Madiun ke depan.	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
4	Peningkatan kualitas infrastruktur dan sarana prasarana kota dan Permukiman	11	Peningkatan kualitas layanan moda transportasi umum	28	program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (llaj)	12	Penyediaan Bis Wisata Gratis Keliling Kota Madiun	Dinas Perhubungan
		12	Manajemen dan rekayasa transportasi					
		13	Peningkatan kualitas infrastruktur jalan	29	program penyelenggaraan jalan			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				30	program penataan bangunan gedung			
				31	program pengembangan jasa konstruksi			

1	STRATEGI	2	ARAH KEBIJAKAN	3	PROGRAM RPJMD	4	PROGRAM AKSI/ JANJI POLITIK	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				32	program penataan bangunan dan lingkungan				
				33	program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum				
				34	program pengelolaan sumber daya air (sda)				
		14	Optimalisasi jaringan drainase perkotaan	35	program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		15	Peningkatan kualitas perumahan dan permukiman	36	program pengembangan perumahan				
				37	program kawasan permukiman				
		5	Peningkatan kualitas penataan ruang	16	Peningkatan upaya pemanfaatan dan pengendalian tata ruang	38	program pengelolaan izin lokasi		
39	program penatagunaan tanah								
40	program penyelesaian sengketa tanah garapan								
41	program penyelenggaraan penataan ruang								
	17	Penguatan kualitas koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta sinergi pemanfaatan ruang							
	18	optimalisasi Ruang Terbuka Hijau (RTH)	42	program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (psu)	13	Mewujudkan Madiun sebagai Kota Sejuta Bunga	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
6	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	19	Peningkatan tata kelola sampah dan limbah secara berkelanjutan	43	Program Pengelolaan Persampahan			Dinas Lingkungan Hidup	
				20	Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	44	Program Perencanaan Lingkungan Hidup		
		45	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup						
		46	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)						

1	STRATEGI	2	ARAH KEBIJAKAN	3	PROGRAM RPJMD	4	PROGRAM AKSI/ JANJI POLITIK	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				47	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan			
				48	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)			
				49	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat			
				50	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup			
7	Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan	21	Peningkatan Harapan Lama Sekolah	51	Program Pengelolaan Pendidikan	14	Beasiswa ikatan dinas pendidikan tinggi untuk mengganti ASN yang pensiun.	Dinas Pendidikan
						15	Memberikan bantuan laptop atau notebook dan seragam gratis bagi siswa SD dan SMP negeri-swasta se kota Madiun	
						16	Program Outdoor learning Centre	
		22	Pengembangan layanan pendidikan anak usia dini					
		23	Pengembangan layanan pendidikan inkulisif					
		24	Peningkatan kualitas manajemen sekolah	52	Program Pengembangan Kurikulum			
		25	Peningkatan kualitas proses pembelajaran untuk memenuhi target SPM bidang pendidikan	53	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	17	Beasiswa Bagi Tenaga Kependidikan	

1	STRATEGI	2	ARAH KEBIJAKAN	3	PROGRAM RPJMD	4	PROGRAM AKSI/ JANJI POLITIK	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				54	Program Pembinaan Perpustakaan			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				55	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno			
8	Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan	26	Peningkatan akses serta kualitas pelayanan kesehatan terpadu	56	program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	18	Pelayanan kesehatan terpadu bagi warga Kota Madiun.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		27	Peningkatan Promosi, upaya Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan	57	program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan			
		28	Peningkatan sumberdaya dan informasi kesehatan	58	program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan			
		29	Peningkatan pelayanan kesehatan primer dan rujukan	59	program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman			Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		30	Peningkatan Advokasi dan Penggerakan Program Bangga Kencana dan Penguatan Sistem Informasi Keluarga serta Penguatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk	60	program pengendalian penduduk			
		31	Peningkatan akses dan kualitas penyelenggaraan KBKR yang komprehensif	61	program pembinaan keluarga berencana (kb)			
32	Peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang holistik dan integratif sesuai siklus hidup, serta menguatkan pembentukan karakter di keluarga	62	program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (ks)					
9	Peningkatan kuantitas dan kualitas pembangunan berbasis kesetaraan	33	Peningkatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat responsif gender	63	program peningkatan kualitas keluarga			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				64	program pengelolaan sistem data gender dan anak			

1	STRATEGI	2	ARAH KEBIJAKAN	3	PROGRAM RPJMD	4	PROGRAM AKSI/ JANJI POLITIK	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	dan keadilan gender			65	program perlindungan perempuan			
				66	program pengarus utamaan gender dan pemberdayaan perempuan			
				67	program perlindungan khusus anak			
				68	program pemenuhan hak anak (pha)			
10	Perluasan kesempatan kerja	34	Peningkatan kompetensi dan ketrampilan masyarakat	69	program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	19	Menghadirkan tenaga profesional yang kompeten di bidangnya untuk melatih masyarakat dalam merealisasikan ide atau gagasan yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		35	Peningkatan jaringan tenaga kerja	70	program hubungan industrial	20	Asuransi bagi Tenaga Kerja Sektor Informal	
				71	program penempatan tenaga kerja	21	Menciptakan lapangan kerja sektor formal dan non formal.	
				72	program pembangunan kawasan transmigrasi			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
11	Peningkatan kondusifitas iklim berinvestasi	36	Penyediaan kebijakan ramah investasi	73	program pengembangan iklim penanaman modal			
		37	Penyederhanaan prosedur pendukung perijinan dan investasi	74	program promosi penanaman modal			
				75	program pelayanan penanaman modal			
				76	program pengendalian pelaksanaan penanaman modal			
				77	program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal			
12	Peningkatan kualitas hidup bermasyarakat yang berbudaya	38	Pelestarian Seni dan Budaya yang berbasis kearifan lokal	78	program pengembangan kebudayaan	22	Menyapa Masyarakat dengan Seni Budaya Mingguan	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
				79	program pengembangan kesenian tradisional			

1	STRATEGI	2	ARAH KEBIJAKAN	3	PROGRAM RPJMD	4	PROGRAM AKSI/ JANJI POLITIK	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				80	program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya			
		39	Peningkatan partisipasi aktif pemuda	81	program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan			
				82	program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	23	Program Peningkatan Kepedulian pada Bidang Olah Raga	
13	Peningkatan kontribusi sector unggulan dalam perekonomian	40	Peningkatan kontribusi sector perdagangan dan jasa terhadap PDRB	83	program perizinan dan pendaftaran perusahaan			Dinas Perdagangan
		41	Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan yang representatif	84	program peningkatan sarana distribusi perdagangan	24	Penghapusan retribusi parkir untuk pasar tradisional.	
						25	Penghapusan retribusi bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Madiun.	
				85	program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting			
				86	program standardisasi dan perlindungan konsumen			
				87	program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri			
		42	Peningkatan Pengelolaan Pariwisata	88	program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata			Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
				89	program pemasaran pariwisata			
		43	Pengembangan ekonomi kreatif	90	program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif			
		44	Pengembangan sentra-sentra usaha/produk ekonomi lokal (produk khas daerah) berbasis kelurahan	91	program pengelolaan sistem informasi industri nasional			
				92	program perencanaan dan pembangunan industri			Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil

1	STRATEGI	2	ARAH KEBIJAKAN	3	PROGRAM RPJMD	4	PROGRAM AKSI/ JANJI POLITIK	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		45	Pengembangan ekonomi digital masyarakat	93	program pengembangan umkm	26	Bantuan Modal dan Pengembangan SDM untuk UKM Kota	dan Menengah
14	Peningkatan produktivitas dan daya saing IKM, Usaha Mikro dan koperasi	46	Pengembangan Sistem Pendukung Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro			27	Madiun Display meningkatkan dan mengembangkan produk unggulan lokal yang ada di wilayah Bakorwil 1 Madiun.	
		47	Peningkatan Produktivitas IKM dan Usaha Mikro					
		48	Peningkatan kelembagaan koperasi	94	program pendidikan dan latihan perkoperasian			
				95	program pemberdayaan dan perlindungan koperasi			
15	Peningkatan kualitas dan kuantitas ketersediaan pangan	49	Peningkatan ketersediaan pangan	96	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat			Dinas Ketahanan pangan dan Pertanian
				97	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	28	Subsidi Pupuk Bagi Petani	
				98	Program Penanganan Kerawanan Pangan			
		50	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	99	Program Pengawasan Keamanan Pangan			
		51	Peningkatan akses pangan dan perilaku pangan masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang dan aman.	100	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya			
				101	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan			
				102	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan			
103	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian							
				104	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner			

1	STRATEGI	2	ARAH KEBIJAKAN	3	PROGRAM RPJMD	4	PROGRAM AKSI/ JANJI POLITIK	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				105	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian			
				106	Program Perizinan usaha Pertanian			
				107	Program Penyuluhan Pertanian			
16	Penurunan tingkat kemiskinan	52	Peningkatan database kemiskinan berbasis RT/RW					
		53	Peningkatan jejaring sosial	108	program pemberdayaan sosial	29	Subsidi Listrik dan Air Bersih Bagi Masyarakat Kurang mampu	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				109	program program perlindungan dan jaminan sosial	30	Memberikan Bantuan Pemakaman bagi masyarakat tak berdaya	
		54	Penguatan program pengentasan kemiskinan	110	program penanganan bencana			
				111	program pengelolaan taman makam pahlawan			
17	Peningkatan Perlindungan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial	55	Peningkatan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS	112	program rehabilitasi sosial	31	Program peningkatan kepedulian pada lansia, kaum marjinal, perempuan, ibu dan anak	
		56	Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak serta Rehabilitasi Sosial					
18	Peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga kerukunan, ketenteraman dan ketertiban	57	Peningkatan masyarakat yang tertib dan patuh terhadap peraturan					Satuan Polisi Pamong Praja
		58	Peningkatan ketenteraman dan ketertiban	113	program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	32	Memberdayakan Pesilat untuk keamanan lingkungan di setiap kelurahan	

1	STRATEGI	2	ARAH KEBIJAKAN	3	PROGRAM RPJMD	4	PROGRAM AKSI/ JANJI POLITIK	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		59	Penguatan peran masyarakat dalam membangun Kerukunan			33	Bantuan Perbaikan dan Sarana Prasarana Ibadah	Sekretariat Daerah
				114	program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				115	program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik			
				116	program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan			
				117	program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya			
				118	program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik social			
19	Peningkatan mitigasi resiko dan ketangguhan bencana	60	Peningkatan ketangguhan pemerintah dan masyarakat terhadap bencana	119	program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran			Satuan Polisi Pamong Praja
				120	Program Penanggulangan Bencana			Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Tabel 6.6
Program Prioritas Pembangunan daerah yang disertai Pagu Indikatif

Kode	Misi				Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
	Tujuan						Realisasi 2020		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	
	Sasaran						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
	Program						5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
prioritas 1																			
Mewujudkan Pemerintahan yang Baik (Good Governance)																			
					Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional yang berorientasi pada pelayanan publik berbasis smart cities	Indeks Reformasi Brikrasi	(B) 67,34	(B) 65,55	(B) 67	(B) 68	(B) 69	(BB) 70,01	(BB) 70,01						
					Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Madiun		BB (70,01)	BB (73)	BB (76)	BB (79)	A (80,01)	A (80,01)						
						Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		3,385 tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sangat tinggi	Sangat tinggi						
						Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,82	Tidak ada penilaian tahun 2020	2,83 (baik)	2,85 (baik)	2,87 (baik)	2,90 (baik)	2,90 (baik)	2,90 (baik)					
4	4	2			Program Penataan Daerah Otonom Baru	Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban Kepala daerah yang tepat Syarat	6 dokumen	6 dokumen	817.968.835	-	-	-	-	-	-	-	6 dokumen	817.968.835	Sekretariat Daerah (Bagian Administrasi Pemerintahan Umum)
						Penyampaian LKPj Tepat Waktu	tepat waktu	tepat waktu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tepat waktu	
4	0	0			Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Indeks Kepuasan Masyarakat di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	-	-	-	80,08 nilai	-	-	-	-	-	-	80,08 nilai	30.614.876.059	Sekretariat Daerah (Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat)
						Persentase Penyediaan Data Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
4	4	2			Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Produk Hukum yang berkualitas	100	100%	847.826.505	-	-	-	-	-	-	-	100%	847.826.505	Sekretariat Daerah (Bagian Hukum)

Kode	Misi			Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
	Tujuan					Realisasi 2020		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
	Sasaran					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	
	Program					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
4	0	0	1	2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Indeks Kepuasan Masyarakat di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	-	-	-	80,08 nilai	-	-	-	-	80,08 nilai	3.744.131.160	Sekretariat Daerah (Bagian Hukum)		
						Persentase Penyediaan Data Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100%	100%	100%	658.490.000	100%	941.759.300	100%	953.535.800	100%	1.048.890.000		100%	
4	0	0	1	2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Indeks Kepuasan Masyarakat di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	-	-	-	80,08 nilai	-	-	-	-	80,08 nilai	9.236.399.000	Sekretariat Daerah (Bagian Pemerintahan)		
						Persentase Penyediaan Data Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100%	100%	100%	1.524.570.550	100%	2.202.809.000	100%	2.475.000,000	100%	2.495.000,000		100%	
4	4	2	0	3	1	Program Pengembangan Kinerja dan Kelembagaan Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Capain Kinerja (LKj Perangkat Daerah) Bernilai Sangat Baik (≥100)	79,41	94,12 %	534.955.164	-	-	-	-	94,12 %	534.955.164	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)		
4	4	2	0	4	1	Program Peningkatan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah dan Pelayanan Publik	Nilai Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik	2,4 (cukup dengan catatan)	2,75	547.003.517	-	-	-	-	2,75	547.003.517	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)		
4	0	0	1	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	74,10	74,25	-	75,88	2.225.206.253	77,00	2.610.646.998	78,00	1.089.109.500	1.094.109.500	80,01	11.195.341.606	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)
4	4	1	0	7	1	Program Peningkatan Kualitas Hidup Beragama	Persentase Kegiatan Keagamaan yang difasilitasi	100	100	1.018.377.035	-	-	-	-	100	1.018.377.035	Sekretariat Daerah (Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat)		
4	4	1	0	5	4	Program Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Dokumen Perencanaannya sesuai Ketentuan	-	100%	1.080.250.652	-	-	-	-	100%	1.080.250.652	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
							Persentase Pemerintah Kota yang capaian kinerjanya lebih dari 80%	100%	100%	-	-	-	-	-	100%				

Kode	Misi					Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
	Tujuan							Realisasi 2020		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	
	Sasaran							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
	Program							5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
4 0 4	4 0 6	1			Program Perencanaan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Capaian target program pembangunan bidang ekonomi, sosil dan budaya	-	100%	355.497.949	-	-	-	-	-	-	100%	355.497.949			
					Program Perencanaan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya yang dapat dimanfaatkan	100%	100%									100%				
4 0 4	4 0 7	1			Program Perencanaan Fisik dan Sarana Prasarana Kota	Persentase Capaian target program pembangunan bidang prasarana wilayah	-	100%	515.325.581	-	-	-	-	-	-	100%	515.325.581			
					Program Perencanaan pembangunan prasarana wilayah yang dapat dimanfaatkan	100%	100%									100%				
5 1 2	0 0	0			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi sesuai ketentuan	100%	100%	-	100%	1.579.333.325	100%	1.669.300.135	100%	1.669.300.135	100%	6.857.358.025	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah		
2 1 0	2 1 6	1			Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Pelayanan Publik yang sudah terintegrasi	25	33,04	9.342.188.500	-	-	-	-	-	-	33,04	9.342.188.500	Dinas Komunikasi dan Informatika		
2 1 6	0 6 3	0			Program Aplikasi Informatika	Nilai Domain Layanan SPBE Administrasi Pemerintahan	-	-	-	3,6 skor						3,6 skor				
					Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100%	100%	-	100%		100%		11.510.000.00		11.860.000.00		43.717.933.60			
					Persentase perangkat daerah yang saling terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	-	-	-	100%	9.760.450.600	100%	0	100%	0	100%	0	0			

Kode	Misi					Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
	Tujuan							Realisasi 2020		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	
	Sasaran							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
	Program							5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
4	4	1				Program Dana Kelurahan	Indek Perkembangan Kelurahan	0,73	100%	5.629.024.604	-	-	-	-	-	-	100%	5.629.024.604		
7	0	0				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	18 usulan	18 usulan	-	18 usulan	4.028.206.193	18 usulan	3.052.276.276	-	3.465.000.000	3.480.750.000	18 usulan	13.421.306.895	Kecamatan Kartoharjo
							Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah Kecamatan Kartoharjo	-	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
7	0	0				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	-	-	18 usulan	4.743.071.967	18 usulan	2.644.100.425	-	3.433.080.378	3.447.234.397	18 usulan	13.663.323.270	Kecamatan Manguharjo	
							Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah Kecamatan Manguharjo		100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
7	0	0				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	90 usulan	90 usulan	18 usulan	3.373.446.350	18 usulan	3.210.061.090	-	3.370.564.145	3.539.092.352	18 usulan	5.305.579.331	Kecamatan Taman	
							Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah Kecamatan Taman		100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
						Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Kota Madiun		82,85 (baik)		82,85 (baik)	83 (baik)	83 (baik)		85 (baik)		86 (baik)			
							Indeks Inovasi Daerah		1892		1892	1900	1925		1950		1950			
4	4	1				Program Pengembangan Kajian dan Penelitian	Persentase hasil penelitian/ kajian yang dapat dimanfaatkan	100%	100%	199.688.047	-	-	-	-	-	-	100%	199.688.047	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5	0	0				Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	persentase hasil penelitian/kajian yang dapat dimanfaatkan	100%	100%	-	100%	727.489.507	100%	874.737.757	100%	1.220.033.946	1.220.033.946	100%	4.271.082.145	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Misi						Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
	Tujuan								Realisasi 2020		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	
	Sasaran								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
	Program								5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Meningkatnya Derajat kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup		72,81		72,81		72,81		72,81		72,81		72,81	
1	1	1	0	8			Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Kesehatan	Persentase penduduk Kota Madiun yang menjadi peserta JKN	87,6	95.21 %	35.903.672.680	-	-	-	-	-	-	-	95.07 %	35.903.672.680	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
1	1	1	0	9			Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Kesehatan Masyarakat yang sesuai standart	16,67	25	6.093.820.696	-	-	-	-	-	-	-	25	6.093.820.696	
1	1	2	0	0			Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Persentase Penurunan Kasus Kejadian Luar Biasa	100 (20 kasus)	- 1.940 %	3.105.216.940	-	-	-	-	-	-	-	- 1.940 %	3.105.216.940	
1	1	2	0	1			Program Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan	Persentase sarana pelayanan kesehatan yang terakreditasi	48,27	75	21.377.920.542	-	-	-	-	-	-	-	75	21.377.920.542	
1	1	1	0	5			Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Persentase sarana dan prasarana rumah sakit yang sesuai standar	88,55	91,15	4.530.614.956	-	-	-	-	-	-	-	91,15	4.530.614.956	Rumah Sakit Umum Daerah
1	1	1	0	6			Program Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pencaaian Kinerja Badan Layanan Umum Daerah	100	60	80.943.285.683	-	-	-	-	-	-	-	60	80.943.285.683	
1	1	1	0	8			Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Kesehatan	Persentase penyediaan sarana/prasarana fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan	88,55	91,15	6.295.049.457	-	-	-	-	-	-	-	91,15	6.295.049.457	
1	0	0	2	2			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks Keluarga Sehat	0,33	0,43		0,39							0,39		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
								Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	-	66,67 %		50,00%	1.974.015.887.78	66,67%	82.687.756.549	75%	162.988.308.912	75%	99.820.515.624	75%	478.806.069.050
1	0	0	2	3			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan yang sesuai standar	-	80%		89%	235.589.050	90%	279.413.000	91%	225.252.245	92%	232.009.812	92%	975.711.057

Kode	Misi						Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
	Tujuan								Realisasi 2020		Target 2021		Target 2022		Target 2023			Target 2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
	Sasaran								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.		
	Program								5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16		
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	0	0					Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Fasilitas Pelayanan Farmasi, Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) dan Depot Air Minum (DAM) sesuai Standar	-	-					88%	233.359.890	89%	240.360.686	89%	902.553.576			
1	0	0					Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang mengalami kenaikan strata	68,63%	60,38%	-				62,50%	1.157.179.250	63,00%	1.191.894.628	63,00%	11.526.646.878			
							Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Memeratakan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kota Madiun																
							Terwujudnya Pembangunan ekonomi inklusif	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	6,78	6,69					6,42		6,44		6,44				
							Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,85	8,32					5,12		5,00		5,00				
2	2	1					Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	79	73,04%	350.882.216	-	-	-	-	-	-	-	73,04%	350.882.216	Dinas Tenaga Kerja		
								Persentase lulusan pelatihan yang mempunyai sertifikat kompetensi dasar	98	100		-	-	-	-	-	-	-	100				
2	0	0					Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja yang Dilatih	21,75%	0,69%	-	23%	23%	-	-	-	-	1.345.000.000	35%	1.345.000.000	35%	3.817.970.730	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
								Persentase jumlah peserta pelatihan yang berbasis kompetensi	-	-	-	20%	25%	30%	1.345.000.000	35%	1.345.000.000	35%	1.345.000.000	35%	3.817.970.730	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
2	0	0					Program Hubungan Industrial	Persentase Penurunan Kasus-kasus Perselisihan Hubungan Industrial	-	-	-	10%	10%	-	-	-	-	2.274.134.040	10%	2.274.134.040	10%	7.949.921.450	
								persentase perusahaan yang mengesahkan peraturan perusahaan	-	-	-	16%	16%	16%	2.274.134.040	16%	2.274.134.040	16%	2.274.134.040	16%	7.949.921.450		

Kode	Misi					Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
	Tujuan							Realisasi 2020		Target 2021		Target 2022		Target 2023			Target 2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
	Sasaran							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	
	Program							3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
						Meningkatnya Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi	Persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	5,82	-10,83		2,16		4,81		5,69		6,91		6,91		
							Persentase pertumbuhan PDRB sektor jasa		-0,93		0,58		0,76		2,78		3,42		3,42		
2	2	1				Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase koperasi aktif	98,05	98,7	612.897.052	-	-	-	-	-	-	-	-	98,7	612.897.052	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro
2	2	1				Program Pengembangan Sistem Pendukung Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro	Persentase pertumbuhan usaha mikro	0,4	0,42	505.342.770	-	-	-	-	-	-	-	-	0,42	505.342.770	
2	1	0				Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase koperasi bersertifikat NIK	0	81,29%	-	80,13%		86,50%		-		-	86,50 %		Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
							Persentase jumlah koperasi yang disetujui permohonan bersertifikat NIK	-	-	-	75,0%	750.310.000	75,0%	500.318.900	75,0%	773.058.000	75,0%	773.058.000	75,0%	2.796.744.900	
2	1	0				Program Pengembangan UMKM	Persentase Usaha Mikro terfasilitasi yang beromzet naik	-	-	-	7%	829.985.000	7%	309.850.000	-		-	7%		2.569.850.000	
							Persentase Usaha Mikro dibina yang beromzet naik	-	-	-	7%		7%		7,33%	715.000.000	8%	715.000.000	8%		
2	2	1				Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga	Jumlah Pemuda Berprestasi yang dikirim kompetisi	16	2 orang	1.640.940.7	-	-	-	-	-	-	-	2 orang	1.640.940.745	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemuda an, dan Olahraga	
							Jumlah Atlit yang ikut kejuaraan di tingkat Provinsi dan Nasional	189	124 orang	45	-	-	-	-	-	-	-	124 orang			
2	1	0				Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Jumlah medali yang diraih di bidang olahraga	50 medali	79 medali	-	33 medali		33 medali		-		-	33 medali		Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemuda an, dan Olahraga	
							Prosentase peningkatan pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	-	-	-	-	3.511.442.880	20%	4.434.615.445	25%	2.036.668.700	30%	2.239.335.570	30%	10.136.838.550	
2	2	1				Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase Kekayaan Budaya yang dipentaskan	31,6	4%	1.901.047.9	-	-	-	-	-	-	-	4%	1.901.047.967	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemuda an, dan Olah Raga	
								67													
2	2	0				Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina	100 orang	100 orang	-	100 orang	123.886.145	100 orang	123.886.145	100 orang	242.000.000	100 orang	266.200.000	500 orang	928.200.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemuda an, dan Olah Raga

Kode	Misi					Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
	Tujuan							Realisasi 2020		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	
	Sasaran							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
	Program							5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
3	3	0	6			Program Pengelolaan Pasar Rakyat	Jumlah Omset Pasar Rakyat	547.949 Juta (Rp)	3,106,54,387,840	5.113.702.485	-	-	-	-	-	-	3,106,54,387,840	5.113.702.485	Dinas Perdagangan	
3	3	0	3			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pasar sesuai standar	-	-	5,88%	-	-	-	-	-	-	5,88%	29.885.229.000	Dinas Perdagangan	
							Persentase pasar yang dikelola sarana distribusinya	0	0	-	100%	8.242.965.872	100%	6.261.231.818	100%	3.256.000.000	100%	3.256.000.000	100%	29.885.229.000
						Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan dan Stabilitas Kehidupan Sosial Masyarakat	Indeks Ketentraman		76,87		76,95		77,05		77,15		77,2		77,2	
							Indek Gini	0,35	0,39		0,38		0,37		0,36		0,35		0,35	
						Pengurangan Kemiskinan	Angka Kemiskinan	4,35	4,98		4,97		4,96		4,95		4,94		4,94	
1	1	0	5			Program Perlindungan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang tertangani	100	100	3.155.942.559	-	-	-	-	-	-	100	3.155.942.559	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
1	0	0	6			Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang berperan aktif dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial	-	-	-	90%	-	-	-	-	-	90%	19.260.071.368	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
							Persentase PSKS yang berperan aktif dalam Pemberdayaan Sosial	-	-	-	-	2.210.456.099	50%	3.860.177.515	58%	4.375.378.420	66%	4.812.916.262	66%	19.260.071.368
1	0	0	6			Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial	-	-	-	18,7%	-	-	-	-	-	18,7%	6.045.896.075		
							Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	-	-	-	-	1.508.844.750	100%	1.742.901.123	100%	2.049.045.215	100%	2.253.949.737	100%	6.045.896.075
1	0	0	6			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	-	-	-	100%	-	100%	11.312.409.780	100%	12.570.286.850	100%	13.305.949.240	100%	46.549.372.750
								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	3	0	5			Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Peningkatan Produktivitas Pertanian	7,2	6,90	2.447.921.843	-	-	-	-	-	-	6,90	2.447.921.843	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
							Rasio Pendapatan Usaha Pertanian dengan biaya Produksi		1,81		-	-	-	-	-	-	1,81			

Kode	Misi				Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
	Tujuan						Realisasi 2020		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
	Sasaran						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	
	Program						5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
					pemerintah daerah	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		3,385 (tinggi)		Tinggi		Tinggi		Tinggi		Sangat tinggi		Sangat tinggi		
						Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,82	Tidak ada penilaian tahun 2020		2,83 (baik)		2,85 (baik)		2,87 (baik)		2,90 (baik)		2,90 (baik)		
4	4	1			Program Peningkatan Fasilitas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai regulasi	100	32,11		-		-		-		-		32,11		493.425.447
						Presentase jumlah pengadaan barang/jasa yang terealisasi		100%		-		-		-		-		100%		
4	4	2			Program Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan	Persentase OPD yang melaksanakan kegiatan sesuai jadwal	100			-		-		-		-		100		
						Jumlah dokumen Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan		2 dokumen		-		-		-		-		2 dokumen		105.974.436
						Presentase jumlah tender yang terealisasi		100%		-		-		-		-		100%		
4	4	2			Program Peningkatan Kerjasama Antar Daerah Pemerintah Daerah	Jumlah Perjanjian Kerjasama	5 kerjasama	10 kerjasama		-		-		-		-		10 kerjasama		186.458.697
4	4	1			Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	Persentase Jumlah Kegiatan sosialisasi Bidang Cukai yang dilaksanakan	100	100		-		-		-		-		100		77.840.000
4	4	2			Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Ekonomi	Persentase kelompok sosial ekonomi yang difasilitasi	100	-		-		-		-		-		100		
4	4	1			Program Stabilisasi Ekonomi Daerah	Tingkat Inflasi	4%	1,8		-		-		-		-				189.597.882

Kode	Misi					Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
	Tujuan							Realisasi 2020		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	
	Sasaran							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
	Program							3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14
4	4	1				Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pelayanan Kedinasan Pimpinan	100	105,87 %	593.745.402	-	-	-	-	-	-	-	105,87 %	593.745.402	Sekretariat Daerah (Bagian Umum)
4	0	0	1	3		Program Perekonomian dan Pembangunan	Indeks Kepuasan Masyarakat di Bidang Perekonomian dan Pembangunan	-	-	-	80,98 nilai	-	-	-	-	-	-	80,98 nilai	3.199.572.502	Sekretariat Daerah (Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan)
							Persentase Penyediaan Data Bidang Perekonomian dan Pembangunan	100%	100%	-	781.786.292	100%	100%	100%	830.000.000	100%	100%	915.000.000		
4	0	0	1	3		Program Perekonomian dan Pembangunan	Indeks Kepuasan Masyarakat di Bidang Perekonomian dan Pembangunan	-	-	-	80,98 nilai	-	-	-	-	-	-	80,98 nilai	4.160.033.600	Sekretariat Daerah (Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat)
							Persentase Penyediaan Data Bidang Perekonomian dan Pembangunan	100%	100%	-	623.733.600	100%	100%	100%	1.277.100.000	100%	100%	1.393.200.000		
4	4	1	0	9	5	Program Optimalisasi Pengelolaan Pajak Daerah	Persentase Ketersediaan Basis Data Pajak daerah	100	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	211.988.000	Badan Pendapatan Daerah
							Jumlah penerimaan pajak daerah	-	118,26 %	-	211.988.000	-	-	-	-	-	-	-		
5	0	0	2	4		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pertumbuhan Pajak Asli Daerah	-	-	-	1,5%	-	-	-	-	-	-	1,5%	4.995.628.000	Badan Pendapatan Daerah
							Persentase Peningkatan Data Potensi Wajib Pajak	10%	10%	-	616.777.500	10%	10%	1.447.675.000	10%	10%	1.499.358.000	10%		
							Peningkatan Capaian Penagihan Pajak Daerah	37%	41%	-	-	41%	41%	42%	43%	43%	-	-		
5	0	0	1	3		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	persentase capaian target program pembangunan daerah	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	-	100%	8.279.198.640	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
							Persentase Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah	100%	100%	-	1.452.140.380	100%	100%	2.376.650.000	100%	100%	2.376.650.000	100%		
4	4	1	0	7	5	Program Peningkatan dan Pengembangan Penatausahaan Keuangan Daerah	Persentase penerbitan SP2D tepat waktu	100%	100%	217.944.427	-	-	-	-	-	-	-	100%	217.944.427	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Misi					Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
	Tujuan							Realisasi 2020		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	
	Sasaran							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
	Program							5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	4	1				Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyampaian laporan pertanggungjawaban APBD tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu									Tepat Waktu		
							Presentase OPD yang menyampaikan Laporan Keuangan sesuai SAP	100%	100%	968.759.403								100%	968.759.403	
4	4	1				Program Pengelolaan Anggaran Daerah	Pengesahan Perda APBD Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu									Tepat Waktu		
							Pengesahan Dokumen DPA dan DPPA	Tepat Waktu	Tepat Waktu	676.717.415								Tepat Waktu	676.717.415	
4	4	1				Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	Kontribusi pengelolaan aset terhadap PAD	4.930.372.055										4.930.372.055		
							Presentase keakuratan data aset OPD	-	100%	2.790.892.165								100%	2.790.892.165	
							Presentase peningkatan Nilai aset pemda	-	6%									6%		
							Presentase aset yang diasuransikan	-	-									-		
4	4	2				Program Peningkatan Manajemen Pajak Daerah	Persentase Pertumbuhan Penerimaan Pajak daerah	1,5	-									1,5		
							Persentase Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	-	100%	453.729.000								100%	453.729.000	
5	0	0				Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Realisasi Kinerja Keuangan yang Memenuhi Target	100%	100%	-	100%	60.340.673.185	100%	11.270.987.599	100%	7.505.329.560.00	100%	7.510.329.650.00	100%	73.121.335.148
5	0	0				Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Aset yang berkondisi baik	100%	100%	-	100%	3.748.942.400	100%	2.099.685.020	100%	3.337.189.000.00	100%	3.337.189.000.00	100%	13.348.756.040
4	4	1				Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase OPD yang maturitas SPI nya level 3	25	25									25		
							Persentase Temuan Hasil pengawasan yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi	-	96,42 %	1.341.655.581								96,42 %	1.341.655.581	

Kode	Misi					Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
	Tujuan							Realisasi 2020		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	
	Sasaran							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
	Program							3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14
4	4	1				Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Persentase aparatur pengawas yang bersertifikat	100%	100%	372.981.909	-	-	-	-	-	-	-	100%	372.981.909	Inspektorat
4	4	1				Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan dan Sisdur Pengawasan	Persentase dokumen kebijakan dan sisdur pengawasan yang terpenuhi	100%	100%	5.996.400	-	-	-	-	-	-	-	100%	5.996.400	
6	0	0				Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase OPD yang maturitas SPInya Level 3	-	25%	-	30%	848.332.295	35%	1.237.019.000	40%	1.428.000,80	45%	1.533.500,00	45%	4.728.339.000
6	0	0				Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Dokumen Kebijakan dan Sisdur Pengawasan serta Asistensi yang Terpenuhi	-	100%	-	100%	1.019.621.160	100%	1.138.997.000	100%	1.327.550,00	100%	1.387.500,00	100%	4.738.923.000
2	2	1				Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Persentase PD yang mengimplementasikan keamanan Informasi	8,8	25	486.210.682	-	-	-	-	-	-	-	25	486.210.682	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	2	0				Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi	-	-	-	II (dua) Level	-	-	-	-	-	-	II (dua) Level	-	Dinas Komunikasi dan Informatika
							Persentase OPD yang menggunakan layanan persandian untuk pengamanan informasi	100%	100%	-	100%	195.502.695	100%	350.000.000	100%	500.000.000	100%	600.000.000	100%	
2	2	1				Program Penyelamatan, Peningkatan SDM dan Layanan Arsip Daerah	Jumlah Berkas Arsip yang dikelola	55.323 berkas	56.300 berkas	426.396.352	-	-	-	-	-	-	-	56.300 berkas	426.396.352	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
							Jumlah Unit Daerah Kearsipan yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku	-	5 unit	-	-	-	-	-	-	-	-	5 unit		
2	2	0				Program Pengelolaan Arsip	Jumlah berkas arsip yang dikelola	57.615 berkas	60.004 berkas	-	59.500 berkas	-	-	-	-	-	-	59.500 berkas	2.987.956.945	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
							Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-	-	82%	-	84%	436.331.945	86%	651.625.000	88%	900.000.000	90%	1.000.000.000		

Kode	Misi						Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
	Tujuan								Realisasi 2020		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD				
	Sasaran								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.			
	Program								3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17
4	4	1					Program Koordinasi, Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan, Kesejahteraan Sosial dan Ketentraman Ketertiban Umum	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	100	129.785.839	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	129.785.839	Kecamatan Kartoharjo	
4	4	1					Program Koordinasi, Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan, Kesejahteraan Sosial dan Ketentraman Ketertiban Umum	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	129	137.775.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	129	137.775.000	Kecamatan manguharjo	
4	4	1					Program Koordinasi, Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan, Kesejahteraan Sosial dan Ketentraman Ketertiban Umum	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	100	94.685.512	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	94.685.512	Kecamatan Taman	
7	0	0					Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	persentase pengkoordinasian ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	100%	100%	-	100%	171.476.620	100%	700.192.835	100%	770.212.119	100%	847.233.330	100%	3.707.258.105	100%	3.707.258.105	Kecamatan Kartoharjo
7	0	0					Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	persentase pengkoordinasian ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	100%	100%	-	100%	427.877.480	100%	815.576.400	100%	1.079.290.212	100%	1.133.254.723	100%	3.104.023.157	100%	3.104.023.157	Kecamatan manguharjo
7	0	0					Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	persentase kewenangan yang dijalankan kecamatan dan tidak dilaksanakan OPD lain	100%	100%	-	100%	181.926.494	100%	181.926.494	100%	191.022.819	100%	200.573.960	100%	834.642.042	100%	834.642.042	Kecamatan Taman

Kode	Misi				Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
	Tujuan						Realisasi 2020		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
	Sasaran						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	
	Program						5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
					Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Kota Madiun		82,85 (baik)		82,85 (baik)		83 (baik)		83 (baik)		85 (baik)		86 (baik)		
						Indeks Inovasi Daerah		1892		1892		1900		1925		1950		1950		
2	2	0	1	05	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan	Persentase Penerbitan Dokumen Kependudukan	81,03	82%	206.825.853	-	-	-	-	-	-	-	82%	206.825.853		
2	2	0	1	06	Program Penataan dan Pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil	Persentase Penerbitan dokumen akta pencatatan sipil		92,00 %	1.332.303.658	-	-	-	-	-	-	-	92,00 %	1.332.303.658	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	2	0	1	07	Program Pengelolaan Data Kependudukan dan Inovasi Pelayanan	Persentase Uptime database kependudukan dan pencatatan sipil	99	99%	330.025.931	-	-	-	-	-	-	-	99%	330.025.931		
2	1	0	2	2	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Penerbitan Dokumen Kependudukan	99,18	93,33 %	-	84%	228.148.160	84%	233.627.050	84,50%	276.070.000	85%	303.160.000	85%	1.309.873.136	
2	1	0	2	3	Program Pencatatan Sipil	Persentase Penerbitan Dokumen Akta Pencatatan Sipil	100	93,33 %	-	94%	559.472.520	94,25%	402.719.632	94,50%	551.590.000	94,75%	605.550.000	94,75 %	2.266.229.296	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	1	0	2	4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	akurasi database kependudukan	-	-	-	99%	347.749.070	99,10%	362.506.923	99,15%	420.780.000	99,20%	462.550.000	99,20 %	2.043.603.047	
2	2	1	0	17	Program Sosialisasi di Bidang Cukai	Persentase Penyebaran Informasi tentang Cukai	100	89	825.498.000	-	-	-	-	-	-	-	89	825.498.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	2	1	1	154	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase data statistik sektoral yang terintegrasi	50	60	257.773.734	-	-	-	-	-	-	-	60	257.773.734	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	2	0	2	02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase data statistik sektoral yang terintegrasi	-	-	-	80	-	-	-	-	-	-	80	-		
						Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%	100%	-	100%	313.278.000	100%	499.250.000	550.000.000	550.000.000	100%	1.912.528.000	Dinas Komunikasi dan Informatika		
						Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	1	-		

Kode	Misi					Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
	Tujuan							Realisasi 2020		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
	Sasaran							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	
	Program							3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15
4	4	1				Program Layanan Perundang-Undangan, Dokumentasi dan Rapat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap layanan perundang-undangan, Dokumentasi dan Rapat	81	80	14.070.912.044	-	-	-	-	-	-	-	80	14.070.912.044	Sekretariat DPRD	
4	0	0				Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap layanan Tugas dan Fungsi	81,29	90,42	-	79	12.826.552.255	80	14.587.486.385	81	19.318.960.080	82	22.288.971.373	82	72.546.774.111	Sekretariat DPRD
4	4	1				Program Peningkatan Manajemen Pelayanan Kepegawaian	Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian sesuai SOP	99	145%	197.835.501	-	-	-	-	-	-	-	145%	197.835.501	Badan Kepegawaian Daerah	
4	4	1				Program Fasilitas Kesejahteraan PNS	Persentase penyelesaian SK terkait kesejahteraan PNS yang sesuai SOP	107,4	108%	95.467.940	-	-	-	-	-	-	-	108%	95.467.940		
7	0	0				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kartoharjo	87,56	87,7	-	87,7	7.476.445.846	87,75	6.902.855.400	87,8	6.118.927.554	87,85	6.424.851.850	87,85	25.515.710.436	Kecamatan Kartoharjo
7	0	0				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Manguharjo	93,34	90,54	-	90,49	7.396.857.097	90,03	7.189.758.228	90,03	6.553.593.481	90,03	6.881.273.156	90,03	24.096.928.692	Kecamatan manguharjo
7	0	0				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Taman	88,30	88,29	-	88,12	8.112.850.452	88,46	7.030.198.834	88,78	7.381.708.776	88,94	7.750.794.214	88,94	25.551.736.008	Kecamatan Taman
						Mewujudkan Pembangunan yang berwawasan lingkungan															
						Terwujudnya Pembangunan infrastruktur Kota yang Maju, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan	livable city	85,32	86,67		87,78		88,19		88,60		89,01		89,01		
						Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur kota	Indeks infrastruktur	96,72	96,85		98,06		98,25		98,42		98,59		98,59		
1	1	1				Program Peningkatan Kualitas Pembangunan Gedung dan Infrastruktur Kota	Persentase bangunan gedung sesuai ketentuan	100	95,04	15.595.185.816	-	-	-	-	-	-	-	95,04	15.595.185.816	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	

Kode	Misi				Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
	Tujuan						Realisasi 2020		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
	Sasaran						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.		
	Program						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16
1	1	1	3				Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase Panjang Jalan Kota dalam Kondisi Baik	92,41	94,03 %	57.038.311.374	-	-	-	-	-	-	94,03 %	57.038.311.374		
1	1	1	3				Program Pembangunan dan Pemeliharaan Saluran/ Drainase/ Gorong-gorong	Persentase Panjang Drainase dalam Kondisi Baik/ Pambuangan air tidak tersumbat	89,75	90,40 %	14.047.224.710	-	-	-	-	-	-	90,40 %	14.047.224.710		
1	1	1	3				Program Pengendalian Banjir	Jumlah Titik/ Lokasi Banjir/ Genangan	12	12 Titik	7.217.269.810	-	-	-	-	-	-	12 Titik	7.217.269.810		
1	1	1	3				Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Persentase Terlayannya air bersih	94	-	-	-	-	-	-	-	-	94	-		
1	1	2	3				Program Perencanaan, Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang	Ketaatan Terhadap RTRW	100%	86%	736.311.193	-	-	-	-	-	-	86%	736.311.193		
1	0	0	3				Program Pengelolaan Sumberdaya Air	Persentase rawan banjir/genangan	-	-	-	20,05%	12.299.394.650	19,09%	8.369.843.440	18,47%	28.517.074.300	17,34%	31.368.781.730	17,34 %	98.737.388.030
1	0	0	3				Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga yang terlayani kebutuhan air minum	-	-	-	100%	-	100%	101.669.000	100%	111.835.900	100%	123.019.490	100%	336.524.390
1	0	0	3				Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Panjang Drainase dalam Kondisi Baik	90,96%	90,40 %	-	80,03%	22.274.002.000	80,06%	20.731.396.010	80,09%	48.653.618.200	80,12%	53.518.980.020	80,12 %	165.621.452.220
1	0	0	3				Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase bangunan Gedung Sesuai Ketentuan	100%	100%	-	100%	20.857.814.000	100%	18.746.270.000	100%	25.922.380.000	100%	28.514.618.000	100%	98.616.248.000
1	0	0	3				Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase Bangunan Sesuai Ketentuan	100%	100%	-	100%	19.966.147.160	100%	14.499.606.270	100%	21.178.289.462	100%	23.296.118.408	100%	81.160.898.290
1	0	1	3				Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan dalam Kondisi Mantab	93,64%	94,03 %	-	94,50%	58.330.391.462	95,00%	49.495.103.351	95,50%	109.548.668.724	96,00%	120.503.535.596	96,00 %	384.418.242.032
1	0	1	3				Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Pelaku jasa Konstruksi yang memenuhi standart kompetensi	-	-	-	47,68%	500.000.000	62,83%	540.000.000	77,98%	594.000.000	94,95%	653.400.000	94,95 %	2.287.400.000
1	0	1	3				Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Ketaatan terhadap RTRW	100%	100%	-	100%	1.280.982.460	100%	1.880.000.000	100%	2.068.000.000	100%	2.274.800.000	100%	7.722.800.000

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Misi						Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
	Tujuan								Realisasi 2020		Target 2021		Target 2022		Target 2023			Target 2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	
	Sasaran								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.
	Program								3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14
1	1	0	5			Program Lingkungan Sehat Perumahan Permukiman	Persentase Rumah tinggal layak huni dan bersanitasi	99,26	99,65	1.969.696.172	-	-	-	-	-	-	-	-	99,65	1.969.696.172	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
							Indeks Perumahan Permukiman	-	99,65 %		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	0	0	2			Program pengembangan Perumahan	Persentase Pengembangan Perumahan	100%	100%	-	100%	1.292.650.000	100%	2.745.911.000	100%	4.900.000.000	100%	4.900.000.000	100%	13.838.561.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	0	0	3			Program Kawasan Permukiman	Persentase Kawasan Permukiman yang tidak Kumuh	100%	98,10 %	-	98,50%	7.283.612.424	99%	5.618.815.000	99,50%	6.720.000.000	100%	6.920.000.000	100%	26.542.427.424	
2	2	0	5			Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Persentase Pemasangan Rambu-rambu Lalu Lintas	74	80	3.860.798.508	-	-	-	-	-	-	-	-	80	3.860.798.508	Dinas Perhubungan
							Persentase Perlengkapan Jalan	58%			-	-	-	-	-	-	-	-	58%		
2	2	0	6			Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Jumlah orang yang terangkut angkutan umum	420.660	539.916 orang	1.760.306.299	-	-	-	-	-	-	-	-	539.916 orang	1.760.306.299	Dinas Perhubungan
							Kinerja angkutan Umum	38%			-	-	-	-	-	-	-	-	38%		
2	1	0	2			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana, serta fasilitas perlengkapan lalu lintas	-	-	-	84%	8.363.009.965	88%	9.178.999.000	92%	10.562.531.500	96%	10.562.531.500	96%	38.719.362.180	Dinas Perhubungan
						Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		60,15		57,69		57,77		57,85		57,93				
2	2	0	5			Program Pelayanan Pertanahan	Persentase Pelayanan Pertanahan	100	100	109.354.539	-	-	-	-	-	-	-	-	100	109.354.539	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
							Persentase Rekomendasi Ijin Pertanahan yang diterbitkan	100			-	-	-	-	-	-	-	100			
2	1	0	2			Program Pengelolaan Izin Lokasi	Persentase Pengelolaan Izin Lokasi	100%	0	-	0	85.000.000	100%	349.901.600	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	464.901.600	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
2	1	0	4			Prgram Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Penyelesaian sengketa tanah garapan	100%	100%	-	100%	-	100%	36.200.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	86.200.000	
2	1	0	0			Program Penatagunaan Tanah	Persentase Penatagunaan Tanah	100%	100%	-	100%	120.000.000	100%	80.000.000	100%	80.000.000	100%	80.000.000	100%	360.000.000	

Kode	Misi					Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
	Tujuan							Realisasi 2020		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
	Sasaran							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	
	Program							3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15
2	2	1				Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase data dan informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang tersedia	58,97	64,01	445.978.043	-	-	-	-	-	-	-	64,01	445.978.043	Dinas Lingkungan Hidup	
2	2	1				Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase titik Sample Kualitas Air dan Udara yang memenuhi baku mutu	44,7	53,19	747.189.821	-	-	-	-	-	-	-	53,19	747.189.821		
2	2	1				Program Penataan, Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Persentase pelaku usaha/kegiatan yang taat terhadap peraturan lingkungan hidup	31,39	44,59	354.933.375	-	-	-	-	-	-	-	44,59	354.933.375		
2	2	1				Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	74,9	74,97	5.528.779.345	-	-	-	-	-	-	-	74,97	5.528.779.345		
2	1	0				Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Data Perencanaan LH yang Tersedia	61,54%	64,10%	-	69,23%	397.958.000	71,79%	419.892.000	79,49%	583.000.000	79,50%	642.000.000	79,50%	2.230.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	1	0				Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase titik sampel kualitas air dan udara yang memenuhi baku mutu	44,89%	53,19%	-	48%	1.242.680.365	49%	1.161.745.000	50%	1.760.000.000	50,10%	1.937.000.000	50,10%	6.666.000.000	
2	1	0				Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	-	-	-	96,83	125.500.000	96,83	56.500.000	-	200.000.000	-	225.000.000	96,83	675.000.000	
							Persentase jumlah spesies KEHATI Lokal Daerah	-	-	-	-	94,32%	-	-	97,20%	-	100%	100%	100%		
2	1	0				Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3)	Persentase pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)	-	70,96	-	71,0	257.127.000	71,5	41.500.000	75%	200.000.000	78%	225.000.000	78%	640.000.000	
2	1	0				Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase pelaku usaha / kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	40%	44,59%	-	52,90%	336.516.400	64,70%	681.549.200	76,47%	532.000.000	88,20%	585.000.000	88,20%	2.038.762.500	

Kode	Misi					Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
	Tujuan							Realisasi 2020		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
	Sasaran							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	
	Program							3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15
2	1	0				Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	-		100%		90%	654.550.000	100%	670.000.000	100%	851.400.000	100%	1.040.000.000	100%	3.439.400.000	
2	1	1				Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	-		100%		90%	85.000.000	100%	94.000.000	100%	104.000.000	100%	114.000.000	100%	397.000.000	
2	1	1				Program Pengelolaan Persampahan	-		74,97 %		74%	8.576.232.000	73%	7.951.800.000	72%	47.928.000.000	71%	61.190.000.000	71%	127.268.970.000	
Meningkatkan kualitas hidup Masyarakat Kota Madiun																					
Terwujudnya Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing																					
Meningkatnya pemberdayaan Gender																					
a	2	1				Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	-		25,21 %		-	2.267.373.362	-	-	-	-	-	-	25,21 %	2.267.373.362	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	2	1				Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak serta Rehabilitasi Sosial	-		100%		-	8.793.371.080	-	-	-	-	-	-	100%	8.793.371.080	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	0	0				Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	-		-		10%	303.007.740	15%	846.501.000	100%	1.105.807.150	100%	1.216.387.865	100%	3.471.703.755	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	0	0				Program Perlindungan Perempuan	-		-		100%	225.292.045	100%	419.590.865	100%	348.895.000	100%	363.550.000	100%	1.357.327.910	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	0	0				Program Peningkatan Kualitas Keluarga	-		-		5%	196.558.420	10%	835.086.470	20%	1.178.847.140	30%	1.296.731.854	30%	3.507.223.884	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Misi					Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
	Tujuan							Realisasi 2020		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	
	Sasaran							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
	Program							5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
2	0	0				Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Jumlah dokumen Data Terpilah Gender dan Anak	-	-	-	100%	113.615.510	1 dokumen	229.549.120	1 dokumen	353.814.360	1 dokumen	277.754.436	1 dokumen	974.733.426
2	0	0				Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase peningkatan pelembagaan dan penguatan pemenuhan hak anak	-	-	-	100%	266.276.000	-	470.265.980	-	534.095.000	-	602.000.000	100%	2.112.564.040
							Persentase Lembaga yang aktif dalam Pemenuhan Hak Anak	-	-	-	-	12,50%			22,43%			42,20%	42,20%	
2	0	0				Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase pelaksanaan kegiatan perlindungan khusus anak	-	-	-	100%		-		-		-		100%	
							Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak	-	-	-	-	81.739.101	0,003	410.605.078	-	168.349.000	-	177.000.000	0,003	734.126.420
							Persentase kasus kekerasan terhadap anak	-	-	-	-	0,04			0,04			0,04	0,04	
						Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Harapan Lama Sekolah		14,39		14,40		14,41		14,42		14,43		14,43	
							Rata-rata Lama Sekolah		11,14		11,14		11,15		11,16		11,17		11,17	
1	1	1				Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Pengolahan database informasi pendidikan dan evaluasi pelaporan berbasis TIK	100%	100%			239.807.439	-	-	-	-	-	-	100%	239.807.439
							Persentase Sekolah Standar Nasional Pendidikan	80					-	-	-	-	-	-	80	
1	1	1				Program Pendidikan Anak Usia Dini	Angka Partisipasi Kasar PAUD	106,70%	98,48 %	4.703.194.291		-	-	-	-	-	-	-	98,48 %	4.703.194.291
1	1	1				Program Pendidikan NonFormal	Jumlah Lembaga yang terakreditasi	80	100%	464.060.253		-	-	-	-	-	-	-	100%	464.060.253
1	0	0				Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Sekolah yang Berkurikulum SNP	100%	100%	-	100%	572.110.560	100%	3.480.307.628	100%	5.319.203.262	100%	5.324.203.262	100%	16.430.719.214
2	2	1				Program Pengembangan	Jumlah Bahan Pustaka yang dipinjam	22.568 eksemplar	-	944.202.757		-	-	-	-	-	-	-	22.568 eksemplar	944.202.757

Kode	Misi				Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
	Tujuan						Realisasi 2020		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	
	Sasaran						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
	Program						5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
	7				Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Nilai IKM Pemustaka terhadap layanan Perpustakaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
						Persentase peningkatan kunjungan perpustakaan	-	33,25 %	-	-	-	-	-	-	33,25 %				
2	2	0			Program Pembinaan Perpustakaan	Nilai IKM Pemustaka terhadap Layanan Perpustakaan	-	87,24	-	72	1.225.410.000	-	-	-	72	12.784.187.300			
						Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	5,35%	5,95%	-	5,95%	5,95%	5,95%	5,95%	5,95%	5,95%	0			
2	2	0			Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan	-	-	-	36%	37%	100.000.000	37%	260.000.000	38%	640.000.000			
						Angka Harapan Hidup		72,81		72,81			72,81		72,81				
2	2	1			Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Persentase Peserta KB Aktif MKJP	42,73%	42,88 %	1.856.462.422	-	-	-	-	-	-	42,88 %	1.856.462.422		
2	1	0			Program Pengendalian Penduduk	Persentase Angka UKP (Usia Kawin Pertama) < 20 tahun	5,58%	4,95%	-	≤ 4.8%	≤ 4.7%	755.101.420	-	686.573.713	≤ 4.7%	2.375.972.396			
						Meningkatnya Jumlah SSK	-	4 SSK	-	4 SSK	7 SSK	8 SSK	686.573.713	9 SSK	9 SSK				
						Meningkatnya Kampung KB yang berstandar paripurna	-	3 Kampung KB	-	3 Kampung KB	4 Kampung KB	5 Kampung KB	686.573.713	6 Kampung KB	6 Kampung KB				
2	1	0			Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Menurunnya Unmet Need	4.2%	11,60 %	-	16,93%	8,00%	2.554.439.400	7,50%	2.867.064.740	7,00%	11.108.317.322			
2	1	0			Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Meningkatnya kepesertaan anggota Tribina PUS yang ber-KB	79,10%	82,25 %	-	80,25%	81,00%	1.331.867.514	82,00%	784.633.813	83,00 %	3.135.200.234			

Kode	Misi					Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
	Tujuan							Realisasi 2020		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
	Sasaran							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	
	Program							3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
						Meningkatnya Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi	Persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	5,82	-10,83		2,16		4,81		5,69		6,91		6,91		
							Persentase pertumbuhan PDRB sektor jasa		-0,93		0,58		0,76		2,78		3,42		3,42		
2	1	0				Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase koperasi aktif dengan omzet meningkat	0	30%	-	30%		30%		30%		30%		30%		
							Persentase koperasi yang dibina dan jenis usahanya bertambah	-	-	-	2,5%		2,5%		2,5%		2,5%		2,5%		
											148.050.000		224.161.900		170.000.000		170.000.000		712.211.900		
																				Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
2	2	1				Program Peningkatan Iklim Investasi dan Ralisasi Investasi	Persentase investor yang merealisasikan investasi	-	19,23	248.406.789	-	-	-	-	-	-	-	19,23	248.406.789		
2	2	1				Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	Persentase Pengaduan Pelayanan Perizinan terselesaikan	-	100	475.791.083	-	-	-	-	-	-	-	100	475.791.083		
2	1	0				Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan penanaman modal	-	-	-	0		100%	161.250.000	100%	254.312.500	0	116.587.500	0	342.150.000	
2	1	0				Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Investor yang Merealisasikan Investasinya	-	19,23	-	13%	373.118.200	26%	294.755.750	32%	300.650.865	39%	306.663.900	39%	1.275.188.715	
2	1	0				Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase pelayanan perizinan terselesaikan	-	-	-	80%	876.549.000	85%	626.851.000	90%	696.500.000	95%	756.500.000	95%	2.733.930.000	
2	1	0				Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan yang melaporkan LKPM	-	-	-	80 perusahaan	525.800.000	100 perusahaan	525.800.000	100 perusahaan	535.000.000	100 perusahaan	546.000.000	100 perusahaan	2.132.600.000,00	
2	1	0				Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase jenis izin yang diproses secara elektronik	-	-	-	90%	83.200.000	100%	174.061.400	100%	200.000.000	100%	210.000.000	100%	615.661.400	
3	3	1				Program Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan	Persentase Peningkatan Pendapatan Pelaku Usaha Perikanan	1	1		-	-	-	-	-	-	-	1			
							Rasio Pendapatan pelaku usaha perikanan dengan biaya produksi	-	2,25	496.518.752	-	-	-	-	-	-	-	2,25	496.518.752		
																				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	

Kode	Misi					Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
	Tujuan							Realisasi 2020		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
	Sasaran							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	
	Program							5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2	2	0				Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase seni budaya yang dilestarikan	4%	-	4%	4%	1.924.765.097	35%	1.256.014.150	35%	3.932.500.000	40%	4.325.750.000	40%	15.083.250.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga
2	2	0				Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase benda/bangunan cagar budaya yang dilestarikan	21%	-	21%	200.000.000	21%	91.547.225	21%	242.000.000	21%	266.200.000	21%	928.200.000		
3	3	1				Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengawasan Perdagangan Non Pasar Rakyat	Persentase Pertumbuhan Perdagangan Non Pasar Rakyat	-	-	1,76%	861.719.402	-	-	-	-	-	-	-	1,76%	861.719.402	Dinas Perdagangan
3	3	1				Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal	Jumlah Barang Kena Cukai ilegal	0	-	0	46.401.600	-	-	-	-	-	-	0	46.401.600		
3	3	0				Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase perusahaan yang memperbarui perijinan	100%	-	100%	388.870.000	100%	107.083.000	100%	155.000.000	100%	155.000.000	100%	600.100.000	Dinas Perdagangan	
3	3	0				Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Bahan Pokok dengan Harga Stabil	100%	-	100%	-	-	77.500.800	-	-	-	-	-	-		867.724.000
							Persentase pelaksanaan pengawasan bahan pokok dan barang penting	100%	-	100%	77.966.680	100%	77.500.800	100%	196.000.000	100%	240.000.000	100%	100%		
3	3	0				Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase UTTP dan BDKT yg telah melakukan tera dan pengawasan BDKT	100%	-	100%	342.050.000	100%	216.946.035	100%	287.000.000	100%	287.000.000	100%	1.102.019.000		
3	3	0				Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	jumlah produk perdagangan yang dipromosikan	-	-	15 produk	-	-	-	-	-	-	-	15 produk	-		
							Persentase produk perdagangan yang dipromosikan	100%	-	100%	379.622.600	100%	243.423.850	100%	726.000.000	100%	726.000.000	100%	3.849.545.000		
3	3	1				Program Pengembangan Industri Kecil Menengah	Persentase IKM yang berstandart	17,09	-	19,63 %	440.979.658	-	-	-	-	-	-	19,63 %	440.979.658	Dinas Tenaga Kerja	
3	3	1				Program Pembinaan Industri	Persentase IKM yang melaksanakan GMP (Good Manufacturing Practice)	80	-	100%	41.523.000	-	-	-	-	-	-	100%	41.523.000		

Kode	Misi					Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
	Tujuan							Realisasi 2020		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	
	Sasaran							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
	Program							3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14
						Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase tersedianya Dokumen Induk Perindustrian	-	-	-	100%	100%	364.324.050	100%	615.000.000	100%	615.000.000	100%	2.945.151.320	
3	3	0	2				persentase IKM yang mutu produk dan kapasitasnya meningkat	-	-	-	2,5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	2.945.151.320	
						Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase IKM yang mengikuti Publikasi Produk	-	-	-	12,80%	12,80%	591.025.135	12,80%	610.000.000	12,80%	610.000.000	12,80%	2.336.000.000	
3	3	0	4				persentase IKM yang mutu produk dan kapasitasnya meningkat	-	-	-	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	2.336.000.000	
						Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan dan Stabilitas Kehidupan Sosial Masyarakat	Indeks Ketentraman		76,87		76,95		77,05		77,15		77,2		77,2	
							Indek Gini	0,35	0,39		0,38		0,37		0,36		0,35		0,35	
						Pengurangan Kemiskinan	Angka Kemiskinan	4,35	4,98		4,97		4,96		4,95		4,94		4,94	
2	2	1	5			Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	95,4	95,04		-	-	-	-	-	-	-	95,04	707.485.783	
							Indeks Ketahanan Pangan	-	80,64	707.485.783	-	-	-	-	-	-	-	80,64	707.485.783	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	0	0	3			Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Peningkatan Skor Pola Pangan Harapan	-	-	-	95,8	-	1.095.000.000	-	1.287.200.000	-	1.307.500.000	95,8	4.977.626.000	
							Persentase Angka Kecukupan Energi (%)	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4.977.626.000	
2	0	9				Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rentan dan Rawan Pangan	-	-	-	-	-	-	25%	60.000.000	22%	60.000.000	22%	120.000.000	
2	0	0	5			Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Peningkatan Sample Pangan Aman yang Teruji (%)	-	-	-	80	-	175.000.000	-	318.000.000	-	335.000.000	80	1.039.622.000	
							Persentase Pangan Segar Aman yang Teruji (%)	-	-	-	80	80	80	80	80	80	80	80	1.039.622.000	
3	3	1	6			Program Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Peternakan	Persentase Peningkatan Pendapatan Pelaku Usaha Peternakan	2	2	375.352.624	-	-	-	-	-	-	-	2	375.352.624	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Kode	Misi				Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
	Tujuan						Realisasi 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD						
	Sasaran											K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.
	Program						5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15
1	2	3	4	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Rasio pendapatan pelaku usaha peternakan dengan biaya produksi	-	1.4	-	-	-	-	-	-	-	-	1.4	-	
3	2	0		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Pengembangan Prasarana yang Berfungsi dengan baik (%)	0	0	50	29.653.000	50	542.900.000	75	3.750.000.000	100	4.950.000.000	100	8.900.653.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	2	0		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Jumlah Hewan dan Produk asal Hewan yang Terawasi (%)	0	0	75%	478.050.000	75%	175.000.000	-	533.700.000	-	543.700.000	75%	1.730.450.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	7	4			Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit hewan Menular (%)	0	50,86	10		10		10		10		10		
3	2	0		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Lahan Aman Bencana Pertanian (%)	0	0	70	171.200.400	72	111.750.000	74	350.000.000	76	400.000.000	76	1.032.950.400	
3	2	0		Program Perizinan usaha Pertanian	Persentase kelompok tani yang memiliki Izin Usaha Pertanian (%)	0	0	-	-	10	50.000.000	12	100.000.000	15	150.000.000	15	300.000.000	
3	2	0		Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Jumlah SDM Pertanian Terlatih (%)	0	0	15	131.363.000	20	148.837.400	20	800.000.000	20	800.000.000	20	1.885.840.400	
1	0	0		Program Penanganan Bencana	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana	-	100%	100%	344.885.800	100%	628.979.400	100%	859.284.765	100%	954.760.850	100%	2.787.910.815	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	0	0		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	-	-	100%	103.194.134	-	186.106.080	-	213.236.600	-	236.929.556	-	475.720.016	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					Persentase Pengelolaan Taman makam Pahlawan dalam kondisi baik	-	-	100%		100%		100%		100%				

Kode	Misi					Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
	Tujuan							Realisasi 2020		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	
	Sasaran							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
	Program							5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
					Meningkatnya stabilitas kehidupan sosial masyarakat	Indeks Kerukunan	B (73,95) harmonis	B skor 74,0306 (Harmonis)		B skor 74,30 (Harmonis)		B skor 76,40 (Harmonis)		B skor 78,40 (Harmonis)		B skor 80,00 (Harmonis)				
						Indeks rasa aman	73,55	76,05		76,15		76,2		76,27		76,35				
1	0	5	1	5	Program Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	Persentase kasus Penegakan Perda yang diselesaikan	100	100	276.423.739	-	-	-	-	-	-	100	276.423.739	Satuan Polisi Pamong Praja		
1	0	5	1	8	Program Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (response time rate)	100%	100	1.193.872.410	-	-	-	-	-	-	100	1.193.872.410	Satuan Polisi Pamong Praja		
1	0	5	1	9	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Persentase Korban Bencana Alam yang Tertangani	100	100%		-	-	-	-	-	-	100%		Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
						Persentase Tingkat Pemenuhan atau Kecukupan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana	100	100%	1.485.457.021	-	-	-	-	-	-	100%				
						Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate)	-	100%		-	-	-	-	-	-	100%				
						Persentase Early Warning System (EWS) di daerah rawan bencana	-	100%		-	-	-	-	-	-	100%				
1	0	5	0	4	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100%	100%	-	100%	1.285.321.000	100%	1.289.528.000	100%	2.336.187.000	100%	2.361.187.000	100%	8.293.882.000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	0	5	0	3	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Korban Bencana yang ditangani	100%	100%	-	100%		100%		100%		100%			Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
						Persentase Tingkat Pemenuhan atau Kecukupan Sarana Dan Prasarana Penanggulangan Bencana	100%	100%	-	100%	1.377.859.000	0%	1.717.005.000	0%	2.030.000.000	0%	2.275.000.000	0%		7.411.174.000

Kode	Misi					Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
	Tujuan							Realisasi 2020		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	
	Sasaran							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
	Program							3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14
4	4	1	0	5	8	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Cakupan Pembinaan Wasbang	100%	382.121.428	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	382.121.428	
								100%		-	-	-	-	-	-	-	100%			
4	4	1	0	6	8	Program Peningkatan Pemahaman Ideologi dan HAM serta Pencegahan Konflik Sosial	Konflik Horizontal di dalam masyarakat	0 konflik	0 konflik	744.799.589	-	-	-	-	-	-	-	0 konflik	744.799.589	
4	4	1	0	7	8	Program Pendidikan Politik Masyarakat dan Orkemas	Persentase Parpol dan orkemas yang memahami regulasi	100%	100%	178.297.043	-	-	-	-	-	-	-	100%	178.297.043	
4	4	1	0	8	8	Program Pembinaan Orkesmas dalam kehidupan demokrasi	Persentase Orkemas	72,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72,37	-	
8	0	0	1	2	2	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase pemahaman masyarakat dibidang politik	-	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	100%	2.473.898.500	
							Persentase pendidikan politik kepada Partai Politik Pemenang Pemilu	100%	100%	-	100%	871.058.100	100%	1.139.076.250	100%	1.159.379.650	100%	1.275.317.600		100%
8	0	0	1	3	3	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Orkemas berbadan hukum	40%	-	45%	-	-	-	-	-	-	-	45%	4.359.736.850	
							Persentase Status Kelembagaan Orkemas	81,8%	72,91 %	-	68%	272.985.000	71%	222.985.000	73%	363.343.000	77%	399.677.300		77%
8	0	0	1	4	4	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase koordinasi yg dilakukan dengan pemangku kepentingan	100%	100%	100%	536.633.650	100%	553.661.370	100%	735.875.052	100%	809.462.557	100%	1.366.317.150	
							Konflik horisontal di dalam masyarakat	0 konflik	0 konflik	-	0 konflik	1.454.339.864	0 konflik	1.803.048.050	-	2.094.339.450	-	2.303.773.395		0 konflik
8	0	0	1	5	5	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase konflik yang terfasilitasi	-	-	100%	484.692.000	100%	553.661.370	100%	735.875.052	100%	809.462.557	100%	2.699.006.929	

Kode	Misi					Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
	Tujuan							Realisasi 2020		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD				
	Sasaran							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.			
	Program							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15
8	0	0				Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial																	
	1	6				Persentase pemahaman masyarakat dibidang politik	-	-	-	100%													
						Persentase pendidikan politik kepada Partai Politik Pemenang Pemilu	100%	100%	-	100%	871.058.100	100%	1.139.076.250	100%	1.159.379.650	100%	1.275.317.600	100%	7.805.255.850				

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Program pembangunan daerah disusun untuk menggambarkan keterkaitan program perangkat daerah dalam mencapai sasaran pembangunan melalui strategi dan arah kebijakan yang dipilih. Perencanaan program perangkat daerah dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu:

1. pemenuhan pelayanan wajib dasar masyarakat berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
2. penjabaran visi dan misi Walikota dan wakil Walikota terpilih;
3. berbasis permasalahan serta isu strategis daerah;
4. peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah serta kualitas lingkungan hidup;
5. peningkatan koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah.

Indikasi rencana program prioritas merupakan program penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diarahkan untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024. Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab daerah, pemerintah Kota Madiun menyusun berbagai program yang disesuaikan dengan prioritas dan kebutuhan daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kota Madiun. Program-program tersebut disertai dengan kebutuhan pendanaan indikatif dan target kinerja terukur yang akan dilaksanakan oleh semua Organisasi Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kota Madiun.

Visi dan misi pembangunan Kota Madiun yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019–2024 diimplementasikan melalui berbagai bentuk program pembangunan. Program tersebut harus mencerminkan kebutuhan pembangunan yang mendesak sehingga perlu dituangkan kedalam kebijakan umum dan program prioritas disertai kebutuhan pendanaan yang merupakan program unggulan Pemerintah Kota Madiun. Dengan demikian, kebijakan umum dan program unggulan yang disampaikan dalam RPJMD ini hanya yang bersifat prioritas, sementara untuk kebijakan umum dan program yang terkait penyelenggaraan maupun operasional pemerintahan dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemilahan program-program pembangunan guna tersusunnya program prioritas yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dan hak-hak dasar masyarakat serta pencapaian keadilan yang berkesinambungan dan berkelanjutan.

Program prioritas pembangunan daerah dibagi menjadi tiga prioritas, diantaranya :

1. Prioritas I, yaitu dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar, antara lain kebutuhan urusan Pendidikan, Urusan Kesehatan, Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Urusan Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat serta Urusan Sosial serta Pemenuhan Urusan Wajib Bukan Pelayanan dasar dan Urusan Pilihan.
2. Prioritas II, yaitu dialokasikan untuk pendanaan program prioritas dalam rangka pencapaian visi dan misi Walikota dan wakil Walikota Kota Madiun periode 2019-2024, yang merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan Kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana. Program tersebut harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah.
3. Prioritas III, merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja-belanja pada Urusan Pemerintah Lainnya.

Rincian mengenai program prioritas beserta anggarannya dapat dilihat dalam tabel 7.1.

Tabel 7.1
Prioritas Alokasi Program Prioritas Kota Madiun Tahun 2019-2024

Uraian	PROYEKSI					
	2019R	2020R	2021	2022	2023	2024
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah	899.202.218.298	816.784.481.163	757.847.498.801	607.269.555.199	612.340.776.720	621.227.905.163
Prioritas I	395.648.976.051	359.385.171.712	333.452.899.473	267.198.604.288	269.429.941.757	273.340.278.272
Prioritas II	377.664.931.685	343.049.482.088	318.295.949.497	255.053.213.184	257.183.126.222	260.915.720.168
Prioritas III	125.888.310.562	114.349.827.363	106.098.649.832	85.017.737.728	85.727.708.741	86.971.906.723

Kerangka pendanaan pembangunan daerah perlu memperhatikan kapasitas riil kemampuan keuangan. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa program pembangunan daerah dapat didanai dengan baik. Idealnya Kapasitas Riil suatu daerah harus mampu memenuhi kebutuhan program pembangunan (belanja langsung) dalam kerangka pendanaan. Tabel 7.2. menunjukkan proyeksi Kapasitas Riil beserta proporsi belanja langsung dan tidak langsung Kota Madiun.

Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah selama periode 2019-2024 diproyeksikan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, kapasitas riil kemampuan keuangan sebesar Rp. 899.202.218.298 diprediksikan mengalami penurunan menjadi Rp. 742.624.007.849 tahun 2024. Penurunan ini sejalan dengan kondisi perekonomian yang mengalami penurunan sebagai dampak Covid19.

Tabel 7.2
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kota Madiun 2019 -2024

	2019R	2020R	2021	2022	2023	2024
Kapasitas Riil Kemampuan keuangan Daerah	899.202.218.298,35	816.784.481.162,85	757.847.498.801,28	607.269.555.199,00	612.340.776.719,87	621.227.905.162,90
BELANJA OPERASI	839.939.781.749,69	816.358.776.801,53	939.902.569.530,00	959.324.726.172,00	966.093.763.849,82	970.640.962.947,82
Belanja Pegawai	440.222.382.579,38	441.683.138.649,00	478.425.879.983,00	485.258.678.433,00	499.476.757.711,09	507.118.752.104,07
Belanja Barang dan Jasa	366.995.675.620,23	349.882.673.481,00	425.059.231.547,00	436.594.527.461,00	440.960.472.735,61	444.532.252.564,77
Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-
Belanja Hibah	15.603.619.810,08	11.938.091.671,53	13.765.706.000,00	13.572.686.278,00	10.600.267.983,12	8.300.009.830,78
Belanja Bantuan Sosial	17.118.103.740,00	12.854.873.000,00	22.651.752.000,00	23.898.834.000,00	15.056.265.420,00	10.689.948.448,20
BELANJA MODAL	307.800.742.344,06	191.011.897.074,57	197.738.448.365,00	165.395.287.479,00	170.380.303.984,26	175.695.652.598,13
Belanja Modal Tanah	-	-	-	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	68.460.669.520,00	47.752.974.268,64	50.500.943.323,00	28.304.237.988,00	30.568.577.027,04	32.708.377.418,93
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	48.758.211.485,26	38.202.379.414,91	56.229.035.949,00	39.281.239.379,00	40.066.864.166,58	41.268.870.091,58
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	184.022.541.935,80	100.281.245.964,15	88.974.356.300,00	95.695.457.752,00	97.609.366.907,04	99.561.554.245,18
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.888.082.876,00	4.775.297.426,86	2.034.112.793,00	2.114.352.360,00	2.135.495.883,60	2.156.850.842,44
Belanja Modal Aset Lainnya	3.671.236.527,00					
BELANJA TAK TERDUGA	118.877.262,00	6.321.154.916,00	3.181.125.198,00	5.279.740.259,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
Belanja Tidak Terduga	118.877.262,00	6.321.154.916,00	3.181.125.198,00	5.279.740.259,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
BELANJA TRANSFER	651.920.000,00	700.062.000,00	-	-	-	-
Belanja Transfer Ke Daerah Lain	651.920.000,00	700.062.000,00	-	-	-	-
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	1.148.511.321.355,75	1.014.391.890.792,10	1.140.822.143.093,00	1.129.999.753.910,00	1.137.474.067.834,07	1.147.336.615.545,94
% Kapasitas Riil terhadap Belanja	78%	81%	66%	54%	54%	54%

Tabel 7.3
Rincian Alokasi Program Prioritas Kota Madiun Tahun 2020-2024

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2019)	KINERJA DAN PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab			
				Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp				
				Kinerja	Pendanaan	Target	anggaran	Target	anggaran	Target	Rp	Target	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
PRIORITAS I																			
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar																			
Urusan Pendidikan																			
Program Permendagri 13 Tahun 2006																			
1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
				Program Pendidikan Dasar	Angka Partispasi Murni SD/SMP	152,99%	132.26%	104.431.778.931	-	-	-	-	-	-	-	132.26 %	104.431.778.931	Dinas Pendidikan	
1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
				Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Pendidik dan Tenaga kependidikan yang lulus pelatihan	100	100%	543.850.985	-	-	-	-	-	-	100%	543.850.985			
					Persentase Jumlah tenaga pendidik yang bersertifikasi	76,66			-	-	-	-	-	-	76,66				
Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan																			
Program Permendagri 90 Tahun 2019																			
1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	-	-	-	A skor	199.816.763.917	A skor	205.213.092.252	A skor	202.345.219.300	A skor	202.345.219.300	A skor	809.720.294.769	Dinas Pendidikan
1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
				Program Pengelolaan Pendidikan	Wajib Belajar 9 Tahun	100%	100%	-	100%	119.094.672.764	100%	67.421.236.524	100%	129.743.179.643	100%	131.784.897.563	100%	448.043.986.494	
1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
				Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Persentase Tenaga Pendidik Bersertifikasi yang Berprestasi	78,98%	-	-	20%	1.959.105.000	20%	1.658.000.000	25%	2.450.385.000	25%	2.450.385.000	25%	8.517.875.000	
Urusan Kesehatan																			
Program Permendagri 13 Tahun 2006																			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2019)	KINERJA DAN PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp		
				Kinerja	Pendanaan	Target	anggaran	Target	anggaran	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	0 2 2	0 2 2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks Keluarga Sehat	0,33	0,43	0,39	-	-	-	-	-	0,39	-	-	-	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	-	66,67%	50,00%	1.974.015.887.78	66,67%	82.687.756.549	75%	162.988.308.912	75%	99.820.515.624	75%	478.806.069.050		
1	0 2 3	0 2 3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan yang sesuai standar	-	80%	89%	235.589.050	90%	279.413.000	91%	225.252.245	92%	232.009.812	92%	975.711.057	
1	0 2 4	0 2 4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Fasilitas Pelayanan Farmasi, Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) dan Depot Air Minum (DAM) sesuai Standar	-	85%	86%	178.376.700	87%	226.563.000	88%	233.359.890	89%	240.360.686	89%	902.553.576	
1	0 2 5	0 2 5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang mengalami kenaikan strata	68,63%	60,38%	61,50%	1.130.949.900	62%	2.492.754.000	62,50%	1.157.179.250	63,00%	1.191.894.628	63,00%	11.526.646.878	
			Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman														
			Program Permendagri 13 Tahun 2006														
1	1 0 4	1 0 6	Program Pengelolaan RTH, PJU dan Pemakaman	Persentase RTH, Penerangan Jalan dan Pemakaman yang dikelola	64,96	72,01	16.667.680.618	-	-	-	-	-	-	-	72,01	16.667.680.618	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2019)	KINERJA DAN PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp	
				Kinerja	Pendanaan	Target	anggaran	Target	anggaran	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Indeks Pengelolaan RTH, PJU dan Permakaman		74,59%		-	-	-	-	-	-	-	-	74,59%		
	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman															
	Program Permendagri 90 Tahun 2019															
1 0 0 4 5	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	100%	100%	-	100%	19.023.618.740	100%	22.490.417.230	100%	27.000.000.000	100%	28.000.000.000	100%	99.688.535.570	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat															
	Program Permendagri 13 Tahun 2006															
1 1 0 5 6	Program Pembinaan, Penertiban dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Persentase Kasus K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) yang diselesaikan	98,83%	97%	1.450.879.321	-	-	-	-	-	-	-	-	97%	1.450.879.321	Satuan Polisi Pamong Praja
1 1 0 5 7	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kota	1,3 orang tiap RT	1,3 orang tiap RT	287.772.906	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3 orang tiap RT	287.772.906	
	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat															
	Program Permendagri 90 Tahun 2019															
1 0 5 2	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Kasus K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Ketertiban	98%	97%	-	97%	4.683.621.000	97%	5.117.465.000	97%	7.587.413.000	97%	5.232.413.000	97%	22.565.746.000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2019)	KINERJA DAN PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp		
				Kinerja	Pendanaan	Target	anggaran	Target	anggaran	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota															
	Urusan Sosial																
	Program Permendagri 13 Tahun 2006																
1	0	1	Program Perlindungan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang tertangani	100	100	3.155.942.559	-	-	-	-	-	-	-	100	3.155.942.559	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial																
	Program Permendagri 90 Tahun 2019																
1	0	0	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang berperan aktif dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial	-	-	-	90%									Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		2		Persentase PSKS yang berperan aktif dalam Pemberdayaan Sosial	-	-	-	-	2.210.456.099	3.860.177.515	4.375.378.420	4.812.916.262	19.260.071.368				
								50%		58%	66%	66%					
1	0	0	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial	-	-	-	18,7%									Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		4		Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	-	-	-	-	1.508.844.750	1.742.901.123	2.049.045.215	2.253.949.737	6.045.896.075	100%	100%		
1	0	0	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	-	-	-	100%									
		5						100%	9.360.726.880	11.312.409.780	12.570.286.850	13.305.949.240	46.549.372.750	100%			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2019)	KINERJA DAN PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp		
				Kinerja	Pendanaan	Target	anggaran	Target	anggaran	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar																
	Urusan Tenaga Kerja																
	Program Permendagri 13 Tahun 2006																
2	2	1	Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	79	73,04%	350.882.216	-	-	-	-	-	-	-	73,04%	350.882.216	Dinas Tenaga Kerja
0	0	5		Persentase lulusan pelatihan yang mempunyai sertifikat kompetensi dasar	98	100		-	-	-	-	-	-	-	100		
	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja																
	Program Permendagri 90 Tahun 2019																
2	0	0	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja yang Dilatih	21,75%	0,69%	-	23%	23%	-	-	-	-	23%	3.817.970.730	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
	7	3		Persentase jumlah peserta pelatihan yang berbasis kompetensi	-	-	-	20%	418.950.040	25%	862.016.290	30%	1.345.000.000	35%			1.345.000.000
2	0	0	Program Hubungan Industrial	Persentase Penurunan Kasus-kasus Perselisihan Hubungan Industrial	-	-	-	10%	10%	-	-	-	-	10%	7.949.921.450	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
	7	5		persentase perusahaan yang mengesahkan peraturan perusahaan	-	-	-	16%	1.682.439.130	16%	1.719.214.240	16%	2.274.134.040	16%			2.274.134.040

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2019)	KINERJA DAN PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
				Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp			
				Kinerja	Pendanaan	Target	anggaran	Target	anggaran	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	Urusan Perhubungan																	
	Program Permendagri 13 Tahun 2006																	
0	0	3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	3.010.026.500	-	-	-	-	-	-	-	100%	3.010.026.500	Dinas Perhubungan	
	Urusan Komunikasi dan Informatika																	
	Program Permendagri 13 Tahun 2006																	
2	2	1	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Sasaran Penyebaran Informasi Publik	75	75	5.585.257.703	-	-	-	-	-	-	-	75	5.585.257.703	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	2	1	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Pelayanan Publik yang sudah terintegrasi	25	33,04	9.342.188.500	-	-	-	-	-	-	33,04	9.342.188.500			
	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika																	
	Program Permendagri 90 Tahun 2019																	
2	1	0	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase OPD yang memenuhi standart layanan informasi publik	-	75%	-	75%	4.619.278.000	77%	4.788.605.000	80%	5.500.000.000	82%	5.900.000.000	82%	20.807.883.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	1	0	Program Aplikasi Informatika	Nilai Domain Layanan SPBE Administrasi Pemerintahan	-	3,6 skor	-	3,6 skor	-	-	-	-	-	3,6 skor	-	-		
				Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh	100%	100%	-	100%	9.760.450.600	100%	10.587.483.000	-	11.510.000.000	-	11.860.000.000	100%	43.717.933.600	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2019)	KINERJA DAN PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp		
				Kinerja	Pendanaan	Target	anggaran	Target	anggaran	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Dinas Kominfo															
		Persentase perangkat daerah yang saling terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	-	-	-	100%		100%				100%			100%		
		Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah															
		Program Permendagri 13 Tahun 2006															
2	2 1 1	1 5 1 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase koperasi aktif	98,05	98,7	612.897.052	-	-	-	-	-	-	-	98,7	612.897.052	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro	
2	2 1 1	1 6 1 Program Pengembangan Sistem Pendukung Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro	Persentase Pertumbuhan usaha mikro	0,4	0,42	505.342.770	-	-	-	-	-	-	-	0,42	505.342.770		
		Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah															
		Program Permendagri 90 Tahun 2019															
2	1 7	0 5 Program Pendidikan dan Latihan	Persentase koperasi bersertifikat NIK	0	81,29%	-	80,13%	750.310.000	86,50%	500.318.900	-	773.058.000	-	773.058.000	86,50%	2.796.744.900	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2019)	KINERJA DAN PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp		
				Kinerja	Pendanaan	Target	anggaran	Target	anggaran	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Perkoperasian	Persentase jumlah koperasi yang disetujui permohonan bersertifikat NIK	-	-	-	75,0%		75,0%		75,0%		75,0%		75,0%			dan Menengah
2	1	0	Program Pengembangan UMKM	Persentase Usaha Mikro terfasilitasi yang beromzet naik	-	-	7%	829.985.000	309.850.000	-	715.000.000	-	715.000.000	7%	2.569.850.000		
	7	8	Persentase Usaha Mikro dibina yang beromzet naik	-	-	7%	7,33%			8%		8%					
Urusan Kepemudaan dan Olah Raga																	
Program Permendagri 13 Tahun 2006																	
2	2	1	Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga	Jumlah Pemuda Berprestasi yang dikirim kompetisi	16	2 orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga
	1	5	Jumlah Atlit yang ikut kejuaraan di tingkat Provinsi dan Nasional	189	124 orang	1.640.940.745	-	-	-	-	-	-	-	-	1.640.940.745		
Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga																	
Program Permendagri 90 Tahun 2019																	
2	1	0	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Jumlah medali yang diraih di bidang olahraga	50 medali	79 medali	-	33 medali	3.511.442.880	20%	2.036.668.700	-	2.239.335.570	33 medali	10.136.838.550	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga	
	9	3	Prosentase peningkatan pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	-	-	-	25%	30%		30%							
Urusan Kebudayaan																	
Program Permendagri 13 Tahun 2006																	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2019)	KINERJA DAN PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp		
				Kinerja	Pendanaan	Target	anggaran	Target	anggaran	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2	2 1 5 6	1 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase Kekayaan Budaya yang dipentaskan	31,6	4%	1.901.047.967	-	-	-	-	-	-	-	-	1.901.047.967	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemuda an, dan Olah Raga	
Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan																	
Program Permendagri 90 Tahun 2019																	
2	2 2 3	0 Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina	100 orang	100 orang	-	100 orang	123.886.145	100 orang	123.886.145	100 orang	242.000.000	100 orang	266.200.000	500 orang	928.200.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemuda an, dan Olah Raga
Urusan Pemerintahan Pilihan																	
Urusan Pertanian																	
Program Permendagri 13 Tahun 2006																	
3	3 0 3	1 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Peningkatan Produktivitas Pertanian	7,2	6,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			Rasio Pendapatan Usaha Pertanian dengan biaya Produksi	-	1,81	2.447.921.843	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.447.921.843	
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian																	
Program Permendagri 90 Tahun 2019																	
3	2 7 2	0 Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Efektifitas Sarana Pertanian (%)	0	0	-	50	1.608.737.600	55	1.781.771.600	60	5.558.150.000	65	5.608.150.000	65	14.556.809.200	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Urusan Perdagangan																	
Program Permendagri 13 Tahun 2006																	
3	3 0 6	1 Program Pengelolaan Pasar Rakyat	Jumlah Omset Pasar Rakyat	547.949 Juta (Rp)	3,106,554,387,840	5.113.702.485	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.113.702.485	Dinas Perdagangan
Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan																	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2019)	KINERJA DAN PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp	
				Kinerja	Pendanaan	Target	anggaran	Target	anggaran	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Program Permendagri 90 Tahun 2019															
3	303	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pasar sesuai standar	-	-	5,88%		-		-		-		-		
			Persentase pasar yang dikelola sarana distribusinya	0	0	100%	8.242.965.872	100%	6.261.231.818	100%	3.256.000.000	100%	3.256.000.000	100%	29.885.229.000	Dinas Perdagangan
	Unsur Staf															
	Program Permendagri 13 Tahun 2006															
4	401	2 Program Penataan Daerah Otonom Baru	Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban Kepala daerah yang tepat Syarat	6 dokumen	6 dokumen		817.968.835	-	-	-	-	-	-	6 dokumen	817.968.835	Sekretariat Daerah (Bagian Administrasi Pemerintahan Umum)
			Penyampaian LKPj Tepat Waktu	tepat waktu				-	-	-	-	-	-	tepat waktu		
4	401	7 Program Peningkatan Kualitas Hidup Beragama	Persentase Kegiatan Keagamaan yang difasilitasi	100	100		1.018.377.035	-	-	-	-	-	-	100	1.018.377.035	Sekretariat Daerah (Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat)
4	401	2 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Produk Hukum yang berkualitas	100	100%		847.826.505	-	-	-	-	-	-	100%	847.826.505	Sekretariat Daerah (Bagian Hukum)
4	401	3 Program Pengembangan Kinerja dan Kelembagaan Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Capain Kinerja (LKj Perangkat Daerah) Bernilai Sangat Baik (≥100)	79,41	94,12%		534.955.164	-	-	-	-	-	-	94,12%	534.955.164	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2019)	KINERJA DAN PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp		
				Kinerja	Pendanaan	Target	anggaran	Target	anggaran	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
4	4	2	Program Peningkatan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah dan Pelayanan Publik	Nilai Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik	2,4 (cukup dengan catatan)	2,75	547.003.517	-	-	-	-	-	-	-	2,75	547.003.517	
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan																	
Sekretariat Daerah																	
Program Permendagri 90 Tahun 2019																	
4	0	0	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Indeks Kepuasan Masyarakat di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	-	-	-	80,08 nilai	-	-	-	-	-	80,08 nilai	-	-	Sekretariat Daerah (Bagian Pemerintan)
			Persentase Penyediaan Data Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
								1.524.570.550		2.202.809.000		2.475.000.000		2.495.000.000		9.256.399.000	
4	0	0	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Indeks Kepuasan Masyarakat di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	-	-	-	80,08 nilai	-	-	-	-	-	80,08 nilai	-	-	Sekretariat Daerah (Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat)
			Persentase Penyediaan Data Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
								6.849.063.710		7.201.761.318		7.921.937.450		8.642.113.582		30.614.876.059	
4	0	0	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Indeks Kepuasan Masyarakat di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	-	-	-	80,08 nilai	-	-	-	-	-	80,08 nilai	-	-	Sekretariat Daerah (Bagian Hukum)
			Persentase Penyediaan Data Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
								658.490.000		941.759.300		953.535.800		1.048.890.000		3.744.131.160	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2019)	KINERJA DAN PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp	
				Kinerja	Pendanaan	Target	anggaran	Target	anggaran	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4 4 0 7 4	1 Program Perencanaan Fisik dan Sarana Prasarana Kota	Persentase Capaian target program pembangunan bidang prasarana wilayah	-	100%	515.325.581	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	515.325.581	
		Persentase Dokumen Perencanaan pembangunan prasarana wilayah yang dapat dimanfaatkan	100%	-		-	-	-	-	-	-	-	-	100%		
Perencanaan																
	Program Permendagri 90 Tahun 2019															
5 0 1 2	0 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi sesuai ketentuan	100%	100%	-	100%	1.579.333.325	100%	1.317.008.885	100%	1.669.300.135	100%	1.669.300.135	100%	6.857.358.025	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan																
	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan															
	Program Permendagri 13 Tahun 2006															
4 0 6	1 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur	Persentase Tercukupinya Usulan Diklat Aparatur	100	113%	1.642.075.075	-	-	-	-	-	-	-	-	113%	1.642.075.075	Badan Kepegawaian Daerah
4 0 6	1 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase pengembangan dan pembinaan ASN	99,6	112%	814.211.395	-	-	-	-	-	-	-	-	112%	814.211.395	
4 0 6	1 Program Penataan Aparatur	Persentase Penempatan PNS Sesuai SKM	103,24	96%	288.459.697	-	-	-	-	-	-	-	-	96%	288.459.697	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2019)	KINERJA DAN PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp		
				Kinerja	Pendanaan	Target	anggaran	Target	anggaran	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Kepegawaian																
	Program Permendagri 90 Tahun 2019																
5	0 3 2	Program Kepegawaian Daerah	Nilai IKM Pelayanan Kepegawaian	87,97	87,62	-	87,52	2.032.523.200	87,6	2.644.572.260	87,7	2.775.000.000	87,7	2.800.000.000	87,7	10.636.280.960	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Pendidikan dan Pelatihan																
	Program Permendagri 90 Tahun 2019																
5	0 4 2	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase peningkatan kapasitas sesuai dengan keahlian dan kompetensi	-	-	-	100%	2.648.819.070	-	4.426.619.390	-	4.600.000.000.	-	4.600.000.000.	100%	19.998.851.865	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Persentase Realisasi Pengembangan SDM	-	-	-	10%		12%		13%		14%		14%		
	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan																
	Penelitian dan Pengembangan																
	Program Permendagri 13 Tahun 2006																
4	4 0 5 7	1 Program Pengembangan Kajian dan Penelitian	Persentase hasil penelitian/ kajian yang dapat dimanfaatkan	100%	100%	199.688.047	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	199.688.047	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Penelitian dan Pengembangan																
	Program Permendagri 90 Tahun 2019																
5	0 5 2	0 Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	persentase hasil penelitian/kajian yang dapat dimanfaatkan	100%	100%	-	100%	727.489.507	100%	874.737.757	100%	1.220.033.946	100%	1.220.033.946	100%	4.271.082.145	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2019)	KINERJA DAN PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp		
				Kinerja	Pendanaan	Target	anggaran	Target	anggaran	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
4409	1	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kelurahan	Persentase Usulan Musrenbang Kecamatan yang terakomodir dalam RKPD	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	198.987.534	Kecamatan Taman
			Persentase Peserta yang Memberikan Usulan	-	100%	198.987.534	-	-	-	-	-	-	-	100%			
4409	1	Program Dana Kelurahan	Indek Perkembangan Kelurahan	0,73	100%	5.629.024.604	-	-	-	-	-	-	-	100%	5.629.024.604		
Unsur Kewilayahan																	
Kecamatan																	
Program Permendagri 90 Tahun 2019																	
701	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	18 usulan	18 usulan	-	18 usulan	18 usulan	-	-	-	-	-	18 usulan	13.421.306.895	Kecamatan Kartoharjo	
			Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah Kecamatan Kartoharjo	-	100%	-	100%	4.028.206.193	100%	3.052.276.276	100%	3.465.000.000	100%	3.480.750.000			100%
701	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	-	-	-	18 usulan	18 usulan	-	-	3.433.080.378	-	3.447.234.397	18 usulan	13.663.323.270	Kecamatan Manguharjo	
			Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi		100%		100%	4.743.071.967	100%	2.644.100.425	100%		100%				

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2019)	KINERJA DAN PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp		
				Kinerja	Pendanaan	Target	anggaran	Target	anggaran	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah Kecamatan Manguharjo															
7	0 1 3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	90 usulan	90 usulan	18 usulan		18 usulan		-		-		18 usulan			
		Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah Kecamatan Taman			100%	100%	3.373.446.350	100%	3.210.061.090	100%	3.370.564.145	100%	3.539.092.352	100%	5.305.579.331	Kecamatan Taman	
PRIORITAS I TOTAL Rp.						341.376.427.780		557.689.380.055		533.600.798.818		539.560.122.056		551.299.788.313		2.523.526.516.988	
% Terhadap Belanja Daerah								49		42		39		39			
Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2019)	KINERJA DAN PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp		
				Kinerja	Pendanaan	Target	anggaran	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
PRIORITAS II																	
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar																	
Urusan Pendidikan																	
Program Permendagri 13 Tahun 2006																	
1	1 0 5 1	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Pengolahan database informasi pendidikan dan evaluasi pelaporan berbasis TIK	100%	100%		239.807.439								100%	239.807.439	Dinas Pendidikan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2019)	KINERJA DAN PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp	
				Kinerja	Pendanaan	Target	anggaran	Target	anggaran	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Persentase Sekolah Standar Nasional Pendidikan	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	-	
1 0 8 1	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Angka Partisipasi Kasar PAUD	106,70%	98.48%	4.703.194.291	-	-	-	-	-	-	-	-	98.48%	4.703.194.291	
1 0 9 1	Program Pendidikan NonFormal	Jumlah Lembaga yang terakreditasi	80	100%	464.060.253	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	464.060.253	
Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan																
Program Permendagri 90 Tahun 2019																
1 0 1 3	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Sekolah yang Berkurikulum SNP	100%	100%	-	100%	572.110.560	100%	3.480.307.628	100%	5.319.203.262	100%	5.324.203.262	100%	16.430.719.214	Dinas Pendidikan
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																
Program Permendagri 13 Tahun 2006																
1 0 3 5	Program Peningkatan Kualitas Pembangunan Gedung dan Infrastruktur Kota	Persentase bangunan gedung sesuai ketentuan	100	95,04	15.595.185.816	-	-	-	-	-	-	-	-	95,04	15.595.185.816	
1 0 3 7	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase Panjang Jalan Kota dalam Kondisi Baik	92,41	94.03%	57.038.311.374	-	-	-	-	-	-	-	-	94.03%	57.038.311.374	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 0 3 8	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Saluran/ Drainase/ Gorong-gorong	Persentase Panjang Drainase dalam Kondisi Baik/ Pembuangan air tidak tersumbat	89,75	90,40%	14.047.224.710	-	-	-	-	-	-	-	-	90,40%	14.047.224.710	
1 0 3 9	Program Pengendalian Banjir	Jumlah Titik/ Lokasi Banjir/ Genangan	12	12 Titik	7.217.269.810	-	-	-	-	-	-	-	-	12 Titik	7.217.269.810	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2019)	KINERJA DAN PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp	
				Kinerja	Pendanaan	Target	anggaran	Target	anggaran	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1 0 3	1 6	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	94			-	-	-	-	-	-	-	-			
1 0 3	2 0	Program Perencanaan, Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang	100%	86%	736.311.193	-	-	-	-	-	-	-	-	86%	736.311.193	
Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																
Program Permendagri 90 Tahun 2019																
1 3	0 2	Program Pengelolaan Sumberdaya Air (SDA)	-	-	-	20,05%	12.299.394.650	19,09%	8.369.843.440	18,47%	28.517.074.300	17,34%	31.368.781.730	17,34%	98.737.388.030	
1 3	0 3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	-	-	-	100%		100%	101.669.000	100%	111.835.900	100%	123.019.490	100%	336.524.390	
1 3	0 6	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	90,96%	90,40%	-	80,03%	22.274.002.000	80,06%	20.731.396.010	80,09%	48.653.618.200	80,12%	53.518.980.020	80,12%	165.621.452.220	
1 3	0 8	Program Penataan Bangunan Gedung	100%	100%	-	100%	20.857.814.000	100%	18.746.270.000	100%	25.922.380.000	100%	28.514.618.000	100%	98.616.248.000	
1 3	0 9	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	100%	100%	-	100%	19.966.147.160	100%	14.499.606.270	100%	21.178.289.462	100%	23.296.118.408	100%	81.160.898.290	
1 3	0 1	Program Penyelenggaraan Jalan	93,64%	94,03%	-	94,50%	58.330.391.462	95,00%	49.495.103.351	95,50%	109.548.668.724	96,00%	120.503.535.596	96,00%	384.418.242.032	
1 3	0 1	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	-	-	-	47,68%	500.000.000	62,83%	540.000.000	77,98%	594.000.000	94,95%	653.400.000	94,95%	2.287.400.000	

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2019)	KINERJA DAN PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
				Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp			
				Kinerja	Pendanaan	Target	anggaran	Target	anggaran	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		kompetensi																
1	0 3 2	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Ketaatan terhadap RTRW	100%		100%	-	100%	1.280.982.460	100%	1.880.000.000	100%	2.068.000.000	100%	2.274.800.000	100%	7.722.800.000	
	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman																	
	Program Permendagri 13 Tahun 2006																	
1	0 4 4	1 5	Program Lingkungan Sehat Perumahan Permukiman	Persentase Rumah tinggal layak huni dan bersantitas	99,26	99,65		-	-	-	-	-	-	-	-	99,65	1.969.696.172	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Indeks Perumahan Permukiman			99,65%		-	-	-	-	-	-	-	99,65%			
	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman																	
	Program Permendagri 90 Tahun 2019																	
1	0 4 2	0 2	Program pengembangan Perumahan	Persentase Pengembangan Perumahan	100%	100%	-	100%	1.292.650.000	100%	2.745.911.000	100%	4.900.000.000	100%	4.900.000.000	100%	13.838.561.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	0 4 3	0 3	Program Kawasan Permukiman	Persentase Kawasan Permukiman yang tidak Kumuh	100%	98,10%	-	98,50%	7.283.612.424	99%	5.618.815.000	99,50%	6.720.000.000	100%	6.920.000.000	100%	26.542.427.424	
	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat																	
	Program Permendagri 13 Tahun 2006																	
1	0 5 5	1 5	Program Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah	Persentase kasus Penegakan Perda yang diselesaikan	100	100	276.423.739	-	-	-	-	-	-	-	-	100	276.423.739	Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2019)	KINERJA DAN PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp		
				Kinerja	Pendanaan	Target	anggaran	Target	anggaran	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	dan Peraturan Walikota																
1 0 5	1 0 8	Program Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (response time rate)	100%	100	1.193.872.410	-	-	-	-	-	-	-	100	1.193.872.410		
1 0 5	1 0 9	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Persentase Korban Bencana Alam yang Tertangani	100	100%	1.485.457.021	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	1.485.457.021	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Persentase Tingkat Pemenuhan atau Kecukupan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana	100	100%		-	-	-	-	-	-	100%				
			Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate)	-	100%		-	-	-	-	-	-	100%				
			Persentase Early Warning System (EWS) di daerah rawan bencana	-	100%		-	-	-	-	-	-	100%				
Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat																	
	Program Permendagri 90 Tahun 2019																
1 0 5	0 0 4	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100%	100%	-	100%	1.285.321.000	100%	1.289.528.000	100%	2.336.187.000	100%	2.361.187.000	100%	8.293.882.000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2019)	KINERJA DAN PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
				Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp			
				Kinerja	Pendanaan	Target	anggaran	Target	anggaran	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	0	0	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Korban Bencana yang ditangani	100%	100%	-	100%		100%		100%		100%			Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
				Persentase Tingkat Pemenuhan atau Kecukupan Sarana Dan Prasarana Penanggulangan Bencana	100%	100%	-	100%	1.377.859.000	0%	1.717.005.000	0%	2.030.000.000	0%	2.275.000.000	7.411.174.000		
Urusan Pemerintahan Bidang Sosial																		
Program Permendagri 90 Tahun 2019																		
1	0	0	Program Penanganan Bencana	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana	-	100%	-	100%	344.885.800	100%	628.979.400	100%	859.284.765	100%	954.760.850	100%	2.787.910.815	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	0	0	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	-	-	100%	-	-	-	-	-	213.236.600	-	-	475.720.016		
				Persentase Pengelolaan Taman makam Pahlawan dalam kondisi baik	-	-	100%	103.194.134	100%	186.106.080	100%	100%	236.929.556	100%				
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar																		
Urusan Tenaga Kerja																		
Program Permendagri 13 Tahun 2006																		
2	0	1	Program Pengembangan Kelembagaan Ketenagakerjaan	Persentase perselisihan yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama	98	100	712.873.503	-	-	-	-	-	-	-	-	100	712.873.503	Dinas Tenaga Kerja

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2019)	KINERJA DAN PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp		
				Kinerja	Pendanaan	Target	anggaran	Target	anggaran	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2022	1	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Persentase partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan	-	25.21%	2.267.373.362	-	-	-	-	-	-	-	25.21%	2.267.373.362	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2022	6	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak serta Rehabilitasi Sosial	Persentase Penanganan Pengaduan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	-	100%	8.793.371.080	-	-	-	-	-	-	-	100%	8.793.371.080		
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																	
Program Permendagri 90 Tahun 2019																	
208	02	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Alokasi Anggaran APBD yang di ARG	-	-	-	10%	303.007.740	15%	846.501.000	100%	1.105.807.150	100%	1.216.387.865	100%	3.471.703.755	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
208	03	Program Perlindungan Perempuan	Persentase penanganan pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan	-	-	-	100%	225.292.045	100%	419.590.865	100%	348.895.000	100%	363.550.000	100%	1.357.327.910	
208	04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase RT yang Memiliki Data Keluarga Berkualitas	-	-	-	5%	196.558.420	10%	835.086.470	20%	1.178.847.140	30%	1.296.731.854	30%	3.507.223.884	
208	05	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Jumlah dokumen Data Terpilah Gender dan Anak	-	-	-	100%	113.615.510	1 dokumen	229.549.120	1 dokumen	353.814.360	1 dokumen	277.754.436	1 dokumen	974.733.426	
208	06	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase peningkatan pelembagaan dan penguatan pemenuhan hak anak	-	-	-	100%	266.276.000	-	470.265.980	-	534.095.000	-	602.000.000	100%	2.112.564.040	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2019)	KINERJA DAN PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp	
				Kinerja	Pendanaan	Target	anggaran	Target	anggaran	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				-	-	-	-	12,50%		22,43%		42,20%		42,20%		
2	0	0	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase pelaksanaan kegiatan perlindungan khusus anak	-	-	100%	-	-	-	-	-	100%	-	-	
	8	7		Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak	-	-	-	81.739.101	0,003	410.605.078	-	168.349.000	-	177.000.000	0,003	734.126.420
				Persentase kasus kekerasan terhadap anak	-	-	-		0,04		0,04		0,04		0,04	
Urusan Pangan																
Program Permendagri 13 Tahun 2006																
2	2	1	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	95,4	95,04	-	-	-	-	-	-	-	95,04	-	-
	0	5		Indeks Ketahanan Pangan	-	80,64	707.485.783	-	-	-	-	-	-	80,64	707.485.783	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Urusan Pemerintahan Bidang Pangan																
Program Permendagri 90 Tahun 2019																
2	0	0	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Peningkatan Skor Pola Pangan Harapan	-	-	95,8	-	-	-	-	-	95,8	-	-	
	9	3		Persentase Angka Kecukupan Energi (%)	-	-	-	1.287.926.000	100%	1.095.000.000	100%	1.287.200.000	100%	1.307.500.000	100%	4.977.626.000
2	0	9	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rentan dan Rawan Pangan	-	-	-	-	-	-	25%	60.000.000	22%	60.000.000	22%	120.000.000
2	0	0	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Peningkatan Sample Pangan Aman yang Teruji (%)	-	-	80	211.622.000	-	175.000.000	-	318.000.000	-	335.000.000	80	1.039.622.000

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2019)	KINERJA DAN PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp	
				Kinerja	Pendanaan	Target	anggaran	Target	anggaran	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Persentase Pangan Segar Aman yang Teruji (%)	-	-	-	80		80		80		80		80		
Urusan Pertanahan																
Program Permendagri 13 Tahun 2006																
2	0	5	Program Pelayanan Pertanahan	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	100	109.354.539	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		4	Persentase Rekomendasi Ijin Pertanahan yang diterbitkan	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100		
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan																
Program Permendagri 90 Tahun 2019																
2	0	0	Program Pengelolaan Izin Lokasi	100%	0	0	85.000.000	100%	349.901.600	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	464.901.600	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
2	0	4	Prgram Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	100%	100%	100%	-	100%	36.200.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	86.200.000	
2	0	0	Program Penatagunaan Tanah	100%	100%	100%	120.000.000	100%	80.000.000	100%	80.000.000	100%	80.000.000	100%	360.000.000	
Urusan Lingkungan Hidup																
Program Permendagri 13 Tahun 2006																
2	0	5	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	58,97	64,01	445.978.043	-	-	-	-	-	-	-	64,01	445.978.043	Dinas Lingkungan Hidup
2	0	5	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	44,7	53,19	747.189.821	-	-	-	-	-	-	-	53,19	747.189.821	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2019)	KINERJA DAN PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab			
				Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp				
				Kinerja	Pendanaan	Target	anggaran	Target	anggaran	Target	Rp	Target	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
2	2	1	0	7	5	31,39	44,59	354.933.375	-	-	-	-	-	-	44,59	354.933.375			
2	2	1	0	8	5	74,9	74,97	5.528.779.345	-	-	-	-	-	-	74,97	5.528.779.345			
Urusan Pemerintahan																			
Bidang Lingkungan Hidup																			
Program Permendagri 90 Tahun 2019																			
2	1	1	0	2		61,54%	64,10%	-	69,23%	397.958.000	71,79%	419.892.000	79,49%	583.000.000	79,50%	642.000.000	79,50%	2.230.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	1	1	0	3		44,89%	53,19%	-	48%	1.242.680.365	49%	1.161.745.000	50%	1.760.000.000	50,10%	1.937.000.000	50,10%	6.666.000.000	
2	1	1	0	4		-	-	-	96,83	125.500.000	96,83	56.500.000	-	200.000.000	225.000.000	96,83	675.000.000		
						-	-	-	-		94,32%		97,20%		100%		100%		
2	1	1	0	5		-	70,96	-	71,0	257.127.000	71,5	41.500.000	75%	200.000.000	78%	225.000.000	78%	640.000.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2019)	KINERJA DAN PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp	
				Kinerja	Pendanaan	Target	anggaran	Target	anggaran	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2 1 1 0 1 6	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase pelaku usaha / kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	40%	44,59%	-	52,90%	336.516.400	64,70%	681.549.200	76,47%	532.000.000	88,20%	585.000.000	88,20%	2.038.762.500	
2 1 1 0 1 8	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	-	100%	-	90%	654.550.000	100%	670.000.000	100%	851.400.000	100%	1.040.000.000	100%	3.439.400.000	
2 1 1 1 0	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	-	100%	-	90%	85.000.000	100%	94.000.000	100%	104.000.000	100%	114.000.000	100%	397.000.000	
2 1 1 1 1	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	-	74,97%	-	74%	8.576.232.000	73%	7.951.800.000	72%	47.928.000.000	71%	61.190.000.000	71%	127.268.970.000	
	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil															
	Program Permendagri 13 Tahun 2006															
2 0 6	2 1 5 6 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan	Persentase Penerbitan Dokumen Kependudukan	81,03	82%	206.825.853	-	-	-	-	-	-	-	-	82%	206.825.853	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 0 6	2 1 6 6 Program Penataan dan Pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil	Persentase Penerbitan dokumen akta pencatatan sipil	-	92,00%	1.332.303.658	-	-	-	-	-	-	-	-	92,00%	1.332.303.658	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2019)	KINERJA DAN PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
				Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp			
				Kinerja	Pendanaan	Target	anggaran	Target	anggaran	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
2	1 4 0 2	Program Pengendalian Penduduk	Persentase Angka UKP (Usia Kawin Pertama) < 20 tahun	5,58%	4,95%	≤ 4.8%	300.956.040	≤ 4.7%	755.101.420	-	686.573.713	-	707.170.924	≤ 4.7%	2.375.972.396	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
		Meningkatnya Jumlah SSK	-	4 SSK	4 SSK	7 SSK		8 SSK		9 SSK								
		Meningkatnya Kampung KB yang berstandar paripurna	-	3 Kampung KB	3 Kampung KB	4 Kampung KB		5 Kampung KB		6 Kampung KB								
2	1 4 0 3	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Menurunnya Unmet Need	4.2%	11,60%	16,93%	2.727.576.000	8,00%	2.554.439.400	7,50%	2.867.064.740	7,00%	2.953.076.682	7,00%	11.108.317.322			
2	1 4 0 4	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Meningkatnya kepesertaan anggota Tribina PUS yang ber-KB	79,10%	82,25%	80,25%	257.495.200	81,00%	1.331.867.514	82,00%	784.633.813	83,00%	808.172.827	83,00%	3.135.200.234			
Urusan Perhubungan																		
Program Permendagri 13 Tahun 2006																		
2	2 0 9	1 5	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Persentase Pemasangan Rambu-rambu Lalu Lintas	74	80	3.860.798.508	-	-	-	-	-	-	80	3.860.798.508	Dinas Perhubungan		
			Persentase Perlengkapan Jalan	58%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58%				
2	2 0 9	1 6	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Jumlah orang yang terangkut angkutan umum	420.660	539.916 orang	1.760.306.299	-	-	-	-	-	-	539.916 orang	1.760.306.299			
			Kinerja angkutan Umum	38%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38%				
Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan																		
Program Permendagri 90 Tahun 2019																		
2	1 5 2	0 2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana, serta fasilitas perlengkapan	-	-	-	84%	8.363.009.965	88%	9.178.999.000	92%	10.562.531.500	96%	10.562.531.500	96%	38.719.362.180	Dinas Perhubungan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2019)	KINERJA DAN PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp	
				Kinerja	Pendanaan	Target	anggaran	Target	anggaran	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	2 1 5 4	1 5	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase data statistik sektoral yang terintegrasi	50	60	257.773.734	-	-	-	-	-	-	60	257.773.734	Dinas Komunikasi dan Informatika
Urusan Pemerintahan Bidang Statistik																
Program Permendagri 90 Tahun 2019																
2	2 0 2	0 2	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase data statistik sektoral yang terintegrasi	-	-	-	80	-	-	-	-	80	-	-	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%	100%	100%	313.278.000	100%	499.250.000	550.000.000	550.000.000	100%	1.912.528.000		
				Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1		
Urusan Persandian																
Program Permendagri 13 Tahun 2006																
2	2 1 5	1 5	Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Persentase PD yang mengimplementasikan keamanan Informasi	8,8	25	486.210.682	-	-	-	-	-	-	25	486.210.682	Dinas Komunikasi dan Informatika
Urusan Pemerintahan Bidang Persandian																
Program Permendagri 90 Tahun 2019																
2	2 1 2	0 2	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi	-	-	-	II (dua) Level	-	-	-	-	II (dua) Level	-	-	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Persentase OPD yang menggunakan layanan persandian untuk pengamanan informasi	100%	100%	100%	195.502.695	100%	350.000.000	500.000.000	600.000.000	100%	1.645.502.695		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2019)	KINERJA DAN PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp		
				Kinerja	Pendanaan	Target	anggaran	Target	anggaran	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2	2	0	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan	-	-	36%		37%	100.000.000	37%	260.000.000	38%	280.000.000	38%	640.000.000	
Urusan Kearsipan																	
Program Permendagri 13 Tahun 2006																	
2	2	1	Program Penyelamatan, Peningkatan SDM dan Layanan Arsip Daerah	Jumlah Berkas Arsip yang dikelola	55.323 berkas	56.300 berkas	-	-	-	-	-	-	-	-	56.300 berkas	426.396.352	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		5	Jumlah Unit Daerah Kearsipan yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku	-	5 unit	426.396.352	-	-	-	-	-	-	-	5 unit			
Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan																	
Program Permendagri 90 Tahun 2019																	
2	2	0	Program Pengelolaan Arsip	Jumlah berkas arsip yang dikelola	57.615 berkas	60.004 berkas	-	59.500 berkas	-	-	-	-	-	59.500 berkas	2.987.956.945	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		2	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	-	82%	436.331.945	84%	86%	651.625.000	88%	900.000.000	90%	1.000.000.000	90%			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2019)	KINERJA DAN PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp		
				Kinerja	Pendanaan	Target	anggaran	Target	anggaran	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2	2 4 0 3	Program Perlindungan dan Penyelamatan arsip	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	-	-		-										
				8,2		8,2		8,4	149.291.000	8,6	150.000.000	8,8	200.000.000	8,8	499.291.000		
Urusan Pemerintahan Pilihan																	
Urusan Kelautan dan Perikanan																	
Program Permendagri 13 Tahun 2006																	
3	3 0 1	Program Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan	Persentase Peningkatan Pendapatan Pelaku Usaha Perikanan	1	1		-	-	-	-	-	-	-	1			
			Rasio Pendapatan pelaku usaha perikanan dengan biaya produksi	-	2,25	496.518.752	-	-	-	-	-	-	-	2,25	496.518.752	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan																	
Program Permendagri 90 Tahun 2019																	
3	2 5 0 4	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Presentase Peningkatan Produksi Perikanan	-	-		5%	296.130.000	-	395.000.000	-	630.000.000	-	1.120.000.000	5%	2.441.130.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2019)	KINERJA DAN PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp	
				Kinerja	Pendanaan	Target	anggaran	Target	anggaran	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah total produksi perikanan budidaya (ton)	274,8	-	275,3	277	280		285		290		290		
3	2	0	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	0	-	0	-	89	80.000.000	89	115.000.000	89	120.000.000	89	315.000.000	
3	2	0	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	-	-	-	1%				470.000.000		490.000.000	1%	1.869.215.600	
			Tingkat Konsumsi Ikan (kg/kapita/tahun)	15,4	-	15,5	15,6	15,7	422.732.000	15,8		15,9		15,9		
			Urusan Pariwisata													
			Program Permendagri 13 Tahun 2006													
3	3	1	Program Pengembangan Pemasaran dan Destinasi Pariwisata	8	5									5	843.086.338	
			Persentase Peningkatan Promosi yang dilaksanakan	25	2%									2%		
			Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata													
			Program Permendagri 90 Tahun 2019													
3	2	0	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	2 destinasi	2 destinasi	-	2 destinasi	2 destinasi						2 destinasi	1.695.000.000	
			Persentase peningkatan destinasi wisata daerah	0	0	-	0	20%	489.048.300	25%	453.750.000	30%	453.750.000	30%		
3	2	0	Program Pemasaran Pariwisata	5 event	3 event	-	4 event	4 event	546.928.750		907.500.000		907.500.000	4 event	3.390.000.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2019)	KINERJA DAN PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp	
				Kinerja	Pendanaan	Target	anggaran	Target	anggaran	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Persentase Peningkatan Pemasaran Pariwisata yang diselenggarakan	-	0	-	5%		10%		20%		20%		20%		
3	2 6 5	Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-	18,68%	-	18,68%	328.410.595	19,00%	386.173.000	19,50%	726.000.000	20%	726.000.000	20%	2.712.000.000	
Urusan Pertanian																
Program Permendagri 13 Tahun 2006																
3	3 0 3	1 6 Program Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Peternakan	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	375.352.624	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Rasio pendapatan pelaku usaha peternakan dengan biaya produksi	-	1.4	-	-	-	-	-	-	-	-	1.4			
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian																
Program Permendagri 90 Tahun 2019																
3	2 7 3	0 3 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	0	0	-	50	29.653.000	50	542.900.000	75	3.750.000.000	100	4.950.000.000	100	8,900,653,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	2 7 4	0 4 Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	0	0	-	75%	478.050.000	75%	175.000.000	-	533.700.000	-	543.700.000	75%	1,730,450,000	
		Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit hewan Menular (%)	0	50,86	-	10		10		10		10				

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2019)	KINERJA DAN PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp		
				Kinerja	Pendanaan	Target	anggaran	Target	anggaran	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
3	2	0	Program Pengendalian dan Penganggulangan Bencana Pertanian	Persentase Lahan Aman Bencana Pertanian (%)	0	0	70	171.200.400	72	111.750.000	74	350.000.000	76	400.000.000	76	1.032.950.400	
3	2	0	Program Perizinan usaha Pertanian	Persentase kelompok tani yang memiliki Izin Usaha Pertanian (%)	0	0	-	-	10	50.000.000	12	100.000.000	15	150.000.000	15	300.000.000	
3	2	0	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Jumlah SDM Pertanian Terlatih (%)	0	0	15	131.363.000	20	148.837.400	20	800.000.000	20	800.000.000	20	1,885,840,400	
Urusan Perdagangan																	
Program Permendagri 13 Tahun 2006																	
3	3	0	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengawasan Perdagangan Non Pasar Rakyat	Persentase Pertumbuhan Perdagangan Non Pasar Rakyat	-	1,76%	861.719.402	-	-	-	-	-	-	-	1,76%	861.719.402	Dinas Perdagangan
3	3	0	Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal	Jumlah Barang Kena Cukai ilegal	0	0	46.401.600	-	-	-	-	-	-	0	46.401.600		
Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan																	
Program Permendagri 90 Tahun 2019																	
3	3	0	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase perusahaan yang memperbarui perijinan	100%	100%	100%	388.870.000	100%	107.083.000	100%	155.000.000	100%	155.000.000	100%	600.100.000	Dinas Perdagangan
3	3	0	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Bahan Pokok dengan Harga Stabil	100%	100%	100%	77.966.680	-	77.500.800	-	196.000.000	-	240.000.000	-	867.724.000	
				Persentase pelaksanaan pengawasan bahan pokok dan barang penting	100%	100%	100%		100%		100%	100%	100%	100%			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2019)	KINERJA DAN PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp	
				Kinerja	Pendanaan	Target	anggaran	Target	anggaran	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3306	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase UTTP dan BDKT yg telah melakukan tera dan pengawasan BDKT	100%	100%	-	100%	342.050.000	100%	216.946.035	100%	287.000.000	100%	287.000.000	100%	1.102.019.000	
3307	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	jumlah produk perdagangan yang dipromosikan	-	15 produk	-	15 produk	379.622.600	-	243.423.850	-	726.000.000	-	726.000.000	15 produk	3.849.545.000	
		Persentase produk perdagangan yang dipromosikan	100%	100%	100%	100%		100%		100%		100%				
Urusan Perindustrian																
Program Permendagri 13 Tahun 2006																
3307	Program Pengembangan Industri Kecil Menengah	Persentase IKM yang berstandart	17,09	19,63%	440.979.658	-	-	-	-	-	-	-	-	19,63%	440.979.658	
3307	Program Pembinaan Industri	Persentase IKM yang melaksanakan GMP (Good Manufacturing Practice)	80	100%	41.523.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	41.523.000	Dinas Tenaga Kerja
Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian																
Program Permendagri 90 Tahun 2019																
3312	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase tersedianya Dokumen Induk Perindustrian	-	-	-	100%	563.351.320	100%	364.324.050	100%	615.000.000	100%	615.000.000	100%	2.945.151.320	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		persentase IKM yang mutu produk dan kapasitasnya meningkat	-	-	-	2,5%		5%		5%		5%		5%		
3314	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase IKM yang mengikuti Publikasi Produk	-	-	-	12,80%	407.053.895	12,80%	591.025.135	12,80%	610.000.000	12,80%	610.000.000	12,80%	2.336.000.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2019)	KINERJA DAN PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
				Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp			
				Kinerja	Pendanaan	Target	anggaran	Target	anggaran	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
4	4	2	Program Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan	Persentase OPD yang melaksanakan kegiatan sesuai jadwal	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0	4		Jumlah dokumen Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan	-	2 dokumen	105.974.436	-	-	-	-	-	-	-	-	2 dokumen	105.974.436	
	1			Persentase jumlah tender yang terealisasi	-	100%		-	-	-	-	-	-	-	-	100%		
4	4	2	Program Peningkatan Kerjasama Antar Daerah Pemerintah Daerah	Jumlah Perjanjian Kerjasama	5 kerja sama	10 kerjasama	186.458.697	-	-	-	-	-	-	-	-	10 kerjasama	186.458.697	Sekretariat Daerah (Bagian Administrasi Pemerintahan Umum)
4	4	1	Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	Persentase Jumlah Kegiatan sosialisasi Bidang Cukai yang dilaksanakan	100	100	77.840.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100	77.840.000	Sekretariat Daerah (Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat)
4	4	2	Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Ekonomi	Persentase kelompok sosial ekonomi yang difasilitasi	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	
4	4	1	Program Stabilitas Ekonomi Daerah	Tingkat Inflasi	4%	1,8	189.597.882	-	-	-	-	-	-	-	-	1,8	189.597.882	
4	4	1	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pelayanan Kedinasan Pimpinan	100	105,87%	593.745.402	-	-	-	-	-	-	-	-	105,87 %	593.745.402	Sekretariat Daerah (Bagian Umum)
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan																		
Sekretariat Daerah																		
Program Permendagri 90 Tahun 2019																		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2019)	KINERJA DAN PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
				Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp			
				Kinerja	Pendanaan	Target	anggaran	Target	anggaran	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	Sekretariat DPRD																	
	Program Permendagri 90 Tahun 2019																	
4	0 2 2	0 2 2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap layanan Tugas dan Fungsi	81,29	90,42	-	79	12.826.552.255	80	14.587.486.385	81	19.318.960.080	82	22.288.971.373	82	72.546.774.111	Sekretariat DPRD
	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan																	
	Perencanaan																	
	Program Permendagri 90 Tahun 2019																	
5	0 1 3	0 1 3	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	persentase capaian target program pembangunan daerah	-	-	100%	100%	1.452.140.380	-	1.887.650.000	-	2.376.650.000	-	2.376.650.000	-	8.279.198.640	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
			Persentase Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah		100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan																	
	Keuangan																	
	Program Permendagri 13 Tahun 2006																	
4	4 0 5	4 1 7	Program Peningkatan dan Pengembangan Penatausahaan Keuangan Daerah	Persentase penerbitan SP2D tepat waktu	100%	100%	217.944.427	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	217.944.427	
4	4 0 5	4 1 5	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyampaian laporan pertanggungjawaban APBD tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	968.759.403	-	-	-	-	-	-	-	-	Tepat Waktu	968.759.403	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			Presentase OPD yang menyampaikan Laporan Keuangan sesuai SAP		100%	100%		-	-	-	-	-	-	-	100%			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2019)	KINERJA DAN PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp		
				Kinerja	Pendanaan	Target	anggaran	Target	anggaran	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
4 0 5	1 6	Program Pengelolaan Anggaran Daerah	Pengesahan Perda APBD Tepat Waktu	Tepat Waktu	676.717.415	-	-	-	-	-	-	-	-	Tepat Waktu	676.717.415		
			Pengesahan Dokumen DPA dan DPPA	Tepat Waktu		Tepat Waktu	-	-	-	-	-	-	-	Tepat Waktu			
4 0 5	1 8	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	Kontribusi pengelolaan aset terhadap PAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.790.892.165	
			Presentase keakuratan data aset OPD	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%		
			Presentase peningkatan Nilai aset pemda	-	6%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6%		
			Presentase aset yang diasuransikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4 0 5	1 9	Program Optimalisasi Pengelolaan Pajak Daerah	Persentase Ketersediaan Basis Data Pajak daerah	100	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	211.988.000	Badan Pendapatan Daerah	
			Jumlah penerimaan pajak daerah	-	118,26%	-	-	-	-	-	-	-	-	-			118,26%
4 0 5	2 0	Program Peningkatan Manajemen Pajak Daerah	Persentase Pertumbuhan Penerimaan Pajak daerah	1,5	453.729.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	453.729.000	Badan Pendapatan Daerah	
			Persentase Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	-		100%	-	-	-	-	-	-	-	-			100%
Keuangan																	
Program Permendagri 90 Tahun 2019																	
5 0 2	0 2 2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Realisasi Kinerja Keuangan yang Memenuhi Target	100%	100%	-	60.340.673.185	100%	11.270.987.599	100%	7.505,329,560.00	100%	7,510,329,650.00	100%	73.121.335.148	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
5 0 2	0 2 3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Aset yang berkondisi baik	100%	100%	-	3.748.942.400	100%	2.099.685.020	100%	3,337,189,000.00	100%	3,337,189,000.00	100%	13.348.756.040		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2019)	KINERJA DAN PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp	
				Kinerja	Pendanaan	Target	anggaran	Target	anggaran	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
50024	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pertumbuhan Pajak Asli Daerah	-	-	-	1,5%	616.777.500	-	1.200.439.000	-	1.447.675.000	-	1.499.358.000	1,5%	4.995.628.000	Badan Pendapatan Daerah
		Persentase Peningkatan Data Potensi Wajib Pajak	10%	10%	10%	10%		10%		10%						
		Peningkatan Capaian Penagihan Pajak Daerah	37%	41%	41%	42%		43%		43%						
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan																
Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan																
Program Permendagri 13 Tahun 2006																
406	405	1	Program Peningkatan Manajemen Pelayanan Kepegawaian	Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian sesuai SOP	99	145%	197.835.501	-	-	-	-	-	-	145%	197.835.501	Badan Kepegawaian Daerah
406	406	1	Program Fasilitas Kesejahteraan PNS	Persentase penyelesaian SK terkait kesejahteraan PNS yang sesuai SOP	107,4	108%	95.467.940	-	-	-	-	-	-	108%	95.467.940	
Unsur Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah																
Program Permendagri 13 Tahun 2006																
403	405	1	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase OPD yang maturitas SPI nya level 3	25	25	1.341.655.581	-	-	-	-	-	-	25	1.341.655.581	Inspektorat
				Persentase Temuan Hasil pengawasan yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi	-	96,42%		-	-	-	-	-	96,42%			
403	406	1	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Persentase aparatur pengawas yang bersertifikat	100%	100%	372.981.909	-	-	-	-	-	-	100%	372.981.909	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2019)	KINERJA DAN PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp		
				Kinerja	Pendanaan	Target	anggaran	Target	anggaran	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
4 4 0 3	1 9	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan dan Sisdur Pengawasan	Persentase dokumen kebijakan dan sisdur pengawasan yang terpenuhi	100%	100%	5.996.400	-	-	-	-	-	-	-	100%	5.996.400		
Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan																	
Inspektorat Daerah																	
Program Permendagri 90 Tahun 2019																	
6 0 1	0 2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase OPD yang maturitas SPInya Level 3	-	25%	-	30%	848.332.295	35%	1.237.019.000	40%	1.428.000,80	45%	1.533.500,00	45%	4.728.339.000	Inspektorat
6 0 1	0 3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Dokumen Kebijakan dan Sisdur Pengawasan serta Asistensi yang Terpenuhi	-	100%	-	100%	1.019.621.160	100%	1.138.997.000	100%	1.327.550,00	100%	1.387.500,00	100%	4.738.923.000	
Fungsi Penunjang Kecamatan																	
Program Permendagri 13 Tahun 2006																	
4 4 0 9	1 5	Program Penyelenggaraan Kelurahan	Persentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	100%	100%	5.114.048.355	-	-	-	-	-	-	-	100%	5.114.048.355	Kecamatan Kartoharjo	
4 4 0 9	1 6	Program Koordinasi, Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan, Kesejahteraan Sosial dan Ketertarikan Ketertiban Umum	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	100	129.785.839	-	-	-	-	-	-	-	100	129.785.839		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2019)	KINERJA DAN PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp	
				Kinerja	Pendanaan	Target	anggaran	Target	anggaran	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4 4 0 9 1	Program Penyelenggaraan Kelurahan	Persentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	100%	100	5.193.265.339	-	-	-	-	-	-	-	-	100	5.193.265.339	Kecamatan manguharjo
4 4 0 9 6	Program Koordinasi, Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan, Kesejahteraan Sosial dan Ketertarikan Ketertiban Umum	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	129	137.775.000	-	-	-	-	-	-	-	-	129	137.775.000	
4 4 0 9 5	Program Penyelenggaraan Kelurahan	Persentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	100%	100	4.540.005.727	-	-	-	-	-	-	-	-	100	4.540.005.727	Kecamatan Taman
4 4 0 9 6	Program Koordinasi, Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan, Kesejahteraan Sosial dan Ketertarikan Ketertiban Umum	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	100	94.685.512	-	-	-	-	-	-	-	-	100	94.685.512	
Unsur Kewilayahan																
Kecamatan																
Program Permendagri 90 Tahun 2019																
7 0 1 2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kartoharjo	87,56	87,7	-	87,7	7.476.445.846	87,75	6.902.855.400	87,8	6.118.927.554	87,85	6.424.851.850	87,85	25.515.710.436	Kecamatan Kartoharjo
7 0 1 4	Program Koordinasi Ketertarikan dan Ketertiban Umum	persentase pengkoordinasian ketertarikan dan ketertiban umum di kecamatan	100%	100%	-	100%	171.476.620	100%	700.192.835	100%	770.212.119	100%	847.233.330	100%	3.707.258.105	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2019)	KINERJA DAN PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp		
				Kinerja	Pendanaan	Target	anggaran	Target	anggaran	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
4 0 8	1 5	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Cakupan Pembinaan Wasbang		100%		382.121.428	-	-	-	-	-	-	100%	382.121.428	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		Cakupan Hubungan Sosial	100%			-	-	-	-	-	-	-	-				
4 0 8	1 6	Program Peningkatan Pemahaman Ideologi dan HAM serta Pencegahan Konflik Sosial	Konflik Horizontal di dalam masyarakat	0 konflik	0 konflik		744.799.589	-	-	-	-	-	-	0 konflik	744.799.589		
4 0 8	1 7	Program Pendidikan Politik Masyarakat dan Orkemas	Persentase Parpol dan orkemas yang memahami regulasi	100%	100%		178.297.043	-	-	-	-	-	-	100%	178.297.043		
4 0 8	1 8	Program Pembinaan Orkesmas dalam kehidupan demokrasi	Persentase Orkemas	72,37				-	-	-	-	-	-	72,37			
Unsur Pemerintahan Umum																	
Kesatuan Bangsa dan Politik																	
Program Permendagri 90 Tahun 2019																	
8 0 1	0 2	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase masyarakat yang memahami nilai-nilai Nasionalisme	-	-			100%		-		-		100%	2.473.898.500		
			Cakupan pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%	100%			100%	265.408.050	100%	344.152.347	100%	726.000.000	100%			798.600.000
8 0 1	0 3	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase pemahaman masyarakat dibidang politik	-	-			100%		-		-		100%	4.359.736.850		
			Persentase pendidikan politik kepada Partai Politik Pemegang Pemilu	100%	100%			100%	871.058.100	100%	1.139.076.250	100%	1.159.379.650	100%			1.275.317.600

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2019)	KINERJA DAN PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp		
				Kinerja	Pendanaan	Target	anggaran	Target	anggaran	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
80104	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Orkemas berbadan hukum		40%	-	45%		-		-		-		45%	1.366.317.150		
		Persentase Status Kelembagaan Orkemas	81,8%	72,91%	-	68%	272.985.000	71%	222.985.000	73%	363.343.000	77%	399.677.300	77%			
80105	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase koordinasi yg dilakukan dengan pemangku kepentingan	100%	100%	100%	536.633.650	100%	553.661.370	100%	735.875.052	100%	809.462.557	100%	2.699.006.929			
80106	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Konflik horisontal di dalam masyarakat	0 konflik	0 konflik	0 konflik				0 konflik	-		-		0 konflik	7.805.255.850		
		Persentase konflik yang terfasilitasi	-	-	100%		1.454.339.864	100%	1.803.048.050	100%	2.094.339.450	100%	2.303.773.395	100%			
PRIORITAS II TOTAL Rp.					180.336.867.618	231.915.497.773	366.696.635.778	447.581.878.169	484.499.835.438	1.711.030.714.775							
% Terhadap Belanja Daerah						20	29	32	34								
Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2019)	KINERJA DAN PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp		
				Kinerja	Pendanaan	Target	anggaran	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
PRIORITAS III																	
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar																	
Urusan Pendidikan																	
Program Permendagri 13 Tahun 2006																	
001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terlaksananya administrasi perkantoran	100%	100%	3.267.693.851	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	3.267.693.851	Dinas Pendidikan	
002	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100%	100%	454.161.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	454.161.000		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2019)	KINERJA DAN PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp		
				Kinerja	Pendanaan	Target	anggaran	Target	anggaran	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
0	0	3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	510.735.000	-	-	-	-	-	-	-	100%	510.735.000	
0	0	4	Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan/laporan yang disusun tepat waktu	100%	100%	43.619.666	-	-	-	-	-	-	-	100%	43.619.666	
Urusan Kesehatan																	
Program Permendagri 13 Tahun 2006																	
0	0	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terlaksananya administrasi perkantoran	100%	100%	2.037.319.629	-	-	-	-	-	-	-	100%	2.037.319.629	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
0	0	2	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100%	100%	241.003.270	-	-	-	-	-	-	-	100%	241.003.270	
0	0	3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	0	
0	0	4	Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan/laporan yang disusun tepat waktu	100%	100%	236.846.187	-	-	-	-	-	-	-	100%	236.846.187	
0	0	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terlaksananya administrasi perkantoran	100%	100%	1.149.200.000	-	-	-	-	-	-	-	100%	1.149.200.000	Rumah Sakit Umum Daerah
0	0	3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	709.511.400	-	-	-	-	-	-	-	100%	709.511.400	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2019)	KINERJA DAN PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp		
				Kinerja	Pendanaan	Target	anggaran	Target	anggaran	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan																	
Program Permendagri 90 Tahun 2019																	
1	0	0	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana/Rumah Sakit Umum Daerah
						A skor	68.817.477.025	A skor	144.172.163.268	A skor	163.367.925.605	A skor	177.304.750.594	A skor	539.562.195.363		
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																	
Program Permendagri 13 Tahun 2006																	
0	0	0	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terlaksananya administrasi perkantoran	100%	100%	2.547.836.748	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
0	0	0	2	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100%	100%	1.182.086.523	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
0	0	0	3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	149.347.797	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
0	0	0	4	Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan/laporan yang disusun tepat waktu	100%	100%	24.155.280	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																	
Program Permendagri 90 Tahun 2019																	
1	0	0	3	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						A Skor	10.781.209.533	A Skor	10.888.336.546	A Skor	11.638.000.000	A Skor	12.801.800.000	A Skor	45.574.481.500		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2019)	KINERJA DAN PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab				
				Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp					
				Kinerja	Pendanaan	Target	anggaran	Target	anggaran	Target	Rp	Target	Rp							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman																			
	Program Permendagri 13 Tahun 2006																			
0	0	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terlaksananya administrasi perkantoran	100%	100%	1.618.412.784,00 00	-	-	-	-	-	-	-	100%	1.618.412.784	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman			
0	0	2	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100%	100%	1.418.155.843,00 00	-	-	-	-	-	-	-	100%	1.418.155.843				
0	0	3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	2.985.645.750,00 00	-	-	-	-	-	-	-	100%	2.985.645.750				
0	0	4	Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan/laporan yang disusun tepat waktu	100%	100%	23.031.285,0000	-	-	-	-	-	-	-	100%	23.031.285				
	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman																			
	Program Permendagri 90 Tahun 2019																			
1	0	0	4	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	-	-	-	A skor	9.312.818.310	A skor	12.021.276.047	A skor	12.482.880.000	A skor	12.613.880.000	A skor	46.430.854.357	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat																			
	Program Permendagri 13 Tahun 2006																			
0	0	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terlaksananya administrasi perkantoran	100%	100%	2.648.978.709	-	-	-	-	-	-	-	100%	2.648.978.709	Satuan Polisi Pamong Praja			
0	0	2	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100%	100%	438.981.387	-	-	-	-	-	-	-	100%	438.981.387				

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2019)	KINERJA DAN PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab				
				Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp					
				Kinerja	Pendanaan	Target	anggaran	Target	anggaran	Target	Rp	Target	Rp							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
0	0	3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	666.155.500	-	-	-	-	-	-	-	100%	666.155.500	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			
0	0	4	Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan/laporan yang disusun tepat waktu	100%	100%	84.332.080	-	-	-	-	-	-	-	100%	84.332.080				
0	0	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terlaksananya administrasi perkantoran	100%	100%	436.894.218	-	-	-	-	-	-	-	100%	436.894.218				
0	0	2	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100%	100%	172.465.421	-	-	-	-	-	-	-	100%	172.465.421				
0	0	3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	23.577.338	-	-	-	-	-	-	-	100%	23.577.338				
0	0	4	Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan/laporan yang disusun tepat waktu	100%	100%	18.776.380	-	-	-	-	-	-	-	100%	18.776.380				
			Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat																	
			Program Permendagri 90 Tahun 2019																	
1	0	5	0	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	-	-	-	A skor	10.019.592.000	A skor	9.609.780.000	A skor	13.747.287.000	A skor	14.052.268.000	A skor	51.887.828.000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemedam Kebakaran
1	0	5	0	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	-	-	-	A Skor	1.950.082.000	A Skor	2.082.695.000	A Skor	2.280.000.000	A Skor	2.456.000.000	A Skor	8.857.767.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2019)	KINERJA DAN PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab				
				Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp					
				Kinerja	Pendanaan	Target	anggaran	Target	anggaran	Target	Rp	Target	Rp							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Urusan Sosial																				
Program Permendagri 13 Tahun 2006																				
0	0	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terlaksananya administrasi perkantoran	100%	100%	1.422.363.218	-	-	-	-	-	-	-	100%	1.422.363.218	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
0	0	2	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100%	100%	245.516.984	-	-	-	-	-	-	-	100%	245.516.984				
0	0	3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-				
0	0	4	Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan/laporan yang disusun tepat waktu	100%	100%	64.748.000	-	-	-	-	-	-	-	100%	64.748.000				
Urusan Pemerintahan Bidang Sosial																				
Program Permendagri 90 Tahun 2019																				
1	0	0	6	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	-	-	-	A Skor	6.442.905.810	A Skor	6.830.143.535	A Skor	6.844.397.143	A Skor	8.214.537.455	A Skor	28.535.339.008	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar																				
Urusan Tenaga Kerja																				
Program Permendagri 13 Tahun 2006																				
0	0	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terlaksananya administrasi perkantoran	100%	100%	758.331.623	-	-	-	-	-	-	-	100%	758.331.623	Dinas Tenaga Kerja			
0	0	2	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100%	100%	88.295.850	-	-	-	-	-	-	-	100%	88.295.850				

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2019)	KINERJA DAN PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
				Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp			
				Kinerja	Pendanaan	Target	anggaran	Target	anggaran	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
0	0	3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-		
0	0	4	Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan/laporan yang disusun tepat waktu	100%	100%	19.452.572	-	-	-	-	-	-	-	100%	19.452.572		
Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja																		
Program Permendagri 90 Tahun 2019																		
2	0	0	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	-	-	-	A Skor	5.300.663.865	A Skor	5.238.330.795	A Skor	5.357.110.000	A Skor	5.981.831.000	A Skor	21.877.935.660	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Urusan Pangan																		
Program Permendagri 13 Tahun 2006																		
0	0	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terlaksananya administrasi perkantoran	100%	100%	865.812.108	-	-	-	-	-	-	-	100%	865.812.108		
0	0	2	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100%	100%	186.483.850	-	-	-	-	-	-	-	100%	186.483.850		
0	0	3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-		
0	0	4	Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan/laporan yang disusun tepat waktu	100%	100%	133.675.637	-	-	-	-	-	-	-	100%	133.675.637		
Urusan Pemerintahan Bidang Pangan																		
Program Permendagri 90 Tahun 2019																		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2019)	KINERJA DAN PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp	
				Kinerja	Pendanaan	Target	anggaran	Target	anggaran	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
20901	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	-	-	-	A Skor	5.287.701.000	A Skor	5.339.979.000	A Skor	5.582.976.000	A Skor	5.901.774.000	A Skor	22,349,522,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Urusan Lingkungan Hidup																
Program Permendagri 13 Tahun 2006																
001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terlaksananya administrasi perkantoran	100%	100%	1.286.187.243	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	1.286.187.243	Dinas Lingkungan Hidup
002	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100%	100%	1.045.473.700	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	1.045.473.700	
003	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	134.723.700	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	134.723.700	
004	Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan/laporan yang disusun tepat waktu	100%	100%	36.146.685	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	36.146.685	
Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup																
Program Permendagri 90 Tahun 2019																
21101	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	-	-	-	A Skor	13.895.013.290	A Skor	16.042.269.915	A Skor	24.526.150.000	A Skor	26.762.525.000	A Skor	87.950.375.000	Dinas Lingkungan Hidup
Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil																
Program Permendagri 13 Tahun 2006																
001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terlaksananya administrasi perkantoran	100%	100%	1.333.142.665	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	1.333.142.665	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2019)	KINERJA DAN PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
				Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp			
				Kinerja	Pendanaan	Target	anggaran	Target	anggaran	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
0	0	2	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100%	100%	248.902.352	-	-	-	-	-	-	-	100%	248.902.352		
0	0	3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%			
0	0	4	Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan/laporan yang disusun tepat waktu	100%	100%	57.876.645	-	-	-	-	-	-	-	100%	57.876.645		
Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil																		
Program Permendagri 90 Tahun 2019																		
2	1	0	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	-	-	-	A Skor	6.472.406.250	A Skor	5.801.555.935	A Skor	6.572.058.965	A Skor	7.300.944.853	A Skor	26.549.062.114	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Urusan Perhubungan																		
Program Permendagri 13 Tahun 2006																		
0	0	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terlaksananya administrasi perkantoran	100%	100%	2.730.773.052	-	-	-	-	-	-	-	100%	2.730.773.052	Dinas Perhubungan	
0	0	2	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100%	100%	1.006.554.701	-	-	-	-	-	-	-	100%	1.006.554.701		
0	0	4	Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan/laporan yang disusun tepat waktu	100%	100%	116.917.346	-	-	-	-	-	-	-	100%	116.917.346		
Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan																		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2019)	KINERJA DAN PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
				Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp			
				Kinerja	Pendanaan	Target	anggaran	Target	anggaran	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
0	0	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terlaksananya administrasi perkantoran	100%	100%	930.275.729	-	-	-	-	-	-	-	100%	930.275.729	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro	
0	0	2	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100%	100%	180.335.900	-	-	-	-	-	-	-	100%	180.335.900		
0	0	3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-		
0	0	4	Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan/laporan yang disusun tepat waktu	100%	100%	42.937.880	-	-	-	-	-	-	-	100%	42.937.880		
Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal																		
Program Permendagri 90 Tahun 2019																		
2	1	0	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	-	-	-	A skor	5.085.389.120	A skor	5.420.298.000	A skor	5.893.386.800	A skor	6.629.000.000	A skor	23.503.893.920	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Urusan Kepemudaan dan Olah Raga																		
Program Permendagri 13 Tahun 2006																		
0	0	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terlaksananya administrasi perkantoran	100%	100%	1.977.536.155	-	-	-	-	-	-	-	100%	1.977.536.155	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
0	0	2	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100%	100%	277.041.980	-	-	-	-	-	-	-	100%	277.041.980		
0	0	3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2019)	KINERJA DAN PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab			
				Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp				
				Kinerja	Pendanaan	Target	anggaran	Target	anggaran	Target	Rp	Target	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
0	0	4	Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan/laporan yang disusun tepat waktu	100%	100%	39.275.000	-	-	-	-	-	-	-	100%	39.275.000			
Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan																			
Program Permendagri 90 Tahun 2019																			
2	2	0	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	-	-	-	A skor	5.748.993.860	A skor	6.054.839.300	A skor	7.210.103.230	A skor	7.890.343.553	A skor	27.620.249.083	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan, dan Olah Raga	
Urusan Perpustakaan																			
Program Permendagri 13 Tahun 2006																			
0	0	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terlaksananya administrasi perkantoran	100%	100%	588.196.787	-	-	-	-	-	-	-	100%	588.196.787	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
0	0	2	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100%	100%	149.494.950	-	-	-	-	-	-	100%	149.494.950				
0	0	3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-				
0	0	4	Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan/laporan yang disusun tepat waktu	100%	100%	34.500.125	-	-	-	-	-	-	100%	34.500.125				
Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan																			
Program Permendagri 90 Tahun 2019																			
2	2	3	0	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	-	-	-	A Skor	3.546.179.100	A Skor	4.542.772.847	A Skor	10.326.104.191	A Skor	6.215.428.111	A Skor	24.630.484.249	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2019)	KINERJA DAN PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
				Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp			
				Kinerja	Pendanaan	Target	anggaran	Target	anggaran	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Urusan Pemerintahan Pilihan																		
Urusan Perdagangan																		
Program Permendagri 13 Tahun 2006																		
0	0	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terlaksananya administrasi perkantoran	100%	100%	974.317.788	-	-	-	-	-	-	-	100%	974.317.788	Dinas Perdagangan	
0	0	2	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100%	100%	724.303.634	-	-	-	-	-	-	-	100%	724.303.634		
0	0	3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-		
0	0	4	Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan/laporan yang disusun tepat waktu	100%	100%	71.793.085	-	-	-	-	-	-	-	100%	71.793.085		
Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan																		
Program Permendagri 90 Tahun 2019																		
3	3	0	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	-	-	-	A Skor	9.790.847.343	A Skor	9.549.876.897	A Skor	13.252.010.800	A Skor	10.665.000.000	A Skor	43.632.226.000	Dinas Perdagangan
Unsur Staf																		
Program Permendagri 13 Tahun 2006																		
0	0	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terlaksananya administrasi perkantoran	100%	100%	378.993.952	-	-	-	-	-	-	-	100%	378.993.952	Sekretariat Daerah (Bagian Administrasi Pembangunan)	
0	0	2	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100%	100%	109.939.801	-	-	-	-	-	-	-	100%	109.939.801		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2019)	KINERJA DAN PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp		
				Kinerja	Pendanaan	Target	anggaran	Target	anggaran	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
0	0	3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%			-	-	-	-	-	-	-	100%		
0	0	4	Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan/laporan yang disusun tepat waktu	100%	100%	31.462.496	-	-	-	-	-	-	-	100%	31.462.496	
0	0	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terlaksananya administrasi perkantoran	100%	100%	262.645.714	-	-	-	-	-	-	-	100%	262.645.714	Sekretariat Daerah (Bagian Administrasi Umum)
0	0	2	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100%	100%	31.758.800	-	-	-	-	-	-	100%	31.758.800		
0	0	3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-		
0	0	4	Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan/laporan yang disusun tepat waktu	100%	100%	6.025.885	-	-	-	-	-	-	100%	6.025.885		
0	0	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terlaksananya administrasi perkantoran	100%	100%	322.561.091	-	-	-	-	-	-	100%	322.561.091	Sekretariat Daerah (Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat)	
0	0	2	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100%	100%	26.896.800	-	-	-	-	-	-	100%	26.896.800		
0	0	3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2019)	KINERJA DAN PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp		
				Kinerja	Pendanaan	Target	anggaran	Target	anggaran	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
0	0	4	Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan/laporan yang disusun tepat waktu	100%	100%	16.250.060	-	-	-	-	-	-	-	100%	16.250.060	
0	0	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terlaksananya administrasi perkantoran	100%	100%	278.133.862	-	-	-	-	-	-	-	100%	278.133.862	Sekretariat Daerah (Bagian Hukum)
0	0	2	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100%	100%	80.347.350	-	-	-	-	-	-	100%	80.347.350		
0	0	3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-		
0	0	4	Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan/laporan yang disusun tepat waktu	100%	100%	33.344.181	-	-	-	-	-	-	100%	33.344.181		
0	0	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terlaksananya administrasi perkantoran	100%	100%	257.735.237	-	-	-	-	-	-	100%	257.735.237		
0	0	2	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100%	100%	32.222.901	-	-	-	-	-	-	100%	32.222.901	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)	
0	0	3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	-	-	-	-	-	-	-	100%	-			
0	0	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terlaksananya administrasi perkantoran	100%	100%	4.897.751.441	-	-	-	-	-	-	100%	4.897.751.441	Sekretariat Daerah (Bagian Umum)	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2019)	KINERJA DAN PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
				Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp			
				Kinerja	Pendanaan	Target	anggaran	Target	anggaran	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
0	0	2	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100%	100%	2.629.970.034	-	-	-	-	-	-	-	100%	2.629.970.034		
0	0	3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	3.339.441.172	-	-	-	-	-	-	-	100%	3.339.441.172		
0	0	4	Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan/laporan yang disusun tepat waktu	100%	100%	116.897.405	-	-	-	-	-	-	-	100%	116.897.405		
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan																		
Sekretariat Daerah																		
Program Permendagri 90 Tahun 2019																		
4	0	0	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	74,10	74,25	-	75,88	1.728.166.744	77,00	2.594.471.000	78,00	1.841.500.000	80,01	1.985.000.000	80,01	8.077.051.534,00	Sekretariat Daerah (Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan)
4	0	0	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	74,10	74,25	-	75,88	1.002.214.210	77,00	934.234.250	78,00	1.106.157.500	80,01	1.131.157.500	80,01	4.241.797.000	Sekretariat Daerah (Bagian Pemerintan)
4	0	0	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	74,10	74,25	-	75,88	1.164.160.000	77,00	1.207.275.500	78,00	2.004.611.100	80,01	2.181.121.200	80,01	7.114.993.300	Sekretariat Daerah (Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat)
4	0	0	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	74,10	74,25	-	75,88	1.423.175.660	77,00	1.642.838.620	78,00	1.768.300.800	80,01	1.853.300.800	80,01	7.383.628.920	Sekretariat Daerah (Bagian Hukum)

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2019)	KINERJA DAN PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab			
				Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp				
				Kinerja	Pendanaan	Target	anggaran	Target	anggaran	Target	Rp	Target	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
	Program Permendagri 13 Tahun 2006																		
0	0	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terlaksananya administrasi perkantoran	100%	100%	993.597.507	-	-	-	-	-	-	-	100%	993.597.507	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
0	0	2	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100%	100%	131.735.900	-	-	-	-	-	-	-	100%	131.735.900			
0	0	3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	196.700.000	-	-	-	-	-	-	-	100%	196.700.000			
0	0	4	Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan/laporan yang disusun tepat waktu	100%	100%	61.785.325	-	-	-	-	-	-	-	100%	61.785.325			
	Perencanaan																		
	Program Permendagri 90 Tahun 2019																		
5	0	0	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	-	-	-	A Skor	7.267.072.443	A Skor	7.622.714.907	A Skor	8.614.815.907	A Skor	8.614.815.907	A Skor	33.138.465.814	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan																		
	Keuangan																		
	Program Permendagri 13 Tahun 2006																		
0	0	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terlaksananya administrasi perkantoran	100%	100%	14.845.730.133	-	-	-	-	-	-	-	100%	14.845.730.133	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		
0	0	2	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100%	100%	133.757.900	-	-	-	-	-	-	-	100%	133.757.900			
0	0	3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2019)	KINERJA DAN PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
				Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp			
				Kinerja	Pendanaan	Target	anggaran	Target	anggaran	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
0	0	4	Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan/laporan yang disusun tepat waktu	100%	100%	19.545.833	-	-	-	-	-	-	-	100%	19.545.833		
0	0	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terlaksananya administrasi perkantoran	100%	100%	522.228.025	-	-	-	-	-	-	-	-	522.228.025	Badan Pendapatan Daerah	
0	0	2	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100%	100%	119.490.755	-	-	-	-	-	-	-	119.490.755			
0	0	3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	625.250.400	-	-	-	-	-	-	-	625.250.400			
0	0	4	Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan/laporan yang disusun tepat waktu	100%	100%	2.099.925	-	-	-	-	-	-	-	2.099.925			
Keuangan																		
Program Permendagri 90 Tahun 2019																		
5	0	0	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	-	-	-	A Skor	51.021.944.546	A Skor	51.820.233.266	A Skor	52,763,515,150.00	A Skor	52,985,016,150.00	A Skor	210.135.196.834	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	0	0	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	-	-	-	BB Skor	9.451.784.500	BB Skor	9.957.607.000	BB Skor	11.283.907.000	BB Skor	12.497.738.000	A Skor	43.706.984.000	Badan Pendapatan Daerah
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan																		
Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan																		
Program Permendagri 13 Tahun 2006																		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2019)	KINERJA DAN PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp		
				Kinerja	Pendanaan	Target	anggaran	Target	anggaran	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
0	0	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terlaksananya administrasi perkantoran	100%	100%	1.024.288.537	-	-	-	-	-	-	-	100%	1.024.288.537	Badan Kepegawaian Daerah
0	0	2	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100%	100%	209.307.565	-	-	-	-	-	-	-	100%	209.307.565	
0	0	3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	82.464.000	-	-	-	-	-	-	-	100%	82.464.000	
0	0	4	Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan/laporan yang disusun tepat waktu	100%	100%	44.821.269	-	-	-	-	-	-	-	100%	44.821.269	
Kepegawaian																	
Program Permendagri 90 Tahun 2019																	
5	0	3	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
						BB	BB Skor	6.649.877.000	BB Skor	6.109.101.755	A skor	6.505.000.000	A skor	6.630.000.000	A skor	25.551.547.176	
Unsur Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah																	
Program Permendagri 13 Tahun 2006																	
0	0	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terlaksananya administrasi perkantoran	100%	100%	676.154.854	-	-	-	-	-	-	-	100%	676.154.854	Inspektorat
0	0	2	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100%	100%	49.383.650	-	-	-	-	-	-	-	100%	49.383.650	
0	0	3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	
0	0	4	Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan/laporan yang disusun tepat waktu	100%	100%	98.561.086	-	-	-	-	-	-	-	100%	98.561.086	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2019)	KINERJA DAN PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab			
				Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp				
				Kinerja	Pendanaan	Target	anggaran	Target	anggaran	Target	Rp	Target	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
0	0	4	Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan/laporan yang disusun tepat waktu	100%	100%	109.251.169	-	-	-	-	-	-	-	100%	109.251.169			
0	0	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terlaksananya administrasi perkantoran	100%	100%	904.837.383	-	-	-	-	-	-	-	100%	904.837.383	Kecamatan Taman		
0	0	2	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100%	100%	139.546.607	-	-	-	-	-	-	100%	139.546.607				
0	0	3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	193.332.000	-	-	-	-	-	-	100%	193.332.000				
0	0	4	Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan/laporan yang disusun tepat waktu	100%	100%	95.130.738	-	-	-	-	-	-	100%	95.130.738				
Unsur Kewilayahan																			
Kecamatan																			
Program Permendagri 90 Tahun 2019																			
7	0	1	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	-	-	-	A skor	11.379.379.567	A skor	11.536.794.226	A skor	12.352.851.052	A skor	12.937.816.056	A skor	50.234.139.723	Kecamatan manguharjo
7	0	1	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	-	-	-	A Skor	10.930.705.433	A Skor	10.620.493.313	A Skor	10.619.477.978	A Skor	10.635.336.056	A Skor	47.161.967.782	Kecamatan kartoharjo
7	0	1	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	-	-	-	A skor	11.964.523.606	A skor	11.329.439.485	A skor	11.895.911.459	A skor	12.490.707.032	A skor	49.139.685.398	Kecamatan Taman

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2019)	KINERJA DAN PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab			
				Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp				
				Kinerja	Pendanaan	Target	anggaran	Target	anggaran	Target	Rp	Target	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
	Fungsi Penunjang Kesatuan Bangsa dan Politik																		
	Program Permendagri 13 Tahun 2006																		
0	0	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terlaksananya administrasi perkantoran	100%	100%	577.948.571	-	-	-	-	-	-	-	100%	577.948.571	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
0	0	2	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100%	100%	67.374.100	-	-	-	-	-	-	-	100%	67.374.100			
c	0	3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	90.150.000	-	-	-	-	-	-	-	100%	90.150.000			
0	0	4	Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan/laporan yang disusun tepat waktu	100%	100%	20.500.000	-	-	-	-	-	-	-	100%	20.500.000			
Unsur Pemerintahan Umum																			
	Kesatuan Bangsa dan Politik																		
	Program Permendagri 90 Tahun 2019																		
8	0	0	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	-	-	-	A Skor	3.701.735.223	A Skor	3.852.008.697	A Skor	4.403.180.867	A Skor	4.667.497.867	A Skor	16.748.742.468	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
PRIORITAS III TOTAL Rp.							89.643.778.136			351.323.145.273		372.694.447.150		400.683.471.253		384.297.295.536		1.598.642.137.348	
% Terhadap Belanja Daerah										31		29		29		27			

Keterangan : Prioritas I
 Prioritas II
 Prioritas III

digunakan untuk belanja wajib mengikat dan pencapaian visi misi kepala daerah
 digunakan untuk pencapaian visi misi kepala daerah dan belanja wajib mengikat
 digunakan untuk belanja urusan pemerintahan lainnya

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

8.1 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Daerah merupakan alat ukur kuantitatif untuk mengevaluasi dampak dari pembangunan daerah yang telah dilaksanakan. Tujuan dalam penetapan Indikator Kinerja Daerah adalah memberikan gambaran tentang pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Oleh karena itu, Indikator Kinerja Daerah juga dapat dikatakan sebagai Indikator Kinerja Utama bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih karena dapat menunjukkan kondisi yang diharapkan tercapai pada akhir periode RPJMD. Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah oleh Kepala Perangkat Daerah. Tujuan dalam penetapan IKU Kepala Pemerintah Daerah adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator sasaran daerah (*outcome*). Pencapaian indikator sasaran tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pembangunan daerah, khususnya dalam pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, dan program pembangunan daerah, yang meliputi aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja daerah ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

Indikator kinerja utama pemerintah Kota Madiun memuat indikator kinerja tujuan dan/atau sasaran sebagai tolok ukur penilaian kinerja walikota dan Wakil walikota periode 2019-2024. IKU daerah dicapai dengan dukungan pencapaian IKU perangkat daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. IKU perangkat daerah yang secara langsung mendukung pencapaian IKU daerah memiliki makna bahwa perangkat daerah tersebutlah secara tugas dan fungsi memiliki peran lebih dominan dibandingkan dengan IKU perangkat daerah dalam pencapaian indikator kinerja tujuan dan/atau sasaran dari setiap misi pembangunan jangka menengah Kota Madiun.

IKU daerah maupun IKU perangkat daerah merupakan indikator kinerja dampak (*impact*) untuk mengukur tujuan dan/atau sasaran RPJMD. Penetapan IKU Kota Madiun tahun 2019 – 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut

Tabel 8.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Madiun

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2019)	Realisasi		Target*		
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	(B) 67,34	(B) 65,55	(B) 67	(B) 68	(B) 69	(BB) 70,01
2	livable city (Indeks Kenyamanan Kota)	85,32	86,67	87,78	88,19	88,60	89,01
3	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	80,88	80,91	81,25	81,70	82,15	82,35
4	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	94,05	94,38	94,40	94,44	94,49	94,51
5	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	6,78	6,69	6,38	6,40	6,42	6,44
6	Indeks ketentraman	-	76,87	76,95	77,05	77,15	77,2
7	Indeks Gini	0,35	0,39	0,38	0,37	0,36	0,35

*Angka proyeksi

Terdapat 7 indikator kinerja utama dalam P-RPJMD Kota Madiun 2019-2024. Penetapan tujuh IKU tersebut didasarkan kondisi objektif Kota Madiun untuk mencapai kesejahteraan pada masa yang akan datang. Tujuh IKU tersebut setidaknya dapat memberi gambaran kualitas pembangunan sampai akhir periode RPJMD tahun 2024 yang meliputi aspek kualitas sumber daya manusia, pembangunan ekonomi berkualitas, dan kondisi masyarakat yang harmonis, yang didukung oleh ketersediaan infrastruktur yang memadai dan tata kelola pemerintahan yang profesional.

8.2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Selain dari IKU, kinerja pemerintah Kota Madiun tahun 2019-2024 dapat dilihat dari target indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan. Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan dapat dilihat dari tiga aspek utama yaitu Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum, dan Aspek Daya Saing Daerah. Aspek Kesejahteraan Masyarakat meliputi kinerja utama penyelenggaraan pemerintah daerah seperti Indeks Pembangunan Manusia, Angka Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Gini, dan lain sebagainya. Aspek Pelayanan Umum meliputi empat fokus yaitu Urusan Wajib Layanan Dasar, Urusan Wajib Bukan Layanan Dasar, Urusan Pilihan, dan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan.

Aspek Daya Saing Daerah meliputi empat fokus yaitu Kemampuan Ekonomi Daerah, Iklim Berinvestasi, Fasilitas Wilayah/Infrastruktur, dan Sumber Daya Manusia. Rincian mengenai indikator dan target capaian tiap tahun kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan dapat dilihat dalam tabel berikut

Tabel 8.2
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Madiun 2019-2024

Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi Kinerja	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
a	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi									
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,69	-3,39	2,95-3,95	3,06-5,11	3,08-5,75	3,11-5,95	3,11-5,95	Indikator makro
2	PDRB Per Kapita	juta	60,01	52,57	59,78	60,01	65,34	70,15	70,15	Indikator makro
3	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	Indeks	6,78	6,69	6,38	6,4	6,42	6,44	6,44	Indikator Tujuan Kota
4	Indeks Gini	Indeks	0,35	0,39	0,38	0,37	0,36	0,35	0,35	Indikator Tujuan Kota
5	Angka Kemiskinan	%	4,35	4,98	5,09	4,87	4,65	4,55	4,55	Indictor sasaran kota
b	Fokus Kesejahteraan Sosial									
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	80,88	80,91	81,25	81,70	82,15	82,35	82,35	Indikator Tujuan Kota
I	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial									
1	Persentase PMKS yang dapat terpenuhi kebutuhan dasar minimal	%	-	92,12%	91%	92%	93%	94%	94%	Indikator Tujuan PD
2	Persentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	%	-	-	-	93%	94%	95%	95%	Indikator Sasaran PD
3	Persentase PMKS yang diberdayakan	%	-	-	-	90%	91%	92%	92%	Indikator Sasaran PD
4	Persentase PMKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial	%	-	-	-	19%	20%	21%	21%	Indikator Sasaran PD
5	Persentase PSKS yang berperan aktif dalam Menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial	%	-	-	90%	-	-	-	90%	Indikator Program PD
6	persentase PSKS yang berperan aktif dalam Pemberdayaan Sosial	%	-	-	-	50%	58%	66%	66%	Indikator Program PD
7	persentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	%	-	-	90%	90%	91%	91%	91%	Indikator Program PD

Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi Kinerja	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	19	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per100.000 penduduk perempuan)	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Lppd
	20	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	-	36 (OPD dan BUMD)	36	63	65	70	70	Lppd
	21	Jumlah program PUG ada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	-	34 OPD	68	96	123	129	129	Lppd
	22	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	-	5 (Madiun Today, RRI, Radar Madiun, JTV, Radio Suara Madiun)	4 (Madiun Today, RRI, Radar Madiun, Radio Suara Madiun)	4 (Madiun Today, RRI, Radar Madiun, Radio Suara Madiun)	4 (Madiun Today, RRI, Radar Madiun, Radio Suara Madiun)	4 (Madiun Today, RRI, Radar Madiun, Radio Suara Madiun)	4 (Madiun Today, RRI, Radar Madiun, Radio Suara Madiun)	Lppd
	23	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	-	11 (Panti Asuhan Anak)	15	15	15	15	15	Lppd
	24	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	%	-	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
	25	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	-	15 (Panti Asuhan Anak)	15	15	15	15	15	Lppd
	26	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)	-	8 (Panti Asuhan)	15	15	15	15	15	Lppd
	27	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	-	1 (PKK)	15	20	25	30	30	Lppd
	28	Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	-	45 (Kader PKK)	45	45	45	45	45	Lppd
	29		-	1 (PKK)	10	10	15	20	20	Lppd

Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi Kinerja	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan	
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan										
	30	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	-	20	20	20	20	20	20	Lppd	
	31	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	-	3 (PERDA, Leaflet, Sosialisasi)	2	2	2	2	2	Lppd	
	32	Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandardisasi	-	1 (PPT)	1	1	1	1	1	Lppd	
	33	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	%	-	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd	
	34	Persentase Penanganan Pengaduan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	%	-	100	-	-	-	-	100	Indikator Lama
	35	Persentase penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	%	-	100	-	-	-	-	100	Indikator Lama
	36	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan dan swasta	%	99,73	25,21	-	-	-	-	25,21	Indikator Lama
	37	Persentase pelaksanaan kegiatan perlindungan khusus anak	%	-	-	100%	100%	-	-	100%	Indikator Lama
	38	Persentase peningkatan kelembagaan dan penguatan pemenuhan hak anak	%	-	-	100%	100%	-	-	100%	Indikator Lama
c.		Fokus Seni Budaya dan Olahraga									
I		Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga									
	1	Jumlah prestasi pemuda dan olahraga di tingkat regional dan nasional	Prestasi	50	95	41	45	-	-	45	Indikator Tujuan PD

Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi Kinerja	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan	
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	17	Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	event	4	3	3	3	3	4	20	Lppd
	18	Jumlah Pemuda Berprestasi yang dikirim kompetisi	orang	-	2	7	7	7	7	7	Indikator Lama
	19	Jumlah Atlit yang Ikut Kejuaraan di Tingkat Provinsi dan Nasional	orang	-	124	-	-	-	-	124	Indikator Lama
	II	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan									
	1	Persentase Kekayaan Budaya yang dipentaskan	%	31,6	35	40	45	-	-	45	Indikator Tujuan PD
	2	Jumlah kesenian dan kebudayaan yang dilestarikan	-	-	-	-	63	65	67	67	Indikator Tujuan PD
	3	persentase budaya daerah yang dilestarikan	%	4%	4%	35%	50%	-	-	50%	Indikator Sasaran PD
	4	Jumlah pelaku seni budaya yang melakukan pagelaran	Orang/group	-	-	-	42 orang/group	44 orang/group	46 orang/group	46 orang/group	Indikator Sasaran PD
	5	jumlah cagar budaya dan WBTB yang berpotensi jadi destinasi wisata		-	-	-	5	6	7	7	Indikator Sasaran PD
	6	persentase seni budaya yang dilestarikan	%	4%	4%	5%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
	7	persentase benda/bangunan cagar budaya yang dilestarikan	%	21%	21%	21%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
	8	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina	orang	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	-	-	400 orang	Indikator Program PD
	9	Persentase SDM, Lembaga dan pranata kesenian yang dibina	%	-	-	-	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
	10	Terlestarikannya Cagar Budaya	obyek	20	20	20	20	20	20	20	Lppd
	11	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	obyek	20	20	20	366	366	366	366	Lppd
	12	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yangdikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	obyek	20	20	20	366	366	366	366	Lppd

Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi Kinerja	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	pengelolaan sarana dan prasarana museum kabupaten/kota									
	23 Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	orang	6	6	6	6	6	6	6	Lppd
	24 Pembentukan tim ahli cagar budaya kabupaten/kota		0	0	0	0	0	0	0	Lppd
	25 Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya		0	0	0	0	0	0	0	Lppd
	26 Pemetaan sdm cagar budayadan permuseuman		0	0	0	0	0	0	0	Lppd
	27 Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan pemuseuman kabupaten/kota		0	0	0	0	0	0	0	Lppd
	28 Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman		0	0	0	0	0	0	0	Lppd
	29 Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat		0	0	0	0	0	0	0	Lppd
II	ASPEK PELAYANAN UMUM									
a	Fokus Pelayanan Urusan Pemerintahan Wajib									
1	Terkait Pelayanan Dasar									
I	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan									
	1 Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	11,12	11,14	11,14	11,15	11,16	11,16	11,16	Indikator sasaran kota
	2 Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,39	14,39	14,4	14,41	14,42	14,43	14,43	Indikator sasaran kota
	3 Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan yang bersertifikat Pendidik	%	-	65%	65%	65%	66%	67%	67%	Indikator Tujuan PD
	4 Angka Partisipasi PAUD dan Pendidikan Dasar	%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Tujuan PD

Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi Kinerja	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	APM Paud, SD, dan SMP	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
6	Persentase Guru, kasek dan Pengawas berkompetensi	%	-	-	65%	65%	66%	67%	67%	Indikator Sasaran PD
7	Persentase sekolah yang memenuhi SNP	%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
8	Presentase Sekolah yang Berkurikulum SNP	%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
9	Wajib belajar 9 tahun	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
10	Presentase Sekolah yang Berkurikulum SNP	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
11	Persentase Tenaga Pendidik Bersertifikasi yang Berprestasi	%	78,98%	81.25%	20%	20%	25%	25%	25%	Indikator Program PD
12	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD		5.768	5.122	4.500	4.210	4.000	3.750	3.750	Lppd
13	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar		19.687	18.229	17.000	16.750	16.500	16.000	16.000	Lppd
14	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama		8.442	8.819	8.000	7.750	7.500	7.250	7.250	Lppd
15	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan		-	202	200	195	180	170	170	Lppd
16	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi	lembaga	99	99	16	16	16	16	16	Lppd
17	Jumlah peserta didik PAUD yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Anak	1	49	50	50	50	50	50	Lppd
18		Anak		109	90	90	90	90	90	Lppd

Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi Kinerja	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	26	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	anak	11.482	11.400	11.400	11.000	11.000	11.000	Lppd
	27	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	anak	10.957	10.500	10.500	10.000	10.000	10.000	Lppd
	28	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	rasio	01.24	01.23	01.23	01.22	01.20	01.20	Lppd
	29	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	rasio	01.29	01.28	01.28	01.27	01.27	01.27	Lppd
	30	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	orang	831	803	760	715	674	674	Lppd
	31	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	orang	649	629	371	538	513	513	Lppd
	32	jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	rasio	01.04	01.04	01.04	01.04	01.04	01.04	Lppd
	33	jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	rasio	01.07	01.07	01.05	01.05	01.05	01.05	Lppd
	34	jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	orang	184	176	171	165	161	167	Lppd
	35	jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	orang	90	86	80	72	68	68	Lppd
	36	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	orang	818	833	648	658	668	668	Lppd

Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi Kinerja	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	37	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	orang	642	656	666	681	696	696	Lppd
	38	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	orang	65	70	70	73	73	73	Lppd
	39	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	orang	19	20	20	23	23	23	Lppd
	40	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	orang	184	180	175	170	165	165	Lppd
	41	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	orang	90	80	78	75	70	70	Lppd
	42	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi	lembaga	3	1	1	1	1	1	Lppd
	43	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah		0	0	0	0	0	0	Lppd
	44	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima pembebasan biaya pendidikan		0	0	0	0	0	0	Lppd
	45	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan	Orang	01.15	01.25	01.27	01.29	01.30	01.30	Lppd

Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi Kinerja	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan	
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	46	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan	Orang	61	40	37	35	30	30	Lppd	
	47	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	Orang	61	40	37	35	30	30	Lppd	
	48	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Orang	65	70	70	73	73	73	Lppd	
	49	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah D-IV atau S1	Orang	6	6	6	6	6	6	Lppd	
	50	jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar(SD/MI, SMP/MTs)	Orang	31.801	30.204	26.937	26.450	26.311	26.301	26.214	spm
	51	jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Orang	96	202	200	210	225	230	230	spm
	52	jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Orang	5.768	5.122	4.500	4.250	4.000	3.750	3.750	spm
	53	Indeks Pengetahuan	Indeks	0,77	0,77	-	-	-	-	0,77	Indikator Lama
	54	Persentase Sekolah Standar Nasional Pendidikan	%	-	85	-	-	-	-	85	Indikator Lama
	55	Persentase Jumlah tenaga pendidik yang bersertifikasi	Guru	76,66	76,66	-	-	-	-	76,66	Indikator Lama
	56	Angka Partisipasi Murni SD/SMP	Skor	152,99	127,04	-	-	-	-	127,04	Indikator Lama
	57	Angka Partisipasi Kasar PAUD	Skor	-	95,61	-	-	-	-	95,61	Indikator Lama
	58	Jumlah Lembaga non formal yang Terakreditasi	lembaga	-	106 lembaga	-	-	-	-	106 lembaga	Indikator Lama

Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi Kinerja	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan									
1	Angka Harapan Hidup	Skor	72,75	72,81	72,83	72,83	72,83	72,83	72,83	Indikator sasaran kota
2	Persentase Keluarga Sehat	%	-	0%	50%	52%	54%	56%	56%	Indikator tujuan PD
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	81,84	83,54	81,99	82,21	-	-	82,66	Indikator Sasaran PD
4	Persentase Indikator SPM mencapai target	%	66,67%	50,00%	50,00%	58,33%	-	-	58,33%	Indikator Sasaran PD
5	Persentase rumah tangga sehat	%	-	68,00%	69,00%	70,00%	71,00%	72,00%	72,00%	Indikator Sasaran PD
6	Persentase rumah sehat	%	-	84,00%	86,00%	88,00%	89,00%	90,00%	90,00%	Indikator Sasaran PD
7	Persentase rata-rata upaya kesehatan bersumber masyarakat berstrata puri	%	-	60,38%	61,50%	62,00%	62,50%	63,00%	63,00%	Indikator Sasaran PD
8	Indeks Keluarga Sehat	%	-	0,45	0,50	0,52	0,54	0,56	0,56	Indikator Sasaran PD
9	Persentase tenaga kesehatan yang teregristrasi	%	-	88,00%	89,00%	90,00%	91,00%	92,00%	92,00%	Indikator Sasaran PD
10	Persentase capaian aplikasi sarana prasarana kesehatan (ASPAK) Puskesmas	%	-	84,32%	84,32%	84,60%	84,80%	85,00%	85,00%	Indikator Sasaran PD
11	Persentase peningkatan sarana pelayanan kefarmasian yang beroperasi sesuai standart	%	-	70,00%	72,00%	74,00%	76,00%	78,00%	78,00%	Indikator Sasaran PD
12	Persentase masyarakat Kota Madiun yang memiliki jaminan kesehatan	%	-	96,00%	97,00%	98,00%	99,00%	100,00%	100,00%	Indikator Sasaran PD
13	Persentase rata-rata IKM puskesmas se- Kota Madiun	%	-	83,57%	86,00%	86,20%	86,40%	86,60%	86,60%	Indikator Sasaran PD
14	Rata - rata nilai PKP Puskesmas	%	-	92,34%	86,63%	86,92%	87,53%	88,11%	88,11%	Indikator Sasaran PD
15	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	%	-	66,67%	50,00%	66,67%	75,00%	75,00%	75,00%	Indikator Program PD
16	Persentase kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan yang sesuai standar	%	-	88%	89%	90%	91%	92%	92%	Indikator Program PD

Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi Kinerja	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan	
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	63	Persentase anak usia Pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	%	97,51%	79.41%	100%	100%	100%	100%	100%	Spm
	64	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining Kesehatan sesuai standar	%	107,18%	104.63%	100%	100%	100%	100%	100%	Spm
	65	Persentase warga negara usia 60 Tahun ke atas mendapatkan skrining Kesehatan sesuai standar	%	93,20%	76.10%	100%	100%	100%	100%	100%	Spm
	66	Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	%	89,21%	55.85%	100%	100%	100%	100%	100%	Spm
	67	Persentase Penderita diabetes melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	%	106,54%	112.74%	100%	100%	100%	100%	100%	Spm
	68	Persentase orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan Kesehatan jiwa sesuai standar	%	107,44%	108.90%	100%	100%	100%	100%	100%	Spm
	69	Persentase orang terduga Tuberculosis (TBC) mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	83,43%	63,78%	100%	100%	100%	100%	100%	Spm
	70	Persentase orang dengan resiko terinfeksi (<i>human immunodeficiency virus</i>) HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	103,70%	111.81%	100%	100%	100%	100%	100%	Spm
	71	Indeks Kesehatan	Indeks	0,81	0,81	-	-	-	-	0,81	Indikator Lama
	72	Status Akreditasi SNARS		-	Lulus Paripurna Akreditasi SNARS	-	-	-	-	Lulus Paripurna Akreditasi SNARS	Indikator Lama

Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi Kinerja	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD Kota Madiun	Indeks	-	79,17	-	-	-	-	79,17	Indikator Lama
74	Persentase Pencapaian Standart Pelayanan Minimal Rumah Sakit	%	-	50	-	-	-	-	50	Indikator Lama
75	Persentase Sarana dan Prasarana Rumah Sakit yang Sesuai Standar	%	100	100	-	-	-	-	100	Indikator Lama
76	Persentase pencapaian kinerja Badan Layanan Umum Daerah	%	100	100	-	-	-	-	100	Indikator Lama
77	Persentase Penyediaan Sarana/ Prasarana Fasilitas Kesehatan yang Bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan	%	-	91,15	-	-	-	-	91,15	Indikator Lama
78	Persentase Penduduk Kota Madiun yang menjadi peserta JKN	%	100	95,17	-	-	-	-	95,17	Indikator Lama
79	Persentase Kesehatan Masyarakat yang Sesuai Standart	%	-	25	-	-	-	-	25	Indikator Lama
80	Persentase Penurunan Kasus Kejadian Luar Biasa	%	-	-1940	-	-	-	-	-1940	Indikator Lama
81	Persentase Sarana Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi	%	-	75	-	-	-	-	75	Indikator Lama
III	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat									
1	Indeks Ketentraman	Indeks	-	76,87	76,95	77,05	77,15	77,2	77,2	Lanjutan Indikator Tujuan Kota
2	Indeks Rasa Aman	Indeks	73,55	76,05	76,15	76,2	76,27	76,35	76,35	Lanjutan Indikator sasaran kota
3	Persentase nilai Keamanan dan Ketentraman	%	70,2	72,44	72,45	72,48	-	-	72,48	Indikator Tujuan PD
4	Nilai Keamanan dan Ketertiban	Skor	-	75	76	76,1	76,2	76,3	76,3	Indikator Tujuan PD

Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi Kinerja	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan	
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	5	Persentase masyarakat yang taat Perda dan Perwal	%	99%	97%	96%	97%	97%	98%	98%	Indikator Sasaran PD
	6	Persentase Tingkat Penanganan Kejadian Kebakaran	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
	7	Persentase Kasus K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	%	98%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	Indikator Program PD
	8	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
	9	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	98%	97%	96%	97%	97%	97%	97%	Lppd
	10	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
	11	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
	12	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	Lppd
	13	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani		3,628	2,051	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Lppd
	14	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	Orang	1.387 orang	1.348 orang	1.300 orang	1.300 orang	1.300 orang	1.300 orang	1300 orang	Lppd
	15	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan		99	76	76	76	76	76	76	Lppd
	16		Orang	4 orang	4 orang	4 orang	5 orang	5 orang	5 orang	5 orang	Lppd

Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi Kinerja	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan	
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran										
	25	Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	orang	16 orang	22 orang	22 orang	22 orang	22 orang	22 orang	22 orang	Lppd
	26	Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	Lppd
	27	Pelayanan Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan Perkada	%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Spm
	28	Pelayanan warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Spm
	29	Cakupan penanganan penanggulangan bencana	%	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	Indikator Tujuan PD
	30	Indeks Resiko Bencana	Indeks	-	116 indeks	115 indeks	114 indeks	113 indeks	112 indeks	112 indeks	Indikator Tujuan PD
	31	Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate)	%	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	Indikator Sasaran PD
	32	Persentase Korban Bencana yang tertangani	%	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
	33	Persentase terlatihnya masyarakat dalam penanganan bencana	%	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
	34	Persentase bantuan bencana kepada korban bencana	%	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
	35	Persentase penyampaian informasi kebencanaan secara berkala	%	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
	36	Persentase sarana prasarana penanggulangan bencana dalam kondisi baik	%	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
	37	Jumlah Destana yang terbentuk	%	0	2 desa/ kelurahan	4 desa/ kelurahan	5 desa/ kelurahan	6 desa/ kelurahan	7 desa/ kelurahan	7 desa/ kelurahan	Indikator Sasaran PD
	38	Persentase Early Warning System (EWS) di daerah rawan Bencana	%	-	100	100	-	-	-	100	Indikator Sasaran PD

Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi Kinerja	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja									
1	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	skor	3,85	8,32	8,15	5,74	5,12	5,00	5,00	Lanjutan Indikator sasaran kota
2	persentase calon tenaga kerja yang ditempatkan	%	-	-	20%	20%	30%	30%	30%	Indikator Tujuan PD
3	persentase perselisihan hubungan industrial yang terselesaikan	%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Tujuan PD
4	Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	60,29%	68,01	55%	60%	-	-	60%	Indikator Tujuan PD
5	persentase penyerapan tenaga kerja sektor formal dan informal	%	-	73,04%	70%	75%	-	-	75%	Indikator Sasaran PD
6	persentase perusahaan yang menerapkan perlindungan tenaga kerja sesuai standart	%	100%	100%	70,00%	71,50%	-	-	71,50%	Indikator Sasaran PD
7	persentase calon tenaga kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi	%	-	-	40%	40%	50%	50%	50%	Indikator Sasaran PD
8	persentase peningkatan pemberian informasi peluang kerja kepada pencari kerja	%	-	-	10%	15%	20%	25%	25%	Indikator Sasaran PD
9	persentase perusahaan yang menerapkan perlindungan tenaga kerja	%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
10	persentase peningkatan tenaga kerja sektor informal yang mendapatkan jaminan sosial	%	-	-	10%	10%	10%	10%	10%	Indikator Sasaran PD
11	persentase Penurunan Kasus-kasus Perselisihan Hubungan Industrial	%	-	-	10%	10%	-	-	10%	Indikator Program PD
12	persentase Pencari Kerja yang dilatih	%	21,75%	0,69%	23%	23%	-	-	23%	Indikator Program PD
13	persentase Pencari Kerja Yang ditempatkan	%	85,52%	56,15%	79%	79%	-	-	79%	Indikator Program PD

Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi Kinerja	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Persentase jumlah peserta pelatihan yang berbasis kompetensi	%	-	-	20%	25%	30%	35%	35%	Indikator Program PD
15	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan melalui informasi bursa kerja	%	-	-	10%	10%	15%	15%	15%	Indikator Program PD
16	persentase perusahaan yang mengesahkan peraturan perusahaan	%	-	-	16%	16%	16%	16%	16%	Indikator Program PD
17	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	-	76,92%	76,92%	76,92%	76,92%	76,92%	76,92%	Lppd
18	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	-	68%	68%	68%	68%	68%	68%	Lppd
19	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja		-	15.242.643.966	12.000.000.000	12.500.000.000	12.750.000.000	13.000.000.000	13.000.000.000	Lppd
20	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	%	-	100%	70,00%	71,50%	72,50%	75,00%	75,00%	Lppd
21	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	%	-	56,15%	50%	51%	52%	53%	53%	Lppd
22	Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota.	Do kumen	-	1	1	1	1	1	1	Lppd
23	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja.		-	0	0	0	0	0	0	Lppd
24			-	5	8	10	12	15	15	Lppd

Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi Kinerja	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota.							
	25	%	Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster -	0%	0%	30%	30%	30%	30%	Lppd
	26	%	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi 26%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	Lppd
	27	%	Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan 50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	Lppd
	28	%	Persentase LPK yang terakreditasi 26%	50%	38%	38%	40%	40%	40%	Lppd
	29	%	Persentase LPK yang memiliki perizinan 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
	30	%	Jumlah penganggur yang dilatih 850	35	230	230	230	230	230	Lppd
	31	%	Persentase lulusan bersertifikat pelatihan 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
	32	%	Persentase penyerapan lulusan 66%	66%	20%	20%	20%	20%	20%	Lppd
	33	%	Lulusan bersertifikat kompetensi 66%	66%	20%	20%	20%	20%	20%	Lppd
	34	%	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan -	0%	0%	25%	25%	25%	25%	Lppd
	35	%	Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) -	0%	0%	25%	25%	25%	25%	Lppd

Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi Kinerja	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan	
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	36	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	%	-	0%	1%	1%	1,50%	2%	2%	Lppd
	37	Data tingkat produktivitas total	%	-	64,00%	62,50%	63%	64%	65,00%	65,00%	Lppd
	38	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	%	-	30%	25%	25%	27%	30%	30%	Lppd
	39	Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	%	-	48%	30%	30%	30%	30%	30%	Lppd
	40	Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan		-	23	23	23	23	23	23	Lppd
	41	Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah.	%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
	42	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	%	-	100%	70%	70%	73%	75%	75%	Lppd
	43	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	%	-	3%	5%	5%	4%	3%	3%	Lppd
	44	Jumlah mogok kerja		-	0	5	5	4	4	4	Lppd
	45	Jumlah penutupan perusahaan		-	0	10	10	9	9	9	Lppd
	46	Jumlah perselisihan kepentingan		-	0	15	15	14	13	13	Lppd

Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi Kinerja	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan	
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	66	Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk	-	0	0	0	0	0	0	Lppd	
	67	Persentase Tenaga Kerja yang terlindungi	%	-	60	-	-	-	-	60	Indikator Lama
	68	Persentase lulusan pelatihan yang berkompeten	Orang	-	35 orang	-	-	-	-	35 orang	Indikator Lama
II		Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil									
	1	Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks	A-82	A-83,56	A-84	A-85	A-86	A-87	A-87	Indikator Tujuan PD
	2	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	99,99	100%	92%	92,45%	92,72%	92,98%	92,98%	Indikator Sasaran PD
	3	Persentase Pengaduan Masyarakat yang terselesaikan	%	-	60%	60,50%	70,00%	70,50%	80,00%	80,00%	Indikator Sasaran PD
	4	Persentase Penerbitan Dokumen Kependudukan	%	99,18	93,33%	84%	84,00%	84,50%	85%	85%	Indikator Program PD
	5	Persentase Penerbitan Dokumen Akta Pencatatan Sipil	%	100	93,33%	94%	94,25%	94,50%	94,75%	94,75%	Indikator Program PD
	6	Akurasi database kependudukan	%	-	-	99%	99,10%	99,15%	99,20%	99,20%	Indikator Program PD
	7	Perekaman KTP elektronik	%	-	99,34%	98,25%	98,50%	98,75%	99,00%	99,00%	Lppd
	8	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	-	81,76%	81,00%	90,00%	92,00%	94,00%	94,00%	Lppd
	9	Kepemilikan akta kelahiran	%	-	98,90%	98,90%	99,00%	99,10%	99,20%	99,20%	Lppd
	10	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama		-	2 OPD dengan Perjanjian Kerjasama dan 20 embaga pengguna data kependudukan	18,18%	39,39%	63,63%	90,90%	90,90%	Lppd
	11	Penerbitan akta perkawinan	%	-	100%	99,00%	99,10%	99,20%	99,30%	99,30%	Lppd
	12	Penerbitan akta perceraian	%	-	100%	99,00%	99,10%	99,20%	99,30%	99,30%	Lppd
	13	Penerbitan akta kematian	%	-	100%	98,50%	98,75%	99,00%	99,25%	99,25%	Lppd

Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi Kinerja	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan	
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	9	Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	Ada/ tidak	-	tidak	tidak	tidak	tidak	tidak	Lppd	
	10	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	Ada/ tidak	-	ada	ada	ada	ada	ada	Lppd	
	11	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	unit	-	-	1	1	1	1	Lppd	
	12	Tertanganinya kerawanan pangan	Ada/ tidak	-	ada	ada	ada	ada	ada	Lppd	
	13	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Ada/ tidak	-	tidak	tidak	tidak	tidak	tidak	Lppd	
	14	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	Ada/ tidak	-	ada	ada	ada	ada	ada	Lppd	
	15	Rasio Ketersediaan Pangan Utama dan Konsumsi Pangan	skor	-	1,38	-	-	-	-	1,38	Indikator Lama
	16	Persentase Peningkatan Ketersediaan Pangan Utama	%	-	0,18	-	-	-	-	0,18	Indikator Lama
IV		Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									
	1	<i>Contraception Prevalency Rate diatas rata-rata nasional</i>	%		72,76%	62,17%	62,54%	63,00%	64,00%	64,00%	Indikator Sasaran PD
	2	Persentase Angka UKP (Usia Kawin Pertama) < 20 tahun	%	≤ 5.58%	≤ 4.95%	≤ 4.8%	≤ 4.7%	-	-	≤ 4.7%	Indikator Program PD
	3	Menurunnya Unmet Need	%	4.2%	11,60%	16,93%	8,00%	7,50%	7,00%	7,00%	Indikator Program PD
	4	Meningkatnya kepesertaan anggota Tribina PUS yang ber-KB	%	79,10%	82,25%	80,25%	81,00%	82,00%	83,00%	83,00%	Indikator Program PD

Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi Kinerja	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan	
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	15	Persentase Peserta KBaktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	-	72,76	50,00%	51,00%	52,00%	53,00%	53,00%	Lppd
	16	Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif		-	56	56	56	56	56	56	Lppd
	17	Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	%	-	44,90%	45,00%	45,01%	45,02%	45,03%	45,03%	Lppd
	18	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	%	-	64,96%	64,96%	64,96%	64,96%	64,96%	64,96%	Lppd
	19	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
	20	Total Fertility Rate / Angka Kelahiran Total	skor	1,91	1,98	<2.1					
	21	Persentase Peserta KB Aktif MKJP	%	-	42,88	-	-	-	-	42,88	Indikator Lama
	V	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika									
	1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	2,82	Tidak ada penilaian tahun 2020	2,83 (BAIK)	2,85 (BAIK)	2,87 (BAIK)	2,90 (BAIK)	2,90 (BAIK)	Lanjutan Indikator Sasaran Kota
	2	Indeks Domain Layanan SPBE	indeks	-	-	2,80	2,87	2,95	3,10	3,10	Indikator Tujuan PD
	3	Indeks Domain Manajemen SPBE				1,9	1,93	1,97	2,01	2,01	Indikator Tujuan PD
	4	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	Skor	87,1	87,25	90	91	92	93	93	Indikator Sasaran PD
	5	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD

Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi Kinerja	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan	
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			Jumlah kompilasi stastik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS								
	9	%	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik	-	0%	0	100%	100%	100%	100%	Lppd
	10	%	Persentase kelengkapan metadata variabel dari kegiatan statistik	-	0%	0	100%	100%	100%	100%	Lppd
	11	%	Persentase Data Statistik Sektoral yang Terintegrasi	50	60	80	-	-	-	80	Indikator Lama
VII			Urusan Pemerintahan Bidang Persandian								
	1	%	Presentase informasi Daerah yang wajib diamankan dengan persandian	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
	2	%	Persentase OPD yang menggunakan layanan persandian untuk pengamanan informasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
	3	%	Tingkat keamanan informasi pemerintah	-	65%	65%	67%	68%	70%	70%	Lppd
	4		Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	-	0%	0	0	0	0	0	Lppd
	5	%	Persentase system elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip2 manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
	6	%	Persentase sistem elektronik/ asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	-	100%	70%	75%	80%	85%	85%	Lppd

Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi Kinerja	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan	
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	12	Persentase Peningkatan Kunjungan Perpustakaan	%	-	33,25%	-	-	-	-	33,25%	Indikator Lama
	13	Nilai IKM Pemustaka terhadap layanan perpustakaan	Indeks	-	87,24	72	-	-	-	72	Indikator Lama
	IX	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan									
	1	Indeks Penyelenggaraan Kearsipan	Indeks	-	-	56	57	58	59	59	Indikator Tujuan PD
	2	Persentase Perangkat Daerah yang Tertib Arsip	%	-	-	9%	9%	9%	9%	9%	Indikator Sasaran PD
	3	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja (alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Skor	-	82%	84%	86%	88%	90%	90%	Indikator Program PD
	4	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Skor	-	8,2	8,2	8,4	8,6	8,8	8,8	Indikator Program PD
	5	persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	%	-	9%	9%	9%	9%	9%	45%	Lppd
	6	persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	%	-	15%	9%	9%	9%	9%	51%	Lppd
	7	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	%	-	12%	6%	6%	6%	6%	36%	Lppd
	8	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN		-	0% Aplikasi RIKANDI belum di launching oleh ANRI	belum dilaksanakan	belum dilaksanakan	belum dilaksanakan	belum dilaksanakan	belum dilaksanakan	Lppd
	9	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	kali	-	Belum Dilakukan Pemusnahan	Belum Dilakukan Pemusnahan	1 kali	1 kali	1 kali	3 Kali	Lppd
	10	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	Daftar arsip	-	22 daftar arsip yang diselamatkan	25 daftar arsip yang diselamatkan	28 daftar arsip yang diselamatkan	31 daftar arsip yang diselamatkan	34 daftar arsip yang diselamatkan	34 daftar arsip yang diselamatkan	Lppd

Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi Kinerja	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	11	Penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/ kota yang sesuai NSPK di provinsi	-	2 Perangkat Daerah Provinsi	belum dilaksanakan	belum dilaksanakan	belum dilaksanakan	belum dilaksanakan	2 Perangkat Daerah Provinsi	Lppd
	12	Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan provinsi yang sesuai NSPK	-	18 arsip hasil alih media	21 arsip hasil alih media	24 arsip hasil alih media	27 arsip hasil alih media	30 arsip hasil alih media	30 arsip hasil alih media	Lppd
	13	Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah provinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	-	2 Daftar Arsip	belum dilaksanakan	belum dilaksanakan	belum dilaksanakan	belum dilaksanakan	2 Daftar Arsip	Lppd
	14	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah provinsi yang sesuai NSPK	-	1 (satu) SOP Layanan Peminjaman Arsip	1 (satu) SOP Layanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	belum dilaksanakan	belum dilaksanakan	belum dilaksanakan	belum dilaksanakan	Lppd
	15	Persentase Unit Kearsipan yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku	-	5 unit	-	-	-	-	5 unit	Indikator Lama
	16	Jumlah Berkas Arsip Yang Dikelola	57.615 berkas	60,004 berkas	59.500 berkas	-	-	-	59.500 berkas	Indikator Lama
3		Fokus Pelayanan Urusan Pilihan								
I		Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi								
	1	Persentase pendaftar transmigrasi yang terfasilitasi	2%	2%	3%	3%	3%	3%	3%	Indikator Sasaran PD
	2	persentase Penduduk yang mendapatkan sosialisasi ketransmigrasian	-	-	-	20%	20%	20%	20%	Indikator Program PD
	3	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	-	0	tidak ada kawasan transmigrasi					Lppd

Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi Kinerja	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan	
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	4	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	-	0	tidak ada pemukiman transmigrasi yang difasilitas					Lppd	
	5	Jumlah satuan pemukiman yang dibina	-	0	tidak ada pemukiman transmigrasi yang dibina					Lppd	
4		Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan									
I		Sekretariat Daerah									
	1	Nilai Indeks reformasi birokrasi	Indeks	(B) 67,34	(B) 65,55	(B) 67	(B) 68	(B) 69	(BB) 70,01	(BB) 70,01	Lanjutan Indikator Tujuan Kota
	2	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah Daerah	Skor	B (63,5)	BB (70,01)	BB (73)	BB (76)	BB (79)	A (80,01)	A (80,01)	Lanjutan indikator sasaran kota
	3	Persentase Penyediaan data dan informasi yang mutakhir, valid, komprehensif, aman, transparan dan cepat dalam rangka fasilitasi pengambilan keputusan	%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Tujuan PD
	4	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Tinggi/ Sangat Tinggi	3,3056 Sangat Tinggi	3,385 Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Lanjutan Indikator Sasaran Kota
	5	Indeks kepuasan masyarakat (IKM) Pemerintah Kota Madiun	Indeks	82,85 (baik)	85,501 (baik)	82,85 (baik)	83 (baik)	85 (baik)	86 (baik)	86 (baik)	Lanjutan Indikator Sasaran Kota
	6	Nilai indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks	-	B	C	B	B	B	B	Indikator Sasaran Rutin Semua PD dan Indikator Tujuan Kecamatan
	7	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Skor	A	A	A	A	A	A	A	Indikator Program Rutin Semua PD
	8	Persentase Indeks RB Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Madiun bernilai baik	%	-	-	70%	72%	74%	76%	78%	Indikator Tujuan PD

Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi Kinerja	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan	
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	9	Persentase Nilai SAKIP Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Madiun yang berpredikat BB	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
	10	Persentase IKM Unit Kerja Pelayanan yang berpredikat baik	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
	11	Indeks Kepuasan Masyarakat di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Indeks			80,08				80,08	Indikator Program PD
	12	Persentase Penyediaan Data Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
	13	Indeks Kepuasan Masyarakat di Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Indeks			80,98				80,98	Indikator Program PD
	14	Persentase Penyediaan Data Bidang Perekonomian dan Pembangunan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
	15	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. Yang ditandatangani pada kuartal pertama	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Lppd
	16	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	3,93%	21,52%	21,55%	21,60%	21,65%	21,70%	21,70%	Lppd
	17	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	83,35%	87,42%	87,50%	87,60%	87,70%	87,80%	87,80%	Lppd
	18	Persentase Capaian Kinerja Indikator Sasaran Kota (LKJ Kota) Sesuai Target yang ditetapkan	%	-	74%	-	-	-	-	74%	Indikator Lama
	19	persentase jumlah pengadaan barang/jasa yang terealisasi	%	-	100	-	-	-	-	100	Indikator Lama
	20	persentase OPD yang melaporkan progres fisik dan keuangan tepat waktu sesuai jadwal pelaksanaan	%	-	100	-	-	-	-	100	Indikator Lama

Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi Kinerja	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	jumlah kegiatan keagamaan yang difasilitasi	kali	-	15	-	-	-	-	15	Indikator Lama
22	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang indeks Kepuasan Masyarakatnya Bernilai Baik	%	-	100	-	-	-	-	100	Indikator Lama
23	Nilai IKM Bagian Umum	Indeks	-	81	-	-	-	-	81	Indikator Lama
24	IKM di Bidang Administrasi dan Keuangan	Indeks	-	81	-	-	-	-	81	Indikator Lama
25	IKM di Bidang Kerumahtangaan	Indeks	-	81	-	-	-	-	81	Indikator Lama
26	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di bidang keprotokolalan dan kepegawaian	Indeks	-	81	-	-	-	-	81	Indikator Lama
27	Pelayanan Dibidang Hukum	jenis	-	3 jenis	-	-	-	-	3 jenis	Indikator Lama
28	Persentase Pencapaian Kinerja Pemerintahan Tepat waktu	%	-	100	-	-	-	-	100	Indikator Lama
29	Persentase Pelayanan Kedinasan Pimpinan	%	-	105	-	-	-	-	105	Indikator Lama
30	Jumlah Dokuem Pertanggungjawaban Kepala Daerah yang tepat syarat	Do kumen	-	6 dokumen	-	-	-	-	6 dokumen	Indikator Lama
31	Jumlah Perjanjian Kerjasama	kali	-	10 Kerjasama	-	-	-	-	10 Kerjasama	Indikator Lama
32	Persentase Produk Hukum yang Berkualitas	%	-	100	-	-	-	-	100	Indikator Lama
33	Nilai Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik	skor	-	2,75	-	-	-	-	2,75	Indikator Lama
34	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai regulasi	%	-	100	-	-	-	-	100	Indikator Lama
35	Persentase Perangkat Daerah yang Capaian Kinerja (LKJ Perangkat Daerah) Bernilai Sangat Baik (≥ 100)	%	-	94,12	-	-	-	-	94,12	Indikator Lama

Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi Kinerja	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan	
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	36	Persentase Kegiatan Keagamaan yang difasilitasi	%	-	100	-	-	-	-	100	Indikator Lama
	37	Persentase OPD yang melaksanakan kegiatan sesuai jadwal	%	-	0	-	-	-	-	0	Indikator Lama
	38	jumlah kegiatan pendukung aktivitas ekonomi	Kali	-	4	-	-	-	-	4	Indikator Lama
	39	Jumlah kegiatan terkait penyelesaian peredaran rokok ilegal	kali	-	2	-	-	-	-	2	Indikator Lama
	40	Tingkat Inflasi	skor	-	1,8	-	-	-	-	1,8	Indikator Lama
	41	Persentase Kelompok Sosial Ekonomi yang difasilitasi	%	-	100	-	-	-	-	100	Indikator Lama
	42	Persentase Jumlah Kegiatan Sosialisasi Bidang Cukai Yang Dilaksanakan	%	-	100	-	-	-	-	100	Indikator Lama
II		Sekretariat DPRD									
	1	Persentase Terpenuhinya Hak Keuangan dan Administratif DPRD sesuai ketentuan Peratuarn Perundang-Undangan)	%	-	-	-	100%	-	-	100%	Indikator Tujuan PD
	2	Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks	-	-	80	80	85	86	86	Indikator Tujuan PD
	3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks	-	-	-	84	-	-	84	Indikator Sasaran PD
	4	Persentase Tertib Administrasi	%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
	5	Persentase Kompetensi Sumber Daya Manusia	%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
	6	Persentase Sarana dan Prasarana yang berkualitas	%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
	7	Persentase Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum yang Sesuai dengan Standart Pelayanan	%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD

Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi Kinerja	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan	
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	8	Persentase Fasilitasi Penganggaran APBD yang Sesuai Dengan Standart Pelayanan	%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
	9	Persentase Fasilitasi Pengawasan Pelaksanaan APBD yang Sesuai dengan Standart Pelayanan	%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
	10	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap layanan Tugas dan Fungsi	Indeks	81,29	90,42	79	80	81	82	82	Indikator Program PD
	11	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap layanan Perundang-Undangan, Dokumentasi dan Rapat	Indeks	-	80	-	-	-	-	80	Indikator Lama
	5	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan									
	III	Perencanaan									
	1	Tercapainya Target Sasaran – sasaran RPJMD	%	86%	70%	80%	85%	-	-	85%	Indikator Tujuan PD
	2	Indeks Perencanaan	Indeks	-	32	33	34	35	36	36	Indikator Tujuan PD
	3	Sinergitas dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJA)	%	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	Indikator Sasaran PD
	4	Persentase Capaian Kinerja Atas Target Indikator Program Pemerintah Kota Madiun	%	93%	91%	100%	100%	-	-	100%	Indikator Sasaran PD
	5	Indeks Kualitas RPJMD	Indeks	-	31	32	33	34	35	35	Indikator Sasaran PD
	6	Indeks Kualitas RKPD	Indeks	-	31	32	33	34	35	35	Indikator Sasaran PD
	7	Persentase capaian kinerja program RKPD	%	-	90%	91%	92%	93%	94%	94%	Indikator Sasaran PD
	8	Nilai SAKIP pada komponen perencanaan	Skor	-	23,65	24	24,5	25	,25,5	25,5	Indikator Sasaran PD

Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi Kinerja	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan	
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	9	persentase program penanganan covid-19 yang dilaksanakan	%	-	0	91	0	0	0	0	Indikator Sasaran PD
	10	persentase sasaran Perangkat Daerah yang berbasis outcome	%		90%	91%	92%	93%	94%	94%	Indikator Sasaran PD
	11	Persentase Perangkat Daerah yang Dokumen Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Sesuai Ketentuan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
	12	Persentase Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
	13	Sinergitas dokumen perencanaan Kota Madiun, Provinsi dan Nasional	%	-	100	-	-	-	-	100	Indikator Lama
	14	Penerapan Kebijakan pembangunan daerah yang menerapkan konsep Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS)	%	-	100	-	-	-	-	100	Indikator Lama
	15	Persentase Perangkat Daerah yang Dokumen Perencanaannya sesuai Ketentuan	%	-	100	-	-	-	-	100	Indikator Lama
	16	Persentase Capaian target program pembangunan bidang ekonomi, sosil dan budaya	%	-	100	-	-	-	-	100	Indikator Lama
	17	Persentase Dokumen Perencanaan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya yang dapat dimanfaatkan	%	-	100	-	-	-	-	100	Indikator Lama
	18	Persentase Capaian target program pembangunan bidang prasarana wilayah	%	-	100	-	-	-	-	100	Indikator Lama
	19	Persentase Dokumen Perencanaan pembangunan prasarana wilayah yang dapat dimanfaatkan / Persentase capaian target sasaran pembangunan Kota Madiun Bidang Prasarana Wilayah	%	-	100	-	-	-	-	100	Indikator Lama
	20	Persentase Pemerintah Kota yang capaian kinerjanya lebih dari 80	%	-	100	-	-	-	-	100	Indikator Lama

Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi Kinerja	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
IV	Keuangan									
1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP/ WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Lanjutan Sebelumnya Indikator Sasaran Kota Menjadi Indikator Tujuan PD
2	Persentase OPD yang menyampaikan laporan keuangan sesuai WTP	%	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	Indikator Sasaran PD
3	Persentase pemanfaatan aset daerah	%	-	-	96%	96%	96%	96%	96%	Indikator Sasaran PD
4	Persentase aset yang dilindungi	%	70,85%	77%	80%	80%	-	-	80%	Indikator Sasaran PD
5	Persentase tersusunnya Laporan BTT	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
6	Persentase Pengelolaan kas daerah yang akuntabel	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
7	Persentase Tersusunnya dokumen Perencanaan Penganggaran yang tepat waktu dan berkualitas	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
8	Persentase Laporan Keuangan OPD yang sesuai SAP	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
9	Persentase bidang tanah pemerintah kota yang bersertifikat	%	-	80%	80%	80%	80%	80%	80%	Indikator Sasaran PD
10	Realisasi kinerja keuangan yang memenuhi target	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
11	Pengelolaan Aset yang berkondisi baik	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
12	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	%	19,68%	21%	21,10%	21,20%	21,20%	21,30%	21,30%	Lppd
13	Rasio PAD terhadap PDRB Non Migas	%	2,52%	2,49%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	Lppd
14	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (expenditures)	%	66,15%	60,63%	60,70%	60,90%	62,20%	63%	63%	Lppd

Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi Kinerja	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan	
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	15	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	83,36%	79,38%	80%	80%	80%	80%	80%	Lppd
	16	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	107	106%	93,15%	95,50%	102%	103%	103%	Lppd
	17	Manajemen Aset	Ya/ tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Lppd
	18	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	%	19,47%	22,15%	21,50%	20,10%	19%	18%	18%	Lppd
	19	Rasio Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah	Rp.	82.332.000.000	76.350.000.000	76.978.000.000	80.255.000.000	-	-	80.255.000.000	Indikator Tujuan PD
	20	Capaian Target Pajak Daerah	%	-	-	-	100%	100%	100%	100%	Indikator Tujuan PD
	21	Persentase peningkatan target pajak daerah	%	-	-	-	5%	5%	5%	5%	Indikator Tujuan PD
	22	persentase Peningkatan Target Pajak daerah	%	35%	36%	37%	38%	-	-	38%	Indikator Sasaran PD
	23	persentase peningkatan objek pajak yang dipantau dengan IT	%	-	-	-	5%	5%	5%	5%	Indikator Sasaran PD
	24	persentase peningkatan pembayaran pajak melalui transaksi elektronik	%	-	-	-	5%	5%	5%	5%	Indikator Sasaran PD
	25	persentase Pencapaian Target Pajak daerah berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah	%	-	-	-	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
	26	persentase Peningkatan Data Potensi Wajib Pajak Daerah	%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	Indikator Program PD
	27	Peningkatan Capaian Penagihan Pajak Daerah	%	37%	41%	41%	41%	42%	43%	43%	Indikator Program PD
	28	Persentase Peningkatan nilai Aset Pemerintah Daerah	%	-	6	-	-	-	-	6	Indikator Lama
	29	Persentase Bidang tanah bersertifikat	%	-	77%	-	-	-	-	77%	Indikator Lama

Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi Kinerja	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan	
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	30	Persentase Kontribusi Pajak daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah	%	-	100	-	-	-	-	100	Indikator Lama
	31	Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban APBD Tepat Waktu	Tidak/ tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	-	-	-	-	Tepat Waktu	Indikator Lama
	32	Pengesahan Perda APBD Tepat Waktu	Tidak/ tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	-	-	-	-	Tepat Waktu	Indikator Lama
	33	Persentase Penerbitan SP2D Tepat Waktu	%	-	100	-	-	-	-	100	Indikator Lama
	34	Kontribusi Pengelolaan Aset Terhadap PAD	Rp.	-	8.407.092.860	-	-	-	-	8.407.092.860	Indikator Lama
	35	Persentase Ketersediaan Basis Data Pajak Daerah	%	-	100	-	-	-	-	100	Indikator Lama
	36	Persentase Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah	%	-	118	-	-	-	-	118	Indikator Lama
	IV	Kepegawaian									
	1	Indeks Profesionalisme ASN	Indeks	69,65	69,66	69,66	70	-	-	69,66	Indikator Tujuan PD
	2	Indeks Sistem Merit	Indeks	-	130,5	170	190	220	250	250	Indikator Tujuan PD
	3	Persentase Penempatan Jabatan Sesuai Kompetensi	%	17,25	34,38	23,52	25,5	-	-	23,52	Indikator Lama
	4	Prosentase Penempatan Pegawai dalam Jabatan sesuai dengan SKJ	%	-	-	50%	50%	60%	70%	70%	Indikator Sasaran PD
	5	Persentase penilaian kinerja pegawai dengan hasil baik	%	-	-	95%	95%	-	-	95%	Indikator Sasaran PD
	6	Persentase Peningkatan Kompetensi ASN	%	-	-	30	33	-	-	33	Indikator Sasaran PD
	7	Persentase kesesuaian usulan pengadaan sesuai dengan jumlah formasi yang dibutuhkan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
	8	Persentase perencanaan ASN sesuai dengan kebutuhan	%	0	0	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
	9	Persentase SKP ASN yang bernilai baik (lebih dari 75)	%	0	0	90%	90%	90%	90%	90%	Indikator Sasaran PD

Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi Kinerja	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Persentase Pelanggaran Disiplin ASN	%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	Indikator Sasaran PD
11	Persentase terpenuhinya penggajian, penghargaan sesuai dengan aturan yang berlaku	%	0	0	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
12	Persentase data kepegawaian yang mutakhir	%	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
13	Persentase Pemberhentian ASN tepat waktu	%	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
14	Nilai IKM Pelayanan Kepegawaian	Indeks	87,97	87,62	87,52	87,6	87,7	87,7	87,7	Indikator Program PD
15	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	-	167%	184%	222%	268%	339%	339%	Lppd
16	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	-	10%	11%	14%	17%	18%	18%	Lppd
17	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	-	72%	74%	80%	84%	87%	87%	Lppd
18	Persentase Nilai SKP Pegawai yang Bernilai Baik	%	-	100%	-	-	-	-	100%	Indikator Lama
19	Persentase Tercukupinya Usulan Diklat Aparatur	%	-	113	-	-	-	-	113	Indikator Lama
20	Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian sesuai SOP	%	-	145	-	-	-	-	145	Indikator Lama
21	Persentase Penyelesaian SK Terkait Kesejahteraan PNS yang sesuai SOP	%	-	100	-	-	-	-	100	Indikator Lama
22	Persentase Penempatan PNS sesuai SKM	%	-	100	-	-	-	-	100	Indikator Lama
23	Persentase Kedisiplinan ASN	%	-	100	-	-	-	-	100	Indikator Lama
24	Persentase Pengembangan ASN	%	-	112	-	-	-	-	112	Indikator Lama

Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi Kinerja	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan	
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
V	Pendidikan dan Pelatihan										
	1	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi sesuai PP 11 Thn 2017	%	-	30%	30%	33%	35%	37%	37%	Indikator Sasaran PD
	2	Persentase Realisasi Pengembangan SDM	%	-	-	10%	12%	13%	14%	14%	Indikator Program PD
VI	Penelitian dan Pengembangan										
	1	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	-	1892	1892	1900	1925	1950	1950	Indikator Sasaran Kota dan Indikator Sasaran PD
	2	Indeks kualitas penelitian/kajian	Indeks		32	33	34	35	36	36	Indikator Sasaran PD
	3	persentase program SMART CITY yang dilaksanakan	%		75%	80%	85%	90%	95%	95%	Indikator Sasaran PD
	4	persentase peningkatan jumlah usulan jenis data untuk diajukan rekomendasi	%		5%	5%	5%	5%	5%	5%	Indikator Sasaran PD
	5	persentase hasil penelitian/kajian yang dapat dimanfaatkan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
6	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan										
VII	Inspektorat Daerah										
	1	Level Maturitas SPIP Kota Madiun	Skor	2	2	3	3	-	-	3	Indikator Tujuan PD
	2	Penilaian Mandiri SPIP	Skor	-	3.0	3.1	3.2	3.3	3.4	3.4	Indikator Tujuan PD
	3	persentase Temuan Hasil pengawasan yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi	%	-	91%	92%	93%	-	-	93%	Indikator Sasaran PD
	4	Level Kapabilitas APIP	skor	-	2+	2+	2+	-	-	2+	Indikator Sasaran PD

Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi Kinerja	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Laporan keuangan tersampaikan tepat waktu	%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
6	Nilai IKM Inspektorat	Indeks	-	87 indeks	88 indeks	89 indeks	90 indeks	91 indeks	91 indeks	Indikator Sasaran PD
7	Nilai Survey Kepuasan atas Kinerja Inspektorat	Nilai	-	4.05	4.1	4.15	4.2	4.25	4.25	Indikator Sasaran PD
8	Persentase Tindak lanjut pengaduan masyarakat yang terselesaikan dengan cepat dan tepat	%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
9	Persentase tenaga pemeriksa dan aparaturnya yang bersertifikat dan profesional	%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
10	Persentase Laporan BMD yang tersampaikan secara tertib dan tepat waktu	%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
11	Persentase Rumusan Kebijakan Penyelenggaraan Pengawasan yang disusun sesuai dengan Etika dan Profesionalisme	%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
12	Persentase Laporan Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Administrasi Pengawasan yang tersampaikan secara tertib dan tepat waktu	%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
13	Persentase laporan tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal yang tersampaikan secara tertib dan tepat waktu	%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
14	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Ketaatan yang Dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja perangkat daerah	%	-	-	-	60%	65%	70%	70%	Indikator Sasaran PD
15	Persentase jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan kinerja yang dimanfaatkan untuk peningkatan kinerja perangkat daerah	%	-	-	-	60%	65%	70%	70%	Indikator Sasaran PD

Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi Kinerja	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan	
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	16	Persentase rekomendasi hasil pengawasan lainnya yang dimanfaatkan untuk peningkatan kinerja perangkat daerah	%	-	-	-	60%	65%	70%	70%	Indikator Sasaran PD
	17	Persentase rekomendasi hasil reviu rencana keuangan daerah yang dimanfaatkan untuk peningkatan kinerja keuangan daerah	%	-	-	-	60%	65%	70%	70%	Indikator Sasaran PD
	18	Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kota Madiun	Nilai	-	-	-	71 nilai	75 nilai	81 nilai	81 nilai	Indikator Sasaran PD
	19	Nilai rata - rata evaluasi SAKIP oleh Inspektorat minimal dalam kategori Baik pada perangkat daerah Kota Madiun	Nilai	-	-	-	76,01	79,01	80,01	80,01	Indikator Sasaran PD
	20	Penilaian mandiri maturitas SPIP Terintegrasi	Nilai	-	-	-	2.00	2.50	3.00	3.00	Indikator Sasaran PD
	21	Penilaian Mandiri Kapabilitas APiP	Indeks	-	2.0	2.0	2.0	2.50	3.00	3.00	Indikator Sasaran PD
	22	Jumlah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Madiun yang diusulkan untuk mendapatkan predikat menuju WBK	Unit	-	-	-	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	Indikator Sasaran PD
	23	Persentase rekomendasi rencana aksi hasil koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi yang dimanfaatkan untuk peningkatan kinerja perangkat daerah	%	-	-	-	60%	65%	70%	70%	Indikator Sasaran PD
	24	Persentase rekomendasi hasil reviu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dimanfaatkan untuk peningkatan kinerja perangkat daerah	%	-	-	-	60%	65%	70%	70%	Indikator Sasaran PD
	25	Indeks persepsi pegawai Inspektorat atas Kepuasan Kinerja Inspektorat Kota Madiun	Indeks	-	-	-	3.50	3.75	4.00	4.00	Indikator Sasaran PD
	26	Persentase realisasi dukungan layanan manajemen pengawasan internal	%	-	-	-	60%	70%	80%	80%	Indikator Sasaran PD

Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi Kinerja	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan	
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	27	Persentase realisasi pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kota Madiun	%	-	-	-	60%	70%	80%	80%	Indikator Sasaran PD
	28	persentase OPD yang maturitas SPI nya level 3	%	-	25%	30%	35%	40%	45%	45%	Indikator Program PD
	29	persentase Dokumen Kebijakan dan Sisdur Pengawasan serta Asistensi yang Terpenuhi	%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
	30	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	skor	-	2	3	3	3	3	3	Lppd
	31	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Skor	-	2+	2+	2+	3	3	3	Lppd
	32	Persentase aparatur pengawas yang bersertifikat	orang	-	25 Orang	-	-	-	-	25 Orang	Indikator Lama
	33	Persentase Dokumen Kebijakan dan Sisdur Pengawasan yang Terpenuhi	%	-	100%	-	-	-	-	100%	Indikator Lama
7		Unsur Kewilayahan									
VIII		Kecamatan									
	1	Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban kecamatan	%	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	Indikator Tujuan PD
	2	Persentase peningkatan kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Manguharjo	%	0%	11%	33%	44%	55%	66%	66%	Indikator Sasaran PD
	3	Persentase peningkatan kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Kartoharjo	%	11%	22%	33%	44%	55%	66%	66%	Indikator Sasaran PD
	4	Persentase peningkatan kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Taman	%		11%	22%	33%	44%	55%	55%	Indikator Sasaran PD
	5	Nilai Indeks Pelayanan Publik di Kecamatan Manguharjo	Indeks		2,77	3,08	3,08	3,08	3,08	3,08	Indikator Sasaran PD
	6	Nilai Indeks Pelayanan Publik di Kecamatan Kartoharjo	Indeks		2,85	2,90	2,93	2,96	2,99	2,99	Indikator Sasaran PD

Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi Kinerja	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7	Nilai Indeks Pelayanan Publik di Kecamatan Taman	Indeks	2,60	3,25	3,30	3,50	3,70	3,70	Indikator Sasaran PD
	8	Persentase terfasilitasi pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kecamatan Manguharjo	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
	9	Persentase terfasilitasi pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kecamatan Kartoharjo	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
	10	Persentase terfasilitasi pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kecamatan Taman	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
	11	persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketentraman dan ketertiban masyarakat	%	100%	100%	100%			100%	Indikator Sasaran PD
	12	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah Kecamatan Manguharjo	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program
	13	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah Kecamatan Kartoharjo	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program
	14	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah Kecamatan Taman	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program
	15	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Manguharjo	Indeks	93,34	90,54	90,49	90,03	90,03	90,03	Indikator Program

Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi Kinerja	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kartoharjo	Indeks	87,56	87,7	87,7	87,75	87,8	87,85	87,85	Indikator Program
17	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Taman	Indeks	88,30	88,29	88,12	88,46	88,78	88,94	88,94	Indikator Program
18	Persentase kewenangan yang dijalankan Kecamatan Manguharjo dan tidak dilaksanakan OPD lain	%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program
19	Persentase kewenangan yang dijalankan Kecamatan Kartoharjo dan tidak dilaksanakan OPD lain	%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program
20	Persentase kewenangan yang dijalankan Kecamatan Taman dan tidak dilaksanakan OPD lain	%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program
21	Persentase pengkoordinasian ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Manguharjo	%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program
22	Persentase pengkoordinasian ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Kartoharjo	%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program
23	Persentase pengkoordinasian ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Taman	%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program
24	jumlah usulan prioritas musrenbang kecamatan yang terakomodir dalam RKPD di kecamatan	usulan	18 usulan	18 usulan	18 usulan	-	-	-	18 usulan	Indikator Program PD
25	Persentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	%	-	100	-	-	-	-	100	Indikator Lama
26	Persentase Hasil Koordinasi yang ditindak lanjuti	%	-	100	-	-	-	-	100	Indikator Lama
27	Persentase Usulan Musrenbang Kecamatan yang terakomodir dalam RKPD	%	-	10	-	-	-	-	10	Indikator Lama
28	Indeks perkembangan kelurahan	skor	-	100	-	-	-	-	100	Indikator Lama

Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi Kinerja	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan	
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
8	Unsur Pemerintahan Umum										
IX	Kesatuan Bangsa dan Politik										
	1	Indeks Kerukunan	Indeks	B (73,95) (Harmonis)	(B 74,03) (Harmonis)	B (74,30) (Harmonis)	B (74,40) (Harmonis)	B (74,46) (Harmonis)	B (75,00) (Harmonis)	B (75,00) (Harmonis)	Lanjutan Indikator Sasaran Kota dan Indikator Tujuan PD
	2	persentase konflik yang tertangani	%	96,15%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
	3	Persentase Partai Politik pemenang Pemilu yang lolos verifikasi	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
	4	Jumlah Peningkatan Orkemas yang Berbadan Hukum	organisasi	-	1 organisasi	1 organisasi	1 organisasi	1 organisasi	1 organisasi	1 organisasi	Indikator Sasaran PD
	5	Jumlah Konflik Keagamaan, Kehidupan Sosial dan Budaya	Kejadian / konflik	-	-10	-10	-10	-10	-10	-10	Indikator Sasaran PD
	6	Cakupan pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
	7	persentase pendidikan politik kepada Partai Politik Pemenang Pemilu	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
	8	persentase Status Kelembagaan Orkemas	%	81,80%	72,91%	68%	69%	69%	70%	70%	Indikator Program PD
	9	persentase koordinasi yg dilakukan dengan pemangku kepentingan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
	10	Konflik horisontal di dalam masyarakat	kali	0 konflik	0 konflik	0 konflik	-	-	-	0 konflik	Indikator Program PD
	11	Persentase masyarakat yang memahami nilai-nilai Nasionalisme	%	-	-	100%	-	-	-	100%	Indikator Program PD
	12	Persentase pemahaman masyarakat dibidang politik	%	-	-	100%	-	-	-	100%	Indikator Program PD
	13	Persentase konflik yang terfasilitasi	%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
	14	Persentase Orkesmas yang berbadan Hukum	%	-	40%	45%	-	-	-	45%	Indikator Lama
	15	Cakupan Hubungan Sosial	%	-	2,6	-	-	-	-	2,6	Indikator Lama
	16	Persentase Orkemas	%	-	100	-	-	-	-	100	Indikator Lama

Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi Kinerja	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan	
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
III	ASPEK DAYA SAING DAERAH										
A	Kemampuan Ekonomi										
I	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah										
	1	Persentase koperasi yang berkualitas	%	0,70%	1,30%	10,53%	11,76%	-	-	11,76%	Indikator Tujuan PD
	2	Persentase pertumbuhan Usaha Mikro yang beromzet naik	%	-	-	0,05%	0,05%	-	-	0,05%	Indikator Tujuan PD
	3	persentase Usaha Mikro yang beromzet naik	%	-	-	0,047%	0,075%	0,09%	0,12%	0,12%	Indikator Tujuan PD
	4	persentase koperasi yang bersertifikat NIK	%	-	-	80%	83%	85%	87%	87%	Indikator Tujuan PD
	5	Persentase koperasi aktif	%	99,33%	98,69%	98,69%	98,71%	-	-	98,71%	Indikator Sasaran PD
	6	Persentase Usaha Mikro yang beromzet naik	%	-	-	0,05%	0,05%	-	-	0,05%	Indikator Sasaran PD
	7	Persentase Peningkatan Jumlah Koperasi Yang Bersertifikat Nik	%	-	-	3%	3%	3%	3%	3%	Indikator Sasaran PD
	8	Persentase jumlah koperasi yang jenis usahanya bertambah	%	-	-	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	Indikator Sasaran PD
	9	Persentase Peningkatan Pelaku Usaha Yang Beromzet Naik Setelah Dipromosikan	%	-	-	15%	15%	15%	15%	15%	Indikator Sasaran PD
	10	Persentase peningkatan Pelaku Usaha Mikro Yang Beromzet Naik Setelah Pembinaan	%	-	-	10%	10%	10%	10%	10%	Indikator Sasaran PD
	11	Persentase koperasi bersertifikat NIK	%	0	81,29%	80,13%	86,50%	-	-	86,50%	Indikator Program PD
	12	Persentase koperasi aktif dengan omzet meningkat	%	-	-	30%	30%	-	-	30%	Indikator Program PD
	13	Persentase Usaha Mikro terfasilitasi yang beromzet naik	%	-	-	7,00%	7,00%	-	-	7,00%	Indikator Program PD
	14	Persentase Usaha Mikro dibina yang beromzet naik	%	-	-	7%	7%	7,33%	8%	8%	Indikator Program PD

Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi Kinerja	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota									
	32 Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	%	-	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	Lppd
	33 Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
	34 Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	%	-	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	Lppd
	35 Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	%	-	0%	0,02%	0,04%	0,06%	0,07%	0,07%	Lppd
	36 Persentase jumlah usahamikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	%	-	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%	Lppd
	37 Rasio usaha mikroyang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	%	-	0,84%	0,84%	0,84%	0,84%	0,84%	0,84%	Lppd
	38 Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan	%	-	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	Lppd
	39 persentase pertumbuhan usaha mikro yang mandiri	%	-	0,005	-	-	-	-	0,005	Indikator Lama
	40 Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro	%	-	0,42	-	-	-	-	0,42	Indikator Lama
II	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal									
	1 ICOR	Poin	1,70	-0,91	5,00	4,79	4,58	4,37	4,37	Indikator Tujuan PD
	2 Nilai Realisasi Penanaman Modal	M	968,702 M	377,632 M	191 M	193 M	194 M	195 M	195 M	Indikator Sasaran PD

Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi Kinerja	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan	
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	3	Persentase penerbitan ijin sesuai SP	%	-	-	78%	80%	82%	85%	85%	Indikator Sasaran PD
	4	Jumlah Rekomendasi Terhadap peraturan daerah/peraturan walikota yang terkait dengan investasi	rekom	-	-	2 rekom	2 rekom	2 rekom	2 rekom	2 rekom	Indikator Sasaran PD
	5	Persentase terpenuhinya informasi yang dibutuhkan investor	%	-	-	-	80%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
	6	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan penanaman modal	%	-	0	0	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
	7	Persentase investor yang merealisasikan investasinya	%	-	19,23%	13%	26%	32%	39%	39%	Indikator Program PD
	8	Persentase Pelayanan Perizinan Terselesaikan	%	-	-	80%	85%	90%	95%	95%	Indikator Program PD
	9	Jumlah Perusahaan yang melaporkan LKPM	Perusahaan	-	-	80 perusahaan	100 perusahaan	100 perusahaan	100 perusahaan	100 perusahaan	Indikator Program PD
	10	persentase Jenis Izin Yang Diproses Secara Elektronik	%	-	-	90%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
	11	Persentase peningkatan investasi dikabupaten/ kota	%	-66,15%	-66,17%	-49,33%	1,05%	0,52%	0,52%	0,52%	Lppd
	12	PERDA mengenai pemberian fasilitas/ intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Dokumen	-	RUPM	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	Lppd
	13	Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas insentif penanaman modal	Dokumen	-	RUPM	0	0	1 dokumen	0	1 dokumen	Lppd
	14	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Dokumen	-	RUPM	0	0	0	1 dokumen	1 dokumen	Lppd
	15	Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	Kali	-	0	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	Lppd
	16	Kegiatan pameran penanaman modal	Kali	-	0	0	0	1 kali	1 kali	1 kali	Lppd
	17	Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	Kali	-	0	-	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	Lppd

Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi Kinerja	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	Orang	-	39	267	275	280	285	285	Lppd
19	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	Buah	1999	2035	1500	1600	1700	1800	1800	Lppd
20	Laporan realisasi penanaman modal	M	968,702 M	327,632 M	191 M	193 M	194 M	195 M	195 M	Lppd
21	Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota	Orang	-	5 orang	15 orang	15 orang	15 orang	15 orang	15 orang	Lppd
22	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	Pe rusahaan	-	50 perusahaan	80 perusahaan	100 perusahaan	100 perusahaan	100 perusahaan	100 perusahaan	Lppd
23	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan kabupaten/kota	Buah	-	1 buah	1 buah	1 buah	1 buah	1 buah	1 buah	Lppd
24	Jumlah Nilai Realisasi Investasi	Rp.	-	327.632.796.023	-	-	-	-	327.632.796.023	Indikator Lama
25	Persentase penyelesaian ijin yang diterbitkan tepat waktu	%	-	100%	-	-	-	-	100%	Indikator Lama
26	Persentase pengaduan pelayanan perizinan terselesaikan	%	-	100%	-	-	-	-	100%	Indikator Lama
III	Usuran Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan									
1	Rasio pendapatan pelaku usaha perikanan dengan Biaya Produksi	skor	-	1,1	1,2	1,25	1,3	1,35	1,35	Indikator Sasaran PD
2	Jumlah total produksi perikanan budidaya (ton)	Ton	274,8	275,3	277	280	285	290	290	Indikator Program PD
3	Tingkat Konsumsi Makan Ikan (kg/kapita/tahun)	kg/ kapita/ ta hun	15,4	15,5	15,6	15,7	15,8	15,9	15,9	Indikator Program PD
4	Jumlah total produksi perikanan tangkap (ton)	ton	-	-	-	89	89	89	89	Indikator Program PD
5	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	Ton	357,7 ton	362,9 ton	365	369	375	381	381	Lppd

Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi Kinerja	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan	
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	6	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	RTP	-	435 RTP	435 RTP	435 RTP	435 RTP	435 RTP	435 RTP	Lppd
	7	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	Ada/tidak	-	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	Lppd
	8	Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan	Ada/tidak	-	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	Lppd
	9	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)	orang	-	90 Orang	0	245	250	260	260	Lppd
	10	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang diproduksi	ekor	-	477.406 ekor	477.406 ekor	497,400 ekor	517.400 ekor	537.406 ekor	537.406 ekor	Lppd
	11	Presentase Peningkatan Produksi Perikanan	%	-	-	5%	-	-	-	5%	Indikator Program PD
	12	Persentase peningkatan Pendapatan pelaku usaha perikanan	%	-	1%	-	-	-	-	1%	Indikator Lama
IV		Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata									
	1	Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	8,6	8,7	8,6	8,7	-	-	8,7	Indikator Tujuan PD
	2	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	421.753	351.554	375.000	400.000	425.000	450.000	450.000	Indikator Tujuan PD
	3	Jumlah destinasi wisata daerah yang berwawasan lingkungan	Destinasi	0	1 destinasi	2 destinasi	20 destinasi	25 destinasi	30 destinaai	30 destinaai	Indikator Sasaran PD
	4	Persentase Peningkatan Pelaku Ekonomi Kreatif yang berkualitas	%	-	-	-	10%	10%	10%	10%	Indikator Sasaran PD
	5	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	destinasi	2 destinasi	2 destinasi	2 destinasi	2 destinasi	-	-	2 destinasi	Indikator Program PD

Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi Kinerja	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan	
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	22	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	%	18,68%	18,68%	18,68%	19,00%	19,50%	20%	20%	Lppd
	23	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	tempat	0	0	3	3	3	3	3	Lppd
	24	Pertumbuhan Sektor Pariwisata	%	-	8,60%	-	-	-	-	8,60%	Indikator Lama
	25	Persentase Peningkatan Promosi yang dilaksanakan	%	-	2	-	-	-	-	2	Indikator Lama
	V	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian									
	1	Peningkatan produktivitas pertanian (ton/ha)	Ton/ ha	7,21 ton/Ha	6,9 ton/ha	7,21 ton/Ha	7,22 ton/Ha	-	-	7,22 ton/Ha	Indikator Sasaran PD
	2	Rasio Pendapatan Pelaku Usaha Peternakan dengan biaya produksi	skor	1,205	1,206	1,21	1,214	1,216	1,221	1,221	Indikator Sasaran PD
	3	Rasio Pendapatan Petani dengan Biaya Produksi	rasio	-	1,1	1,1	1,12	1,14	1,16	1,16	Indikator Sasaran PD
	4	Efektifitas Sarana Pertanian (%)	%	-	-	50	55	60	65	65	Indikator Program PD
	5	persentase Pengembangan Prasarana yang Berfungsi dengan baik (%)	%	-	-	50	50	75	100	100	Indikator Program PD
	6	Persentase Jumlah Hewan dan Produk asal Hewan yang Terawasi (%)	%	-	-	75%	75%			75%	Indikator Program PD
	7	persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Jumlah Menular (%)	%	-	50,86	10	10	10	10	10	Indikator Program PD
	8	persentase Lahan Aman Bencana Pertanian (%)	%	-	-	70	72	74	76	76	Indikator Program PD
	9	persentase kelompok tani yang memiliki Izin Usaha Pertanian (%)	%	-	-		10	12	15	15	Indikator Program PD
	10	persentase Jumlah SDM Pertanian Terlatih (%)	%	-	-	15	20	20	20	20	Indikator Program PD
	11	Produktivitas pertanian per hektar per tahun				Nilai sama dengan indikator no.1				Lppd	

Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi Kinerja	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan	
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	12	Sarana pertanian yang diberikan	Jenis	-	13 jenis	1	2	2	2	7	Lppd
	13	Prasarana pertanian yang digunakan	Jenis	-	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	Lppd
	14	Penerbitan izin usaha pertanian	Kali	-	-	0	2	2	2	2	Lppd
	15	Persentase prasarana yang digunakan	%	-	66.7%	75	75	75	75	75	Lppd
	16	Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian dikab/kota	%	-	-	-	50	50	50	50	Lppd
	17	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana (%)	%	-	50,86	50	50	50	50	50	Lppd
	18	Persentase Peningkatan Pendapatan Pelaku Usaha Peternakan	%	-	2%	-	-	-	-	2%	Indikator Lama
	19	Nilai Tukar Usaha Pertanian, Peternakan dan Perikanan	%	-	1,389	-	-	-	-	1,389	Indikator Lama
VI		Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan									
	1	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	%	5,82	-10,83	2,16	2,44	2,91	3,16	3,16	Lanjutan Indikator Sasaran Kota
	2	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Jasa	%	-	-0,93	0,58	0,76	0,84	1,02	1,02	Indikator Sasaran Kota
	3	Persentase Peningkatan Nilai PDRB Sektor Perdagangan	%	23,56	24,05	24,05	24,05	-	-	24,05	Indikator Tujuan PD
	5	Persentase Nilai Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB		-	-	-	24,05	24,05	24,05	24,05	Indikator Tujuan PD

Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi Kinerja	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan	
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	39	Persentase Pertumbuhan Perdagangan Non Pasar Rakyat	%	-	1,76	-	-	-	-	1,76	Indikator Lama
	40	Jumlah Omset Pasar Rakyat	Rp.	-	3.106.554.387.840	-	-	-	-	3.106.554.387.840	Indikator Lama
	41	Jumlah Barang Kena Cukai Ilegal		-	0	-	-	-	-	0	Indikator Lama
VII		Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian									
	1	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri	%	-	-12,84	7,30%	7,35%	-	-	7,35%	Indikator Tujuan PD
	2	persentase IKM yang berstandarisasi	%	-	-	40%	42%	44%	45%	45%	Indikator Tujuan PD
	3	persentase pertumbuhan industri	%	0%	0%	0,03%	0,03%	-	-	0,03%	Indikator Sasaran PD
	4	persentase komoditi makanan dan minuman yang memenuhi standarisasi	%	-	-	70%	75%	80%	85%	85%	Indikator Sasaran PD
	5	persentase pengajuan rekomendasi permodalan yang disetujui	%	-	-	90%	90%	90%	90%	90%	Indikator Sasaran PD
	6	persentase pengajuan perijinan NIB yang direkomendasi	%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
	7	persentase peningkatan IKM terpublikasikan	%	-	-	9%	10%	10%	10%	10%	Indikator Sasaran PD
	8	persentase Tersedianya Dokumen Induk Perindustrian	%	-	-	100%	100%	-	-	100%	Indikator Program PD
	9	persentase IKM yang mengikuti publikasi produk	%	-	-	12,80%	12,80%	-	-	12,80%	Indikator Program PD
	10	Persentase IKM yang mengikuti publikasi produk	%	-	-	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	Indikator Program PD
	11	persentase IKM yang mutu produk dan kapasitasnya meningkat	%	-	-	2,5%	5%	5%	5%	5%	Indikator Program PD
	12	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	%	-	0%	0,02%	0,02%	0,02%	0,03%	0,03%	Lppd

Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi Kinerja	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan	
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	21	Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri kecil dan menengah yang diterbitkan	%	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Lppd
	22	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/ kota yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota	%	-	1,28%	1%	1%	1,20%	1,20%	1,20%	Lppd
	23	Pertumbuhan Sektor Pengolahan	%	-	-12,84	-	-	-	-	-12,84	Indikator Lama
	24	Persentase IKM yang Berstandart	%	-	17,09	-	-	-	-	17,09	Indikator Lama
	25	persentase IKM yang melaksanakan GMP (Good Manufacturing Practice)	%	-	80	-	-	-	-	80	Indikator Lama
B		Fasilitas Wilayah Infrastruktur									
	1	Livable City (Indeks Kenyamanan Kota)	Indeks	85,32	86,67	87,78	88,19	88,60	89,01	89,01	Indikator Tujuan Kota
I		Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
	1	Indeks Infrastruktur	Indeks	96,72	96,85	98,06	98,25	98,42	98,59	98,59	Lanjutan Indikator Sasaran Kota dan Indikator Tujuan PD
	2	Persentase kawasan bebas banjir/genangan	%	-	-	79,84%	80,89%	81,58%	82,82%	82,82%	Indikator Sasaran PD
	3	Persentase bangunan gedung sesuai dengan ketentuan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran dan Indikator Program PD
	4	Persentase Ketaatan Pemanfaatan ruang sesuai RTRW	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
	5	Persentase Rumah tangga yang melayani kebutuhan air minum	%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD

Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi Kinerja	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja		-	0	0	0	0	0	0	Lppd
51	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	%	-	98%	98%	98%	98%	98%	98%	Lppd
52	Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting	Buah	-	400	410	415	420	425	425	Lppd
53	Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/ Gedung (ada/tidak)	Ada/tidak	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Lppd
54	Penetapan Keputusan Bupati/ Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/ Gedung (Ada/tidak)	Ada/tidak	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Lppd
55	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	unit	-	20 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit	Lppd
56	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah	unit	-	20 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit	Lppd
57	Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota	unit	-	230	230	230	230	230	230	Lppd
58	Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/ dirawat	unit	-	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	Lppd
59	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan Kepala Daerah dalam SK Jalan Kewenangan Kab/Kota	km	-	433,095 Km	433,095 Km	433,095 Km	433,095 Km	433,095 Km	433,095 Km	Lppd
60	Panjang jalan yang dibangun	km	-	0,654 Km	0,5 km	0,45 km	0,45 km	0,4 km	0,4 km	Lppd
61	Panjang jembatan yang dibangun	m	-	0	18 m	20 m	20 m	10 m	10 m	Lppd

Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi Kinerja	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan	
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	90		Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	-	50	50	50	50	50	50	Lppd
	91		Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	-	0	0	0	0	0	0	Lppd
	92	%	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	-	100	100	100	100	100	100	Lppd
	93	%	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100	100	100	100	100	100	100	SPM
	94	%	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	-	90	90	90	90	90	90	SPM
	95	%	Persentase Ruang yang dimanfaatkan RTRW	100	100	-	-	-	-	100	Indikator Lama
	96	%	Persentase Panjang Jalan Kota dalam Kondisi Baik	92,41	94.03%	-	-	-	-	94.03%	Indikator Lama
	97	titik	Jumlah Titik/ Lokasi Banjir/ Tergenang	-	12 titik	-	-	-	-	12 titik	Indikator Lama
II			Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman								
	1	Indeks	Indeks Sarana Prasarana Permukiman	85,69	87,12	89,13	90,14	91,17	92,19	92,19	Sebelumnya Indikator Sasaran Kota Menjadi Indikator Tujuan PD
	2	Indeks	Indeks Perumahan Permukiman	99,65	99,65	99,60	99,68	99,80	99,90	99,90	Lanjutan Indikator Sasaran PD
	3	Indeks	Indeks Pengelolaan PSU, RTH, PJU dan Permukiman	71,74	74,59	76,34	78,48	80,62	82,76	82,76	Lanjutan Indikator Sasaran PD

Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi Kinerja	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan	
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	18		Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	0	0	0	0	0	0	0	lppd
	19		Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	0	0	0	0	0	0	0	lppd
	20		Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	0	0	0	0	0	0	lppd
	21		Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	0	0	0	0	0	0	lppd
	22		Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	0	0	0	0	0	0	lppd
	23	KK	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	65 KK	65 KK	105 KK	105 KK	105 KK	105 KK	lppd
	24		Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	0	0	0	0	0	0	lppd
	25		Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	0	0	0	0	0	0	0	lppd
	26	Ha	Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	0 ha	52,41 ha	40,41 ha	28,41 ha	16,41 ha	0 ha	0 ha	lppd
	27	Unit	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	129 unit	115 unit	133 unit	60 unit	100 unit	100 unit	637 unit	lppd
	28	ha	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	0 ha	12,08 ha	10,08 ha	12,08 ha	12,08 ha	0 ha	0 ha	lppd

Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi Kinerja	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan	
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	29	Jumlah rumah di kab/kota	unit	42329	42329	42329	42329	42329	42329	42329	lppd
	30	Jumlah unit PK RTLH	unit	129 unit	115 unit	133 unit	60 unit	100 unit	100 unit	637 unit	lppd
	31	Jumlah rumah tidak layak huni	unit	20 unit	21 unit	133 unit	60 unit	60 unit	60 unit	60 unit	lppd
	32	Jumlah rumah yang tidak dihuni	unit	0	1438 unit	1438 unit	1438 unit	1438 unit	1438 unit	1438 unit	lppd
	33	Rasio rumah dan KK	%	-	171,87%	171,87%	171,87%	171,87%	171,87%	171,87%	lppd
	34	Jumlah rumah pembangunan baru	unit	-	133	50	50	50	50	333	lppd
	35	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	unit	37	38	38	38	38	38	38	lppd
	36	Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	unit	-	5948 unit	5948 unit	5948 unit	5948 unit	5948 unit	5948 unit	lppd
	37	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	unit	-	5948 unit	5948 unit	5948 unit	5948 unit	5948 unit	5948 unit	lppd
	38	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)	unit	-	5948 unit	5948 unit	5948 unit	5948 unit	5948 unit	5948 unit	lppd
	39	Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	unit	-	5948 unit	5948 unit	5948 unit	5948 unit	5948 unit	5948 unit	lppd
	40	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	Unit	-	5948 unit	5948 unit	5948 unit	5948 unit	5948 unit	5948 unit	lppd
	41	Jumlah pengembang yang tersertifikasi	orang	37	38	38	38	38	38	38	lppd
	42	Jumlah pengembang yang terregistrasi	Orang	37	38	38	38	38	38	38	lppd
	43	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	orang	37	38	38	38	38	38	38	lppd
	44	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Spm
	45	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	spm
	46	Persentase Rumah tinggal Layak Huni dan Bersanitasi	%	99,95	99,95	-	-	-	-	99,95	Indikator Lama
	47	Persentase RTH, Penerangan Jalan dan Pemakaman yang dikelola	%	-	74,59	-	-	-	-	74,59	Indikator Lama

Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi Kinerja	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan	
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee.										
	13	Dokumen Izin membuka tanah	0	0	0	0	0	0	0	Lppd	
	14	Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	0	0	Lppd	
	15	Persentase Rekomendasi Ijin Pertanahan yang diterbitkan	%	-	100	-	-	-	-	100	Indikator Lama
	IV	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup									
	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	-	60,15	57,69	57,77	57,85	57,93	57,93	Lanjutan indikator Sasaran Kota dan Indikator Tujuan PD
	2	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	-	51,28	51,29	51,3	51,31	51,32	51,32	Indikator sasaran PD
	3	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	-	83,26	82,73	82,90	83,09	83,26	83,26	Indikator sasaran PD
	4	persentase pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	%	94,00%	97,01%	98,00%	98,50%	99,00%	99,00%	99%	Indikator sasaran PD
	5	persentase data Perencanaan LH yang tersedia	%	61,54%	64,10%	69,23%	71,79%	79,49%	79,50%	79,50%	Indikator Program PD
	6	persentase titik sampel kualitas air dan udara yang memenuhi baku mutu	%	44,89%	53,19%	48%	49%	50%	50,10%	50,10%	Indikator Program PD
	7	persentase jumlah spesies KEHATI Lokal Daerah	%	-	-	-	94,32%	97,20%	100%	100%	Indikator Program PD
	8	persentase pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun(limbah B3)	%	-	70,96	71	71,5	75%	78%	78%	Indikator Program PD
	9	persentase pelaku usaha / kegiatan yang taat terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	%	40%	44,59%	52,90%	64,70%	76,47%	88,20%	88,20%	Indikator Program PD
	10	persentase Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	%	-	100%	90%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD

Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi Kinerja	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan	
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	8	Terlaksananya pelayanan uji berkala	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
	9	Penetapan tarif fangkutan orang antar kota dalam kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
	10	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
	11	Kepadatan Lalu Lintas	%	36,93%	33%	-	-	-	-	33%	Indikator Lama
	12	Persentase Perlengkapan jalan	%	64%	67%	-	-	-	-	67%	Indikator Lama

BAB IX

PENUTUP

9.1 Pedoman Transisi

Penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Kota Madiun 2019-2024 berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 tahun 2017. RPJMD Kota Madiun Periode 2019-2024 merupakan Tahap IV (empat) dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Madiun Tahun 2005-2025. Kedudukan RPJMD dalam RPJPD sangat penting untuk menjaga kesinambungan dari suatu periode 5 (lima) tahun pemerintahan ke periode 5 (lima) tahun berikutnya. RPJPD tahun 2005-2025 dilaksanakan dalam empat tahapan RPJMD, yang masing-masing tahapan telah pula memuat rumusan indikatif arahan prioritas kebijakan. Kedudukan RPJMD 2019-2024 Kota Madiun juga merupakan pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Madiun setiap tahunnya. P-RPJMD juga merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (P-Renstra-PD) dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota Madiun terpilih Tahun 2019-2024 akan berakhir pada tanggal 29 April 2024. Sementara itu, dokumen RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024 akan berakhir pada akhir bulan Desember 2024. Oleh karena itu, untuk menjamin adanya kesinambungan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan memastikan, bahwa pada akhir periodesasi dari dokumen RPJMD ini tidak akan terjadi kekosongan regulasi, maka ditetapkan antara lain sebagai berikut :

1. Walikota dan Wakil Walikota Madiun terpilih Tahun 2019-2024 dapat terus melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai program dan kegiatan yang telah tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2021;
2. Sambil menunggu penetapan Peraturan Daerah Kota Madiun Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun Tahun 2019-2024, maka penyusunan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Madiun Tahun 2022 berpedoman pada rancangan awal P-RPJMD 2019 – 2024 dan memperhatikan RKP Tahun 2022 dan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2022;

3. Tahun pertama dari P-RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024, yaitu Tahun 2021 dan seterusnya untuk selama 5 (lima) tahun.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

9.2 Kaidah Pelaksanaan

Perubahan RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024 dijadikan sebagai landasan oleh Pemerintah Kota Madiun dan seluruh pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan yang akan dituangkan kedalam dokumen rencana pembangunan tahunan kota Madiun untuk selama 5 (lima) tahun mulai Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2024, termasuk dalam penyusunan perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (P-Renstra PD) Tahun 2019-2024 dan Rencana Kerja tahunan Perangkat Daerah (Renja PD) untuk selama 5 (lima) tahun kedepan.

Berkaitan dengan itu, maka dalam dokumen RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024 perlu dirumuskan beberapa kebijakan tentang kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Madiun dan seluruh pemangku kepentingan seperti masyarakat umum, dunia usaha, para akademis dan seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kota Madiun, berkewajiban untuk melaksanakan seluruh program dan kegiatan sesuai yang telah ditetapkan dalam dokumen P-RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024 dengan penuh tanggung jawab;
2. Walikota dan Wakil Walikota Madiun, dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan agar dalam implementasinya selaras dan bersinergi dengan dokumen P-RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024;
3. Untuk menjamin agar target capaian setiap program dapat dicapai secara optimal, maka sesuai kewenangannya Sekretaris Daerah Kota Madiun berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan P-RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024;

4. Seluruh Perangkat Daerah (PD) Kota Madiun berkewajiban untuk menjabarkan P-RPJMD kedalam dokumen P-Renstra PD dan Renja PD;
5. Dalam upaya menjamin efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan P-RPJMD Kota Madiun tahun 2019-2024, maka Bappeda Kota Madiun berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh PD dalam perumusan rencana pembangunan daerah;
6. Sesuai Pasal 43 dan 46 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan dan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Walikota wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap setiap dokumen rencana (Renstra dan Renja PD) yang disusun oleh seluruh PD;
7. Dalam hal dokumen RKPD Kota Madiun Tahun 2022 ditetapkan lebih awal dari dokumen P-RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024, maka apabila terdapat ketidakselarasan dan keserasian dengan RPJMD, dokumen RKPD dimaksud perlu disempurnakan sesuai dokumen RPJMD ini.

WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. MAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
Sekretaris Daerah
u.b.
Kepala Bagian Hukum



BUDI WIBOWO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19750117 199602 1 001